



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022**

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR DAN PEMULIHAN EKONOMI
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap tahunnya Pemerintah Daerah wajib menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan disusun dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 82);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 adalah merupakan hasil penjarangan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 3

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2022 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

- (1). RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 8 (Delapan) Bab, yaitu:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2). RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 30 Juni 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 30 Juni 2021

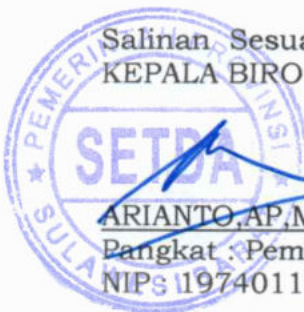
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ARIANTO, AP, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIPs 19740112 199311 1 001



GUBERNUR SULAWESI BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Proses penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, yang memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022. Penetapan RKPD Tahun 2022 ini sebagai komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan dalam mewujudkan visi RPJMD 2017-2022 yaitu "**Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq**".

Berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama ini adalah wujud dari komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dan segenap komponen masyarakat Sulawesi Barat. Namun demikian, kerja keras harus tetap dilakukan agar hasil yang telah tercapai sesuai target dapat terus ditingkatkan. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang capaiannya masih belum sesuai dengan rencana, memerlukan upaya lebih keras lagi sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penetapan RKPD Tahun 2022 ini. Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Sulawesi Barat ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT.

Mamuju, 30 Juni 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I - 6
1.4. Maksud dan Tujuan	I - 7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I - 7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 191
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	II - 193
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 14
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 2
4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022	IV - 5
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V - 1
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI - 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..	VII - 1
7.1. Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.....	VII - 1
7.2. Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VII - 2
BAB VIII PENUTUP	VIII - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, Program Prioritas Provinsi dan Pedoman Penyusunan RKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD ini memuat arah kebijakan dan program pembangunan yang disesuaikan dengan target dan pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, yaitu **“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq”**. Selain arah kebijakan dan program pembangunan, dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 juga memuat secara makro tentang kondisi umum daerah dan berbagai permasalahan yang ada dan akan dihadapi. Sebagaimana ketentuan Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
- c. Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
- d. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
- k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Penyusunan RKPD Tahun 2022, dilakukan dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa sistem perencanaan

pembangunan nasional merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat. Proses interaksi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengenai beberapa pendekatan dalam rangkaian tersebut, yaitu politik, teknokratis, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tentunya masih dihadapkan dengan tantangan penanganan virus Covid-19. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penyebaran Covid-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia yang mana sampai saat ini masih terdapat indikasi penyebaran pandemi Covid-19 yang belum juga menurun, bahkan ada timbul varian baru. Sehingga dapat diprediksi pandemi Covid-19 ini masih ada di Indonesia dan diperkirakan akan terkendali pada tahun 2022, apabila vaksin tersebut telah tersedia dan sudah terdistribusi kepada sebagian masyarakat Indonesia serta dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai terlepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun yang sangat penting bagi pemulihan ekonomi.

Selain itu, di awal Tahun 2021 ini Provinsi Sulawesi Barat kembali dihadapkan dengan bencana alam gempa bumi yang melanda 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene dengan magnitudo berkekuatan sebesar 6,2SR pada tanggal 15 Januari 2021 yang lalu. Bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa sebanyak 107 orang meninggal dunia dan 3.369 orang mengalami luka-luka tersebut, juga berdampak pada kerusakan berbagai infrastruktur baik gedung pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, jalan dan jembatan, sarana perhubungan, sarana kelistrikan, air minum dan informatika dan perumahan permukiman, serta pusat-pusat perbelanjaan.

Oleh karena itu, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ini menjadi sangat strategis dalam perencanaan pembangunan di daerah. Khususnya dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan penanganan pasca bencana gempa bumi. Selain itu RKPD Tahun 2022 ini juga menjadi bagian terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2017–2022, yang menuntut untuk dilakukannya percepatan dalam pencapaian target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 21);
29. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari periode RPJMD 2017–2022 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022.

Keterkaitannya dengan RKP dan program strategis nasional, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan antar provinsi yang berbatasan serta prioritas pembangunan nasional.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Tahun 2022, dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui penetapan prioritas, sasaran dan target, serta program prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022. Selain itu, RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Provinsi Tahun 2022, pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota Tahun 2022, serta pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Tahun 2022.

sebagai salah satu instrumen tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan menjadi pe

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (4) Maksud dan Tujuan, serta (5) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat (1) Kondisi Umum Daerah menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, hal ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari renja, renstra dan atau dari laporan pertanggungjawaban APBD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan

daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan nasional bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional), serta kebijakan bidang ekonomi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat; (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017–2022 yang menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan, (2) Prioritas Pembangunan Tahun 2022, menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA, mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP, memuat kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Barat berada di sebelah barat pulau Sulawesi yang terletak pada posisi geografis 0°12' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°43'15" - 119°54'3" Bujur Timur (Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka). Luas wilayah Sulawesi Barat adalah berupa daratan seluas 16.787,18 km² sedangkan luas wilayah laut sebesar 20.851,00 km² dengan panjang garis pantai sebesar 677 km serta jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 69, dimana terdiri atas 69 Kecamatan, 575 Desa dan 75 Kelurahan. Adapun batas Administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, dimana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2°8'7" - 2°57'50" LS dan 117°3'57" - 119°51'17" BT.
2. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2°38'45" - 3°38'15" LS dan 118°45'00" - 119°4'45" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
3. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 3°4'10" - 3°32'00" LS dan 118°40'27" - 119°29'41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
4. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2°39'216" - 3°19'288" LS dan 119°0'216" - 119°38'144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.

5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 0°40'10" - 1°50'12" LS dan 119°25'26" - 119°50'20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.
6. Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 1°43'33" - 2°18'54" LS dan 119°07'35" - 119°52'18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Prov. Sulawesi Barat

NO	KABUPATEN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
1.	Majene	947,84	5,65
2.	Polewali Mandar	1 775,65	10,58
3.	Mamasa	3 005,88	17,91
4.	Mamuju	4 999,69	29,78
5.	Pasangkayu	3 043,75	18,13
6.	Mamuju Tengah	3 014,37	17,96
TOTAL (SULAWESI BARAT)		16 787,18	100,00

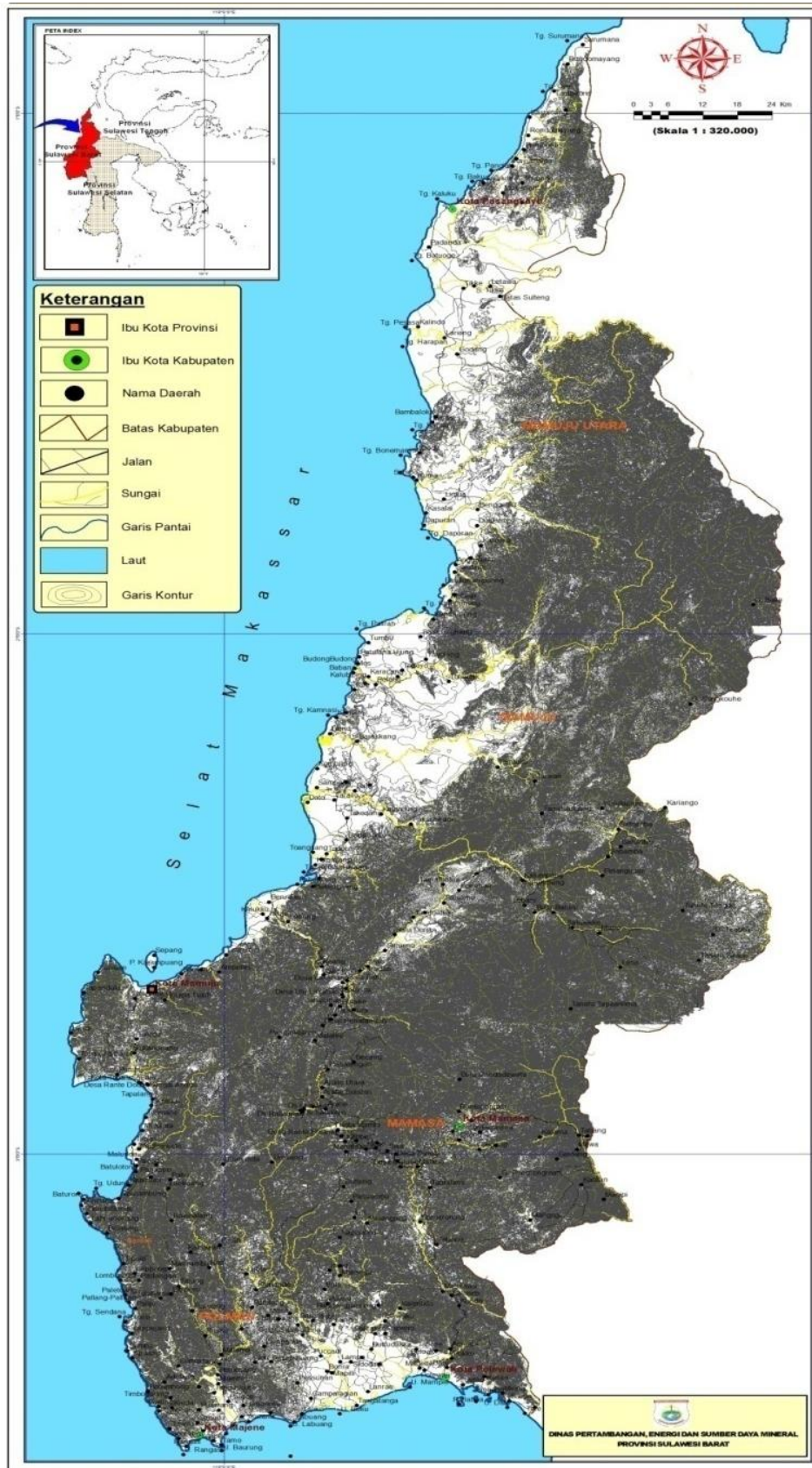
Sumber: Permendagri 56 Tahun 2015

Kabupaten dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mamuju dengan luas 4.999,69 Km² atau sekitar 29,78 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan kabupaten dengan luas wilayah terkecil yaitu Kabupaten Majene dengan luas sekitar 947,84 km² atau hanya sebesar 5,65 persen terhadap luas Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:

2.1.1.2 Topografi

RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

Tabel 2.2 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian Gunung (meter)
Majene	11	Seteng	1 001
Polewali Mandar	28	Tetuho	1 448
Mamasa	31	Mambulilling	2 873
Mamuju	109	Gandang Dewata	3 037
Pasangkayu	14	Pandabatu	284

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2015

2.1.1.3 Geologi

Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuartar. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasang kayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wilayah Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasang kayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.

Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu

gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunungapi Talaya. Batuan Gunungapi Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal.

Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasang kayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batupasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidak selarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosen dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

Batuan Gunung api Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batupasir gampingan, napal tufaan dan batugamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batugamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batupasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal.

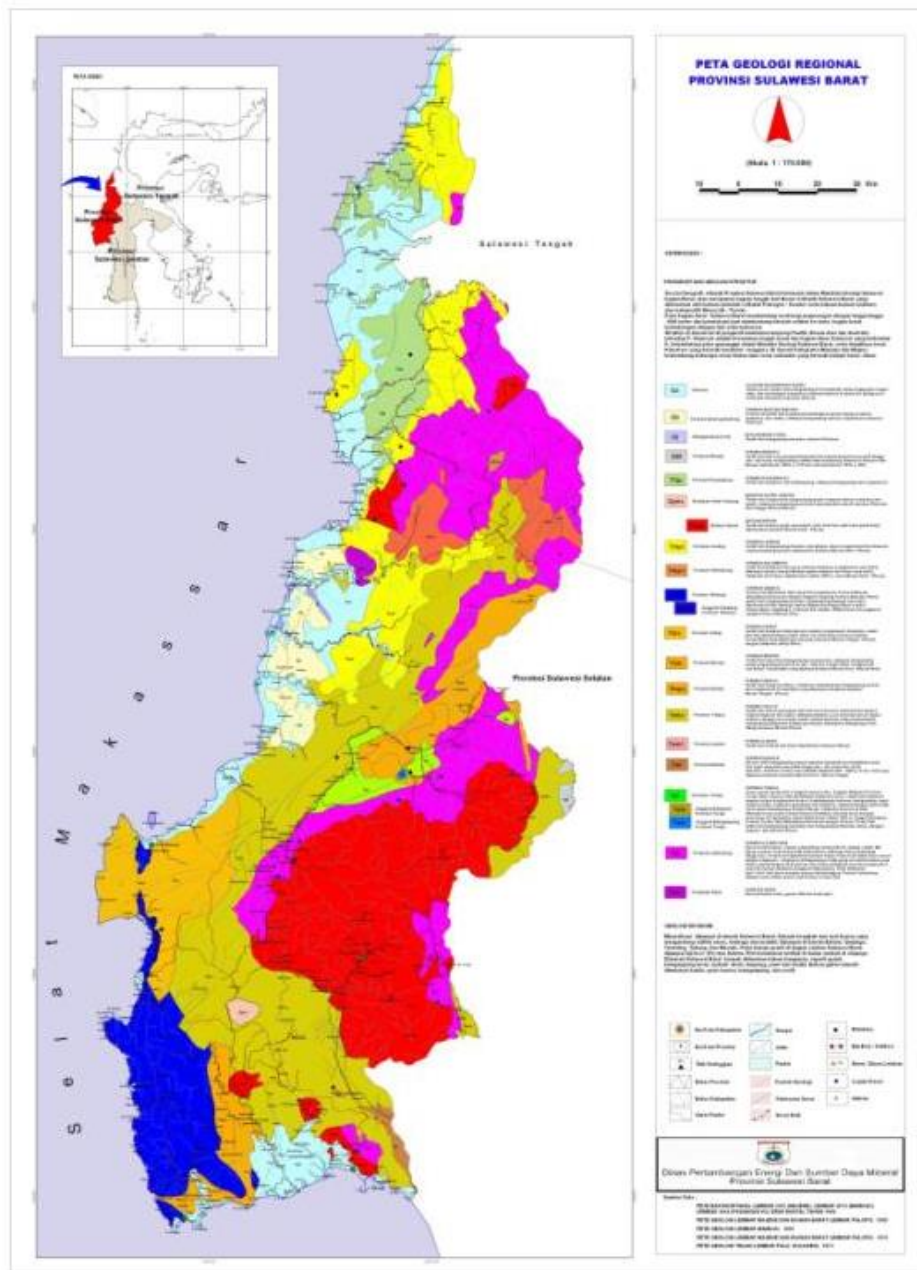
Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Kearah tenggara wilayah Mamasa, batuanannya didominasi oleh batuan epiklastik gunungapi Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batupasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmvp) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen.

Diwilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi barat pada umumnya di susun oleh endapan sedimenter dimana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budongbudong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batupasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batupasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah – Pliosen.

Proses tertonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tetonik yang berbeda juga menyebabkan perlipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan plynch Formasi Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas. Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dan diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu:

- a. Foldbelt aktif dimana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke selat Makassar
- b. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basemen, paparan karbonat dan batuan sedimen klasti yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
- c. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen.

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara, batupasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Diatas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batugamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan.

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Diatas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut dimana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistesen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesis ke arah timur.

2.1.1.4 Hidrologi

Sejumlah sungai yang tergolong besar mengalir wilayah Sulawesi Barat, dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta

Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing-masing sekitar 150 km.

Tabel 2.3 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat

Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi
Saddang	150	Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
Matakali	28	Polewali Mandar
Mambi	95	Polewali Mandar
Mandar	90	Polewali Mandar
Manyamba	28	Majene
Malunda	38	Majene
Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar
Karama	150	Mamuju

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2015

Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar. Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumberdaya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Tabel 2.4 Kebijakan pengelolaan DAS-DAS utama di Sulawesi Barat

Nama DAS atau Kelompok DAS	Luas DAS (ha)	Areal kritis (ha)	Ekstensi kekritisian (% areal)	Frekuensi banjir di hilir	Fungsi dan peran DAS								Arahan kebijakan		
					PLTA (MW)	Irigasi	Air baku	Pert. & perkeb.	Wallacea Ecoregion	Ecotourism	Keragaman ekosistem	Stabilisasi ekosistem	Konser-vasi	Preser-vasi	Urutan prioritas
Budong-Budong/Topoyo	326.579	65.756	20,1	Tinggi, pengaruhi jalan negara	124	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Karama	344.899	84.659	24,5	Tinggi	115++	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Karossa/Benggawu	151.395	10.024	6,6	Sedang	✓	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	II
Lariang/Pasangkayu	167.587	11.688	7,0	Sedang	✓	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	II
Malunda	67.767	1.549	2,3	Sedang	✗	✗	Kecil	Sedang	Penting	Potensial	Sedang	Penting		✓	III
Mamasa	89.106	13.872	15,6	Wil.hulu DAS	✓	✗	Besar	Sedang	Penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓		II
Mamuju	149.487	67.067	44,9	Sedang	✗	✗	Besar	Sedang	Sgt penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Mandar	93.462	36.656	39,2	Sedang	✗	✗	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Sedang	Penting	✓		III
Mapilli	229.644	77.983	34,0	Tinggi	174	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Saddang (hulu)	71.856	19.448	27,1	Wil.hulu DAS	✗	✓	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Tinggi	Sgt penting	✓		III
Total	1.691.780	388.702	23,0												

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah Mamuju sebesar 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2 persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1 persen. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 ha, juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54 persen dari total wilayah DAS Karama. Adapun data kekritisian Daerah-daerah Aliran Sungai di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Kondisi Kekritisian DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat

DAS	Tdk Kritis (ha)	% DAS	Kritis (ha)	% DAS	Total DAS (ha)	Persen (%)
DAS Budong-Budong	260 823	80	65 756	20	326 579	19,3
DAS Karama	260 240	75	84 659	25	344 899	20,4
DAS Karossa	141 362	93	10 024	7	151 386	8,9
DAS Lariang	155 897	93	11 688	7	167 585	9,9
DAS Malunda	66 218	98	1 549	2	67 767	4,0
DAS Mamasa	75 234	84	13 872	16	89 106	5,3
DAS Mamuju	82 415	55	67 066	45	149 481	8,8
DAS Mandar	56 772	61	36 656	39	93 428	5,5
DAS Mapilli	151 659	66	77 983	34	229 643	13,6
DAS Saddang	52 401	73	19 448	27	71 850	4,2
Grand Total	1 303 022	77	388 701	23	1 691 723	100,0

Sumber: Materi Teknis RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

Pengembangan DAS kedepan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan prioritas yang mengacu pada pengendalian lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, Penghijauan, Pembinaan pertanian berbasis konservasi, penggalangan partisipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Perlindungan terhadap aktifitas pengrusakan hutan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktifitas penebangan liar, Pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau instansi yang akan mengelola kawasan hutan. DAS DAS yang perlu mendapat prioritas adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa dan Mapilli yang memiliki tingkat kekritisan yang besar.

2.1.1.5 Klimatologi

Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap siklus hidrologi, sumberdaya tanah, air dan tanaman. Umumnya, ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi, seringkali terjadi pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah dari horison atas ke horison tanah di bawahnya.

Iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang memiliki pinggiran pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Pada tahun 2020 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 20,60°C hingga 35°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 28,1°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 46,00 persen sampai dengan 100 persen. Pemantauan suhu udara di Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami banyak perubahan, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. Luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 1.069.989 Ha, Rincian luas kawasan hutan pada masing-masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun SK 2019 (hektar)

Kabupaten	Hutan Lindung	Hutan Produksi			Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Total Luas Hutan
		Terbatas	Permanent	Dapat Dikonversi		
Majene	45 052	7 627	-	-	-	52 679
Polewali Mandar	65 814	23 036	-	-	986	89 836
Mamasa	90 151	49 539	-	368	63 261	203 319
Mamuju	128 691	85 242	41 027	10 851	71 883	337 694
Pasangkayu	99 530	54 603	2 264	8 988	612	165 997
Mamuju Tengah	26 795	111 202	27 639	1 224	53 604	220 464
Sulawesi Barat	456 033	331 249	70 930	21 431	190 346	1 069 989

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

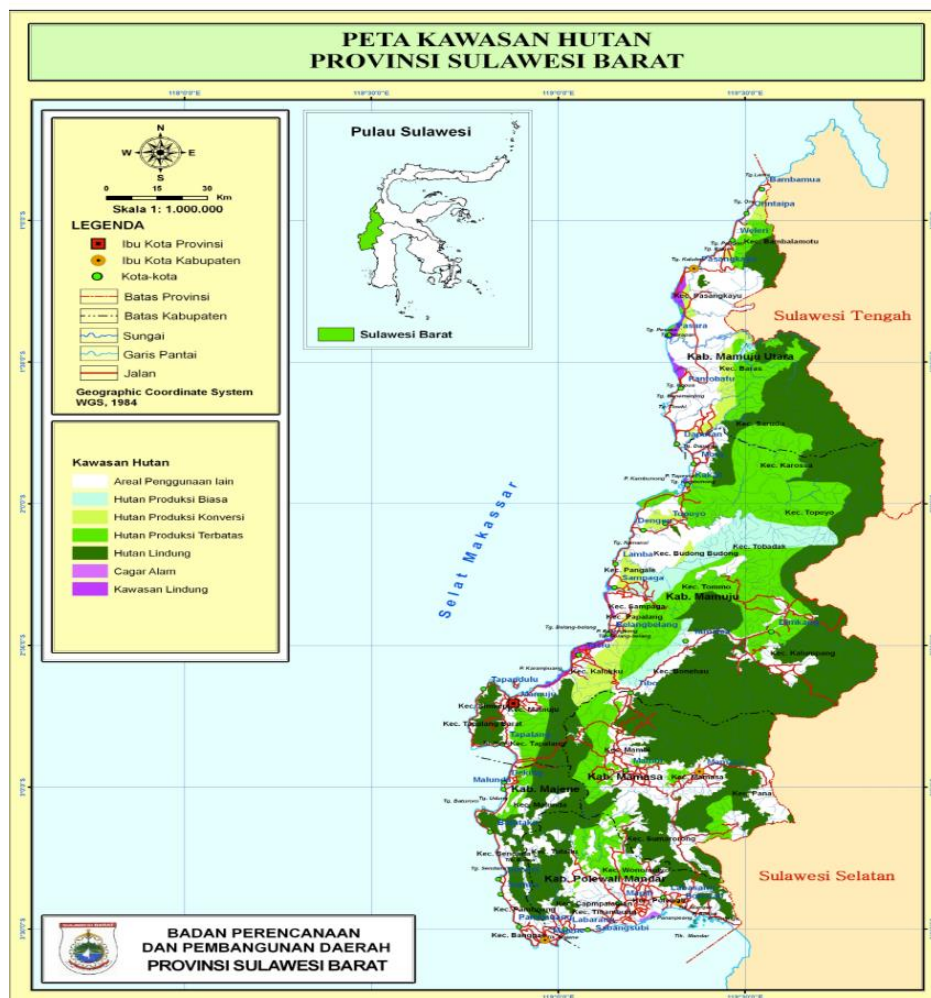
a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (2014-2034) seluas 665.763,85 Ha, meliputi:

1. Kawasan Hutan Lindung

Luas Kawasan Hutan Lindung di Sulawesi Barat sebesar 450.639,13 (RTRW Prov. Sulbar 2014-2034) yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung Nasional merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Gambar 2.5 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju, Hutan Lindung Mamuju Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung Majene, Hutan Lindung Polewali Mandar, Hutan Lindung Mamasa. Kawasan Perlindungan setempat dengan arah pemanfaatan ruang meliputi sempadan pantai sepanjang kurang lebih 781 km di beberapa kabupaten, kawasan pantai berhutan bakau primer, sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter serta kawasan sekitar DAM.

2. Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya.
Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang di RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Ganda Dewata, Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA), Taman wisata alam laut Balabalakang, Taman wisata Goa alam.

3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- a) Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju; Kabupaten Mamuju Tengah; Kabupaten Polewali Mandar); Kabupaten Pasangkayu; Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Polewali Mandar;
- b) Tsunami di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
- c) Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa dan Polewali Mandar;
- d) Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju; Mamuju Tengah, Majene dan Polewali Mandar;
- e) Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah; Mamuju, Majene dan Polewali Mandar;
- f) Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis provinsi yang dapat dikembangkan. Dimana kawasan budidaya Provinsi meliputi : Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman, dan; Kawasan peruntukan lainnya.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun tahun 2018 relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Tabel 2.7 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Kabupaten	Angin Puting Beliung	Banjir	Gempa Bumi	Tsunami	Gempa Bumi dan Tsunami	Letusan Gunung Api	Tanah Longsor
Majene	-	-	-	-	-	-	-
Polewali Mandar	2	2	-	-	-	-	1
Mamasa	-	2	-	-	-	-	-
Mamuju	-	-	-	-	-	-	-
Pasangkayu	-	1	-	-	-	-	1
Mamuju Tengah	1	-	1	-	-	-	-
Sulawesi Barat	3	5	-	-	-	-	2

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Wilayah rawan bencana sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Simkep, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Limboro, Balanipa, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali).
- b. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Balabalakang, Simkep, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
- c. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simkep, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar (Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulu).

- d. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).
- e. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budongbudong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simkep, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
- f. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene

Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka sepuluh tahun (Tahun 2014 – 2024) atau dua puluh tahun mendatang (Tahun 2014 – 2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan (misalnya) berupa :

- 1) Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir;
- 2) Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur);
- 3) Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan sumberdaya manusia.

Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-Budong, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi, Tappalang, Mamuju, Kalukku, Singkep, Bonehau, Belang-Belang, Papalang, Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama

pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS Saddang.

Curah hujan yang tinggi di Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup dominan, tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan sumberdaya lahan yang ada, kawasan tertentu di Sulawesi Barat tergolong rentan terhadap longsor. potensi kekritisian, erosi dan longsor di Sulawesi Barat dirinci berdasarkan DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan longsor yang luas. Karena itu, sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini, prasarana pengamanan dan evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana longsor.

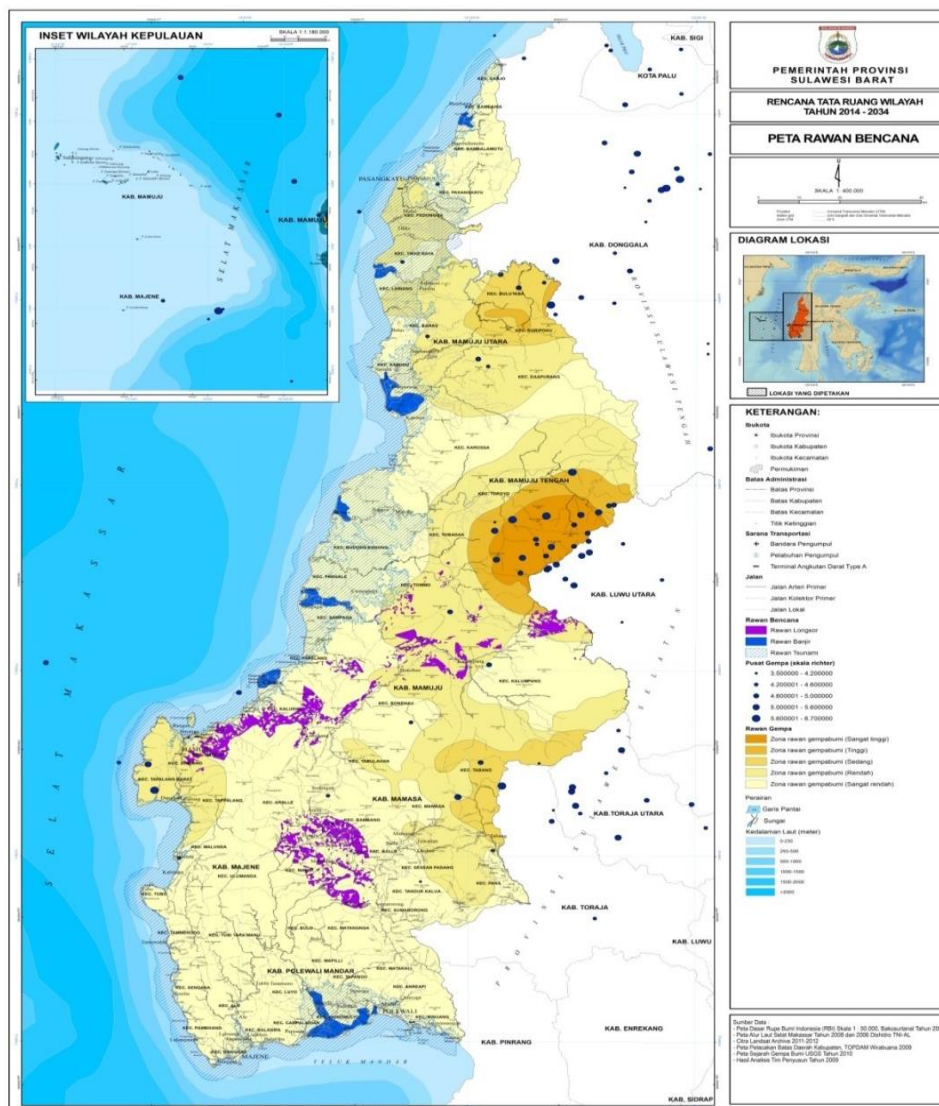
Tabel 2.8 Arahan kebijakan pengendalian DAS dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat

Nama DAS atau Kelompok DAS	Luas (ha)	Areal kritis (ha)	Potensi kekritisian			Potensi Erosi			Potensi longsor			Arahan kebijakan		
			Kriteria	%	Rank	Kriteria	%	Rank	Kategori	%	Rank	Konse rvasi	Preser vasi	Urutan prioritas
Budong-Budong	326.579	65.756	Kritis	20,1	6	Tinggi-Sgt tinggi	0,2	7	Cukup tinggi-Tinggi	6,8	9	✓	✓	I
Karama	344.899	84.659	Kritis	24,5	5	Tinggi-Sgt tinggi	4,4	2	Cukup tinggi-Tinggi	17,8	7	✓	✓	I
Karossa/Benggoulu	151.395	10.024	Kritis	6,6	9	Tinggi-Sgt tinggi	0,0	8	Cukup tinggi-Tinggi	4,9	10	✓	✓	II
Lariang/Pasangayu	167.587	11.688	Kritis	7,0	8	Tinggi-Sgt tinggi	0,0	8	Cukup tinggi-Tinggi	6,9	8	✓	✓	II
Malunda	67.767	1.549	Kritis	2,3	10	Tinggi-Sgt tinggi	0,0	8	Cukup tinggi-Tinggi	49,7	3		✓	III
Mamasa	89.106	13.872	Kritis	15,6	7	Tinggi-Sgt tinggi	3,2	4	Cukup tinggi-Tinggi	56,9	2	✓		II
Mamuju	149.487	67.067	Kritis	44,9	1	Tinggi-Sgt tinggi	5,9	1	Cukup tinggi-Tinggi	32,2	6	✓	✓	I
Mandar	93.462	36.656	Kritis	39,2	2	Tinggi-Sgt tinggi	1,8	5	Cukup tinggi-Tinggi	65,5	1	✓		III
Mapilli	229.644	77.983	Kritis	34,0	3	Tinggi-Sgt tinggi	3,5	3	Cukup tinggi-Tinggi	43,0	5	✓	✓	I
Saddang (hulu)	71.856	19.448	Kritis	27,1	4	Tinggi-Sgt tinggi	0,3	6	Cukup tinggi-Tinggi	46,8	4	✓		III
Total	1.691.780	388.702		23,0										

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang tergolong potensi longsornya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan longsornya cukup tinggi dengan sebaran yang luas.

Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat



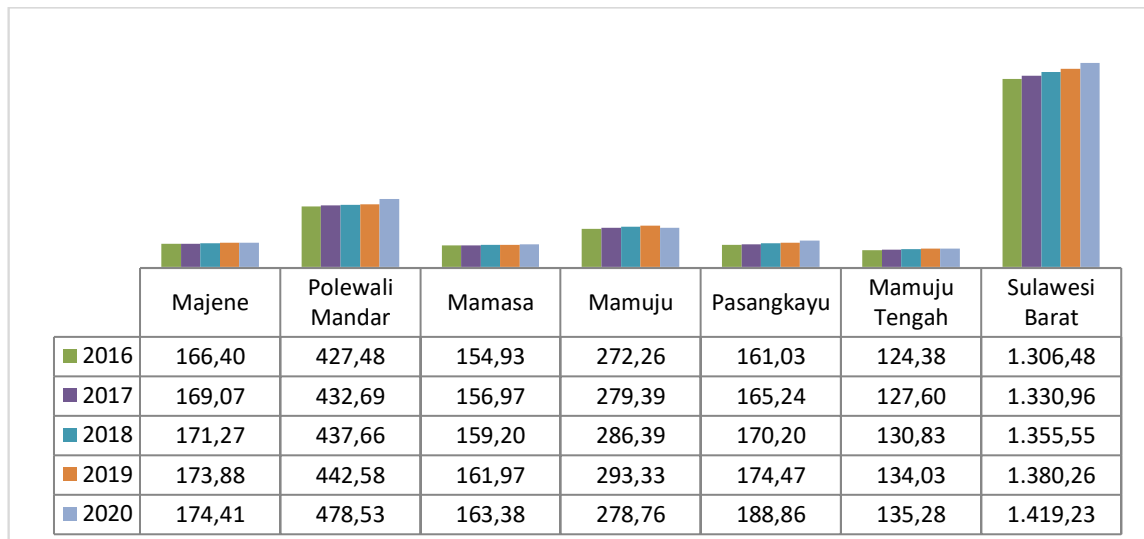
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,18 Km² memiliki jumlah penduduk sekitar 1.419.229 (BPS, Hasil SP2020-September), dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 720.187 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 699.042 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 artinya penduduk laki-laki lebih banyak 3 (tiga) persen dari penduduk perempuan. Adapun kepadatan penduduk sebesar 84 jiwa/Km².

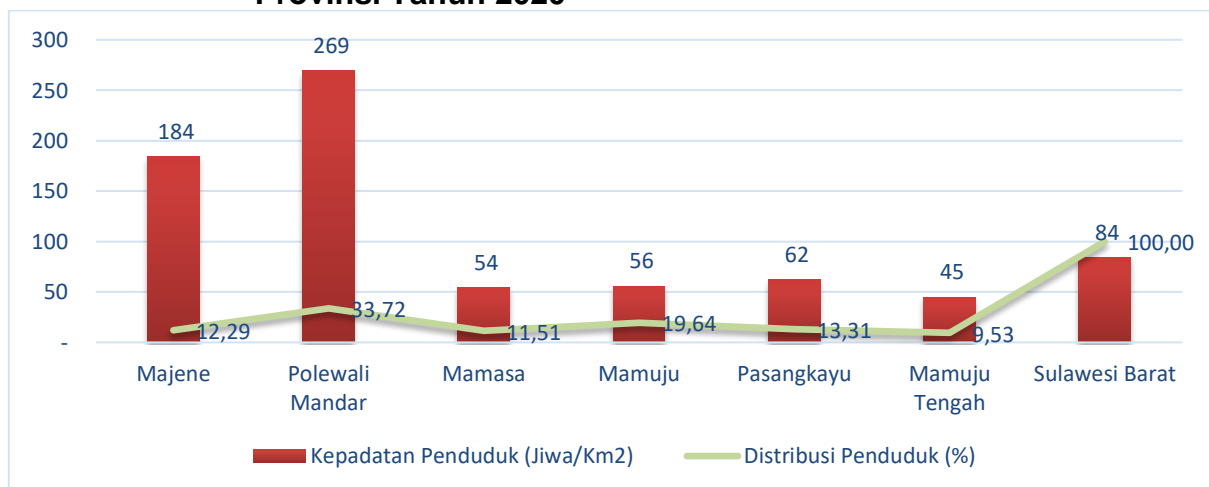
Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Barat tahun 2016-2020 (ribu)



Sumber: BPS, Hasil SP2020

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,72 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,53 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 237 jiwa/km², selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 184 jiwa/km², Kabupaten Pasangkayu 62 jiwa/km², Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa dengan kepadatan yang sama sebesar 56 jiwa/km², serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 45 jiwa/km² pada tahun 2020.

Grafik 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi Tahun 2020



Sumber: BPS, Hasil SP2020

Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 83,24 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar 13,88 persen serta agama yang minoritas yaitu Budha dan Hindu dengan jumlahnya di bawah dua persen. Adapun gambaran persentase penduduk menurut Kabupaten dan Agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

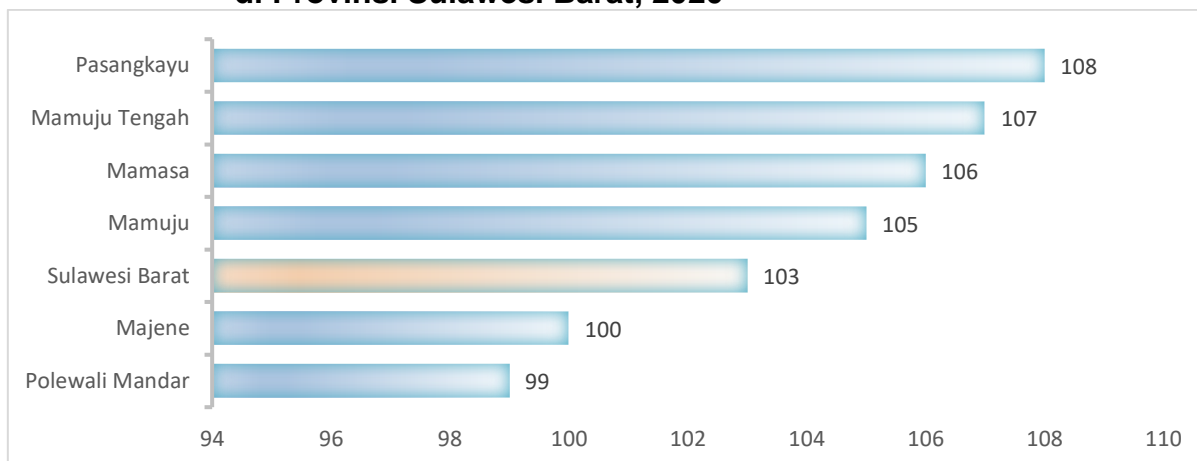
Kabupaten	Persentase Penduduk					
	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
Majene	99,75	0,12	0,10	0	0,03	0
Polewali Mandar	94,67	4,43	0,62	0,25	0,02	0
Mamasa	22,72	70,22	4,20	2,82	0,03	0
Mamuju	81,49	16,13	0,68	1,65	0,05	0
Pasangkayu	84,26	8,37	1,88	5,44	0,04	0
Mamuju Tengah	79,67	13,23	1,81	5,01	0,29	0
Sulawesi Barat	79,57	16,89	1,36	2,12	0,06	0

Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Penduduk di Sulawesi didominasi oleh laki-laki dimana perbandingan rasionya sebesar 103. Ratio jenis kelamin tiap kabupaten juga berbeda dimana untuk Kabupaten Polewali Mandar mempunyai ratio jenis kelamin dibawah dari nilai 100 (seratus) sebesar 99 untuk Kabupaten Polewali Mandar artinya bahwa untuk setiap seratus penduduk perempuan hanya ada 99 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah rasio terbesar berada di Kabupaten Pasangkayu yang sebesar 108 sedangkan untuk kabupaten lainnya dengan nilai ratio lebih besar dari seratus, seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

Grafik 2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: BPS, Hasil SP2020

2.1.2.3 Struktur Usia Penduduk

Struktur Usia penduduk di Sulawesi Barat dimana angka terbesar berada pada kelompok usia muda yaitu antara usia 0-49 tahun, hal itu menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk pada usia muda yang cukup tinggi. Jumlah penduduk usia belum produktif antara 0-14 tahun sebesar 416.311 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia produktif antara 15-64 tahun sebesar 1.068.098 jiwa serta jumlah penduduk usia tidak produktif ≥ 65 tahun sebanyak 75.575 jiwa.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	70 133	68 261	138 394
5 – 9	67 739	66 123	133 862
10 – 14	71 331	66 546	137 877
15 – 19	69 855	65 138	134 993
20 – 24	67 596	64 131	131 727
25 – 29	63 083	60 447	123 530
30 – 34	57 050	55 410	112 460
35 – 39	51 817	50 629	102 446
40 – 44	47 321	46 321	93 642
45 – 49	41 056	40 311	81 367
50 – 54	33 914	33 371	67 285
55 – 59	27 122	26 915	54 037
60 – 64	19 781	20 009	39 790
65 – 69	14 170	14 721	28 891
70 – 74	9 342	10 106	19 448
75+	8 877	10 603	19 480
Jumlah	720 187	699 042	1 419 229

Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

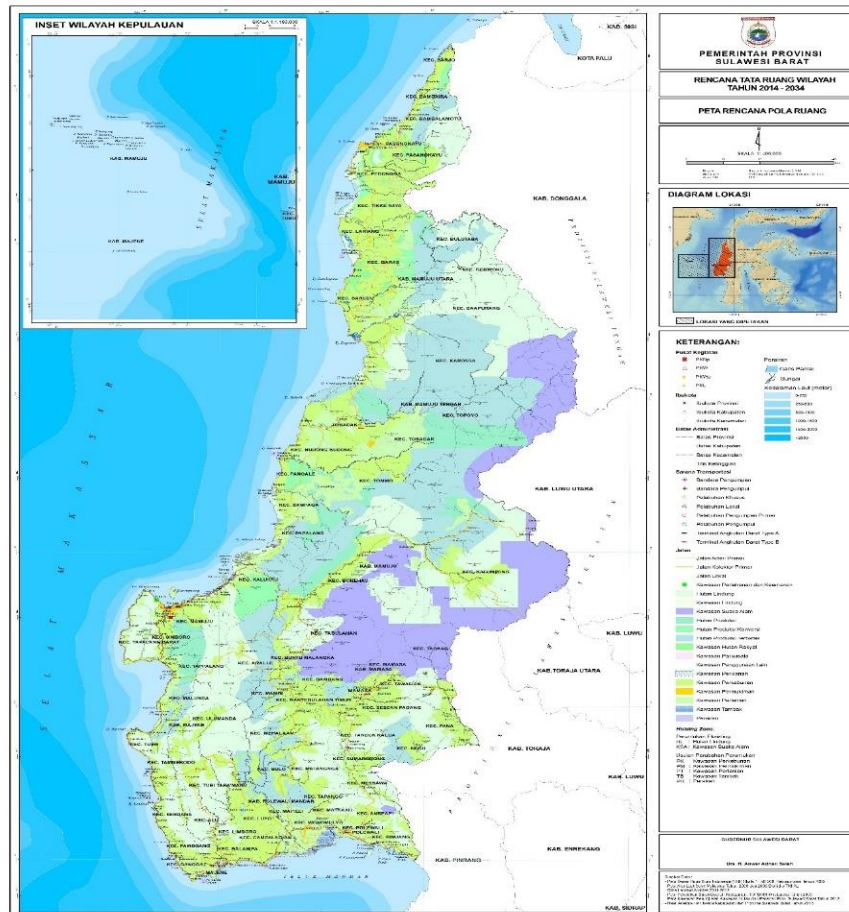
Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kawasan Budidaya di Sulawesi Barat dengan luasan sebesar 10.168,88 Ha.

Pengembangan Kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan Arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan untuk melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Strategi pengembangan kawasan terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampapadang – Belang-Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
- b. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Pasangkayu) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata
- c. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan), dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.

Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.3.1 Kawasan Hutan Produksi

Luas Hutan Produksi di Sulawesi Barat sebesar 423.424 hektar, terdiri dari hutan produksi terbatas 331.249 hektar, hutan produksi tetap 70.930 hektar dan hutan produksi dapat dikonversi 21.063 hektar. Kawasan hutan produksi ini selain pernah dimanfaatkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), juga sebagian telah dikonversi oleh rakyat sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan (terutama kakao dan sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju, Mamuju tengah, dan Pasangkayu). Pada bekas areal HPH, banyak dari kawasan ini yang belum dihutankan kembali, hanya dibiarkan terlantar setelah kayunya diambil. Sebagian dari kawasan ini termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan longsor atau menjadi wilayah tangkapan air dari DAS krusial, sehingga perlu direhabilitasi. Rencana pengembangan Hutan produksi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulbar terdiri atas:

- Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu,

- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
- c. Kawasan hutan produksi konversi, yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.

2.1.3.2 Kawasan Pertanian

Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, dimana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini juga didukung oleh potensi lahan pertanian seluas 1.429,29 km² dan lahan perkebunan seluas 3.969,32 km² yang ada di Sulawesi Barat. Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan arahan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan potensil budidaya tanaman pangan unggulan Holtikultura di Kabupaten Mamasa;
- c. Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
- e. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan Kakao di Seluruh kabupaten di wilayah Prov.Sulbar;
- f. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan Kelapa di Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- g. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu;
- h. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta dan teh di kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;

- i. Kawasan potensil budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika (nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2.11 Luas Lahan Sawah Menurut Kabupaten dan Jenis Pengairan Provinsi Sulawesi Barat (hektar), 2017

Kabupaten	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Majene	542	884	1 426
Polewali Mandar	15 723	2 730	18 453
Mamasa	12 640	227	12 867
Mamuju	4 288	12 087	16 375
Pasangkayu	2 110	1 872	3 982
Mamuju Tengah	925	10 204	11 129
Sulawesi Barat	36 228	28 004	64 232

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2018

Ket: Data 2020 belum tersedia/masih menggunakan data tahun 2017

Tabel 2.12 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat (hektar), 2019

Kabupaten	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan
Majene	12 014	7 292	3 316
Polewali Mandar	20 246	17 361	6 488
Mamasa	17 189	16 163	12 350
Mamuju	19 378	8 080	17 686
Pasangkayu	48 517	43 531	11 229
Mamuju Tengah	17 477	3 883	9 486
Sulawesi Barat	134 821	96 310	60 555

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.3.3 Kawasan perikanan

Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km². Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 (sepuluh) persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat maka kawasan perikanan terbagi atas:

- Kawasan tambak udang dan ikan bandeng terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- Kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- Kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu;
- Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Banggae Majene, Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar) dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.

Tabel 2.13 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Kabupaten	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
Majene	-	312	188	-	-	-	500
Polewali Mandar	350	2 973	468	-	10	25	3 826
Mamasa	-	-	1 726	-	-	10 667	12 393
Mamuju	462	882	1 002	-	-	-	2 346
Pasangkayu	-	2 108	210	-	-	-	2 318
Mamuju Tengah	-	601	347	-	-	-	948
Sulawesi Barat	812	6 876	3 941	-	10	10 692	22 331

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.14 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Kabupaten	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
Majene	821	1 875	1 521
Polewali Mandar	500	1 138	799
Mamasa	-	-	-
Mamuju	574	2 575	897
Pasangkayu	349	989	90
Mamuju Tengah	144	725	14
Sulawesi Barat	2 388	7 302	3 321

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.3.4 Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan berdasarkan arah pengembangan wilayah di RTRW Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

- Kawasan pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene;
- Kawasan pengembangan peternakan sapi yang meliputi kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

Tabel 2.15 Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Provinsi Sulawesi Barat (ekor), 2019

Kabupaten	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Majene	-	18 144	148	194	70 953	-	-
Polewali Mandar	-	34 543	615	532	94 894	-	2 567
Mamasa	-	5 907	8 676	655	1 112	-	74 530
Mamuju	-	18 812	754	97	15 125	-	30 013
Pasangkayu	-	10 155	15	8	4 981	-	4 221
Mamuju Tengah	-	9 078	162	92	7 707	-	25 775
Sulawesi Barat	-	96 639	10 370	1 578	194 772	-	137 106

Lanjutan Tabel diatas

Kabupaten	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
Majene	219 897	25 503	299 778	17 076
Polewali Mandar	1 832 300	49 424	945 363	260 578
Mamasa	129 816	2 165	9 018	32 670
Mamuju	1 255 226	64 466	848 400	37 621
Pasangkayu	305 065	13 524	510 975	16 450
Mamuju Tengah	1 113 977	29 722	43 056	32 089
Sulawesi Barat	4 856 281	184 804	2 656 590	396 484

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Ket: Data Tahun 2020 belum tersedia

2.1.3.5 Kawasan Pertambangan

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan sumberdaya alam diantaranya galian logam meliputi emas, biji besi, perak dll. serta potensi akan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Barat. Berdasarkan arahan RTRW terkait pengembangan kawasan pertambangan diantaranya yaitu :

- Kawasan potensil tambang galian logam yang tersebar di beberapa kabupaten antara lain tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan

Kabupaten Mamasa); tambang biji besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu); tambang perak (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).

- b. Kawasan potensial tambang galian industri meliputi : tambang mika (kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); Tambang gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); Tambang Sulfat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa); tambang Pasir Kuarsa (Kabupaten Mamasa).
- c. Kawasan potensil tambang minyak dan gas bumi (Migas), Blok Suremana, Blok Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu; sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu, Blok Budong-Budong dan Blok Karama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok sebuku di pulau Ilerelerekang Kabupaten Majene; Blok South Mandar dan dan Blok Mandar yang sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian lagi di Kabupaten Polewali Mandar; tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kab. Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu).

Tabel 2.16 Potensi Bahan Galian Tambang (Logam, Batubara, Panas Bumi) Menurut Sebaran Lokasi, di Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Majene				
Kec Ulumanda, Desa Sambabo	Logam Biji Besi (Fe)	-	-	Data KP. Distamben Kab. Majene
Kec Pamboang	Logam Emas (Au)	-	-	Data KP. Bina Alam Sukses
Kec Sendana, Desa Limboro Rambu	Panas Bumi	38,9° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Ulumanda, Sungai Urekang	Panas Bumi	42,3° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Pamboang, Desa Siang Adholang Dhua	Panas Bumi	37,9° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Pamboang, S. Loppa Adholang Dhua	Panas Bumi	52° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Polewali Mandar				
Tapango, Desa Tapango	Logam Biji Besi (Fe)	163823,83	5,2979	Wilayah IUP PT. Isco Iron, Tahap Operasi Produksi/Survei Logam oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006
Kec Tapango, Desa Tapango	Logam Biji Besi (Fe)	500000,00	943	PT. ISCO IRON
Kec Tapango, Desa Lapejang	Logam Biji Besi (Fe)	-	787	
Kec Tapango, Desa Simbalutung	Logam Biji Besi (Fe)	-	300	Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman,
Kec Tapango, Desa Bussu	Logam Biji Besi (Fe)	-	-	
Kec Tapango, Desa Takaturung	Logam Biji Besi (Fe)	-	1500	
Kec Anreapi, Desa Ulugalung	Logam Biji Besi (Fe)	-	1750	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Binuang, Desa Mammi	Logam Biji Besi (Fe)	6044,04	2445	Survei Logam Oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006
Kec Matakali, Desa Barumbung	Logam Biji Besi (Fe)	-	912	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Campalagian, Desa Sumarrang	Logam Emas (Au)	-	-	Penyelidikan Umum/ Lap. Penelitian Umum Oleh PT. Manggis Mitra Minerals 2007
Kec Binuang, Desa Kurma	Logam Emas (Au)	-	3000	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Mapilli, Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa	Logam Emas (Au)	-	5000	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan	Logam Galena (Pb)	1500000 (Terukur)	199	Wilayah KP. Eksploitasi PT. Isco Polman. ReSource dan PT. Inti Karya Polman/ Data KP Distamben Kab.Polman Thn 2009. Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi &

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
				Distamben Polman, tahun 2010
Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan	Logam Galena (Pb)	3570405 MTon	776	PT. Inti Karya P.
Kec Binuang, Desa Batetangga	Logam Galena (Pb)	-	2000	Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Bulu, Desa Sapporakki	Panas Bumi	95-97°C	4700	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Terpadu Geologi dan Geokimia Daerah Panas Bumi Lilli Kab. Polman Prov. SulBar Tahun 2010.
Kec Matangnga, Desa Matangnga	Panas Bumi	60,9-84°C	Kec Matangnga, Desa Matangnga	Laporan Akhir Penyelidikan Geofisika Terpadu Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman SulBar 2011. Laporan Akhir Magnetotellurik Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman Prov. Sulbar Tahun 2011.
Kec Tapango, Desa Riso/Kalimbua	Panas Bumi	47-54°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Geofisika Terpadu Panas Bumi Daerah Riso Kab. Polman, Prov. Sulbar Tahun 2011.
Kec Balanipa, Desa Bala	Panas Bumi	38-40°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Kec Mapilli, Desa Batupanga Daala	Panas Bumi	46-48°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kec Mapilli, Desa Andau	Panas Bumi	47-49°C	-	
Kec Alu, Desa Pao - Pao	Panas Bumi	45-47°C	-	
Mamasa				
Kec Messawa, Desa Batubusa	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Survei Logam Oleh PT.Siduppa Group,2007
Kec Pana, Desa Karaka, Uluvalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Pana, Desa Karaka, Uluvalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Seng (Zn)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Tabulahan, Desa Talopak	Logam Biji Besi (Fe)	-	Hipotesa	Wilayah KP. PT. Antam/Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007
Kec Sumarorong, Desa Ratte Bo'te	Logam Biji Besi (Fe)	-	Hipotesa	Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group,2007. Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle	Logam Biji Besi (Fe)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Makuang Pebassian	Logam Mangan (Mn)	-	Hipotesa	Kawasan Pertanian/Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010.
Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle	Logam Mangan (Mn)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Sipai Pebassian	Logam Pasir Besi	-	900	Belum Pernah dikelola/ Inventarisasi Bahan Galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010.
Kec Mamasa, Desa Usango, Desa Rambusaratu, Desa Makau, Desa Salu Mokanan Utara, Desa Lindu Hahangan, Desa Uhaulano, Desa Rantetangga, Desa Salu Kanan, Desa Mungin, Desa Rantekatoang, Desa Indobanua, Desa Rantekamiri, Desa Tamalatik, Desa Timbu	Panas Bumi	51,14°C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Mamasa, 2015

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Kanan, Desa Malimbong.				
Mamuju				
Kec Bonehau, Desa ButtuAda S. Malotong	Logam Emas (Au)	-	-	Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Bonehau, Desa Buttu Ada S. Malotong	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Kalumpang, Desa Karataun (Sungai Karataun)	Logam Emas Placer (Au)	-	-	Tambang Rakyat/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Kalumpang, Desa Karataun (Batuisi)	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT.PT Mandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam,
Kec Kalumpang, Desa Bulo'	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Kalumpang,	Nikel (Ni)	47353	604	Survey dan Inventarisasi Potensi Nikel Kecamatan Kalumpang, Kab.mamuju
Kec Bonehau, Desa Tamalea	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT. PTMandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam,
Kecamatan Bonehau	Batu Bara	1900000	96	PT. Bonehau Prima Coal
Kecamatan Tapalang	Batu Bara	Indikasi	-	Wilayah Perkebunan Masyarakat/ Informasi Distamben Mamuju
Kec Tapalang Barat, Desa Tappalang	Panas Bumi	53,5° C	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Kec Simboro, Desa Karema	Panas Bumi	47,7°C	-	-
Kec Kalukku, Kelurahan Bebanga, dusun Ampallas	Panas Bumi	66-71°C	-	-
Kec Kalukku, Desa Pontanakayyang	Panas Bumi	42°C	-	-
Pasangkayu				
Kec Tikke, Desa S. Lariang	Logam Emas Placer (Au)	103	DAS Lariang. Bekas Penambangan Rakyat/Survei dan Pemetaan Geologi Oleh	Kec Tikke, Desa S. Lariang

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
			GDA Consultan, 2007. Survey dan Pemetaan Bahan Galian Logam Kab Pasangkayu, Kerjasama Distamben Prov. Sulbar & CV Armedia Consultant, 2009.	
Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarakedo	Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu)	-	-	Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009
Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarakedo	Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu)	-	-	Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009
Kec Baras dan Kec Sarudu	Batubara	-	-	Wilayah Ekplorasi PT. Tambang sekarsa Adaya/Data Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Dinas PESDM Prov. Sulbar, 2009
Kec Sarudu, Desa Doda	Panas Bumi	37,2°C	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kab Mamuju dan Pasangkayu Prov. SulBar, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Mamuju Tengah				
Kec Topoyo, Desa Tabolang	Logam Seng (Zn)	-	-	Eksplorasi/Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Topoyo, Desa Tabolang	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Tobadak, Desa Panasuan	Panas Bumi	-	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Wilayah Eksplorasi/ Survey dan Pemetaan

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
				Bahan Galian Logam di Kab. Mamuju, Kerjasama Distamben Prov. SULBAR & CV. CITRA MULTICON, 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Biji Besi (Fe)	-	-	Wilayah Penyeledikan Umum/Data Pengelolaan Mineral dan Batubara, Provinsi Sulawesi Barat, 2009
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Seng (Zn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Galena (PbS)	-	-	Wilayah Eksplorasi/Data Pengelolaan Pertambangan dan Mineral, Oleh Dinas PSDM. Prov. Sulawesi Barat, 2009
Kec Tobadak, Desa Sungai Andeang	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013
Kec Tobadak, Desa Salulekbo	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013
Kec Tobadak, Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013.

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.1.3.6 Kawasan Industri

Paradigma baru pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan usaha-usaha primer ke sekunder hingga ke tersier, untuk lebih meningkatkan nilai tambah, dalam hal ini pengembangan industri. Salah satu ciri daerah yang sudah maju ditandai oleh dominannya kontribusi penciptaan nilai tambah pada kategori industri dibanding kategori lainnya. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta disamping pertambangan dan Gas yang menjadi potensi di Sulawesi Barat, jelas akan sangat mendukung pengembangan industri yang secara nyata akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Rencana

pengembangan industri baik skala besar maupun skala kecil telah termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034. Arahan pengembangan industri tersebut antara lain :

- a. Kawasan industri skala besar diantaranya agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong.
- b. Kawasan industri skala menengah, agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit, di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju.
- d. Kawasan Industri Perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belang belang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah Eco-Industrial-Park (EIP) dan Special Economic Zone (SEZ/KEK) Belang-Belang.

Tabel 2.17 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sulawesi Barat, 2019

Industrial	Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Makanan	12	-
Industri Tekstil	5	-
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1	-
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	-
Industri Barang Galian Bukan Logam	1	-
JUMLAH	20	-

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2021

2.1.3.7 Kawasan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan bagi daerah. Selain faktor finansial bagi daerah, pengembangan sektor pariwisata juga dinilai menjadi suatu hal yang sangat penting baik sebagai salah satu penyerap tenaga kerja. Salah satu aspek pemegang peranan dalam meningkatkan sektor pariwisata adalah jasa perhotelan. Dalam perekonomian Sulawesi Barat, kegiatan perhotelan tergabung dalam kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain data pertumbuhan ekonomi, indikator meningkatnya kegiatan perhotelan di suatu wilayah dapat berupa tingkat penghunian.

Potensi budaya yang ada Provinsi Sulawesi Barat ini disempurnakan dengan panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga Pasangkayu, sampai pemandangan alam persawahan dan hutan primer di pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi keindahan *landscape* alam pegunungan. Berdasarkan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 ditetapkan Rencana Kawasan Pariwisata yang berisi tentang keanekaragaman potensi wisata dari wisata alam seperti air terjun dan arung jeram, wisata sosial budaya seperti tarian tarian unik, tenunan khas dan perayaan perayaan tradisional dan wisata minat khusus memiliki keunikan yang mempunyai daya tarik yang besar. Disamping pengembangan wisata di daratan, potensi pengembangan wisata pantai seperti Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju serta gugusan pulau pulau kecil dan terumbu karang di Pulau pulau Ambo di sebelah barat Kabupaten Majene perlu dikembangkan. Pembukaan jalur jalan yang menghubungkan Belang-belang ke kota Palopo di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan serta jalan yang menghubungkan kota Mamasa dan kota Makale di Kabupaten Tana Toraja akan memberi dampak pada peningkatan akses jalan ke obyek obyek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi potensi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Jenis Dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
Wisata Alam	Mamuju	Mamuju	Gunung Paken	Pemandangan laut dan kepulauan	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Mamuju	Air terjun Tamasapi	Air terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Kalukku	Taman Wisata Gentungan	Panorama Alam	Peningkatan jalan akses
		Mamuju	Pulau Karampuang	Wisata Bahari / pasir putih	Penataan obyek dan akses dari kota Mamuju
		Simboro kepulauan	Pantai Toangsang	Pasir Putih	Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata
		Simboro kepulauan	Wisata Pulau	Wisata Pulau	Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata
	Majene	Tammeroddo	Permandian Air panas Limbroo	Air Panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Banggae	Pembuatan Perahu Sandeq	Perahu layar	Peningkatan Promosi dan Pelestarian
		Banggae	Pantai Rangas	Pasir Putih	Penataan kawasan dan jalan akses
		Banggae Timur	Pantai Dato'	Pantai dan Tebing	Penataan kawasan dan jalan akses
		Banggae Timur	Pantai Barane	Pantai	Penataan kawasan dan jalan akses
	Polewali Mandar	Anreapi	Air terjun Indo Rannoang	Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Binuang	Kanang	Wisata Agro	Penataan kawasan dan jalan akses
		Anreapi	Bendungan Sekka-sekka	Wisata air	Pengelolaan obyek dan fasilitas jalan
		Tinambung	Pantai Palippis	Wisata Bahari / Panorama	Penataan wilayah
		Binuang	P. Gusung Toraya	Panorama pantai	Penataan wilayah dan sistim transportasi
		Wonomulyo	Pantai Mampie	Pantai, Bahari dan Ekowisata	Penataan kawasan dan jalan akses
	Mamasa	Sumarorong	Air Terjun Liawan	Air terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Messawa	Air Terjun Sallokan	Air terjun dan Air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Messawa	Air Panas Malimbong	Air terjun dan Air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Mamasa	Air Panas Kole	Permandian air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Mamasa	Gunung Mambulilling	Hiking, Trecking	Penataan <i>tracking paths</i>
		Balla	Puncak Mussa' dan Perkampungan Tradisional Balla Peu'	Panorama dan perkampungan adat	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan
		Sesena Padang	Perkampungan Tradisional Sesena Padang	Wisata Alam dan perkampungan tradisional	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan
	Pasang kayu	Bambaira	Goa Ape	Wisata Goa	Perbaikan jalan akses
		Pasang kayu	Pantai Tanjung Batu Oge'	Wisata Pantai / Terumbu karang	Perbaikan jalan akses dan promosi wisata

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
		Pasangkayu	Pantai Tanjung Babia	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Baras	Pantai Salukaili	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
	Mamuju Tengah	Topoyo	Air Terjun Kalando	Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Karossa	Pantai Kambunong	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Kec. Pangale	Pantai Karama	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Budong-Budong	Pantai Babana	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Karossa	Air Terjun Lembah Hopo	Wisata Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
Wisata Budaya	Mamuju		Pure	Kegiatan keagamaan Hindu	Promosi event wisata
		Mamuju	Monumen Ahmad Kirang	Tugu/Patung	Promosi wisata
		Mamuju	Banoa Sibatang	Rumah Tradisional Kalumpang	Promosi wisata
		Mamuju	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Mamuju	Massossor Manurung	Pesta Rakyat dan HUT Manakarra	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
		Mamuju	Festival Pulau Karangpuang	Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Pesta Nelayan	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Mamuju	Rumah Adat Mamuju	Rumah Adat Tradisional	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
	Majene	Majene	Museum Mandar	Museum	Promosi wisata
		Malunda, Sendana dan Banggae	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Banggae	Makam Raja Raja	Makam	Promosi wisata
		Malunda	Pa'bandangan Manu' manu'	Upacara syukuran panen	Promosi wisata
			Makam Syech Abdul Mannan	Makam	Promosi wisata
		Banggae	Maulidan Salabose	Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
	Polewali Mandar	Limboro	Makam Todilaling	Makam Raja I Balanipa	Promosi wisata
		Binuang	Makam Sysch Al-Ma'ruf	Makam	Promosi wisata
		Campalagian	Makam Imam Lapeo	Makam	Promosi Wisata
		Campalagian	Makam Raja Tie Tie	Makam	Promosi Wisata
		Polewali	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Polewali	Polewali Mandar Internasional Folk & Art Festival (PIFAF)	Festival Seni Budaya dan Pariwisata tingkat Internasional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
	Mamasa		Prosesi Mangngasa'	Adat / kegiatan pertukangan	Promosi wisata
		Balla	Makam Tua Tedong-tedong	Kuburan adat	Promosi wisata
			Rambu Solo'	Pesta pemakaman	Promosi wisata
		Nosu	Ritual Mangaro'	Prosesi adat Kematian	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
		Mamasa	Perayaan HUT Kab. Mamasa	Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Ritual Adu Kerbau	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Mamasa	Monumen To'Pao	Sejarah Perjanjian Kerajaan Pitu Ulunna Salu	Dukungan Pelestarian Sejarah dan Promosi Pariwisata
		Mamasa	Rumah Adat Rambusaratu	Rumat Tradisional Mamasa	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
	Pasangkayu	Bamballamotu	Suku Bunggi	Adat tradisional	Promosi wisata
		Pasangkayu	Sumur tua Parappe'	Sumur tua	Promosi wisata
		Pasangkayu	Monumen Sejarah Vovasanggayu	Monumen Sejarah	Promosi wisata
	Mamuju Tengah	Tobadak	Festival Bumi Lalla Tassisara	Peringatan Hari Bakti Transmigrasi dan Hari Jadi Kab Mamuju Tengah	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
			Festival Nusantara Tassisara	Festival Seni, Budaya, Pariwisata dan Etnis	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
Wisata Minat Khusus (Belanja, Pertunjukan dan Pendidikan)	Mamuju	Kalumpang	Tenun Sekomandi	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertunjukan
			Tari Bambamanurung	Tarian adat	Promosi wisata
			Tari Ma'bundu'	Tarian adat	Promosi wisata
		Mamuju	Daiving	Menyelam dan Pemetretan di bawah laut	Promosi wisata
	Majene	Banggae	Tenun Sutra Mandar	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertunjukan
			Tari Pa'jinang	Tarian adat	Promosi wisata
			Tari Pa'dego	Tarian adat	Promosi wisata
		Banggae Timur	Wisata Pendidikan	Universitas Sulawesi Barat	Pengembangan dan promosi
		Bangae	Mancing Mania	Mancing dilaut dalam	Promosi wisata
	Polewali Mandar	Tinambung Dan Balanipa	Tenun Surtra Mandar	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertunjukan
			Sayyang Pattu'du	Tarian adat	Promosi wisata
		Binuang	Desa Wisata Batetangnga	Perkampungan Tradisional	Pembangunan daya tarik, pemberdayaan masyarakat dan Promosi wisata
		Binuang	Kampung Bahasa Inggris	Sekolah Tradisional Bahasa Inggris	Pengembangan dan promosi

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
	Mamasa	Mamasa	industri souvenir	Souvenir	Promosi wisata dan penataan lokasi kerajinan dan lokasi pemasaran
			Tari Bulu Londong	Tarian adat	Promosi wisata
			Musik Iyo iyo	Musik tradisional	Promosi wisata
			Tari Luya	Tarian adat	Promosi wisata
			Tari Pararuk	Tarian adat	Promosi wisata
			Tari Burake	Tarian adat	Promosi wisata
			Tari Bisu	Tarian adat	Promosi wisata
			Tari Simbong	Tarian adat	Promosi wisata
			Gunung Mambulilling Lintas	Petualangan dan Pendaki gunung	Penyediaan akses dan promosi
			Sungai Mamasa	Arung Jerang	Pengembangan dan promosi
	Pasang kayu		Tari Mataro	Tarian adat	Promosi wisata

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Tabel 2.19 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Provinsi Sulawesi Barat, 2014–2019

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Domestic	
2014	42	30 116	30 158
2015	50	30 337	30 387
2016	336	164 467	164 803
2017	723	385 557	386 280
2018	550	442 563	443 113
2019	534	521 762	522 296

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.3.8 Kawasan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tantangan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.

- Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan tetap memperhatikan tingkat kerawanan gempa;
- Pola Permukiman Perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa

lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih besar atau sama dengan 30 m di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

2. Kawasan Permukiman Perdesaan

- a. Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
- b. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Tabel 2.20 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Kabupaten	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal			
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Jumlah
Majene	94,27	1,18	4,56	100,00
Polewali Mandar	90,61	1,60	7,80	100,00
Mamasa	86,61	2,18	11,21	100,00
Mamuju	87,50	3,32	9,18	100,00
Pasangkayu	74,79	3,11	22,10	100,00
Mamuju Tengah	88,76	1,31	9,93	100,00
Sulawesi Barat	87,56	2,15	10,29	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

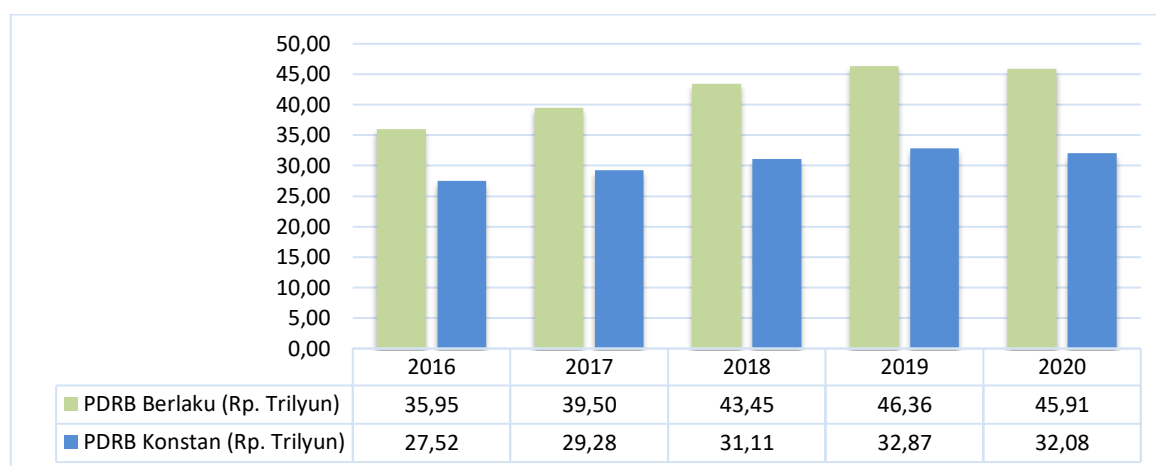
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Pada tahun 2019, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 45,91 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 32,08 triliun rupiah. Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2020 kontraksi 2,42 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdapat terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,31 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi terdapat terjadi pada komponen Impor yakni sebesar 14,91 persen.

Grafik 2.4 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

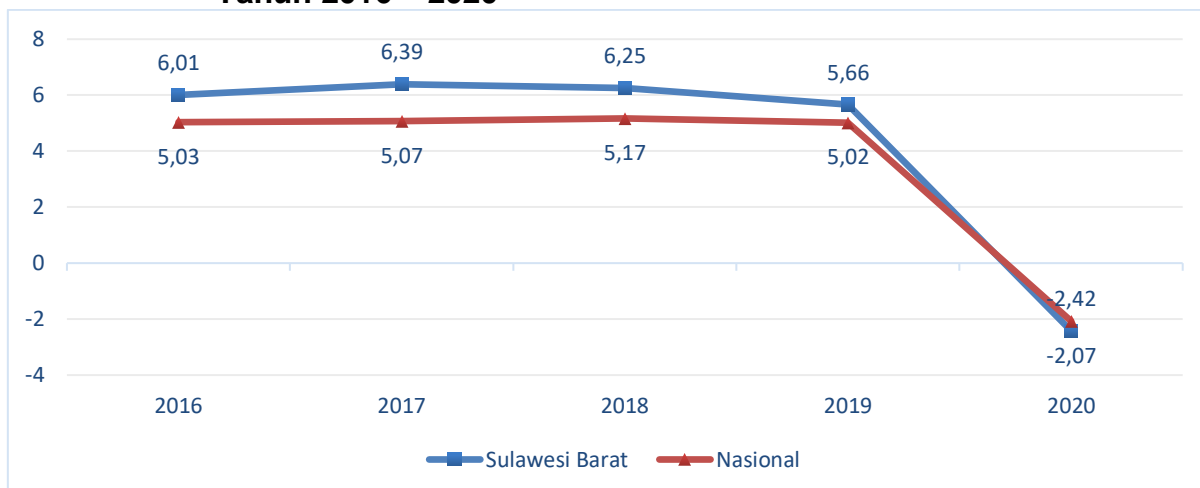


Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya.

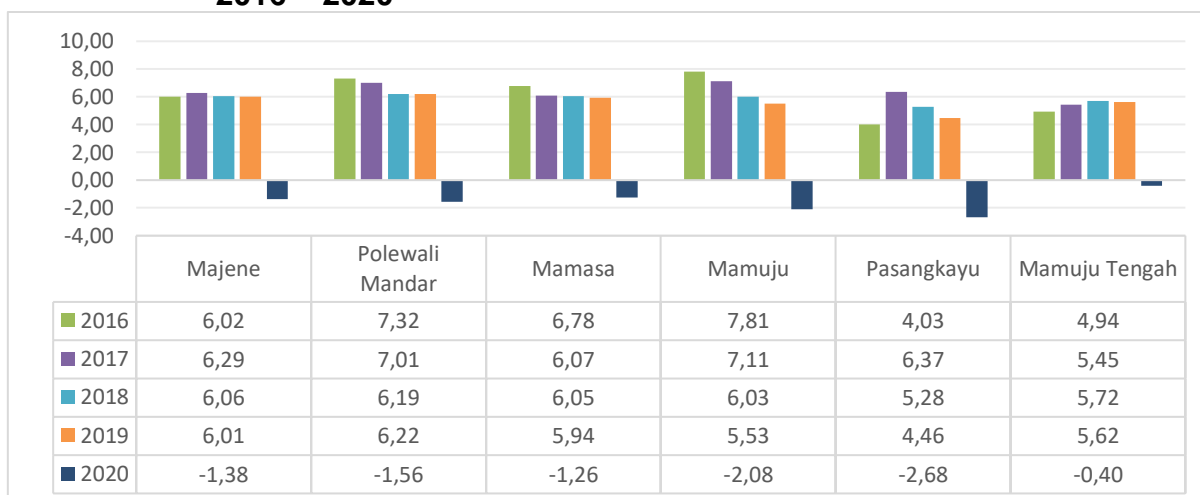
Sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, namun masih selalu berfluktuasi setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,42 persen yang disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19. Meskipun berfluktuasi dan terjadi penurunan seiring penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat berada dibawah pertumbuhan rata-rata nasional yaitu sebesar 2,07 persen pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berimbas kepada kegiatan perekonomian di Sulawesi Barat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terkontraksi.

Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional (%) Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

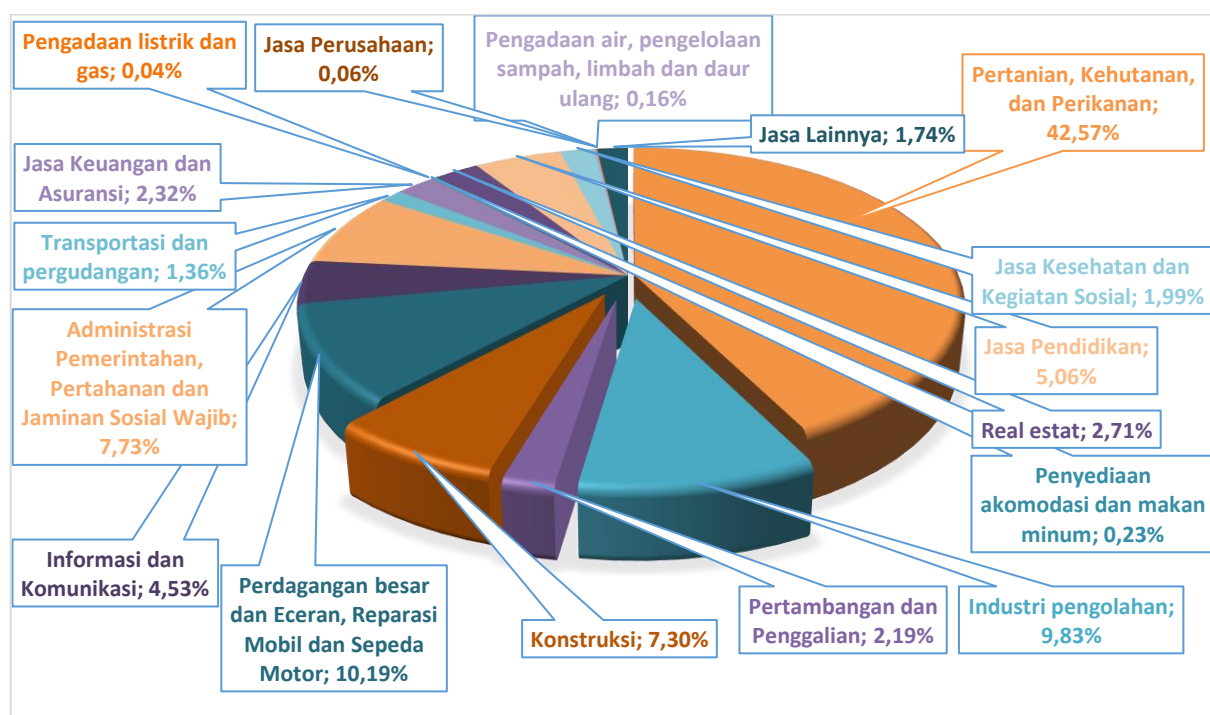
Grafik 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat (%) Tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun masih tumbuh dengan positif hingga tahun 2019, meskipun mengalami kontraksi diseluruh kabupaten. Kabupaten Pasangkayu dengan tingkat pertumbuhan yang paling menurun dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat mengalami kontraksi sebesar 2,68 persen tahun 2020.

Diagram 2.1 Struktur Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2019 (%)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Struktur perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 42,57 persen. meskipun jenis lapangan usaha ini masih mendominasi namun semakin mengalami trend penurunan dari tahun 2013 sebesar 47,44 persen yang diakibatkan adanya peralihan jenis usaha di masyarakat yang beralih ke sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dan lain-lain.

Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat 2016 s/d 2020 (persen)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,08	6,51	6,11	4,62	0,54
Pertambangan dan Penggalian	10,89	6,37	8,25	5,28	-4,90
Industri Pengolahan	-2,46	7,96	7,51	5,13	-3,52
Pengadaan Listrik dan Gas	19,66	9,59	7,19	8,29	6,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,24	10,05	8,81	9,61	1,63
Konstruksi	10,85	6,37	4,99	6,65	-13,31
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,02	5,56	6,16	5,07	-2,60
Transportasi dan Pergudangan	5,78	5,79	5,66	4,23	-6,47
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	9,33	1,55	7,92	9,69	-7,19
Informasi dan Komunikasi	9,26	9,97	7,86	12,54	5,73
Jasa Keuangan	14,90	8,61	4,60	3,37	6,76
Real Estate	5,94	4,59	6,31	7,28	1,90

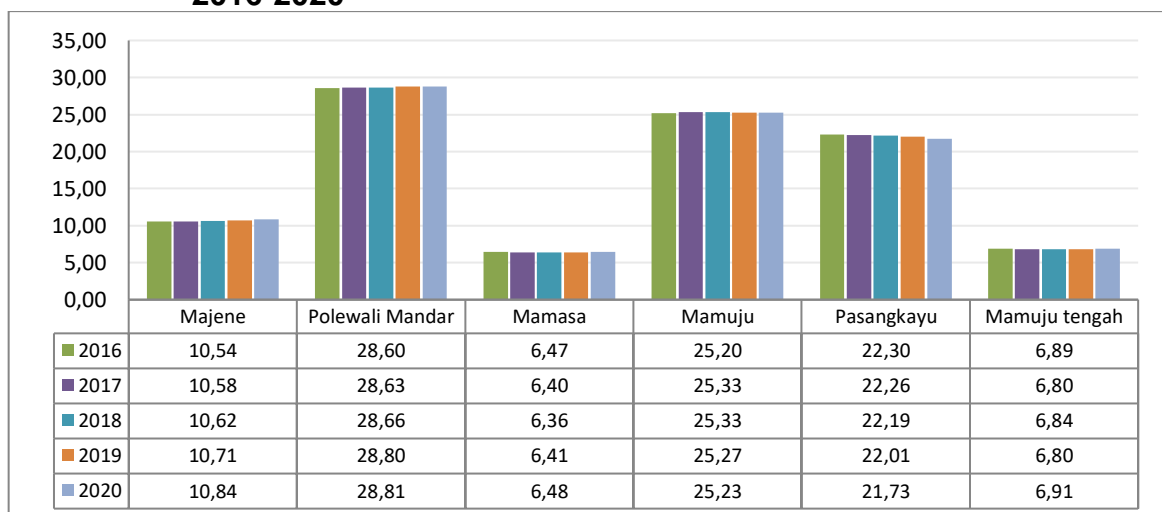
LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Perusahaan	4,62	5,33	3,06	7,49	-5,42
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,04	3,08	6,79	4,91	-8,61
Jasa Pendidikan	10,90	6,20	4,22	8,17	-6,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,83	6,17	7,43	4,23	2,36
Jasa Lainnya	8,90	8,27	5,75	10,53	-5,08
PERTUMBUHAN PDRB	6,01	6,39	6,26	5,67	-2,42

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 0,54 persen pada tahun 2020, mengalami penurunan dari tahun 2019. Pada tahun 2020 hampir semua lapangan usaha mengalami kontraksi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,85 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,76 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,73 persen. Sementara Lapangan usaha Jasa Konstruksi mengalami kontraksi dalam pertumbuhannya sampai -13,31 persen.

Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 28,70 persen dan Mamasa dengan kontribusi terendah sebesar 6,3 persen pada tahun 2018. Presentase kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.7 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

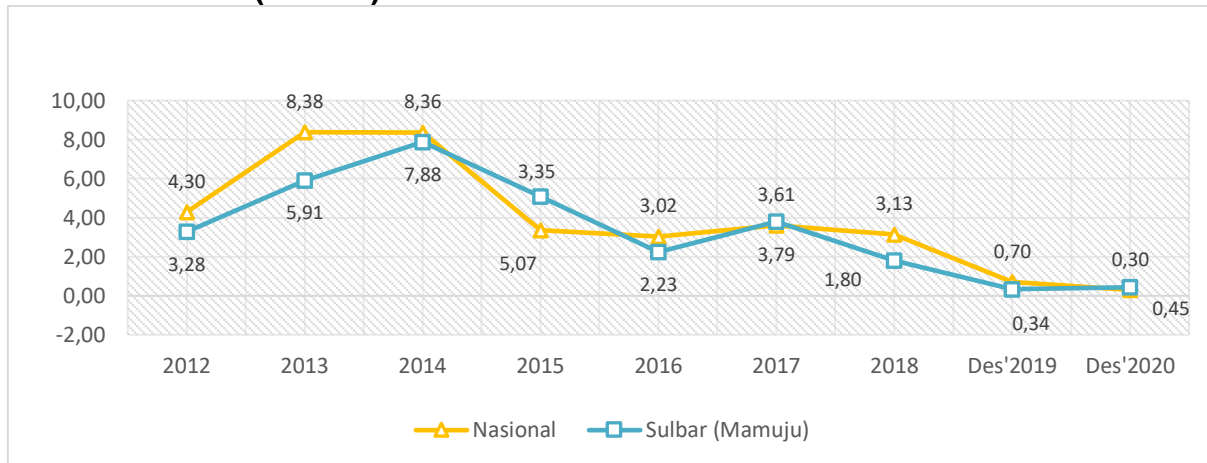
2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu 1) Inflasi Inti, dimana Cenderung menetap/persisten (Persistent component). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh : 1) Interaksi Permintaan dan penawaran, 2) Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, 3) Ekspektasi inflasi dan pedagang dan konsumen. 2) Inflasi Non Inti, Volatilitasnya tinggi. Dipengaruhi oleh selain faktor fundamental di antaranya : 1) Volatile Food (dipengaruhi oleh shock karena panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik). 2) Administered Price (dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, Tarif Listrik, Tarif Angkutan, dll).

Tingkat perubahan indeks tahun kalender dan perubahan indeks tahun ke tahun Desember 2020 di Mamuju adalah inflasi 0,30 persen. Inflasi di Mamuju pada Desember 2020 terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks harga pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok kesehatan 1,63 persen; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,53 persen; transportasi 0,49 persen; makanan, minuman, dan tembakau 0,44 persen; pakaian dan alas kaki 0,30 persen; Informasi, Komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen; dan Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya 0,09 persen. Sementara itu kelompok Rekreasi, Olahraga, dan budaya; Pendidikan; Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga relatif stabil atau tidak mengalami perubahan.

Perkembangan inflasi tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada tahun 2014 inflasi Sulawesi Barat sebesar 7,88 persen berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,36 persen. Inflasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016 yang sebesar 2,23 persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 3,02 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 inflasi tahunan di Sulawesi Barat sebesar 1,88 persen berada di bawah angka nasional sebesar 3,13 persen dan merupakan inflasi terendah dari tahun 2009.

Grafik 2.8 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat (Persen) Tahun 2014 – 2018

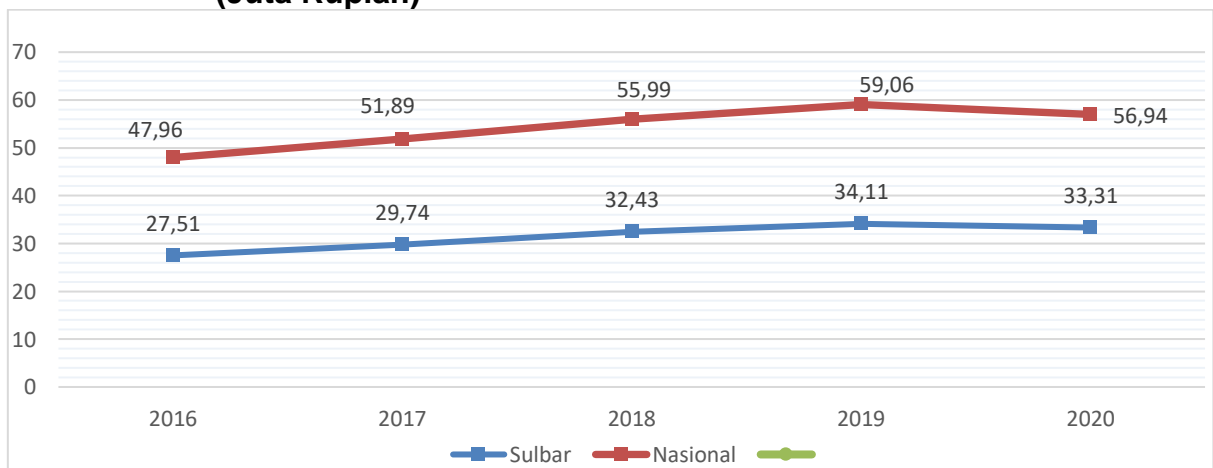


Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.2.3 Pendapatan Per Kapita

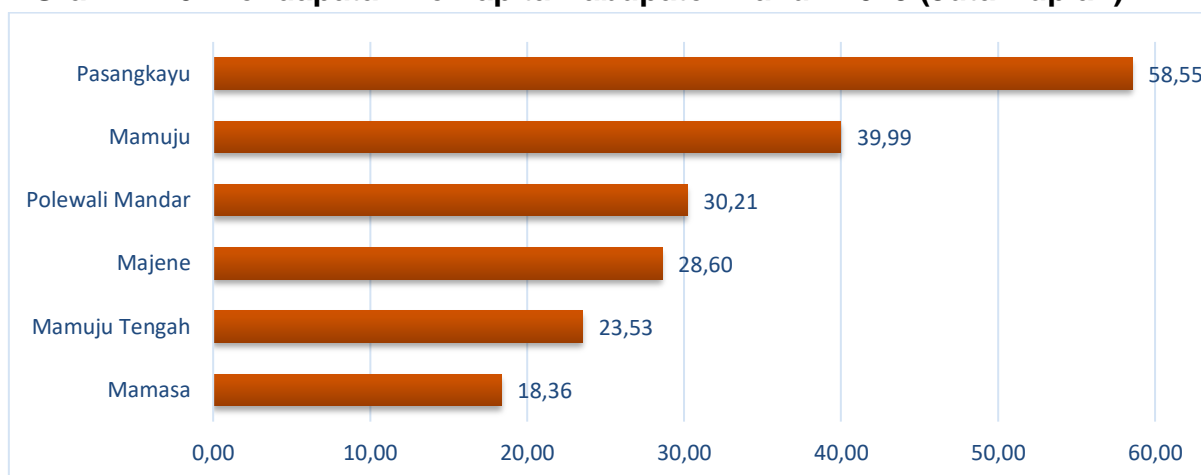
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.

Grafik 2.9 Pendapatan Perkapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.10 Pendapatan Perkapita Kabupaten Tahun 2019 (Juta Rupiah)



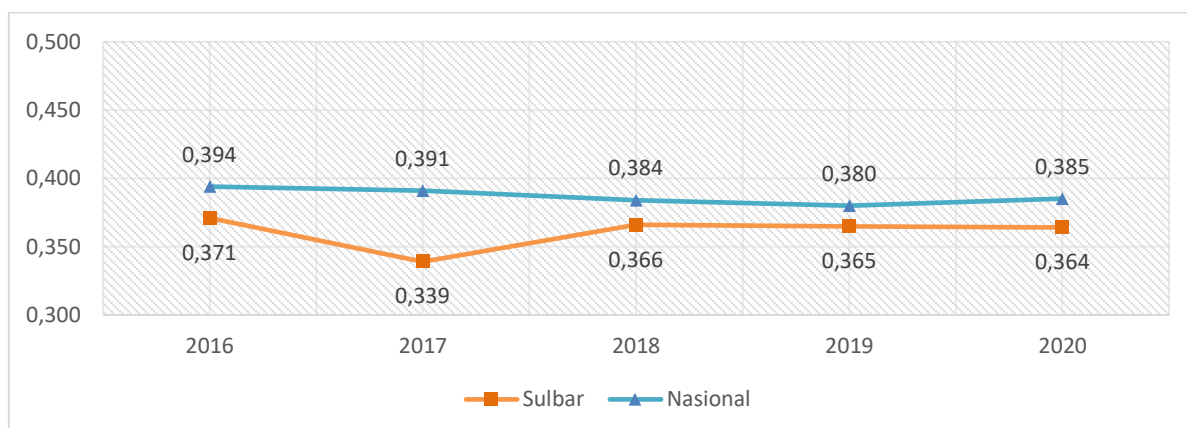
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Pendapatan perkapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2015 pendapatan perkapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 25,73 juta meningkat sebesar 33,59 juta pada tahun 2019 dan masih jauh dibawah rata-rata nasional yang sebesar 59,06 juta. Rasio Pendapatan Perkapita antara Sulbar dan Nasional tahun 2015 sebesar 57,03 persen meningkat tahun 2019 sebesar 56,87 persen. Untuk wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar Kabupaten dimana Pasangkayu sebesar 58,55 juta dan Mamasa hanya sebesar 18,36 juta rupiah. Tingginya pendapatan perkapita masyarakat namun tidak secara rill menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

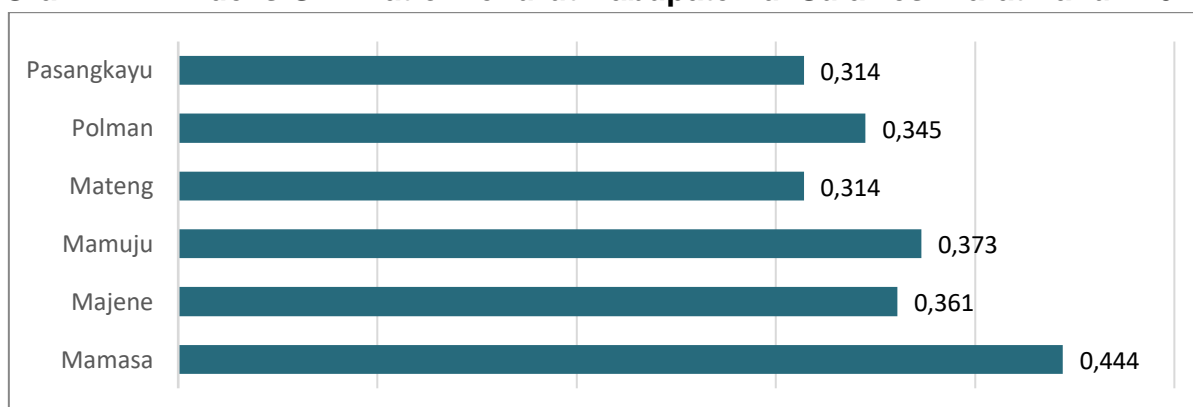
Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) dimana Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,364 Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,365 Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,366, Gini Ratio September 2020 turun sebesar 0,002 poin hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun belum signifikan.

Grafik 2.11 Indeks Gini Ratio di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.12 Indeks Gini Ratio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

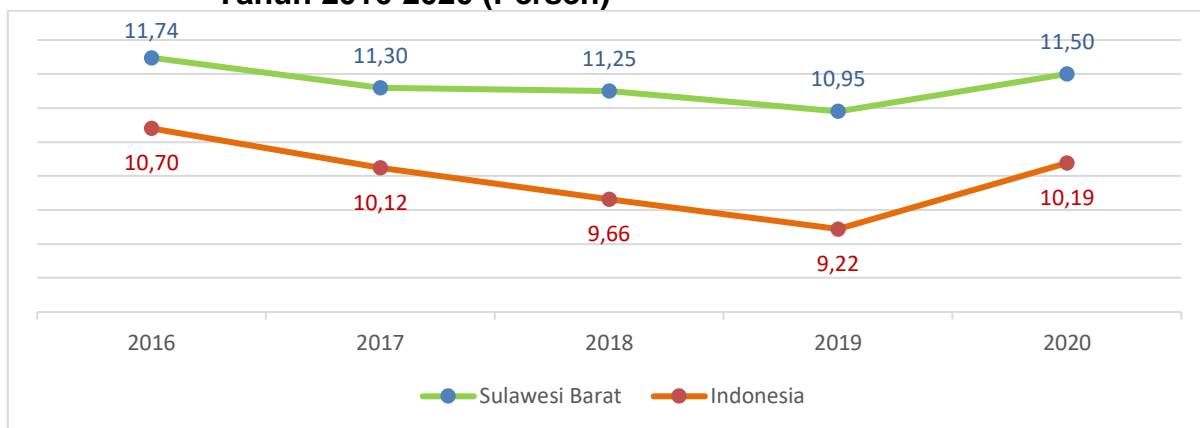
2.2.5 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneeds approach*), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan,

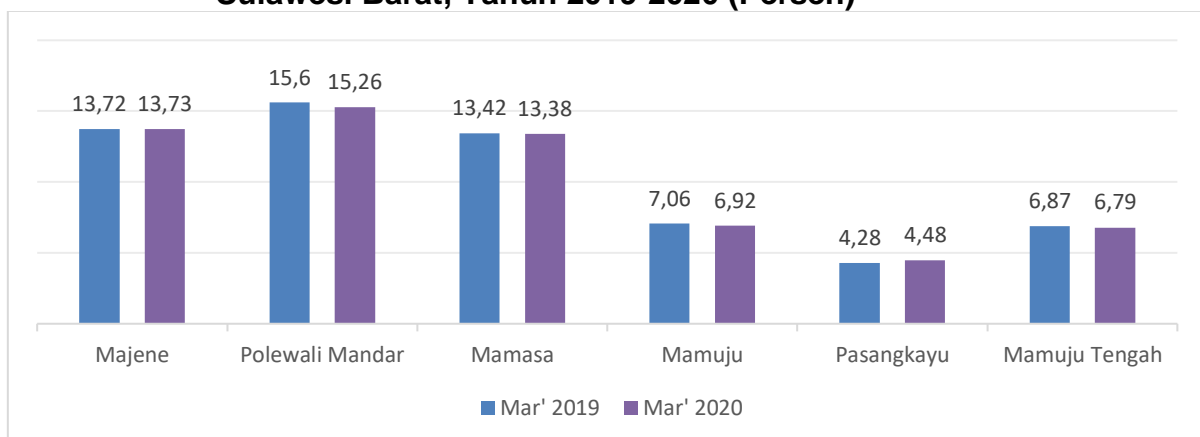
sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluaran perkapitanya dibawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Grafik 2.13 Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.14 Presentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2019-2020 (Persen)

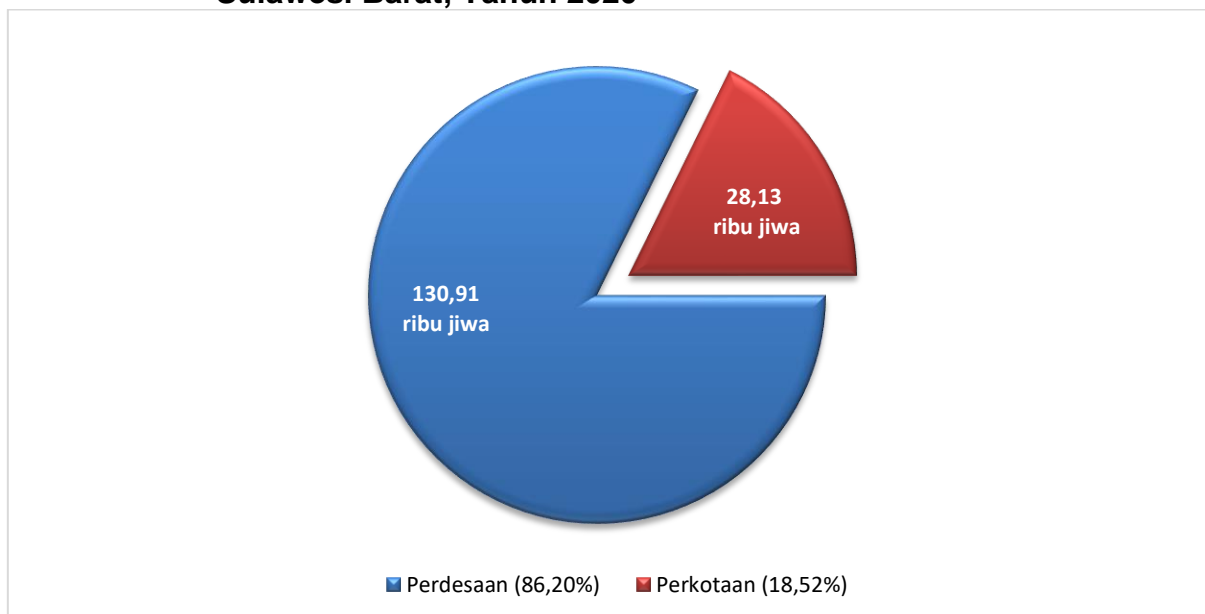


Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Presentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sampai dengan 2020 terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 11,74 persen pada tahun 2016 menjadi 11,50 persen pada tahun 2020. Pencapaian itu sebuah hal positif meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, namun masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 10,19 persen. Rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,05 poin persentase pertahun sedangkan nasional sebesar 0,10 poin persentase pertahun. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 15,26 persen dan terendah berada di Kabupaten Pasangkayu sebesar 4,48 pada Maret 2020.

Rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dari tahun 2015.

Diagram 2.2 Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk miskin perdesaan sebesar 130,91 ribu jiwa atau sekitar 86,20 persen penduduk miskin berada di perdesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 28,13 ribu jiwa atau sekitar 18,52 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan berada di Perdesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang mengalami penurunan tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat (Ribu) Tahun 2016 - 2020

Kabupaten	2016	2017	2018	Mar 2019	Mar 2020
Majene	24,69	23,48	23,53	23,76	24,12
Polewali Mandar	73,04	69,25	69,68	68,86	68,18
Mamasa	21,43	21,14	21,22	21,64	21,86
Mamuju	17,47	19,11	20,42	20,57	20,65
Pasangkayu	7,67	7,96	7,65	7,42	7,95
Mamuju Tengah	8,43	8,82	9,28	9,16	9,25
Sulawesi Barat	152,73	149,76	151,78	151,40	152,01

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.23 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat (persen) Tahun 2016-2020

Kabupaten	2016	2017	2018	Mar 2019	Mar 2020
Majene	14,89	13,94	13,79	13,72	13,73
Polewali Mandar	17,06	16,05	15,97	15,60	15,26
Mamasa	13,90	13,51	13,38	13,42	13,38
Mamuju	6,48	6,88	7,18	7,06	6,92
Pasangkayu	4,82	4,84	4,53	4,28	4,48
Mamuju Tengah	6,83	6,95	7,14	6,87	6,79
Sulawesi Barat	11,74	11,30	11,25	11,02	10,87

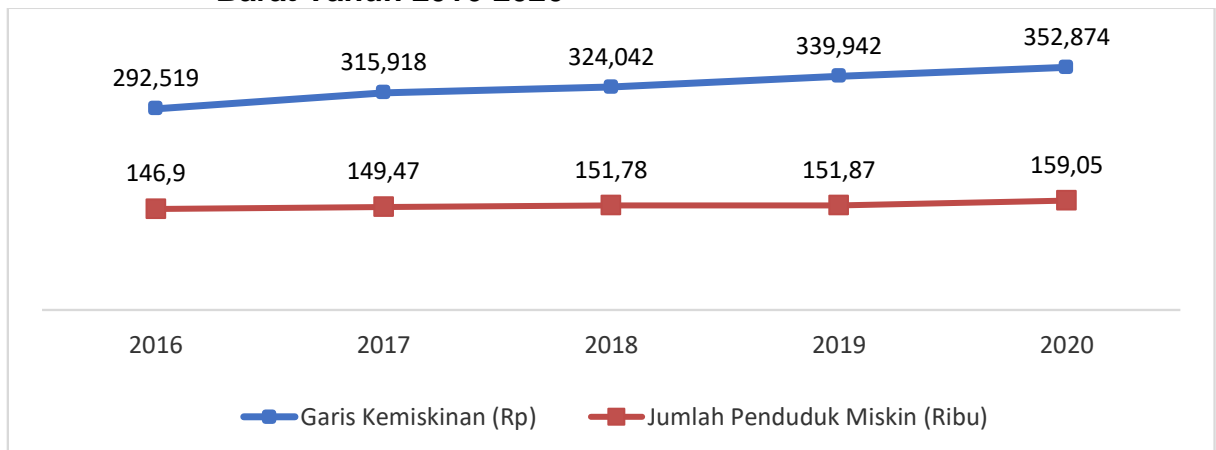
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.24 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat (Rupiah) Tahun 2016-2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	320 726	335 248	330 226	332 145	384 344
Polewali Mandar	337 138	351 856	252 429	259 969	401 057
Mamasa	262 202	239 112	249 103	256 544	273 513
Mamuju	223 150	241 616	366 355	376 827	277 078
Pasangkayu	312 474	328 100	349 522	360 362	354 115
Mamuju Tengah	215 769	335 248	236 699	239 592	255 440
Sulawesi Barat	286 840	226 559	324 042	339 942	352 874

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.15 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

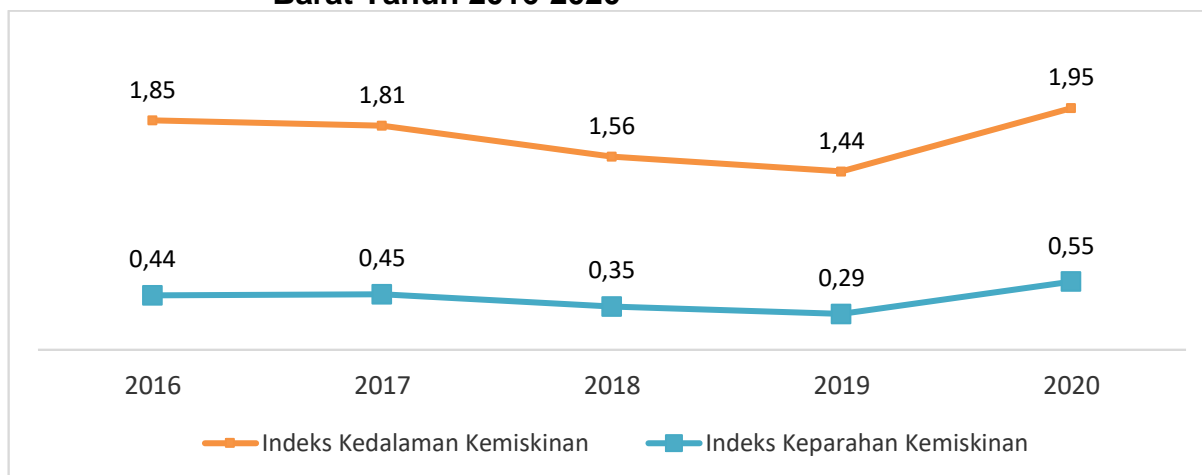


Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Garis Kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 garis kemiskinan sebesar 292.519 rupiah perkapita perbulan, naik pada tahun 2020 sebesar 352.874 rupiah perkapita perbulan. Angka ini menjadi suatu capaian positif meskipun pada saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 146,90 ribu jiwa menjadi 159,05 ribu

jiwa pada tahun 2020. Kenaikan garis kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat mulai menurun yang diakibatkan pandemi covid-19.

Grafik 2.16 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



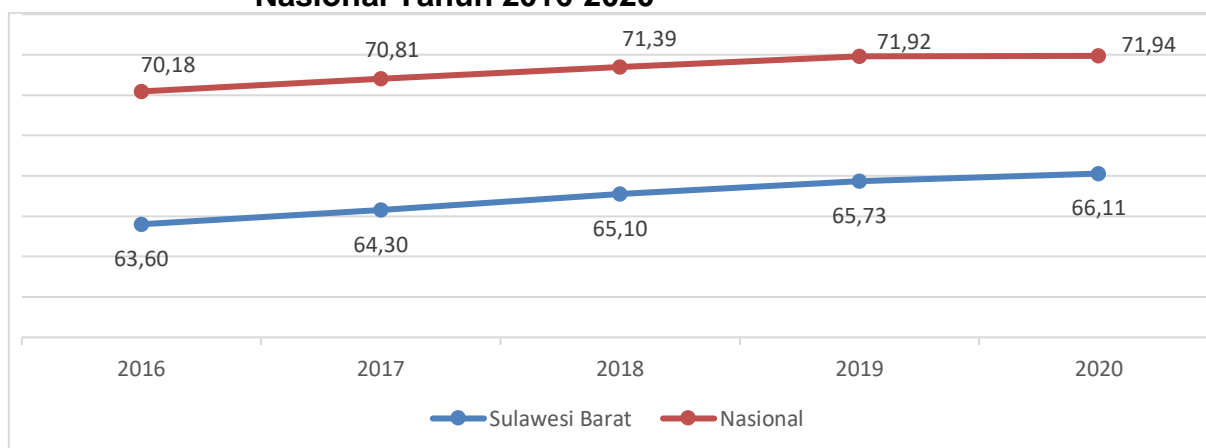
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Barat sebesar 1,95 atau meningkat 0,51 poin dibandingkan September 2019, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Barat sebesar 0,55 meningkat 0,26 poin dibandingkan September 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada September 2020 rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin menyempit.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari sisi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia, Provinsi Sulawesi Barat sudah cukup baik. Hal ini diindikasikan dengan selalu meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019, capaian IPM Sulawesi Barat sebesar 65,73, kondisi ini meningkat menjadi 66,11 pada tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada level Menengah berada pada peringkat ke 31 dari seluruh provinsi tahun 2020. Dari segi pertumbuhan IPM Sulawesi Barat berada pada peringkat ke dua Nasional, dengan pertumbuhan sebesar 0,58 persen sementara IPM Indonesia tumbuh 0,03 persen.

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

IPM Sulawesi Barat masih berada jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 71,94, IPM Nasional ini telah mencapai kategori level tinggi pada tahun 2020. Kabupaten dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 68,15, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 67,79 sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 63,84.

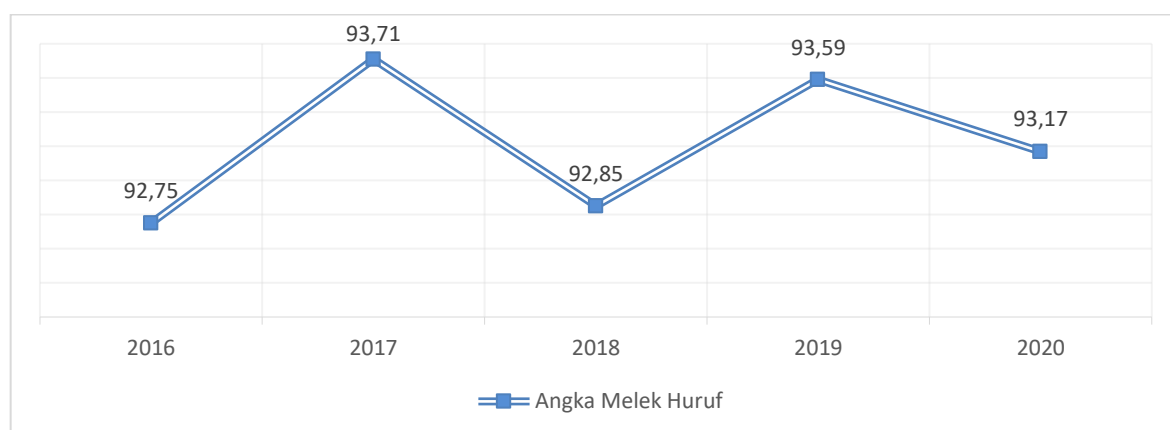
Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	64,80	65,40	66,01	66,59	66,91
Polewali Mandar	65,51	62,35	63,14	63,74	63,84
Mamasa	63,51	63,92	64,66	65,32	66,02
Mamuju	65,65	66,32	67,11	67,72	68,15
Pasangkayu	65,17	65,67	66,60	67,27	67,79
Mamuju Tengah	62,89	63,64	64,43	65,10	65,71
Sulawesi Barat	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.7 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan prosentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin dan atau huruf lainnya.

Grafik 2.17 Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 angka melek huruf sebesar 92,75 persen dan terus mengalami kenaikan sampai sebesar 93,71 di tahun 2017 akan tetapi mengalami penurunan sebesar 92,85 persen di tahun 2018, naik kembali sebesar 93,59 persen di tahun 2019 dan turun kembali sebesar 93,17 persen di tahun 2020.

Tabel 2.26 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2020

Kabupaten	Tahun		
	2018	2019	2020
Majene	94,07	95,20	95,85
Polewali Mandar	90,39	90,98	91,16
Mamasa	94,66	94,21	92,66
Mamuju	93,15	94,65	93,13
Pasangkayu	95,60	96,46	95,13
Mamuju Tengah	93,58	93,84	94,68

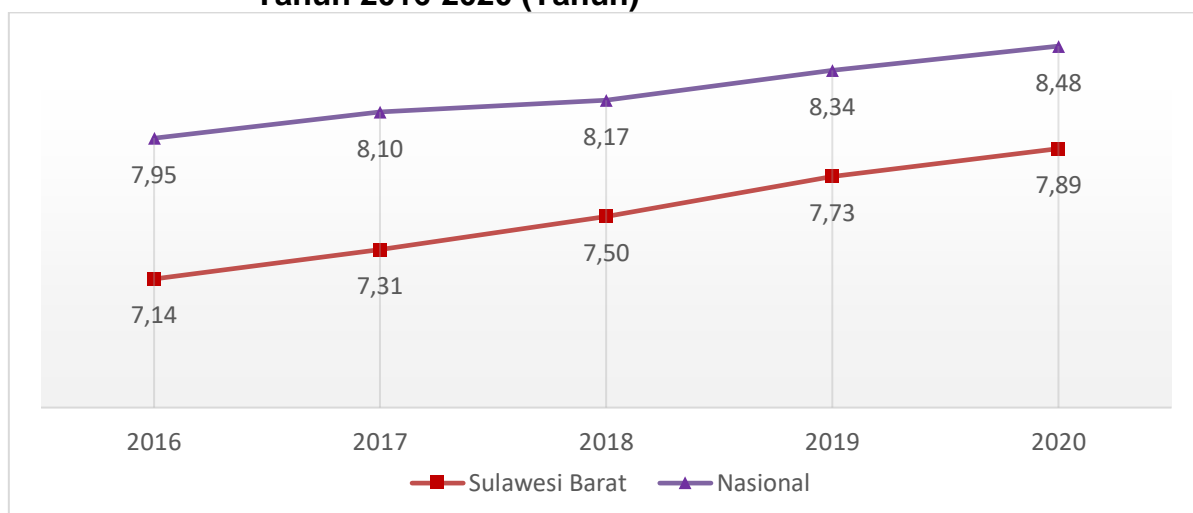
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Angka melek huruf hampir merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, setiap tahunnya masing-masing daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Majene dari 94,07 tahun 2018 menjadi 95,85 di tahun 2020, Kabupaten Mamuju Tengah dari 93,58 tahun 2018 menjadi 94,68 di tahun 2020, serta Kabupaten Polewali Mandar dari 90,39 tahun 2018 menjadi 91,16 di tahun 2020. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Mamasa yang justru mengalami penurunan pada tahun 2018 dari 94,66 menjadi 92,66. Dengan demikian, pada skala provinsi mengalami peningkatan terjadi pada 2018 sebesar 92,85 menjadi 93,17 di tahun 2020 atau naik 0,32 poin.

2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 7,89 tahun, artinya bahwa rata-rata lama sekolah penduduk di Sulawesi Barat yaitu berada pada tingkat SLTP, berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,48 tahun. Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Barat tumbuh 2,53 persen per tahun, sementara nasional tumbuh 1.63 persen per tahun (2016-2020). Untuk wilayah kabupaten, Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kabupaten Majene sebesar 8,65 tahun. Capaian ini tentunya ditunjang oleh majene sebagai pusat pendidikan di Sulawesi Barat.

Grafik 2.18 Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Barat dan Nasional, Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.19 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (Tahun)

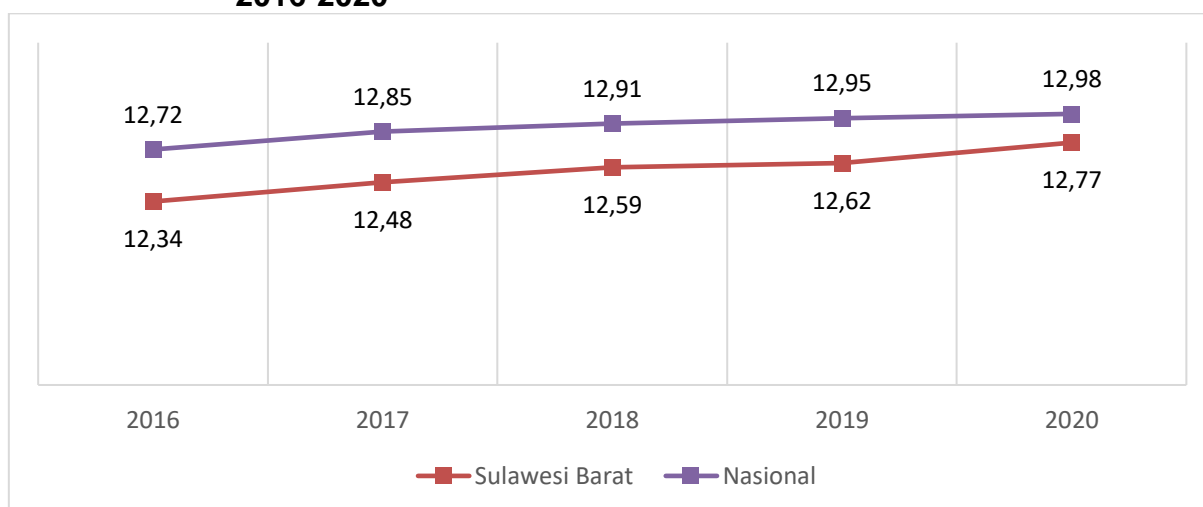
Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	7,81	8,14	8,25	8,52	8,65
Polewali Mandar	6,89	7,09	7,24	7,40	7,41
Mamasa	6,98	7,10	7,22	7,37	7,65
Mamuju	7,21	7,26	7,53	7,69	7,95
Pasangkayu	7,47	7,48	7,68	7,92	7,98
Mamuju Tengah	7,10	7,13	7,23	7,24	7,46
Sulawesi Barat	7,14	7,31	7,50	7,73	7,89

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Sulawesi Barat sebesar 12,77 tahun berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 12,98 tahun. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat tumbuh 1,19 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 2,22 persen per tahun. Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi yaitu Kabupaten Majene dengan angka sebesar 13,61 yang tergolong tinggi bahkan lebih tinggi dari harapan lama sekolah nasional, juga sejalan dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene yang juga tinggi.

Grafik 2.20 Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.21 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, tahun 2016-2020

Kabupaten	Harapan Lama Sekolah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	13,54	13,57	13,58	13,60	13,61
Polewali Mandar	12,96	13,01	13,02	13,05	13,06
Mamasa	11,36	11,41	11,58	11,74	12,05
Mamuju	12,97	13,13	13,14	13,18	13,19
Pasangkayu	11,27	11,37	11,59	11,66	11,93
Mamuju Tengah	11,49	11,57	11,71	11,92	12,23
Sulawesi Barat	12,34	12,48	12,59	12,66	12,77

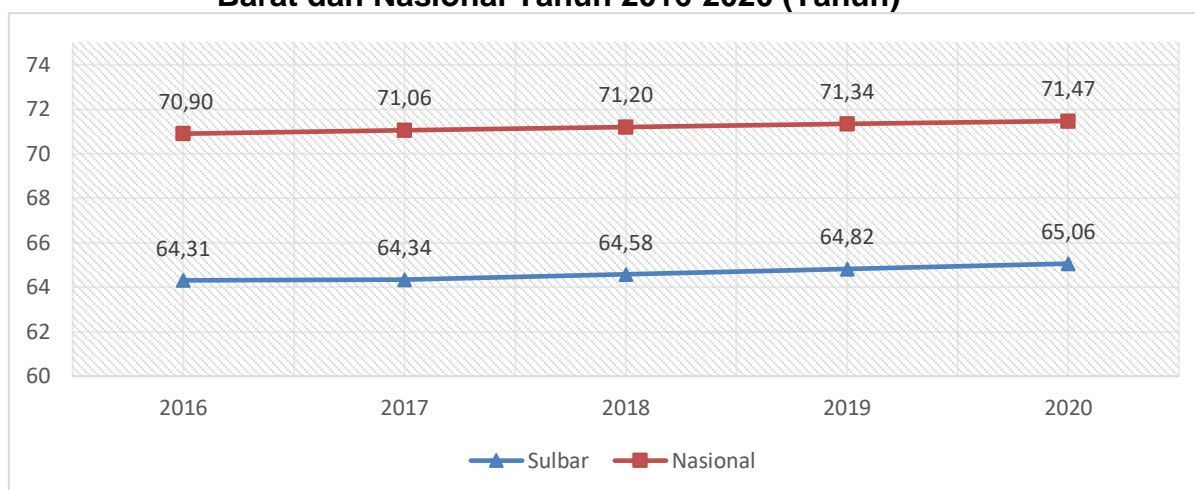
Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.10 Angka Harapan Hidup

Komponen pembentukan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari dimensi kesehatan tergolong masih rendah, dimana angka harapan hidup sebesar 65,06 tahun berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,74 tahun. Angka Harapan Hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,29 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh hanya 0,20 persen per

tahun. Tingginya jumlah kematian ibu (47 kasus) dan jumlah kematian bayi (379 kasus) pada tahun 2016 menjadi salah satu penyebab rendahnya angka harapan hidup, sehingga perlunya peningkatan derajat kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan (air bersih dan sanitasi), perilaku kesehatan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan.

Grafik 2.22 Angka Harapan Hidup/ Umur Harapan Hidup saat Lahir Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.27 Angka Harapan Hidup/ Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, 2016-2020 (Tahun)

Kabupaten	Angka Harapan Hidup				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	60,64	60,79	61,05	61,30	61,56
Polewali Mandar	61,65	61,76	61,97	62,18	62,38
Mamasa	70,43	70,48	70,62	70,75	70,87
Mamuju	66,51	66,65	66,94	67,23	67,52
Pasangkayu	65,13	65,33	65,62	65,91	66,20
Mamuju Tengah	67,36	67,52	67,79	68,06	68,30
Sulawesi Barat	64,31	64,34	64,58	64,82	65,06

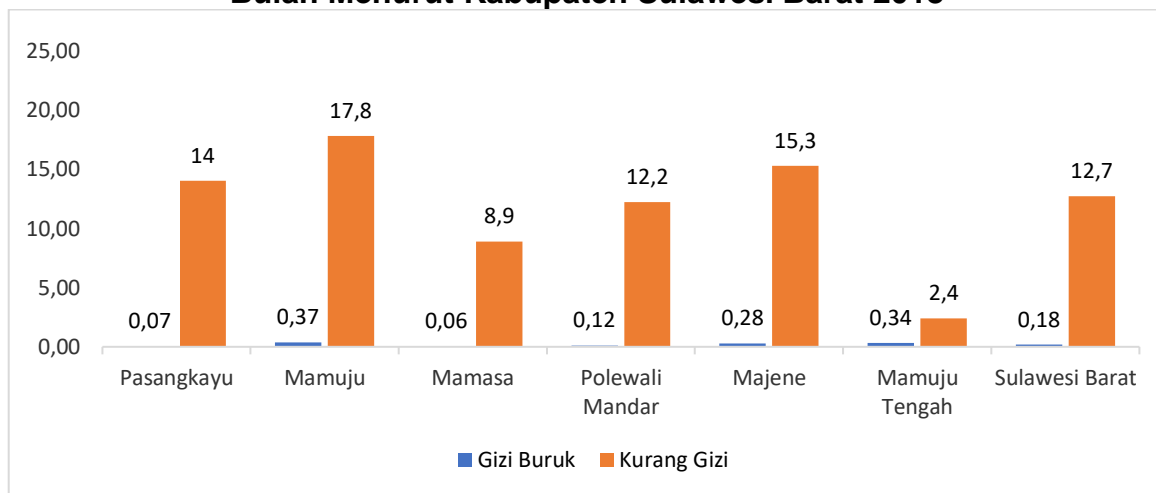
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.2.11 Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk merupakan kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Persentase Balita Gizi buruk

di Sulawesi Barat belum menunjukkan angka yang menggembirakan dimana pada tahun 2018 menurun dengan capaian sebesar 0,18 persen.

Grafik 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Umur 0 – 59 Bulan Menurut Kabupaten Sulawesi Barat 2018



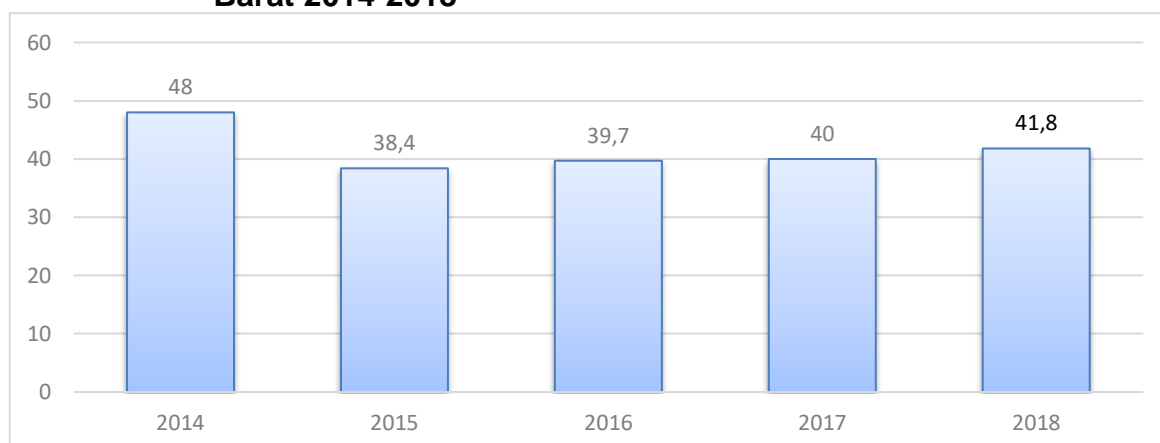
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.2.12 Stunting

Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur. Untuk mengetahui pengukuran Stunting dan Gizi buruk tentunya memiliki indikator yang berbeda, stunting sendiri dapat dilihat pengukurannya melalui tinggi badan menurut umur. Dari data Kementerian Kesehatan melalui Riset Kesehatan dasar Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Barat menduduki urutan kedua secara nasional angka stunting tertinggi mencapai 48,02 % setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur 51,73 %, sedangkan di enam Kabupaten adalah yang paling tertinggi adalah Kabupaten Majene 58,6%, Kabupaten Polman 48,5%, Mamuju Utara/Pasangkayu 47,8%, Mamuju 47,3% dan Mamasa 37,6%, sementara untuk Gizi Buruk yang paling tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mandar 32,5%, Mamuju 31,1%, Mamuju Utara/Pasangkayu 29,4%, Majene 27,5% dan Mamasa 16,0%. Sementara data Kementerian Kesehatan Tahun 2018 angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 41,0% artinya sejak tahun 2013 hingga 2018 terjadi penurunan angka stunting 7,02% yang sebaran wilayahnya terdiri dari Kabupaten Mamasa 43,2%, Kabupaten Majene 45,9%, Pasangkayu 34,8%, Mamuju tengah

41,6% dan Polewali Mandar 38,2%, sedangkan data Gizi buruk di enam Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat adalah yang paling tertinggi di Kabupaten Mamuju 0,37 persen, Mamuju tengah 0,34 persen, Majene 0,28%, Polewali Mandar 0,12 persen, Pasangkayu 0,07 persen dan Mamasa 0,06 persen berdasarkan jumlah kelahiran hidup balita dari umur 0-59 bulan di tahun 2018.

Grafik 2.24 Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi Barat 2014-2018



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.28 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Bidang Kesehatan Tahun 2018

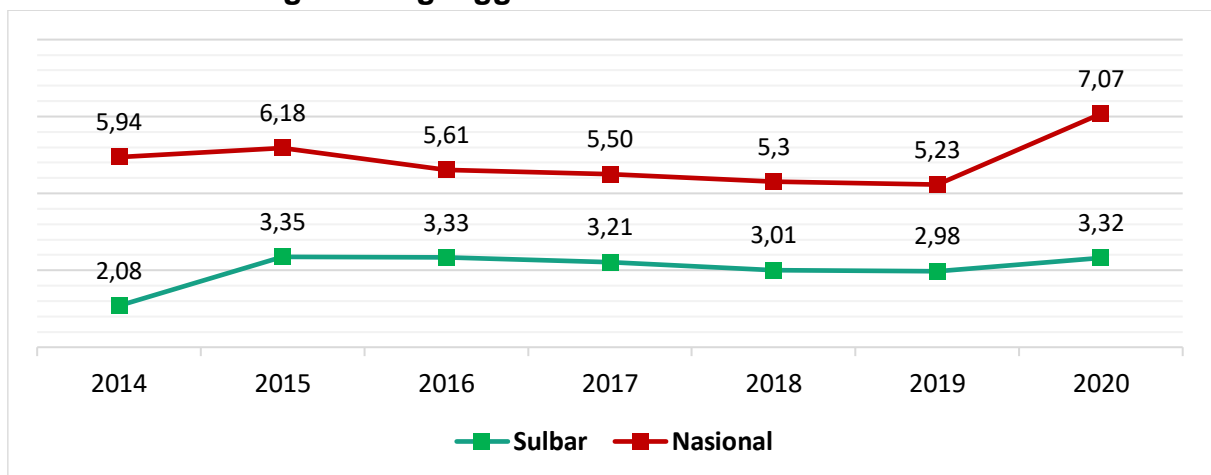
URAIAN KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	%	19,8
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	19,8
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	%	9,5
Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	22,1
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	76,75
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	78,3
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	75,8
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	80,6
Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	7
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	%	1,179
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100
Unmet need pelayanan kesehatan		N/A

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.2.13 Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja

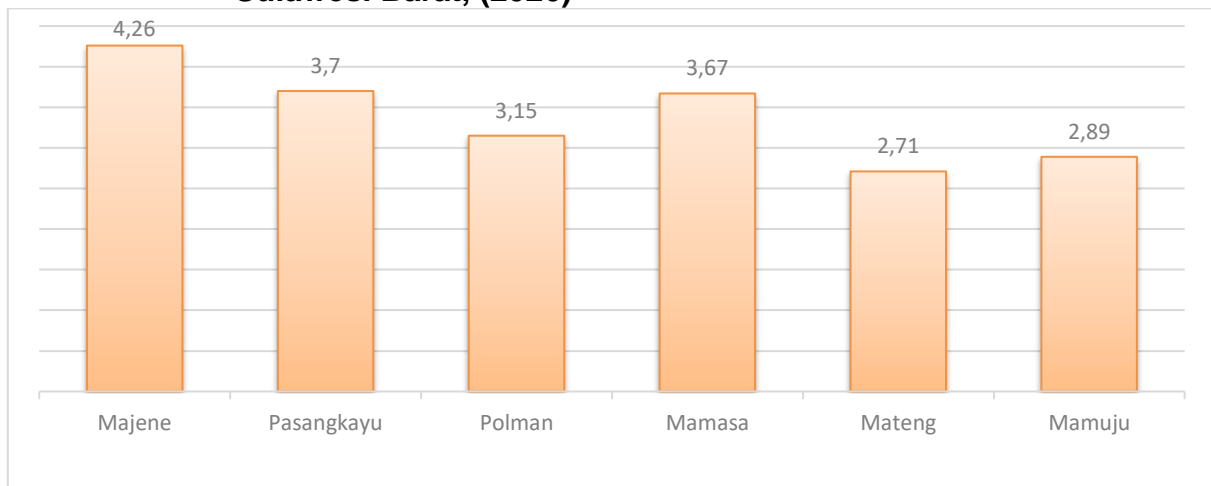
Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) menunjukkan angka yang rendah apabila dibandingkan dengan angka TPT nasional yakni sebesar 3,32 persen sedangkan nasional 7,07 persen (sulbar.bps.go.id) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Barat mencapai 11,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa TPT yang rendah belum berdampak signifikan dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Grafik 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, (2020)



Sumber: BPS, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021*

Tabel 2.29 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016-2020

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas	897 964	908 506	934 281	956 647	991 723
Bekerja	624 182	622 641	619 395	641 613	672 986
Pengangguran	21 489	19 132	20 227	21 054	23 132
Angkatan Kerja	645 671	641 773	639 622	662 667	692 118
Bukan Angkatan Kerja	252 293	266 283	294 659	293 980	295 605
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,33	3,21	3,16	3,18	3,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,90	66,96	68,46	69,27	70,19

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 672,986 ribu orang, atau sebesar 97,24 persen dari angkatan kerja di Sulawesi Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, penduduk yang bekerja di Sulawesi Barat bertambah sebanyak 31,373 ribu orang atau meningkat 4,89 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 3,32 persen, artinya dari sekitar 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, 3 orang diantaranya adalah pengangguran. Angka ini naik jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dimana pada saat itu TPT-nya sebesar 3,18 persen.

2.2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2014 adalah 97,92 persen turun di tahun 2015 sebesar 96,65 dan naik pada tahun 2018 menjadi 96,84 persen. Dari angka tersebut, terdapat 96,84 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 3,16 persen masih mencari kerja atau pengangguran.

Tabel 2.30 Rasio Penduduk yang bekerja

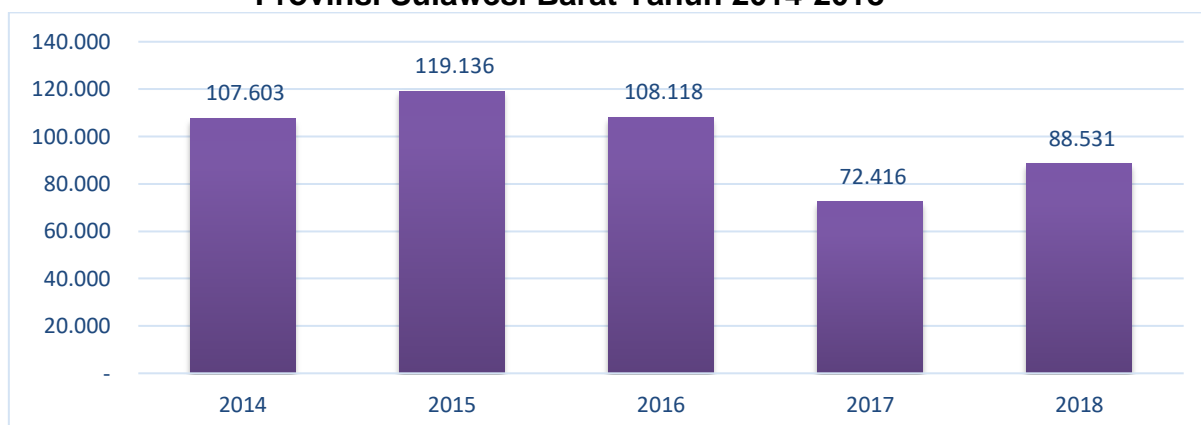
Keterangan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk yang bekerja	Jiwa	624 182	595 004	619 395	641 613	672 986
Angkatan Kerja	Jiwa	645 671	614 748	639 622	662 667	696 118
Rasio Penduduk yang bekerja	%	96,67	96,79	96,84	96,82	96,68

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021

2.2.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 setiap tahunnya di Sulawesi Barat, Berdasarkan data di bawah ini, Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tertinggi berada di tahun 2015 yang sebesar 119.136 jiwa, namun berhasil diturunkan pada tahun 2017 hingga menjadi 72.416 jiwa walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 88.531 jiwa. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.27 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018



Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kepuasan Masyarakat					Ada	Ada
Persentase PAD terhadap pendapatan		17,95	18,56	16,44	16,49	17,78
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	87,50	72,73	73,31	81,90	82,00
Penguatan Cadangan Pangan	%	50,87	60,07	30,05	33,31	33,16
Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	6,90	13,79	12,59	14,84	14,27

Sumber : Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.32 Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Sulawesi Barat

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	(%)	9,74	9,85	10,76	11,07	11,14
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	(%)	7,44	7,48	7,83	7,81	7,53
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	(%)	0,35	0,35	0,34	0,32	0,32
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	(%)	2,06	2,21	2,3	2,26	2,28
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	(%)	0,24	0,23	0,24	0,23	0,23
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	(%)	8.73	6.46	2.08	5.96	3.11
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	(%)	10,50	10,43	10,46	10,38	10,29
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	(%)	10,37	10,32	9,53	9,95	9,70
Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	(%)	8.73	6.46	2.08	5.96	3.11
Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

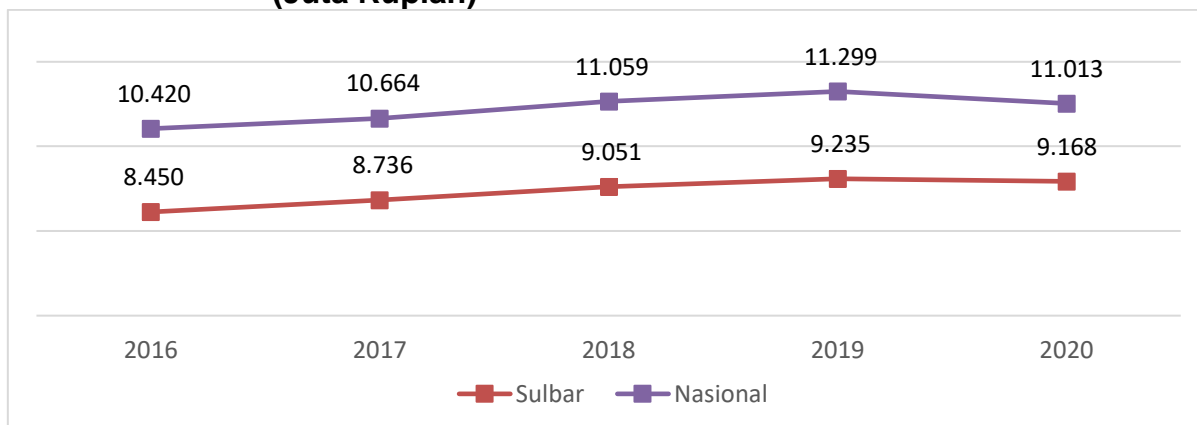
2.3 Aspek Daya Saing

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur, juga berhadapan langsung dengan Selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional (ALKI II). Disamping itu, Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tentunya sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional sulawesi maupun nasional.

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran perkapita merupakan kemampuan daya beli masyarakat yang menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran perkapita di Sulawesi Barat sebesar 8,260 juta perkapita pertahun di tahun 2015 naik menjadi 9,235 juta perkapita pertahun pada tahun 2019 dan masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 11,299 juta perkapita pertahun pada tahun 2019. Pengeluaran per kapita Sulawesi Barat tumbuh 2,49 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 2,67 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan pengeluaran perkapita di Sulawesi Barat.

Grafik 2.28 Pengeluaran Perkapita Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.33 Pengeluaran Perkapita menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat, Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)

Kabupaten	Pengeluaran Perkapita				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	9.441	9.559	9.051	10.029	10.056
Polewali Mandar	7.559	7.947	9.904	8.598	8.580
Mamasa	7.231	7.353	8.355	7.769	7.747
Mamuju	8.689	9.019	7.597	9.535	9.500
Pasangkayu	10.264	10.577	9.308	11.094	11.111
Mamuju Tengah	7.521	7.931	10.915	8.501	8.414
Sulawesi Barat	8.450	8.736	8.243	9.235	9.168

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2020 melambat hingga -2,42 persen. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berimbas kepada kegiatan perekonomian di Sulawesi Barat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi terkontraksi. Perkembangan PDRB Sulawesi Barat berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 20,18 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 45,91 triliun rupiah pada tahun 2020 sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 20,78 triliun rupiah meningkat menjadi Rp 32,08 triliun rupiah. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB telah mencapai 33,31 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 23,82 juta rupiah.

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan, baik dengan provinsi atau daerah lainnya yang berdekatan maupun nasional atau internasional. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga perkapita (angka konsumsi RT perkapita) Penduduk Sulawesi Barat memiliki

pola konsumsi yang relatif beragam. Pada tahun 2020, menurut golongan pengeluaran tertinggi, terdapat 25,20 persen penduduk dengan antara Rp.500.000,- hingga Rp.749.999,- per kapita sebulan. Sedangkan presentase terendah pada golongan pengeluaran kurang dari Rp.200.000,- sebesar 0,21 persen. Pengeluaran per kapita sebulan di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Presentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Sebulan di Prov. Sulawesi Barat, 2020

<200.000	0,21
200.000-299.999	5,81
300.000-499.999	24,55
500.000-749.999	25,20
750.000-999.999	15,74
1.000.000-1.499.999	17,02
1.500.000+	11,48
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.35 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Provinsi	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Barat	13.966,45	14.632,82	15.370,06	16.029,78	16.114,87

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi berada di Kabupaten Pasangkayu. Dan yang paling rendah berada di Kabupaten Mamasa. Berikut tabel pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan menurut Kabupaten.

Tabel 2.36 Pengeluaran Rata-rata Perkapita sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Rupiah), Tahun 2018 dan 2019

Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Majene	439 781	436 271	372 730	412 845	812 511	849 115
Polewali Mandar	446 767	438 086	403 320	396 024	850 087	834 110
Mamasa	383 632	377 680	277 562	352 928	661 194	730 608
Mamuju	432 473	475 919	375 629	481 937	808 102	957 856
Pasangkayu	516 916	551 553	499 912	515 244	1 016 828	1 066 797
Mamuju Tengah	458 438	476 725	450 459	499 786	908 897	976 512
Sulawesi Barat	445 427	457 059	395 586	436 701	841 013	893 761

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.3.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.37 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks yang diterima petani (It)	127,40	131,10	139,42	142,70	122,58
Indeks yang dibayarkan petani (Ib)	118,63	122,60	125,70	127,58	106,32
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,40	106,93	110,92	111,85	115,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Secara umum, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan periode yang sama. Nilai tukar produk pertanian tahun 2020 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.38 Nilai Tukar Petani (NTP) (bulan) di Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020

Bulan	Nilai Tukar Petani				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	106,05	106,58	108,89	110,60	109,55
Februari	106,04	106,41	108,16	109,15	111,80
Maret	106,11	105,44	110,12	109,56	110,42
April	106,65	106,00	110,86	111,09	108,91
Mei	106,61	105,63	113,32	112,01	106,41
Juni	107,51	104,65	112,17	113,01	104,34
Juli	107,14	104,42	111,77	113,25	104,76
Agustus	107,93	106,07	111,56	112,29	107,25
September	108,60	107,57	111,43	112,19	109,78
Oktober	109,79	109,05	110,50	112,23	111,80
November	108,61	110,96	112,42	112,68	113,08
Desember	107,70	110,38	109,78	114,04	115,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

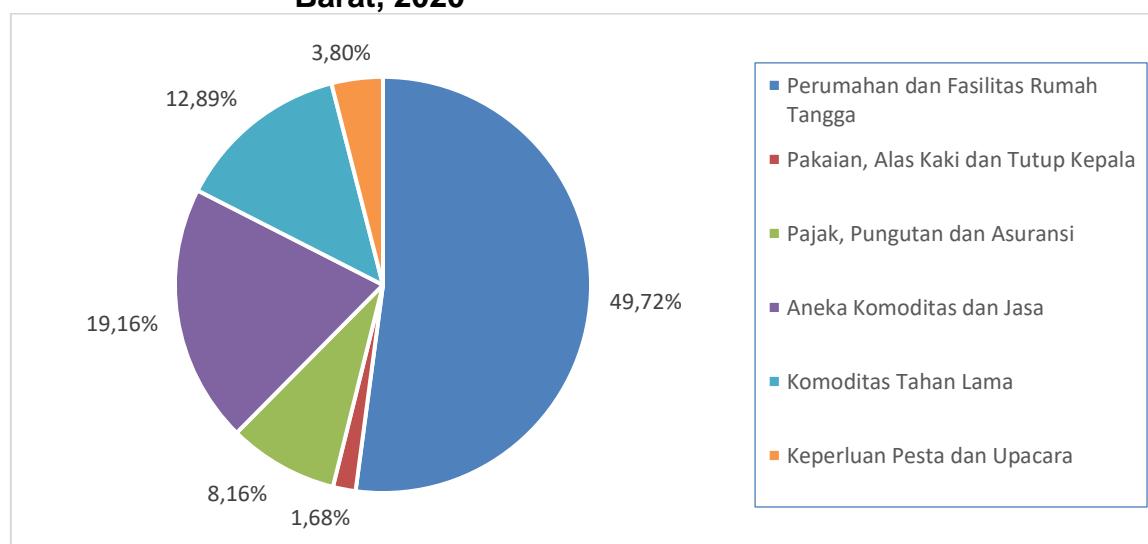
Selama Tahun 2016 NTP Sulawesi Barat terlihat berfluktuatif nilai NTP paling tinggi sebesar 109,79 pada Oktober 2016 dan 115,30 pada Desember 2020, dan sepanjang tahun 2016 dan 2019 nilai NTP Sulawesi Barat selalu berada di atas 100

baik itu dilihat secara tahunan ataupun bulanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat sudah baik dan tetap harus terus dikembangkan mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan tingkat serapan Tenaga Kerja paling tinggi.

2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan yang paling tinggi adalah pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan dan air, sekitar 51,18 persen dan paling rendah adalah pengeluaran untuk pesta dan upacara sekitar 3,18 persen.

Diagram 2.3 Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.39 Pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat

Kelompok Komoditas Non Pangan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perumahan, dan fasilitas rumah tangga	169 575	51,64	158 994	48,37	197 395	51,18	190 471	48,15	217 122	49,72
Aneka komoditas dan jasa	66 496	20,25	70 500	21,45	75 310	19,52	77 761	19,66	83 691	19,16
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	20 615	6,28	22 175	6,75	24 926	6,46	27 418	6,93	27 350	1,68
Komoditas tahan lama	45 549	13,87	40 674	12,37	49 722	12,89	60 388	15,27	56 307	12,89
Pajak, pungutan, dan asuransi	16 534	5,04	26 724	8,13	26 118	6,77	26 732	6,76	35 616	8,16
Keperluan pesta dan upacara	9 587	2,92	9 616	2,93	12 247	3,18	12 816	3,24	16 616	3,80
Total	328 356	100	328 683	100	385 717	100	395 586	100	436 701	100

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021

Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dalam kurun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pengeluaran makanan lebih besar dibanding pengeluaran Bukan Makanan. Pengeluaran non-pangan per kapita di tahun 2016, sebesar Rp. 328.356,- meningkat sebesar Rp. 436.701,- pada tahun 2020.

Tabel 2.40 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (rupiah), 2019 dan 2020

Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Majene	439 781	436 271	372 730	412 845	812 511	849 115
Polewali Mandar	446 767	438 086	403 320	396 024	850 087	834 110
Mamasa	383 632	377 680	277 562	352 928	661 194	730 608
Mamuju	432 473	475 919	375 629	481 937	808 102	957 856
Pasangkayu	516 916	551 553	499 912	515 244	1 016 828	1 066 797
Mamuju Tengah	458 438	476 725	450 459	499 786	908 897	976 512
Sulawesi Barat	445 427	457 059	395 586	436 701	841 013	893 761

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.41 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (rupiah), 2019 dan 2020

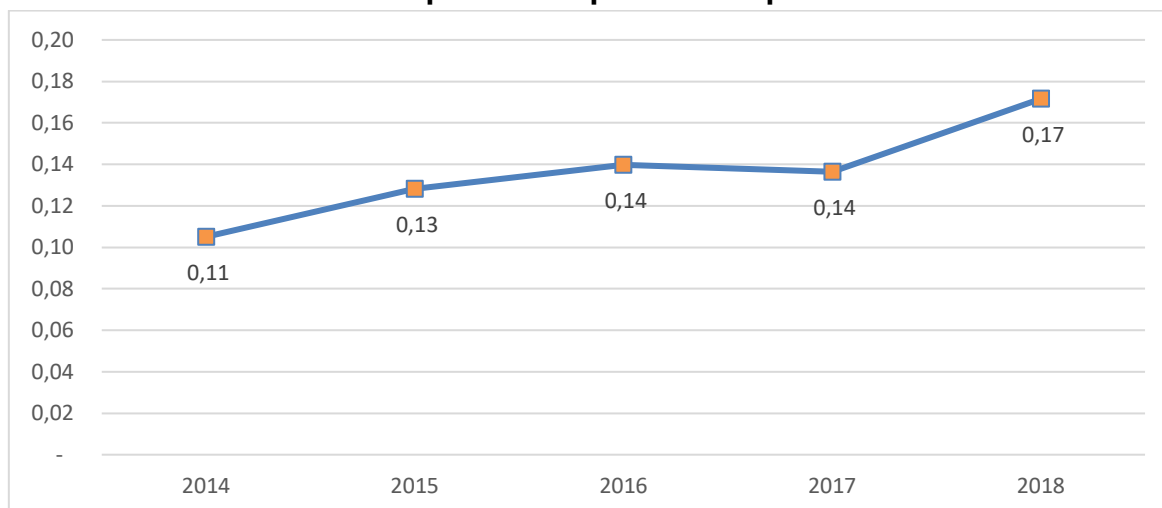
Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan	
	2019	2020	2019	2020
Majene	54,13	51,38	45,87	48,62
Polewali Mandar	52,56	52,52	47,44	47,48
Mamasa	58,02	51,69	41,98	48,31
Mamuju	53,52	49,69	46,48	50,31
Pasangkayu	50,84	51,70	49,16	48,30
Mamuju Tengah	50,44	48,82	49,56	51,18
Sulawesi Barat	52,96	51,14	47,04	48,86

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.3.4 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB

Ekspor dan impor adalah indikator keterbukaan ekonomi yang menunjukkan keterkaitan aktivitas ekonomi suatu daerah/negara dengan daerah/negara lain. Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB dapat digunakan untuk melihat kontribusi aktivitas perekonomian suatu daerah dengan daerah lain terhadap PDRB. Selama kurun waktu 2014-2018, keterbukaan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat relatif rendah tetapi memiliki kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan oleh rasio ekspor-impor Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB, tahun 2014 sebesar 0,11 meningkat menjadi 0,17 tahun 2018.

Grafik 2.29 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB



Sumber: BPS, PDRB Sulawesi Barat menurut Pengeluaran 2014-2018

2.3.5 Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas di suatu daerah akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat, berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi di Sulawesi Barat. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi terganggu. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah.

Tabel 2.42 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019

Kepolisian Resort	2015	2016	2017	2018	2019
Majene	280	322	289	333	262
Polewali Mandar	1 151	904	714	434	794
Mamasa	164	125	104	126	137
Mamuju	498	478	390	774	348
Pasangkayu	474	467	386	447	414
Sulawesi Barat	2 290	2 410	2 286	2 139	3 698

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Selama tahun 2015-2019, jumlah tindak pidana di Kabupaten Polewali Mandar memiliki tren menurun, dan untuk 2019 mengalami peningkatan. Sama dengan Kabupaten Pasangkayu, yang trennya terus menurun sepanjang tahun 2015-2017. Berbeda dengan 3 kabupaten lainnya yaitu Majene dan Mamuju yang mengalami penurunan pada tahun 2019, sementara Mamasa mengalami meningkat di tahun 2019.

Tabel 2.43 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2019

Kepolisian Resort	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)		
	2017	2018	2019
Majene	71	62	70
Polewali Mandar	56	52	63
Mamasa	69	71	82
Mamuju	78	53	47
Pasangkayu	64	51	94
Sulawesi Barat	58	54	68

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.44 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2019

Kepolisian Resort	2017	2018	2019
Majene	171	194	151
Polewali Mandar	165	99	179
Mamasa	66	79	85
Mamuju	140	270	119
Pasangkayu	234	263	237
Sulawesi Barat	172	158	268

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

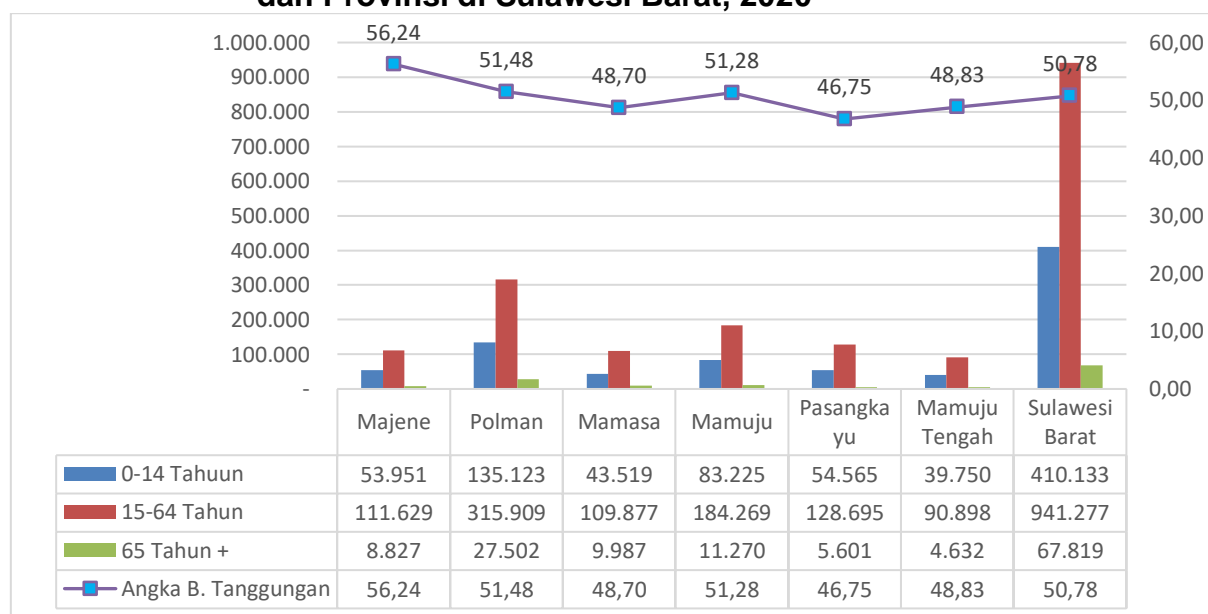
2.3.6 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah sudah maju ataupun sebaliknya. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk

yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Melalui pengelompokan penduduk berdasarkan usia maka dapat diketahui angkat beban tanggungan di Sulawesi Barat. Angka beban tanggungan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 50,78 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum/tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) Tahun 2020. Beban tanggungan tertinggi di Kabupaten Majene sebesar 56,24 dan terendah di Kabupaten Pasangkayu sebesar 46,75 di Tahun 2020. Adapun grafik beban tanggungan di Sulawesi Barat seperti yang ada di bawah ini.

Grafik 2.30 Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat, 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang dituangkan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam dan Undang Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12 mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada peningkatan sumberdaya manusia Indonesia.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2016 s.d. 2020 yang melebihi angka seratus persen hal tersebut menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 tahun ataupun anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	SD	SMP	SMA
2020	106,05	84,67	84,36
2019	107,32	82,71	84,10
2018	108,56	82,36	84,48
2017	110,19	83,02	80,34
2016	106,23	81,00	83,49

Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), salah satu indikator lainnya untuk mengukur keberhasilan pendidikan yaitu Angka Partisipasi Murni. APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Adapun tabel Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan tahun 2016–2020 sebagai berikut.

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2016 - 2020

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD	SMP	SMU
2020	95,80	69,98	58,05
2019	95,86	69,36	57,64
2018	95,83	69,43	57,58
2017	95,51	69,40	57,46
2016	95,41	69,10	57,08

Sumber: BPS, bps.go.id

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Persentase APM di Sulawesi Barat masih menunjukkan angka di bawah seratus persen. Hal itu berarti bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah tepat waktu. Dari tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan sehingga dapat dipastikan anak usia sekolah di Sulawesi Barat khususnya jenjang Sekolah Dasar telah mengenyam pendidikan. Terkait APM SMP dan SMU pertumbuhannya selalu meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Peningkatan ini terjadi karena intervensi pendidikan khususnya program kembali bersekolah yang dicanangkan oleh Pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Selama kurun waktu sekitar lima tahun terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Barat yang digambarkan dengan Angka Partisipasi Sekolah relatif meningkat.

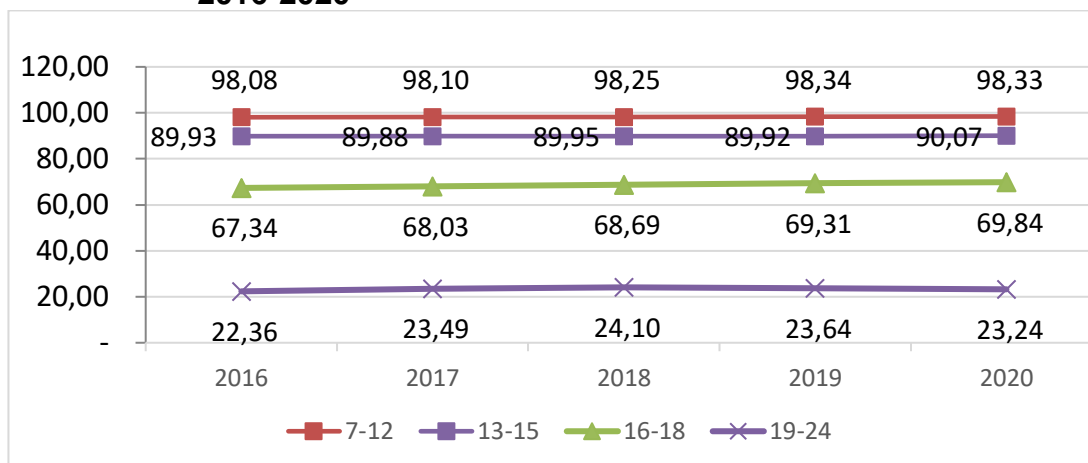
Tabel 2.47 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	7-12	13-15	16-18	19-24
1.	2020	98.33	90.07	69.84	23.24
2.	2019	98.34	89.92	69.31	23.64
3.	2018	98.25	89.95	68.69	24.10
4.	2017	98.10	89.88	68.03	23.49
5.	2016	98.08	89.93	67.34	22.36

Sumber: BPS, bps.go.id

Angka Partisipasi Sekolah merupakan Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Barat pada jenjang SD dan SLTP sudah cukup memuaskan namun pada tingkat SLTA, Angka Partisipasi Sekolah masih sangat rendah yaitu sebesar 69,84 persen.

Grafik 2.31 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, bps.go.id

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai Pada tingkat pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SLTP) tahun 2019, memiliki jumlah gedung

sekolah sebanyak 1.326 unit untuk SD dan 373 unit untuk tingkat SMP, dengan jumlah guru masing-masing 12.918 orang dan 5.143 orang dengan jumlah murid 154.304 orang murid untuk SD dan 60.341 untuk SMP.

Sementara pada jenjang pendidikan menengah, yang terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah sekolah 137, jumlah siswa 29.487 orang dan jumlah guru sebesar 2.312 orang. Untuk SMA dengan jumlah sekolah sebesar 88 unit, jumlah murid sebesar 31.877 orang dan jumlah guru sebanyak 2.054 orang. Rasio murid terhadap sekolah terbesar pada jenjang pendidikan SMA dimana rasionya sebesar 362,24. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya sarana pendidikan seperti sekolah yang ada di Sulawesi Barat terutama pada jenjang pendidikan SMA.

Tabel 2.48 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	171	20 182	1 873	10,78	118,02
Polewali Mandar	333	44 710	3 492	12,80	134,26
Mamasa	261	17 230	2 652	6,50	66,02
Mamuju	309	33 097	2 782	11,90	107,11
Pasangkayu	135	19 519	1 355	14,41	144,59
Mamuju Tengah	116	13 960	1 142	12,22	120,34
Sulawesi Barat	1 325	148 698	13 296	11,18	112,22

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.49 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	37	7.759	606	12,80	209,70
Polewali Mandar	86	17.444	1.422	12,27	202,84
Mamasa	99	9.050	1.220	7,42	91,41
Mamuju	66	11.810	918	12,86	178,94
Pasangkayu	49	7.704	632	12,19	157,22
Mamuju Tengah	37	4.803	619	7,76	129,81
Sulawesi Barat	374	58.570	5.417	10,81	156,60

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.50 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	16	5.322	434	13,05	335,25
Polewali Mandar	28	9.572	672	14,86	332,97
Mamasa	38	4.619	490	9,45	117,45
Mamuju	24	5.514	391	14,61	239,21
Pasangkayu	14	2.356	192	11,34	163,64
Mamuju Tengah	13	1.515	158	10,92	124,07
Sulawesi Barat	133	28.898	2.337	12,37	217,28

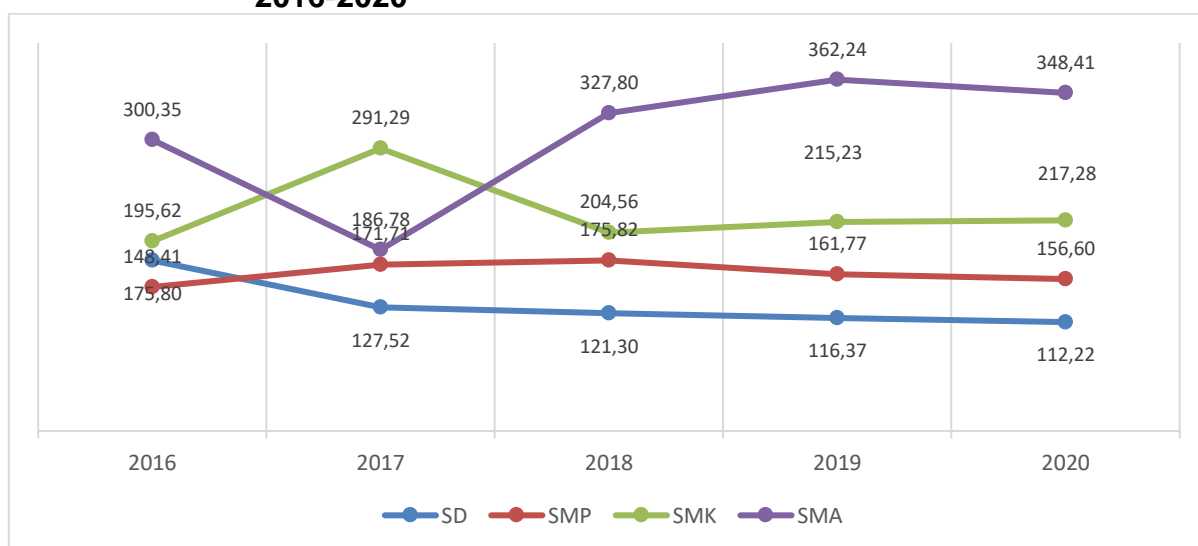
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.51 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	7	3.732	270	14,53	543,71
Polewali Mandar	17	8.068	506	17,36	493,35
Mamasa	21	4.223	328	13,78	208,67
Mamuju	21	6.767	451	16,42	344,10
Pasangkayu	12	4.655	318	14,63	387,58
Mamuju Tengah	10	3.215	242	14,70	342,50
Sulawesi Barat	88	30.660	2.115	14,50	348,41

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.32 Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Provinsi Sulawesi Barat memiliki 22 perguruan tinggi swasta yang terdiri dari 5 (lima) universitas, 4 (empat) akademi dan 13 (tiga belas) sekolah tinggi serta 1 (satu) perguruan tinggi negeri yaitu universitas Sulawesi Barat dan satu Sekolah

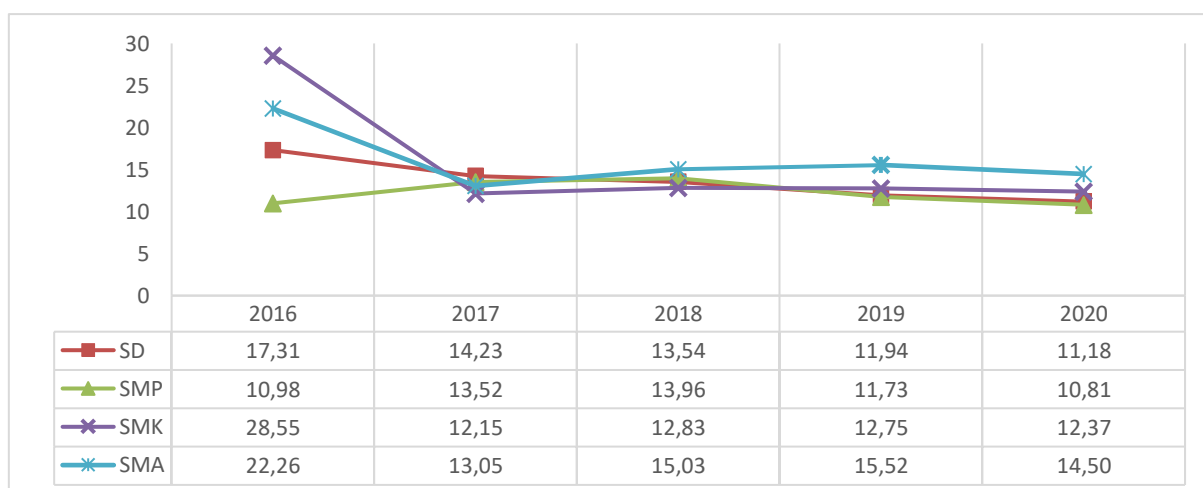
Tinggi Agama Islam Negeri yang berada di Kabupaten Majene. Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di Sulawesi Barat.

e. Rasio Murid Per Guru

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.

Rasio murid terhadap guru di Provinsi Sulawesi Barat jenjang SD sebesar 11,18, jenjang SMP sebesar 10,81, jenjang SMK sebesar 12,37 sedangkan untuk SMA rasio murid terhadap guru sebesar 14,50. Rasio murid terhadap guru untuk semua jenjang pendidikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan angka tersebut belum menjadi ideal sehingga kebutuhan akan guru masih sangat diharapkan.

Grafik 2.33 Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.52 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2015		2016		2017		2018		Keterangan / *) Sumber Data
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Angka pendidikan yang ditamatkan	281,926	88,91	278,062	84.31	274,283	82.59	279,754	85.19	Jenjang SD, SMP, SM
Penduduk berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	N/A	92,64	N/A	92,75	N/A	92,79	N/A	92,85	*) PDSPK Kemdikbud (penerima SUKMA/ Surat Keterangan Melek Aksara)
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	1,438	16.71	1,608	18.57	1,752	20.40	1,921	21.63	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	434	18.19	476	19.91	672	27.38	639	25.43	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	821	47.40	790	44.86	886	47.23	1,000	48.22	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SLB kondisi bangunan baik	68	34.69	35	30.70	19	16.67	51	27.72	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20,678	18.60	22,312	19.94	22,602	19.72	22,615	19.46	Jumlah Sekolah PAUD/TK
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,706	0.97	908	0.52	451	0.27	540	0.33	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	896	1.56	569	0.97	328	0.54	386	0.61	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,085	2.20	723	1.51	508	0.97	485	1.35	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	28,433	99.73	29,297	99.74	28,971	99.47	27,230	99.05	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	17,636	98.68	18,882	98.08	19,066	98.88	20,277	98.27	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	15,290	98.19	14,931	96.50	14,329	96.13	15,488	95.81	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	20,439	71.88	21,469	73.28	20,980	72.42	20,349	74.73	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	17,202	97.54	16,642	88.14	18,201	95.46	19,849	97.89	*) PDSPK Kemdikbud
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	17,415	72.08	15,341	66.88	15,971	75.63	15,186	77.55	*) PDSPK Kemdikbud (Jenjang SLB, SD, SMP, SM)
Guru yang bersertifikasi	NA	NA	7,378	34.78	7,381	33.09	6,126	29.05	*) PDSPK Kemdikbud

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

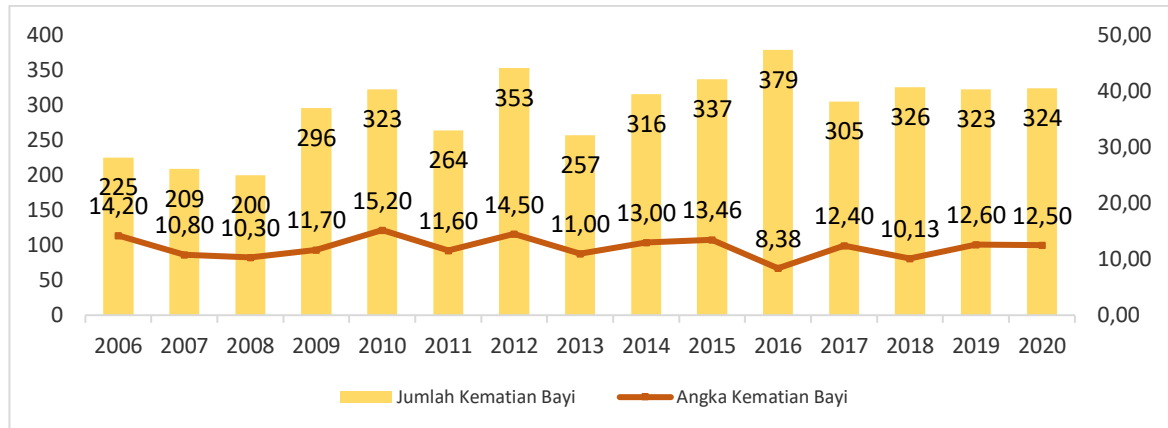
2.4.2 Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Sebagaimana gambaran perkembangan angka kematian ibu, angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh tahun terakhir.

Perkembangan jumlah kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.34 Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2006-2020



Sumber: Buku Data Statistik Sektor Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

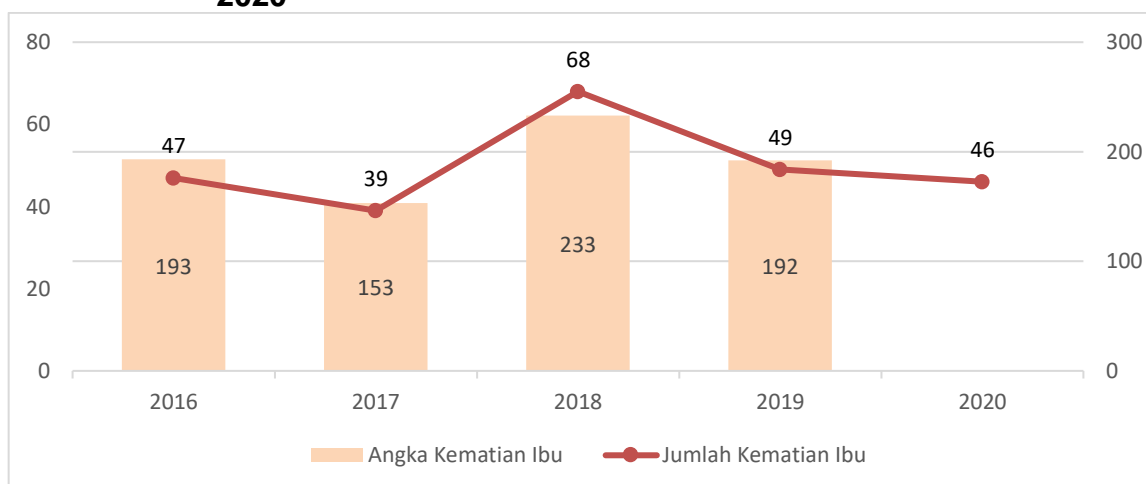
Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 8.38/1000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 12/1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 379 bayi mati menjadi 303 bayi mati pada tahun 2020.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (*still birth*) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

Grafik 2.35 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020



Sumber: Buku Data Statistik Sektor Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan belum stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat. Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir namun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi. Tahun 2014 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 180/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 153/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 233/100.000 kelahiran hidup, hal ini tentunya harus terus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang kesehatan terutama menekan angka kematian ibu yang cukup besar.

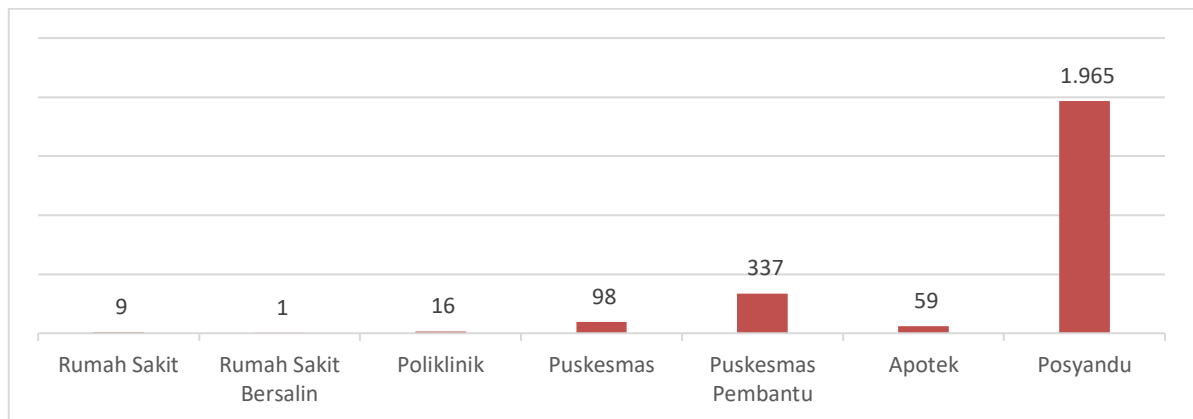
Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Jumlah kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada tahun 2016 sebesar 47 kasus, turun menjadi 39 kasus di tahun 2017 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 68 kasus, kembali turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 49 kasus dan kemudian turun menjadi 46 kasus di tahun 2020.

c. Jumlah dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk,

sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.

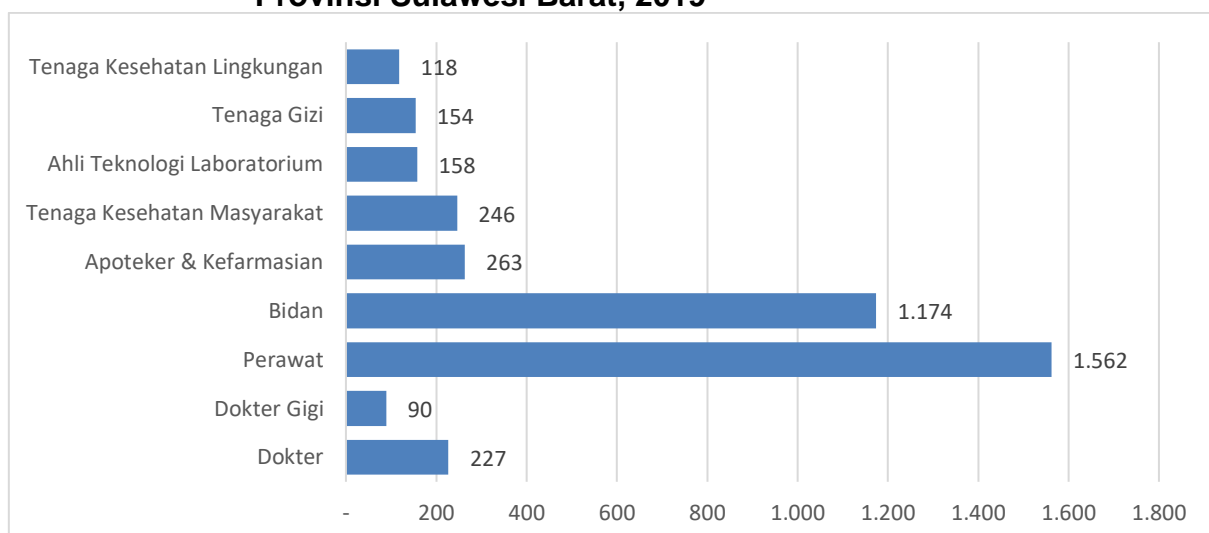
Grafik 2.36 Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat terdiri dari 10 Rumah Sakit yang terdiri dari 8 (Delapan) Rumah Sakit Pemerintah dan 2 (dua) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 98, Posyandu sebanyak 1.965. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah membangun Rumah Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe B yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya.

Grafik 2.37 Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019



Sumber: Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Unsur kesehatan yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan diantaranya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2019, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 317 orang, yang terdiri dari 227 dokter termasuk dokter spesialis dan 90 dokter gigi. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 1.174 orang, perawat sebanyak 1.562 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian sebanyak 263 orang. Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000 Penduduk Tahun 2019

Jumlah Fasyankes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kes-Mas	Kes-Ling	Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
150	16	6	113	85	19	17	8	11	11

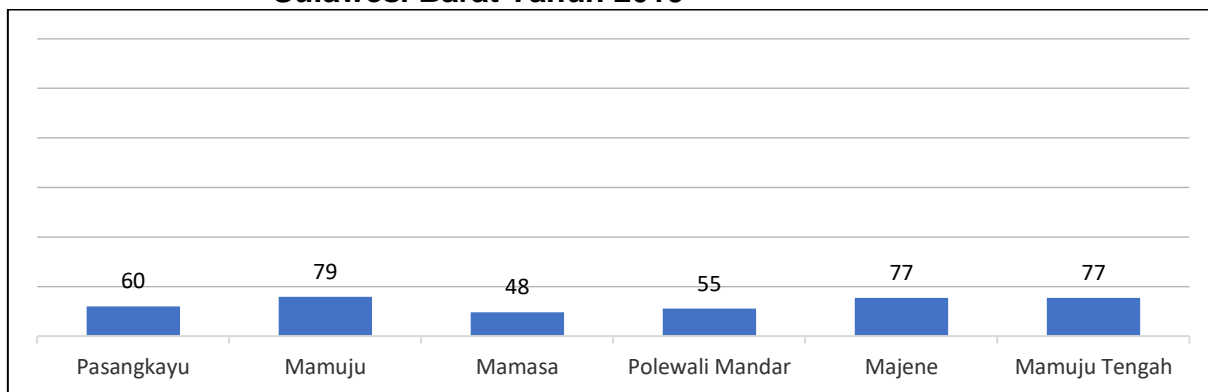
Sumber : http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/info/renbut (diolah)

d. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru TBA Positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR minimal pada tahun 2010 sebesar 70%. Dalam upaya peningkatan efektifitas pengendalian TB, Sulawesi Barat telah melakukan upaya penguatan DOTS yang

merupakan kebijakan nasional dalam pengendalian Tuberkulosis. Kunci utama dalam DOTS yaitu: komitmen, doagnosa yang benar dan baik. Ketersediaan dan lancarnya distribusi obat, pengawasan penderita menelan obat dan pencatatan dan pelaporan penderita dengan baik dan benar dengan sistem kohort.

Grafik 2.38 Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

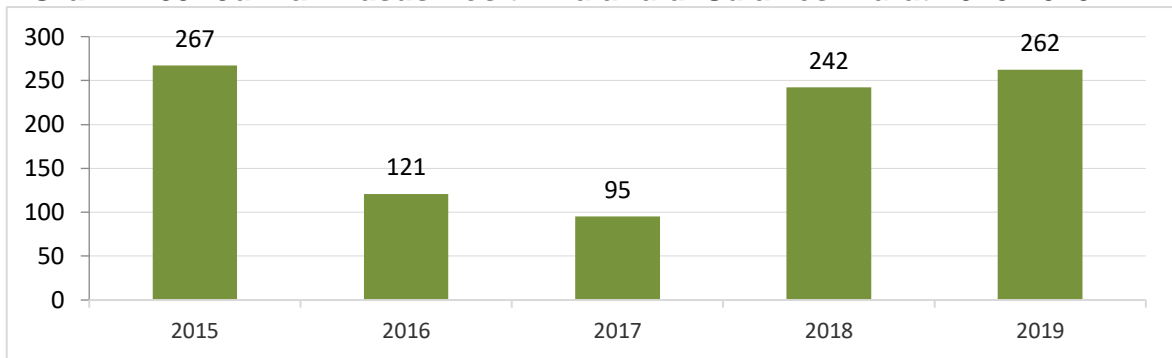


Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020

e. Angka Kejadian Malaria

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kasus positif malaria terbesar di Indonesia pada tahun 2011 angka positif malaria yang ada sebesar 3004 kasus yang merupakan angka yang cukup besar, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menekan kasus Positif Malaria salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2015, tentang eliminasi Malaria. Peraturan Gubernur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam upaya menghentikan penularan malaria di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa dan Majene. Melalui berbagai upaya tersebut sehingga dari tahun ke tahun kasus positif malaria mengalami penurunan. Sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2017 jumlah kasus positif malaria mengalami penurunan yang signifikan hingga sebesar 95 kasus. Hal ini tentunya sebuah pencapaian yang positif dalam menekan perkembangan kasus Positif Malaria yang ada.

Grafik 2.39 Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2015-2019

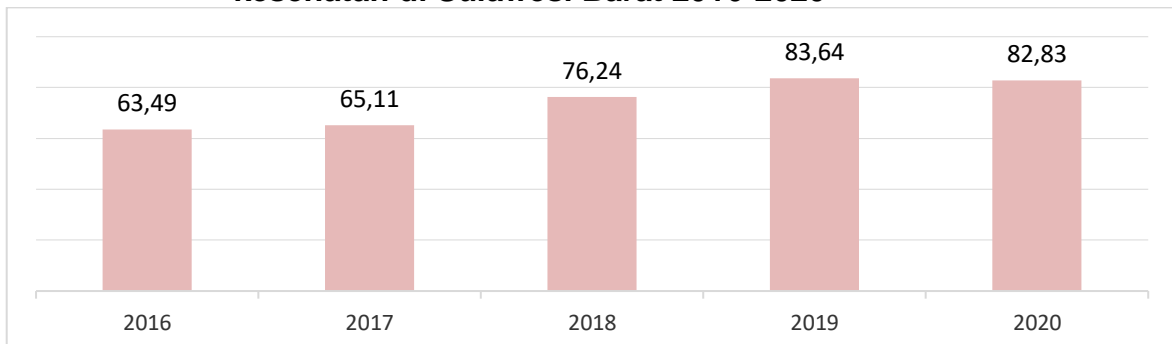


Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020

f. Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui kepesertaan jaminan kesehatan. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan di Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 63,49 persen mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebesar 82,83 persen. Hal ini diharapkan dapat dituntaskan sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan oleh nasional.

Grafik 2.40 Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan di Sulawesi Barat 2016-2020

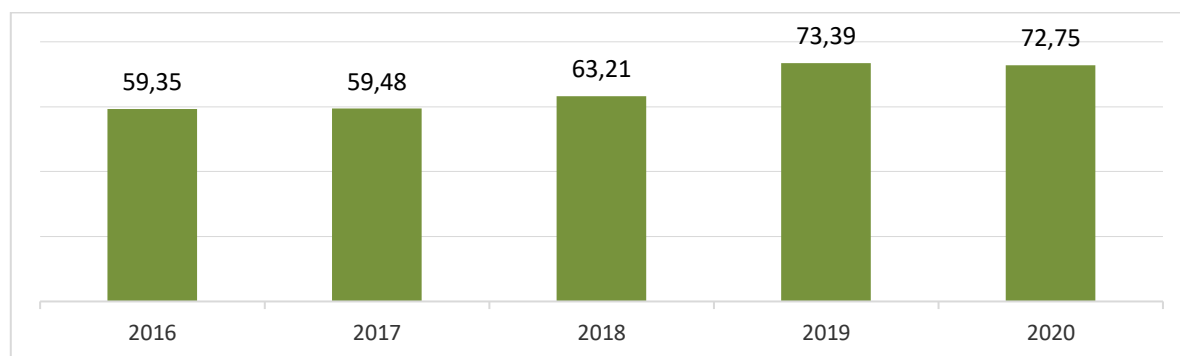


Ket: Target Nasional Pada Tahun 2019 telah UHC = 100%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021

g. Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2016 akses sanitasi layak sebesar 59,35 persen meningkat pada tahun 2019 sebesar 73,39 persen akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2020. Meskipun demikian namun angka tersebut masih tidak dapat ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat dalam RPJMN sebesar 100 persen pada tahun 2020.

Grafik 2.41 Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2016-2020

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.54 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
2,1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	986,9	986,76	985,07	990,54	
2,2	Persentase balita gizi Buruk (%)	29,1	29,1	24,7	19,00	18,10
	Rasio Posyandu Per Satuan balita (balita/posyandu)	13,40	16,36	16,36	16,36	
2,2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, persatuan penduduk (penduduk/puskesmas/poliklinik)	0,59	0,31	0,31	0,60	
2,3	Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk (Penduduk/Rumah Sakit)	0,02	0,02	0,01	0,01	
2,4	Rasio dokter per satuan Penduduk (Penduduk/dokter)	0,26	0,23	0,23	0,31	0,16
2,5	Rasio tenaga Medis per satuan Penduduk (Penduduk/tenaga medis)	0,26	0,23	0,23	0,35	2,28
2,6	cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	57,75	66,12	71,83	72	69,90
2,7	Cakupan Pertolongan Pesalinani oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kopetensi Kebidanan	87,75	82,8	80,44	81,44	77,83
2,8	Cakupan Desa/Kelurahan universal Clild Immunization (UCI)	47,8	74,4	78,43	78,57	73,32
2,9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	99,6	100	100	100
2,1	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	49	70,77	76	76	89,17
2,11	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	54	100	100	100	100
2,12	cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3,49	8,59	25	30	27,32
2,13	Cakupan Kunjungan bayi	88,80	88,2	86,98	88	88,31
2,14	Cakupan Puskesmas	7,41	7,41	7,41	7,41	
2,15	Cakupan Puskesmas Pembantu	37	37	37	37	
2,16	Angka Kematian Bayi (%)	13,01	13,4	14,93	12,40	12,10

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakaryaan, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

a. Sub Urusan Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR meliputi:

- Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
- Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
- Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.55 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat

PROVINSI SULAWESI BARAT	Luas (ha)
Kabupaten Mamasa	
DI. Aralle	2.330
DI. Mambi	2.728
DI. Messawa	1.562
DI. Pana	1.334

PROVINSI SULAWESI BARAT	Luas (ha)
DI. Rantebulahan Timur	1.400
DI. Tandukkalua	2.170
Kabupaten Mamuju	
DI. Papalang - Sampaga	2.245
Kabupaten Mamuju Tengah	
DI. Tobadak	1.880
Kabupaten Pasangkayu	
DI. Bantalaka	1.200
Kabupaten Polewali Mandar	
DI. Lakejo	1.265
DI. Tandung	1.000
Sulawesi Barat 2016	19.114

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Keterangan: Penjelasan tabel berdasarkan SK Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015

Tabel 2.56 Jenis Irigasi di Sulawesi Barat tahun 2017

Kabupaten	Jenis Lahan Sawah					
	Irigasi				Tadah Hujan	Jumlah
	Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Jumlah		
Majene	-	133	220	353	3.467	4.119
Polewali Mandar	12.396	1.255	880	14.531	5.813	20.972
Mamasa	-	1.300	12.717	14.017	2.711	14.947
Mamuju	-	659	7.095	7.754	8.596	17.338
Pasangkayu	-	900	775	1.675	4.383	6.219
Mamuju Tengah	-	0	500	500	12.990	14.929
Sulawesi Barat	12.396	4.247	22.187	38.830	37.960	78.524

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat 2019

Ket: Data 2019 belum tersedia/masih menggunakan data tahun 2017

Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi atas irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang terbesar di Kabupaten Mamasa.

Tabel 2.57 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Sumber Daya Air

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
3	Pekerjaan Umum					
3,17	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	63,86	63,86	40,82	41,27	43,31
	- Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	14.416	15.858	18.270	18.470	19.470
	- Luas irigasi kabupaten (ha)	22.574	24.832	44.757	44.756,54	44.956,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2019

b. Sub Urusan Keciaptakaryaan

Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan pokok. Tahun 2020 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.58 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Kabupaten	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
Majene	10,95	9,62	37,72	10,95	3,94
Polewali Mandar	13,94	16,49	18,53	19,98	8,35
Mamasa	10,99	3,98	1,24	0,32	1,74
Mamuju	13,53	8,82	28,86	16,61	8,00
Pasangkayu	-	13,57	48,42	20,52	2,26
Mamuju Tengah	2,40	15,34	32,57	20,50	14,31
Sulawesi Barat	10,09	12,05	26,22	15,91	6,69

Lanjutan Tabel diatas

Kabupaten	Mata Air Terlindung	Mata Air tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Majene	18,43	0,79	7,61	-	-	100,00
Polewali Mandar	12,36	3,30	6,74	-	0,31	100,00
Mamasa	8,61	23,85	48,08	1,03	0,15	100,00
Mamuju	16,47	5,33	2,19	0,19	-	100,00
Pasangkayu	3,41	0,91	8,83	1,50	0,57	100,00
Mamuju Tengah	5,34	2,78	2,28	4,48	-	100,00
Sulawesi Barat	11,53	5,60	10,91	0,81	0,20	100,00

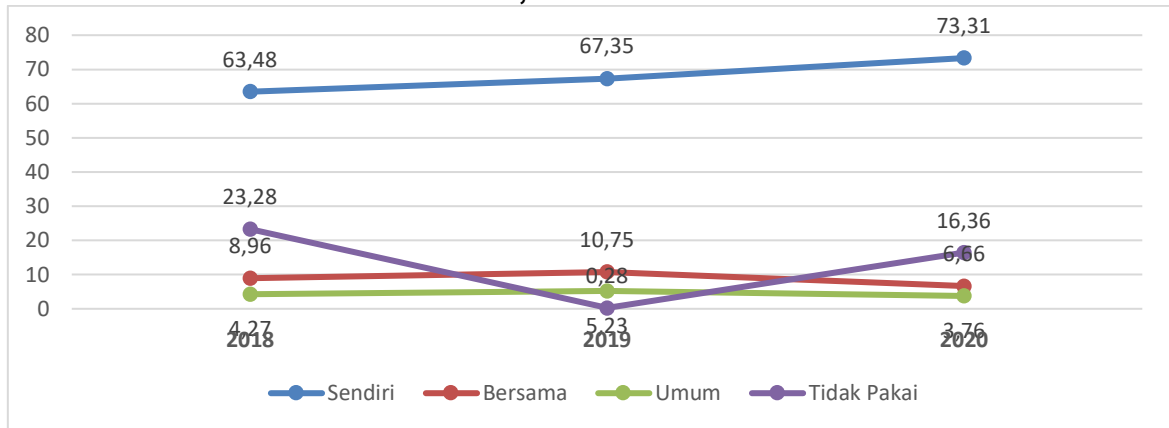
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat, Tahun 2020

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada	Jumlah
Majene	68,65	9,22	8,14	0,29	13,70	100,00
Polewali Mandar	82,11	5,83	1,14	0,57	10,35	100,00
Mamasa	63,88	7,73	12,14	0,40	15,84	100,00
Mamuju	67,26	7,03	2,85	0,00	22,86	100,00
Pasangkayu	73,12	6,44	1,29	0,51	18,64	100,00
Mamuju Tengah	75,13	4,41	1,72	0,50	18,24	100,00
Sulawesi Barat	73,31	6,66	3,76	0,38	15,88	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.42 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat, Tahun 2018-2020



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Selain ketersediaan air minum bersih, ketersediaan sanitasi layak juga dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 63,48 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri. Tahun 2020, rumah tangga pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 73,31 persen. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki jamban.

c. Sub Urusan Jalan

Dalam rangka menggerakkan perekonomian khususnya di Sulawesi Barat maka diperlukan penanganan infrastruktur yang berkelanjutan untuk itu kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah terutama infrastruktur dan konektivitas. Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk segera mendapat penanganan yaitu jalan. Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir tahun 2020 dengan panjang 349,67 km, dimana terdapat 39,58 persen dalam kondisi mantap, dan 60,42 persen dalam kondisi tidak mantap.

Grafik 2.43 Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

No	NAMA RUA S	Panjang (Km)	KONDISI JALAN TAHUN 2019				KONDISI JALAN TAHUN 2020			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
RUAS JALAN PROVINSI										
1	Batuisi - Batas Toraja	44.84	0.00	0.00	0.70	43.94	0.00	1.40	7.00	36.24
2	Lampa (Mapilli) - Matangnga	45.88	39.97	0.00	0.35	5.36	41.46	0.20	3.62	0.40
3	Matangnga - Keppe	31.10	0.10	20.40	3.60	7.00	3.85	10.70	14.80	1.95
4	Salutambung - Urekang	36.46	4.01	9.12	22.83	0.50	7.28	6.91	10.11	12.16
5	Urekang - Mambi	18.58	0.00	5.20	1.60	11.78	1.38	2.20	12.20	2.80
6	Tikke - Bts. Sulteng	9.50	7.45	0.44	1.56	0.05	8.68	0.77	0.05	0.00
RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL										
1	Salubatu - Bonehau	28.70	3.96	5.70	19.05	0.00	5.80	3.85	19.05	0.00
2	Bonehau - Kalumpang	21.97	0.00	16.92	5.05	0.00	0.00	16.92	5.05	0.00
3	Kalumpang - Batuisi	15.74	3.75	0.90	3.50	7.59	6.25	0.00	5.40	4.09
4	Batuisi - Bts. Luwu Utara	42.30	0.00	0.00	2.00	40.30	0.00	0.00	2.00	40.30
5	Jl. Marthadinata - Sumare (Rangas) - Bts. Tapalang Barat	55.00	8.62	3.70	37.48	5.21	12.76	8.00	29.04	5.21
TOTAL PANJANG JALAN PROVINSI + JALAN STRATEGIS NASIONAL		349.67	67.84	62.39	97.71	121.73	67.46	50.95	108.11	103.15
		%	19.40%	17.84%	27.94%	34.81%	25.01%	14.57%	30.92%	29.50%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.60 Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2014-2020

INDIKATOR	2014 (Km)	2015 (Km)	2016 (Km)	2017 (Km)	2018 (Km)	2019 (Km)	2020 (Km)
Kondisi Mantap	567.88	651.82	661.95	669.57	696.30	667.82	675.03
Kondisi Tidak Mantap	4.10	111.35	101.22	93.60	66.87	95.35	88.14
JUMLAH	571.98	763.17	763.17	763.17	763.17	763.17	763.17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.61 Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat (km), 2020

Kabupaten	Panjang Jalan/Kewangan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Majene	103,30	110,21	621,20	834,71
Polewali Mandar	89,78	146,61	855,36	1 071,75
Mamasa	175,60	115,64	649,77	941,01
Mamuju	144,51	208,35	666,86	1 019,72
Pasangkayu	145,24	15,00	2 598,75	2 758,99
Mamuju Tengah	104,71	48,39	465,88	618,98
Sulawesi Barat	763,17	644,20	5 837,81	7 245,15

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.62 Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2020

NOMOR RUAS	N A M A R U A S		PANJANG (KM)	JAP (KM)	JKP-1 (KM)
001		SURUMANA (BTS. PROV. SULTENG) - PASANG KAYU	51.19		51.19
002		PASANG KAYU - BARAS	54.62		54.62
003		BARAS - KAROSSA	48.23		48.23
004		KAROSSA - TOPOYO	54.67		54.67
005		TOPOYO - TARAILU	41.27		41.27
006		TARAILU - KALUKU	43.84		43.84

NOMOR RUAS			N A M A R U A S	PANJANG (KM)	JAP (KM)	JKP-1 (KM)
007			KALUKU - BTS. KOTA MAMUJU	28.53		28.53
007	11	K	JLN. POROS KALUKU (MAMUJU)	1.25		1.25
007	12	K	JLN. HASANUDDIN (MAMUJU)	1.31		1.31
008			BTS. KAB. MAJENE - MAMUJU	37.03	37.03	
008	11	K	JLN. AHMAD YANI (MAMUJU)	0.41	0.41	
008	12	K	JLN. KS. TUBUN (MAMUJU)	0.72	0.72	
008	13	K	JLN. URIP SUMOHARJO (MAMUJU)	0.69	0.69	
008	14	K	JLN. SUDIRMAN (MAMUJU)	1.24	1.24	
008	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (MAMUJU)	1.28	1.28	
009			TAMERODDO - BTS. KAB. MAMUJU	50.89	50.89	
010			BTS. KOTA MAJENE - TAMERODDO	42.79	42.79	
010	11	K	JLN. A. YANI (MAJENE)	3.82	3.82	
010	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (MAJENE)	1.35	1.35	
011			BTS. KOTA POLEWALI - BTS. KOTA MAJENE	42.78	42.78	
011	11	K	JLN. SUDIRMAN (MAJENE)	2.32	2.32	
011	12	K	JLN. HASANUDDIN (MAJENE)	2.13	2.13	
011	13	K	JLN. M. YAMIN (POLEWALI)	2.80	2.80	
012			BTS. PROV. SULSEL - BTS. KOTA POLEWALI	14.07	14.07	
012	11	K	JLN. ANDI DEPU (POLEWALI)	3.38	3.38	
012	12	K	JLN. TENGKU UMAR (POLEWALI)	3.70	3.70	
012	13	K	JLN. A. YANI (POLEWALI)	1.76	1.76	
013			SALUBATU - KALUKU	28.11		28.11
014			SALUBATU - MAMBI	45.63		45.63
015			MAMBI – MALABO	27.09		27.09
016			MALABO – MAMASA	13.50		13.50
017			MAMASA - BTS. SULSEL	37.95		37.95
018			MALABO – TABONE	27.09		27.09
019			TABONE – POLEWALI	45.73		45.73
			TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL	763.17	213.17	550.00

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Ket : Sesuai dengan SK. NO. 290/KPTS/M/2015

Dari tabel diatas digambarkan kondisi jalan provinsi tahun 2019 dengan kondisi Mantap sebesar 37,24 persen. Kondisi mantap pada jalan provinsi meningkat menjadi 39,58 persen pada akhir tahun 2020. Hal itu menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Demikian sebaliknya dengan kondisi Jalan Tidak Mantap yang terus mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya persentase jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap. Penurunan tersebut berarti bahwa perbaikan jalan provinsi dari kondisi sedang beralih menjadi kondisi baik. Panjang jalan provinsi tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan adanya ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan menjadi jalan nasional yaitu ruas Polewali – Tabone – Malabo dan Ruas Salubatu – Mambi – Malabo – Mamasa – Batas Toraja Utara. Adapun status jalan yang ada di

Sulawesi Barat antara lain Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi serta jalan Strategis Nasional yang juga masih menjadi kewenangan Provinsi.

Tabel 2.63 Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	5	001	5	BATUISI – BATAS TORAJA	44,64	MAMUJU
003	1	002	1	LAMPA(MAPILLI) – MATANGNGA	45,68	POLMAN
003	2	002	2	MATANGNGA – KEPPE	31,10	POLMAN
004	1	003	1	SALUTAMBUNG - UREKANG	36,46	MAJENE
004	2	003	2	UREKANG – MAMBI	18,58	MAMASA
005	1	004	1	TIKKE - BTS SULTENG	9,50	PASANGKAYU
				JUMLAH	185,96	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.64 Kondisi Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Ruas Jalan Strategis Provinsi	Kecamatan yang dilalui	Panjang ruas (Km)	Kondisi Jalan Akhir Tahun 2020				KET
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PIRIANG-MAPILLI	KEC. LAMPA	48,14	27,996	1	11,604	7,54	
2	TIBUNG-ALU	KEC. ALU	24,69	0	0,2	8	16,49	
3	ALU-TINAMBUNG	KEC. ALU	14,79	11,496	0	2,494	0,8	
4	SALEPPA-PUAWANG	KEC. SALEPPA	6,46	4	0	2,46	0	
5	PUAWANG-KATITTING	KEC. PUAWANG	6,85	3,967	0,853	2,03	0	
6	LOMBONGAN (TALAMBALAO) -PIRIANG	KEC. TIBUNG	27,29	3,3	1,5	1	21,49	
7	PALLANG PALLANG-TIBUNG	KEC. TIBUNG	13,5	2,15	2	4	5,35	
8	PAMBOANG-SUMARRANG	KEC. PAMBOANG	18,58	0	2	0	16,58	
9	SUMARRANG-GALUNG LOMBOK	KEC. SUMARRANG	14,38	5,07	2	5,88	1,43	
10	AKSES PELABUHAN PASANGKAYU	KEC. PASANGKAYU	5,5	0	0	3,1	2,4	
11	TABONE - NOSU	KEC. TABONE	27,5	7,445	0	0	20,06	
12	NOSU - PANA	KEC. NOSU	26,7	2,33	0	0	24,37	
13	PANA - MAMULLU - MANIPI BARRU	KEC. PANA	10	0	0	0	10	
14	AKSES BANDARA SUMARORONG	KEC. SUMARORONG	1,757	0,1	0	1,657	0	
15	TOBADAQ (BENTENG) -TOBADAQ VII	KEC. TOBADAQ	21	14,74	0	6,26	0	
16	TOBADAQ VII - TOBADAQ VIII (BTS TOMMO)	KEC. TOBADAQ	13,19	0	0	13,19	0	
17	AKSES PELABUHAN BUDONG-BUDONG	KEC. BUDONG-BUDONG	14,2	7,08	0	2	5,12	
JUMLAH PJG.JLN STRATEGIS PROVINSI			294,527	89,674	9,553	63,675	131,6	

Tabel 2.65 Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	1	001	1	SALUBATU - BONEHAU	28,70	MAMUJU
001	2	001	2	BONEHAU - KALUMPANG	21,97	MAMUJU
001	4	001	3	KALUMPANG BATUISI	15,74	MAMUJU
		001	4	BATUISI - BTS LUWU UTARA	42,30	MAMUJU
		001	6	JL. MARTADINATA - SUMARE (RANGAS) - BTS. TAPALANG BARAT	55,00	MAMUJU
				JUMLAH	163,71	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di Sulawesi Barat tahun 2013 sekitar 602,78 km, dengan kondisi baik 453,34 km, kondisi sedang 144,86 km, kondisi rusak 3,88 km dan rusak berat 0,7 km.

Tabel 2.66 Panjang Jalan Provinsi di Sulawesi Barat tahun 2011 dan 2020

RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2011	PANJANG	RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2019	PANJANG
Salubatu – Mambi - Mala'bo – Mamasa - Batas Tator	122,54	Salubatu – Bonehau - Kalumpang – Batuisei - Batas Luwu Utara	108,71
Salubatu – Bonehau - Kalumpang – Batas Luwu Utara	92,97	Martadinata - Sumare (Rangas) - BTS. Tapalang Barat	55
Kalumpang - Batuisei – Batas Toraja	60,38	Batisei – Batas Toraja	44,64
Polewali – Tabone – Mala'bo	71,89	Lampa – Matangnga - Keppe	76,78
Lampa – Matangnga - Keppe	76,78	Salutambung – Urekang - Mambi	55,04
Salutambung – Urekang - Mambi	55,04	Tikke - BTS. Sulteng	9,5
Tikke - BTS. Sulteng	8,5		
TOTAL (Km)	488,10	TOTAL (Km)	349,67

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.67 Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2019

NO	TAHUN	PANJANG (KM)
1	2012	3,600
2	2013	13,425
3	2014	12,400
4	2015	53,480
5	2016	14,740
6	2017	18,263
7	2018	13,965
8	2019	11,190
9	2020	9,700
TOTAL		150,763

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jalan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
3	Pekerjaan Umum					
3.9	Panjang jalan dilalui roda 4 (%)	0,38	0,39	0,39	0,25	0,29
	- Jumlah panjang jalan (km)	4.774	4.984	4.984	3.913,91	4.480,91
	- Jumlah penduduk (Orang)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
3,10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	NA	NA	91,06	91,06	91,37
	- Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	NA	NA	591	591	593
	- Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	NA	NA	649	649	649
3,11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam) (%)	34,52	36,04	37,55	39,06	40,56
	- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	4.774	4.984	5.192	5.401	5.609
	- Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71
3,12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	10,85	11,09	11,30	11,42	11,54
	- Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	1.500	1.534	1.562	1.579	1.596
	- Panjang seluruh jalan kabupaten (km)	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71
3,13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	NA	NA	31,61	38,22	42,86
	- panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	NA	NA	263	318	378
	- Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (km)	NA	NA	832	832	882
3,14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	NA	NA	38,29	42,07	43,94
	- Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	NA	NA	152	167	192
	- Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	NA	NA	397	397	397
3,16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)	NA	NA	8,57	14,29	25,71
	- Jumlah lokasi Pembangunan turap di Umum wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	NA	NA	3	5	9
	- Jumlah saluran wilayah rawan longsor	NA	NA	35	35	35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2019

d. Sub Urusan Jasa Konstruksi

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jasa Konstruksi

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
3	Pekerjaan Umum					
3,3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)	0,27	0,27	0,27	0,23	0,23
	- Jumlah tempat ibadah (Buah)	3.390	3.434	3.538	3.538	3.541
	- Jumlah penduduk (Orang)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554
3,5	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk (%)	NA	NA	54,90	51,85	54,47
	- Jumlah daya tampung tempat Umum pemakaman umum	NA	NA	732.356	799.584	843.571
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554
3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	4,60	5,37	5,16	4,75	4,86
	- Jumlah daya tampung TPS	57.900,38	68.792,38	68.792,38	73.245,38	75.245,38
	- Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2019

e. Sub Urusan Penataan Ruang

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
5	Penataan Ruang					
5,1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB (%)	NA	NA	10,78	10,95	11,09
	Luas ruang terbuka hijau	NA	NA	71.322,73	72.522,73	73.472,73
	Luas wilayah ber HPL/HGB	NA	NA	661.801,73	662.051,73	662.401,73
5,2	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%)	NA	NA	41,46	42,82	44,42
	Jumlah bangunan ber - IMB	NA	NA	115.600	119.450	124.000
	Jumlah bangunan	NA	NA	278.824	278.949	279.174
5,3	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	NA	NA	0,06	0,07	0,07
	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)	NA	NA	20	23	25
	Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)	NA	NA	34.660	34.710	34.785
	Ketaatan terhadap RTRW					
	Luas wilayah produktif (ha)	NA	NA	655.562	655.689,56	655.892,93
	Luas wilayah Industri (ha)	NA	NA	NA		
	Luas wilayah banjir (ha)	NA	NA	5.084,44	5.186,13	5.186,13
	Luas wilayah Kekeringan (ha)	NA	NA	20.337,77	20.642,83	20.642,8
	Luas wilayah perkotaan (ha)	NA	NA	NA		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2019

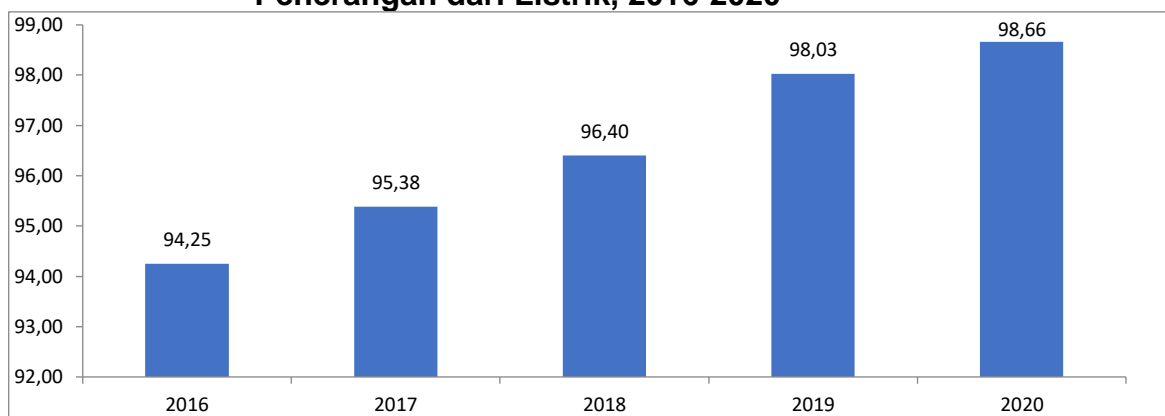
2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tabel 2.71 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (unit)	Persentase Rumah Tangga Milik (%)	Jumlah Rumah Tangga Milik (unit)	Backlog Kepemilikan Rumah (unit)
2014	1.258.090	280.926	91,31	256.502	24.424
2015	1.282.162	286.324	91,41	261.743	24.581
2016	1.306.478	292.792	91,00	266.446	26.346
2017	1.330.961	298.688	88,45	265.811	32.877
2018	1.355.554	304.600	86,85	264.545	40.055

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.44 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik, 2016-2020

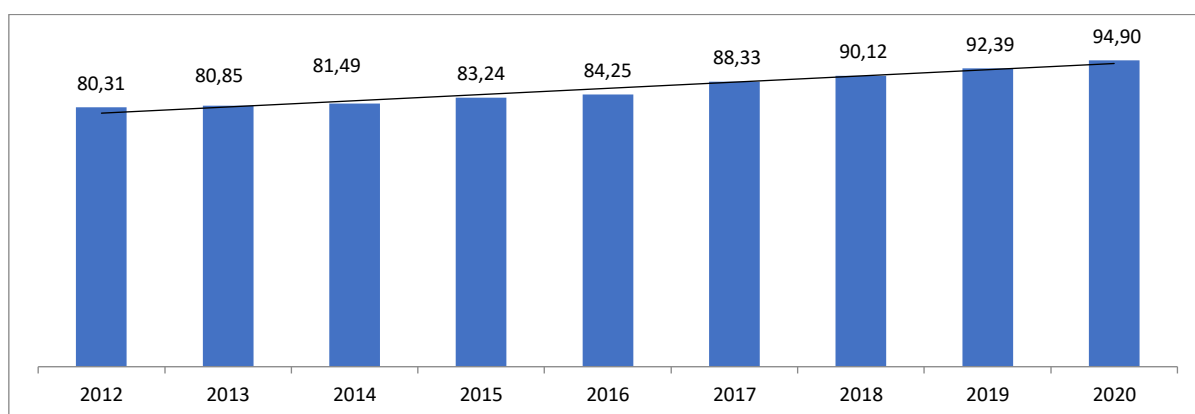


Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.72 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2016-2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	60,56	63,11	58,42	72,09	86,66
Polewali Mandar	67,91	66,10	71,09	82,44	79,63
Mamasa	32,87	34,63	40,15	51,24	26,00
Mamuju	58,89	60,95	59,70	68,39	80,70
Pasangkayu	62,43	62,47	75,04	75,92	75,93
Mamuju Tengah	60,60	58,56	63,36	79,95	72,05
Sulawesi Barat	59,35	59,48	63,21	73,39	72,75

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.45 Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Tabel 2.73 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
3.7	Rasio rumah layak huni (Jiwa/Rumah)	0,167	0,198	0,202	0,209	0,211
	- Jumlah rumah layak huni (Rumah)	220.641	263.835	274.497	286.431	299.365
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.256	1.419.229
3.8	Rasio pemukiman layak huni (%)	NA	0,999481	0,999483		
	- Luas pemukiman layak huni (Ha)	NA	1.448.948	1.448.951		
	- Luas wilayah permukiman (Ha)	NA	1.449.700	1.449.700		
3,18	lingkungan pemukiman (%)	1,67				
	- Luas kawasan kumuh (ha)	5.276	752	752	750	748
	- Luas wilayah (ha)	316.338	16.973	16.973	16.973	16.973

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.74 Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2017-2018

Kabupaten	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah (Orang)	Rasio	Jumlah (Orang)	Rasio
Majene	990	58,55	1.274	73,09
Polewali Mandar	1.595	36,86	2.458	47,12
Mamasa	1.071	68,23	1.172	56,85
Mamuju	1.231	44,06	1.514	50,11
Pasangkayu	542	32,80	790	37,28
Mamuju Tengah	367	28,76	700	48,02
Total	5.792		7.908	

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.75 Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Polisi Pamong Praja	160	148	143	137	137
Jumlah Penduduk	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.419.229
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.76 Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Diklat Satpol PP	71	0	0	0	30

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 tidak ada tenaga Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar di sebabkan karena tidak adanya Penganggaran di Kantor Satpol PP.

Tabel 2.77 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kententraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	12	15	20	22	25
Jumlah Pelanggaran K3	127	120	125	124	129
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	9.44 %	100 %	34 %	100 %	91 %

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.78 Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Demo Bidang Politik	2	3	5	7	9
Jumlah Demo Ekonmomi	1	3	6	5	2
Jumlah Kasus Pemogokan Kerja	3	4	7	6	4
Jumlah Demo Unjuk Rasa	5	6	12	6	4
Jumlah	11	16	30	34	29

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.79 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.80 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	3 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2019

Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari tahun 2014 sebanyak 3 kegiatan meningkat menjadi 5 kegiatan pada tahun 2015 sedangkan tahun 2018 sebanyak 4 kegiatan.

Tabel 2.81 Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sulawesi Barat, 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Jumlah
Satpol PP	4
Dinas Perhubungan	3
Dinas Perindagkop & UKM	3
Dinas Tenaga Kerja	1
Dinas Kelautan dan Perikanan	4
Dinas Sosial	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat	1
Bappeda	1
Dinas Kehutanan	3
JUMLAH	24

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jumlah PPNS di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat terbatas yang tersebar di beberapa OPD terkait sesuai dengan jenis PPNS bidang masing-masing. Rendahnya minat ASN dalam mengikuti diklat PPNS menjadi salah satu penyebab kurangnya tenaga PPNS di Provinsi Sulawesi Barat.

Peran PPNS dalam rangka penegakan Perda sangat diharapkan, hingga saat ini penegakan perda masih sangat minim dan tidak terlaksana dengan baik, hingga tahun 2018 penegakan perda yang telah dilakukan yaitu terkait dengan Perda nomor I tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.82 Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN	
		TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Penegakan PERDA	1	2
	- Jumlah penyelesaian penegakan perda	1	2
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0	50
	- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam)	0	0,5
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,0000	0,0001
	- Jumlah mobil pemadam kebakaran	0	2
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.330.961	1.355.554
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0	50
	- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam)	0	0,5
	- Jumlah kejadian kebakaran (kali)	0	1
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi		

Sumber : SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis dalam pembangunan nasional.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial,

antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diharapkan guna meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat serta lingkungannya.

Tabel 2.83 Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat

NO	DATA PMKS	POPULASI DATA PMKS TAHUN 2016	HASIL YANG TERTANGANI				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Balita Terlantar	1.900 Jiwa	N/A	32	N/A	56	56
2	Anak Terlantar	8.803 Jiwa	5.180	165	882	1390	1390
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	153 Jiwa	N/A	25	50	3	N/A
4	Anak Jalanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Anak Dengan Kedisabilitas	2.667 Jiwa	8	3	N/A	100	N/A
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	138 Jiwa	N/A	N/A	2	N/A	N/A
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	10.846 Jiwa	N/A	N/A	N/A	2	104
8	Lanjut Usia Terlantar	7.986 Jiwa	460	1015	100	500	500
9	Penyandang Disabilitas	2.152 Jiwa	280	198	279	120	160
10	Tuna Susila	2100 Jiwa	20	N/A	20	13	N/A
11	Pengemis	559 Jiwa	N/A	N/A	N/A	11	N/A
12	Gelandangan	33 Jiwa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Pemulung	283 Jiwa	N/A	N/A	N/A	10	N/A
14	Kelompok Minoritas	77.927	N/A	N/A	N/A	20	N/A
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	18.903 Jiwa	25	20	100	50	N/A
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	755 KK	N/A	N/A	N/A	50	N/A
17	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	4.280 Jiwa	N/A	N/A	N/A	6	N/A
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7.214 Jiwa	18	10	90	20	N/A
19	Korban Trafficking	217 Jiwa	N/A	N/A	N/A	20	N/A
20	Korban Tindak Kekerasan	150 Jiwa	N/A	20	15	10	N/A
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2020 Jiwa	18	8	50	50	N/A
22	Korban Bencana Alam	29000 Jiwa	1607	2340	5029	200	13000
23	Korban Bencana Sosial	1.537 Jiwa	1061	1800	124	253	700

NO	DATA PMKS	POPULASI DATA PMKS TAHUN 2016	HASIL YANG TERTANGANI				
			2014	2015	2016	2017	2018
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	6880 Jiwa	160	60	N/A	100	N/A
25	Fakir Miskin	140,761 KK	8154	28398	23.989	200	1860
26	Komunitas Adat Terpencil	12.628 KK	159	50	223	50	66

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2019

Ket : 1) Anak Gelandangan dan pengemis yang ada di Sulbar merupakan anak gelandangan dan pengemis dari luar Sulbar. 2) Untuk Keterangan N/A format diatas tidak ada anggaran.

Tabel 2.84 Data potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, 2018

NO	DATA PSKS	JUMLAH PSKS PER KABUPATEN						TOTAL PSKS
		POLMAN	MAJENE	MAMUJU	MAMASA	MATENG	MATRA	
1	Pekerja Sosial Profesional	1	1	6	1	1	1	11
2	Pekerja Sosial Masyarakat	41	96	32	62	10	13	254
3	Taruna Siaga Bencana	60	57	66	189	49	58	479
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial							
	- LKS Tuna Sosial	1	1	3	1	1	1	8
	- LKS Anak	15	9	11	7	1	2	45
	- LKS Lanjut Usia	1	1	1	1	1	1	6
	- LKS Orang Dengan Kecacatan (ODK)	6	5	2	2	1	5	21
	- LKS Rehabilitasi Narkotika dan Psitrofik dan Zat Adektif (NAPZA)	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1
	LK Askesos	3	7	5	2	1	1	19
5	Karang Taruna	98	32	120	102	15	30	397
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	N/A	1	1	5
7	Keluarga Pioner	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	5	5	10	N/A	N/A	N/A	20
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	5	5	25	1	5	1	42
10	Penyuluh Sosial	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	80
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	8	11	17	5	12	69
12	Dunia Usaha (DU yang berpartisipasi dalam CSR)	65	10	75	20	25	39	234

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.85 Capaian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Sulawesi Barat tahun 2014-2018

No	Indikator SPM	Capaian 2014		Capaian 2015		Capaian 2016		Capaian 2017		Capaian 2018	
		Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%
1	Persentase (%) PMKS skala Provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{37.660}{666.864}$	5,6	$\frac{41.454}{666.864}$	6,2	$\frac{43.248}{666.864}$	6,5	$\frac{45.321}{666.864}$	6,8	$\frac{47.465}{666.864}$	7,1
2	Persentase (%) Panti sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56
3	Persentase (%) Panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48
4	Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial diluar panti	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7
5	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{3}{6}$	50
6	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{3}{6}$	50
7	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{6}$	83,33

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.7 Urusan Ketenaga Kerjaan

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada keadaan tahun 2019 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 297,36 ribu orang atau 46,35 persen dari total

jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor Perdagangan besar dan eceran yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98,55 ribu orang atau sekitar 15,36 persen, kemudian diikuti sektor Jasa Pendidikan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 40,31 ribu orang atau sekitar 6,28 persen.

Tabel 2.86 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat, 2020

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama			
	Pertanian	Industri	Jasa	Jumlah
Majene	25 536	15 241	35 989	76 766
Polewali Mandar	84 800	39 026	84 059	207 885
Mamasa	50 963	9 333	21 433	81 729
Mamuju	57 890	21 962	51 027	130 879
Pasangkayu	43 677	9 807	28 329	81 813
Mamuju Tengah	34 500	9 029	26 113	69 642
Total	297 366	104 398	23 9849	641 613

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2020

Tabel 2.87 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat, Tahun 2016-2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	446 429	456 632	464 088	476 557	478 595
Perempuan	451 535	461 468	470 193	480 090	462 682
Jumlah	897 964	918 100	934 281	956 647	941 277

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Komposisi penduduk usia kerja jika dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di tahun terakhir 2018 dan 2019 didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan besaran proporsi yang cenderung menurun dari 50,33 persen tahun 2018 menjadi 50,18 persen pada tahun 2019. Sedangkan jenis kelamin laki-laki proporsinya cenderung menurun dari 49,67 persen tahun 2018 menjadi 49,82 persen pada tahun 2019 dengan dibarengi bertambahnya penduduk usia kerja. Sementara di tahun 2020 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 50,85 persen dibandingkan jenis kelamin perempuan sebesar 49,15 persen.

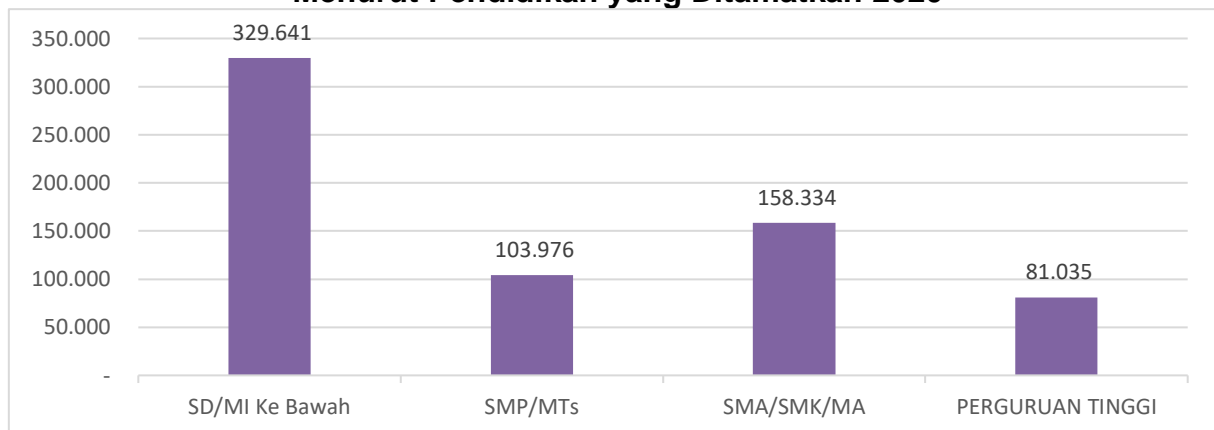
Tabel 2.88 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2016-2020

Pendidikan	Angkatan Kerja yang Bekerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI ke bawah	342.124	321.065	330.490	317.862	329.641
SMP/MTs	92.302	85.747	91.913	88.641	103.976
SMA/SMK/MA	124.477	122.065	133.929	156.914	158.334
Perguruan Tinggi	65.279	66.127	63.063	78.196	81.035
Total	624.182	595.004	619.395	641.613	672.986

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

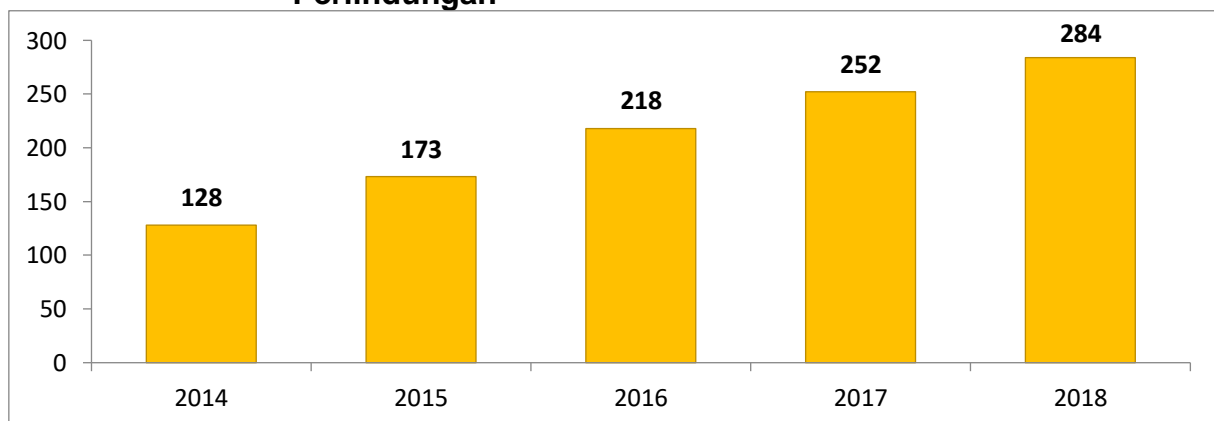
Pada Tahun 2020, pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sekitar 433,62 ribu orang atau sebesar 64,43 persen, yang terdiri dari pekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 329,64 ribu orang atau sebesar 76,02 persen dan pekerja berpendidikan SLTP sebanyak 103,98 ribu orang atau sebesar 23,98 persen.

Grafik 2.46 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

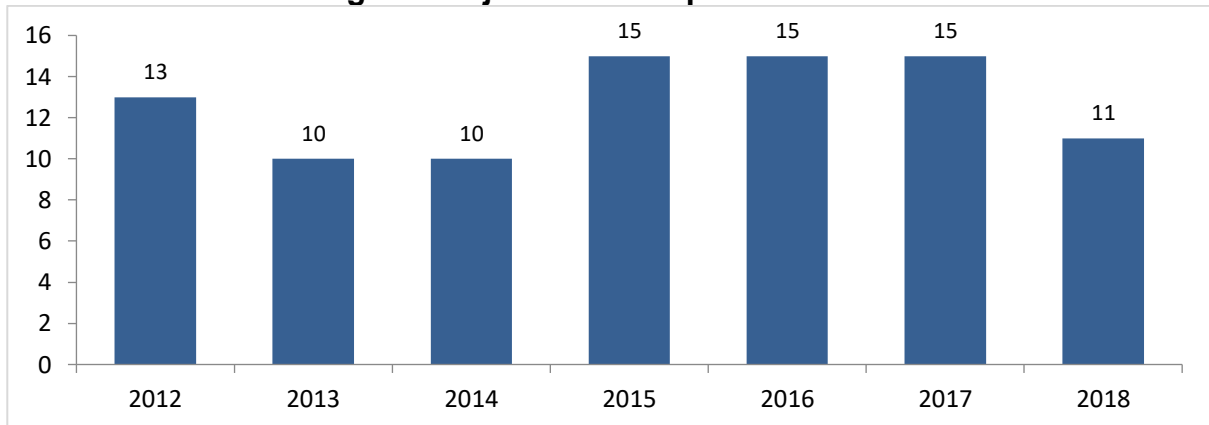
Grafik 2.47 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2019

Jumlah Keselamatan dan Perlindungan dari tahun 2014 sebanyak 128 Perusahaan meningkat menjadi 284 Perusahaan pada tahun 2018.

Grafik 2.48 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda pada Tahun N

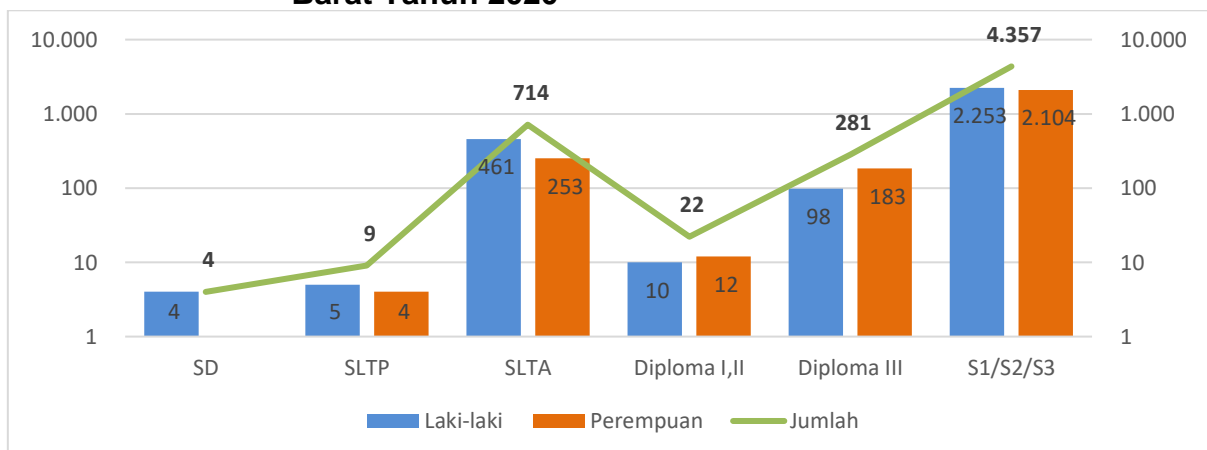


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2019

Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan kebijakan Pemda pada tahun N dari tahun 2014 sebanyak 10 Kasus meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2018).

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Grafik 2.49 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Jumlah Laki-Laki sebesar 2.831 dan Perempuan Sebesar 2.556 dari total Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Barat 5.387. Mayoritas PNS di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 merupakan lulusan universitas sebanyak 86,50 persen dari jumlah keseluruhan PNS.

2.4.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi Sulawesi Barat berdasarkan tabel di bawah, menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika dilihat berdasarkan golongan ruang, perbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh PNS laki-laki yang berada pada golongan ruang III/A – III/D. Dominasi perempuan pada golongan ruang III/C tahun 2017 sejumlah 511 dan III/D tahun 2018 sejumlah 453. Data dari Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada jabatan struktural pemerintah provinsi pada tahun 2018 baru mencapai 33,45 persen, dimana hampir pada seluruh jenjang eselon jabatan struktural, dominasi laki-laki masih sangat menonjol. Jika hal ini dikaitkan dengan golongan ruang PNS, khususnya pada golongan ruang III-a sampai IV-a yang hanya memiliki selisih yang kecil antara laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan akses bagi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural.

Tabel 2.89 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
I/A (Juru Muda)	1	100	0	-	1
I/B (Juru Muda Tk. I)	4	100	0	-	4
I/C (Juru)	8	61,5	5	38,5	13
I/D (Juru Tk. I)	8	80	2	20	10
II/A (Pengatur Muda)	108	64,7	59	35,3	167
II/B (Pengatur Muda Tk. I)	277	68,3	126	31,7	403
II/C (Pengatur)	72	55	59	45	131
II/D (Pengatur Tk. I)	78	57,8	57	42,2	135
III/A (Penata Muda)	402	50	403	50	805
III/B (Penata Muda Tk. I)	378	51,3	359	48,7	737
III/C (Penata)	456	50,1	454	49,9	910
III/D (Penata Tk. I)	437	49,1	453	50,9	890
IV/A (Pembina)	313	54,5	261	55,5	574
IV/B (Pembina Tk. I)	374	65	202	35	576
IV/C (Pembina Utama Muda)	20	90,9	2	9,1	22
IV/D (Pembina Utama Madya)	20	90,9	2	9,1	22
IV/E (Pembina Utama)	0	-	0	-	0

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin				Jumlah
	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	
Jumlah	2,956	54,7	2,444	45,3	5,400

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

Adapun persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan secara keseluruhan Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru sekitar 7,8 persen. Dari angka tersebut bisa menggambarkan kesempatan perempuan dalam menduduki jabatan berdasarkan golongan ruang masih kecil jika dibandingkan dengan laki-laki.

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.90 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

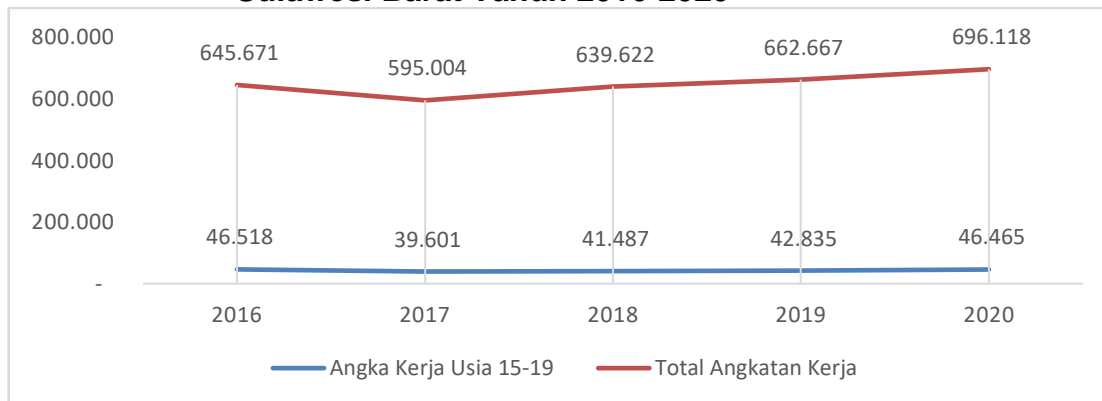
Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	Tdk ada %	Tdk ada %	92 %	92 %	32,42 %	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

c. Angkatan Kerja Dibawah Umur

Angkatan kerja di bawah umur Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di bawah umur sebesar 42.835 jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 46.465 jiwa dari total angkatan kerja yang ada. Angka tersebut memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relative rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting dalam upaya pengurangan jumlah anak di bawah umur yang bekerja.

Grafik 2.50 Angkatan Kerja Menurut Umur 15-19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



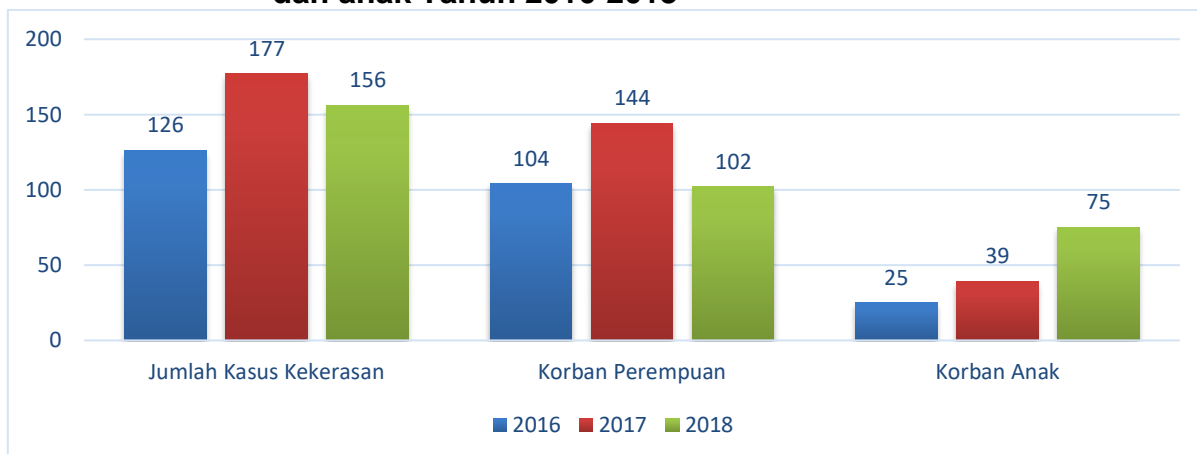
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

d. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

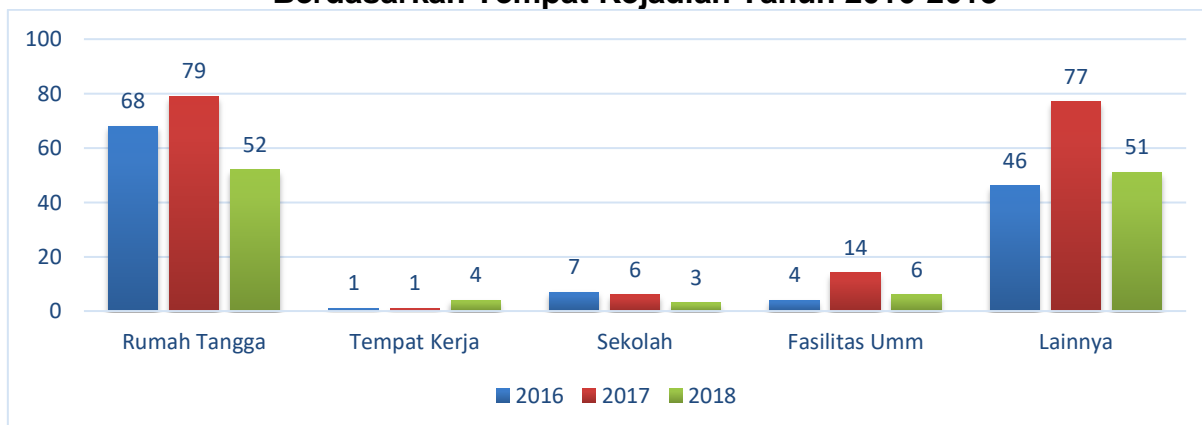
Kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dimana jumlah kasus kekerasan pada tahun 2016 sebesar 126 kasus meningkat menjadi 156 kasus pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 24 persen. Demikian halnya dengan jumlah korban anak juga mengalami kenaikan namun berbeda dengan jumlah korban perempuan yang mengalami penurunan serta berdasarkan tempat kejadian paling banyak dilakukan dalam rumah tangga seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

Grafik 2.51 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan anak Tahun 2016-2018



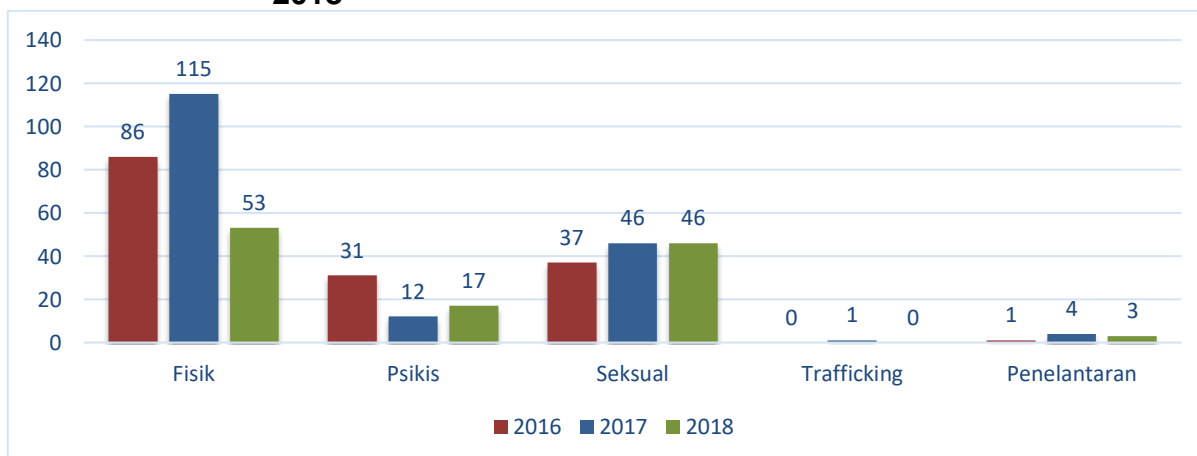
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.52 Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.53 Jenis kekerasan terhadap Perempuan dan anak Tahun 2016-2018



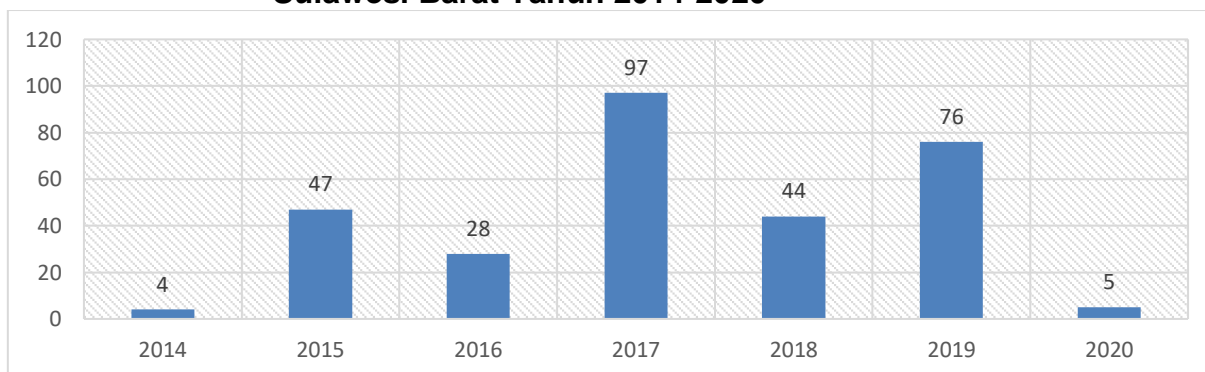
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenisnya terbesar adalah kekerasan fisik, seksual dan psikis. Ketiga jenis kekerasan tersebut harus menjadi perhatian dan dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menghilangkan ataupun mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus mengalami peningkatan.

e. Jumlah Penanganan Laporan KDRT

Kasus kekerasan dalam rumah tinggi di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 97 kasus menjadi 41 kasus pada tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2018 hal ini masih mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terkait perlindungan perempuan dan anak.

Grafik 2.54 Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2021

f. Indeks Pembangunan Gender

Isu-isu tentang penyetaraan gender memang akan selalu menjadi perdebatan sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian membawa pada permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan

dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks pembangunan gender ini menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender. Berikut ini disajikan tabel indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Tabel 2.91 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	94.55	94.89	95.17	94.42	94,09
Polewali Mandar	90.89	91.22	91.87	91.57	91,56
Mamasa	97.85	98.21	98.53	97.75	97,79
Mamuju	89.15	89.93	90.24	90.64	90,57
Pasangkayu	83.12	83.76	84.15	84.42	84,92
Mamuju Tengah	87.13	87.44	87.90	86.70	86,34
Sulawesi Barat	89.35	89.44	90.05	89.76	89,43

Sumber: BPS, *bps.go.id* 2021

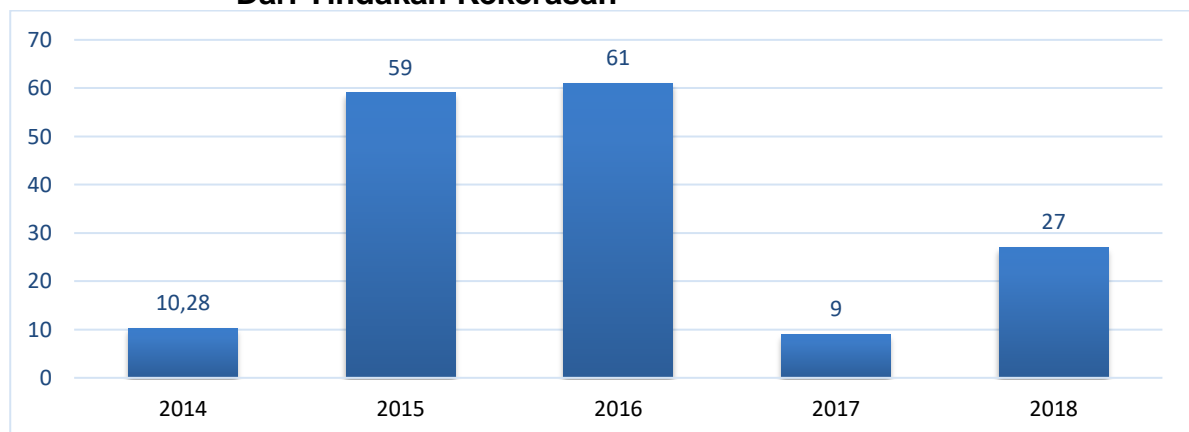
Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan Pada tahun 2016 nilai IPG sebesar 89,35 persen, meningkat hingga tahun 2019 sebesar 89,76 persen kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 89,43 persen. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan namun ketimpangan tersebut semakin mengecil. Untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai IDG Sulawesi Barat tahun 2020 sebesar 65,92 persen, salah satu komponen pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional seperti yang ditunjukkan pada tabel di Bawah ini. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Barat tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Sulawesi Barat.

Tabel 2.92 Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Kabupaten	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	N/A	53.72	50.97	53,41	53,55
Polewali Mandar	N/A	61.86	55.16	50,93	57,01
Mamasa	N/A	47.66	45.92	50,88	47,60
Mamuju	N/A	53.15	54.42	52,97	56,42
Pasangkayu	N/A	56.82	51.73	47,20	46,54
Mamuju Tengah	N/A	50.60	61.67	54,81	52,05
Sulawesi Barat	52.67	54.93	52.99	51,67	53,26

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2021

Grafik 2.55 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.9 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketahanan pangan di Sulawesi Barat secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Sulawesi Barat;

- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah sebagaimana yang tertera pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.93 Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2018

Kabupaten	Luas Lahan Sawah					Luas (Ha) penurunan/ kenaikan lahan sawah	Persentase penurunan/ kenaikan lahan sawah
	2014	2015	2016	2017	2018		
Mamuju	15.826	15.395	15.395	N/A	N/A	0	0
Majene	1.247	1.620	1.620	N/A	N/A	0	0
Polewali Mandar	17.119	17.628	18.546	N/A	N/A	981 (-)	0,05
Pasangkayu	6.353	3.338	4.437	N/A	N/A	1.099 (+)	0,33
Mamuju Tengah	11.026	11.189	11.189	N/A	N/A	0	0
Mamasa	13.974	12.876	12.876	N/A	N/A	0	0
Sulawesi Barat	65.730	62.046	64.063			2.017	0,3

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019

Keterangan: Data 2017 dan 2018 Tidak tersedia

Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2014 - 2018 mengalami peningkatan seperti pada Tabel dibawah. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Sulawesi Barat setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

Tabel 2.94 Ketersedian Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Padi (Ton GKG)	548.536	668.362	676.362	300.142,22	319.165,97
Produksi Beras (Kg)	301.695.000	267.674.250	267.674.250	171.491.240	182.360.830
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.256	1.419.229
Konsumsi Perkapita (Kg/Thn)	113,70	112,60	112,60		
Kebutuhan Beras (Kg)	148.697.429	145.967.169	145.967.169		
Surplus Beras (Kg)	152.997.571	160.332.625	179.575.506		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Tabel 2.95 Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 (juta ton)

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kedelai	3,008	-	4,943	4.216	4.356
Kacang Hijau	0.455	0	4,243	4.360	4.524
Kacang Tanah	0,406	0	0,287	0,329	0,442
Ubi Jalar	8,177	6,005	4,547	8.749	9.987
Gula	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Tahun 2014, yaitu ketersediaan energi 2.388 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 87 gram/kap/hari. Dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu ketersediaan energi 4.983 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 113,45 gram/kap/hari. Perkembangan ketersediaan energi dan protein perkapita dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 2.96 Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Daging	1.378	7.529	10.260	11.025	11.254
Susu	-	-	-	-	-
Telur	-	-	-	-	-
Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2014 – 2018 (k.kal/kap/hr)	2.388	3.447	4.447	4.740	4.983
Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2014– 2018 (gram/kap/hari)	87	97	122,47	113,70	113,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Barat dari Tahun 2014 - 2018 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Sulawesi Barat dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.97 Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Kelompok Pangan	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Umbi-umbian	1,6	1,7	0,6	1,0	1
Pangan Hewani	11,9	13,5	18,9	15,1	14
Minyak & lemak	5,0	5,0	4,4	4,5	5
Buah/biji berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70
Kacang-kacangan	2,4	3,4	4,7	4,3	3
Gula	2,0	2,1	2,5	2,5	2
Sayur & buah	22,0	21,4	17,0	23,4	22

Kelompok Pangan	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Lain-lain	-	-	0,0	-	0
Skor PPH Sulbar	70,9	73,14	74,0	76,8	73
Skor PPH Nasional					

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Sulawesi Barat sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.98 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Beras (Kg/Kap/Th)	N/A	114,76	112,59	109,2	115,1
Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	N/A	8,46	7,31	11,3	11,1
Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	N/A	36,9	45,74	41,8	35,2
Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	N/A	68,13	72,61	59,0	72,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Tabel 2.99 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Padi-padian	N/A	1.297,7	1.345,5	1.302,2	1.133,6
Umbi-umbian	N/A	28,9	28,4	41,3	42,4
Pangan Hewani	N/A	146,4	160	150,7	135,7
Minyak & lemak	N/A	171,4	191,1	178,5	194,8
Buah/biji berminyak	N/A	53,6	54,6	44,5	27,1
Kacang-kacangan	N/A	30,6	36,5	43,0	32,6
Gula	N/A	111,3	116,0	106,3	88,9
Sayur & buah	N/A	88,0	78,7	93,7	89,4
Lain-lain	N/A	28,7	27,8	24,0	37,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

2.4.10 Urusan Pertanahan

Sebagai Provinsi yang masih sangat muda tentunya ketersediaan lahan yang ada di Sulawesi Barat masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, baik untuk

bidang pertanian, perkebunan maupun untuk kawasan perumahan penduduk. Persentase penduduk yang memiliki lahan baru sekitar 78,65 persen, dengan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 64,54 persen dari luar Areal Penggunaan Lain (APL). Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100 Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Indikator	Capaian
Persentase Penduduk yang memiliki lahan	78,65 %
Persentase luas lahan bersertifikat	64,54 % dari luas APL
Penyelesaian kasus tanah negara	3 Kasus

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulbar

2.4.11 Urusan Lingkungan Hidup

a. Mangrove

Provinsi Sulawesi Barat sanga kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak mempehatikan kearifan lokal dalam mengelolah lingkunganya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

Tabel 2.101 Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat

Kabupaten	Kondisi Hutan Mangrove (Ha)			
	Baik	Sedang	Rusak	Total
Mamuju	220.245,00	286.450,00	183.555,00	690.250,00
Majene	33,58	35,97	2,99	72,54
Polewali Mandar	23,90	88,25	205,18	317,33
Pasangkayu	310,15	250,00	294,00	854,15
Mamuju Tengah	22,00	21,00	24,50	67,50
Jumlah	220.634,63	286.845,22	184.081,67	691.561,52

Sumber: Tim Pokja DKPLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat berdasarkan data di atas terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar 286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen

hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan.

b. Terumbu Karang

Tabel 2.102 Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat

Kabupaten	Kondisi Terumbu Karang (Ha)				
	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	Luas Total
Mamuju	600,00	1.066,00	1.934,00	3.600,00	7.735,00
Majene	0	0	120,58	287,95	408,53
Polewali Mandar	0	477,48	0	371,75	849,23
Pasangkayu	200,07	346,23	250,48	287,95	1.084,73
Mamuju Tengah	0	0	36,00	15,00	51,00
Jumlah	800,07	1,889,71	2.220,48	4.274,70	9.719,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

Ket.: Kondisi Terumbu karang disulawesi barat untuk 2018 tidak tersedia data dikarenakan Penyusunan Profil di DLH tidak dilaksanakan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya mencapai 8,23 persen, dalam kondisi baik sebesar 19,44 persen dan kondisi cukup sebesar 22,84 persen serta kondisi kurang sebesar 43,98 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir sebanding dengan kondisi kurang. Hal ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Pasangkayu dan yang sangat kurang yaitu Kabupaten Mamuju.

c. Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya lahan kritis yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada

masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan serta penanaman tanaman semusim.

Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air.

Tabel 2.103 Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat (Hektar), 2019

Daerah	Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	848,04	33 515,79	41 438,86	5 873,80	-
Polewali Mandar	2 895,52	7 459,89	66 974,18	16 914,34	144,38
Mamasa	11 781,11	40 570,77	135 615,07	5 102,30	7 399,22
Mamuju	21 819,37	103 639,93	200 924,90	9 266,29	642,55
Pasangkayu	10 125,55	73 183,77	72 324,18	5 571,59	742,64
Mamuju Tengah	26 390,41	101 576,22	83 686,86	544,17	57,94
Sulawesi Barat	73 860,00	329 946,38	600 964,05	43 272,49	8 986,73

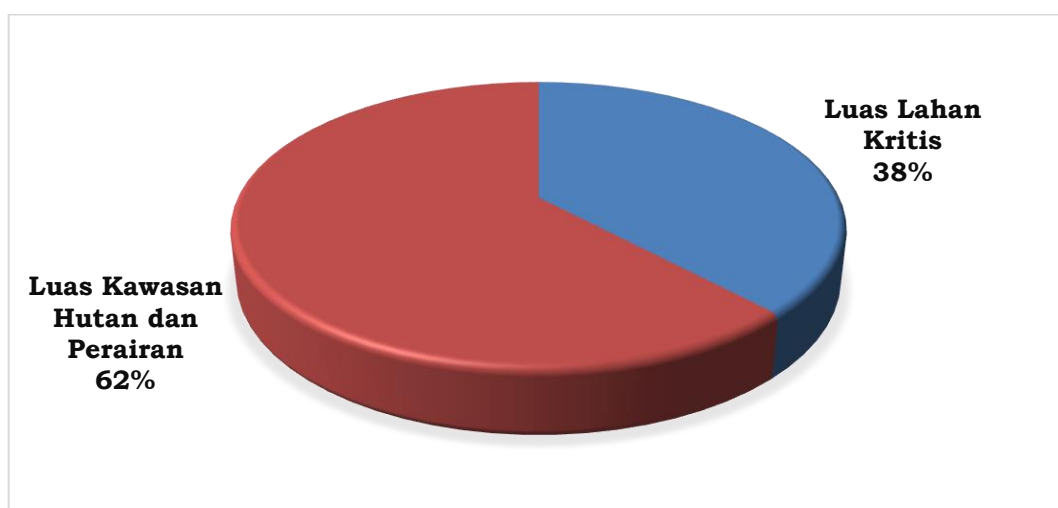
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Lanjutan Tabel diatas

Daerah	Bukan Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	3 976,90	6 287,85	25 721,20	1 912,38	30,68
Polewali Mandar	22 659,93	17 255,18	54 354,78	7 897,74	264,46
Mamasa	9 294,99	7 404,28	66 480,91	10 281,38	3 808,74
Mamuju	25 693,50	18 352,14	66 814,94	8 269,24	63,49
Pasangkayu	36 756,90	63 034,45	24 943,75	536,62	538,36
Mamuju Tengah	34 772,37	21 364,34	40 589,34	1 107,95	119,87
Sulawesi Barat	144 154,57	133 698,24	278 904,92	30 005,31	4 825,60

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Diagram 2.4 Persentase Luas Lahan Kritis di Sulawesi Barat 2018



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

d. Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat

Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan.

Tabel 2.104 Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Majene	50,00	N/A	70,00	N/A	N/A
Kab. Polewali Mandar	42,00	59,33	33,33	46,67	50,00
Kab. Mamasa	48,86	53,43	67,14	47,14	51,82
Kab. Mamuju	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A
Kab. Pasangkayu	40,00	33,67	55,56	47,50	N/A
Kab. Mamuju Tengah	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A
Prov. Sulawesi Barat	45,84	54,11	52,01	53,20	53,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

Ket : Tahun 2018 pemantauan hanya dilakukan pada 3 sungai di 3 kabupaten yaitu Pasangkayu, Polman dan Mamasa, Tahun 2017 Pemantauan hanya dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Pasangkayu, Polman dan Mamasa, Ika kab. Majene data pemantauan berasal dari Hasil Pemantauan kabupaten Mamasa.

Tabel 2.105 Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat

Provinsi/Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Majene	99,35	98,92	81,91	84,14	86,87
Kab. Polewali Mandar	99,23	99,33	88,66	87,68	85,51
Kab. Mamasa	99,41	99,61	87,32	92,63	91,48
Kab. Mamuju	99,21	99,57	92,29	92,11	92,88

Provinsi/Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Pasangkayu	99,26	99,64	94,53	94,96	92,94
Kab. Mamuju Tengah	-	99,64	90,83	88,48	88,62
Prov. Sulawesi Barat	99,29	99,45	89,26	90,00	89,72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.106 Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat

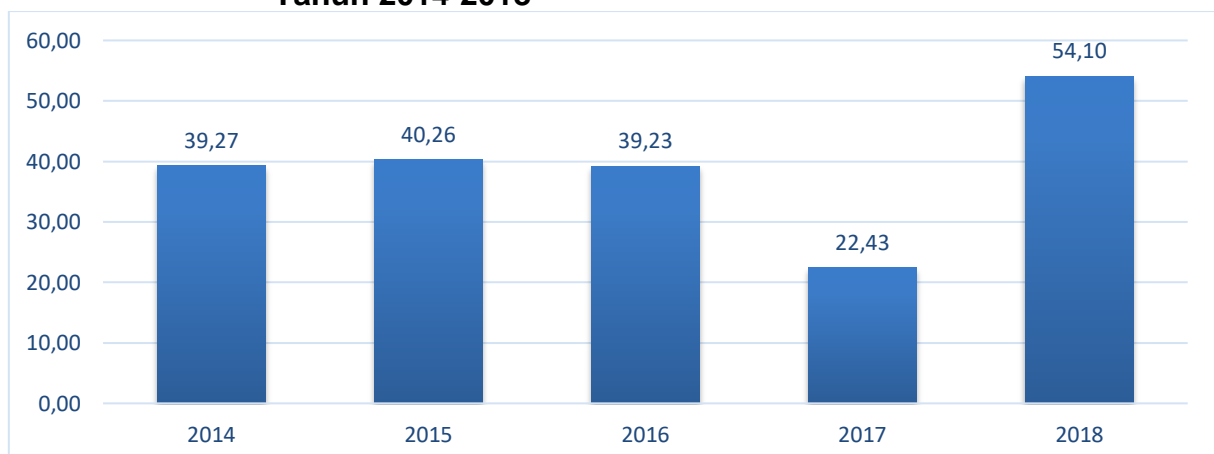
Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	50,81	52,48	51,60	51,52	58,90
Polewali Mandar	40,62	40,94	39,37	37,25	40,77
Mamasa	67,29	68,48	66,76	68,20	70,50
Mamuju	76,58	70,27	73,66	73,62	82,61
Pasangkayu	63,48	62,50	62,21	62,53	63,17
Mamuju Tengah	-	82,23	79,41	79,38	80,13
Provinsi Sulawesi Barat	67,28	62,82	62,17	62,08	70,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir.

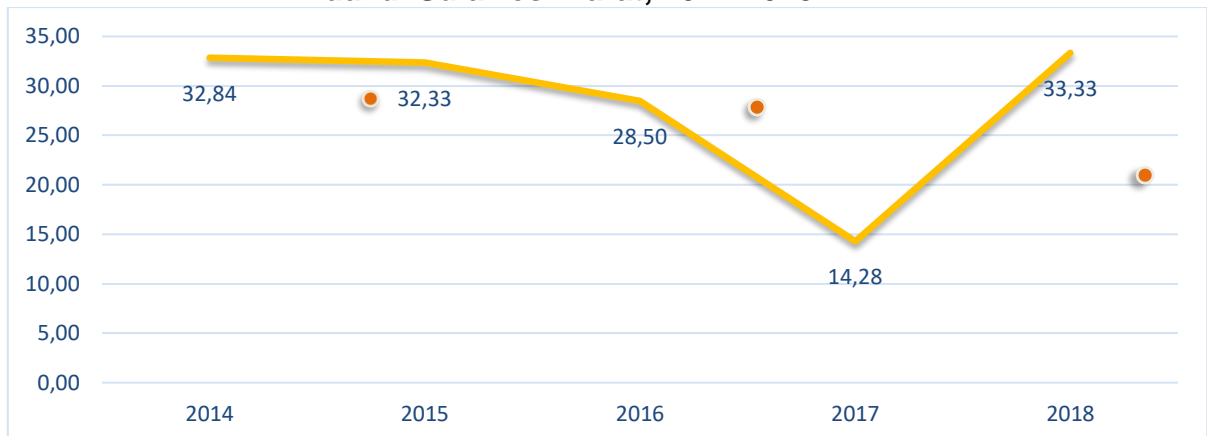
Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2016-2020 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2014 persentase penanganan sampah tercatat 39,27 persen, akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 22,43 persen. Namun kemudian di tahun 2018, persentase penanganan sampah mengalami meningkat menjadi 54,10 persen. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Tabel 2.107 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018



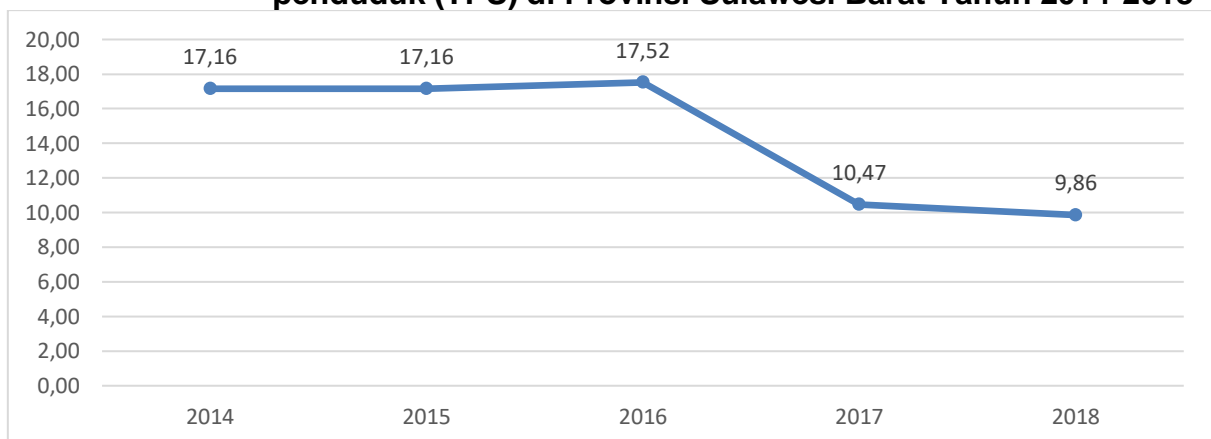
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.108 Persentase Cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal di Sulawesi Barat, 2014-2018



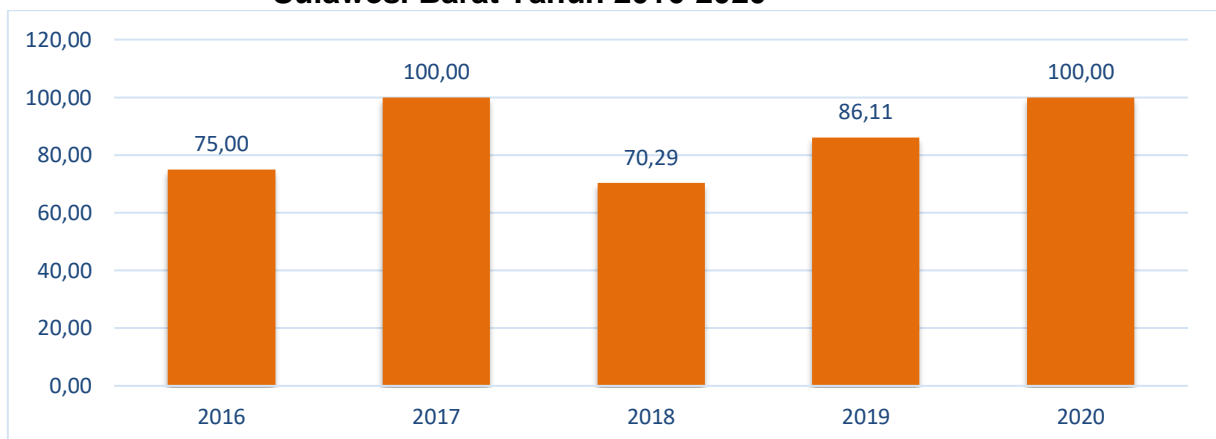
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.109 Persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (TPS) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.110 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.111 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase penduduk berakses air minum	37,91	56,70	40,90	n/a	n/a
Persentase Luas pemukiman yang tertata	0,00	0,00	0,00	n/a	n/a
Persentase Pencemaran status mutu air	8,33	8,33	8,33	n/a	n/a
Persentase Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	8,12	10,68	21,83	n/a	n/a

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.112 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

INDIKATOR	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk	686.611	65	713.936	67	796.186	75		78	866.785	89
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	78.325	56	78.926	81	91.635	87	9.109	92	10.322	93
Rasio Pasangan Berakte Nikah	35.345	6	55.854	9	87.562	14	117.036	21	172.776	28
Kepemilikan KTP	1.048.658	65	1.068.957	67	1.068.246	75	1.076.125	78	972.811	89
Kepemilikan Akte Kelahiran/1000 Penduduk	N/A		N/A		398.343	25,5 3				
Kependudukan Skala Provinsi					Ada		Ada		Ada	
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK					Sudah		Sudah		Sudah	

Sumber: Disas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius pemerintah mengingat keberadaan pemerintahan desa memiliki arti strategis sebagai lini terdepan dalam memberikan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemajuan desa sangat ditentukan oleh kondisi pemerintahan dan kelembagaan yang berkembang di desa dan kelurahan yang bersangkutan. Kondisi pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif serta kelembagaan masyarakat yang proaktif dan partisipatif merupakan modal utama pendukung kemajuan desa menuju kemandirian. Di Sulawesi Barat, sebagian besar desa merupakan desa tertinggal. Desa tertinggal tersebar di seluruh kabupaten baik wilayah dataran tinggi berciri desa perladangan/kebun, wilayah dataran rendah berupa desa padi sawah dan perkebunan rakyat, maupun wilayah pesisir berupa desa pantai/perikanan tangkap. Karena itu,

dalam penanggulangan kemiskinan, pendekatannya tidak hanya meniscayakan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pendekatan pemandirian desa. Dengan sinergi pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa, yang di dalamnya berinterkoneksi unsur manusia, kelembagaan dan sumberdaya alam, dapat diharapkan berkembangnya teknostruktur desa dalam mengelola potensi lokalitasnya.

Salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini adalah Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang dikenal dengan nama MARASA yang telah menjadi Peraturan Daerah No 42 Tahun 2018 tentang MANDIRI, CERDAS SEHAT. Tujuan dari MANDIRI, CERDAS SEHAT adalah semakin efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.

Tabel 2.113 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	37,39	42,95	45,39	54,26	61,56
- Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	215	247	261	312	354
- Jumlah seluruh kantor pemerintahan desa	575	575	575	575	575
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	71	75	83	84	87
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
-Jumlah kelompok binaan PKK	9.993	9.993	9.993	9.993	9.993
-Jumlah PKK	138.556	138.556	138.556	138.556	138.556
LPM berprestasi					
- Jumlah LPM berprestasi	354	372	412	N/A	N/A
PKK aktif					
- Jumlah PKK Aktif	714	714	714	926	926
Posyandu aktif					
- Jumlah Posyandu aktif	1651	1723	1795	1775	1775
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	575 Desa	575 Desa	575 Desa	575 Desa	575 Desa
pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	79 Desa	69 Desa	59 Desa	N/A	N/A
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

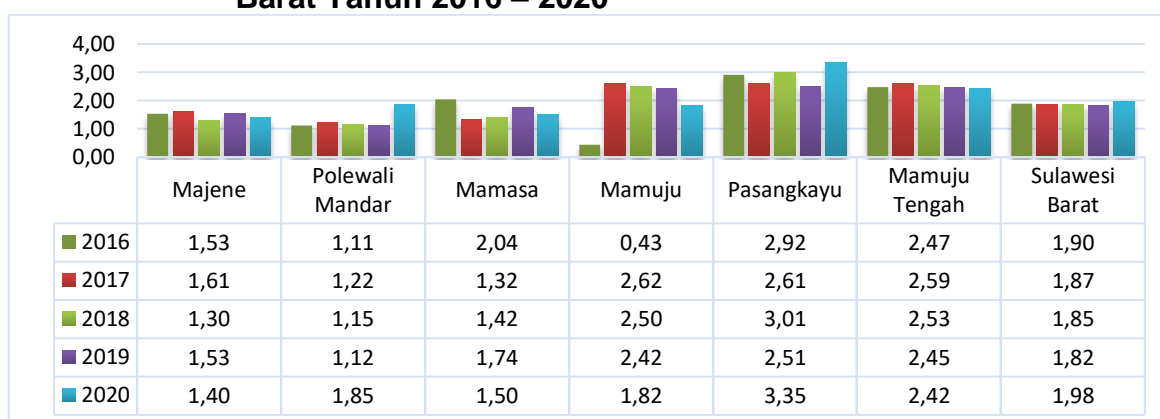
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat

2.4.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sejak dibentuk pada tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai potensi pengembangan kedepan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah lainnya untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 1,90 persen turun menjadi 1,82 persen pada tahun 2019. Dan di tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat naik sebesar 1,98 persen.

Grafik 2.56 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Pasangkayu dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dikarenakan Kabupaten Mamuju sebagai daerah sasaran migrasi masuknya penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Majene dengan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat mengalami laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan melambat disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang besar yaitu 184 jiwa/km².

Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419.229 jiwa terdiri dari

penduduk laki - laki sebanyak 720.187 jiwa dan perempuan sebanyak 699.042 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.98 persen.

Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) adalah banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama masa reproduksinya, dimana untuk Sulawesi Barat angka TFR tahun 2020 sebesar 2,68 merupakan angka yang tinggi dan menempati urutan ke 5 (lima) dari seluruh provinsi. Selanjutnya dari segi angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR (Age Spesific Fertility Rate) yang merupakan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per 1.000 wanita dari kelompok umur tertentu, dimana ASFR untuk kelompok usia muda di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 55 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun dan merupakan angka tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dan angka terendah terdapat pada Provinsi Aceh (13 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun).

Tinggi rendahnya angka TFR ini dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama penentu fertilitas, yaitu usia kawin pertama (UKP), pemakaian kontrasepsi, lama menyusui eksklusif, aborsi, dan sterilitas. Disamping itu faktor sosial budaya juga berpengaruh. Namun dalam operasionalnya, pencapaian TFR sangat ditentukan oleh kinerja pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) baik di tingkat Pusat dan Provinsi, maupun OPD KB di Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pembinaan kesertaan ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS).

Tabel 2.114 Total Fertility Rate, Age Spesific Fertility Rate dan Usia Kawin Pertama (UKP) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Kabupaten	ASFR (Age Spesific Fertility Rate)							TFR	Rata-Rata UKP
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
Sulawesi Barat	53	163	174	115	48	30	1	2,93	N/A

Sumber : BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga menjadi hal yang sangat penting.

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2012 sampai 2018 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2012 ke tahun 2014 terjadi penurunan persentase. Namun demikian pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan yang signifikan meskipun secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Adapun tabel rasio akseptor KB seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.115 Rasio Akseptor KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH AKSEPTOR KB	15 486	25 509	24 683	24 034	18 803
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR	216 025	205 805	203 677	210 044	196 227
RASIO AKSEPTOR KB	7,17	12,39	12,12	11,44	9,58

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebesar 74,77 persen mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 64,42 persen dan 70,92 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 75,06 persen, dan di tahun 2020 naik menjadi 77,92 persen sebagaimana tabel dibawah ini. Penurunan pada tahun 2017 terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.

Tabel 2.116 Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peserta KB Aktif	161,532	132,579	144,442	157.656	152.895
Jumlah Pasangan Usia Subur	216,025	205,805	203,677	210.044	196.227
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	74.77	64.42	70.92	75,06	77,92

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

2.4.15 Urusan Perhubungan

a. Perhubungan Udara

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi dan mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan 2 (dua) bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tampa Padang dan bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Mamasa.

Tabel 2.117 Kondisi Bandara Tampa Padang Sulawesi Barat Tahun 2020

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu (Runway)	2500 m x 45 m
Landas Hubung (Taxiway)	75 m x 18 m
Landas Parkir (Apron)	20.400 m ²
Overrun	2 x 30 m x 30 m
Bahu (Shoulder)	2 x 60 m x 2.500 m

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tampapadang Mamuju selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah terjadi penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada tahun 2005 menjadi 2,500 meter pada Tahun 2020. Dengan penambahan panjang tersebut maka Bandara Tampapadang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boing sekelas Garuda.

Tabel 2.118 Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2020

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu (Runway)	1.200 m x 30 m
Landas Hubung (Taxiway)	80 m x 15 m
Landas Parkir (Apron)	60 m x 40 m

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Mobilitas penduduk melalui bandara Tampa Padang selama tahun 2015-2018 mengalami peningkatan akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk mendukung daerah destinasi wisata di Kabupaten Mamasa maka Pemerintah Provinsi juga membangun Bandara Sumarorong yang berfungsi sebagai penghubung daerah wisata dari Bali, Sumarorong, Tana Toraja. Bandara ini telah beroperasi dan saat ini melayani rute Makassar- Sumarorong tiga kali seminggu.

Tabel 2.119 Aktivitas Bandara Tampa Padang Mamuju Tahun 2016-2020

Tahun	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Ton)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
2016	1 123	1 123	65 249	58 361	269 429	352 468
2017	1 497	1 497	88 218	82 686	441 914	507 642
2018	1 657	1 657	90 379	81 472	469 664	514 300
2019	1300	1300	67 432	61 488	307 736	208 239
2020	669	669	26 976	26 641	85 730	133 301

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.120 Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa, Tahun 2020

Bulan	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Kg)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
Januari	115	155	5 130	5 087	15 665	21 333
Februari	118	118	5 650	5 270	15 228	19 516
Maret	102	102	3 962	4 558	9 698	21 496
April	34	34	756	880	1 537	5 029
Mei	5	5	-	-	-	312
Juni	6	6	-	-	-	-
Juli	27	27	822	755	2 999	5 316
Agustus	51	51	1 630	1 751	6 799	10 333
September	50	50	1 760	1 584	6 692	10 598
Oktober	53	53	2 333	2 003	8 170	11 687
November	53	53	2 513	2 534	9 016	14 691
Desember	55	55	2 420	2 219	9 926	12 990
Sulawesi Barat	669	669	26 976	26 641	85 730	133 301

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pada tahun 2020, arus penerbangan di Bandara Tampa Padang dan Sumarorong Mamasa tercatat pesawat yang datang dan berangkat masing-masing 669 penerbangan. Jumlah penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 26.976 orang yang berangkat dan penumpang datang 26.641 orang.

b. Perhubungan Darat

Jumlah terminal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit, dimana terdapat terminal tipe A sebanyak 2 unit di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar serta tipe B maupun tipe C yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat.

Tabel 2.121 Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020

Tipe Terminal	2016	2017	2018	2019	2020
Terminal Tipe A	2	2	2	2	2
Terminal Tipe B	2	-	1	-	-
Terminal Tipe C	3	6	6	3	3
Terminal Pembantu	3	2	3	3	3
Jumlah	10	10	12	8	8

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.122 Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020

NO	NAMA TERMINAL	TYPE	KETERANGAN
I	KABUPATEN MAMUJU		
a.	Simbuang	A	Berfungsi
b.	Pasar Sentral Mamuju	C	Tidak Berfungsi
c.	Tarailu	C	Berfungsi
d.	Tasiu	TP	Berfungsi
II	KABUPATEN MAJENE		
a.	Lutang	TP	Berfungsi
b.	Ammana Wewang	C	Berfungsi
III	KABUPATEN POLMAN		
a.	Tipalayo	A	Berfungsi
b.	Polewali	TP	Berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

c. Perhubungan Laut

Pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Laut sebagai upaya mendukung jalur poros maritim yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah aktifitas pelayaran yang telah berlangsung di Sulawesi Barat.

Tabel 2.123 Kondisi Pelabuhan Belang-Belang

URAIAN	Dimensi
DERMAGA – 1 (Deep = -9 M)	62 X 15 M ²
DERMAGA – 2 (Deep = -11,25 M)	101 X 15 M ²
DERMAGA – 3 (2015)	100 X 15 M ²
LAPANGAN PENUMPUKAN	108 M2
GUDANG	850 M2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Secara umum, jenis pelayaran laut yang diselenggarakan diantaranya adalah pelayaran nasional, pelayaran rakyat, non pelayaran dan pelayaran luar negeri. Pada periode 2012-2014, aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, pelayaran ke luar negeri memiliki jumlah paling banyak yakni 41 pelayaran. Pelayaran luar negeri yang ada di Sulawesi Barat masih sebatas pada pengangkutan hasil olahan CPO.

Tabel 2.124 Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Minyak Sawit	Ton	300 774	212 993,14	206 965,13	493 966,94	582 041,50
Biji Sawit	Ton	162 723	54 209,41	116 981,07	76 688,48	58 414,61
Karang	M3	-	-	-	-	-
PKO	Ton	-	17 401,00	2 814,81	11 000,00	23 432,05
Jagung	Ton	8 951	9 035,00	7 817,54	9 072,50	8 048,50
Mobil	Unit	1 491	1 694,00	1 844,00	1 512,00	1 082,83
Motor	Unit	1 471	1 073,00	1 430,00	1 543,00	83,73
Hewan	Ekor	8 112	32 290,00	20 425,00	21 680,00	3 520,00
Barang Campuran	Ton	3 515	12 991,30	15 897,00	21 611,00	20 440,00
Pisang	Ton	1 132	948,00	1 175,00	2 804,33	8 323,00

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Aktivitas Bongkar Muat Barang di dominasi oleh jenis muatan produk sawit yang terdiri dari minyak sawit dan biji sawit, namun berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 aktivitas bongkar muat untuk minyak sawit mengalami kenaikan di tahun 2020. Berbeda dengan jenis biji sawit yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak biji sawit yang telah dilakukan pengolahan pada beberapa turunan sawit kemudian dilakukan pengiriman. Jenis muatan yang terbesar selanjutnya yaitu Hewan yang biasanya banyak di kirim ke beberapa daerah seperti kalimantan untuk keperluan hari-hari besar.

Tabel 2.125 Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat 2016-2020

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Semen	Ton	168 564	158 773	195 486,30	543 618,00	137 237,90
Kayu	M3	155	125	20,00	20,00	5,00
Ikan	Ton	191	56	562,86	640,76	153,23
Tali Bekas	Ton	-	50	15,00	15,00	82,00
Mobil	Unit	1 146	1 180	1 061,00	1 061,00	909,23
Motor	Unit	1 430	1 407	1 341,00	1 341,00	118,80
Hewan	Ekor	1 641	-	-	-	-
Barang Campuran	Ton	16 779	18 143	10 443,00	11 133,00	-
Pupuk	Ton	20 662	13 725	22 755,80	23 155,80	21 026,50

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Untuk Kategori aktivitas bongkar di pelabuhan didominasi oleh jenis muatan semen, yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi terjadi geliat pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Jenis muatan yang kedua yaitu pupuk yang banyak didatangkan dari daerah lainya untuk menunjang tanaman pertanian dan perkebunan yang ada di Sulawesi Barat.

Tabel 2.126 Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020

Bulan	Pelayaran	Penumpang (Orang)	
		Berangkat	Datang
Januari	277	3 818	2 743
Februari	252	3 249	2 286
Maret	309	3 391	2 961
April	250	-	-
Mei	154	-	-
Juni	269	382	367
Juli	230	1 128	1 227
Agustus	215	1 908	1 420
Septeber	268	1 919	1 715
Oktober	270	1 816	2 247
November	270	1 816	2 247
Desember	234	2 000	2 100
Jumlah	2 768	19 919	17 357

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.127 Capain Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Perhubungan					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum					
	Jumlah penumpang yang tiba (masuk)	1.105.145	18.730.719	17.646.005	1.164.677	659.385

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Jumlah penumpang yang berangkat (keluar)	1.034.925	15.869.913	8.892.781	1.146.297	844.350
	Persentase pergerakan kendaraan dan penumpang pada terminal tipe A, B dan C	18,71	22,38	33,10	17,95	28,46
2	Rasio Ijin Trayek					
	- Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan	249	212	177	37	20
3	Jumlah angkutan Darat					
	Jumlah angkutan Darat yang tiba (Masuk)	206.783	217.996	219.990	246.061	99.897
	Jumlah angkutan Darat yang berangkat (Keluar)	186.117	187.617	199.044	238.930	97.735
4	Pemasangan Rambu-rambu					
	- LPJU	20	72	55	32	
	- Rambu	22	31	9		
	- Guadrail	200	308	364		
	- Marka	Tidak ada	Tidak ada	1.000		
	- Delineator	Tidak ada	Tidak ada	112		
	- Halte	Tidak ada	Tidak ada	9		
5	Jumlah uji kir angkutan umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Lama Pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat

2.4.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan menyediakan layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (knowledge society). Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 93 (Sembilan puluh tiga) yang tersebar di seluruh Kabupaten.

Tabel 2.128 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pusat Layanan Informasi Internet Kecamatan (PLIK) Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat, 2018

Kabupaten	Pusat Layanan Internet Kecamatan
Majene	11
Polewali Mandar	26
Mamasa	19
Mamuju	22
Pasangkayu	10
Mamuju Tengah	5
Sulawesi Barat	93

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

Lembaga Penyiaran yang ada di Sulawesi Barat yang terdiri dari lembaga penyiaran televisi dan radio mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2014 sebesar 179 menjadi 55 pada tahun 2018.

Tabel 2.129 Jumlah Lembaga Penyiaran Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 - 2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
Majene	41	6	6	6	3
Polewali Mandar	68	4	8	8	3
Mamasa	12	1	2	2	5
Mamuju	38	10	23	23	20
Pasangkayu	15	2	3	3	13
Mamuju Tengah	5	2	3	3	11
Sulawesi Barat	179	25	45	45	55

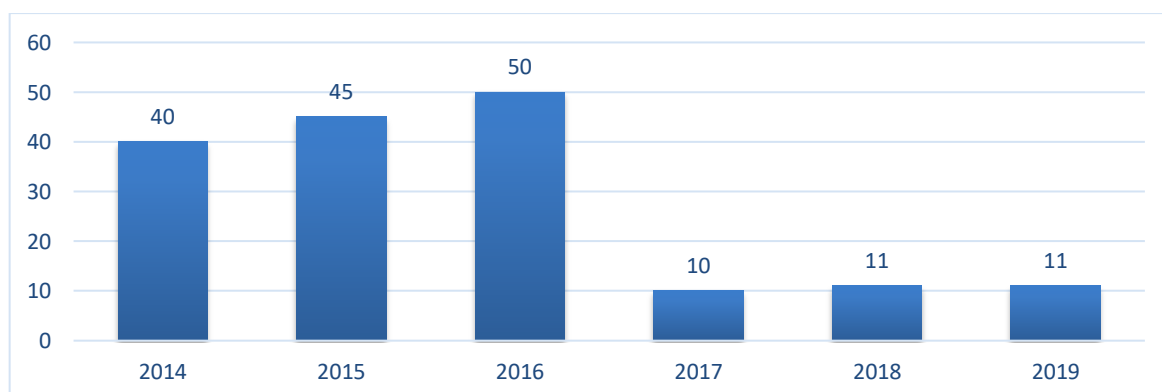
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019, Data 2018 sumber KPID Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.130 Jumlah Jaringan Komunikasi

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Unit	4 Unit

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.57 Jumlah Surat Kabar Nasional/Daerah di Prov. Sulbar



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.131 WebSite Milik Pemerintah Daerah

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat

2.4.17 Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada tahun 2019 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 941 unit. Terdiri dari 614 koperasi aktif dan 301 koperasi tidak aktif.

Tabel 2.132 Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, tahun 2019

Kabupaten	Keaktifan		Jumlah
	Aktif	Tidak Aktif	
Majene	105	4	109
Polewali Mandar	173	63	236
Mamasa	68	70	138
Mamuju	190	42	232
Pasangkayu	39	55	94
Mamuju Tengah	39	93	132
Sulawesi Barat	614	327	941

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 941 unit yang terdiri dari 614 koperasi aktif dan 327 koperasi yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh rendahnya informasi, akses pasar dan pembiayaan, juga disebabkan Sumber Daya Manusia para pelaku koperasi yang masih sangat minim.

Tabel 2.133 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2018

Usaha	Lapangan UMK	UMB	Jumlah Distribusi (%)	
Majene	19.757	108	19.865	14,35
Polewali Mandar	54.534	265	54.799	39,59
Mamasa	12.419	36	12.455	9,00
Mamuju	23.922	340	24.262	17,53
Pasangkayu	16.799	86	16.885	12,20
Mamuju Tengah	10.099	54	10.153	7,33
Jumlah	137.530 (99,36)	889 (0,64)	138.419 (100,00)	100,00

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

Tabel 2.134 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Majene	41.955	2.609	44.564	15,30
Polewali Mandar	94.580	4.432	99.012	33,99
Mamasa	27.263	835	28.098	9,65
Mamuju	52.734	6.202	58.936	20,23
Pasangkayu	35.106	2.475	37.581	12,90
Mamuju Tengah	22.124	963	23.087	7,93
Jumlah	273.762 (93,99)	17.516 (6,01)	291.278 (100,00)	100,00

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2019

Tabel 2.135 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Prov. Sulawesi Barat

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Presentase Koperasi Aktif (unit)	74,61%	75,22%	70,85%	73,50%	75,15%
Jumlah BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM
Jumlah UKM Non BPR/LKM	19995	29792	38150	20330	22150
Usaha Mikro dan Kecil (Keg.Expo)	8 UKM	8 UKM	5 UKM	5 UKM	5 UKM

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2019

2.4.18 Urusan Penanaman Modal

Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.

Pada kurun waktu 2014-2018, jumlah investor yang menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Barat mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Berdasarkan data dari DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Barat, jumlah investor sebanyak 516 pada tahun 2014 mengalami penurunan tahun 2015 sebesar 318 investor dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 7 investor, bahwa pada tahun tersebut, jumlah investor yang kecil dengan nilai investasi yaitu 745 Milyar rupiah.

Tabel 2.136 Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

Uraian	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	516 Investor	318 Investor	50 Investor	5 Investor	7 Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	4.4 Trilyun	6.8 Trilyun	10.52 Trilyun	745 M	745 M
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1 Izin/Non Izin	46 Izin/Non Izin	191 Izin/Non Izin	570 Izin	138 Izin
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	28	26	30	138	97
Lama Proses Perizinan (Rata-rata)	3 Hari	1 Hari	1 Hari	3 Hari	3 Hari
Jumlah PERDA yang Mendukung iklim Usaha	N/A	N/A	Masih sebatas Pergub	N/A	N/A

Sumber : DPMPTSP Prov. Sulbar, 2019

Tabel 2.137 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan sektor usaha Triwulan I 2017 - 2018

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA 2017		PENYERAPAN TENAGA KERJA 2018	
				INDONESIA	ASING	INDONESIA	ASING
I	Sektor Primer						
1	Tanaman pangan & Perkebunan	17	300099.9383	0	0	1631	1
2	Peternakan	0	0	0	0	0	0
3	Kehutanan	0	0	0	0	0	0
4	Perikanan	0	0	0	0	0	0
5	Pertambangan	6	999.6398584	4	0	0	0
II	Sektor Sekunder						
1	Industri Makanan	33	3712597.361	3481	0	3634	0
2	Industri tekstil	0	0	0	0	0	0
3	Industri barang dari kulit & alas kaki	0	0	0	0	0	0
4	Industri kayu	0	0	0	0	0	0
5	Industri kertas & percetakan	0	0	0	0	0	0
6	Industri kimia & farmasi	5	915.9114363	4	1	0	0
7	Industri karet & plastik	0	0	0	0	0	0
8	Industri mineral non logam	5	67500	0	0	3	0
9	Industri Logam, mesin & elektronika	0	0	0	0	0	0
10	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam	0	0	0	0	0	0

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA 2017		PENYERAPAN TENAGA KERJA 2018	
				INDONESIA	ASING	INDONESIA	ASING
11	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain	0	0	0	0	0	0
12	Industri lainnya	0	0	0	0	0	0
III	Sektor Tersier						
1	Listrik, gas dan air	58	149881.1163	43	0	195	47
2	Konstruksi	0	0	0	0	0	0
3	Perdagangan & reparasi	11	3310.559024	25	0	60	1
4	Hotel & restoran	0	0	0	0	0	0
5	Transportasi, gudang & komunikasi	6	32380.00605	250	0	0	0
6	Perumahan, kawasan industri & perkantoran	0	0	0	0	0	0
7	Jasa Lainnya	1	1650			7	0
Jumlah		141	4287476.289	4767	1	5530	49

Sumber : DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat, 2019.

Tabel 2.138 Realisasi Penanaman Modal Asing berdasarkan Perusahaan dan Bidang Usaha Triwulan IV 2018

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN/IZIN PRINSIP/IZIN USAHA	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
I	Kab. Majene					
1	PT. MAJENE ENERGY BAYU	2957/1/IP/PMA/2016	Ketenaga listrikan	1616.039771	4	2
2	PT. AKUO ENERGY INDONESIA	3005/1/IP/PMA/2016	Ketenaga listrikan	0	0	0
3	PT. ENERGI BITTARA MAJA	3248/1/IP/PMA/2016	Ketenaga listrikan (Pembangkit Tenaga Listrik)	103.1799854	3	2
Jumlah I				1719.219756	7	4
II	Kab. Polewali Mandar					
1	PT. HANMAN SIAMA SEYANG	488/1/IP/PMA/2015	Industri Barang Kimia Lainnya	3249.499976	60	1
2	PT. HANMAN SIAMA SEYANG	2104/1/IP/PMA/2017	Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup	1692.41976	0	0
Jumlah II				6317.039658	218	48
III	Kab. Mamuju					
1	PT. MAXPOWER	437/1/IP/PMA/2013	Perdagangan besar mesin	0	0	0
2	PT. MAXPOWER	437/1/IP/PMA/2013	Ketenaga listrikan (Pembangkit Tenaga Listrik)	0	0	0
3	PT. MAXPOWER	437/1/IP/PMA/2013	Jasa pertambangan minyak bumi dan gas alam	999.6398584	0	0
4	PT. XL AXIATA TBK	3/1/IP-PP/PMA/2014	Telekomunikasi tanpa kabel	18242.75742	0	0

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN/IZIN PRINSIP/IZIN USAHA	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
5	PT. BIO INDUSTRY INDOCO	495/I/IP/PB/PMA/2015	(industri pelet kayu)	0	0	0
6	PT. SULAWESI ELECTRIC CITY	5/1/IP-PL/PMA/2015	Ketenagalistrikan	147.3999791	0	0
7	PT. TIRTO ENERGI UTAMA	234/1/IP/PMDN/2017	Ketenagalistrikan	0	0	0
8	PT. REKIND DAYA MAMUJU	228/1/IP/PMDN/2017	Ketenagalistrikan	14138.4	26	0
9	PT. MANAKARRA UNGGUL LESTARI	188.45/KTSP/VIII/2014	Industri minyak makan kelapa sawit	0	10	0
10	PT. PANCA UTAMA ENERGI	002/76/IP/PTSP.A/I/2018 dan 519/I/IP/PMDN/2017	Pembangkitan Tenaga Listrik	0	0	0
11	PT. SEMEN TONASA	1/76/PI/PMDN/2018	Industri Semen, Kapur dan Gips	67500	3	0
12	PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK	No. 8120318160854	Penyediaan Makanan dan Minuman serta produksi gambar bergerak	1650	7	0
Jumlah III				127925.6163	883	0
IV Kab. Mamuju Tengah						
1	PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI	360/I/IP/PMDN/2017	Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak mentah kelapa sawit (cpo)	286658.1194	885	0
2	PT. WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI	360/I/IP/PMDN/2017	Industri minyak mentah kelapa sawit (cpo)	214271.9	0	0
Jumlah IV				500930.0194	885	0
IV Pasangkayu						
1	PT. TIRTA WANGI POWER	338/T/KEHUTANAN/PERKEBUNAN/2000	Ketenagalistrikan	0	0	0
2	PT. UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI	338/T/KEHUTANAN/PERKEBUNAN/2000	Industri Minyak makan dan lemak nabati dan hewani	0	0	0
3	PT. TANJUNG BINA LESTARI	102/76/IP-PL/PMDN/2017	industri Minyak Makan kelapa sawit (cpo) dan minyak goreng kelapa sawit (pabrikrefining dan fraktionation)	121352.2	16	0
4	PT. TANJUNG SARANA LESTARI	101/76/IP-PL/PMDN/2017	Pabrik Refining dan fractionation	1494798	250	0
5	PT. SURYARAYA LESTARI	104/76/IP-PL/PMDN/2017	Industri minyak makan kelapa sawit (CPO) Perkebunan kepala sawit terpadu dengan unit	0	0	0

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN/IZIN PRINSIP/IZIN USAHA	BIDANG USAHA	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA	
					INDONESIA	ASING
			pengelolaan menjadi CPO, KARNEL dan PKO			
6	PT. WIDYA TEKNOLOGI LESTARI	59/II/PMDN/2009	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	0	0	0
7	PT. MAMUANG	15/76/IU/PMDN/2013	Perkebunan kepala sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi CPO dan PKO	0	0	0
8	PT. LETAWA	106/76/IP-PL/PMDN/2017	Industri minyak makan kelapa sawit dan minyak makan kelapa sawit (perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi CPO dan inti kelapa sawit/karnel serta palm karnel oil)	565164.7	1628	0
9	PT. PASANGKAYU	105/76/IP-PL/PMDN/2017	Perkebunan kepala sawit terpadu dengan unit pengolahan menjadi CPO, KARNEL dan PKO	552790.1	1385	0
10	PT. AWANA SAWIT LESTARI	02/7506/IP/PMDN/2017	Industri minyak mentah kelapa wasit	90000	248	0
11	PT. BATUMAS MAKMUR LESTARI	298/1/IP/PMDN/2017	Pembangkitan Tenaga Listrik	0	0	0
Jumlah V				2824252.4	3527	0
V	Mamasa					
1	PT. AGRO LINO SEJAHTERA	654/1/IP/PMA/2015	Perkebunan tanaman untuk bahan minuman	13399.9981	6	1
2	PT. SULAWESI POWER ENERGY	976/1/IP/PMA/2015	Ketenagalistrikan	147.3999791	2	0
3	PT. SULAWESI POWER ENERGY	976/1/IP/PMA/2015	Ketenagalistrikan	499	5	0
Jumlah VI				14046.39808	13	1
Jumlah I II III IV V dan VI				3475190.693	5530	49

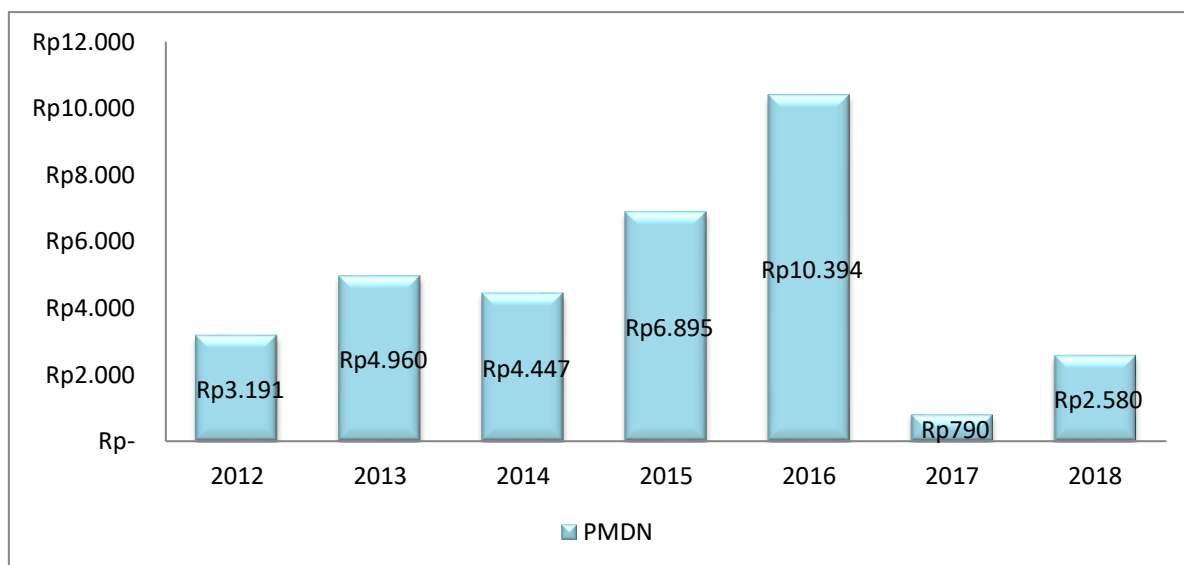
Sumber : DPMPTSP Prov. Sulbar, 2019 & Website BKPM <https://nswi.bkpm.go.id>

Catatan : Data yang tidak ada nilainya atau nilainya 0 disebabkan perusahaan tidak melaporkan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena tidak ada penambahan realisasi maupun jumlah tenaga kerjanya.

Nilai Realisasi PMDN mengalami Penurunan data yang turun drastis di tahun 2017 disebabkan karena pada tahun tersebut realisasi LKPM sudah dipisahkan antara

data Kabupaten dan data Provinsi sesuai dengan kewenangan, dimana pada tahun realisasi LKPM antara Kabupaten dan Provinsi masih bergabung.

Grafik 2.58 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)



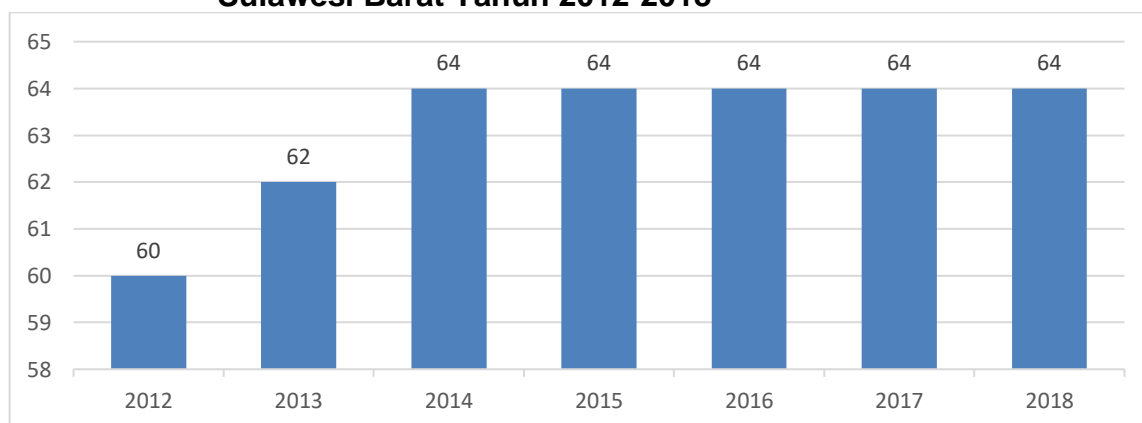
Sumber : DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.19 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Jumlah Organisasi Kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2012 sebesar 60 Organisasi Kepemudaan meningkat menjadi 64 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Perkembangan Organisasi Kepemudaan tersebut tentunya harus mendapat dukungan pemerintah terutama dalam pengembangan partisipasi dan potensi pemuda sehingga majunya organisasi kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

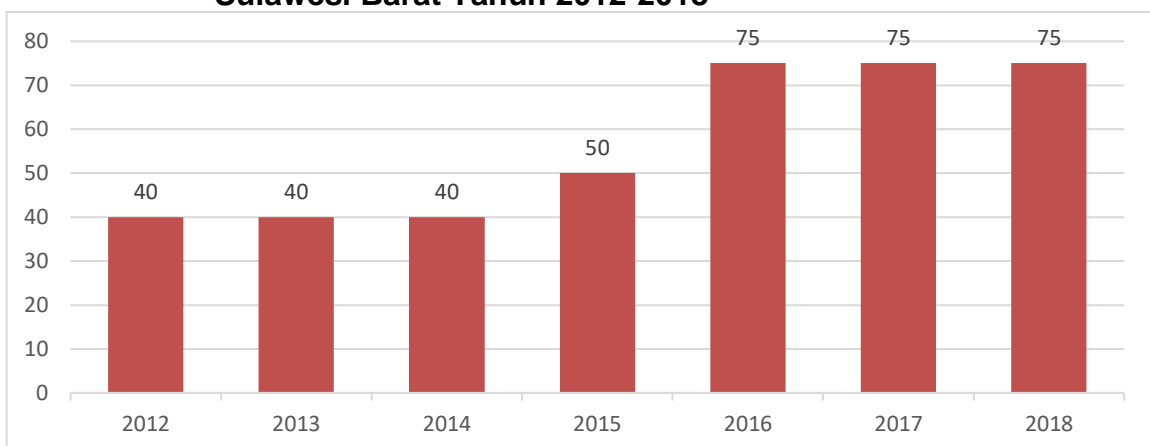
Grafik 2.59 Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2018



b. Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 hingga tahun 2014 sebesar 40 dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 75. Untuk meningkatkan kader kewirausahaan pemuda diperlukan Penanganan Program kewirausahaan secara berkelanjutan serta berbagai upaya seperti memberikan pendampingan, promosi serta bantuan permodalan kepada para kader.

Grafik 2.60 Perkembangan Kader Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2018

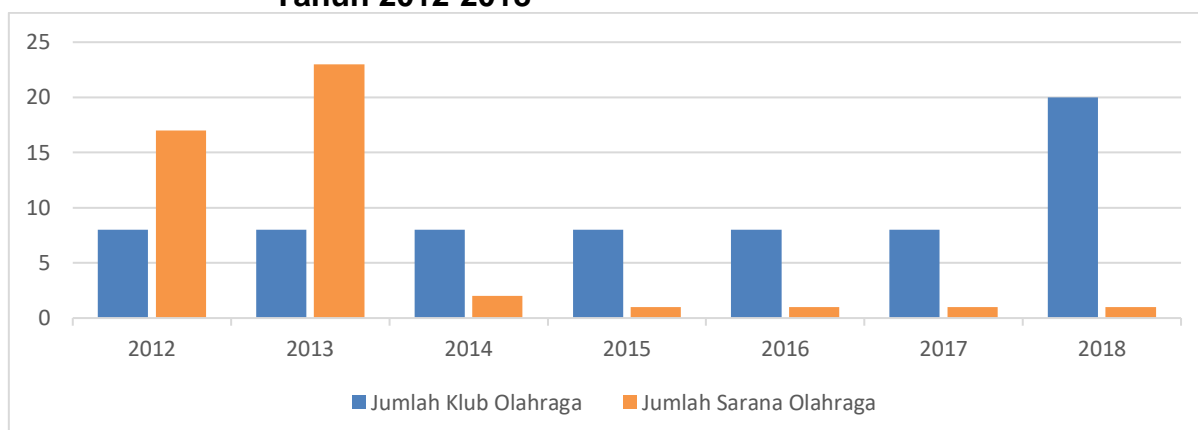


Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2019

c. Jumlah Klub dan Sarana Olah Raga

Perkembangan klub dan sarana olahraga di Sulawesi Barat masih sangat minim, jumlah klub olahraga dari tahun 2012 hingga tahun 2018 sebesar 20 (dua puluh) klub olahraga dan tidak ada perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pembibitan olahraga menjadi hal yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menekuni dunia olahraga di Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 jumlah sarana olahraga sebesar 17 unit dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 23 unit, sampai tahun 2018 menurun dan hanya 1 unit sarana olahraga melalui PPLP Sulawesi Barat yang terdiri dari 3 lapangan takraw, 1 lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung.

Grafik 2.61 Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2018



Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat 2019

Jumlah keseluruhan atlet yang dibina di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 30 atlet. Minimnya pembinaan cabang olahraga unggulan mengakibatkan minimnya partisipasi Sulawesi Barat dalam Kejuaaraan Nasional PPLP sesuai dengan cabang olahraga binaan. Hal ini tentunya mempengaruhi capaian prestasi keolahragaan pada tingkat nasional. Dalam pertandingan Kejurnas PPLP sejak tahun 2012-2016, untuk cabang olahraga takraw Sulawesi Barat telah meraih 2 emas; 3 perak; dan 4 Perunggu. Cabang Olahraga silat meraih 2 perunggu dan Cabang Olahraga Dayung telah meraih 4 emas; 1 perak; dan 4 perunggu. Untuk prestasi pada ajang olahraga nasional (PON) Sulawesi Barat hanya meraih 1 perunggu untuk cabang olahraga catur. Hal ini menunjukkan bahwa pembibitan dan regenerasi pada bidang keolahragaan masih sangat minim.

Sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat tergolong sangat minim. GOR dan Stadion belum tersedia bahkan untuk aset lapangan masih sebatas lapangan yang tersedia di PPLP Sulbar yaitu 2 (dua) lapangan takraw, 1 (satu) lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung (perahu cano) dan olahraga takraw.

Tabel 2.139 Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat

2.4.20 Urusan Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai budaya di masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak akan menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal yang ada, pemerintah mempunyai kewajiban membuat kebijakan - kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan daerah. Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi budaya, dengan keberanekaragaman suku di Sulawesi Barat menjadikan warna tersendiri bagi pengembangan budaya yang ada. Suku-suku tersebut terdiri dari Makassar (1,59%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Suku Mandar (49,15%), dan suku lainnya (19,15%).

Pentingnya pembangunan bidang kebudayaan sehingga pelaksanaannya termuat dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Urusan Kebudayaan menjadi urusan Wajib bagi pemerintah, baik itu Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event - event baik yang berskala provinsi maupun nasional. Pemberian ruang bagi penampilan kebudayaan lokal pada event - event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat nasional memberikan dampak positif bagi tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja.

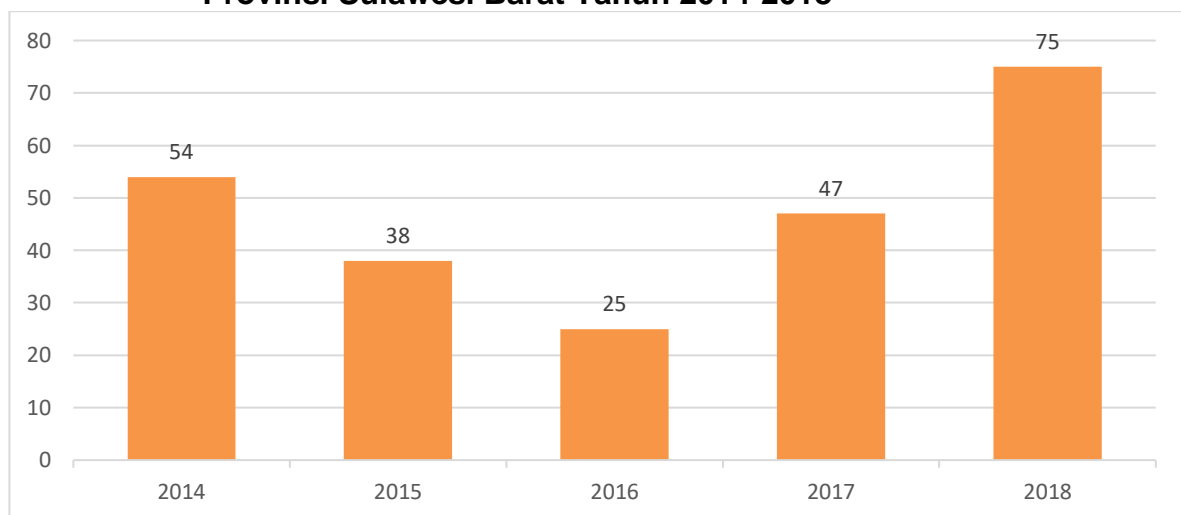
Tabel 2.140 Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018

Keterangan	TAHUN	
	2017	2018
Jumlah group kesenian (Grup)	176	185
Jumlah Gedung (Buah)	3	3
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	6	11
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.	10	34
Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	75

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 45 (empat puluh lima) hingga pada tahun 2015 sebesar 69 (enam puluh sembilan). Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu pemerintah dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat.

Grafik 2.62 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan seni dan budaya, berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut, salah satunya dengan cara rutin melaksanakan Karnaval budaya tingkat Provinsi maupun mengikuti perlombaan seni dan budaya tingkat nasional. Sebagai wujud dari besarnya perhatian tersebut provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali berhasil menjuarai karnaval budaya tingkat nasional. Beberapa pertunjukan seni dan budaya yang ada di Sulawesi Barat telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah disertifikasi nasional oleh pemerintah pusat. Adapun berbagai warisan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.141 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2018

TAHUN	NO. PENETAPAN	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	KET
2011		SANDEQ KATINTING	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	Ditetapkan
2013	201300046	SAIYYANG PATTU'DU	Seni Pertunjukan	Ditetapkan
2014	201400156	PASSAYANG-SAYANG	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Ditetapkan
2014	201400157	SANDEQ	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	Ditetapkan
2015	201500278	LOKA SATTAI /LOKA RO'DO /LOKA ANJOROI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2015	201500279	KAIN TENUN SUKOMANDI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2016	201600413	MANGARO	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600414	PERKAWINAN ADAT MANDAR	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600417	MASOSSOR MANURUNG /MANOSSOR MANURUNG	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600415	KEKE/ PAKEKE	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2016	201600416	CALONG	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2017	201700568	LIPA SAQBE MANDAR	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2018	201800794	MAPPATAMMAQ AL-QURAN	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800795	MAULIDAN SALABOSE	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800796	PUPU	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.21 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan terutama masyarakat pelajar, mahasiswa dan kelompok-kelompok tertentu untuk menunjang aktivitasnya. Dengan kata lain perpustakaan sudah memasyarakat, namun kita juga menyadari bahwa sebagian masyarakat yang lain belum mendapatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dan benar meliputi koleksi perpustakaan,

pengolahan koleksi dan pustaka, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Sulawesi Barat sangat minim terutama pada Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamasa dan Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, hal itu berdasarkan kurangnya jumlah pengunjung pada masing-masing perpustakaan tersebut. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat saat ini adalah masih minimnya koleksi buku yang tersedia, terlebih lagi kurang update-nya koleksi buku-buku yang ada. Beberapa hal itu tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sehingga upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan dapat dioptimalkan.

Tabel 2.142 Statistik Perpustakaan Daerah Pada Masing-Masing Kabupaten dan Provinsi, Tahun 2014 dan 2018

Kabupaten	Tahun 2014				Tahun 2017			
	Anggota (Orang)	Koleksi Buku (Buah)	Pengunjung (Orang)	Buku Yang Dipinjamkan (Buah)	Anggota (Orang)	Koleksi Buku (Buah)	Pengunjung (Orang)	Buku Yang Dipinjamkan (Buah)
Majene	4 188	9 505	395	6 976				
Polewali Mandar	1 858	13 185	36 000	4 972	1 120	14 786		
Mamasa	45	3 273	196	101		1 973		
Mamuju	589	9 264	1 738	938	3 300	11 419	4 300	8 600
Pasangkayu	10 747	8 238	3 889	329	5 373	13 200		
Mamuju Tengah	-	-	-	-	720	1 528	733	1 466
Sulawesi Barat	74	3 905	145	301	289	5 220	1 638	3 276

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Sementara di tahun 2018 Statistik Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat jumlah anggota sebanyak 356 orang, jumlah koleksi buku sebanyak 6.285, jumlah pengunjung sebanyak 1.559 dan jumlah buku yang dipinjamkan sebanyak 3.318 buah.

2.4.22 Urusan Kearsipan

Kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong

dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi kinerja aparatur pemerintah sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus benar adalah melalui penanganan arsip. Apalagi dalam konteks transparansi informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi baik dalam bentuk media kertas maupun non kertas. Dengan demikian arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi utamanya dalam melindungi hak kepentingan organisasi. Untuk itu arsip harus dikelola dan dilindungi secara khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak baik karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Pengelolaan arsip yang terprogram dan mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, efektif dan efisien.

a. Tenaga Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya Pasal 9 ayat (3) telah mengamanatkan kepada seluruh Pencipta Arsip untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, yang meliputi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Penyelenggaraan kegiatan kearsipan agar dapat berjalan secara optimal, tentunya harus didukung oleh jumlah dan kualitas tenaga kearsipan yang memadai. Tenaga arsiparis di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat masih sangat minim dan sangat terbatas, dimana dari seluruh kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Barat, tenaga arsiparis hanya terdapat di Kabupaten

Pasangkayu yaitu sebanyak 2 (dua) arsiparis dengan kategori terampil seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.143 Sebaran Tenaga Arsiparis se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Provinsi/ Kabupaten	Arsiparis		Jumlah
	Ahli	Terampil	
Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0
Mamuju	0	0	0
Majene	0	0	0
Polman	0	0	0
Mamasa	0	0	0
Pasangkayu	0	2	2
Mamuju Tengah	0	0	0
Jumlah	0	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2019

b. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pencipta arsip dan lembaga kearsipan perlu menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 32, dan pasal 33. Sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sulawesi Barat sangat memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (Records Center). Jika keduanya tidak ada atau tidak memadai, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Tabel 2.144 Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2018

Lembaga Kearsipan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kebutuhan	Tingkat Ketersediaan %
LKD Provinsi Sulawesi Barat	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju	0	1	0
LKD Kabupaten Majene	0	1	0
LKD Kabupaten Polewali Mandar	0	1	0
LKD Kabupaten Mamasa	0	1	0
LKD Kabupaten Pasangkayu	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju Tengah	0	1	0
Jumlah	0	7	0

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 2019

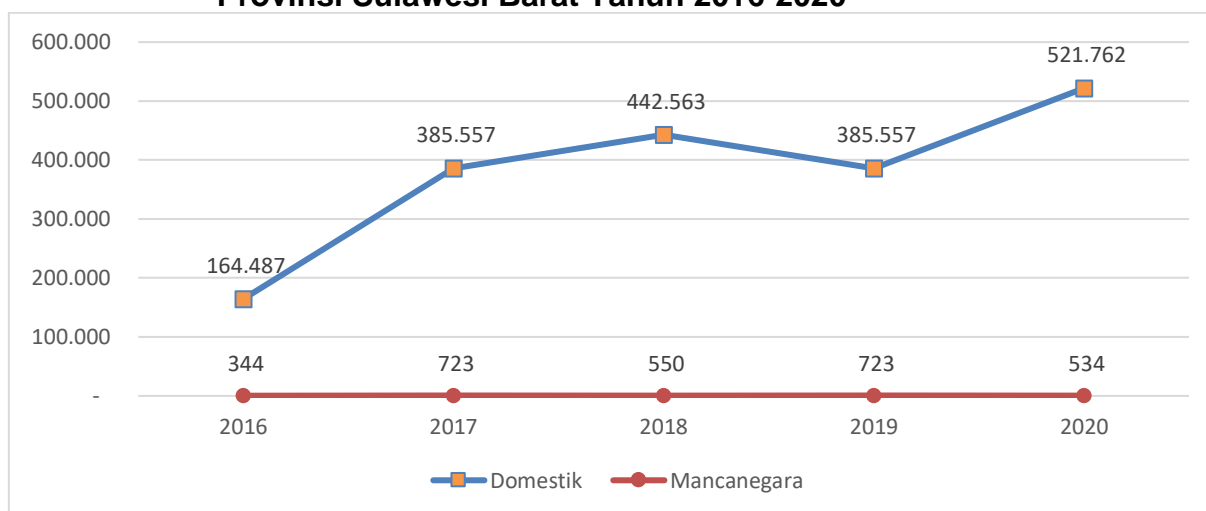
Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan Depot Arsip masih sangat tinggi, belum adanya lembaga kearsipan daerah yang memiliki Depot Arsip di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan ketersediaan *record center*, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di

Provinsi Sulawesi Barat, record center hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

2.4.23 Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Sulawesi Barat. Disamping karena potensi pariwisata yang besar, pariwisata juga menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan.

Grafik 2.63 Perkembangan Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Jumlah wisatawan Domestik maupun Mancanegara mengalami perkembangan setiap tahunnya pada tahun 2016, jumlah wisatawan domestik sebesar 164.487 meningkat hingga tahun 2020 sebesar 521.762 orang. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara mengalami kenaikan yang fluktuatif dari hanya sebesar 344 orang pada tahun 2016 menjadi 534 orang di tahun 2020.

Tabel 2.145 Jumlah Hotel, Kamar Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah Hotel	Tingkat Penghuni Kamar	
		Hotel Bintang	Hotel Non Bintang
2016	147	39,57	28,65
2017	155	28,64	13,27
2018	150	36,70	17,85
2019	149	46,79	17,72
2020	163	22,78	13,19

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat di dukung oleh ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di Sulawesi Barat. Pada tahun 2016, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat sekitar 147 unit menjadi 163 unit pada tahun 2020. Hal itu menjadi indikator bahwa pertumbuhan dunia pariwisata di Sulawesi Barat mengalami kenaikan.

Tabel 2.146 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2016-2019

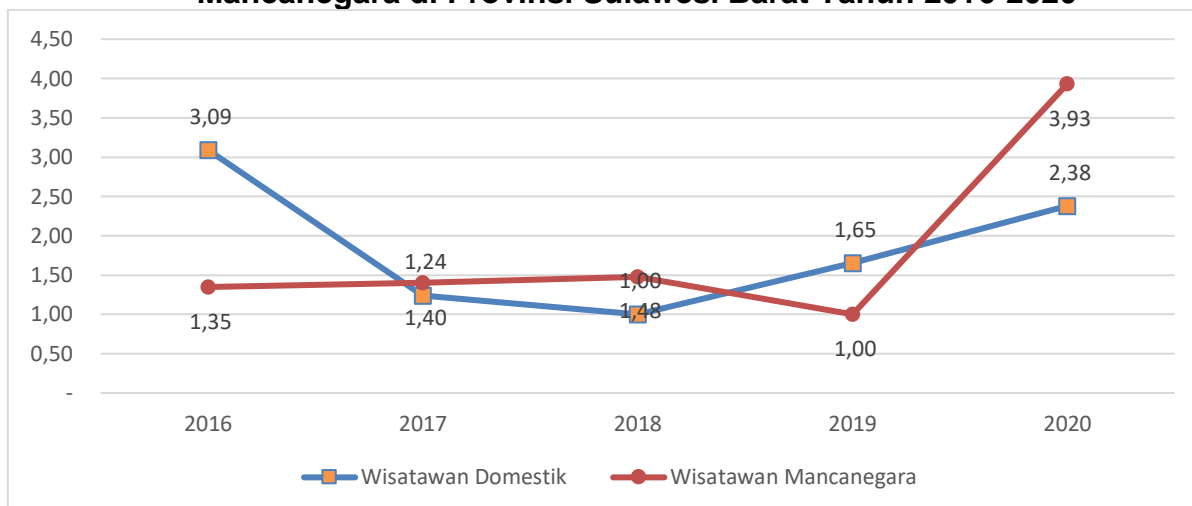
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Majene	13	17	45	47
Polewali Mandar	37	40	51	64
Mamasa	27	28	33	35
Mamuju	171	171	62	62
Pasangkayu	53	53	25	33
Mamuju Tengah	60	60	33	35
Jumlah/ Total	361	369	249	276

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Selain meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat menarik wisatawan adalah diselenggarakannya *event Sandeq Race* dari Mamuju ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 2 tahun belakangan jalurnya dialihkan dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Mamuju.

Grafik 2.64 Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Sulawesi Barat belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Sulawesi Barat meningkat setiap tahunnya dan peningkatan jumlah kunjungan tersebut sangat signifikan. kunjungan wisata asing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 723 orang pada tahun 2017 menurun sebesar 543 orang pada tahun 2019 dengan rata-rata lama menginap hanya sehari. Kurang berkembangnya pariwisata di Sulawesi Barat karena belum adanya pengembangan kepariwisataan yang ditata dengan baik. adapun Kendala pengembangan pariwisata meliputi akses seperti jalan menuju objek wisata serta sarana dan fasilitas untuk para wisatawan yang berkunjung.

2.4.24 Urusan Pertanian

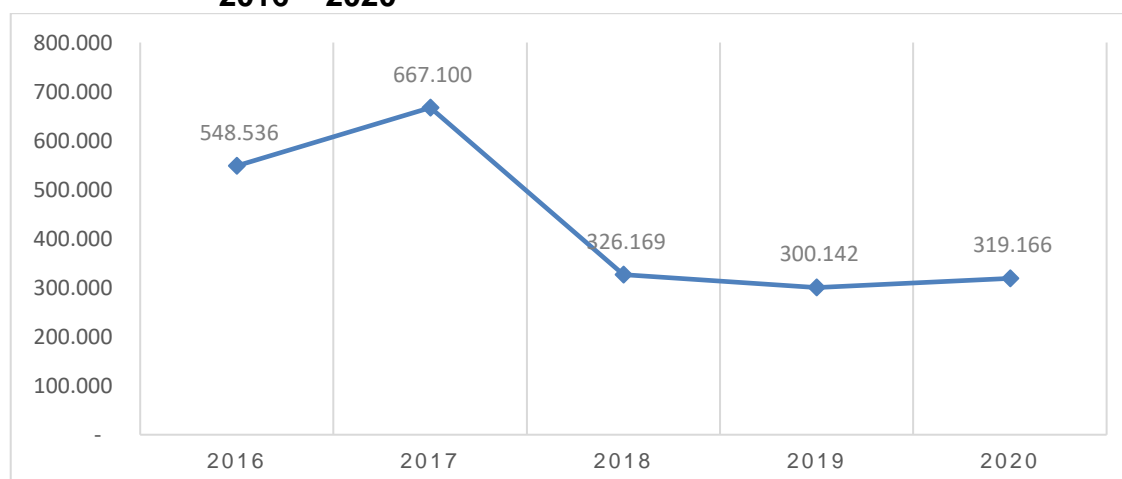
Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, dimana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian selain dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang dominan pada kategori pertanian. Pada tahun 2019, tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian mencapai 337,77 ribu orang atau sekitar 50,19 persen penduduk angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Olehnya itu, keberadaan kategori

pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus senantiasa tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar kedepannya kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.

a. Tanaman Pangan

Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat terus menurun. Produksi padi khususnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami penurunan akan tetapi mengalami penurunan kurang lebih sebesar 8 persen di tahun 2019 seperti yang terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 2.65 Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami fluktuasi pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini.

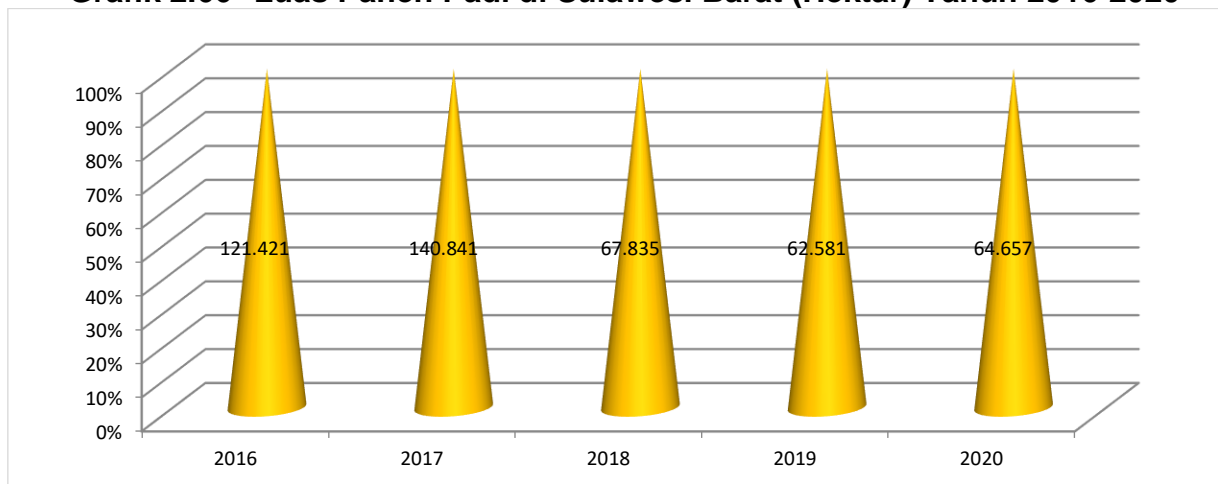
Tabel 2.147 Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2018

Komoditas	Tahun (Ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Padi					
Luas Panen (ha)	94.351,00	93.470,00	121.421,00	140.81,00	168.549,00
Produksi (ton)	449.621,00	461.844,00	548.536,00	667.100,00	751.531,00
Produktivitas (ku/ha)	47,70	49,00	45,26	47,37	44,60
2. Jagung					
Luas Panen (ha)	24.341,00	20.752,00	51.346,00	154.173,50	145.121,00
Produksi (ton)	110.665,00	100.811,00	284.213,00	724.222,00	702.339,00
Produktivitas (ku/ha)	45,50	49,00	55,35	46,97	48,40

Komoditas	Tahun (Ha)				
	2014	2015	2016	2017	2018
3. Ubi Kayu					
Luas Panen (ha)	1.420,00	1.109,00	1.161,00	1.269,50	900,00
Produksi (ton)	29.902,00	24.984,00	25.700,00	34.662,00	22.174,00
Produktivitas (ku/ha)	210,60	225,00	221,36	273,04	246,38
4. Ubi Jalar					
Luas Panen (ha)	531,00	755,00	566,00	467,00	576,00
Produksi (ton)	5.880,00	8.749,00	6.751,00	5.483,00	8.044,00
Produktivitas (ku/ha)	110,70	116,00	119,38	117,53	139,65
5. Kacang Tanah					
Luas Panen (ha)	376,00	327,00	353,00	342,50	
Produksi (ton)	502,00	329,00	433,00	385,00	391,00
Produktivitas (ku/ha)	13,40	10,00	12,27	11,24	15,18
6. Kedelai					
Luas Panen (ha)	3.410,00	4.106,00	3.802,00	3.103,20	9.293,00
Produksi (ton)	3.998,00	4.218,00	6.480,00	4.853,00	15.091,00
Produktivitas (ku/ha)	11,70	10,00	17,04	15,64	16,24

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.66 Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya cakupan luas panen padi di Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan produksi padi yang terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2018. Hal berbeda terjadi pada tahun 2019, dimana luas area panen padi pada tahun tersebut justru mengalami penurunan diikuti dengan turunnya produksi padi di Sulawesi Barat yang sangat signifikan. Salah satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal tersebut adalah adanya Modernisasi di sektor pertanian, dimana produksi padi tidak lagi bergantung pada luasan lahan tetapi lebih pada penerapan teknologi terkini mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, sampai pada proses panen.

Modernisasi ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai tukar petani dan pada akhirnya akan berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Namun yang perlu diwaspadai adalah maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian ke lahan komoditas perkebunan seperti sawit, lahan untuk peruntukan perumahan ataupun peruntukan lainnya.

b. Peternakan

Komoditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi Potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 95.287 ekor, populasi kambing sekitar 193.944 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.575.252 ekor.

Tabel 2.148 Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019

Komoditas	2015	2016	2017	2018	2019
1. Populasi					
Populasi Sapi Potong	86 953	85 417	94 015	95 287	96 639
Populasi Sapi Perah	-	-	-	-	-
Populasi Kerbau	7 805	7 842	7 978	10 167	10 370
Populasi Kambing	225 766	163 180	190 708	193 944	194 772
Populasi Kuda	4 545	2 835	2 432	1 560	1 578
Populasi Babi	131 839	66 655	134 566	134 931	137 106
Populasi Ayam Ras	1 893 731	1 575 521	1 936 130	2 628 919	2 656 590
Populasi Ayam Kampung	4 696 726	4 445 160	4 487 632	4 575 252	4 856 281
Populasi Itik	466 512	384 671	354 159	390 025	396 484
2. Produksi					
Produksi Daging Sapi Potong	1.987.995	16 132	2 854 429	2 266 145	2 228 823
Produksi Daging Kerbau	134.923	849	-	150 604	205 834
Produksi Daging Kambing	271.543	9 792	210 660	212 741	214 844
Produksi Daging Kuda	300	2	825	-	-
Produksi Daging Babi	334.779	11 702	709 774	716 899	724 138
Produksi Daging Ayam Ras Pedaging	1.758.254	1 528 255	1 755 973	2 384 298	2 409 394
Produksi Daging Ayam Kampung	4.951.006	6 223 184	4 837 559	4 932 122	5 235 071
Produksi Daging Itik	272.609	230 802	222 058	245 671	249 741

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2016-2021

b. Perkebunan

Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat potensial. Adapun produksi dan Produktifitas berbagai tanaman perkebunan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.149 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat (Ton), Tahun 2019

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	8 693	-	216	8 128
Polewali Mandar	19 850	-	817	33 438
Mamasa	9	-	2 946	7 231
Mamuju	3 505	12 896	138	10 411
Pasangkayu	4 343	142 976	2	5.637
Mamuju Tengah	891	96 578	14	6.529
Sulawesi Barat	37 291	252 450	4 131	71 374

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.150 Produktifitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat (ton/ha/), 2019

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	-	-	1,19	0,90
Polewali Mandar	2,52	-	1,64	0,90
Mamasa	0,60	-	1,38	0,66
Mamuju	1,13	2,24	1,10	0,66
Pasangkayu	0,96	3,26	1,12	0,73
Mamuju Tengah	0,90	3,27	0,61	0,70
Sulawesi Barat	2,43	3,19	1,39	0,79

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Salah satu komoditi potensial perkebunan yang menjadi andalan di Sulawesi Barat adalah Kakao. Pada tahun 2019, produksi Kelapa Sawit Sulawesi Barat mencapai 252.450 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak jika Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah menjadi sentra dari komoditi ini dengan produksi masing-masing mencapai 142.976 ton dan 96.578 ton. Produksi di kedua kabupaten ini hampir mencapai seluruh produksi di Sulawesi Barat. Namun secara statistik terjadi penurunan produksi Kelapa Sawit dari tahun sebelumnya, yang diakibatkannya menurunnya harga Kelapa Sawit, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menstabilkan harga.

Komoditi lain yang memiliki produksi yang cukup banyak adalah Kakao. Pada tahun 2019, produksi kakao di Sulawesi Barat mencapai 71.374 ton. Persebaran kakao paling banyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar hingga 33.438 ton, kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamuju yang sebesar 10.411 ton. Kakao yang cukup potensial di Sulawesi Barat memberikan peluang untuk pengembangan industri hasil olahan Kakao. Berbagai komoditi di atas tentunya ditunjang oleh luas lahan yang cukup dan pengembangannya masih dapat

dilakukan. Luas lahan masing-masing komoditi tersebut seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.151 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat (Ha), 2019

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	7 246	-	413	8 984
Polewali Mandar	17 273	-	1 035	37 109
Mamasa	15	-	4 275	10 949
Mamuju	3 068	5 765	262	15 764
Pasangkayu	4 501	43 925	3	7 732
Mamuju Tengah	995	29 549	23	9 325
Sulawesi Barat	33 101	79 239	6 011	89 863

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

c. Hortikultura

Pengembangan tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di Sulawesi Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari tahun 2017 - 2018, beberapa komoditas tanaman hortikultura mengalami peningkatan produksi, sebagaimana pada tabel berikut.

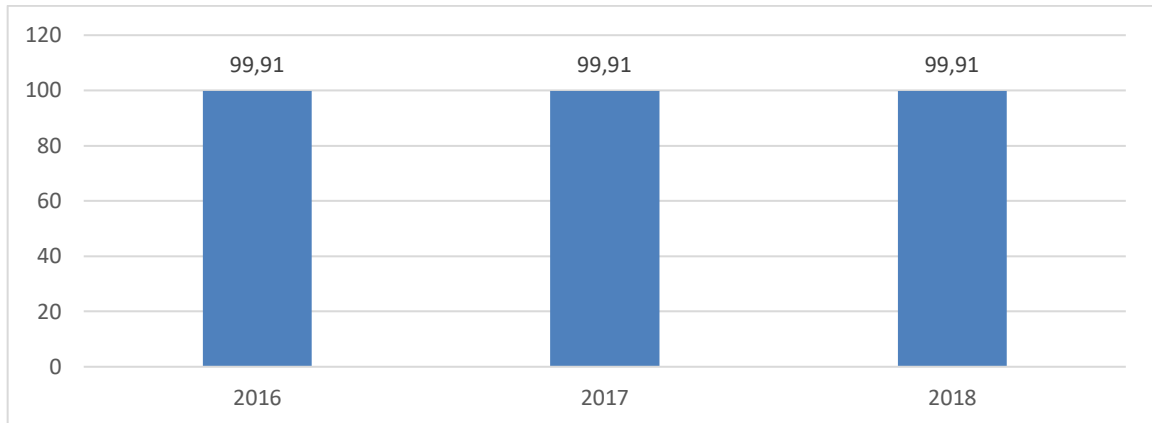
Tabel 2.152 Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2017-2018

Kabupaten	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	Luas panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
	(ha)	(ton)	(ha)	(ton)	(ha)	(ton)
Majene:						
Bawang Merah	110	3 575	56	2 701	73	2 237
Cabai Besar	57	1 320	49	814	50	518
Cabai Rawit	155	4 116	144	3 673	107	1 219
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	5	13	7	28	-	-
Kubis			-	-	2	7
Tomat	56	1 959	53	682	71	521
Bawang Putih	-	-	-	-	151	7 410
Kangkung	56	793	41	647	42	244
Kacang Panjang	68	731	40	373	51	350
Polewali Mandar						
Bawang Merah	44	1 319	43	1 234	97	3 130
Cabai Besar	217	3 146	137	3 076	150	2 138
Cabai Rawit	159	2 363	91	2 252	97	1 557
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	53	2 079	35	580	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	83	1 678	72	1 525	76	1 273
Bawang Putih	-	-	-	-	151	55
Kangkung	83	3 379	115	2 053	97	1 540
Kacang Panjang	77	1 416	105	1 411	133	1 721
Mamasa						

Kabupaten	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	Luas panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
	(ha)	(ton)	(ha)	(ton)	(ha)	(ton)
Bawang Merah	6	125	3	64	16	450
Cabai Besar	9	107	1	100	2	20
Cabai Rawit	30	352	21	237	39	376
Kentang	29	3 310	30	2 888	24	2 580
Petsai	65	753	48	568	-	-
Kubis			-		2	15
Tomat	33	230	29	854	42	718
Bawang Putih			-		33	1 342
Kangkung	33	487	28	592	68	1 057
Kacang Panjang	30	304	17	373	37	585
Mamuju						
Bawang Merah	6	360	22	880	7	14
Cabai Besar	126	6 592	145	7 324	265	857
Cabai Rawit	169	7 738	203	9 778	277	880
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	44	2 090	81	3 157	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	64	5 810	113	7 567	287	837
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-
Kangkung	64	7 205	211	6 035	292	851
Kacang Panjang	116	2 500	152	5 421	261	806
Pasangkayu						
Bawang Merah	2	63	4	160	2	86
Cabai Besar	71	9 131	90	8 878	77	6 137
Cabai Rawit	82	10 306	87	9 072	77	5 971
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	1	47	1	48	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	25	2 819	33	4 000	24	1 671
Bawang Putih			-		-	-
Kangkung	25	279	51	608	39	552
Kacang Panjang	31	3 632	64	6 736	59	4 122
Mamuju Tengah						
Bawang Merah	1	2	1	27	7	184
Cabai Besar	108	2 368	58	1 788	39	1 315
Cabai Rawit	91	1 706	54	1 618	58	2 044
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	58	594	37	411	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	73	1 286	62	1 989	40	1 468
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-
Kangkung	73	1 129	69	1 059	68	1 349
Kacang Panjang	93	1 843	74	2 266	62	2 157

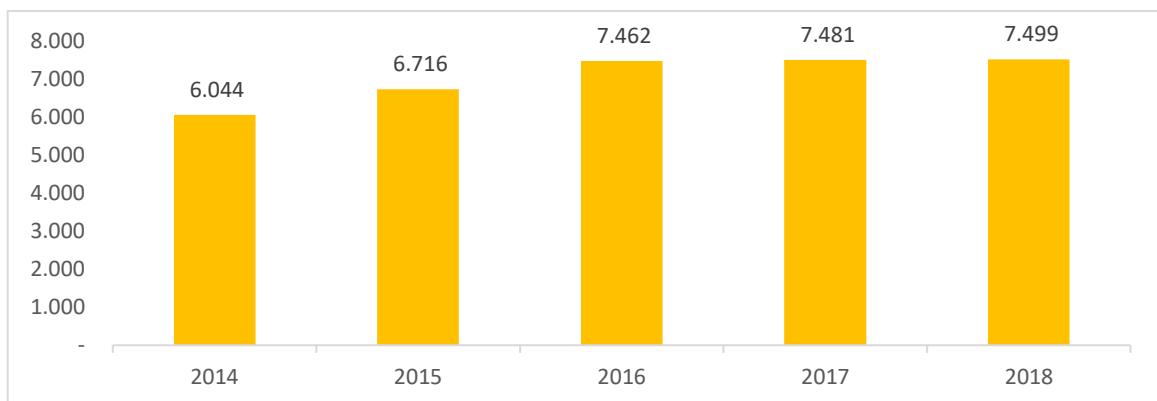
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.67 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019

Grafik 2.68 Cakupan Bina Kelompok Petani (Kelompok)



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019

2.4.25 Urusan Kehutanan

Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang cukup melimpah. Pada tahun 2019, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat sekitar 1.069.989 ha.

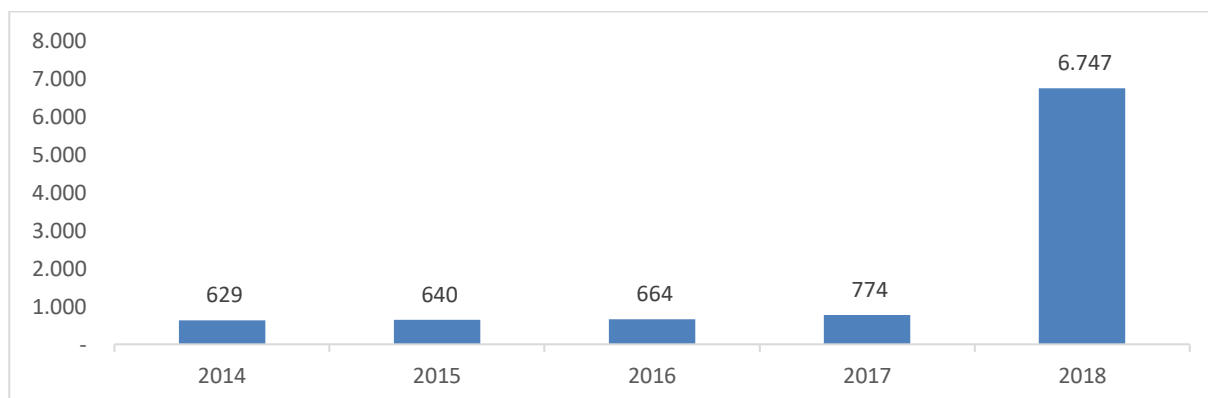
Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat 62 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sementara sisanya merupakan kawasan hutan produksi dengan jenis produksi kayu hutan yang dibagi kedalam dua jenis yaitu kayu bulat dengan kayu gergajian. Pembagian luas kawasan hutan serta produksinya pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 2.153 Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat Tahun 2014-2019

Kabupaten	Kawasan Suaka Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Jumlah
Majene	-	45.052	7.627	-	-	52.679
Polewali Mandar	986	65.814	23.036	-	-	89.836
Mamasa	63.261	90.151	49.539	-	368	203.319
Mamuju	71.883	128.691	85.242	41.027	10.851	337.694
Pasangkayu	612	99.530	54.603	2.264	8.988	165.997
Mamuju Tengah	53.604	26.795	111.202	27.639	1.224	220.464
2019	190.346	456.033	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2018	190.346	456.033	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2017	190.346	456.033	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2016	190.256	456.108	331.154	70.932	21.431	1.069.881
2015	215.190	452.030	330.700	71.859	22.597	1.092.376
2014	215.190	452.030	330.700	71.859	22.597	1.092.376

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

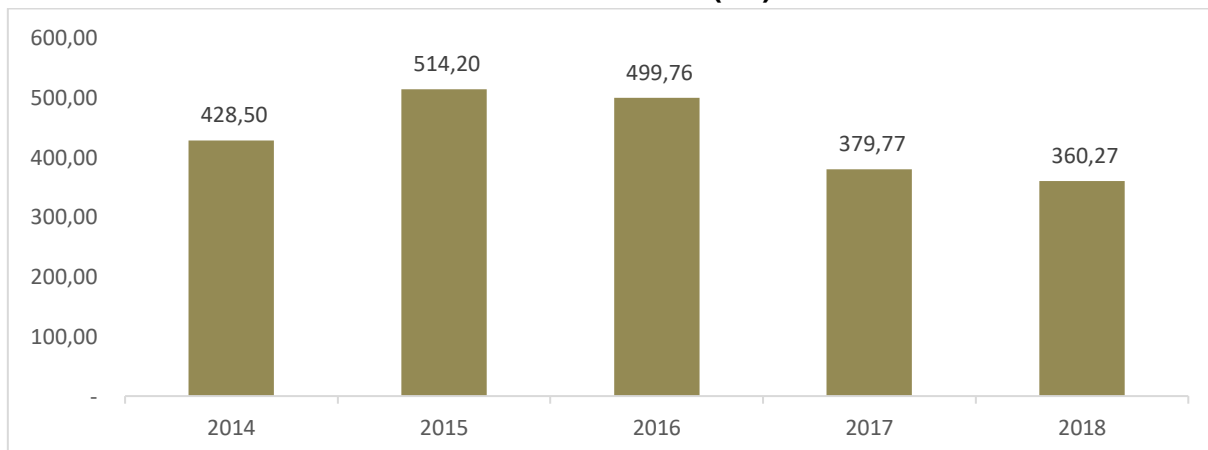
Grafik 2.69 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 sebanyak 629 Ha meningkat menjadi 6.747 Ha pada tahun 2018.

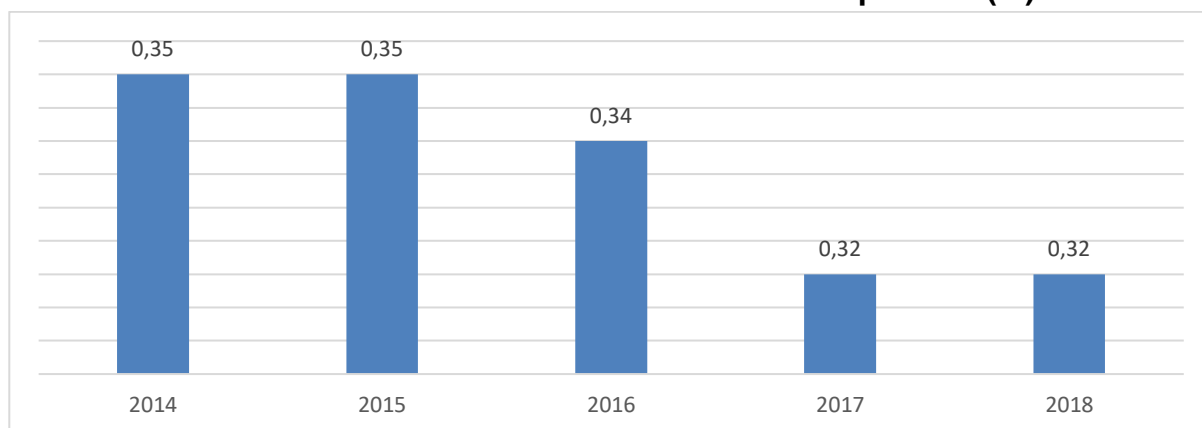
Grafik 2.70 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 sebanyak 428,50 Ha menurun menjadi 360,27 Ha pada tahun 2018.

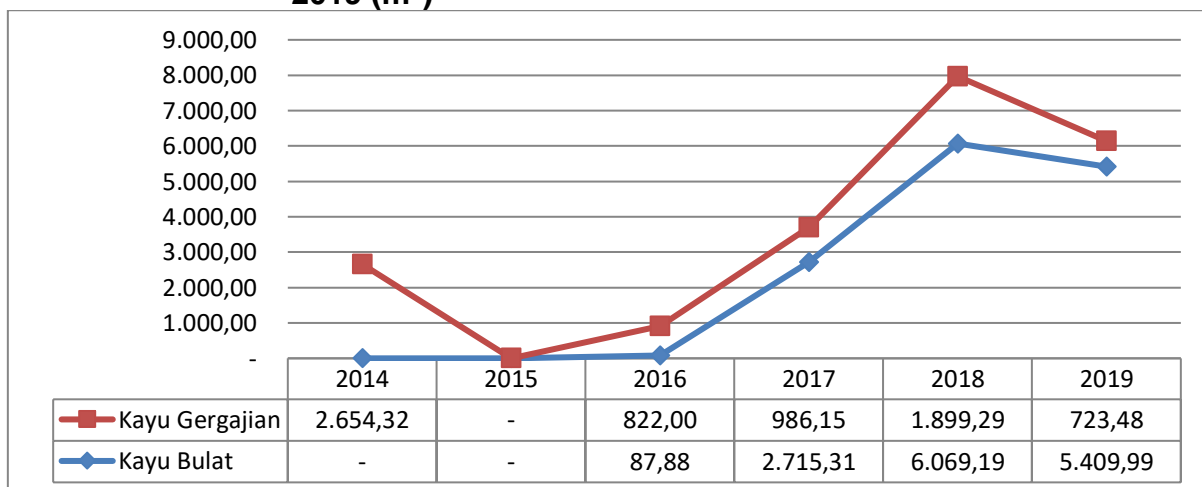
Grafik 2.71 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Kontribusi sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB dari tahun 2014 sebesar 0,35 persen menurun menjadi 0,32 persen pada tahun 2018.

Grafik 2.72 Produksi Kayu Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2019 (m³)



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga saat ini setidaknya telah membentuk 13 unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan serta pengawasan kawasan hutan menjadi lebih efektif. Tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kebijakan antara lain : (1) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas

pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung, (2) Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil (3) Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan terkait dengan sumberdaya hutan yang ada. Berikut ini disajikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Sulawesi Barat beserta dengan potensi yang ada dalam kawasan hutan tersebut.

Tabel 2.154 Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
1	MAPILI	UNIT XI	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor. 91 Tahun 2010	SK. 651/Menhut-II/2010	SK. 6404/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016	SKPD	77,196	Rotan, murbei, aren, damar	Wisata Bahari Palippis dan Labuang, Wisata Tirta bendungan Sekka-Sekka, air terjun Kunyi, Air terjun Limbong, Agrowisata, calon Tahura Indorannuang
2	MAMASA TENGAH	Unit VIII	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Bupati Mamasa Nomor. 8 Tahun 2010	SK. 340/Menhut-II/2011	SK. 7584/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	37,962	Getah Pinus, Rotan, Bambu, Tanaman Seong, Aren, Alpukat, Markisa, Terong Belanda	Air Panas Belerang Kanan, Air Terjun Solokan, Air Terjun Mambuliling, Wisata Rohani Pena, Wisata Budaya Kuburan TedongTedong, Wisata Budaya Batu Kumila, Gua Kelelawar di Desa Pasapa Mambu
3	MAMASA BARAT	Unit VII	KPH P	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 341/Menhut-II/2011	SK. 5581/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	53,555	Getah Pinus, Rotan, Bamboo, Nilam, Siong	Air Terjun Sambabo, Permandian Air Panas di Desa Uhelanu, Aliran Sungai Deras Untuk Arum Jeram
4	GANDA DEWATA	Unit XII	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7e Tahun 2013	SK. 441/Menhut-II/2012	SK. 7579/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	157,598	Rotan, Damar, Madu, Getah, Nilam	Perdagangan Karbon, Wisata Air Terjun Di Hulu Sungai Kinatang, Wisata Alam Pendakian Di Desa Tabulahan, Wisata Religi Dan Wisata Budaya Pada Situs Budaya Tabulahan Di Kabupaten Mamasa, Situs Kamasi Di Kalumpang Dan Situs Palembang Di Kalumpang, Pemanfaatan Air Untuk

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
											Produksi Air Kemasan Di Desa Kinatang
5	MALUNDA	Unit X	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Bupati Majene Nomor. 1 Tahun 2012	SK. 753/Menhut-II/2012		UPTD	52,071	Rotan, Gaharu, Lebah Madu	Permandian Air Panas Tallum Banua, Wisata Alam Arung Jeram Bambang, Wisata Alam Air Terjun Sambabo, Hutan Pendidikan Baruga Dua, Pengembangan Kegiatan Religi Tallum Banua
6	BUDONG-BUDONG	Unit V	KPH P	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 996/Menhut-II/2013	SK. 817/Menhut-II/Reg.4-1/ 2015	UPTD	167,243	Rotan, Damar, Madu	Pemandangan Alam, Air Terjun, Sungai
7	LARIANG	Unit II	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 542 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 15 Tahun 2011	SK. 60/Menhut-II/2011	SK. 7317/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	57,916	Rotan, Coklat, Sawit	
8	KAROSSA	UNIT IV	KPH P	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015		UPTD	63,110	rotan, getah getahan, buahbuahan, madu lebah	wisata alam air terjun, pembangunan agrowisata, potensi pemanfaatan air domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, perdagangan karbon
9	KARAMA	UNIT VI	KPH P	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	SK. 3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	UPTD	156,918	rotan, damar, madu	pemandangan alam, air terjun, sungai
10	MAMASA TIMUR	UNIT IX	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.840/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	SK. 4809/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2019	UPTD	51,086		

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
11	PASASANG KAYU	UNIT I	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017		UPTD	25,662		
12	SARUDU	UNIT III	KPH L	SK.799/MENH UT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/I/2019	SK. 3575/MENLHK-KPHL/PKPHL/DA S.3/4/2019	UPTD	68,384		
13	TAMAN NASIONAL GANDANG DEWATA	UNIT XIII	KPH K	SK.799/MENH UT-II/2009	-	SK.773/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2016	-	UPTD KLHK	189,208		

2.4.26 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan Galian / Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, biji besi, sulfida, serta potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan International, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, dimana menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radio aktif atau uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dimana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S Nasional dan International, baik off shore maupun on shore dan dalam tahap eksplorasi.

Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti pada tahun 2013 – 2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Menurut standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum yang boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/tahun dan untuk para pekerja adalah 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju.

Sumberdaya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan International. Adapun kontraktor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.155 Sumberdaya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan International

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
MUBADALA PETROLIUM	SEBUKU	Majene	2,344.9 km ²	Produksi Gas Alam mulai Oktober 2013 Kegiatan Proses Penyertaan Modal/Participating Interest antara Kalsel dan Sulbar	Aktif (Produksi) Periode Efektif: 22 Sept 1997 – 21 Sept 2027
MUBADALA PETROLIUM	WEST SEBUKU	Majene	4,933 km ²	PSC Kontrak tahun 2012 Study Geology	Aktif (Eksplorasi) Tanggal efektif KKS: 19 Des 2011
KRISENERGY BV. (BALABALAKA NG)	BALA-BALAKANG	Mamuju	4.190,96 km ²	Akuisisi & Processing Seismik 3D 500 km ² 2014 Pergantian nama blok sesuai dengan SK Kem ESDM No.15.K/13/DJM.E/ 2015	Aktif (Eksplorasi)
ENI INDONESIA. LTD	EAST SEPINGGAN (MANAKARR A MAMUJU 1)	Mateng, Pasangkayu		PemprovSulbar telah diusulkan penggantian nama WK menjadi Blok Manakarra Mamuju 1	Aktif (Eksplorasi)
NIKO RECOURCES LIMITED	SOUTH EAST GANAL 1	Matra & Mateng	Luas Wilayah:		Aktif (Eksplorasi)
	PARE PARE	Polewali, Pinrang, Pare-pare	8.373 km ²		Proses Lelang
	MANAKARR A MAMUJU	Mamuju, Mateng	6.995 km ²		Lelang Reguler 2016
	WEST BUDONG	Mamuju, Mateng, Matra	1.723 km ²		Proses Lelang
	EAST KENDILO	Matra		Pemprov Sulbar mengusulkan penggantian Nama WK menjadi Blok Sendana 1	Proses Lelang
	SOUTH EAST MANDAR	Polewali		Konsulda WK Baru Migas berlangsung pd 17 Maret 2016	Lelang Reguler 2016
	SUREMANA 1	Matra		Lalang Reguler Tahun 2016	Lelang Reguler 2016
Pearl Oil	KARANA	Majene	5.389,68 Km ²	Survey 2D (2008)	Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2013
STATOIL	KARAMA	Mamuju, Mateng	4.287,37 Km ²	Sumur Eksplorasi Karama-1&Karama-2	Telah dikembalikan kePemerintah tahun 2013
CONOCO PHILIPS	KUMA	Mateng, Matra	5086 Km ²	SumurEksplorasi Kalukku-1	sda
EXXON	MANDAR	Majene, Polewali Mandar	4.196,25 Km ²	Kris-1 32,30 mill laut Putera-1 26,04 mil laut Sultan-1 25,35 mill	sda

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
MARATHON	PASANG KAYU	Pasangkayu	4.707,63 Km2	Sumur Eklporasi Bravo-1 Romeo-1	sda
EXXON	SUREMANA	Pasangkayu	5.339,63 Km2	Sumur Eksplorasi Rangkong-1	Sda
HARVEST BUDONG-BUDONG B.V.	BUDONG-BUDONG	Mamuju, Mateng & Matra	Tanggal efektif KKS: 16 Jan 2007 Luas Wilayah Kerja: 2.476,45 km ²	Proses Terminasi/ Pengembalian Blok Migas Kepemerintah Surat Nomor Hbb.Jk.14.117 Yang Diterima Tanggal 5 Juni 2014.	Telah dikembalikan kePemerintah tahun 2014

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019

Selain pertambangan minyak dan gas potensi lainnya adalah bahan galian, Sebaran lokasi pertambangan bahan galian yang ada di Sulawesi Barat tersebar pada 6 (enam) kabupaten dengan potensi bahan galian yang berbeda-beda. Adapun sebaran lokasi pertambangan menurut kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.156 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

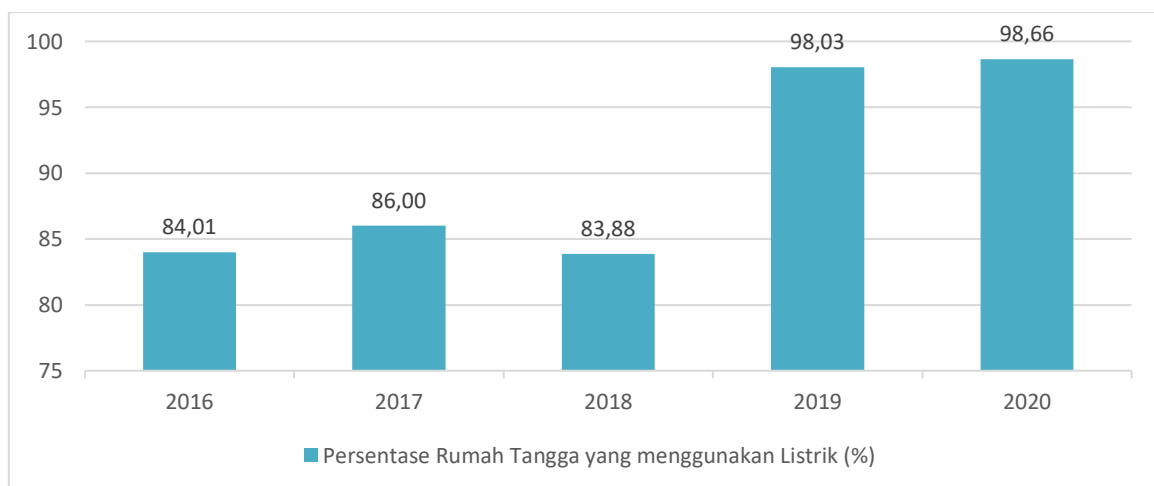
Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
Majene			
1. Ulumanda	Biji Besi (Fe)	-	-
- Desa Sambabo	Panas Bumi	-	-
- Sungai Urekang			
2. Pamboang	Logam Emas (Au)	-	-
- Pamboang	Panas Bumi	-	-
- Desa Siang	Panas Bumi	-	-
- Desa S. Loppa		-	-
3. Sendana		-	-
- Desa Limboro	Panas Bumi	64.531.353 ton	4.287
- Desa Ulidang	Batu Bara	(Hipotesa)	
Polewali Mandar			
1. Tapango	Biji Besi (Fe)	163.823,83 ton	5,
- Desa Tapango	Biji Besi (Fe)	-	707
- Desa Lapejang	Biji Besi (Fe)	-	300
- Desa Simbalutung	Biji Besi (Fe)	-	-
- Desa Bussu	Biji Besi (Fe)	-	1.500
- Desa Takaturung	Panas Bumi	41 MWe	-
- Desa Riso/Kalimbua	Biji Besi (Fe)	328.525 ton	8
2. Anreapi			
- Desa Pasiang dan Desa Papandangan	Biji Besi (Fe)	-	1.750
- Desa Ulugalung	Logam Galena (Pb)	1.500 ton	199
- Desa Basseang, Kunyi, Duampanua, Papandangan			
3. Binuang	Biji Besi (Fe)	6.044,04 ton	2.445
- Desa Mammi	Logam Emas (Au)	-	3000

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
- Desa Kurma	Logam Galena (Pb)	-	2.000
- Desa Batetangnga			
4. Matakali	Biji Besi (Fe)	-	912
- Desa Barumbung			
5. Campalagian	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Sumarrang			
6. Mapilli	Logam Emas (Au)	-	5.000
- Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa	Panas Bumi	-	-
- Desa Batupanga Daala	Panas Bumi	-	-
- Desa Andau			
7. Bulu	Panas Bumi	292 Mwe	-
- Desa Sapporakki			
8. Matangnga	Panas Bumi	115 Mwe	-
- Desa Matangnga			
9. Balanipa	Panas Bumi	-	-
- Desa Bala			
10. Alu	Panas Bumi		-
- Desa Pao-Pao			
Mamasa			
1. Messawa	Logam Tembaga (Cu)	-	-
- Desa Batubusa			
2. Pana	Logam Tembaga (Cu)	-	-
- Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Seng (Zn)	-	-
- Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken			
3. Tabulahan		Hipotesa	888
- Desa Talopak	Biji Besi (Fe)	-	-
- Desa Tarinding, Talopak	Logam Emas Primer (Au)		
4. Sumarorong			
- Desa Ratta Bo'te	Biji Besi (Fe)	Hipotesa	-
5. Aralle			-
- Desa Salu Kaiyyang	Biji Besi (Fe)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
6. Mamasa			-
- Desa Makuang Pebassian	Logam Mangan (Mn)	Hipotesa	-
- Desa Sipai Pebassian	Logam Pasir Besi	900	
- Desa Usango, Rambusaratu, Makau, Salu Mokbanan Utara, Lindu Hahangan, Uhailano, Rantetangnga, Salu Kanan, Mungin, Rantekatoang, Indobanua, Rantekamiri, Tamalatik, Timbu Kanan, Malimbong	Panas Bumi	-	
7. Tabang	Logam Emas Primer (Au)	-	5.327
- Desa Baka Disura'			
Mamuju			
1. Bonehau	Batu Bara	3.593.642 ton	1,6
- Bonehau	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Buttu Ada	Logam Mangan (Mn)	-	-
- Desa Tamalea	Logam Emas Primer (Au)	1.073.570 ton	-
2. Kalumpang			
- Desa Karataun	Logam Emas Placer	-	-

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
- Desa Bulo	Logam Emas Primer (Au)	-	-
3. Tapalang	Logam Tembaga (Cu)	-	-
- Tapalang	Batu Bara	Indikasi	-
4. Tapalang Barat	Panas Bumi	30 Mwe	-
- Desa Tapalang	Panas Bumi	10 Mwe	-
5. Simboro	Panas Bumi	40 Mwe	-
- Desa Karema	Panas Bumi	10 MWe	-
6. Kalukku	Panas Bumi	-	-
- Ampallas	Panas Bumi	-	-
- Desa Kona Kaiyyang	Panas Bumi	-	-
Pasangkayu			
1. Tikke	Logam Emas Placer	103.896	-
- Desa S. Lariang	Logam Emas (Au)	-	-
2. Dapurang	Logam Tembaga (Cu)	-	-
- Desa Masabo, Tarakedo	Batu Bara	-	-
3. Baras	Batu Bara	-	-
4. Sarudu	Batu Bara	-	-
- Doda	Panas Bumi	-	-
Mamuju Tengah			
1. Topoyo	Logam Seng (Zn)	-	-
- Desa Tabolang	Logam Mangan (Mn)	-	-
- Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-
2. Karossa	Logam Emas Primer (Au)	-	-
- Desa Sanjango	Biji Besi (Fe)	-	-
	Logam Tembaga (Cu)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
	Logam Seng (Zn)	-	-
	Logam Galena (PbS)	-	-
3. Tobadak	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-
- Desa S. Andeang	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Salulekbo	Panas Bumi	-	-
- Desa Panasuan			

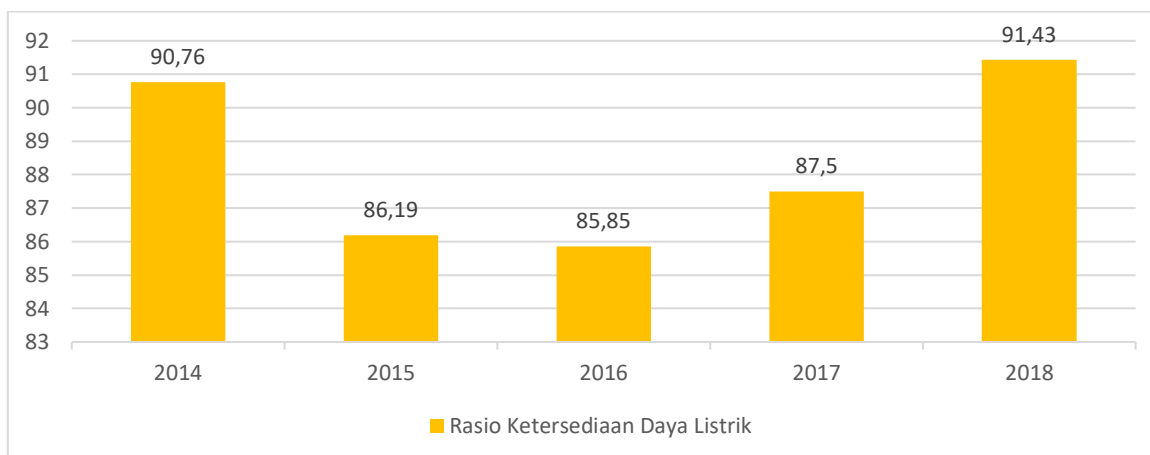
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.73 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik



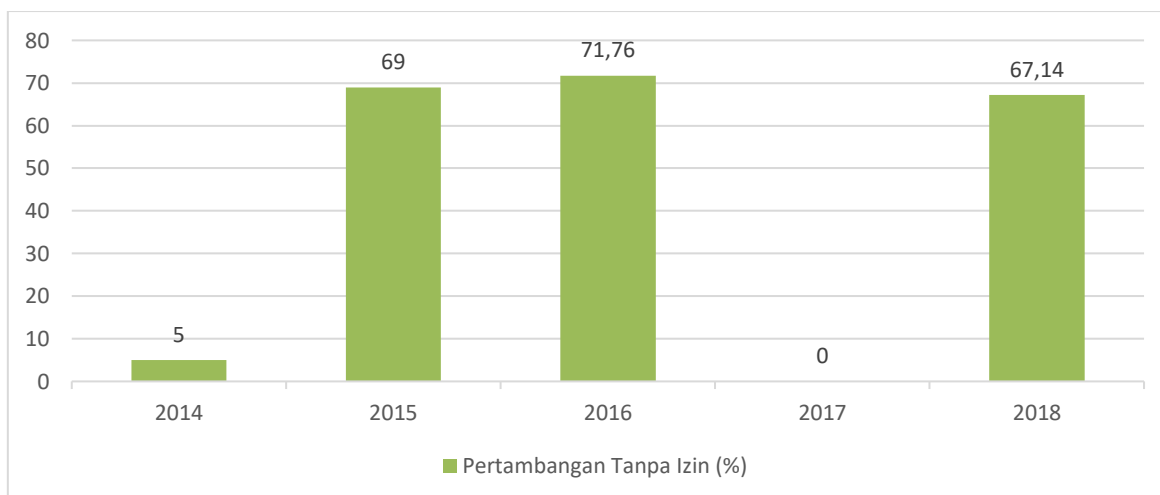
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

Grafik 2.74 Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)



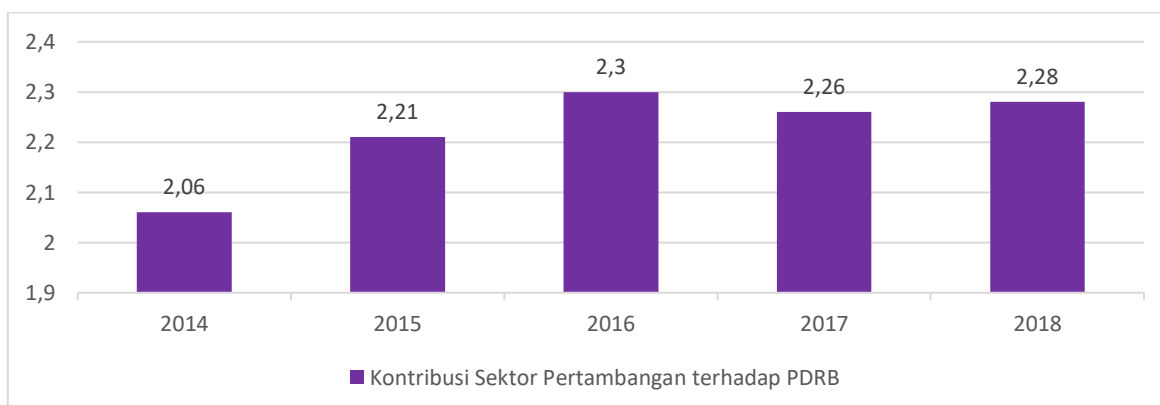
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.75 Pertambangan tanpa Ijin (%)



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.76 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)

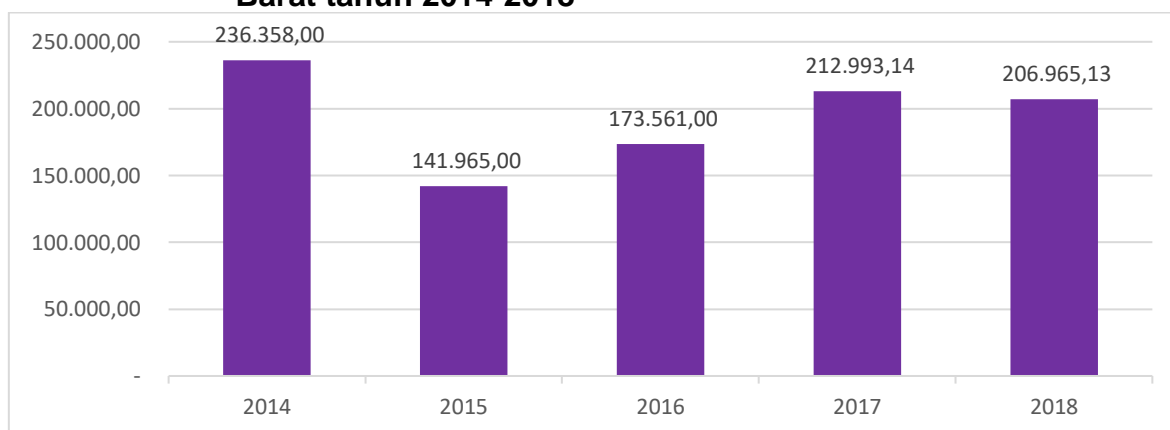


Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.27 Urusan Perdagangan

Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekspor yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat mencatat bahwa selama tahun 2014-2018 komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit.

Grafik 2.77 Perkembangan Ekspor CPO Melalui Pelabuhan di Sulawesi Barat tahun 2014-2018



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 nilai ekspor CPO mencapai 236.358 ton. Namun beberapa tahun terakhir jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor cuaca dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit yang dimuat melalui pelabuhan selama tahun 2018 sebanyak 116.981,07 ton. Informasi bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah bongkar semen di Sulawesi Barat. Artinya bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif.

Tabel 2.157 Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal

Indikator	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2019

2.4.28 Urusan Perindustrian

a. Jumlah Industri dan tenaga kerja

Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha kecil dan mikro yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal yang rendah, modal usaha yang belum tersedia, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

Tabel 2.158 Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat tahun 2014-2018

Kabupaten	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja									
	Perusahaan					Tenaga Kerja				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Majene	210	265	428	428	428	492	2,033	2,424	2,815	2,770
Polewali Mandar	1,563	4,186	5305	6276	6264	5,470	8,512	10,856	13,200	13,741
Mamasa	591	459	459	459	459	1,727	1,500	1,500	1,500	1,500
Mamuju	585	548	598	692	730	1,795	1,701	1,483	2,965	2,767
Pasangkayu	415	474	479	527	676	1,171	2,386	1,951	1,515	1,912
Mamuju Tengah	273	273	307	307	262	508	508	473	438	438
Sulawesi Barat	3,364	6,205	7576	8644	9236	10,655	16,640	18,687	22,433	23,128

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

b. Kawasan Industri

Sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Namun kedepan telah direncanakan untuk membangun kawasan industri yang berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku, rencana pembangunan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan RTRW Provinsi dan Kabupaten dan telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan telah dibuat Masterplan dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan industri yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 2.159 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	8.73	6.46	2.08	5.96	3.11
Cakupan Bina kelompok Pengrajin (keg)	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Sulbar 2019

2.4.29 Urusan Transmigrasi

Sejak telah diresmikan menjadi DOB Baru, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 telah dibangun dan ditempatkan 6 (enam) Unit Pemukiman Transmigrasi yakni UPT. Botteng Kab. Mamuju (2006-2008), UPT. Patambanua Kab. Polman (2007), UPT Lakahang Kab. Mamasa (2007), dan UPT Sinyonyoi Kab. Mamuju (2009), UPT Botteng Pasembuk Kab. Mamasa (2011-2012) dan UPT Ulumanda (2011-2013) dan 1 (satu) TSM Ralleanak Kab. Mamasa (2008). Selain itu juga dilakukan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak Kab. Mamuju (2008), serta Perencanaan KTM Sarudu Baras Tahun 2009.

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, telah direncanakan sejak tahun 2012, dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki pandangan jauh kedepan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan baru, sebagai cikal bakal pembentukan Desa, Kecamatan dan Kabupaten baru. Untuk Itu Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat telah

merencanakan Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut :

1. Kawasan Mambi, Kab. Mamasa Luas Penetapan kawasan 24.135 Ha;
2. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polman, Penetapan kawasan 14.301 Ha;
3. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 90.092 Ha;
4. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 109.000 Ha;
5. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan, sementara dalam proses perhitungan ulang;
6. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 20.000 Ha.

Tabel 2.160 Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Yang Masih Di Bina Tahun 2017 – 2018

KABUPATEN/ NAMA UPT	POLA/JENIS TRANSMIGRASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
KAB. POLMAN				
UPT. Piriang Tapiko	TU/TPLK	2016 & 2017	78 KK	179 JIWA
KAB. MAMASA				
UPT. Rano	TU/TPLK	2015-2018	215 KK	430 JIWA
KAB. MAJENE				
UPT. Tamajannang	TU/TPLK	2018	25 KK	78 JIWA
UPT. Ulumanda Tandiallo	TU/TPLK	2012 - 2013	250 KK	739 JIWA
KAB. MAMUJU TENGAH				
UPT. Saluandeang	TU/TPLK	2018	40 KK	104 JIWA
KAB. PASANGKAYU				
UPT. Tanjung Cina	Pola Perikanan Tambak	2018	25 KK	84 JIWA
KAB. MAMUJU				
UPT. Sinyonyoi	TU/TPLK	2016	50 KK	142 JIWA

Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.161 Data Pembangunan Transmigrasi Baru Di Sulawesi Barat tahun 2018

KABUPATEN/ NAMA UPT	POLA/JENIS TRANSMIGRASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
KAB. MAMASA				
UPT. Rano	TU/TPLK	2018	40 KK	
KAB. MAJENE				
UPT. Tamajannang	TU/TPLK	2018	25 KK	
KAB. MAMUJU TENGAH				
UPT. Saluandeang	TU/TPLK	2018	40 KK	
KAB. PASANGKAYU				
UPT. Tanjung Cina	Pola Perikanan Tambak	2018	25 KK	

Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.30 Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km². Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan.

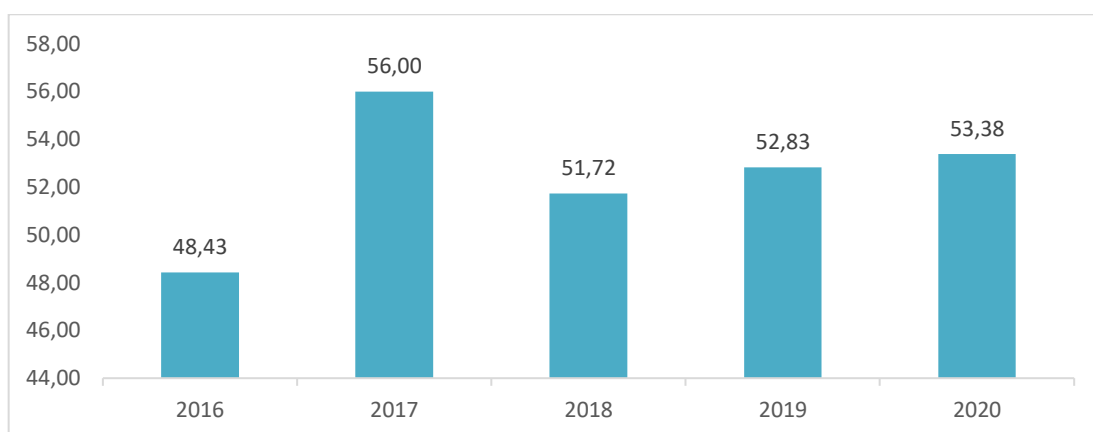
Tabel 2.162 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Kabupaten	Laut	Tambak	Kolam
Majene	-	668,9	134,86
Polewali mandar	11.537,35	12.998,07	1.148,50
Mamasa	-	-	357,55
Mamuju	58.459,25	1.699,27	93,33
Pasangkayu	-	5.976,92	571,09
Mamuju Tengah	76,33	5.622,40	61,74
Sulawesi Barat	70.072,936	26.965,56	2.367,07

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

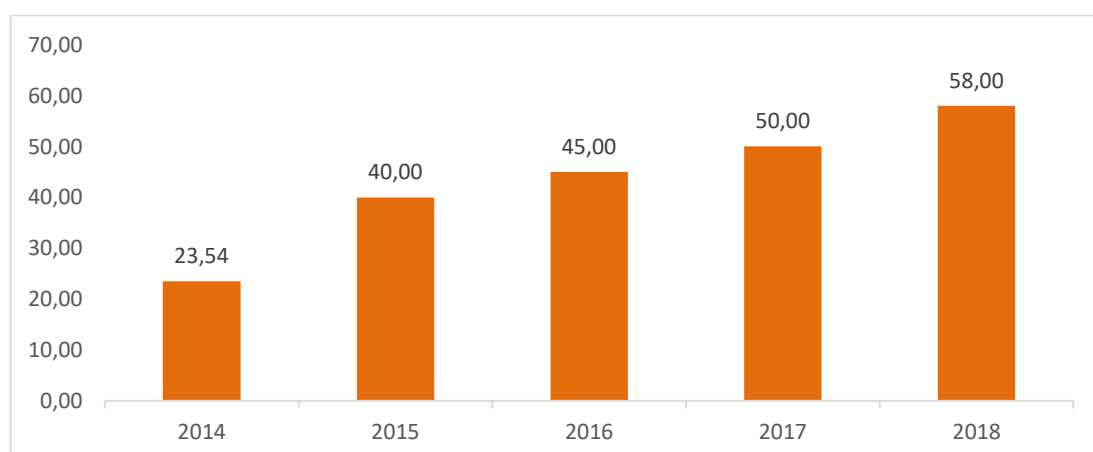
Pada tahun 2018, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak 99.405,56 ton. Produksi tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar 70 ribu ton, air payau 27 ribu ton dan di air tawar 2 ribu ton. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan pada semua jenis budidaya, peningkatan jumlah yang paling banyak terjadi pada perikanan laut yang produksinya mencapai 70 ribu ton.

Grafik 2.78 Persentase Konsumsi Ikan (%) Prov. Sulawesi Barat



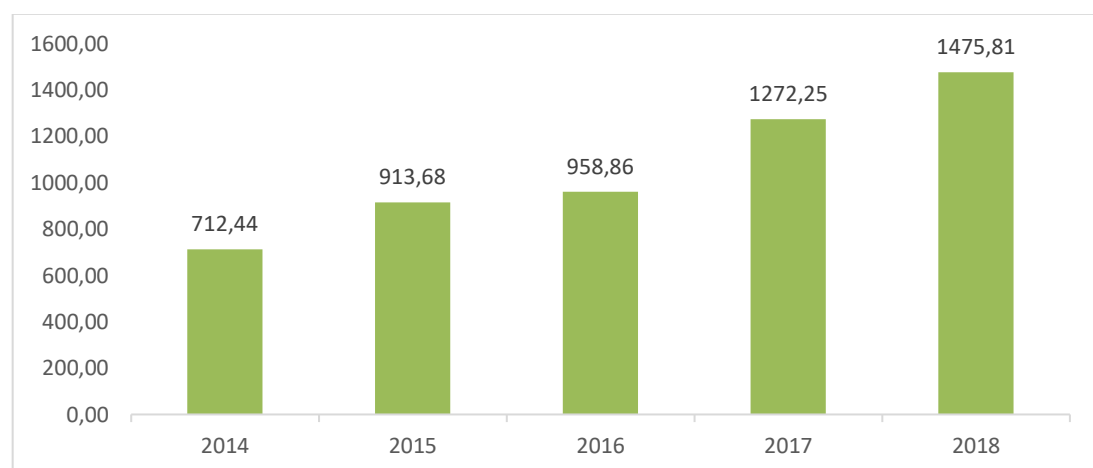
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Grafik 2.79 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.80 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.163 Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	46,717.40	55,759.30	64,334.90	56,100.28	56,328.18
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	67,548.70	89,729.96	121,650.40	104,320.78	102,501.16
Produksi Olahan (Ton)	1,325.00	3,338.00	4.302.00	10,557.18	5,698.45
Komoditi Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	1,890.00	2,438.00	2.763.00	-	-
Konsumsi Ikan (Kg)	46.80	47.57	48,43	56.00	50.02
Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit)	1.00	1.00	1.00	1,00	1,00
Pendapatan Rata-rata Nelayan (Rp/bln/org)	1,100,000.00	1,300,000.00	1,390,000.00	109.49 (NTN)	114.77 (NTN)
Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan (Rp/bln/org)	1,400,000.00	1,600,000.00	1,700,000.00	94.92 (NTPi)	94.86 (NTPi)
Pendapatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Rp/bln/org)	878,000.00	1,200,000.00	1,362,480.00	1,376,104.80	1,389,831.79
Kawasan Konservasi (Ha)	147,307.00	147,307.00	154,00	147,307.393	147,307.393
Jumlah Pulau-pulau Kecil yang Dikelola (pulau)	3.00	2.00	3.00	5.00	5.00
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	16.60	16.60	16,60	16.00	16.00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.31 Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat

penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dimulai dari 2017 pemerintah menggunakan pendekatan money follow function menjadi *money follow program* adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional maupun prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

RPJMD Perubahan 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tabel 2.164 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Perencanaan pembangunan					
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA					
	ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA					
	ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA					
	ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd (%)	74,28	98,25	89,89	90,25	90,97
	Jumlah program RKPd tahun berkenaan	205	281	249	250	252
	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	276	286	277	277	277
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	205	230	249	250	252
	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	182	230	219	203	209
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.32 Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar -benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.165 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan

N o.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
2	Keuangan						
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar 2021

2.4.33 Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

a. Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat menjadi pioneer

dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*).

Tabel 2.166 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2020

NO	Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
1	Jabatan Pimpinan Tertinggi	39	47	8
2	Jabatan Administrator	202	222	20
3	Jabatan Pengawas	616	637	21
4	Jabatan Pelaksana	2.133		
5	Jabatan Fungsional	2.396		
	Jumlah			

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified system*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini.

b. Rekrutmen

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memerhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggungjawab, hak, syarat-syarat dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN menurut kepada analisis jabatan (*analisis jabatan*) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban yang kerja yang akan ditempuh oleh pegawai

seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekrutmen digunakan sistem CAT (computer assessment test) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

c. Pengembalian Pegawai

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN. Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan baik tugas belajar, ijin belajar, seminar, pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

d. Promosi

Promosi yang dilakukan disini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilaksanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

e. Kesejahteraan

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggungjawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

f. Disiplin

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penilaian pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir.

Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus dilaksanakan oleh pegawai. Prilaku yang tidak sesuai dengan peraturan, maka diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

g. Pensiun

Hingga tahap akhir dari manajemen ASN ini yaitu pensiun maka berakhir tugas sebagai aparatur sipil negara di instansi terkait. Pada tahap akhir ini, masih merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pegawai. Disini, diberikan tunjangan sebagai penghormatan dan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut untuk melayani masyarakat dan mengabdikan kepada negara.

Tabel 2.167 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2014-2020

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Rill terhadap Kebutuhan
2014	3.111	4.088	Kurang	23,89%
2015	3.381	4.418	Kurang	23,47%
2016	3.196	4.418	Kurang	27,65%
2017	5.635	8.220	Kurang	31,44%
2018	5.400	8.220	Kurang	32,05%
2019	5.488	8.220	Kurang	33,24%
2020	5.387	8.220	Kurang	34,36%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT

(sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan merit system melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Tabel 2.168 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Diklat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
3.1	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal (orang)	28	7	27	45	63
3.2	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas (%)	7,5	5,71	6,49	3,7	2,84

Sumber : BKD dan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.34 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 070/3521/SJ tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditegaskan bahwa tugas pokok Badan Litbang adalah (1) penyiapan Naskah Akademis/pokok pikiran yang bersinergi dengan propemperda (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2) melakukan evaluasi kebijakan sebagai input dalam penyusunan pembangunan daerah (3) menyiapkan rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu-isu strategis dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu untuk penguatan kelitbangan ditegaskan bahwa penyelenggaraan kelitbangan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, dilaksanakan secara satu pintu oleh perangkat Litbang Daerah, termasuk kegiatan penyiapan naskah Akademis/pokok pikiran dalam menindaklanjuti program legislasi daerah.

Tabel 2.169 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
4	Penelitian dan Pengembangan					
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	55	60	83,3	66,67	50

Sumber : Bappeda Litbang (2014-2017) dan Balitbangda (2018-2021) Provinsi Sulbar

2.4.35 Urusan Pengawasan

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

2.4.36 Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Sekretariat dewan tidak berhenti sampai pada fungsi dukungan teknis administrasi saja, namun terpersonalisasi di dalam posisi Sekretaris DPRD itu sendiri. Berdasarkan amanat undang-undang, penyelenggaraan tugas administrasi kesekretariatan dilaksanakan Sekretaris DPRD. Tugas itu, tidak hanya dipahami melalui pendekatan formalistis-birokratis. Namun, pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru mulai diperkenalkan yaitu konsep (good Governance).

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Hasil evaluasi kinerja tahun lalu selain mereview RPJMD dan RKPD, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan, seperti disajikan dalam Tabel 2.70. berikut.

EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re		K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100		17								
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																												
1	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran		%		4.935.284.889,00		1.948.082.930,00		2.331.350.000,00	90%	1.360.637.420,00		326.694.641,00		259.552.946,00		257.965.300,00		503.017.962,00	0,00	1.347.230.849,00	0,00	99,01	0,00	3.295.313.779,00	#DIV/0!	66,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60	60.500.000	24	11.604.000,00	12	20.000.000,00	12	13.058.000,00	3	-	3	1.000.000,00	3	-	3	11.200.000,00	12,00	12.200.000,00	100,00	93,43	36,00	23.804.000,00	60,00	39,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa telepon, air dan listrik	Bulan	60	232.500.000	24	36.733.020,00	12	20.000.000,00	12	15.275.400,00	3	3.552.702,00	3	-	3	4.221.800,00	3	2.113.600,00	12,00	9.888.102,00	100,00	64,73	36,00	46.621.122,00	60,00	20,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	Waktu penyediaan jasa operasional / pemeliharaan dan perizinan	Bulan	60	371.500.000	24	312.064.210,00	12	400.000.000,00	12	187.190.000,00	3	64.180.000,00	3	57.190.400,00	3	30.965.000,00	3	34.690.966,00	12,00	187.026.366,00	100,00	99,91	36,00	499.090.576,00	60,00	134,34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	343.500.000	24	81.740.000,00	12	180.000.000,00	12	41.160.000,00	3	21.160.000,00	3	9.750.000,00	3	5.490.000,00	3	4.700.000,00	12,00	41.100.000,00	100,00	99,85	36,00	122.840.000,00	60,00	35,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	60	458.090.961	24	176.997.000,00	12	250.000.000,00	12	118.705.320,00	3	31.558.000,00	3	19.784.000,00	3	24.045.500,00	3	43.300.000,00	12,00	118.687.500,00	100,00	99,98	36,00	296.684.500,00	60,00	64,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.6	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Lembar	60.500	383.500.000	12100	201.734.500,00	12100	150.000.000,00	14641	75.437.500,00	4800	9.412.500,00	2.066	5.250.000,00	1900	6.000.000,00	5875	54.775.000,00	14641,00	75.437.500,00	100,00	100,00	26741,00	277.172.000,00	44,20	72,27	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman sajikan dan konsumsi	Dos	3025	793.302.922	605	247.782.000,00	605	250.000.000,00	2310	196.000.000,00	200	34.436.000,00	500	13.900.000,00	1000	42.821.000,00	610	104.815.680,00	2310,00	195.972.680,00	100,00	99,99	2915,00	443.754.680,00	96,36	55,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Waktu penyediaan biaya perjalanan dinas	Bulan	60	1.170.775.362	24	741.228.200,00	12	400.675.000,00	12	250.192.000,00	3	94.225.439,00	3	40.844.546,00	3	250.000,00	3	108.078.716,00	12,00	243.398.701,00	100,00	97,28	36,00	984.626.901,00	60,00	84,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Waktu penyediaan biaya perjalanan dinas	Bulan	60	1.121.615.644	24	138.200.000,00	12	660.675.000,00	12	463.619.200,00	3	68.170.000,00	3	111.834.000,00	3	144.172.000,00	3	139.344.000,00	12,00	463.520.000,00	100,00	99,98	36,00	601.720.000,00	60,00	53,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		4.979.155.016,00		535.570.000,00		1.260.000.000,00	90%	453.304.400,00		-		340.000.000,00		49.250.000,00		59.100.000,00	0,00	448.350.000,00	0,00	98,91	0,00	983.920.000,00	#DIV/0!	19,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	60	4.979.155.016	24	535.570.000,00	12	1.260.000.000,00	12	453.304.400,00	0	-	12	340.000.000,00		49.250.000,00		59.100.000,00	12,00	448.350.000,00	100,00	98,91	36,00	983.920.000,00	60,00	19,76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	%		610.510.000	-	-		250.000.000	90%	61.615.840		18.000.000		43.607.500		-		-	0,00	61.607.500,00	0,00	99,99	0,00	61.607.500,00	#DIV/0!	10,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	50	610.510.000,00	-	-	10	250.000.000,00	10	61.615.840,00	5	18.000.000,00	5	43.607.500,00		0		10,00	61.607.500,00	100,00	99,99	10,00		61.607.500,00	20,00	10,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		18.278.010.000,00		3.662.361.200,00		2.988.538.000,00	100%	1.731.551.800,00		20.264.700,00		399.333.000,00		433.354.600,00		873.157.500,00	0,00	1.726.109.800,00	0,00	99,69	0,00	5.388.471.000,00	#DIV/0!	29,48	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Waktu penyediaan dan pengisian implementasi sistem	Bulan	60	15.135.760.000,00	24	2.798.529.000,00	12	2.256.384.000,00	12	1.436.872.000,00	3	-	3	327.000.000,00	3	378.000.000,00	3	731.872.000,00	12,00	1.436.872.000,00	100,00	100,00	36,00	4.235.401.000,00	60,00	27,98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Waktu penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Dok	10	305.260.000,00	4	22.137.000,00	2	50.000.000,00	2	13.125.200,00		-	1	-	0	3.862.600,00	1	9.262.600,00	2,00	13.125.200,00	100,00	100,00	6,00	35.262.200,00	60,00	11,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.3	Penyusunan RKAD/DPA SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	10	305.260.000,00	4	70.642.200,00	2	55.000.000,00	2	23.674.700,00	2	10.474.700,00		4.200.000,00	0	6.600.000,00		2.400.000,00	2,00	23.674.700,00	100,00	100,00	6,00	94.316.900,00	60,00	30,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.4	Penyusunan RKAD/DPPA-P SKPD	Jumlah Dokumen	Dok	10	305.260.000,00	4	51.439.600,00	2	50.000.000,00	2	23.338.000,00		-	-	1	-	1	23.338.000,00	2,00	23.338.000,00	100,00	100,00	6,00	74.777.600,00	60,00	24,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5.5	Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Pengembangan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen	Bulan	60	1.463.330.000,00	24	528.902.800,00	12	287.154.000,00	12	192.200.000,00	3	3.165.000,00	3	63.933.000,00	3	38.292.000,00	3	86.798.000,00	12,00	192.188.000,00	100,00	99,99	36,00	721.090.800,00	60,00	49,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.6	Penyusunan Renstra/Renja OPD	Jumlah Dokumen	Dok	15	457.880.000,00	5	156.694.800,00	12	200.000.000,00	3	30.286.900,00		-	1	4.200.000,00	1	6.600.000,00	1	19.486.900,00	3,00	30.286.900,00	100,00	100,00	8,00	186.981.700,00	53,33	40,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.7	Penyusunan LKDU, LKSD, PPD, OPD	Jumlah Dokumen	Dok	15	305.260.000,00	6	34.075.800,00	3	90.000.000,00	3	12.055.000,00	2	6.625.000,00	1	-	0	-	-	3,00	6.625.000,00	100,00	54,96	9,00		40.640.800,00	60,00	13,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Program : Pendidikan Menengah	Angka partisipasi sekolah (APK) pada pendidikan SMA/SMK/SMA LBBMA/Paket C	%		33.678.377.420.000,00		112.435.352.320,00		10.770.378.900,00	1	201.088.416.932,50		34.060.000,00		32.436.512.700,00		56.168.955.120,00		134.557.557.410,00	0,00	223.197.085.230,00	0,00	110,99	0,00	335.632.437.550,00	#DIV/0!	1,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.1	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	Unit	5	8.265.700.000,00	3	544.370.000,00	2	2.000.000.000,00	2	553.270.000,00		-	-	-	-	-	2	485.887.806,00	2,00	485.887.806,00	100,00	87,82	5,00	1.030.257.806,00	100,00	12,46	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.2	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir yang dibangun	Paket	25	7.958.000.000,00	11	1.920.455.500,00	2	508.000.000,00	2	184.352.932,50		-	-	-	-	-	2	159.580.000,00	2,00	159.580.000,00	100,00	86,56	13,00	2.080.035.500,00	52,00	26,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengadaan Mebelur Sekolah	Jumlah Jenis Mebelur Sekolah yang dibangun	Paket	200	10.449.600.000,00	10	1.183.430.000,00	10	1.095.600.000,00	10	200.000.000,00		0	-	-	-	-	10	11.500.000,00	10,00	11.500.000,00	100,00	5,75	20,00	1.194.930.000,00	10,00	11,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah Bangunan Sekolah, Ruang Kelas, Laboratorium, Perpustakaan, Toilet/Jamban dll yang direhabilitasi Berat/Sedang/Ringan	Ruang	235	17.250.000.000,00	0	-	10	822.700.000,00	10	33.750.000,00		3.360.000,00	1	9.016.400,00		-	2	40.367.600,00	3,00	52.744.000,00	30,00	156,28	3,00	52.744.000,00	1,28	0,31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II		III		IV		K		Re		K	Re		K	Re		K	Re			
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		K			Re	K		Re	K	Re	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah Jenis Pagar sekolah yang dibangun	Paket	100	9.200.000.000,00	20	3.194.799.500,00	20	923.600.000,00	20	31.490.000,00	1		1	-	0	-	4	195.944.000,00	6,00	195.944.000,00	30,00	622,24	26,00	3.390.743.500,00	26,00	36,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
6.3	Pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SMK	Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Prestasi Siswa SMK yang dipersembahkan di Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping Peserta Lomba ke tingkat Nasional	Keg	40	12.627.060.000,00	3	3.192.249.123,00	3	2.211.485.900,00	3	53.140.000,00	1	30.700.000,00	1	39.407.500,00	0	13.500.000,00	4	27.091.700,00	6,00	110.699.200,00	200,00	208,32	9,00	3.302.948.323,00	22,50	26,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
6.4	Pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SMA	Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Prestasi Siswa SMA yang dipersembahkan di Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendamping Peserta Lomba ke tingkat Nasional	Keg	40	12.627.060.000,00	5	5.043.914.364,00	6	3.208.993.000,00	6	216.220.000,00	-	25	17.311.707.000,00	45	1.318.849.000,00	30	105.548.814.560,00	100,00	124.179.370.560,00	1666,67	57.431,95	105,00	129.223.284.924,00	262,50	1.023,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
6.5	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembinaan SMK	Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Reguler dan Alkasi	Paket	500	16.800.000.000.000,00	100	78.579.957.295,00	100	-	100	127.188.963.000,00	-	25	15.076.381.800,00	45	27.418.303.060,00	30	28.054.621.744,00	100,00	70.549.306.604,00	100,00	55,47	200,00	149.129.263.899,00	40,00	0,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
6.6	Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembinaan SMA	Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fisik Reguler dan Alkasi	Paket	500	16.800.000.000.000,00	100	18.776.176.538,00	100	-	100	72.627.231.000,00	-	25	-	45	27.418.303.060,00	30	33.750.000,00	100,00	27.452.053.060,00	100,00	37,80	200,00	46.228.229.598,00	40,00	0,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
7	Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi standar kualifikasi sertifikasi guru/kepala sekolah	97,52%		5.429.446.000		312.592.208		2.998.148.000	1	442.618.200	10.632.000		37.853.711		19.330.000		369.373.062	0,00	437.188.773,00	0,00	98,77	0,00	749.780.981,00	#DIV/0!	13,81	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
7.1	Penghargaan Tokoh Pendidik	Jumlah tokoh pendidik yang diberikan penghargaan	Orang	30	277.000.000,00	12		6	148.000.000,00	12	9.000.000,00	-		-	-	-	-	12	8.898.000,00	12,00	8.898.000,00	100,00	98,87	24,00	8.898.000,00	80,00	3,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
7.2	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Jumlah Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Manajerial	Orang	600	1.299.900.000,00	12	94.821.400,00	20	1.291.895.000,00	210	5.400.000,00	-		-	-	-	-	210	5.400.000,00	210,00	5.400.000,00	100,00	100,00	222,00	100.221.400,00	37,00	7,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
7.3	Peningkatan Kompetensi Guru Mata Pelajaran	Jumlah GTK SMA, SMK dan SLB yang terpilih berprestasi Tingkat Provinsi dan Mengikuti Pemilihan ke Tingkat Nasional	Orang	500	1.106.000.000,00	0	-	72	691.805.000,00	100	47.586.000,00	10.632.000,00	0	3.460.000,00	-	100	33.470.462,00	100,00	47.562.462,00	100,00	99,95	100,00		47.562.462,00	20,00	4,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
7.4	Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional	Jumlah Guru SMA/SMK/SLB yang mengikuti Lomba Olimpiade Guru Nasional	Orang	350	829.000.000,00	116	217.770.808,00	40	227.266.000,00	70	7.824.000,00	-	70	7.317.000,00	-			70,00	7.317.000,00	100,00	93,52	186,00		225.087.808,00	53,14	27,15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
7.6	Pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Sekolah (Calok) SMA, SMK dan PK-LK	Jumlah kepala sekolah SMA, SMK dan SLB yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah	Orang	735	1.917.546.000,00	0	-	147	639.182.000,00	251	372.808.200,00	-		27.076.711,00		19.330.000,00		321.604.600,00	0,00	368.011.311,00	0,00	98,71	0,00	368.011.311,00	0,00	19,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
8	Program : Manajemen Pelayan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	%		125.021.000.000		28.224.399.663		19.864.609.500	1	8.584.603.672	202.277.173		128.012.000		860.041.600		6.402.177.723	0,00	7.592.508.496,00	0,00	88,44	0,00	35.816.908.159,00	#DIV/0!	28,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
8.1	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Kepala Sekolah, Tutor, Pamong Belajar dan Pengawas Sekolah yang mengikuti pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang pendidikan	Orang	200	745.000.000	55	495.152.417,00	64	370.000.000,00	64	522.344.948,00	116.121.273,00	64	53.375.000,00		140.751.000,00		196.136.500,00	64,00	506.383.773,00	100,00	96,94	119,00	1.001.536.190,00	59,50	134,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/3*100	15 = 13+6	16 = 15/5*100	17														
8.2	Penyediaan Operasional Sekolah	Jumlah pengurus dewan pendidikan provinsi Sulbar yang diberikan biaya operasional dan honorarium bulanan dan Jumlah Jasa Tenaga Kontrak/Staf Sekretariat Dewan Pendidikan diberikan honor bulanan	Sekolah	254	3.150.000.000	294	24.725.254.036,00	254	17.000.000.000,00	254	3.721.761.500,00	-	900.000,00	254	183.900.000,00		2.767.992.000,00	254,00	2.952.792.000,00	100,00	79,34	548,00	27.678.046.036,00	215,75	878,67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
8.3	Pelaksanaan Ujian Nasional	Jumlah dokumen laporan ujian nasional SD, SMP, SMA/SMK sederajat yang dilaksanakan	Sekolah	255	108.866.000.000	254	622.451.323,00	254	565.000.000,00	254	92.250.000,00	254	46.579.200,00	-	41.452.000,00	-	3.900.000,00	254,00	91.931.200,00	100,00	99,65	508,00	714.382.523,00	199,22	0,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
8.4	Pembinaan Siswa Berprestasi Akademik	Jumlah dokumen laporan ujian nasional SD, SMP, SMA/SMK sederajat yang dilaksanakan	Orang	200	3.592.000.000	60	664.310.000,00	40	150.000.000,00	40	2.124.600.000,00	-	-	-	40	2.042.500.000,00	40,00	2.042.500.000,00	100,00	96,14	100,00	2.706.810.000,00	50,00	75,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
8.5	Rapat Koordinasi Perencanaan Pendidikan	Jumlah Sesi Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri/Swasta yang mengikuti Rapat Bidang Pendidikan dan program Jikss Sekolah	Orang	150	553.000.000	30	526.331.571,00	30	300.000.000,00	30	476.303.423,82	39.576.700,00	-	0	12.847.600,00	30	405.700.123,00	30,00	458.124.423,00	100,00	96,18	60,00	984.455.994,00	40,00	178,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
8.6	Penulisan Buku Sejarah Lokal	Jumlah buku sejarah lokal yang ditulis	Eks	10000		2000	109.540.000,00	2000	428.560.000,00	2000	895.960.000,00	-	-	800	297.985.000,00	1200	500.990.000,00	2000,00	798.975.000,00	100,00	89,18	4000,00	908.515.000,00	40,00	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
8.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi TK Kabupaten	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi TK Kabupaten yang diikuti dan dilaksanakan	-	10000		0	-	51	200.000.000,00	51	100.000.000,00	-	-	800	-	1200	99.280.000,00	2000,00	99.280.000,00	3921,57	99,28	2000,00	99.280.000,00	20,00	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
8.9	Manajemen Penyuluran Dana Bos	Jumlah Waktu Penyuluran dan Pelaporan Dana BOS SMA, SMK, SLB yang dilakukan dan Jumlah Jasa tenaga Tim Manajemen Dana BOS Provinsi yang diberikan honor bulanan	TW	20	1.863.000.000	8	433.591.466,00	4	273.130.000,00	4	342.410.400,00	1	-	1	-	1	53.448.000,00	1	251.612.700,00	4,00	305.060.700,00	100,00	89,09	12,00	738.652.166,00	60,00	39,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
8.10	Pengembangan data dalam perencanaan bidang pendidikan	Jumlah dokumen sinkronisasi Dapodik/dasmen ke satuan pendidikan, koordinasi, konsultasi yang diikuti dan	Bulan	60	3.902.000.000	24	172.655.850,00	12	200.000.000,00	12	112.389.800,00	3	-	3	28.685.000,00	3	33.410.000,00	3	78.865.800,00	12,00	140.960.800,00	100,00	125,42	36,00	313.616.650,00	60,00	8,04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
8.11	Rapat koordinasi pengawas sekolah	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawas Sekolah yang disusun	Orang	325	2.350.000.000	130	475.113.000,00	65	377.919.500,00	65	196.583.600,00	-	-	3.600.000,00	65	137.700.000,00		55.200.600,00	65,00	196.500.600,00	100,00	99,96	195,00	671.613.600,00	60,00	28,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
9	Program : Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi Pendidikan	Persentase Sekolah SMA/SMK/SMA LBMA yang memanfaatkan dan menerapkan TIK dalam proses pembelajaran	%		1.856.000.000	333.646.100		315.195.000	1	249.603.000		20.218.200		68.674.000		149.458.000		9.405.000	0,00	247.755.200,00	0,00	99,26	0,00	581.401.300,00	#DIV/0!	31,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
9.1	Movev TIK untuk pembelajaran	Jumlah Tenaga Administrasi Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah dalam mengelola administrasi sekolah berbasis TIK	TW	20	804.000.000	0	-	4	82.500.000,00	4	46.140.000,00	1	-	1	45.884.000,00	1		1	-	4,00	45.884.000,00	100,00	99,45	4,00	45.884.000,00	20,00	5,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
9.2	Peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah dalam mengelola administrasi sekolah berbasis TIK	Jumlah nilai budaya dan kearifan lokal yang terdokumentasi	Orang	150	1.052.000.000	60	333.646.100,00	30	232.695.000,00	30	203.463.000,00		20.218.200,00		22.790.000,00	30	149.458.000,00		9.405.000,00	30,00	201.871.200,00	100,00	99,22	90,00	535.517.300,00	60,00	50,90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
10	Program : Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah nilai budaya dan kearifan lokal yang terdokumentasi	%		526.820.000		619.718.900		1.429.643.700	1	704.437.200		35.859.380		23.038.322		18.744.000		618.265.920	0,00	695.907.622,00	0,00	98,79	0,00	1.315.626.522,00	#DIV/0!	249,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K	Re	K	Re	K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
10.1	Peningkatan Kapasitas Seni Budaya Daerah	Jumlah Tenaga Kebudayaan, Pengelola Sanggar Seni, Pelaku Budaya dan Stakeholders yang mengikuti Peningkatan Kapasitas pengelolaan Seni Budaya Daerah	Orang	125	264.000.000	0	-	30	863.175.900	30	216.164.580	28.628.880,00	10.380.000,00	18.744.000,00	30	151.649.700,00	30,00	209.402.580,00	100,00	96,87	30,00	209.402.580,00	24,00	79,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
10.2	Temu karya se-indonesia	Jumlah Peserta Museum dan Taman Budaya Sulawesi Barat yang mengikuti Temu Karya se-Indonesia	orang	150	262.820.000	50	619.718.900,00	30	566.467.800	30	488.272.620	7.230.500,00	12.658.322,00	-	30	466.616.220,00	30,00	486.505.042,00	100,00	99,64	80,00	1.106.223.942,00	53,33	420,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
11	Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Jumlah kesenian daerah yang dibina dan difasilitasi 2. Jumlah Taman Budaya dan museum yang dikembangkan	%		3.942.000.000		2.133.335.912		1.445.526.800	1	172.582.000	17.296.600	25.243.000		25.900.000	93.462.600	0,00	161.902.200,00	0,00	93,81	0,00	2.295.238.112,00	#DIV/0!	58,23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
11.1	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Kekayaan Budaya Sulawesi Barat yang dikelola dan dibina	Bulan	60	263.000.000	14	1.304.196.212,00	12	691.569.000	12	104.632.000	3	6.245.500,00	3	22.243.000,00	3	11.620.000,00	3	54.390.000,00	12,00	94.498.500,00	100,00	90,32	26,00	1.398.694.712,00	43,33	531,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
11.2	Gita Bahana Nusantara (GBN)	Jumlah Peserta Gita Bahana Nusantara (GBN) yang dibina, difasilitasi	Orang	600	1.051.000.000	120	580.945.900,00	120	361.423.200	120	13.620.000	-	3.000.000,00	0	8.620.000,00	120	2.000.000,00	120,00	13.620.000,00	100,00	100,00	240,00	594.565.900,00	40,00	56,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
11.3	Festival Kesenian	Jumlah Pagelaran Budaya Sulawesi Barat yang diadakan dan didokumentasikan	Orang	150	2.628.000.000	30	248.193.800,00	30	392.534.600	30	54.330.000	11.051.100,00	-	0	5.660.000,00	30	37.072.600,00	30,00	53.783.700,00	100,00	98,99	60,00	301.977.500,00	40,00	11,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
12	Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Situs dan Cagar Budaya serta kepurbakalaan yang dilestarikan Jumlah Bangunan Rumah Adat, Taman Budaya dan Museum yang dibangun, direhabilitasi dan difasilitasi	%		789.000.000		177.813.670		22.156.567.000	1	2.870.617.450	-	5.780.000		935.166.453	1.881.322.922	0,00	2.822.269.375,00	0,00	98,32	0,00	3.000.083.045,00	#DIV/0!	380,24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
12.1	Pendaftaran warisan budaya tak benda	Jumlah warisan budaya tak benda yang didaftarkan	Dok	5	526.000.000,00	2	177.813.670,00	1	156.567.000,00	1	71.320.000,00	-	5.780.000,00	1	11.150.000,00		51.638.000,00	1,00	68.568.000,00	100,00	96,14	3,00	246.381.670,00	60,00	46,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
12.2	Rehabilitasi dan Pembangunan Kawasan, situs BCB termasuk Rumah Adat	Jumlah rumah adat yang dibangun dan direhabilitasi	Unit	5	-	-	-	1	20.000.000.000,00	1	2.782.257.450,00	-	-	0,50	909.219.253,00	0,5	1.827.608.922,00	1,00	2.736.828.175,00	100,00	98,37	1,00	2.736.828.175,00	20,00	#DIV/0!	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
12.3	Pembangunan Rumah adat dan Gedung Kesenian	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang didata, diregistrasi dan dilestarikan	Unit	10	263.000.000,00	-	-	2	2.000.000.000,00	2	17.040.000,00	-	-	2	14.797.200,00		2.076.000,00	2,00	16.873.200,00	100,00	99,02	2,00	16.873.200,00	20,00	6,42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										
13	Program : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase penyakuran dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri tingkat setu	%		359.167.000.000		-		102.735.200.000	1	97.157.372.099	-	-	-	-	90.923.921.947	0,00	90.923.921.947,00	0,00	93,58	0,00	90.923.921.947,00	#DIV/0!	25,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
13.1	Dana BOS Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah siswa SMAN yang menerima dana BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi	Sekolah	75	209.615.000.000	75	84.497.120.000,00	75	46.468.000.000,00	75	53.280.354.547,00	-	75	-	-	51.496.632.256,00	75,00	51.496.632.256,00	100,00	96,65	150,00	135.993.952.256,00	200,00	64,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
13.2	Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah siswa SMKN yang menerima dana BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi	Sekolah	58	144.855.000.000	58	63.357.320.000,00	58	47.248.200.000,00	58	41.522.964.720,00	-	58	-	-	37.675.340.868,00	58,00	37.675.340.868,00	100,00	90,73	116,00	101.032.660.868,00	200,00	69,75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											
13.3	Dana BOS Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah siswa SLBN yang menerima dana BOS Reguler dan Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Kinerja dan BOS Afirmasi	Sekolah	13	4.697.000.000	13	2.625.200.000,00	13	9.019.000.000,00	13	2.354.052.832,00	-	13	-	-	1.751.748.823,00	13,00	1.751.748.823,00	100,00	74,41	26,00	4.376.948.823,00	200,00	93,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan											

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re		K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re								K	Re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/8*100		15 = 13+6		16 = 15/5*100		17						
14	Program : Pembinaan Pendidikan Khusus, Tugas Pembantuan PAUD dan Pendidikan Dasar	APK SMP/MTs APK PAUD/TK APM SD/MSL B	%		5.145.000.000		8.352.546.067		1.285.549.000	1	3.365.684.000		40.498.700		769.574.000		55.254.269		2.497.553.900	0,00	3.362.880.869,00	0,00	99,92	0,00	11.715.426.936,00	#DIV/0!	227,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembinaan minat, bakat dan prestasi pendidikan berkelanjutan	Jumlah Jenis Lomba Minat, Bakat dan Prestasi Siswa SD dan SMP yang diperlombakan di Tingkat Provinsi dan Jumlah Pendaftar Peserta Lomba ke tingkat Nasional	Orang	5000	166.000.000		2.991.855.568,00	1014	1.225.549.000,00	10	116.040.000,00		32.210.000,00	-			12.838.269,00	1014	69.264.200,00	1014,00	114.312.469,00	10000,00	98,51	1014,00	3.106.168.037,00	20,28	1.871,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Monrev pelaksanaan ujian nasional siswa SD/SMP/SLB	Jumlah Dokumen hasil Monrev Pelaksanaan Ujian Nasional Siswa SD/SMP/SLB	Dok	5	829.000.000	1	27.399.600,00	1	60.000.000,00	1	9.330.000,00	1	8.288.700,00	-	-	-			1,00	8.288.700,00	100,00	88,84	2,00	35.688.300,00	40,00	4,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	DAK bidang pembinaan PK-LK SLB	Jumlah Jenis Kegiatan DAK Fiskal, Register dan Alimisi	Paket	5000	4.150.000.000		5.333.290.899,00	0	-	0	3.240.314.000,00	-		769.574.000,00		42.416.000,00	12	2.428.289.700,00	12,00	3.240.279.700,00	#DIV/0!	100,00	12,00	8.573.570.599,00	0,24	206,59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
DINAS KESEHATAN																												
1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran																	0,00	2.090.067.749,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	3.793.636.749,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	500.000.000,00	35	486.400.000,00	-	12	481.840.050,00	3,00	110.850.375,00	3,00	110.850.375,00	3,00	110.850.375,00	3,00	110.850.375,00	12,00	443.409.500,00	100,00	92,02	47,00	939.809.500,00	391,67	187,96	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	700.000.000,00	3	240.360.000,00	-	12	611.631.977,00	3,00	99.411.236,00	3,00	99.411.236,00	3,00	99.411.236,00	3,00	99.411.236,00	12,00	397.644.994,00	100,00	65,01	15,00	638.004.994,00	125,00	91,14	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	80.000.000,00	25	29.100.000,00	-	12	73.340.300,00	3,00	14.000.000,00	3,00	14.000.000,00	3,00	14.000.000,00	3,00	8.870.117,00	12,00	50.870.117,00	100,00	69,36	37,00	79.970.117,00	308,33	99,96	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	80.000.000,00	3	55.040.000,00	-	12	72.421.250,00	3,00	18.042.500,00	3,00	18.042.500,00	3,00	18.042.500,00	3,00	18.042.500,00	12,00	72.170.000,00	100,00	99,65	15,00	127.210.000,00	125,00	159,01	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	30.000.000,00	5	27.260.000,00	-	12	27.450.000,00	3,00	5.000.000,00	3,00	5.000.000,00	3,00	5.000.000,00	3,00	8.274.000,00	12,00	23.274.000,00	100,00	84,79	17,00	50.534.000,00	141,67	168,45	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	120.000.000,00	40	81.789.000,00	-	12	108.230.460,00	0,00	-	6,00	53.962.380,00	0,00	-	6,00	53.962.380,00	12,00	107.924.760,00	100,00	99,72	52,00	189.713.760,00	433,33	158,09	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	90.000.000,00	4	27.600.000,00	-	12	81.860.000,00	3,00	20.185.000,00	3,00	20.185.000,00	3,00	20.185.000,00	3,00	20.185.000,00	12,00	80.740.000,00	100,00	98,63	16,00	108.340.000,00	133,33	120,38	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	35.000.000,00	25	24.000.000,00	-	12	30.987.600,00	0,00	-	6,00	8.000.000,00	3,00	8.000.000,00	3,00	13.381.000,00	12,00	29.381.000,00	100,00	94,82	37,00	53.381.000,00	308,33	152,52	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	60.000.000,00	966	54.582.000,00	-	12	50.000.000,00	3,00	11.702.000,00	3,00	11.702.000,00	3,00	11.702.000,00	3,00	11.705.350,00	12,00	46.811.350,00	100,00	93,62	978,00	101.393.350,00	8150,00	168,99	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	420.000.000,00	40	374.248.000,00	-	12	414.140.000,00	3,00	103.315.632,00	3,00	103.315.632,00	3,00	103.315.632,00	3,00	103.315.632,00	12,00	413.262.528,00	100,00	99,79	52,00	787.510.528,00	433,33	187,50	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	400.000.000,00	80	233.400.000,00	-	12	364.950.000,00	3,00	91.142.375,00	3,00	91.142.375,00	3,00	91.142.375,00	3,00	91.142.375,00	12,00	364.569.500,00	100,00	99,90	92,00	597.969.500,00	766,67	149,49	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.21	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	65.000.000,00	1	60.000.000,00	-	12	60.150.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	3,00	15.000.000,00	12,00	60.000.000,00	100,00	99,75	13,00	120.000.000,00	108,33	184,62	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		842.956.902,00							Dinas Kesehatan		
1.02.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Paket	1	1.700.000.000,00	2	184.590.000,00	-	1	1.667.636.740,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	462.407.600,00	1,00	462.407.600,00	100,00	27,73	3,00	646.997.600,00	300,00	38,06	Dinas Kesehatan	
1.02.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Paket	1	200.000.000,00	6	109.600.000,00	-	1	186.515.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	163.299.744,00	1,00	163.299.744,00	100,00	87,55	7,00	272.899.744,00	700,00	136,45	Dinas Kesehatan	
1.02.01.02.22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Paket	1	25.000.000,00	2	77.562.000,00	-	1	24.220.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	100,00	-	3,00	77.562.000,00	300,00	310,25	Dinas Kesehatan	
1.02.01.02.23	Pemeliharaan Rutin berkala mobil jabatan	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	125.000.000,00	1	75.070.000,00	-	12	121.740.000,00	3,00	21.000.000,00	3,00	21.000.000,00	3,00	21.000.000,00	3,00	21.370.295,00	12,00	85.370.295,00	100,00	70,13	13,00	160.440.295,00	108,33	128,35	Dinas Kesehatan	
1.02.01.02.24	Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	140.000.000,00	6	93.450.000,00	-	12	138.215.450,00	3,00	32.000.000,00	3,00	32.000.000,00	3,00	32.000.000,00	3,00	35.879.263,00	12,00	131.879.263,00	100,00	95,42	18,00	225.329.263,00	150,00	160,95	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Proses belajar mengajar	Orang			7													118.869.662,00							Dinas Kesehatan		
1.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Proses belajar mengajar	Orang	12	170.000.000,00	7	99.600.000,00	-	-	12	165.666.000,00	3,00	29.717.415,00	3,00	29.717.415,00	3,00	29.717.415,00	3,00	29.717.417,00	12,00	118.869.662,00	100,00	71,75	19,00	218.469.662,00	158,33	128,51	Dinas Kesehatan
1.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	331.370.000,00	Tepat Waktu	231.787.000,00	Tepat Waktu	211.371.300,00	Tepat Waktu	326.392.540,00	Tepat Waktu	59.604.000,00	Tepat Waktu	87.635.000,00	Tepat Waktu	44.092.000,00	Tepat Waktu	101.226.000,00	Tepat Waktu	303.696.000,00	Tepat Waktu	93,05	Tepat Waktu	535.483.000,00	Tepat Waktu	161,60	Dinas Kesehatan
1.02.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPKD	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	Dokumen	5	142.685.000,00	6	141.335.000,00	5	142.685.000,00	5	142.484.000,00	5,00	8.084.000,00	0,00	65.800.000,00	0,00	29.400.000,00	0,00	39.200.000,00	5,00	142.484.000,00	100,00	100,00	5,00	142.484.000,00	100,00	99,86	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
												I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.02.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	Dokumen	1	10.000.000,00	2	10.060.000,00	-	1	10.966.000,00	0,00	-	1,00	7.935.000,00	0,00	-	1,00	-	-	1,00	7.935.000,00	100,00	72,36	3,00	17.995.000,00	300,00	179,95	Dinas Kesehatan
1.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	Dokumen	1	20.000.000,00	1	10.587.000,00	-	1	11.475.000,00	1,00	10.955.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,00	10.955.000,00	100,00	95,47	2,00	21.542.000,00	200,00	107,71	Dinas Kesehatan
1.02.01.06.06	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	Dokumen	2	19.699.000,00	2	19.555.000,00	2	19.699.400,00	2	19.560.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	19.560.000,00	2,00	19.560.000,00	100,00	100,00	2,00	19.560.000,00	100,00	99,29	Dinas Kesehatan
1.02.01.06.07	Penyusunan RKA-PDPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	Dokumen	2	18.899.000,00	2	19.555.000,00	2	18.899.400,00	2	18.299.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	18.299.000,00	2,00	18.299.000,00	100,00	100,00	2,00	18.299.000,00	100,00	96,83	Dinas Kesehatan
1.02.01.06.118	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeliharaan	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	kali	4	50.000.000,00	-	-	-	4	49.909.000,00	4,00	11.500.000,00	3,00	11.500.000,00	3,00	11.547.000,00	3,00	10.362.000,00	4,00	44.909.000,00	100,00	89,98	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.06.123	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah Dokumen Yang Tersedia	Dokumen	2	18.612.000,00	2	24.119.000,00	2	18.612.500,00	2	18.605.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-	2,00	13.805.000,00	2,00	18.605.000,00	100,00	100,00	2,00	18.605.000,00	100,00	99,96	Dinas Kesehatan
1.02.01.06.14	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Tersusunnya LKJP SKPD	Dokumen	1	11.475.000,00	1	6.576.000,00	1	11.475.000,00	1	10.980.000,00	1,00	10.980.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	10.980.000,00	0,00	100,00	1,00	17.556.000,00	100,00	152,99	Dinas Kesehatan
1.02.01.06.25	Pertemuan Evaluasi Pengelolaan Keuangan	Tersusunnya rencana kerja dan keuangan	kali	3	40.000.000,00	-	-	-	3	31.297.240,00	1,00	15.685.000,00	1,00	-	1,00	3.145.000,00	0,00	-	3,00	18.830.000,00	100,00	60,17	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.06.73	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan	Tersusunnya rencana kerja dan keuangan	bulan	12	12.000.000,00	-	-	-	12	11.475.000,00	3,00	3.000.000,00	3,00	-	3,00	4.611.000,00	3,00	1.764.000,00	12,00	11.139.000,00	100,00	97,07	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.06.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						454.239.000,00												0,00	995.573.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan dalam mendukung Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Paket			1	65.060.000,00	-	-	-	972.861.500,00	-	-	-	-	-	-	112.324.000,00	0,00	112.324.000,00	#VALUE!	11,55	1,00	177.384.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.15.09	Pemantauan Indikator Penggunaan Obat Rasional (Isip, Non Premonia, Diare Non Spesifik, Malaria) di PKM Perawatan	Tersedianya Dokumen Data Indikator Penggunaan Obat Rasional (PKM)	Dokumen	6	534.373.070,00	6	29.460.000,00	-	-	6	39.320.000,00	-	-	4,00	27.900.000,00	2,00	11.060.000,00	6,00	38.960.000,00	100,00	99,08	12,00	68.420.000,00	200,00	12,80	Dinas Kesehatan		
1.02.01.15.24	Distribusi Obat	Tersedianya Obat dan Bahan Medis Habis di Instalasi Farmasi Kabupaten	Kabupaten	6	534.373.070,00	-	-	-	-	6	95.178.000,00	-	5,00	37.864.000,00	5,00	37.420.000,00	3,00	19.464.000,00	13,00	94.748.000,00	216,67	99,55	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.15.80	Pelayanan Kefarmasian	Tersedianya Sarana dan Prasarana di UPTD Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)				2	424.779.000,00	-	-		779.049.000,00	-	-					#VALUE!	749.541.000,00	#VALUE!	96,21	#VALUE!	1.174.320.000,00	#VALUE!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat																		0,00	290.447.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	290.447.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.16.80	Pemantauan Kesehatan Pengemudi	Jumlah Kabupaten melaksanakan kesehatan kerja	Kabupaten	6	100.000.000,00	0	-	1	24.367.000,00	1	24.367.000,00								0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kesehatan	
1.02.01.16.80	Orientasi Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) pada kelompok Kerja	Jumlah Kabupaten melaksanakan kesehatan kerja	Kabupaten	6	250.000.000,00	-	-	3	57.291.600,00	3	57.201.600,00	3,00	57.201.600,00						3,00	57.201.600,00	100,00	100,00	3,00	#VALUE!	50,00	#VALUE!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.16.82	Penguatan POS UKK Melalui Bimtek POS UKK	Jumlah Kabupaten melaksanakan kesehatan kerja	Kabupaten	6	200.000.000,00	0	-	6	98.960.000,00	6	98.960.000,00	6,00	78.039.000,00						6,00	78.039.000,00	100,00	78,86	6,00	78.039.000,00	100,00	39,02	Dinas Kesehatan	
1.02.01.16.85	Sosialisasi Penggerakan Aktifitas Fisik	Jumlah Kabupaten yang melaksanakan Kesehatan Olah Raga	Kabupaten	6	-	-	-	-	-	-	-								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#VALUE!	0,00	#VALUE!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.16.86	Monitoring dan Evaluasi K3 di Fasilitas	Jumlah Fasilitas /Pkm yang melaksanakan K3	Kabupaten	6	125.867.690,00	-	-	6	125.867.690,00	6	125.867.690,00							6,00	113.407.200,00	6,00	113.407.200,00	100,00	90,10	6,00	#VALUE!	100,00	#VALUE!	Dinas Kesehatan
1.02.01.16.88	Bimtek dan Implementasi KTR di institusi	Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Penggunaan PAK	Kabupaten	6	55.000.000,00	-	-	6	50.520.000,00	6	50.520.000,00	0,00	-	6,00	41.800.000,00	0,00	-	0,00	-	6,00	41.800.000,00	100,00	82,74	1,00	41.800.000,00	16,67	76,00	Dinas Kesehatan
1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan																		0,00	67.958.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.19.14	Sosialisasi BTP	Tersedianya Petugas Kesehatan dalam hal Bahan Tambahan Pangan yang sesuai dengan Standar Kesehatan	Kabupaten	6	406.123.533,00	-	-	-	-	2	96.278.800,00	-	-	-	-	-	-	2,00	67.958.800,00	2,00	67.958.800,00	100,00	70,59	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kesehatan
1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kabupaten PHBS	Persentase																961.305.500,00								Dinas Kesehatan	
1.02.01.19.14	Pembinaan Desa Siaga Aktif Tk. Provinsi	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kabupaten PHBS	Persentase	100	300.000.000,00	6	193.862.000,00		100	278.984.000,00	100,00	179.420.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	179.420.000,00	100,00	64,31	106,00	373.282.000,00	106,00	124,43	Dinas Kesehatan	
1.02.01.19.17	Penyebutan Informasi Rumah Tangga Ber PHBS	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kabupaten PHBS	Persentase	100	300.000.000,00	-	-		100	221.955.700,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	174.117.000,00	100,00	174.117.000,00	100,00	78,45	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.19.36	Penggerakan Masyarakat Perilaku Sehat dalam Gernas	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kabupaten PHBS	Persentase	100	200.000.000,00	6	149.969.500,00		100	222.109.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	197.088.000,00	100,00	197.088.000,00	100,00	88,73	106,00	347.057.500,00	106,00	173,53	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K		K		K		K		I		II		III		IV		K		K		K		K		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1.02.01.01 -19.47	Facilitasi Satuan Bakti Husada (Kursus Pembina Promuka Matrik Tingkat Dasar (KMD))	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan DBRS	Persentas e	100	500.000.000,00	-	-	100	438.924.560,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	265.330.500,00	100,00	265.330.500,00	100,00	60,45	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -19.49	Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Pameran	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan DBRS	Persentas e	100	100.000.000,00			100	80.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	79.866.000,00	100,00	79.866.000,00	100,00	99,83	100,00	79.866.000,00	100,00	79,87	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -19.37	Evaluasi dan Intervensi Germas	Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Kebijakan DBRS	Persentas e	100	150.000.000,00			100	105.920.000,00	0,00	-	0,00	-	100,00	65.840.000,00	0,00	-	100,00	65.484.000,00	100,00	62,16	100,00	65.840.000,00	100,00	43,89	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20	Perbaikan Gizi				5.445.000.000,00		6.223.000.000,00		10.876.620.400,00							54,00	5.888.202.041,00	54,00	5.888.202.041,00	#DIV/0!	54,14	54,00	11.333.202.041,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.57	Evaluasi Pemberian PMT Pada Ibu Hamil	Persentase Anak-Baduta Kecamatan Sugihan	Dokumen	-	6	10.890.000,00	6	124.000.000,00	70	80.197.000,00						53,00	42.582.000,00	44,00	35.272.000,00	97,00	77.854.000,00	138,57	97,08	103,00	88.744.000,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan
1.02.01.01 -20.58	Pendampingan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	Jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang yang di dampingi	BALITA	-	1000	816.785.000,00	1000	936.121.677,00	70	323.878.200,00						28,00	90.983.760,00	28,00	90.983.760,00	40,00	28,09	1028,00	907.768.760,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.60	Peningkatan Kapasitas petugas dalam konseling menyusui	Jumlah petugas yang ditingkatkan	Orang	-	65	1.089.020.000,00	70	1.244.640.958,00	70	96.667.000,00						50,00	58.305.000,00	50,00	58.305.000,00	71,43	60,32	115,00	1.147.325.000,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.61	Peningkatan pelayanan kesehatan gizi ibu dan anak berkelanjutan melalui pendampingan	Ibu dan anak yang mendapatkan pendampingan	Orang	-	1000	653.445.000,00	1000	746.824.156,00	70	555.714.000,00						56,00	312.908.000,00	56,00	312.908.000,00	80,00	56,31	1056,00	966.353.000,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.63	Pengadain PMT ibu hamil KEK, dan Balita Kurus	Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus	Dokumen	-					2.161.447.630,00								0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	-	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.69	Penutrisian data dan Surveilans Gizi	Data dan Surveilans Gizi	Dokumen	-					111.679.900,00								81.106.700,00	0,00	81.106.700,00	#DIV/0!	72,62	0,00	81.106.700,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.72	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KCK	Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KCK	Paket	-	1	490.050.000,00	1	560.078.000,00	1	3.470.036.430,00						76,00	2.669.785.750,00	76,00	2.669.785.750,00	7600,00	76,94	77,00	3.159.835.750,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.73	Penyediaan Makanan Tambahan bagi BALITA	Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus	Paket	-	1	490.050.000,00	1	560.078.000,00	1	3.240.513.940,00						69,00	2.240.801.324,00	69,00	2.240.801.324,00	6900,00	69,15	70,00	2.730.851.324,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.74	Pelatihan pencegahan stafoksa gizi buruk	Tenaga kesehatan yang di latih stafoksa gizi buruk	BALITA	-					367.802.500,00								107.213.307,00	0,00	107.213.307,00	#DIV/0!	29,15	0,00	107.213.307,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.75	Pelacakan dan konfirmasi Masalah Gizi dan dan Move Gizi	Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan dan di konfirmasi	Orang	-					138.440.000,00								135.440.000,00	0,00	135.440.000,00	#DIV/0!	97,83	0,00	135.440.000,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -20.77	Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan anak (PMBR)	Tenaga kesehatan yang di latih PMBR	BALITA	-	500	381.150.000,00	500	435.616.000,00	500	330.243.800,00						34,00	113.804.200,00	34,00	113.804.200,00	6,80	34,46	534,00	494.954.200,00	#DIV/0!	#VALUE!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat																0,00	630.448.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02 -1.02.01.0 1.21.28	Pertemuan Jejaring STBM	Tergain koordinasi antara semua stake holder dalam pelaksanaan kegiatan STBM dan mendukung terwujudnya universal access	Kabupaten	6	388.000.000,00	6	-	6	229.598.000,00	6	229.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	193.872.000,00	6,00	193.872.000,00	100,00	84,44	12,00	193.872.000,00	200,00	49,97	Dinas Kesehatan		
1.02.1.02 01.01.21.7 6	Bimbingan Teknis Petugas dalam Pengawasan TPM yang Memenuhi Syarat	Jumlah Peserta yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	6	300.000.000,00	0	-	258	229.598.000,00	258	164.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	123.130.000,00	210,00	123.130.000,00		74,97	210,00	123.130.000,00	3500,00	41,04	Dinas Kesehatan		
1.02.1.02 01.01.21.7 8	Pertemuan Orientasi Depot Air Minum	Jumlah Peserta yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	160.992.900,00	0	-	35	26.832.150,00	20	26.832.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	24.191.000,00	35,00	24.191.000,00	175,00	90,16	35,00	24.191.000,00	#DIV/0!	15,03	Dinas Kesehatan		
1.02.1.02 01.01.21.7 9	Bimbingan Teknis Implementasi STBM 5 Pilar	Jumlah Peserta yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	6	180.000.000,00	0	-	250	178.080.000,00	6	178.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	113.035.000,00	175,00	113.035.000,00	2916,67	63,47	175,00	113.035.000,00	2916,67	62,80	Dinas Kesehatan		
1.02.1.02 01.01.21.8 3	Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	Jumlah Peserta yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	6	120.000.000,00	0	-	210	101.640.000,00	210	101.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	92.710.000,00	210,00	92.710.000,00	100,00	91,21	210,00	92.710.000,00	3500,00	77,26	Dinas Kesehatan		
1.02.1.02 01.01.21.8 4	Pemeriksaan dan Pengawasan Limbah Medis	Jumlah Dokumen yang dicatat	Dokumen	6	-	0	-	6	94.080.000,00	6	94.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	83.510.000,00	6,00	83.510.000,00	100,00	88,76	6,00	83.510.000,00	100,00	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																0,00	9.815.233.568,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01 -22 -133	Investigasi dan Penanggulangan KLB	-							10.884.085.743,00								0,00	8.686.109.518,00	#DIV/0!	79,81	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01 -22 -147	Peningkatan Penemuan Preklinik TB	-							40.000.000,00								29.920.000,00	0,00	29.920.000,00	#DIV/0!	74,80	0,00	29.920.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -22 -181	Sosialisasi dan Adokasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumerak	-							54.767.300,00								48.667.300,00	0,00	48.667.300,00	#DIV/0!	88,86	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -22 -187	Facilitasi Cold Room	Presentase Bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat murnisasi dasar kehidupan		94	45.000.000,00	78		94	38.840.000,00								34.989.650,00	0,00	34.989.650,00	#DIV/0!	90,09	78,00	34.989.650,00	82,89	77,75	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -22 -188	Evaluasi Malaria di Kabupaten Eliminasi dan Pasca Eliminasi	Jumlah Kabupaten	Kabupaten	6	80.000.000,00	6	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	41.107.000,00		6,00	33.540.000,00			6,00	33.540.000,00	100,00	81,59	12,00	83.540.000,00	200,00	104,43	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01 -22 -193	Gerakan 1 Rumah 1 Jumerak (Pengendalian DBD)								118.851.867,00								112.900.000,00		112.900.000,00		94,99					Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 -22 -195	Ekspansi Strategi DOTS di Daerah Terpencil di Provinsi Sulawesi Barat							1	43.074.200,00							1,00	37.562.500,00	1,00	37.562.500,00	100,00	87,20	1,00	37.562.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.1.02 01.01.22.1 91	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular / Peningkatan Pemeriksaan pemeriksaan Konseling dan Testing pada Populasi Khusus, Populasi Kerumah dan Populasi Survei	Prevalensi HIV	Orang					100	53.665.000,00				90,38	48.500.000,00			90,38	48.500.000,00	90,38	90,38	90,38		48.500.000,00		#DIV/0!	Dinas Kesehatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	13 = 9+10+11+12	K	Re	14 = 13*100	K	Re		15 = 13+6	K	Re	16 = 15*100
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re													
1.02.1.02.01.01.22.1-99	Peningkatan Kapasitas Pengelola Program HIV	Prevalensi HIV	Kabupaten / Kota			0	-		100	80.000.000,00								37,50	30.000.000,00	37,50	37.330.000,00	37,50	46,66	37,50				Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.200	Pengutan System Surveilans Malaria (e-System)	Jumlah Kabupaten	Kabupaten	6	80.000.000,00	6	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	39.095.000,00		6,00	36.865.000,00						6,00	36.865.000,00	100,00	94,30	12,00	86.865.000,00	200,00	108,58	Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.205	Peningkatan Kapasitas petugas Puskesmas dalam tatalaksana ISPA sesuai standar	Jumlah Kabupaten	Kabupaten							80.000.000,00											35.270.000,00		44,09					Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.215	Bimtek Pelaksanaan Imunisasi dasar Lengkap	Presentase Bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		94	150.000.000,00	78		94		53.277.000,00										-	0,00	-	#DIV/0!	#VALUE!	78,00	#VALUE!	82,89	#VALUE!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.218	Monitoring dan Pengumpulan Data Pelaksanaan Bias (Bulan imunisasi Anak Sekolah)	Presentase Anak sekolah yang mendapatkan imunisasi dasar		95	70.000.000,00	95		95		35.597.000,00								18.796.000,00	0,00	18.796.000,00	#DIV/0!	52,80	94,90	18.796.000,00	99,89	26,85		Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.225	Bimtek Program Surveilans Terpadu	Jumlah Kabupaten								44.970.000,00											37.320.000,00		82,99					Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.229	Monitoring pelaksanaan Introduksi Vaksin Measles rubella (MR)	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		92	55.000.000,00	81		91,66		31.301.000,00								24.080.000,00	0,00	24.080.000,00	#DIV/0!	76,93	80,70	24.080.000,00	87,72	43,78		Dinas Kesehatan				
1.02.1.02.01.01.22.236	Program Pencegahan dan Penyakit Menular / VCT Mobile	Prevalensi HIV	Orang			0	-		100	53.175.000,00			57,21	30.420.000,00						57,21	30.420.000,00	57,21	57,21	57,21				Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.237	Bimtek pelaksanaan pelayanan posbindu PTM	Terlaksananya Monitoring penggunaan DAK	Orang	180	140.000.000,00	150	111.770.000,00	180	137.167.600,00	180	137.167.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	180,00	121.847.600,00	180,00	121.847.600,00	100,00	88,83	6,00	233.617.600,00	3,33	166,87		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.240	CJT Pelaksanaan SKDR Dalam Rangka Respon Penyakit Potensial KLB		Kabupaten							59.360.000,00											49.120.000,00	0,00	48.500.000,00	#DIV/0!	81,70	0,00	48.500.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01.22.241	Bimtek Pelaksanaan Imunisasi Rutin dan Lanjutan	Presentase Bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		94	110.000.000,00	78		94		43.980.000,00										-	0,00	-	#DIV/0!	-	78,00	-	82,89	-	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.243	Evaluasi Pelaksanaan Pasca PQPM Kecamatan		Kabupaten							29.680.000,00											29.460.000,00		99,26					Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.244	Bimbingan Teknis Penyakit Zoonosis		Kabupaten							80.430.000,00											77.860.000,00		96,80					Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.22.245	CJT Pemetaan dan Deteksi Vektor di Daerah Endemis Penyakit Tular Vektor									31.780.000,00											27.550.000,00		86,69					Dinas Kesehatan				
1.02.1.02.01.01.22.246	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular / Movev dan Bimtek Gerakan HIV/AIDS	Prevalensi HIV	Kabupaten					100	31.780.000,00			79,67	25.320.000,00							79,67	25.320.000,00	79,67	79,67	79,67	25.320.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.247	Bimbingan Teknis Program Penyakit TBC		Kabupaten					1	31.780.000,00									1,00	40.440.000,00	1,00	27.160.000,00	100,00	85,46	1,00	27.160.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.248	Bimbingan Teknis dan Validasi Data Program Kota		Kabupaten						31.780.000,00												28.260.000,00		88,92		-				Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.249	Movev Program ISPA																				29.160.000,00								Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.250	Bimtek Implementasi Pelaksanaan pelayanan posbindu PTM di Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Bimtek antar kader dan pengelola PTM di Puskesmas	Kabupaten	6	50.000.000,00	-	-	6	47.560.000,00	6	47.560.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	40.440.000,00	6,00	40.440.000,00	100,00	85,03	86,00	40.440.000,00	1433,33	80,89		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.251	Movev dan Bimtek Program Hepatitis dan Infeksi Pencernaan		Orang					1	46.620.000,00									1,00	-	1,00	44.636.000,00	100,00	95,74	1,00	44.636.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.252	Bimtek Pelaporan Program Malaria									29.980.000,00											28.730.000,00		95,83						Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.22.43	Penatalaksanaan Kasus Malaria Bagi Petugas Malaria	Jumlah Kabupaten	Kabupaten	6	80.000.000,00	6	50.000.000,00	6	60.000.000,00	6	40.895.000,00		6,00	34.040.000,00						6,00	34.040.000,00	100,00	83,24	12,00	84.040.000,00	200,00	105,05		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																			0,00	804.330.300,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.23.260	Peningkatan Kemampuan Teknis Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)	Jumlah Peserta Peningkatan kemampuan Teknis Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)	Orang					-	283.951.000										276.664.000	0,00	276.664.000,00	-	97,43	0,00	276.664.000,00				Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.23.261	Pembinaan PIS - PK	Jumlah Kecamatan / Puskesmas yang di bina PIS - PK	Orang					-	70.926.000,00											0,00	69.957.500,00	-	98,63	0,00	69.957.500,00			#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.23.270	Visitasi Akreditasi dan Kelas Rumah Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Laporan Visitasi Akreditasi dan Kelas Rumah Rumah Sakit	Orang					-	73.322.000											0,00	72.050.000,00	-	98,27	0,00	72.050.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.23.263	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi FKTP	Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi FKTP	Orang					-	200.642.000,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,53	106.756.000	0,53	198.819.000,00	-	99,09	0,53	198.819.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan				
1.02.01.01.23.282	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana atau berpotensi Bencana	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan Penguatan dalam Pengelolaan Krisis Kesehatan	Orang					-	147.214.743,00											0,00	133.392.800,00	-	90,61	0,00	133.392.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan			
	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Jumlah Krisis Kesehatan akibat bencana yang di tangapilangi						-	55.657.000											0,00	53.447.000,00	-	96,03	0,00	53.447.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak								1.598.482.700,00				326.226.100,00					170.046.000,00	605.938.500,00	0,00	1.083.052.500,00	#DIV/0!	67,76	0,00	1.083.052.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan			
1.02.01.01.32.118	Orientasi Maternal Death Notification (MDN)	Peningkatan Kapasitas Bidan	Dokumen						105.391.500,00			-		-		-	44,09	46.471.000,00	44,09	46.471.000,00	#DIV/0!	44,09	44,09	46.471.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
										K	Re	K	Re	K	Re	K	Re												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1.02.01.01 32.119	Orientasi Ante Natal Care (ANC) Terpadu dan Post Natal Care (PNC)	Peningkatan Kapasitas Bidan	Dokumen		50	239.020.000,00	50	250.000.000,00		105.709.400,00			-		84,96	89.810.000,00	84,96	89.810.000,00	#DIV/0!	84,96	134,96		328.830.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01 32.120	Penguatan Penyellian Fasilitas Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Peningkatan Kapasitas Petugas	Dokumen		50	239.020.000,00	50	250.000.000,00		174.026.000,00			-	22,30	29.999.000,00	39,03	37.927.000,00	61,33	67.926.000,00	#DIV/0!	39,03	111,33		306.946.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 32.121	Penguatan Pelayanan Bayi Baru Lahir (BBL), Termasuk Skining Hipotermid Konvensional (SKHK)	Jumlah yang di skining	Bayi		50	239.020.000,00	50	250.000.000,00		134.508.000,00			-	43,55	53.527.000,00	4,37	10.934.000,00	47,92	64.461.000,00	#DIV/0!	47,92	97,92		303.481.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 32.122	Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial	Bidan Koordinator dan Bidan Desa	Dokumen		60	500.000.000,00	60	425.000.000,00		122.896.000,00			-	43,55	53.527.000,00	29,68	36.470.000,00	73,23	89.997.000,00	#DIV/0!	73,23	133,23		589.997.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 32.124	Orientasi Kohort Bayi dan Balita	Bidan Koordinator dan Bidan Desa	Dokumen		50	239.020.000,00	50	250.000.000,00		104.825.400,00			-	45,68	47.883.000,00	41,93	43.955.400,00	87,61	91.838.400,00	#DIV/0!	87,61	137,61		330.858.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 32.125	Penguatan Pembinaan Kader Kesehatan Guru PAUD/TK/RA tentang Buku KIA dan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh kembang Anak (SDIDTK)	Pengelola Program,Bidan koordinator dan Guru Paud	Dokumen		50	464.000.000,00	50	505.305.280,00		158.616.000,00			-	16,04	25.441.800,00	30,04	47.654.000,00	46,08	73.095.800,00	#DIV/0!	46,08	96,08		537.095.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 32.126	Orientasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Remaja (MTPKR)	Tenaga kesehatan,bidan dan pengelola program	Dokumen		50	239.020.000,00	50	250.000.000,00		106.286.000,00			-	14,10	14.990.000,00	74,30	78.970.000,00	88,40	93.960.000,00	#DIV/0!	88,40	138,40		332.980.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 32.129	Orientasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin dan Pasangan Usia Subur)	Tenaga kesehatan,bidan dan pengelola program	Dokumen		50	239.020.000,00	50	250.000.000,00		90.486.000,00			-	24,12	21.820.900,00	52,21	47.250.000,00	76,33	69.070.900,00	#DIV/0!	76,33	126,33		308.090.900,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 32.131	Bimtek Kesehatan Keluarga	Jumlah Kabupaten yang mendapatkan Bimbingan Teknis						151.560.000,00				-	30,00	47.000.000,00	32,00	49.800.000,00	15,09	20.034.000,00		116.834.000,00	#DIV/0!	77,09	0,00		116.834.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
1.02.01.01 32.91	Pendampingan Ibu Hamil Dalam Rangka Menurunkan Jumlah Kematan Ibu	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan Pendampingan	orang		60	350.000.000,00	60	350.000.000,00		344.178.400,00			-	34,00	89.000.000,00	47,23	190.588.400,00		279.588.400,00	#DIV/0!	81,23	60,00		629.588.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
																	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01 34	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Jumlah Dokumen kebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pembangunan kesehatan yang Berualitas	Dokumen	1	1.206.468.100,00	1		1	1.206.468.100,00	1	993.237.600,00	1,00		-	1,00	92.768.100,00	1,00	19.600.000,00	1,00	880.869.500,00	1,00	1.158.513.000,00	100,00	116,64	1,00	1.158.513.000,00	100,00	96,03	Dinas Kesehatan
1.02.01.01 34.01	Rapat Kerja Kesehatan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Lintas Program, Lintas Sektor, Pusat dan Daerah	Orang	86	181.013.000,00	86	-	86	181.013.000,00	86	165.275.400,00	0,00		-	0,00	-	86,00	165.275.400,00	86,00	165.275.400,00	100,00	100,00	86,00	165.275.400,00	100,00	91,31	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 34.02	Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Terlaksananya Rakor LP LS Pemerintah Subar	Dokumen	1	90.833.000,00	1	130.000.000,00	1	90.833.000,00	1	88.298.100,00	0,00		-	1,00	88.298.100,00	0,00	-	1,00	88.298.100,00	100,00	100,00	1,00	218.298.100,00	100,00	240,33	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 34.16	Monitoring dan Evaluasi DAK Kesehatan	Terlaksananya Monitoring penggunaan DAK	Kabupaten	6	199.360.000,00	6	75.000.000,00	6	199.360.000,00	6	175.829.000,00	0,00		-	0,00	-	1,00	10.400.000,00	5,00	165.429.000,00	6,00	175.829.000,00	100,00	100,00	6,00	250.829.000,00	100,00	125,82	Dinas Kesehatan
1.02.01.01 34.38	Fasilitasi Dan Intervensi Program Meraas Bidang Kesehatan	Terlaksananya pendampingan Desa Meraas	Desa	6	791.560.700,00	6	350.000.000,00	6	791.560.700,00	6	643.675.100,00	0,00		-	0,00	-	6,00	643.675.100,00	6,00	643.675.100,00	100,00	100,00	12,00	993.675.100,00	200,00	125,53	Dinas Kesehatan		
1.02.01.01 34.48	Monitoring dan Evaluasi PIS- PK Tahun 2020	Terlaksananya Movev dan Bimbingan Teknis Program Indonesia Sehat	Dokumen	6	124.714.400,00	0	-	6	124.714.400,00	6	85.435.400,00	0,00		-	1,00	4.470.000,00	1,00	9.200.000,00	2,00	71.765.400,00	4,00	85.435.400,00	66,67	100,00	4,00	85.435.400,00	66,67	68,50	Dinas Kesehatan
1.02.01.01 35	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan								180.835.960,00								0,00	141.175.000,00	#DIV/0!	78,07	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01 35.60	Monitoring dan Evaluasi Penguatan Tenaga Kesehatan Berbasis Tim dan Individu	Jumlah tenaga kesehatan rusantara sehat baik tim maupun individu di Prov. Subar	Orang	30	55.000.000,00	30	48.570.000,00	30	84.339.100,00	30	84.339.100,00	0,00		-	0,00	-	30,00	78.287.800,00	0,00	30,00	80.742.800,00	100,00	95,74	60,00	129.312.800,00	200,00	235,11	Dinas Kesehatan	
14.02.01.0 1.35.72	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas	Jumlah Tenaga kesehatan teladan yang terpilih	Orang	30	100.000.000,00	9	93.805.000,00	9	96.496.860,00	9	96.496.860,00	0,00		-	0,00	-	3,00	62.932.200,00	0,00	-	3,00	60.432.200,00	33,33	62,63	12,00	154.237.200,00	40,00	154,24	Dinas Kesehatan
1.02.01.01 37	Program Pelayanan Kesehatan Perencanaan																	0,00	1.703.797.523,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	189.713.760,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.01.01 37-10	Peningkatan pelayanan kesehatan di Poli									603.375.657,00								0,00	343.903.155,00	#DIV/0!	57,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan			
1.02.37.01 9	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan	Tersedianya dan meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan	Bulan	12	500.000.000,00			12	223.580.700,00								3,00	206.340.370,00	3,00	206.340.700,00	25,00	92,29	3,00	206.340.700,00	25,00	41,27	Dinas Kesehatan		
1.02.37.02 4	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal	Tersedianya Dokumen Pelayan Kesehatan	Bulan	12	700.000.000,00			12	-							-	3,00	-	12,00	-	100,00	#DIV/0!	12,00	-	100,00	-	Dinas Kesehatan		
1.02.37.02 7	Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagent	Tersedianya Bahan Medis habis Pakai dan reagent Laboratorium kesehatan	Bulan	12	80.000.000,00			12	244.564.260,00									18.751.165.200,00	12,00	187.511.652,00	100,00	76,67	12,00	187.511.652,00	100,00	234,39	Dinas Kesehatan		
1.02.37.03 0	Promosi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Tersedianya Dokumen Media Promosi Layanan Laboratorium kesehatan Pelayanan Kesehatan	Bulan	12	80.000.000,00			12	47.909.700,00			46.809.700,00							12,00	46.809.700,00	100,00	97,70	12,00	46.809.700,00	100,00	58,51	Dinas Kesehatan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11x12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17													
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan pertanggung- jawaban bulanan keuangan (SPJ Fungsional)	Dokumen	12	145.000.000,00	12	145.900.000,00	12	89.800.000,00	12	89.800.000,00	3,00	20.000.000,00	3,00	31.680.000,00	3,00	31.680.000,00	3,00	5.165.000,00	12,00	88.525.000,00	100,00	98,58	24,00	234.425.000,00	200,00	161,67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyusunan laporan keuangan semester	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	1	35.000.000,00	1	15.700.000,00	1	11.238.400,00	1	11.238.400,00	0,00	-	0,00	-	1,00	-	11.188.090,00	1,00	11.188.090,00	100,00	99,55	2,00	26.888.090,00	200,00	76,82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	50.000.000,00	1	16.775.000,00	1	17.416.400,00	1	17.416.400,00	1,00	11.460.000,00	0,00	3.223.780,00	0,00	-	2.700.000,00	1,00	17.383.780,00	100,00	99,81	2,00	34.158.780,00	200,00	68,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Penyusunan Renstra/Renja/ LAKIP dan LPPD	Dokumen Renstra/Renja/E valuasi Renja/LAKIP dan LPPD Perangkat Daerah	Dokumen	7	100.000.000,00	0	-	4	43.540.800,00	4	43.540.800,00	2,00	-	0,00	1.967.130,00	1,00	5.130.000,00	1,00	35.775.000,00	4,00	42.872.130,00	100,00	98,46	4,00	42.872.130,00	57,14	42,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyusunan RKA/DPA- SKPD	Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	Dokumen	2	30.000.000,00	2	21.500.000,00	2	21.037.600,00	2	21.037.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	17.910.610,00	2,00	17.910.610,00	100,00	85,14	4,00	39.410.610,00	200,00	131,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyusunan RKA-P/DPPA- SKPD	Dokumen RKA- P dan DPPA Perangkat Daerah	Dokumen	2	30.000.000,00	2	21.500.000,00	2	21.037.600,00	2	21.037.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	20.460.610,00	2,00	20.460.610,00	100,00	97,26	4,00	41.960.610,00	200,00	139,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Laporan bulanan pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah	Laporan	12	180.000.000,00	12	257.689.009,00	12	420.460.460,00	12	420.460.460,00	3,00	26.900.000,00	3,00	42.340.000,00	3,00	52.000.000,00	3,00	243.321.000,00	12,00	364.561.000,00	100,00	86,71	24,00	622.250.009,00	200,00	345,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah operator Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dibayarkan	OB	84	118.000.000,00	84	13.825.000,00	132	165.700.000,00	132	165.700.000,00	33,00	-	33,00	37.400.000,00	33,00	28.400.000,00	33,00	48.485.000,00	132,00	114.285.000,00	100,00	68,97	216,00	128.110.000,00	257,14	108,57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Dokumen LKJP Perangkat Daerah	Dokumen	1	15.000.000,00	1	12.900.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1,00	-	0,00	815.320,00	0,00	-	12.064.000,00	1,00	12.879.320,00	100,00	99,07	2,00	25.779.320,00	200,00	171,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Laporan bulanan aset/barang daerah	Laporan	0	-	12	74.207.149,00	12	57.110.400,00	12	57.110.400,00	3,00	-	3,00	12.386.070,00	3,00	10.080.000,00	3,00	18.190.000,00	12,00	40.656.070,00	100,00	71,19	24,00	114.863.219,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi mantap jalan provinsi yang dibangun	Persen	13	132.736.000.000,00	37	61.881.952.467,00	3,25	34.983.315.243,52	3	73.296.634.084,08	0,00	238.602.345,00	0,00	2.212.398.988,34	0,20	11.243.984.725,00	2,14	58.000.047.862,39	2,34	71.695.033.920,73	88,30	97,81	39,58	133.576.986.387,73	307,54	100,63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan provinsi yang dibangun	Km	34	127.656.000.000,00	9	61.881.952.467,00	5,4	27.692.817.763,52	10	65.703.961.624,08	0,00	238.602.345,00	1,80	1.374.728.317,00	3,00	11.220.974.725,00	5,00	51.686.646.537,00	9,80	64.520.951.924,00	100,00	98,20	19,25	126.402.904.391,00	57,12	99,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan pada ruas jalan provinsi yang dibangun	Meter	20	5.080.000.000,00	0	-	27	7.290.497.480,00	30	7.592.672.460,00	0,00	-	0,00	837.670.671,34	12,00	23.010.000,00	18,00	6.313.401.325,39	30,00	7.174.081.996,73	100,00	94,49	30,00	7.174.081.996,73	150,00	141,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase tingkat kondisi mantap jalan provinsi yang dibangun	Persen	13	6.500.000.000,00	37	4.657.792.721,00	3,25	3.114.014.377,26	3	3.114.014.377,26	0,00	702.289.092,00	0,00	845.911.922,00	0,20	674.766.922,00	2,14	852.663.089,00	2,34	3.075.631.025,00	88,30	98,77	39,58	7.733.423.746,00	307,54	118,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan provinsi yang dibangun	Km	120	6.500.000.000,00	130	4.657.792.721,00	50	3.114.014.377,26	50	3.114.014.377,26	12,00	702.289.092,00	14,00	845.911.922,00	11,00	674.766.922,00	15,00	852.663.089,00	52,00	3.075.631.025,00	104,00	98,77	182,00	7.733.423.746,00	151,67	118,98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Persentase tingkat kondisi mantap jalan provinsi yang dibangun	Persen	13	-	37	10.000.000,00	3,25	378.300.250,00	3	378.300.250,00	0,00	-	0,00	49.313.500,00	0,20	139.683.500,00	2,14	162.814.282,00	2,34	351.811.282,00	88,30	93,00	39,58	361.811.282,00	307,54	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebencanaan	Jumlah (unit) alat ukur dan bahan laboratorium kebencanaan	Unit	0	-	1	10.000.000,00	8	88.309.750,00	8	88.309.750,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	88.082.250,00	8,00	88.082.250,00	100,00	99,74	9,00	98.082.250,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah (unit) alat berat yang dibangun	Unit	0	-	0	-	9	289.990.500,00	9	289.990.500,00	0,00	-	2,00	49.313.500,00	5,00	139.683.500,00	2,00	74.732.032,00	9,00	263.729.032,00	100,00	90,94	9,00	263.729.032,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi yang berfungsi dengan baik (10.114.434,00)	Persen	41	20.710.000.000,00	53	19.920.152.739,02	19,77	6.813.144.608,94	20	6.821.964.608,94	0,00	88.508.004,00	2,00	94.536.689,00	7,00	852.226.900,00	10,77	5.216.142.789,00	19,77	6.251.414.382,00	100,00	91,64	73,13	26.171.567.121,02	176,30	126,37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang distrofikasi	Ha	8000	3.400.000.000,00	50	1.408.498.513,00	500	301.210.308,94	500	310.030.308,94	50,00	36.176.900,00	50,00	-	100,00	66.466.000,00	300,00	205.282.902,00	500,00	307.925.802,00	100,00	99,32	550,00	1.716.424.315,00	6,88	50,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Jumlah petugas penjaga pintu air (PPA) dan petinggi operasi bendung (POB) yang terbayarkan gaji bulannya	OB	0	-	1116	1.404.174.000,00	30	3.326.600,00	2	3.326.600,00	0,00	-	2,00	3.218.930,00	0,00	-	0,00	-	2,00	3.218.930,00	100,00	96,76	1118,00	1.407.392.930,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang distrofikasi	Ha	7700	11.530.000.000,00	300	8.285.545.459,00	850	3.038.182.700,00	850	3.038.182.700,00	0,00	52.331.104,00	250,00	91.317.759,00	250,00	785.760.900,00	350,00	1.927.467.036,00	850,00	2.856.876.799,00	100,00	94,03	1150,00	11.142.422.258,00	14,94	96,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Luas daerah irigasi permukaan kewenangan provinsi yang distrofikasi	Ha	12000	5.780.000.000,00	200	8.821.934.767,02	1100	3.470.425.000,00	1100	3.470.425.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1100,00	3.083.392.851,00	1100,00	3.083.392.851,00	100,00	88,85	1300,00	11.905.327.618,02	10,83	205,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang dikembangkan	Persen	0	1.966.000.000,00	0	-	0,1	426.586.383,00	0	448.486.383,35	0,00	63.875.392,00	0,00	69.511.432,00	0,00	257.294.497,00	0,10	56.506.799,00	0,10	447.188.120,00	100,00	99,71	0,10	447.188.120,00	50,00	22,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	Kws	1	1.966.000.000,00	0	-	1	426.586.383,00	1	448.486.383,35	0,00	63.875.392,00	0,00	69.511.432,00	0,00	257.294.497,00	1,00	56.506.799,00	1,00	447.188.120,00	100,00	99,71	1,00	447.188.120,00	100,00	22,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkantoran	Persentase terbangunnya kawasan perkantoran Pemprov. Subar	Persen	72	21.543.000.000,00	67	17.851.443.702,00	1,85	5.938.500.760,00	2	7.773.191.919,00	0,00	1.080.000,00	0,00	2.495.459.797,00	0,00	1.106.189.900,00	1,85	3.529.752.293,03	1,85	7.132.481.990,03	100,00	91,76	68,70	24.983.925.692,03	94,88	115,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembangunan Pengembangan Kawasan Perkantoran	Luas kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terbangun	Ha	1	21.543.000.000,00	1	17.851.443.702,00	1	5.938.500.760,00	1	7.773.191.919,00	0,00	1.080.000,00	0,00	2.495.459.797,00	0,00	1.106.189.900,00	1,00	3.529.752.293,03	1,00	7.132.481.990,03	100,00	91,76	2,00	24.983.925.692,03	200,00	115,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang siap digunakan	Persen	50	1.200.000.000,00	35	1.473.059.520,00	5	309.106.000,00	5	309.106.000,00	0,00	39.560.989,00	0,00	44.422.100,00	0,00	41.950.000,00	0,00	114.655.000,00	0,00	240.588.089,00	0,00	77,83	35,00	1.713.647.609,00	70,00	142,80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Koordinasi dan Fasilitas Penyusunan Rencana Tata Ruang	Jumlah koordinasi dan fasilitas penyusunan rencana tata ruang yang dilakukan di kabupaten	Kab.	6	200.000.000,00	6	878.341.036,00	6	307.106.000,00	6	307.106.000,00	1,00	39.560.989,00	2,00	43.750.000,00	1,00	41.950.000,00	2,00	113.406.500,00	6,00	238.667.489,00	100,00	77,72	12,00	1.117.008.525,00	200,00	558,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penyusunan dan Legalisasi Revisi RTRW	Jumlah dokumen RTRW yang direvisi dan disahkan	Dokumen	1	1.000.000.000,00	1	594.718.484,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	0,00	-	0,00	672.100,00	0,00	-	1,00	1.248.500,00	1,00	1.920.600,00	100,00	96,03	2,00	596.639.084,00	200,00	59,66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembinaan, Pengembangan dan Kerja Sama Pengawasan Uj Mu dan Standarisasi Konstruksi Bangunan	Persentase paket pekerjaan konstruksi yang melakukan pengujian material setiap tahunnya	Persen	0	-	60	748.470.926,00	60	798.861.632,00	60	798.861.632,00	0,00	-	10,00	217.492.264,00	20,00	251.397.773,00	30,00	285.609.185,00	60,00	754.499.222,00	100,00	94,45	120,00	1.502.970.148,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengujian dan Standarisasi Mutu Bahan/ Material Konstruksi	Jumlah pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap beberapa paket pekerjaan konstruksi	Pengujian	0	-	100	748.470.926,00	100	798.861.632,00	100	798.861.632,00	0,00	-	40,00	217.492.264,00	47,00	251.397.773,00	13,00	285.609.185,00	100,00	754.499.222,00	100,00	94,45	200,00	1.502.970.148,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase ketersediaan 3 (tiga) layanan informasi jasa konstruksi pada SIP (AK)	Persen	100	-	70	209.812.100,00	10	165.051.960,00	10	165.051.960,00	7,00	43.295.831,00	3,00	47.953.600,00	0,00	16.095.000,00	0,00	9.084.000,00	10,00	116.428.431,00	100,00	70,54	80,00	326.240.531,00	80,00	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Bina Jasa Konstruksi	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terkait Bidang Bina Jasa Konstruksi	Laporan	0	-	15	209.812.100,00	15	165.051.960,00	15	165.051.960,00	4,00	43.295.831,00	6,00	47.953.600,00	3,00	16.095.000,00	2,00	9.084.000,00	15,00	116.428.431,00	100,00	70,54	30,00	326.240.531,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Jasa Konstruksi	Persentase aparat dan tenaga ahli yang diberi pelatihan jasa konstruksi	Persen	60	760.840.000,00	30	149.920.900,00	35	419.312.800,00	35	459.292.800,00	0,00	6.184.000,00	0,00	1.651.750,00	0,00	14.150.000,00	35,00	281.088.710,00	35,00	303.074.460,00	100,00	65,99	65,00	452.995.360,00	108,33	59,54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang diberi pelatihan	Orang	150	760.840.000,00	20	149.920.900,00	30	389.999.800,00	30	389.999.800,00	0,00	6.184.000,00	0,00	915.750,00	0,00	9.650.000,00	30,00	269.538.710,00	30,00	286.288.460,00	100,00	73,41	50,00	436.209.360,00	33,33	57,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Uji Sertifikasi melalui Mobile Training Unit (MTU)	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi melalui Mobile Training Unit (MTU)	Orang	0	-	0	-	20	29.313.000,00	20	69.293.000,00	0,00	-	0,00	736.000,00	0,00	4.500.000,00	5,00	11.550.000,00	5,00	16.796.000,00	25,00	24,22	5,00	16.796.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																												
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										1.291.577.254,00		72.877.123,00		428.597.672,00		254.294.090,00		293.967.727,00		1.049.736.612,00		81,28	0,00	1.049.736.612,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi	OK	2100	884.800.000,00	383	1.129.027.250,00	100	533.750.000,00	100	533.750.000,00	0,00	-	25,00	168.085.500,00	25,00	135.886.250,00	50,00	94.159.500,00	100,00	398.131.250,00	100,00	74,59	483,00	1.527.158.500,00	23,00	172,60	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, dan internet		120	1.422.000.000,00	36	140.929,00	100	89.960.300,00	100	89.960.300,00	25,00	323.000,00	0,00	-	0,00	-	75,00	32.918.074,00	100,00	33.241.074,00	100,00	36,95	136,00	33.382.003,00	113,33	2,35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	jenis	1500	1.057.320.750,00	312	108.267.500,00	300	70.962.427,00	300	70.962.427,00	50,00	8.894.940,00	75,00	14.917.280,00	75,00	17.268.840,00	100,00	29.881.240,00	300,00	70.962.300,00	100,00	100,00	612,00	179.229.800,00	40,80	16,95	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak, penggandaan dan penjiwaan	cetak	1500	370.200.000,00	300	40.600.000,00	100	31.650.000,00	100	31.650.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	12.900.000,00	100,00	12.900.000,00	100,00	40,76	400,00	53.500.000,00	26,67	14,45	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	240	915.598.000,00	60	147.472.000,00	100	35.548.327,00	100	35.548.327,00	0,00	-	60,00	20.868.800,00	10,00	1.000.000,00	30,00	13.630.000,00	100,00	35.498.800,00	100,00	99,86	160,00	182.970.800,00	66,67	19,98	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makan dan Minum rapat	Rapat	220	319.100.000,00	56	155.287.000,00	100	80.096.600,00	100	80.096.600,00	5,00	6.420.000,00	30,00	13.980.000,00	5,00	4.130.000,00	60,00	26.536.600,00	100,00	51.066.600,00	100,00	63,76	156,00	206.353.600,00	70,91	64,67	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	Jumlah media cetak yang digunakan	Media	360	1.740.800.000,00	12	69.580.000,00																				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat	600	2.751.500.000,00	121	1.096.183.962,00	100	229.249.600,00	100	229.249.600,00	12,00	33.769.183,00	50,00	106.623.992,00	8,00	24.814.000,00	30,00	63.385.503,00	100,00	228.592.678,00	100,00	99,71	221,00	1.324.776.640,00	36,83	48,15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rapat	900	2.150.800.000,00	181	684.802.650,00	180	220.360.000,00	180	220.360.000,00	20,00	23.470.000,00	90,00	104.122.100,00	50,00	71.195.000,00	20,00	20.556.810,00	180,00	219.343.910,00	100,00	99,54	361,00	904.146.560,00	40,11	42,04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR								552.438.434,40			31.255.060,00		72.700.703,00		46.948.416,00		387.864.840,00		538.769.019,00		97,53	0,00	538.769.019,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasion	unit					3	107.354.000,00	3	107.354.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	100.154.000,00	3,00	100.154.000,00	100,00	93,29	3,00	100.154.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	unit	100	1.609.040.000,00	32	1.235.218.900,00	20	227.945.434,40	20	227.945.434,40	2,00	7.200.000,00	0,00	-	2,00	7.200.000,00	16,00	210.161.000,00	20,00	224.561.000,00	100,00	98,52	52,00	1.459.779.900,00	52,00	90,72	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit																								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Pengadaan Mebelkur	Jumlah mebelkur yang diadakan	unit	5	752.440.000,00	5	26.650,00																				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	unit	20	1.364.610.000,00	106	408.519.201,00	8	143.270.000,00	8	143.270.000,00	2,00	23.705.060,00	2,00	44.438.703,00	2,00	12.848.416,00	2,00	62.154.840,00	8,00	143.147.019,00	100,00	99,91	114,00	551.666.220,00	570,00	40,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	5	752.440.000,00	1	76.964.792,00	8	73.869.000,00	8	73.869.000,00	2,00	350.000,00	2,00	28.262.000,00	2,00	26.900.000,00	2,00	15.395.000,00	8,00	70.907.000,00	100,00	95,99	9,00	147.871.792,00	180,00	19,65	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									87.001.000,00		-		241.000,00		85.200.000,00		1.260.000,00		86.701.000,00	#DIV/0!	99,66	0,00	86.701.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian harian tertentu Lingkup Dinas Perkim	pasang	660	562.000.000,00	90	115.660,00	52	87.001.000,00	52	87.001.000,00	0,00	-	0,00	241.000,00	52,00	85.200.000,00	0,00	1.260.000,00	52,00	86.701.000,00	100,00	99,66	142,00	86.816.660,00	21,52	15,45	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu Lingkup Dinas Perkim	pasang	100	250.000.000,00	100	74.310.000,00																				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									36.342.646,00		-		30.125.000,00		-		6.000.000,00	0,00	36.125.000,00	#DIV/0!	99,40	0,00				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah peserta yang ikut dalam pendidikan dan pelatihan formal						2	36.342.646,00	2	36.342.646,00	0,00	-	2,00	30.125.000,00	0,00	-	0,00	6.000.000,00	2,00	36.125.000,00	100,00	99,40	2,00	36.125.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	40	1.000.000.000,00	0	18.231.930,00																				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Bimbingan Teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah peserta yang ikut dalam Bimbingan Teknis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	orang	50	1.150.000.000,00	50	158.639.100,00	-				-					-										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									378.325.539,90		5.549.000,00		70.803.660,00		77.371.800,00		198.265.060,00	0,00	351.989.520,00	#DIV/0!	93,04	0,00	351.989.520,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan hasil capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	5	210.000.000,00	1	17.690.100,00	1	3.475.200,00	1	3.475.200,00	0,00	-	1,00	1.425.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1.425.000,00	100,00	41,00	2,00	19.115.100,00	40,00	9,10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen hasil laporan keuangan	dokumen	10	193.900.000,00	2	14.275.000,00	2	5.078.400,00	2	5.078.400,00	0,00	-	0,00	-	1,00	2.053.800,00	1,00	3.009.600,00	2,00	5.063.400,00	100,00	99,70	4,00	19.338.400,00	40,00	9,97	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen hasil laporan keuangan akhir	dokumen	5	308.400.000,00	1	12.650.000,00	1	4.116.400,00	1	4.116.400,00	0,00	-	0,00	-	-	1,00	4.076.400,00	1,00	4.076.400,00	100,00	99,03	2,00	16.726.400,00	40,00	5,42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LUPD	Jumlah laporan Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LUPD	dokumen	5		-	100	3.752.800,00	100	3.752.800,00	0,00	-	50,00	1.622.800,00	20,00	750.000,00	30,00	1.365.000,00	100,00	3.737.800,00	100,00	99,60	100,00	3.737.800,00	2000,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA/DPA-SKPD	dokumen	10	295.700.000,00	4	131.935.000,00	4	5.554.000,00	4	5.554.000,00	4,00	5.549.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	5.549.000,00	100,00	99,91	8,00	137.484.000,00	80,00	46,49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	dokumen	1	250.000.000,00	1	12.350.000,00	1	4.360.800,00	1	4.360.800,00	0,00	-	0,00	1.670.600,00	-	1,00	2.685.200,00	1,00	4.355.800,00	100,00	99,89	2,00	16.705.800,00	200,00	6,68	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan laporan program	laporan	180	1.249.860.000,00	36	94.039.466,00	36	54.562.469,90	36	54.562.469,90	0,00	-	6,00	9.030.000,00	10,00	18.600.000,00	20,00	26.705.900,00	36,00	54.335.900,00	100,00	99,58	72,00	148.375.366,00	40,00	11,87	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban SKPD	Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban SKPD	laporan	1	550.000.000,00	1	14.960.000,00																				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)							100	92.670.150,00	100	92.670.150,00	0,00	-	0,00	-	40,00	36.168.000,00	60,00	48.065.400,00	100,00	84.233.400,00	100,00	90,90	100,00	84.233.400,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Pelaporan aset	dokumen	5	509.759.250,00	3	47.109.000,00	3	40.041.400,00	3	40.041.400,00	0,00	-	1,00	12.989.100,00	1,00	7.400.000,00	1,00	19.602.300,00	3,00	39.991.400,00	100,00	99,88	6,00	87.100.400,00	120,00	17,09	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)								-			-													-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100						17				
	Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Akutabilitas Kinerja SKPD	laporan	1	1	11.075.000,00	2	56.797.620,00	2	56.797.620,00	0,00	-	1,00	22.365.960,00	0,00	6.000.000,00	1,00	27.891.660,00	2,00	56.257.620,00	100,00	99,05	3,00	67.332.620,00	300,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja SKPD serta Monev Renja	Jumlah dokumen hasil penyusunan Renja dan Evaluasi Renja serta Monev Renja	dokumen	10	816.247.000,00	2	225.994.578,00	2	34.976.800,00	2	34.976.800,00	-	1,00	12.956.800,00	0,00	-	1,00	7.230.000,00	2,00	20.186.800,00	100,00	57,71	4,00	246.181.378,00	40,00	30,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ/SPJ Bendahara Pengeluaran SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ/SPJ Bendahara Pengeluaran	laporan	1	1	15.790.000,00	6	3.737.200,00	6	3.737.200,00	0,00	-	2,00	743.400,00	-	-	4,00	2.993.800,00	6,00	3.737.200,00	100,00	100,00	7,00	19.527.200,00	700,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Pengembangan basis data dan pemutakhiran sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah kegiatan pengembangan basis data yang akurat dalam sistem informasi Provinsi Sulawesi Barat	kegiatan	1	1	386.615.500,00	6	69.202.300,00	6	69.202.300,00	0,00	-	1,00	8.000.000,00	1,00	6.400.000,00	4,00	54.639.800,00	6,00	69.039.800,00	100,00	99,77	7,00	455.655.300,00	700,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								173.936.816,00		-			53.581.200,00		27.431.700,00		88.864.256,00		169.877.156,00	#DIV/0!	97,67	0,00	169.877.156,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)	Jumlah dokumen Peraturan Gubernur tentang pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	dokumen	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Pemeliharaan Rumah Instansi Sederhana Sehat (RISHA)	Jumlah rumah instansi sederhana sehat (RISHA) yang layak huni	unit	4	4	154.932.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	154.932.000,00	100,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan			
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang perumahan	laporan	12	16	99.187.500,00	100	80.710.080,00	100	80.710.080,00	0,00	-	20,00	10.949.200,00	30,00	27.431.700,00	50,00	41.364.660,00	100,00	79.745.560,00	100,00	98,80	116,00	178.933.060,00	966,67	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Penyusunan Perda RP3KP	Jumlah dokumen Peraturan Daerah RP3KP	dokumen	1	1	282.691.676,00	2	61.880.000,00	2	61.880.000,00	0,00	-	1,00	34.012.000,00	0,00	-	1,00	24.834.900,00	2,00	58.846.900,00	100,00	95,10	3,00	341.538.576,00	300,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Identifikasi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Masyarakat Miskin (MARASA)	Jumlah identifikasi pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin (Marasa)	kecamatan	6	6	199.845.500,00	6	31.346.736,00	6	31.346.736,00	0,00	-	2,00	8.620.000,00	0,00	-	4,00	22.664.696,00	6,00	31.284.696,00	100,00	99,80	12,00	231.130.196,00	200,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Sinkronisasi Program dan Kegiatan bidang perumahan	Jumlah laporan sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Perumahan	laporan	12	12	98.067.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.067.000,00		#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan				
	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN							2.397.872.760,40			36.658.000,00			84.239.453,00		76.163.000,00		2.167.976.715,00		2.365.037.168,00	#DIV/0!	98,63	0,00	2.365.037.168,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan						100	1.752.800.760,40	100	1.752.800.760,40	0,00	-	0,00	-	0,00	17.800.000,00	100,00	1.706.130.500,00	100,00	1.723.930.500,00	100,00	98,35	100,00	1.723.930.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Perencanaan, Pengawasan dan Pembangunan Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Kumuh	Jumlah Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Perumahan Perkotaan	ha	3	3	1.434.859.500,00	72,68	645.072.000,00	73	645.072.000,00	7,68	36.658.000,00	10,00	84.239.453,00	5,00	58.363.000,00	50,00	461.846.215,00	72,68	641.106.668,00	100,00	99,39	75,68	2.075.966.168,00	2522,67	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN								55.001.800,00		-	-	-	-	-	-	-	45.892.800,00		45.892.800,00	#DIV/0!	83,44	0,00	45.892.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Facilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Pokja PKP	dokumen	1	1	99.569.100,00	1	55.001.800,00	1	55.001.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	45.892.800,00	1,00	45.892.800,00	100,00	83,44	2,00	145.461.900,00	200,00	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL								117.503.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi		unit					49.995.200,00		49.995.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
	Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemertan Daerah Provinsi		unit					67.508.500,00		67.508.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	%	100	1.404.833.568,00	1	1.016.974.350,00	0,5	785.000.000,00	1	550.199.466,00	22,00	102.346.701,00	22,00	89.749.860,00	18,00	74.324.780,00	37,20	110.196.128,00	99,20	376.617.469,00	9920,00	68,45	100,20	1.393.591.819,00	100,20	99,20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Menyurat yang tersedia		100	5.000.000,00	99,60 %	3.984.000,00	500 L	5.000.000,00	100	5.000.000,00	0,00	-	18,00	900.000,00	44,74	2.237.000,00	1.860.000,00	62,74	4.997.000,00	62,74	99,94	63,74	8.981.000,00	63,74	179,62	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Rekening yang terdaftar		5	80.000.000,00	98,52 %	30.265.000,00	10 REK	40.000.000,00		52.299.936,00	1,80	7.834.301,00	2,17	9.454.010,00	3,62	15.773.580,00		16.777.628,00	7,59	49.839.519,00	#DIV/0!	95,30	8,57	80.104.519,00	171,42	100,13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat tulis kantor yang tersedia		50	65.000.000,00	99,99 %	73.793.800,00	50 paket	50.000.000,00		40.915.020,00	0,00	-	18.387.600,00	25,20	15.863.300,00		12.590.500,00	25,20	46.841.400,00	#DIV/0!	114,48	26,20	120.635.200,00	52,40	185,59	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
												I		II		III		IV										
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13*100	16 = 15*100	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia		15	17.100.000,00	10.834.000,00		15 blok	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	-	4.240.000,00	0,29	294.000,00	4.405.500,00	0,29	8.939.500,00	#DIV/0!	89,40	0,29	19.773.500,00	1,96	115,63	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan & Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		5	150.000.000,00	-	5 bacaan	20.000.000,00	13.222.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia		12	400.000.000,00	55.314.000,00	12 bulan	60.000.000,00	41.892.000,00	1,50	4.624.000,00	8.936.000,00	2,84	8.735.800,00	9.392.000,00	4,35	31.687.800,00	#DIV/0!	75,64	4,35	87.001.800,00	36,21	21,75	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilakukan		5	237.733.568,00	502.301.200,00	5 provinsi	300.000.000,00	219.492.000,00	1,86	59.935.400,00	4.045.000,00	0,02	766.800,00	40.422.000,00	1,88	105.169.200,00	#DIV/0!	47,91	1,88	607.470.400,00	37,59	255,53	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah yang dilakukan		6	300.000.000,00	340.482.350,00	6 kabupaten	300.000.000,00	167.380.500,00	1,64	29.953.000,00	43.787.250,00	1,68	30.654.300,00	24.750.000,00	3,32	129.144.550,00	#DIV/0!	77,16	3,32	469.626.900,00	55,41	156,54	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		100	10.602.505.222,00	1.602.668.383,00	0,5	3.335.000.000,00	1.090.316.000,00	0,01	2.327.000,00	0,63	201.617.425,00	0,21	65.934.250,00	140.660.482,00	0,85	410.539.157,00	#DIV/0!	37,65	0,85	2.013.207.540,00	0,85	18,99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang terbangun		1	700.000.000,00	838.424.841,74	1 paket	270.000.000,00	143.240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	#VALUE!	0,00	#VALUE!	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		6	1.227.505.222,00	-	1 unit	665.000.000,00	549.725.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	-	0,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan		20	300.000.000,00	516.550.000,00	10 paket	215.000.000,00	162.365.000,00	0,00	-	19,66	150.180.000,00	0,00	-	-	19,66	150.180.000,00	#DIV/0!	92,50	19,66	666.730.000,00	98,29	222,24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional		30	300.000.000,00	237.968.042,00	18 unit	245.000.000,00	216.410.000,00	0,48	2.327.000,00	10,54	51.437.425,00	10,98	53.575.250,00	125.795.482,00	21,99	233.135.157,00	#DIV/0!	107,73	21,99	471.103.199,00	73,31	157,03	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		36	100.000.000,00	9.725.500,00	25 unit	30.000.000,00	18.576.000,00	0,00	-	0,00	-	17,30	12.359.000,00	14.865.000,00	17,30	27.224.000,00	#DIV/0!	146,55	17,30	36.949.500,00	48,05	36,95	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Jumlah Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran beserta perlengkapannya yang diadakan		2	3.700.000.000,00	-	1 unit	1.300.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Pengadaan Mobil Pengendali Massa (Daimas)	Jumlah Transportasi mobil pengendali massa beserta kelengkapannya yang diadakan		2	1.000.000.000,00	-	1 unit	610.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100	2.026.339.971,00	154.440.000,00	0,4	218.000.000,00	75.818.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	154.440.000,00	0,00	7,62	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan baju dinas beserta kelengkapannya yang diadakan		466	466.600.000,00	154.440.000,00	250 steel	150.000.000,00	75.818.000,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	154.440.000,00	0,00	33,10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pengadaan Pakain Khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		466	410.000.000,00	-	136 steel	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur		100	3.125.350.409,00	635.194.800,00	0,4	345.000.000,00	80.008.000,00	0,00	-	0,00	1,00	10.000.000,00	-	1,00	10.000.000,00	#DIV/0!	12,50	1,00	645.194.800,00	1,00	20,64	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran				
	Pembinaan Mental Fisik dan Aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Mental Fisik Aparatur		50	240.000.000,00	102.787.000,00	30 org	150.000.000,00	80.008.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	10.000.000,00	-	1,00	10.000.000,00	#DIV/0!	12,50	1,00	112.787.000,00	2,00	46,99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		30	120.000.000,00	-	15 org	195.000.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	-	0,00	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya kualitas sistem Pelaporan keuangan		100	128.000.000,00	-	0,45	260.000.000,00	225.719.000,00	0,21	40.777.200,00	0,25	48.489.000,00	0,29	55.344.000,00	52.981.800,00	0,76	197.592.000,00	#DIV/0!	87,54	0,76	197.592.000,00	0,76	154,37	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		12	18.358.465,00	86.929.000,00	12 laporan	70.000.000,00	91.749.200,00	0,00	-	4,89	32.687.000,00	3,70	24.760.000,00	22.800.000,00	8,59	80.247.000,00	#DIV/0!	87,46	8,59	167.176.000,00	71,55	910,62	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran		2	5.000.000,00	8.000.000,00	2 laporan	10.000.000,00	14.038.400,00	0,00	-	0,00	-	1,98	9.960.000,00	-	1,98	9.960.000,00	#DIV/0!	70,95	1,98	17.960.000,00	99,22	359,20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1	5.000.000,00	14.999.000,00	1 laporan	10.000.000,00	20.116.400,00	0,00	20.026.400,00	0,00	90.000,00	0,00	-	1,00	-	1,00	20.116.400,00	#DIV/0!	100,00	1,00	35.115.400,00	100,45	702,31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
	Penyusunan Renstra/Reja/LAKIP dan LPKD	dokumen Penyusunan Renstra/Reja/LAKIP dan LPKD		4	5.000.000,00	22.380.000,00	4 dokumen	50.000.000,00	34.696.100,00	0,00	-	0,00	13.312.000,00	0,00	8.783.900,00	1,00	4.800.000,00	1,00	26.895.900,00	#DIV/0!	77,52	1,00	49.275.900,00	25,00	985,52	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
	Penyusunan RKA dan DPA Pokok	Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah		2	5.000.000,00	10.000.000,00	2 dokumen	15.000.000,00	20.750.800,00	0,00	20.750.800,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1,00	20.750.800,00	#DIV/0!	100,00	1,00	30.750.800,00	50,00	615,02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan	Dokumen RKA-P dan DPPA Perangkat Daerah		2	5.000.000,00	19.999.000,00	2 dokumen	20.000.000,00	10.630.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	8.430.800,00	0,00	8.430.800,00	#DIV/0!	79,31	0,00	28.429.800,00	0,00	568,60	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13x100		15 = 13x6		16 = 15x100			
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/SPJ Bendahara	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan/SPJ Bendahara		4	10.000.000,00		13.169.000,00	4 laporan	35.000.000,00		3.737.200,00	0,00		-	0,00	-	0,00			8.633.000,00	0,00	8.633.000,00	#DIV/0!	231,00	0,00	21.802.000,00	0,00	218,02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Penyusunan dan pengumpulan SIPD Peta Proses Bisnis, TEPA, SIMOLEK dan KRISNA Penyusunan dan Pengumpulan SIMPEG/ANJAB ABK/SKP dan SIMAYA	Jumlah Laporan yang Tersedia		5	25.000.000,00			5 laporan	25.000.000,00		15.000.100,00	0,00		-	0,00	-	1,81	9.040.100,00		960.000,00	1,81	10.000.100,00	#DIV/0!	66,67	1,81	10.000.100,00	36,16	40,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Penyusunan dan Pengumpulan SIMPEG/ANJAB-ABK/SKP dan SIMAYA	Jumlah Laporan yang Tersedia		4	20.000.000,00			4 laporan	25.000.000,00		15.000.000,00	0,00		-	0,48	2.400.000,00	0,56	2.800.000,00		7.358.000,00	1,04	12.558.000,00	#DIV/0!	83,72	1,04	12.558.000,00	26,00	62,79	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tercapainya Sistem Keamanan Yang Kondusif		100	7.106.000.000,00			0,4	5.716.128.861,00		3.774.014.400,00	0,08	150.911.500,00	0,74	1.437.459.800,00	0,14	274.383.780,00			581.111.950,00	0,96	2.443.867.030,00	#DIV/0!	64,76	0,96	2.443.867.030,00	0,96	34,39	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Penyediaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tersedia		324	3.934.000.000,00		2.796.411.250,00	247	4.055.000.000,00		3.170.000.000,00	0,00		-	199,52	1.437.459.800,00	10,41	74.980.800,00		581.111.950,00	209,93	2.093.552.550,00	#DIV/0!	66,04	209,93	4.889.963.800,00	64,79	124,30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Kerjasama Operasi Penegakan PERDA	Jumlah Perda yang diagalkan se Subar		2	283.000.000,00		149.700.000,00	2 kali	250.000.000,00		439.590.120,00	0,08	7.950.000,00	0,00		-	1,89	198.574.680,00		-	1,97	206.524.680,00	#DIV/0!	46,98	1,97	356.224.680,00	98,54	125,87	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan kegiatan safitmas.	Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan di-Evaluasi		6	89.000.000,00		83.700.000,00	5 kali	140.000.000,00		0,00							-		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		83.700.000,00	0,00	94,04	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Rakornes SATPOL PP dan DAMKAR	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		0	-			2 laporan	200.000.000,00		144.424.280,00	1,98	142.961.500,00	0,00		-	0,01	828.300,00		-	1,99	143.789.800,00	#DIV/0!	99,56	1,99	143.789.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Standar pelayanan minimal SATPOL PP dalam Menegakkan Perda dan Perkada			1	200.000.000,00			1 laporan	30.000.000,00		20.000.000,00							-		0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pemantauan Pemilu Legislatif, Pilpres & PemiluKada	Jumlah kabupaten yang dipantau		2	200.000.000,00		173.589.000,00	3 kabupaten	150.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		173.589.000,00	0,00	86,79	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Monitoring Evaluasi Program Pelaksanaan PERDA Kabupaten	Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan di-Evaluasi		0	-		100.000.000,00	6 kali	100.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		100.000.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	pelatihan pengendalian kemran dan kenyamanan lingkungan	Jumlah anggota satpol pp yang mengikuti pelatihan		40	100.000.000,00			60 org	150.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Rapat Kerja dan Koordinasi PPNS Se- Subar	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja dan Koordinasi PPNS Se- Subar		2	50.000.000,00		70.000.000,00	35 org	100.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		70.000.000,00	0,00	140,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Peningkatan SDM dan Pelatihan Dasar Linmas	Jumlah anggota Linmas yang mengikuti pelatihan Dasar		240	200.000.000,00			50 org	250.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Sosialisasi penegakan perundang undangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penegakan perundang undangan Daerah		35	200.000.000,00	-		35 org	150.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi		6	200.000.000,00			6 lap	41.128.861.007,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pelaksanaan Penerbitan dan Penegakan Disiplin ASN di Lingkup Pemprov Subar (Razia/Sidak)	Jumlah Pelaksanaan penerbitan & Penegakan Disiplin PNS Lingkup Pemprov Subar (Razia/Sidak)		5	150.000.000,00	-		3 lap	100.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Penegakan Perda dan Perkada dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah perda dan perkada yang di lakukan		0	-	-														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response Time Rate) Daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WAKM)		100	1.000.000.000,00			0,4	440.000.000,00			0,00		-	0,00	-	0,00	-		0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	0,00	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Peserta/Kabupat en yang di Sosialisasi tentang kebakaran		50	30.000.000,00		31.172.000,00	45 org	110.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		31.172.000,00	0,00	103,91	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemadam kebakaran	Jumlah kabupaten yang dimonitoring dan dievaluasi		6	250.000.000,00		148.927.200,00	6 kali	130.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		148.927.200,00	0,00	59,57	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Pelatihan Pencegahan Pemadam Kebakaran	Jumlah personel pemadam kebakaran yang diatih		4	10.000.000,00			45 org	200.000.000,00																				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
DINAS SOSIAL																													

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17												
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat		1.319.829.000,00	3.224.874.000,90	0,25	1.427.300.000,00	1.280.834.662,50	12,54	160.599.477,00	36,55	468.164.538,00	12,35	158.180.353,00	34,59	443.048.130,00	96,03	1.229.992.498,00	#DIV/0!	96,03	96,03	4.454.866.498,90	#DIV/0!	337,53	Dinas Sosial			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman Surat Keluar Lingkup Dinas Bksw Sulbar	Surat	1000	20.055.000,00	7	138.600.000,00	1000	92.000.000,00	1000	128.088.400,00	1,83	2.348.800,00	29,74	38.088.000,00	21,00	26.898.600,00	47,43	60.749.000,00	100,00	128.084.400,00	10,00	100,00	107,00	266.684.400,00	10,70	1.329,77	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/Internet/Fasimile, Listrik Kantor/Gudang dan Lapangan	Rekening	3	60.000.000,00	36	318.449.000,46	3	105.000.000,00	3	107.574.800,00	17,51	18.839.268,00	19,35	20.815.086,00	8,74	9.397.319,00	22,23	23.910.979,00	67,83	72.962.652,00	2260,83	67,83	103,83	391.411.652,46	3460,83	652,35	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis	5	22.500.000,00	1	59.165.000,00	5	22.500.000,00	5	15.046.000,00	14,52	2.185.000,00	50,56	7.608.000,00	18,94	2.850.000,00	14,94	2.248.000,00	98,97	14.891.000,00	1979,40	98,97	99,97	74.056.000,00	1999,40	329,14	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Tersedia kebutuhan	Jenis	32	100.000.000,00	1	194.113.000,00	32	50.000.000,00	32	63.668.200,00	9,18	5.841.600,00	19,99	12.728.740,00	20,83	13.263.434,00	49,97	31.817.251,00	99,97	63.651.025,00	312,42	99,97	100,97	257.764.025,00	315,54	257,76	Dinas Sosial
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dokumen	Jenis	6	27.500.000,00	12	114.600.000,00	6	20.300.000,00	6	15.801.800,00	16,14	2.550.000,00	40,85	6.455.400,00	0,00	-	43,01	6.796.400,00	100,00	15.801.800,00	1666,67	100,00	112,00	130.401.800,00	1866,67	474,19	Dinas Sosial
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Media	2	100.640.000,00	12	268.965.000,00	2	100.000.000,00	2	75.176.000,00	0,00	-	20,05	15.075.000,00	14,96	11.250.000,00	64,98	48.851.000,00	100,00	75.176.000,00	5000,00	100,00	112,00	344.141.000,00	5600,00	341,95	Dinas Sosial
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan Minum Tamu dan Rapat	Kotak	600	30.100.000,00	12	148.985.000,00	600	50.000.000,00	600	93.221.000,00	9,70	9.040.000,00	16,91	15.760.000,00	7,45	6.941.000,00	50,06	46.665.500,00	84,11	78.406.500,00	14,02	84,11	96,11	227.391.500,00	16,02	755,45	Dinas Sosial
	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pegawai	67	340.000.000,00	12	861.498.000,14	65	400.000.000,00	65	186.746.000,00	37,64	70.293.259,00	38,90	72.646.736,00	13,11	24.491.000,00	10,29	19.216.000,00	99,95	186.646.995,00	153,76	99,95	111,95	1.048.144.995,14	167,09	308,28	Dinas Sosial
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Kegiatan yang dilaksanakan Ke Dalam Daerah	Pegawai	67	286.534.000,00	12	981.999.000,30	65	450.000.000,00	65	474.276.462,50	10,18	48.265.550,00	52,50	248.987.576,00	8,56	40.589.000,00	28,53	135.294.000,00	99,76	473.136.126,00	153,48	99,76	111,76	1.455.135.126,30	166,81	507,84	Dinas Sosial
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SDM yang Terserikan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan	Orang	4	62.500.000,00	4	138.500.000,00	4	62.500.000,00	4	121.236.000,00	1,02	1.236.000,00	24,75	30.000.000,00	18,56	22.500.000,00	55,68	67.500.000,00	100,00	121.236.000,00	2500,00	100,00	104,00	259.736.000,00	2600,00	415,58	Dinas Sosial
	Forum OPD Provinsi	Jumlah koordinasi di 6 kabupaten	Kegiatan	1	270.000.000,00	0	-	1	75.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Sosial
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur			1.115.635.000,00		1.487.336.002,25	25%	695.000.000,00	25%	467.988.000,00	0,00	-	3,57	16.700.000,00	17,10	80.045.238,90	78,89	369.201.559,00	99,56	465.946.797,90	39825,53	99,56	99,56	1.953.282.800,15	#DIV/0!	175,08	Dinas Sosial
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas	Unit	5	223.230.000,00	8	155.200.000,00	5	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	8,00	155.200.000,00	160,00	69,52	Dinas Sosial
	Pengadaan komputer/jaringan komputer dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Laptop, Printer dan Mesin Aksesoris	Unit	5	100.000.000,00	0	-	1	55.000.000,00	3	98.347.000,00	0,00	-	16,98	16.700.000,00	81,39	80.045.238,90	0,69	680.000,00	99,06	97.425.238,90	3302,09	99,06	99,06	97.425.238,90	1981,25	97,43	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (1 Kantor dan Gudang 1)	Gedung	2	77.385.000,00	2	495.484.000,50	2	150.000.000,00	2	129.391.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	99,72	129.024.000,00	99,72	129.024.000,00	4985,82	99,72	101,72	624.508.000,50	5085,82	807,01	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pengurusan STNK bagi Kendaraan Dinas 6 Roda, 4 Roda dan 2 dan 2	Unit	8	265.020.000,00	8	593.155.000,30	8	150.000.000,00	8	240.250.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	99,69	239.497.559,00	99,69	239.497.559,00	1246,09	99,69	107,69	832.652.559,30	1346,09	314,18	Dinas Sosial
	Pengadaan Mebelkur	Jumlah Pengadaan Mebelkur	Paket	1	300.000.000,00	1	44.059.000,60	1	40.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	44.059.000,60	100,00	14,69	Dinas Sosial
	Pembangunan Pagar, Drainase, Pos, Taman, Tempat Parkir	Jumlah pagar, Drainase, Pos, Taman, Tempat Parkir bagi Kendaraan	Paket	1	150.000.000,00	1	199.438.000,85	1	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	199.438.000,85	100,00	132,96	Dinas Sosial
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur			16.800.000,00		217.322.000,50	0,25	30.000.000,00	0	16.200.000,00	0,00	-	90,12	14.600.000,00	0,00	-	7,41	1.200.000,00	97,53	15.800.000,00	39012,35	97,53	97,53	233.122.000,50	#DIV/0!	1.387,63	Dinas Sosial
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang Mengikuti LATRIM IV dan III Serta Binek Perencanaan/K keuangan	Orang	3	16.800.000,00	6	217.322.000,50	5	30.000.000,00	2	16.200.000,00	0,00	-	90,12	14.600.000,00	0,00	-	7,41	1.200.000,00	97,53	15.800.000,00	4876,54	97,53	103,53	233.122.000,50	3451,03	1.387,63	Dinas Sosial
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi kegiatan bidang-			187.503.560,00		276.681.000,00	0,25	304.398.025,42	0	308.398.500,00	0,80	2.472.800,00	20,90	64.463.700,00	12,16	37.500.000,00	65,82	202.983.000,00	99,68	307.419.500,00	39873,02	99,68	99,68	584.100.500,00	#DIV/0!	311,51	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
												I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100			
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	8	28.560,00	8	48.740.000,00	8	21.100.000,00	8	33.279.100,00	0,00	-	24,88	8.279.100,00	11,27	3.750.000,00	63,85	21.250.000,00	100,00	33.279.100,00	1250,00	100,00	108,00	82.019.100,00	1350,00	287.181,72	Dinas Sosial	
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD yang Terakut	Dokumen	1	12.600.000,00	1	20.350.000,00	1	21.000.000,00	1	32.981.600,00	7,50	2.472.800,00	16,16	5.330.000,00	11,37	3.750.000,00	64,43	21.250.000,00	99,46	32.802.800,00	9945,79	99,46	100,46	53.152.800,00	10045,79	421,85	Dinas Sosial	
	Penyusunan RKA-PIDPPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PIDPPA-OPD yang Terakut	Dokumen	1	32.550.000,00	1	9.621.000,00	1	5.425.000,00	1	17.802.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	17.802.800,00	100,00	17.802.800,00	10000,00	100,00	101,00	27.423.800,00	10100,00	84,25	Dinas Sosial	
	Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPD	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	Laporan	12	49.350.000,00	12	71.075.000,00	12	82.250.000,00	12	31.805.500,00	0,00	-	21,40	6.805.500,00	11,79	3.750.000,00	66,81	21.250.000,00	100,00	31.805.500,00	833,33	100,00	112,00	102.880.500,00	933,33	208,47	Dinas Sosial	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semester	Dokumen	1	20.250.000,00	1	24.770.000,00	1	60.250.000,00	1	61.715.500,00	0,00	-	24,31	15.000.000,00	18,23	11.250.000,00	57,47	35.465.500,00	100,00	61.715.500,00	10000,00	100,00	101,00	86.485.500,00	10100,00	427,09	Dinas Sosial	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	20.225.000,00	1	34.300.000,00	1	60.225.000,00	1	77.364.900,00	0,00	-	19,39	15.000.000,00	14,54	11.250.000,00	66,07	51.114.700,00	100,00	77.364.700,00	9999,97	100,00	101,00	111.664.700,00	10099,97	552,11	Dinas Sosial	
	Penyusunan Renstra/LAKIP dan LPD	Jumlah Laporan Renstra/Lakip/R enja dan LPD yang disusun	Dokumen	4	52.500.000,00	4	67.825.000,00	4	54.148.025,42	4	53.449.100,00	0,00	-	26,29	14.049.100,00	7,02	3.750.000,00	65,20	34.850.000,00	98,50	52.649.100,00	2462,58	98,50	102,50	120.474.100,00	2562,58	229,47	Dinas Sosial	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPERCIL DAN PMKS LAINNYA	Persentase keluarga fakir miskin dan yang menerima bantuan stimulan UJF dan bantuan			6.905.000.000,00		1.494.715.001,29	0,25	910.000.000,00	0	1.519.648.700,00	0,00	-	3,24	49.161.300,00	4,37	66.383.000,00	89,28	1.356.729.650,00	96,88	1.472.273.950,00	38753,01	96,88	96,88	2.966.988.951,29	#DIV/0!	42,97	Dinas Sosial	
	Peningkatan Kemampuan Petugas Pendamping Pemantauan Fakir Miskin	Jumlah petugas Pendamping Fakir Miskin	Orang		150.000.000,00	0	-	5	50.000.000,00	5	45.350.500,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	99,34	45.050.500,00	99,34	45.050.500,00	1986,77	99,34	99,34	45.050.500,00	#DIV/0!	30,03	Dinas Sosial	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga miskin Pedesaan	Terlaksananya Pengadaan pendukung bagi keluarga miskin pedesaan	Klp	20	3.000.000.000,00	8	570.211.000,36	8	160.000.000,00	53	1.009.041.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	98,40	992.920.750,00	98,40	992.920.750,00	185,66	98,40	106,40	1.563.131.750,36	532,01	52,10	Dinas Sosial	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga miskin Perkotaan	Terlaksananya Pengadaan pendukung bagi keluarga miskin Perkotaan	Klp	20	1.750.000.000,00	8	132.044.000,33	8	160.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	132.044.000,33	#DIV/0!	7,55	Dinas Sosial
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi keluarga miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pengadaan pendukung bagi keluarga miskin pesisir dan pulau-pulau kecil	Klp	0	300.000.000,00	0	-	8	160.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial	
	Bimbingan Teknis dan pemantauan Pengelolaan Bantuan Sarana Usaha Fakir Miskin	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan KUBE FM	Kegiatan	1	230.000.000,00	1	154.925.000,00	1	70.000.000,00	1	125.317.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	81,02	101.529.800,00	81,02	101.529.800,00	8101,79	81,02	82,02	256.454.800,00	8201,79	111,50	Dinas Sosial	
	Verifikasi/Seleksi/monitoring/evaluasi dan Pelaporan bagi Penerima bantuan sarana usaha Fakir Miskin	Terlaksananya Verifikasi Calon Penerima KUBE Fakir Miskin	Kab	6	200.000.000,00	6	325.064.000,10	6	60.000.000,00	6	157.213.800,00	0,00	-	0,00	-	23,78	37.385.000,00	73,29	115.220.800,00	97,07	152.605.800,00	1617,82	97,07	103,07	477.669.800,10	1717,82	238,83	Dinas Sosial	
	Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Fakir Miskin	Terlaksananya Verifikasi Calon Penerima KUBE Fakir Miskin	Kegiatan	1	75.000.000,00	0	-	1	75.000.000,00	1	47.472.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	96,25	45.692.800,00	96,25	45.692.800,00	9625,05	96,25	96,25	45.692.800,00	9625,05	60,92	Dinas Sosial	
	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Pangan Mnu Teras (BMDH)	Terlaksananya Monev BPNT	Kegiatan	1	200.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1	46.108.000,00	0,00	-	0,00	-	62,89	28.998.000,00	37,10	17.104.000,00	99,99	46.102.000,00	9998,70	99,99	99,99	46.102.000,00	9998,70	23,05	Dinas Sosial	
	Pengadaan Jaminan Hidup bagi warga Komunitas Adat Terpencil	Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha bidang tertentu bagi fakir miskin	Kegiatan	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	39.978.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	98,08	39.211.000,00	98,08	39.211.000,00	9807,95	98,08	98,08	39.211.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial	
	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Monev PKH	Kegiatan	2	1.000.000.000,00	1	312.471.000,50	1	75.000.000,00	1	49.166.000,00	0,00	-	99,99	49.161.300,00	0,00	-	0,00	-	99,99	49.161.300,00	9999,04	99,99	100,99	361.632.300,50	5049,52	36,16	Dinas Sosial	
	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi awal			200.000.000,00		-	25%	100.000.000,00	25%	77.597.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	98,38	76.337.600,00	98,38	76.337.600,00	39350,50	98,38	98,38	76.337.600,00	#DIV/0!	38,17	Dinas Sosial	
	Peningkatan kapasitas tenaga sakti pekes/petugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Tersedianya tenaga sakti bagi petugas LKSA	Kegiatan	1	-	0	-	1	50.000.000,00	1	46.333.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	99,87	46.273.800,00	99,87	46.273.800,00	9987,05	99,87	99,87	46.273.800,00	9987,05	#DIV/0!	Dinas Sosial	
	Sidang Pengangkatan Anak	Terlaksananya sidang pengangkatan anak	Kegiatan	2	200.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1	31.263.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	96,16	30.063.800,00	96,16	30.063.800,00	9616,17	96,16	96,16	30.063.800,00	4808,08	15,03	Dinas Sosial	
	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / JOMPO	Persentase Panti sosial/lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan sosial			500.000.000,00		-	25%	220.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial	
	Pengadaan Perumahan dan Jaminan Hidup lainnya dalam Panti Asuhan	Tersedianya kebutuhan jaminan hidup dalam panti asuhan	Orang	50	250.000.000,00	0	-	50	70.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Sosial	
	Pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia terlanter	Tersedianya bantuan sarana dan prasarana bagi usaha ekonomi produktif	Kab	6	250.000.000,00	0	-	6	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Sosial	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG DISABILITAS DAN EKS. TRAUMA/KEJIWAAN	Persentase Penyandang Disabilitas dan Bermasalah Kejawen yang mendapatkan hak-haknya sosial		65.000.000,00	-	0,25	200.000.000,00	0	80.308.200,00	0,00	-	0,00	-	20,66	16.595.000,00	72,78	58.451.200,00	93,45	75.046.200,00	37379,10	93,45	93,45	75.046.200,00	#DIV/0!	115,46	Dinas Sosial				
	Pengadaan Sarana dan prasana Perawatan alat bantu penyandang Disabilitas/ Trauma	Tersedianya kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas/traum a	Orang	0	-	0	-	50	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial				
	Peningkatan jejaring kerjasama Keluarga, Lembaga Sosial dan lintas sektor lainnya dalam perawatan Orang Dengan Masalah Kejawen (Penyandang Disabilitas Mental)	Tertaksananya kerjasama keluarga dan lembaga sosial	Kegiatan	0	-	0	-	1	100.000.000,00	1	45.514.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	96,91	44.107.800,00	96,91	96,91	96,91	44.107.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial					
	Verifikasi/seleksi/monitoring/ evaluasi dan pelaporan penanganan penyandang disabilitas	Terwujudnya verifikasi/seleksi bagi penanganan penyandang disabilitas	Kab	6	65.000.000,00	0	-	6	50.000.000,00	6	34.793.400,00	0,00	-	0,00	-	47,70	16.595.000,00	41,22	14.343.400,00	88,92	88,92	88,92	30.938.400,00	1482,01	47,60	Dinas Sosial				
	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Pengemis, Eks Narapidana,PSK, Narkoba & Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase eks penyandang penyakit sosial (narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial				-	0,25	150.000.000,00	0	95.209.600,00	0,00	-	0,00	-	25,23	24.020.000,00	72,45	68.981.600,00	97,68	97,68	97,68	93.001.600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial					
	Bimbingan Mental Sosial, Agama dan Hukum bagi Eks Penyakit Sosial	Terwujudnya bimbingan mental bagi eks penakit sosial	Kegiatan	1	150.000.000,00	0	-	1	150.000.000,00	1 Keg	95.209.600,00	0,00	-	0,00	-	25,23	24.020.000,00	72,45	68.981.600,00	97,68	97,68	97,68	93.001.600,00	9768,09	62,00	Dinas Sosial				
	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Penyuluhan Sosial, penyelenggara n perizinan undian dan pengumpulan Uang dan Barang, persentase korban bencana yang menerima bantuan perlindungan sosial selama masa tanggap darurat dan Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		6.195.000.000,00	-	0,25	5.610.000.000,00	0	340.681.600,00	1,51	5.138.000,00	19,49	66.386.700,00	34,78	118.478.000,00	40,23	137.066.564,00	96,00	327.069.264,00	38401,75	96,00	96,00	327.069.264,00	#DIV/0!	5,28	Dinas Sosial				
	Pemulangan Orang Terlarant	Tertaksananya Pemulangan bagi orang terlarant	Kegiatan	1	80.000.000,00	0	-	1	70.000.000,00	1	83.633.600,00	6,14	5.138.000,00	7,93	6.630.000,00	12,08	10.103.000,00	64,58	54.009.564,00	90,73	90,73	90,73	75.880.564,00	9072,98	94,85	Dinas Sosial				
	Pelayanan Parali Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (Eks. Trauma/Kejawen)	Terwujudnya parali sosial penyandang disabilitas mental	Kegiatan	1	230.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial				
	Pemeliharaan Rutin Berkala Gudang Logistik Bencana	Tertaksananya perawatan gudang logistik	Gedung	2	120.000.000,00	0	-	1	15.000.000,00	1	25.120.000,00	0,00	-	49,04	12.320.000,00	0,00	-	50,96	12.800.000,00	100,00	100,00	100,00	25.120.000,00	5000,00	20,93	Dinas Sosial				
	Pengembangan KSB (Kerjasama Sosial Bersinergi)	Terwujudnya kerjasama sinergi	KSB	0	-	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial				
	Temu Koordinasi Program dan Rencana Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Provinsi, Kabupaten dan Perw. Forum PSKS)	Tertaksananya koordinasi antar Kabupaten dan Perw. Forum PSKS)	Kegiatan	1	80.000.000,00	0	-	1	75.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial				
	Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (I-SIKS)	Terwujudnya pelayanan SIKS	Kegiatan	1	200.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1 Keg	49.153.000,00	0,00	-	96,51	47.436.700,00	0,00	-	0,00	-	96,51	47.436.700,00	#VALUE!	96,51	96,51	47.436.700,00	9650,82	23,72	Dinas Sosial		
	Pameran Nasional KSN/ Indotera Expo dan HUT Suber	Terwujudnya pameran berbasis KSN/EXPO di Provinsi Sulawesi Barat	Kegiatan	2	250.000.000,00	0	-	3	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial				
	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya bidang kesejahteraan sosial	Terwujudnya penyusunan rancangan peraturan daerah	Kegiatan	0	-	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Sosial				
	Penyuluhan Sosial bahaya penyalahgunaan narkoba, psitropika dan zat adiktif lainnya	Terwujudnya sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan	Kegiatan	1	60.000.000,00	0	-	1	70.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial				
	Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus	Terwujudnya pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus	Kegiatan	1	175.000.000,00	0	-	1	80.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial				
	Pembangunan Gedung Pusat Rehabilitasi Sosial Karya Warita (rumah singgah, parali jompo, rapza, anak terlarant, PSK, retardan)	Tertanganannya gedung pusat rehabilitasi sosial	Paket	1	5.000.000.000,00	0	-	1	5.000.000.000,00	5	182.775.000,00	0,00	-	0,00	-	59,29	108.375.000,00	38,44	70.257.000,00	97,73	97,73	97,73	178.632.000,00	9773,33	3,57	Dinas Sosial				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	I		II		III		IV		K	Rn	K	Rn		K	Rn		
												K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn								K	Rn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan lembaga sosial lainnya yang diberdayakan		776.840.000,00		941.379.000,00	0,25	295.000.000,00	0	325.547.000,00	0,00	-	11,65	37.915.000,00	1,23	4.000.000,00	85,85	279.481.700,00	98,73	321.396.700,00	39490,05	98,73	98,73	1.262.775.700,00	#DIV/0!	162,55	Dinas Sosial	
	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Tertakutnya pembinaan TKSK	Orang	69	201.840.000,00	10	101.400.000,00	10	20.000.000,00	69	201.840.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	201.840.000,00	100,00	201.840.000,00	144,93	100,00	110,00	303.240.000,00	159,42	150,24	Dinas Sosial
	Penguatan Jaringan Kerja Sama Dunia Usaha dalam Program Corporate Social Responsibility (CSRP)	Tertakutnya penguatan kerjasama dunia usaha	Kegiatan	1	50.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Dinas Sosial
	Penggerakan tagora ke lokasi bencana	Tertakutnya penggerakan tagora ke lokasi bencana	Kegiatan	1	150.000.000,00	1	524.589.000,00	1	50.000.000,00	1	34.976.000,00	0,00	-	38,58	13.495.000,00	7,15	2.500.000,00	44,52	15.572.000,00	90,25	31.567.000,00	9025,33	90,25	91,25	556.156.000,00	9125,33	370,77	Dinas Sosial
	Peningkatan kinerja tagora dalam kesiapsiagaan bencana 24 jam	Tertakutnya kinerja tagora 24 jam	Kegiatan	1	50.000.000,00	1	246.940.000,00	1	50.000.000,00	1	39.600.000,00	0,00	-	35,15	13.920.000,00	0,00	-	64,36	25.488.000,00	99,52	39.408.000,00	9951,52	99,52	100,52	286.348.000,00	10051,52	572,70	Dinas Sosial
	Pengadaan sarana dan prasarana tagora	Tertakutnya kebutuhan bagi tagora	Kegiatan	1	250.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1	34.131.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	98,39	33.581.700,00	98,39	33.581.700,00	9839,06	98,39	98,39	33.581.700,00	9839,06	13,43	Dinas Sosial
	Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT- Puskesmas)	Tertakutnya sistem layanan SLRT	Kegiatan	1	75.000.000,00	1	68.450.000,00	1	75.000.000,00	1	15.000.000,00	0,00	-	70,00	10.500.000,00	10,00	1.500.000,00	20,00	3.000.000,00	100,00	15.000.000,00	10000,00	100,00	101,00	83.450.000,00	10100,00	111,27	Dinas Sosial
	PROGRAM PELESTARIAN KEPERINTISAN KEPAKAWANAN DAN KESEKUTAKAWANAN SOSIAL	Persentase penyelenggaraan Restorasi Sosial Penanaman dan Penghayatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesekutawanan			287.578.750,00		351.444.000,55	0,25	145.000.000,00	0	139.728.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,25	128.658.800,00	0,25	128.658.800,00	100,00	92,08	0,25	480.102.800,55	#DIV/0!	166,95	Dinas Sosial
	Pembinaan warakawu keluarga pahlawan perintis kemerdekaan	Tertakutnya pembinaan warakawu bagi keluarga perintis kemerdekaan	Kegiatan	1	157.500.000,00	1	179.965.000,00	1	60.000.000,00	1	45.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	10000,00	100,00	101,00	224.965.000,00	10100,00	142,83	Dinas Sosial
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Tertakutnya pemeliharaan TMP	TMP	1	130.000.000,00	0	-	1	35.000.000,00	1	28.384.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	28.384.800,00	100,00	28.384.800,00	10000,00	100,00	100,00	28.384.800,00	10000,00	21,83	Dinas Sosial
	Renungan suci, napaktilas, upacara, tabur bunga dan risak nabila	Tertakutnya renungan suci ri	Kegiatan	1	78.750,00	1	171.479.000,55	1	50.000.000,00	1	66.344.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	83,31	55.274.000,00	83,31	55.274.000,00	8331,42	83,31	84,31	226.753.000,55	8431,42	287.940,32	Dinas Sosial
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																												
2.02. 2.02.01.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan administrasi perkantoran		1	760.306.543,00	1		1	1.679.904.046,00	1	1.068.037.200,00	0,33	308.393.626,00	0,40	371.926.622,00	0,14	107.425.000,00	0,12	98.380.550,00	0,99	886.125.798,00	99,00	82,97	1,99	886.125.798,00	199,00	641,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang keluar		1	138.050.000,00	1	145.040.000,00	1	270.000.000,00	1	138.050.000,00	0,01	1.625.000,00	0,78	108.350.000,00	0,14	19.990.000,00	0,19	26.478.000,00	1,13	156.443.000,00	113,32	113,32	2,13	301.483.000,00	213,32	#REF!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening		1	8.483.000,00	1	500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.483.000,00	0,97	8.210.000,00	0,00	-	0,00	-	0,98	8.326.250,00	1,95	16.536.250,00	194,93	194,93	2,95	17.036.250,00	294,93	200,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dalam daerah		1	273.400.000,00	1	249.587.000,00	1	393.841.810,00	1	300.000.000,00	0,33	99.265.000,00	0,37	111.512.000,00	0,21	62.623.000,00	0,00	-	0,91	273.400.000,00	91,13	91,13	1,91	522.987.000,00	191,13	191,29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor		1	47.196.000,00	1	77.793.600,00	1	95.000.000,00	1	47.196.000,00	0,23	10.842.500,00	0,23	11.069.900,00	0,25	11.983.000,00	0,39	18.291.500,00	1,11	52.186.900,00	110,57	110,57	2,11	129.980.500,00	210,57	275,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1	10.426.700,00	1	52.384.000,00	1	60.000.000,00	1	30.092.200,00	0,20	6.140.000,00	0,06	1.900.000,00	0,08	2.310.000,00	0,17	4.999.800,00	0,51	15.349.800,00	51,01	51,01	1,51	67.733.800,00	151,01	649,62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik		1	3.144.000,00	1	2.030.000,00	1	10.000.000,00	1	3.144.000,00	0,00	-	0,00	-	0,24	744.000,00	#DIV/0!	2.400.000,00	#DIV/0!	3.144.000,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	5.174.000,00	#DIV/0!	164,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan		1	6.580.000,00	1	56.100.000,00	1	66.062.236,00	1	51.182.000,00	0,00	-	0,12	6.370.000,00	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	6.370.000,00	#DIV/0!	12,45	#DIV/0!	62.470.000,00	#DIV/0!	949,39	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang		1	50.010.000,00	1	92.909.000,00	1	97.000.000,00	1	90.000.000,00	0,31	27.889.000,00	0,07	6.410.000,00	0,11	9.775.000,00	0,13	11.325.000,00	0,62	55.399.000,00	61,55	61,55	1,62	148.308.000,00	161,55	296,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		1		1		1	200.000.000,00	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Lap. hasil Koordinasi dan konsultasi yang dibuat		1	223.016.843,00	1	299.610.711,00	1	480.000.000,00	1	399.890.000,00	0,24	94.392.126,00	0,32	126.314.722,00	0,00	-	0,07	26.560.000,00	0,62	247.266.848,00	61,83	61,83	1,62	546.877.559,00	161,83	245,22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		1	103.852.000,00	1	3.800.000,00	1	440.000.000,00	1	373.554.000,00	0,20	90.562.000,00	0,33	34.053.099,00	0,26	28.658.563,00	0,20	20.337.293,00	0,99	173.610.955,00	99,00	46,48	1,99	177.410.955,00	199,00	170,83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
	Pengadaan mabelekr	Jumlah peralatan kantor		1	-	1		1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 02.24	Pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas		1		1		1	200.000.000,00	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan kantor		1	10.000.000,00	1	3.800.000,00	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	0,00	-	1,00	9.990.000,00	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	9.990.000,00	#DIV/0!	99,90	#DIV/0!	13.790.000,00	#DIV/0!	137,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01. 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan		1	87.070.000,00	1	77.703.010,00	1	110.000.000,00	1	136.772.000,00	0,12	15.870.000,00	0,18	24.063.099,00	0,20	26.708.563,00	0,15	20.337.293,00	0,64	86.978.955,00	63,59	63,59	1,64	164.681.965,00	163,59	189,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K		Re		K		Re		K		Re		K		Re		K		Re		K		Re		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17								
2.02. 2.02.01.01 .02 .28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan yang dipelihara	1	6.782.000,00	1	6.120.000,00	1	15.000.000,00	1	26.782.000,00	0,18	4.692.000,00	0,00	-	0,07	1.950.000,00	0,00	-	0,25	6.642.000,00	24,80	24,80	1,25	12.762.000,00	124,80	188,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	1	-	1	28.000.000,00	1	105.000.000,00	1	66.600.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	28.000.000,00	100,00	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pakaian	1	-	1	56.000.000,00	1	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	jumlah pakaian hari - hari tertentu	1	-	1	49.000.000,00	1	66.600.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	1	69.999.900,00	1	190.462.800,00	1	120.000.000,00	1	69.999.000,00	0,88	61.724.000,00	0,12	8.200.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	69.924.000,00	100,00	99,89	2,00	260.386.800,00	200,00	371,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .05 .01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang diikuti	1	69.999.900,00	1	190.462.800,00	1	120.000.000,00	1	69.999.000,00	0,88	61.724.000,00	0,12	8.200.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	69.924.000,00	99,89	99,89	2,00	260.386.800,00	199,89	371,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1	139.254.700,00	1	242.000.000,00	1	289.224.700,00	0,55	75.904.000,00	0,10	13.800.000,00	0,14	19.386.200,00	0,20	20.549.000,00	0,99	129.639.200,00	99,00	44,82	1,99	129.639.200,00	199,00	93,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB			
2.02 . 2.02.01.01 .06 .02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan semesteran	1	7.900.000,00	1	8.000.000,00	1	7.900.000,00	1	7.900.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	7.887.000,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	7.887.000,00	#DIV/0!	99,84	#DIV/0!	15.887.000,00	#DIV/0!	201,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .06 .04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun	1	8.795.000,00	1	-	1	8.500.000,00	1	8.795.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	8.609.000,00	#DIV/0!	8.609.000,00	#DIV/0!	97,89	#DIV/0!	8.609.000,00	#DIV/0!	97,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .06 .05	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LUPD	Jumlah dokumen laporan	1	56.360.000,00	1	146.965.000,00	1	50.000.000,00	1	56.360.000,00	0,98	55.010.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,98	55.010.000,00	97,60	97,60	1,98	201.975.000,00	197,60	358,37	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .06 .06	Penyusunan RKA/DPA- SKPD	Jumlah dokumen laporan	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1,00	7.790.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	7.790.000,00	99,87	99,87	2,00	15.590.000,00	199,87	199,87	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .06 .07	Penyusunan RKA-PIDPPA- SKPD	Jumlah dokumen laporan	1	8.399.900,00	1	7.800.000,00	1	7.800.000,00	1	8.399.900,00	0,00	-	0,00	-	0,30	2.499.200,00	#DIV/0!	3.540.000,00	#DIV/0!	6.039.200,00	#DIV/0!	71,90	#DIV/0!	13.839.200,00	#DIV/0!	164,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan program SKPD	terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	1	-	1	-	1	110.000.000,00	1	149.970.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .06 .10	Penyediaan pengelolaan implementasi sisten informasi pengelolaan keuangan daerah	jumlah operator SIMDA	1	49.999.800,00	1	38.000.000,00	1	50.000.000,00	1	49.999.800,00	0,26	13.104.000,00	0,28	13.800.000,00	0,18	9.000.000,00	0,17	8.400.000,00	0,89	44.304.000,00	88,61	88,61	1,89	82.304.000,00	188,61	164,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rasio KDRT	1	103.441.897,00	1	-	1	600.000.000,00	1	406.692.900,00	0,10	10.230.000,00	0,12	12.740.000,00	0,39	34.677.497,00	0,35	40.060.000,00	0,96	97.707.497,00	96,00	24,02	1,96	97.707.497,00	196,00	94,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02 . 2.02.01.01 .17 .35	Pengembangan kader pencegahan kekerasan dalam rumah tangga(PKDRT)	Jumlah kader yang telah mengikuti pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (diklat)	1	51.123.797,00	1	193.495.000,00	1	200.000.000,00	1	165.880.900,00	0,06	10.230.000,00	0,08	12.740.000,00	0,14	22.517.497,00	0,00	-	0,27	45.487.497,00	27,42	27,42	1,27	238.982.497,00	127,42	467,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02 . 2.02.01.01 .17 .40	Advokasi sosialisasi dan fasilitas perlindungan hak perempuan dalam ketenaga kerja	jumlah peserta sosialisasi dan advokasi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	1	52.318.100,00	1	-	1	200.000.000,00	1	140.812.000,00	0,00	-	0,00	-	0,09	12.160.000,00	#DIV/0!	40.060.000,00	#DIV/0!	52.220.000,00	#DIV/0!	37,08	#DIV/0!	52.220.000,00	#DIV/0!	99,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
	Pemutakhiran data pemangan kekerasan perempuan dan anak	jumlah kekerasan perempuan dan anak	1	-	1	-	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	persentase partisipasi perempuan dalam lembaga kemasyarakatan	1	50.314.280,00	1	-	1	800.000.000,00	1	806.142.800,00	0,78	393.994.000,00	0,22	108.446.000,00	0,00	10.348.500,00	0,00	-	1,00	512.788.500,00	100,00	63,61	2,00	512.788.500,00	200,00	1.019,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
	Sosialisasi dan advokasi PUG antar SKPD terkait	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG	1	-	1	-	1	100.000.000,00	1	74.999.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .18 .36	Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pengub/perda	1	400.000.000,00	1	-	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	0,98	393.994.000,00	0,01	5.600.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	399.594.000,00	99,90	99,90	2,00	399.594.000,00	199,90	99,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02. 2.02.01.01 .18 .38	Penyusunan peraturan dan kebijakan bersama dengan organisasi kemasyarakatan	meningkatnya SDM Forum PUSPA	1	103.142.800,00	1	205.926.784,00	1	250.000.000,00	1	256.143.000,00	0,00	-	0,40	102.846.000,00	0,00	148.000,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	102.994.000,00	#DIV/0!	40,21	#DIV/0!	308.920.784,00	#DIV/0!	299,51	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan	meningkatnya kapasitas dan SDM perencanaan subhar	1	-	1	-	1	150.000.000,00	1	74.999.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	
2.02 . 2.02.01.01 .19	program penguatan kelembagaan penguatan Gender dan Anak	cakupan perempuan dan anak/korban kekerasan yang mendapatkan pengaduan oleh pelaku terlatih didalam unit pelayanan terpadu	1	171.632.500,00	1	-	1	400.000.000,00	1	394.632.000,00	0,35	59.952.000,00	0,57	98.332.500,00	0,06	10.200.500,00	0,00	-	0,98	168.485.000,00	98,00	42,69	1,98	168.485.000,00	198,00	98,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100		17								
2.02. 2.02.01.01 - 19 - 22	Pelayanan pendampingan (biaya kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan penempatan) bagi korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang tingkat daerah	terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kekerasan		1	171.632.500,00	1	-	1	400.000.000,00	1	394.632.000,00	0,15	59.952.000,00	0,15	98.332.500,00	0,03	10.200.500,00	0,00	-	0,33	168.485.000,00	32,97	42,69	1,33	168.485.000,00	132,97	98,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 21	Program Keluarga Berencana			1	226.302.500,00	1		1	500.000.000,00	1	413.049.900,00	0,00	-	0,00		0,00		0,98	222.962.018,00	0,98	222.962.018,00	98,00	53,98	1,98	222.962.018,00	198,00	98,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 21 - 21	Peningkatan peran stakeholder terkait pendewasaan usia perkawinan	peran stakeholder terkait PUP		1	226.302.500,00	1	498.573.807,00	1	500.000.000,00	1	413.049.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	222.962.018,00	#DIV/0!	222.962.018,00	#DIV/0!	53,98	#DIV/0!	721.535.825,00	#DIV/0!	318,84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01 - 23	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	meningkatkan kualitas pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak		1	323.206.620,00	1		1	900.000.000,00	1	706.134.420,00	0,44	143.186.120,00	0,00		0,35	112.966.900,00	0,15	31.408.000,00	0,94	287.561.020,00	94,00	40,72	1,94	287.561.020,00	194,00	88,97	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02. 2.02.01.01 - 23 - 03	Promosi komunikasi informasi dan edukasi (pkie) tentang Puskesmas rumah anak	percepatan implementasi KLA melalui cluster III		1	109.948.700,00	1	-	1	250.000.000,00	1	216.148.000,00	0,00	-	0,00	-	0,47	102.008.700,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	102.008.700,00	#DIV/0!	47,19	#DIV/0!	102.008.700,00	#DIV/0!	92,78	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.02 2.02.01.01 - 23 - 35	Pengembangan kabupaten/ kota Layak anak	desa ramah anak		1	213.257.920,00	1	185.283.000,00	1	250.000.000,00	1	236.258.120,00	0,61	143.186.120,00	0,00	-	0,05	10.958.200,00	0,13	31.408.000,00	0,79	185.552.320,00	78,54	78,54	1,79	370.835.320,00	178,54	173,89	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
	Pengembangan hari anak nasional tingkat Provinsi	percepatan implementasi KLA melalui Model IV		1	-	1	-	1	220.000.000,00	1	59.560.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
	Pengembangan Forum anak tingkat pusat dan daerah	percepatan implementasi daerah		1	-	1	-	1	180.000.000,00	1	194.168.300,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	100,00	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
	Program Gender dan Anak	Rasio APM		1	-	1		1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	0,00	-	0,00	-		#REF!	0,00	-	0,00	#REF!	0,00	#REF!	1,00	#REF!	100,00	#REF!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
	Penyajian data dan informasi data gender dan anak	meningkatkan pemahaman stakeholder sarana dan prasarana yang responsif gender		1	-	1	-	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 25	Program Keluarga sejahtera	meningkatkan peran ORMAS dan Mitra dan pembinaan PPKS		1	63.290.000,00	1		1	400.000.000,00	1	146.501.000,00	0,00	-	0,17	10.576.000,00	0,80	50.898.000,00	0,02	13.196.000,00	0,99	74.670.000,00	99,00	50,97	1,99	74.670.000,00	199,00	117,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 25 - 10	Sinkronisasi peran serta ormas dan mitra dalam pembinaan pps	capaian remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa		1	48.396.000,00	1	-	1	100.000.000,00	1	48.396.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	48.278.000,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	48.278.000,00	#DIV/0!	99,76	#DIV/0!	48.278.000,00	#DIV/0!	99,76	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 25 - 11	Sosialisasi dan Pembinaan pengkaji dan pelaksanaan PIK RM	Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengkaji dan pelaksanaan PIK RM		1	14.894.000,00	1	-	1	300.000.000,00	1	98.105.000,00	0,00	-	0,11	10.576.000,00	0,03	2.620.000,00	#DIV/0!	13.196.000,00	#DIV/0!	26.392.000,00	#DIV/0!	26,90	#DIV/0!	26.392.000,00	#DIV/0!	177,20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 26	Program Pengendalian Penduduk			1	79.128.900,00	1		1	400.000.000,00	1	246.546.500,00	0,12	9.100.000,00	0,18	14.342.000,00	0,00		0,69	55.396.900,00	0,99	78.838.900,00	99,00	31,98	1,99	78.838.900,00	199,00	99,63	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 26 - 01	Seminar kependudukan	jumlah kebijakan (peraturan kepala Daerah) yang mengatur tentang pendataan kuantitas dan kualitas penduduk		1	53.524.900,00	1	109.948.000,00	1	100.000.000,00	1	53.524.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	53.524.900,00	#DIV/0!	53.524.900,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	163.472.900,00	#DIV/0!	305,41	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
2.08 2.02.01.01 - 26 - 02	Sosialisasi Advokasi desa Berwawasan kependudukan	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi		1	25.604.000,00	1	-	1	300.000.000,00	1	193.021.600,00	4,71	9.100.000,00	0,07	14.342.000,00	0,00	-	0,97	1.872.000,00	5,76	25.314.000,00	575,86	13,11	6,76	25.314.000,00	675,86	98,87	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP, dan KB
DINAS KETAHANAN PANGAN																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	4.531.768.000,00	100	1.874.362.976,00	100	624.740.000,00	100	586.924.000,00	10,00	88.775.000,00	30,00	170.714.600,00	10,00	34.107.920,00	40,00	266.193.206,00	90,00	559.790.726,00	90,00	89,60	190,00	2.434.153.702,00	190,00	53,71	Dinas Ketahanan Pangan
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang selesai	Surat	2233	29.250.000,00	1324	15.604.000,00	450	3.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1324,00	15.604.000,00	59,29	53,35	Dinas Ketahanan Pangan
02.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Jumlah rekening, tp, kark yang selesai	Komponen	12	246.200.000,00	4	57.397.000,00	12	3.000.000,00	12	2.664.000,00	0,00	-	12,00	2.664.000,00	0,00	-	0,00	-	12,00	2.664.000,00	100,00	100,00	16,00	60.061.000,00	133,33	24,40	Dinas Ketahanan Pangan
06.	Penyediaan jasa Pemeliharaan & Perizinan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	13	982.400.000,00	26	86.095.678,00	13	32.400.000,00	13	46.620.000,00	0,00	-	4,00	12.006.000,00	1,00	2.312.000,00	8,00	21.029.206,00	13,00	35.347.206,00	100,00	75,62	39,00	121.443.084,00	300,00	12,36	Dinas Ketahanan Pangan
03.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Buah	10000	270.000.000,00	0	-	100	5.000.000,00	60	1.710.000,00	0,00	-	20,00	600.000,00	20,00	600.000,00	10,00	400.000,00	50,00	1.600.000,00	83,33	93,57	50,00	1.600.000,00	0,50	0,59	Dinas Ketahanan Pangan
10.	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah mesin/tulis ATK yang tersedia	Jenis	25	1.025.000.000,00	25	216.444.329,00	25	75.000.000,00	25	80.580.000,00	0,00	-	9,00	25.802.000,00	5,00	4.344.920,00	11,00	50.254.200,00	25,00	80.401.120,00	100,00	99,78	50,00	296.845.449,00	200,00	28,96	Dinas Ketahanan Pangan
11.	Penyediaan Barang Cetakn & Pengemasan	Jumlah Barang Cetakn	Blok	250	59.796.000,00	165	31.498.650,00	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00	20,00	3.100.000,00	30,00	4.500.000,00	0,00	-	30,00	6.699.900,00	80,00	14.299.900,00	100,00	95,33	245,00	45.798.550,00	96,00	76,59	Dinas Ketahanan Pangan
18.	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Keluar daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Lap	250	212.080.000,00	87	519.395.019,00	50	200.000.000,00	50	109.370.000,00	22,00	68.285.000,00	6,00	10.100.600,00	0,00	-	17,00	23.953.000,00	45,00	102.338.600,00	90,00	93,57	132,00	621.733.619,00	52,80	293,16	Dinas Ketahanan Pangan
20.	Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Ke dalam daerah	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Lap	400	1.387.500.000,00	135	437.080.500,00	80	150.000.000,00	80	141.959.000,00	8,00	12.843.000,00	30,00	45.115.000,00	0,00	-	40,00	76.233.000,00	78,00	134.191.000,00	97,50	94,53	213,00	571.271.500,00	53,25	41,17	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17												
07.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Tenaga administrasi keuangan yang disediakan	Orang	100	207.542.000,00	36	417.300.000,00	18	111.340.000,00	18	158.840.000,00	0,00	-	5,00	66.940.000,00	4,00	24.800.000,00	9,00	67.097.000,00	18,00	158.837.000,00	100,00	100,00	54,00	576.137.000,00	54,00	277,60	Dinas Ketahanan Pangan
17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan & Minuman Yang tersedia	Fax	120	112.000.000,00	193	93.547.600,00	120	30.000.000,00	120	30.181.000,00	40,00	4.547.000,00	20,00	2.987.000,00	14,00	2.051.000,00	46,00	20.526.900,00	120,00	30.111.900,00	100,00	99,77	313,00	123.659.500,00	260,83	110,41	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	1.510.580.000,00	90	292.119.020,00	90	118.180.000,00	90	125.510.000,00	0,00	-	30,00	49.813.000,00	20,00	41.190.000,00	20,00	34.324.394,00	70,00	125.327.394,00	77,78	99,85	160,00	417.446.414,00	177,78	27,63	Dinas Ketahanan Pangan
24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional al yang tersedia	Unit	12	1.058.180.000,00	23	216.124.020,00	12	108.180.000,00	12	114.420.000,00			6,00	47.413.000,00	4,00	39.120.000,00	2,00	27.818.394,00	12,00	114.351.394,00	100,00	99,94	35,00	330.475.414,00	291,67	31,23	Dinas Ketahanan Pangan
28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	Komponen	5	452.400.000,00	11	75.995.000,00	5	10.000.000,00	5	11.090.000,00			2,00	2.400.000,00	2,00	2.070.000,00		6.506.000,00	4,00	10.976.000,00	80,00	98,97	15,00	86.971.000,00	300,00	19,22	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Org ASN	167	138.870.000,00		47.190.000,00		53.870.000,00	0	-									-				0,00	47.190.000,00	0,00	33,98	Dinas Ketahanan Pangan
05.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Pig	84	138.870.000,00	45	47.190.000,00	82	53.870.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	45,00	47.190.000,00	53,57	33,98	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian melalui pelatihan/diklat	Org	3	115.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	1	4.324.000,00	0,00	-	1,00	4.000.000,00	0,00	-	0,00	264.000,00	1,00	4.264.000,00	100,00	98,61	1,00	44.264.000,00	33,33	38,49	Dinas Ketahanan Pangan
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Org	5	65.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	0	-													5,00	25.000.000,00	100,00	38,46	Dinas Ketahanan Pangan
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur Yang mengikuti bimbingan	Org	4	50.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	1	4.324.000,00	0,00	-	1,00	4.000.000,00	0,00	-	0,00	264.000,00	1,00	4.264.000,00	100,00	98,61	5,00	19.264.000,00	125,00	38,53	Dinas Ketahanan Pangan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat, tepat, transparan serta terintegrasi	Lap	4	336.210.000,00		218.345.750,00		99.210.000,00	4	82.278.600,00	0,00	-	1,00	20.828.000,00	1,00	11.200.000,00	2,00	49.960.000,00	4,00	81.988.000,00	100,00	99,65	4,00	300.333.750,00	100,00	89,33	Dinas Ketahanan Pangan
04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun	Lap	4	34.000.000,00	3	1.250.000,00	4	9.000.000,00	4	10.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	100,00	100,00	7,00	11.250.000,00	175,00	33,09	Dinas Ketahanan Pangan
05.	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	Jumlah laporan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	Lap	4	49.000.000,00	5	50.600.000,00	4	10.000.000,00	4	10.228.600,00	0,00	-	2,00	4.300.000,00	0,00	-	2,00	5.890.200,00	4,00	10.190.200,00	100,00	99,62	9,00	60.790.200,00	225,00	124,06	Dinas Ketahanan Pangan
06.	Penyusunan RKA/DPA-SKPD yang di Dukungan	Jumlah RKA/DPA-SKPD yang di Dukungan	Dok	10	158.000.000,00	18	48.945.950,00	5	8.000.000,00	5	12.774.000,00	0,00	-	1,00	528.000,00	0,00	-	4,00	11.993.800,00	5,00	12.521.800,00	100,00	98,03	23,00	61.467.750,00	230,00	36,90	Dinas Ketahanan Pangan
10.	Penyediaan pengelolaan implementasi sistem informasi dan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Administrasi keuangan yang akurat	Org/bn	120	95.210.000,00	160	117.549.800,00	120	72.210.000,00	120	49.276.000,00	0,00	-	30,00	16.000.000,00	20,00	11.200.000,00	70,00	22.076.000,00	120,00	49.276.000,00	100,00	100,00	280,00	166.825.800,00	233,33	175,22	Dinas Ketahanan Pangan
	Program peningkatan distribusi harga dan cadangan pangan	Informasi Pasokan, Cadangan dan Harga Pangan di Prov. Sulawesi Barat	Lap	5	1.507.000.000,00		378.066.690,00		125.000.000,00	5	32.718.000,00	0,00	-	2,00	16.180.000,00	1,00	940.000,00	2,00	12.812.900,00	5,00	29.932.900,00	100,00	91,49	5,00	407.999.590,00	100,00	27,07	Dinas Ketahanan Pangan
01.	pembinaan dan pemantauan harga pangan pokok	Jumlah Dokumen hasil analisis kondisi harga dan pasokan pangan mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan tahunan	dok	25	862.000.000,00	46	210.622.690,00	5	70.000.000,00	5	26.445.000,00			2,00	12.665.000,00	1,00	940.000,00	2,00	12.440.000,00	5,00	26.045.000,00	100,00	98,49	51,00	236.667.690,00	204,00	27,46	Dinas Ketahanan Pangan
03.	Pemantauan distribusi pangan	Jumlah Dokumen informasi pendistribusian pangan yang masuk dan keluar dari Prov. Sulawesi Barat	dok	30	645.000.000,00	58	167.444.000,00	6	55.000.000,00	6	6.273.000,00			4,00	3.515.000,00			1,00	372.900,00	5,00	3.887.900,00	83,33	61,98	63,00	171.331.900,00	210,00	26,56	Dinas Ketahanan Pangan
																								-				Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan kesejahteraan petani	Persentase Peningkatan Konsumsi dan Pendapatan keluarga	Persen	100	5.340.000.000,00		1.414.862.850,00		825.000.000,00	100	270.065.000,00	0,00	-	20,00	41.335.000,00	15,00	5.980.000,00	60,00	193.561.435,00	95,00	240.876.435,00	0,00	89,19	95,00	1.655.739.285,00	95,00	31,01	Dinas Ketahanan Pangan
03.	peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan	Jumlah peserta perempuan/ masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan	Orang	200	1.425.000.000,00	380	208.615.000,00	40	75.000.000,00	40	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	380,00	208.615.000,00	190,00	14,64	Dinas Ketahanan Pangan
04.	Lomba cipta menu (LCM) tingkat Prov. Dan Nasional	Jumlah Kelompok Mengikuti lomba cipta menu tingkat prov. Dan Nasional	Kelompok	6	1.090.000.000,00	12	439.810.400,00	6	75.000.000,00	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	12,00	439.810.400,00	200,00	40,35	Dinas Ketahanan Pangan
	Pembinaan / Optimalisasi Pemanfaatan pekarangan melalui Konsep kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah Kelompok yang mengembangkan Pekarangan rumah pangan lestari	kelompok	150	675.000.000,00	142	65.633.000,00	15	275.000.000,00	14	126.465.000,00	0,00	-	4,00	17.650.000,00	2,00	2.660.000,00	8,00	90.095.985,00	14,00	110.405.985,00	100,00	87,30	156,00	176.038.985,00	104,00	26,08	Dinas Ketahanan Pangan
	Gerakan sayang halaman rumah (Gersaharum)	Jumlah Gerakan Sayang halaman rumah (Gersaharum)	kelompok	80	1.475.000.000,00	154	573.394.250,00	17	275.000.000,00	15	143.600.000,00	0,00	-	4,00	23.685.000,00	1,00	3.320.000,00	10,00	103.465.450,00	15,00	130.470.450,00	100,00	90,86	169,00	703.864.700,00	211,25	47,72	Dinas Ketahanan Pangan
	Promosi pangan lokal pada peringatan hari pangan sedunia (HPS)	Jumlah promosi pangan pada peringatan hari pangan sedunia (HPS)	Kali	5	675.000.000,00	2	127.410.200,00	1	125.000.000,00	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	127.410.200,00	40,00	18,88	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
	Program peningkatan ketahanan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama dan Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	Persen	100	12.715.200.000,00		3.204.286.415,00		1.030.000.000,00	100	440.180.400,00	15,00	56.187.000,00	20,00	89.449.900,00	10,00	22.327.500,00	50,00	213.328.100,00	95,00	381.292.500,00	95,00	86,62	95,00	3.585.578.915,00	95,00	28,20	Dinas Ketahanan Pangan								
01.	Apresiasi analisis ketersediaan pangan	Jumlah Kapasitas aparatur dalam menganalisis ketersediaan pangan di daerah	Aparat	100	597.000.000,00	196	180.159.300,00	18	50.000.000,00	18	9.542.000,00	0,00	-	3,00	254.300,00	6,00	905.700,00	9,00	6.592.000,00	18,00	7.752.000,00	100,00	81,24	214,00	187.911.300,00	214,00	31,48	Dinas Ketahanan Pangan								
54.	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah penduduk rawan pangan yang terdampak	kelompok	25	870.000.000,00	47	206.138.850,00	5	55.000.000,00	5	48.882.000,00	0,00	-	0,00	-	2,00	10.167.000,00	3,00	35.233.200,00	5,00	45.400.200,00	100,00	92,88	52,00	251.539.050,00	208,00	28,91	Dinas Ketahanan Pangan								
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah stock cadangan pangan pemerintah Daerah (CPBD)	Ton	99	445.000.000,00	5	74.605.000,00	8,7	100.000.000,00	9	120.842.000,00	1,00	9.527.000,00	3,00	43.832.000,00	0,00	-	4,70	61.161.000,00	8,70	114.520.000,00	100,00	94,77	13,70	189.125.000,00	13,84	42,50	Dinas Ketahanan Pangan								
42.	Model pengembangan pangan pokok lokal (MPPL)	Jumlah pangan lokal bersumber karbohidrat non beras untuk masyarakat	kelompok	15	1.200.000.000,00	8	395.248.000,00	3	80.000.000,00	3	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	395.248.000,00	53,33	32,94	Dinas Ketahanan Pangan								
43.	pembinaan, pengawasan, pemantauan, keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah Pasar yang membutuhkan pengawasan	Pasar	50	1.080.000.000,00	23	299.161.000,00	12	70.000.000,00	12	40.368.000,00	0,00	-	0,00	-	2,00	5.906.800,00	10,00	30.003.000,00	12,00	35.909.800,00	100,00	88,96	35,00	335.070.800,00	70,00	31,03	Dinas Ketahanan Pangan								
46.	Rapat Teknis/Sinkronisasi Program dan kegiatan Ketahanan pangan	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi antara program keg di Kab dan Kota	Kali	10	1.625.000.000,00	4	131.040.000,00	2	60.000.000,00	2	46.660.000,00	2,00	46.660.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	46.660.000,00	100,00	100,00	6,00	177.700.000,00	60,00	10,94	Dinas Ketahanan Pangan								
35.	apresiasi sertifikasi pangan segar asal tumbuhan pelaku usaha GHP	sosialisasi prosedur sertifikasi pangan segar kepada pelaku usaha PSAT	pelaku usaha PSAT	70	560.000.000,00	133	226.389.740,00	15	45.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	133,00	226.389.740,00	190,00	40,43	Dinas Ketahanan Pangan								
48.	penguatan rencana aksi pangan dan gizi	Jumlah kwt yang bermitra antar OPD yang terakui dalam BAD-PG	Kwt	56	340.000.000,00	97	230.370.700,00	12	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	97,00	230.370.700,00	173,21	67,76	Dinas Ketahanan Pangan								
	sertifikasi, fasilitas prima 3, registrasi PSAT dan Uji Residu Prodak Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang melakukan sertifikasi pangan	pelaku usaha PSAT	70	875.000.000,00	66	103.180.500,00	15	75.000.000,00	10	38.679.800,00	0,00	-	4,00	5.260.500,00	0,00	-	6,00	9.759.300,00	10,00	15.019.800,00	100,00	38,83	76,00	118.200.300,00	108,57	13,51	Dinas Ketahanan Pangan								
51.	Pemberdayaan sumber daya pangan	Jumlah Komoditi lokal khas daerah yang dikembangkan	Komoditi	30	525.500.000,00	12	225.357.000,00	6	55.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	12,00	225.357.000,00	40,00	42,88	Dinas Ketahanan Pangan								
29.	surveiln pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaku usaha yang terakui	pelaku usaha PSAT	30	676.000.000,00	58	293.700.000,00	20	35.000.000,00	15	32.100.000,00	0,00	-	5,00	11.285.000,00	0,00	-	8,00	11.930.000,00	13,00	23.215.000,00	86,67	72,32	71,00	316.915.000,00	236,67	46,88	Dinas Ketahanan Pangan								
13.	Monitoring stok gabah dan beras dipenggalan	Jumlah data Penggalan stok gabah dan beras setiap bulan	Penggalan	66	880.000.000,00	26	68.785.100,00	14	45.000.000,00	7	24.650.000,00	0,00	-	3,00	7.936.000,00	1,00	5.348.000,00	3,00	7.610.900,00	7,00	20.894.900,00	100,00	84,77	33,00	89.680.000,00	50,00	10,19	Dinas Ketahanan Pangan								
	galer pangan murah/ bazar dalam rangka hari besar keagamaan nasional (HBKN)	Jumlah galer pangan/bazar yang diselenggarakan	Kali	10	425.000.000,00	9	33.355.875,00	1	50.000.000,00	1	13.540.000,00	0,00	-	1,00	13.390.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	13.390.000,00	100,00	98,89	10,00	46.745.875,00	100,00	11,00	Dinas Ketahanan Pangan								
	Analisis dan penyusunan pola konsumsi Pangan	Jumlah Data Pola Pangan Harapan(PPH) dan Konsumsi Pangan	Dok	5	425.000.000,00	2	110.158.000,00	1	40.000.000,00	1	16.083.500,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	15.729.500,00	1,00	15.729.500,00	100,00	97,80	3,00	125.887.500,00	60,00	29,62	Dinas Ketahanan Pangan								
44.	Pengolahan data sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi	Lap	30	656.200.000,00	56	368.574.200,00	6	70.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	56,00	368.574.200,00	186,67	56,17	Dinas Ketahanan Pangan								
	Pengembangan kawasan mandiri pangan dan Gizi	Jumlah kawasan dalam mewujudkan kemandirian pangan masyarakat miskin di desa	Kawasan	10	525.500.000,00	8	71.298.200,00	1	40.000.000,00	1	32.603.100,00	0,00	-	0,00	7.492.100,00	-	-	1,00	20.019.200,00	1,00	27.511.300,00	100,00	84,38	9,00	98.809.500,00	90,00	18,80	Dinas Ketahanan Pangan								
55.	promosi keamanan pangan segar	Jumlah event yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengkonsumsi pangan yang aman dan bergizi	Event	10	810.000.000,00	2	186.764.950,00	3	50.000.000,00	3	16.230.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	15.290.000,00	2,00	15.290.000,00	66,67	94,21	4,04	202.054.950,00	40,40	24,95	Dinas Ketahanan Pangan								
52.	Pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	Jumlah TTIC dalam pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok	TTIC	1	200.000.000,00	0	-	1	60.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Ketahanan Pangan							
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	1	5.656.100.000,00	1	2.178.298.591,00	0,9	791.542.680,00	1	568.180.031,00	0,34	201.220.146,00	0,20	116.877.601,00	0,21	122.427.791,00	0,15	125.994.523,00	0,90	566.520.061,00	100,18	99,71	1,75	2.744.818.652,00	175,16	48,53	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan makan minum yang terakui	Jenis	25	377.335.000,00	16	92.457.000,00	5	40.000.000	8	17.189.000,00	2,00	3.686.900,00	1,00	2.400.000,00	3,00	4.486.500,00	2,00	6.615.600,00	8,00	17.189.000,00	100,00	100,00	24,00	109.646.000,00	96,00	29,06	Dinas Lingkungan Hidup								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K	Re	K	Re	K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29								
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang terbeli	Jenis	235	401.165.000,00	141	161.927.500,00	47	54.449.280	47	37.888.480,00	11,00	7.940.440,00	15,00	9.966.600,00	18,00	12.621.481,00	3,00	6.539.973,00	47,00	37.068.494,00	100,00	97,84	188,00	198.995.994,00	80,00	49,60	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Bank yang terbeli	Rekening/ Bulan	180	791.200.000,00	108	159.477.978,00	36	64.316.000	36	68.598.576,00	9,00	22.323.948,00	9,00	13.981.001,00	9,00	16.755.010,00	9,00	14.868.055,00	36,00	67.928.014,00	100,00	99,02	144,00	227.405.992,00	80,00	28,74	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	Jenis	35	444.000.000,00	16	29.475.000,00	7	2.756.000										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	16,00	29.475.000,00	45,71	6,64	Dinas Lingkungan Hidup									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim	Surat	1500	198.400.000,00	500	41.998.500,00	500	63.900.000	500	76.446.000,00			200,00	20.670.000,00	200,00	30.000.000,00	100,00	25.696.000,00	500,00	76.366.000,00	100,00	99,90	1000,00	118.364.500,00	66,67	59,66	Dinas Lingkungan Hidup								
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	OP	100	1.550.000.000,00	60	688.371.500,00	20	267.863.000	20	183.684.415,00	2,00	19.645.000,00	6,00	62.710.000,00	6,00	51.160.000,00	6,00	50.080.000,00	20,00	183.595.000,00	100,00	99,95	80,00	871.966.500,00	80,00	56,26	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang tersedia	Blok	90	65.000.000,00	30	24.525.700,00	30	5.150.000										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	30,00	24.525.700,00	33,33	37,73	Dinas Lingkungan Hidup									
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah orang perjalanan yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	OP	100	1.784.000.000,00	60	961.365.413,00	20	281.680.400	20	184.373.560,00	13,00	147.623.858,00	1,00	7.150.000,00	1,00	7.404.800,00	5,00	22.194.895,00	20,00	184.373.553,00	100,00	100,00	80,00	1.145.738.966,00	80,00	64,22	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli	Bahan Bacaan	10	45.000.000,00	4	18.700.000,00	2	11.428.000										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00	18.700.000,00	40,00	41,56	Dinas Lingkungan Hidup									
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	1	4.196.500.000,00	1	585.222.054,00	0,9	967.475.000,00	1	193.834.109,00	0,16	30.884.704,00	0,33	64.156.813,00	0,21	40.036.244,00	0,30	57.983.621,00	1,00	193.061.382,00	110,67	99,60	1,85	778.283.436,00	184,60	18,55	Dinas Lingkungan Hidup								
	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan gedung kantor	Jumlah perengkapan jenis kantor yang terbeli	Jenis	25	387.200.000,00	16	88.599.947,00	5	41.000.000	13	40.795.000,00	3,00	840.900,00	4,00	12.800.000,00	5,00	13.785.000,00	1,00	13.369.100,00	13,00	40.795.000,00	100,00	100,00	29,00	129.394.947,00	116,00	33,42	Dinas Lingkungan Hidup								
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan jenis kantor yang terbeli	Jenis	25	239.000.000,00	16	53.875.409,00	5	18.510.000	22	10.906.000,00			6,00	4.130.000,00	6,00	4.338.925,00	10,00	2.437.075,00	22,00	10.906.000,00	100,00	100,00	38,00	64.781.409,00	152,00	27,11	Dinas Lingkungan Hidup								
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	Jenis	25	400.000.000,00	16	12.980.000,00	5	13.106.000										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	16,00	12.980.000,00	64,00	3,25	Dinas Lingkungan Hidup									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional dinas terbeli	Unit	90	240.000.000,00	45	56.469.240,00	15	60.400.000	15	10.946.000,00	6,00	6.000.000,00	5,00	4.000.000,00			4,00	946.000,00	15,00	10.946.000,00	100,00	100,00	60,00	67.415.240,00	66,67	28,09	Dinas Lingkungan Hidup								
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Meubeleur Kantor dan Laboratorium yang terbeli	Unit	40	750.700.000,00	12	71.030.000,00	8	49.166.000	2	11.420.000,00			2,00	11.420.000,00		-		2,00	11.420.000,00	100,00	100,00	14,00	82.450.000,00	35,00	10,98	Dinas Lingkungan Hidup									
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang terbeli	Unit	23	680.000.000,00	0	-	5	478.993.000										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup									
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan operasional dan mobil jabatan yang terbeli	Unit	36	1.239.600.000,00	24	302.267.458,00	6	164.000.000	6	96.731.359,00	2,00	24.043.804,00	2,00	20.706.813,00	1,00	21.912.319,00	1,00	30.048.423,00	6,00	96.711.359,00	100,00	99,98	30,00	398.978.817,00	83,33	32,19	Dinas Lingkungan Hidup								
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	3	70.000.000,00	-	-	7	60.300.000										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup									
	pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jenis	9	190.000.000,00	-	-	3	82.000.000	3	23.035.750,00			2,00	11.100.000,00		-	1,00	11.183.023,00	3,00	22.283.023,00	100,00	96,73	3,00	22.283.023,00	33,33	11,73	Dinas Lingkungan Hidup								
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Patuh	Patuh	889.400.000,00	Patuh	149.781.440,00	Patuh	139.282.000,00	Patuh	63.416.000,00	-		Patuh	63.001.400,00			Patuh	66.000,00	Patuh	63.067.400,00	Patuh	99,45	Patuh	212.848.840,00	Patuh	23,93	Dinas Lingkungan Hidup								
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang terbeli	Pakaian	400	400.000.000,00	163	70.640.440,00	80	75.866.000										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	163,00	70.640.440,00	40,75	17,66	Dinas Lingkungan Hidup									
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terbeli	Pakaian	400	489.400.000,00	163	79.141.000,00	80	63.416.000	83	63.416.000,00			83,00	63.001.400,00				66.000,00	83,00	63.067.400,00	100,00	99,45	246,00	142.208.400,00	61,50	29,06	Dinas Lingkungan Hidup								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemertase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	Persen	1	2.245.000.000,00	1	316.333.199,00	0,9	212.891.600,00	1	43.506.000,00	0,74	32.400.600,00	0,10	4.295.000,00	0,09	3.975.000,00	0,04	1.850.000,00	0,98	42.520.600,00	108,59	97,74	1,83	358.853.799,00	182,74	15,98	Dinas Lingkungan Hidup								
	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Peraturan Perundang - undangan terbaru yang di sosialisasikan	Peraturan Perundang - undangan	4	450.000.000,00	-	-	1	38.493.600										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup									
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Kapasitasnya	OK	95	1.795.000.000,00	42	316.333.199,00	20	174.198.000	7	43.506.000,00	2,00	32.400.600,00	1,00	4.295.000,00	12,00	3.975.000,00	3,00	1.850.000,00	18,00	42.520.600,00	257,14	97,74	60,00	358.853.799,00	63,16	19,99	Dinas Lingkungan Hidup								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Taat	Taat	2.860.200.000,00	Taat	657.629.054,00	Taat	347.119.140,00	Taat	165.849.400,00	Taat	18.588.200,00	Taat	38.140.000,00	Taat	50.400.000,00	Taat	58.460.200,00	Taat	165.588.400,00	Taat	99,84	Taat	823.217.454,00	Taat	28,78	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun tersusun	Laporan	5	220.000.000,00	3	56.424.737,00	1	41.556.400	1	35.156.400,00			1,00	11.060.000,00		11.200.000,00		12.756.400,00	1,00	35.016.400,00	100,00	99,60	4,00	91.441.137,00	80,00	41,56	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyusunan Renstra/Reg/LAKIP dan LKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Pelaporan	Dokumen	14	138.200.000,00	1	22.600.000,00	2	88.772.000	4	23.588.000,00			1,00	4.800.000,00	3,00	6.800.000,00		11.988.000,00	4,00	23.588.000,00	100,00	100,00	5,00	46.188.000,00	35,71	33,42	Dinas Lingkungan Hidup								
	Penyusunan RKA-PD/PPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-PD/PPA SKPD	Dokumen	11	137.000.000,00	7	37.909.982,00	2	6.890.800	2	3.590.800,00							2,00	3.590.800,00	2,00	3.590.800,00	100,00	100,00	9,00	41.500.782,00	81,82	30,29	Dinas Lingkungan Hidup								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
												I		II		III		IV		K		K		K		K		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10+11x12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x5/100	17												
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	20	673.200.000,00	12	177.013.611,00	4	81.465.200	4	68.585.200,00			2,00	22.280.000,00	2,00	22.400.000,00		23.785.000,00	4,00	68.465.000,00	100,00	99,82	16,00	245.478.611,00	80,00	36,46	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD	Dokumen	11	137.000.000,00	7	42.420.476,00	2	6.890.800	2	3.590.800,00	1,00	2.250.000,00					1.340.000,00	1,00	3.590.000,00	50,00	99,98	8,00	46.010.476,00	72,73	33,58	Dinas Lingkungan Hidup	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD yang terlaksana	Kabupaten	36	1.124.800.000,00	18	253.744.343,00	6	67.146.340										0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	18,00	253.744.343,00	50,00	22,56	Dinas Lingkungan Hidup	
	Forum SKPD	Jumlah program dan kegiatan yang diselenggarakan sesuai Program/kegiatan Prosidia	Program/kegiatan	350	430.000.000,00	210	67.515.905,00	70	54.397.600	70	31.338.200,00	70,00	16.338.200,00			10.000.000,00		5.000.000,00	70,00	31.338.200,00	100,00	100,00	280,00	98.854.105,00	80,00	22,99	Dinas Lingkungan Hidup	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Pelatihan	10	2.950.000.000,00	4	133.101.035,00	2	610.998.300,00	1	290.513.580,00		63.353.960,00		6.500.000,00		15.000.000,00	1,00	204.234.520,00	1,00	289.088.480,00	100,00	99,51	5,00	422.189.515,00	50,00	14,31	Dinas Lingkungan Hidup
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Dokumen	5		2		1		1										0,00		2,00	-	40,00	#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peserta PPSN	OK	1000	1.300.000.000,00	600	133.101.035,00	200	110.998.300	200	55.049.060,00	200,00	45.773.960,00		1.500.000,00		2.500.000,00		5.000.000,00	200,00	54.773.960,00	100,00	99,50	800,00	187.874.995,00	80,00	14,45	Dinas Lingkungan Hidup
	Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan	Jumlah aparatur dan masyarakat yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Sampah dan TPA	Orang	390	1.650.000.000,00	0	-	150	500.000.000	40	235.464.520,00		17.580.000,00		5.000.000,00		12.500.000,00	40,00	199.234.520,00	40,00	234.314.520,00	100,00	99,51	40,00	234.314.520,00	10,26	14,20	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Dokumen	3	1.550.000.000,00	1	75.854.263,00	1	188.693.092	1	18.320.000,00			1,00	13.320.000,00			5.000.000,00	1,00	18.320.000,00	100,00	100,00	2,00	94.174.263,00	66,67	6,08	Dinas Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	55-75	5.156.700.000,00	53	1.548.793.428,00	60	1.226.144.978,00	60	370.032.960,00	51,16	34.936.600,00		35.000.000,00		123.919.999,00		171.631.438,00	51,16	365.488.037,00	85,27	98,77	104,36	1.914.281.465,00	#VALUE!	37,12	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	85-100	800.000.000,00	90	92.583.718,00	95	150.958.000	95	15.063.000,00			89,72	5.000.000,00		5.000.000,00		5.063.000,00	89,72	15.063.000,00	94,44	100,00	179,72	107.646.718,00	#VALUE!	13,46	Dinas Lingkungan Hidup
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	10	600.000.000,00	4	114.770.141,00	2	226.248.070,00											-	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00	114.770.141,00	40,00	19,13	Dinas Lingkungan Hidup	
		Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	50	1.600.000.000,00	0	468.209.769,00	25												-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	468.209.769,00	0,00	29,26	Dinas Lingkungan Hidup	
		Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas Kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan	60	793.850.000,00	20	161.931.708,00	10	211.480.220	1	26.680.000,00	1,00	11.680.000,00		4.800.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1,00	26.480.000,00	100,00	99,25	21,00	188.411.708,00	35,00	23,73	Dinas Lingkungan Hidup
		Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diselenggarakan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	75	1.350.000.000,00	20	142.909.226,00	50	392.512.520,00	30	36.880.000,00	20,00	21.880.000,00		4.600.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	20,00	36.480.000,00	66,67	98,92	40,00	179.389.226,00	53,33	13,29	Dinas Lingkungan Hidup
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ADIPURA	Jumlah Kota yang dilakukan Pemantauan	Kab/Kota	24	2.019.130.000,00	12	125.401.040,00	4	124.099.220											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	12,00	125.401.040,00	50,00	6,21	Dinas Lingkungan Hidup
	Pelaksanaan pengambilan sampel dan Analisa/Pengujian Sampel	Jumlah Dokumen data hasil uji lingkungan	Dokumen	5	1.850.000.000,00	3	526.263.421,00	1	311.849.000	1	186.562.760,00		8.532.200,00		35.000.000,00	1,00	70.460.000,00		69.930.000,00	1,00	183.922.200,00	100,00	98,58	4,00	710.185.621,00	80,00	38,39	Dinas Lingkungan Hidup
	Pemantauan Kualitas Air Laut	Data Kualitas Air laut	Kab/Kota	25	900.000.000,00	0	-	5	165.010.700											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re		K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17														
	Pengawasan Izin lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi dan Jumlah PPLH yang diterbitkan dalam pengawasan lingkungan	Usaha/Kegiatan	85	1.350.000.000,00	45	142.909.226,00	20	224.075.520	10	36.880.000,00	4,00	21.880.000,00	2,00	4.600.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	10,00	36.480.000,00	100,00	98,92	55,00	179.389.226,00	64,71	13,29	Dinas Lingkungan Hidup		
	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah B3	Data hasil pemantauan limbah B3 yang dibuang	Dokumen	5	1.550.000.000,00	2	75.854.263,00	1	188.693.092	1	18.320.000,00			1,00	13.320.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1,00	18.320.000,00	100,00	100,00	3,00	94.174.263,00	60,00	6,08	Dinas Lingkungan Hidup		
	Pengendalian Mutu Hasil Pengujian	Data Alat Terkalibrasi Dan Jumlah Pengujian Yang terakreditasi Dokumen mutu laboratorium	Alat, Metode, Parameter	132; 36; 36	1.000.000.000,00	88; 24; 24	107.522.302,00	44 ; 12; 12	207.380.000	44 ; 12; 12	131.571.500,00	0,00	563.200,00		44 Alat; 12 Metode; 12 Parameter		40.799.999,00		89.203.938,00	44 Alat; 12 Metode; 12 Parameter	130.567.137,00	#VALUE!	99,24	#VALUE!	238.089.439,00	#VALUE!	23,81	Dinas Lingkungan Hidup		
	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai Amdal Daerah	Jumlah Komisi Penilai Amdal yang terbina dan Jumlah Komisi Penilai Amdal yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah Dokumen Laporan Data Inventarisasi yang dihasilkan	KPA	25	1.000.000.000,00	5	46.925.865,00	6	98.437.000											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,00	46.925.865,00	20,00	4,69	Dinas Lingkungan Hidup		
	Pengelolaan Pos P3SLH	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang ditangani Jumlah SDM Aparatur, dan Stakeholders dan Masyarakat yang dilibatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam tata cara pengaduan dan Pengelolaan Pengaduan LH	Pengaduan	56	793.850.000,00	36	161.931.708,00	10	211.480.220	1	26.680.000,00	1,00	11.680.000,00		4.800.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1,00	26.480.000,00	100,00	99,25	37,00	188.411.708,00	66,07	23,73	Dinas Lingkungan Hidup		
	Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten	Data Kualitas Air Sungai	Sungai	20	992.300.000,00	12	777.039.000,00	5	237.510.400	2	51.898.700,00	1,00	25.841.200,00			1,00	12.660.000,00		12.497.500,00	2,00	50.998.700,00	100,00	98,27	14,00	828.037.700,00	70,00	83,45	Dinas Lingkungan Hidup		
	Penyediaan Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup terbeli	Jenis	40	6.150.000.000,00	17	410.926.390,00	8	220.771.000											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	17,00	410.926.390,00	42,50	6,88	Dinas Lingkungan Hidup		
	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	Data Kualitas Udara	Kabupaten	24	800.000.000,00	12	92.583.718,00	6	150.958.000		15.063.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00				5.063.000,00	0,00	15.063.000,00	#DIV/0!	100,00	12,00	107.646.718,00	50,00	13,46	Dinas Lingkungan Hidup	
	Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengendalian Lingkungan	Peningkatan kepada masyarakat Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengendalian LH	Orang	1000	600.000.000,00	600	114.770.141,00	200	102.148.850											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	600,00	114.770.141,00	60,00	19,13	Dinas Lingkungan Hidup		
	Peningkatan kapasitas dan kinerja laboratorium	Meningkatnya kapasitas dan kinerja laboratorium	Orang	75	1.600.000.000,00	30	468.209.769,00	15	83.623.878											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	30,00	468.209.769,00	40,00	29,26	Dinas Lingkungan Hidup		
	Peningkatan Peningkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Data Perusahaan dalam Mengelola Lingkungan Hidup	Perusahaan	46	1.314.400.000,00	14	137.968.705,00	8	70.000.000											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	14,00	137.968.705,00	30,43	10,50	Dinas Lingkungan Hidup		
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Laporan Inventarisasi Objek	Dokumen	5	1.450.000.000,00	2	232.025.526,00	1	208.543.200		15.063.000,00		4.920.000,00		5.000.000,00		5.063.000,00		5.063.000,00	0,00	14.983.000,00	#DIV/0!	99,47	2,00	247.008.526,00	40,00	17,04	Dinas Lingkungan Hidup		
	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional	Ha	115	3.460.800.000,00	49	963.082.393,00	10	260.000.000		27.490.000,00		3.410.000,00		8.020.000,00		7.550.000,00		8.260.000,00	0,00	27.240.000,00	#DIV/0!	99,09	49,17	990.322.393,00	42,76	28,62	Dinas Lingkungan Hidup		
	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air	Laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim nasional	Dokumen	5	1.100.000.000,00	2	194.302.026,00	1	622.185.400,00	1	87.481.400,00	1,00	72.481.400,00		4.900.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	1,00	87.381.400,00	100,00	99,89	3,00	281.683.426,00	60,00	25,61	Dinas Lingkungan Hidup		
	Penyusunan kriteria baku kerusakan lingkungan	Jumlah Penetapan kebijakan pengelolaan Sumber daya alam	Dokumen	5	1.700.000.000,00	0	-	1	349.280.000											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Lingkungan Hidup		
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Pelestarian sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air	Ha	109	3.460.800.000,00	51	963.082.393,00	10	260.000.000	0	27.490.000,00		3.410.000,00		8.020.000,00		7.550.000,00		8.260.000,00	0,00	27.240.000,00	#DIV/0!	99,09	51,17	990.322.393,00	46,77	28,62	Dinas Lingkungan Hidup		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re		K	Re						
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re								K	Re				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17																
	Pembinaan Program Kampung Ikim (ProKIm)	- Jumlah Komite Lingkungan Hidup - Jumlah Desa mandiri peduli lingkungan - Pengembangan sistem informasi kebalah	Desa Peduli Lingkungan	35	1.100.000.000,00	11	194.302.026,00	7	272.905.400	7	87.481.400,00	5,00	72.481.400,00	4.900.000,00	2,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7,00	87.381.400,00	100,00	99,89	18,00	281.683.426,00	51,43	25,61	Dinas Lingkungan Hidup						
	Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Laporan Inventarisasi GRK	Dokumen	5	1.450.000.000,00	3	232.025.526,00	1	208.543.200		15.063.000,00			4.920.000,00		5.000.000,00	5.063.000,00	0,00	14.983.000,00	#DIV/0!	99,47	3,00	247.008.526,00	60,00	17,04	Dinas Lingkungan Hidup						
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	1	400.000.000,00	1	69.625.600,00	-										#DIV/0!	#DIV/0!	1,00		69.625.600,00	100,00	17,41	Dinas Lingkungan Hidup							
		Tersedianya Dokumen RBDP H Provinsi	Dokumen	5	5.947.000.000,00	1	603.420.610,00	1	673.667.200,00	0	41.640.000,00		2.150.000,00		4.217.000,00		2.500.000,00	31.660.000,00	0,00	40.527.000,00	#DIV/0!	97,33	1,00	643.947.610,00	20,00	10,83	Dinas Lingkungan Hidup					
	Evaluasi Penyusunan KLHS	Pelaksanaan evaluasi dokumen KLHS	Kabupaten	9	400.000.000,00	2	69.625.600,00	3	80.000.000									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00		69.625.600,00	22,22	17,41	Dinas Lingkungan Hidup					
	Penyusunan DIKPLHD (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen DIKPLHD dan IKLH yang dihasilkan	Dokumen	10	777.000.000,00	6	163.453.287,00	2	93.667.200	1	41.640.000,00		2.150.000,00	1,00	4.217.000,00		2.500.000,00	31.660.000,00	1,00	40.527.000,00	100,00	97,33	7,00	203.980.287,00	70,00	26,25	Dinas Lingkungan Hidup					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan PPH	Dokumen	10	3.350.000.000,00	0	-	1	300.000.000									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup					
	Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH)	Jumlah Dokumen RPPPLH	Dokumen	5	1.820.000.000,00	2	439.967.323,00	1	200.000.000									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00		439.967.323,00	40,00	24,17	Dinas Lingkungan Hidup					
	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Peningkatan Indeks Tutupan Laut	Ha	113	12.525.150.000,00	36	665.390.723,00	10	1.017.926.020		44.233.600,00		28.553.600,00		4.760.000,00		5.000.000,00	5.680.000,00	0,00	43.993.600,00	#DIV/0!	99,46	36,21	709.384.323,00	31,98	5,66	Dinas Lingkungan Hidup					
	Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Luas lahan kritis wilayah pesisir dan Laut yang tertutupi dengan Tanaman Mangrove (Peningkatan Indeks Kualitas Laut)	Ha	113	12.525.150.000,00	36	665.390.723,00	10	1.017.926.020	0	44.233.600,00		28.553.600,00		4.760.000,00		5.000.000,00	5.680.000,00	0,00	43.993.600,00	#DIV/0!	99,46	36,21	709.384.323,00	31,98	5,66	Dinas Lingkungan Hidup					
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen MHA Yang diinventarisir dan Tersfasitasnya pendampingan masyarakat lokal	MHA	20	8.616.450.000,00		492.667.262,00	3	752.532.580,00	0	57.479.000,00			28.518.000,00		8.040.000,00		20.660.000,00	0,00	57.218.000,00	#DIV/0!	99,55	0,00	548.885.262,00	0,00	6,38	Dinas Lingkungan Hidup					
		Tersfasitasi pendampingan masyarakat lokal	Kegiatan	1				1	0									0,00		#DIV/0!		0,00		0,00			Dinas Lingkungan Hidup					
	Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan Lokal Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen MHA yang di inventarisir dan Tersfasitasnya pendampingan masyarakat lokal	MHA	14	2.692.000.000,00	0	-	3	186.631.150									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Lingkungan Hidup					
	Saka Kapastaru	Jumlah kader lingkungan hidup yang aktif dan Jumlah Aparatur Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan	Kader	16225	1.750.000.000,00	50	111.854.668,00	4006	249.740.530									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	50,00		111.854.668,00	0,31	6,39	Dinas Lingkungan Hidup					
	Expose/Promosi upaya penanganan Lingkungan Hidup dan Pelestarian Alam	Jumlah expose yang terfaksana	Kegiatan	7	2.000.000.000,00	4	97.210.000,00	2	135.782.000									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00		97.210.000,00	57,14	4,86	Dinas Lingkungan Hidup					
	Pengembangan program sekolah peduli lingkungan	Jumlah Sekolah Sekolah Peduli Lingkungan	Sekolah	85	2.174.450.000,00	50	283.602.594,00	15	180.378.900	6	57.479.000,00			5,00	28.518.000,00	1,00	8.040.000,00	20.660.000,00	6,00	57.218.000,00	100,00	99,55	56,00	340.820.594,00	65,88	15,67	Dinas Lingkungan Hidup					
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																																
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Layanan Administrasi Perkantoran	%	1	695.132.012,00		976.897.358,00	2184	875.747.350,00	32129	838.277.350,00	2084,00	119.200.151,00	12062,00		307.145.392,00	7180,00		37.319.200,00	10312,00		373.177.400,00	31638,00		836.842.143,00	98,47	99,83	31638,00	1.813.739.501,00	3163800,00	260,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa Tenaga Pendukung Administrasi yang menangani surat menyurat	Orang	25	217.732.012,00	300	213.797.000,00	27	168.600.000,00	27	168.600.000,00	5,00	30.360.000,00	10,00		93.240.000,00		-	12,00		45.000.000,00	27,00		168.600.000,00	100,00	100,00	327,00	382.397.000,00	1308,00	175,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi	Rek	12	2.400.000,00			57	-	57	-							0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan	Jenis	40	5.000.000,00	55	62.719.400,00	70	82.383.010,00	70	82.383.010,00	5,00	4.132.600,00	15,00		12.397.992,00	30,00		24.795.000,00	20,00		41.057.400,00	70,00		82.382.992,00	100,00	100,00	125,00	145.102.392,00	312,50	2.902,05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penggandaan Selama 12 Bulan	Lembar	50.000	6.000.000,00	31209	10.147.000,00	50	27.499.000,00	30000	30.601.000,00	2000,00	739.800,00	11660,00		14.601.000,00	7000,00		2.658.200,00	9340,00		12.602.000,00	30000,00		30.601.000,00	100,00	100,00	61209,00	40.748.000,00	#VALUE!	679,13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Peralatan dan Perlengkapan perkantoran	Unit	4	8.000.000,00	5	62.203.000,00	10	246.730.000,00	13	246.730.000,00	0,00	-	7,00		48.790.000,00		-	6,00		196.970.000,00	13,00		245.760.000,00	100,00	99,61	18,00	307.963.000,00	450,00	3.849,54	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Berapapun Tawar	Dos	5000	40.000.000,00	1987	73.735.000,00	1900	31.986.400,00	1900	47.926.400,00	67,00	2.980.000,00	370,00		18.440.400,00	150,00		8.566.000,00	933,00		17.940.000,00	1520,00		47.926.400,00	80,00	100,00	3507,00	121.661.400,00	70,14	304,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah ASN dan PTT yang Melakukan Rapat-rapat Koordinasi	Orang	50	200.000.000,00	72	168.776.458,00	70	126.930.000,00	62	59.620.000,00	7,00	52.202.751,00			-		-	1,00		7.082.000,00	8,00		59.284.751,00	12,90	99,44	80,00	228.061.209,00	160,00	114,03	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re		K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/3*100	15 = 13+6	16 = 15/3*100	17														
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah ASN dan PTT yang Melakukan Koordinasi Ke dalam Daerah	Orang	50	180.000.000,00	144	264.809.500,00	70	191.618.940,00	62	202.416.940,00	8,00	28.785.000,00	40,00	119.676.000,00	1,00	1.300.000,00	13,00	52.526.000,00	62,00	202.287.000,00	100,00	99,94	206,00	467.096.500,00	412,00	259,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jenis	3	3.000.000,00	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	3.000.000,00	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyusunan pelayanan administrasi perencanaan dan ketatausahaan	Dokumen Perencanaan Kerja Kegiatan dan Anggaran yang Tersusun dengan Baik dan Terukur	Dok	4	30.000.000,00	4	120.710.000,00	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulawesi Barat	0,75	1	191.531.324,00	31	76.852.975,00	54	82.972.400,00	37	109.852.400,00	1,00	5.616.000,00	-	35.776.400,00	-	5.830.000,00	-	62.630.000,00	1,00	109.852.400,00	2,70	100,00	32,00	186.705.375,00	3368,42	97,48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Tersedia	Unit	1	150.000.000,00	12	68.302.975,00	2	59.640.000,00	2	72.110.000,00	1,00	5.616.000,00	1,00	25.664.000,00	-	-	2,00	40.830.000,00	4,00	72.110.000,00	200,00	100,00	16,00	140.412.975,00	1600,00	93,61	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional untuk Aparatur	Unit	1	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat	Tersedianya Gedung Dinas DUKCAPIT, Prov. Sulbar	0 Unit	0	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pemeliharaan gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	2	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit	20	31.531.324,00	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor	Unit	20	10.000.000,00	19	8.550.000,00	52	23.332.400,00	35	37.742.400,00	0,00	-	10,00	10.112.400,00	5,00	5.830.000,00	20,00	21.800.000,00	35,00	37.742.400,00	100,00	100,00	54,00	46.292.400,00	270,00	462,92	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengadaan meubeleuer	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi	Unit	20	-	-	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpeenuhinya ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang berintegritas serta profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Paket	50	141.638.556,00	70	51.740.000,00	50	26.198.000,00	29	26.198.000,00	-	29,00	26.100.000,00	-	-	-	-	-	29,00	26.100.000,00	100,00	99,63	99,00	77.840.000,00	198,00	54,96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Paket	50	72.000.000,00	32	19.040.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengadaan Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Paket	50	69.638.556,00	38	32.700.000,00	50	26.198.000,00	29	26.198.000,00	0,00	-	29,00	26.100.000,00	-	-	-	-	29,00	26.100.000,00	100,00	99,63	67,00	58.800.000,00	134,00	84,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpeenuhnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, cakap, serta memiliki keterampilan dan kemampuan	Orang	3	50.050.096,00	0	-	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	Orang	3	10.000.000,00	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Fasilitasi Pembinaan Sumber Daya Aparatur yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan d Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Fasilitas Pembinaan Sumber Daya Aparatur yang Menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Orang	20	40.050.096,00	-	0	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpeenuhnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Dokumen	7	5.720.137,00	11	15.039.400,00	11	18.934.200,00	11	18.934.200,00	0,00	-	6,00	12.989.400,00	2.953.000,00	-	2.991.800,00	6,00	18.934.200,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Dokumen	1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	13 = 9+10+11+12	14 = 13x100	K	Re	15 = 13x6	16 = 15x100	17		
	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Dokumen Perencanaan Program Kegiatan dan Anggaran yang Tersusun dengan Baik dan Teratur	Dokumen	2	1.000.000,00	2	2.040.000,00	2	11.499.400,00	2	11.499.400,00			2,00	11.499.400,00		-			2,00	11.499.400,00	100,00	100,00	4,00	13.539.400,00	200,00	1.353,94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyusunan RKA-P/DPA-P SKPD	Tersusunnya RKA-P/DPA-P SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00	2	1.250.000,00	2	1.498.800,00	2	1.498.800,00	0,00	-			-	1,00	1.498.800,00	1,00	1.498.800,00	50,00	100,00	3,00	2.748.800,00	150,00	137,44	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	320.137,00	1	4.999.400,00	1	1.460.000,00	1	1.460.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1.460.000,00		1,00	1.460.000,00	100,00	100,00	2,00	6.459.400,00	50,00	2.017,70	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	2	600.000,00	1	2.250.000,00	1	1.493.000,00	1	1.493.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1.493.000,00		1,00	1.493.000,00	100,00	100,00	2,00	3.743.000,00	100,00	623,83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	2	300.000,00	1	2.250.000,00	1	1.493.000,00	1	1.493.000,00	0,00	-	0,00	-	-	1,00	1.493.000,00	1,00	1.493.000,00	100,00	100,00	2,00	3.743.000,00	100,00	1.247,67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyusunan Renja/Renstra/LAKIP, dan LPPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	2	500.000,00	4	2.250.000,00	4	1.490.000,00	4	1.490.000,00	0,00	-	4,00	1.490.000,00		-			4,00	1.490.000,00	100,00	100,00	8,00	3.740.000,00	400,00	748,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya terbit administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat	%	1	7.330.000.000,00	173	1.026.169.565,00	90	368.647.380,00	90	379.237.380,00	93,00	51.000.000,00	9,00	112.500.000,00	0,00	-	26,00	214.835.400,00	128,00	378.335.400,00	142,22	99,76	301,00	1.404.504.965,00	33444,44	19,16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota	Terwujudnya Terbit Administrasi Kependudukan di Daerah	Kabupaten	6	100.000.000,00	6	49.290.000,00	6	60.000.000,00	6	60.099.700,00	1,00	12.500.000,00	4,00	37.500.000,00		-	1,00	10.099.700,00	6,00	60.099.700,00	100,00	100,00	12,00	109.389.700,00	200,00	109,39	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Org	30	100.000.000,00							0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemeliharaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK)	Tersedianya Aplikasi Jaringan SIAK yang Lulus Uji Coba	Kabupaten	1	100.000.000,00	6	169.220.400,00	6	170.139.200,00	6	195.179.200,00	1,00	12.500.000,00	2,00	37.500.000,00		-	3,00	145.179.200,00	6,00	195.179.200,00	100,00	100,00	12,00	364.399.600,00	1200,00	364,40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Pencatatan Sipil	Org	30	175.000.000,00							0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pembinaan dan Penilaian Pengelolaan Adminduk se-Provinsi Sulawesi Barat	Meningkatnya Kemampuan Aparatur Pengelola Adminduk di Daerah	Kab	6	175.000.000,00	6	99.940.000,00					0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pembinaan, pengawasan, dan penerbitan administrasi kependudukan Penduduk sementara	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Penduduk Sementara	6 Kab	6	125.000.000,00	1	78.197.850,00					0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peningkatan Akta Kelahiran dengan Jalur Kemitraan	Terwujudnya terbit administrasi kependudukan di provinsi Sulawesi Barat	Kab	6	100.000.000,00							0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sosialisasi Pengelolaan Data Kependudukan Pindah, Datang Penduduk di Penduduk Rentan Administrasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Data Kependudukan Pindah Datang Penduduk di Penduduk Rentan Administrasi	Org	30	100.000.000,00	30	149.425.371,00					0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pendataan dan Penerbitan dokumen kependudukan rentan adminduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Rentan Adminduk	Dokumen Exemplen	25	50.000.000,00							0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Kajian Pola mobiltas dan migrasi penduduk	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kajian Pola Mobiltas dan Migrasi Penduduk	Org	20	80.000.000,00							0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyajian data dan informasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional	Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang Terintegrasi Secara Nasional	Dok	50	50.000.000,00							0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penyajian data kependudukan hasil registrasi pendataan kependudukan dan pencatatan sipil	Tersedianya Data Kependudukan Hasil Registrasi Pendataan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Paket	50	150.000.000,00							0,00	-			-				0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re		K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17												
	Facilitasi Pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga pengguna tingkat Prov. Sulawesi Barat	Jumlah Peserta yang Mengikut Facilitasi Pelayanan Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el pada Lembaga Penggunaan	Org	100	150.000.000,00			0,00	-									0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Peningkatan kerjasama Pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	1	100.000.000,00	50	111.074.644,00	0,00	-									0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Kegiatan monitoring dan evaluasi Akta Kematian	Terselenggaranya Akta Kematian di Daerah	Kab	6	200.000.000,00			6	75.000.000,00	6	75.100.300,00	1,00	12.500.000,00	3,00	37.500.000,00		-	2,00	25.100.300,00	6,00	75.100.300,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pendataan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Tersedianya Data Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian di Kabupaten	Kab	6	150.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Percepatan pencapaian target nasional persamaan KTP-el di Provinsi Sulawesi Barat	Tercapainya Target Nasional Persamaan KTP- el Provinsi Sulawesi Barat	%	1	150.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pemutakhiran Data Kependudukan Skala Provinsi	Tersedianya data hasil pemutakhiran data kependudukan	%	1	500.000.000,00				600	13.500.000,00	600	13.500.000,00	90,00	13.500.000,00		-		-			90,00	13.500.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pengembangan Database Kependudukan	Tersedianya Data Hasil Database Kependudukan	Org	36	175.000.000,00								-					-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Koordinasi Pemutakhiran Kartu Keluarga dan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran Anak Tahun 2017 sebesar 85%	Terkordinasiny a pemutakhiran kartu keluarga dan peningkatan akta kelahiran anak	%	0	100.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Gerakan Indonesia Sedar Adminiduk (GISA)	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan	Kab	6	1.000.000.000,00				600	50.008.180,00	20	35.358.180,00		-				-	20,00	34.456.200,00	20,00	34.456.200,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Sosialisai pemahaman peraturan administrasi kependudukan bagi lembaga/institusi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pemahaman Peraturan Administrasi Kependudukan	Org	100	175.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pembangunan database kependudukan skala Provinsi	Tersedianya Database Kependudukan Skala Provinsi	%	1	175.000.000,00								-					-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Bimtek Penyajian informasi kependudukan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Penyajian Informasi Kependudukan	Org	30	175.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyiapan Data Kependudukan dalam rangka penyusunan DP4 untuk Pilkada serentak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyiapan Data Kependudukan Dalam Rangka Penyusunan DP4 untuk Pilkada Serentak	Org	100	175.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Penyiapan Data Kependudukan dalam rangka penyusunan DP4 untuk Pemlu Legislatif dan Pilpres Tahun 2019	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyiapan Data Kependudukan dalam Rangka Penyusunan DP4 untuk Pemlu Legislatif dan Pilpres	Org	100	175.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kegiatan Program Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Antar Daerah	Terselenggaranya Terbit Administrasi Kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat	Keg	6	90.000.000,00	18	89.984.000,00											-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pelatihan dan workshop pengembangan wawasan tentang pelayanan E-KTP, E-Akta, dan SIAK bagi pengelola sistem kependudukan se-Sulawesi Barat	Meningkatnya wawasan serta kemampuan aparatur penyelenggara pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan E- KTP, E-Akta, dan SIAK	Org	24	175.000.000,00	27	102.333.900,00											-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Pembinaan supervisi pelayanan pendaftran penduduk	Pelayanan Pendaftran Penduduk yang Efektif di Daerah	Kab	6	115.000.000,00													-			0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17												
	Pengembangan wawasan penyelenggara layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya wawasan serta pemahaman aparatur penyelenggara pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Org	30	-													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Studi banding pengelolaan sistem administrasi kependudukan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Study Banding Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan	Org	25	150.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimtek pemutakhiran data administrasi kependudukan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan	Org	36	150.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Rapat Kerja Provinsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Kerja Provinsi Sulawesi Barat	Org	36	100.000.000,00	22	79.600.300,00											0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Rakor penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rakor Penyelenggaraa n Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Org	36	100.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Monitoring teknis operasional PIAK	Terwujudnya Terbit Administrasi Kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat	Kab	6	108.000.000,00	6	57.631.100,00											0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Monitoring teknis operasional SIAK, KTP-el, dan Akta Kelahiran	Terwujudnya Terbit Administrasi Kependudukan di Daerah	Kab	6	90.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang perakaman KTP-el	Tersedianya Sarana dan Prasarana KTP-el di Daerah	Unit	6	75.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengadaan Hardware, software, windows, oracle database dan security	Tersedianya Pengadaan Hardware, Software, Oracle, Database dan Security	Unit	1	150.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penambahan perangkat KTP- el operasional mobile pada pelayanan mobil keliling	Tersedianya Perangkat KTP- el Operasional Mobile pada Pelayanan Mobil Keliling	Unit	1	150.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penambahan perangkat KTP- el operasional reguler di setiap Dinas Kependudukan dan suku cadang KTP-el kelurahan pada pelayanan mobil keliling	Tersedianya Tambahan KTP- el di Setiap Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Unit	1														0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimtek PIAK tingkat Pemula	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PIAK Pemula	Org	36	150.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimtek PIAK tingkat Lanjutan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek PIAK Lanjutan	Org	36	150.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengembangan Aplikasi informasi data kependudukan untuk pelayanan data lintas sektor	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	Paket	1	100.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pembangunan Aplikasi monitoring jaringan pelayanan Adminduk	Jumlah Aplikasi Monitoring yang Dibangun	Paket	1	100.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengembangan Aplikasi informasi Adminduk kependudukan	Jumlah Aplikasi yang Dikembangkan	Paket	1	100.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pengembangan sistem pengelolaan dan Penyajian data statistik kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah Peserta Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Penyajian Data Statistik	Org	36														0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pembangunan atau pengembangan Data Centre	Jumlah Data Centre yang di bangun	Paket	1	135.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Forum Koordinasi OPD Dinas Dukcapil Provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Forum OPD	Org	36	100.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pemeliharaan Aplikasi jaringan SIAK	Tersedianya Aplikasi Jaringan SIAK	Unit	1	100.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	Pengadaan Software, windows server, dan oracle database Aplikasi KTP-el	Jumlah Software yang di Sediakan	Paket	4	52.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Informasi pelayanan dan Peraturan administrasi kependudukan melalui Media Cetak dan elektronik	Jumlah Informasi Pelayanan yang Diterbitkan melalui Media Cetak dan Elektronik	Paket	5	-													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyajian informasi kependudukan dalam bentuk Billboard di kabupaten	Jumlah Informasi Kependudukan dalam Bentuk Billboard yang di Sajikan untuk Kabupaten	Kab	6	50.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pembangunan/pengembangan Data Centre	Jumlah Data Centre yang di bangun	Unit	1	60.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Fasilitasi percepatan pelayanan penerbitan KTP-el, KK, dan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta yang Mengikuti Fasilitas Percepatan Pelayanan Penerbitan KTP-el, KK, dan Akta Pencatatan Sipil	Org	36	75.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Rapat Koordinasi dalam rangka perekaman KTP-el	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dalam rangka perekaman KTP-el			100.000.000,00	1	39.472.000,00											0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terdudanya terbit administrasi kependudukan di Provinsi Sulawesi Barat	%	10	2.055.762.000,00	0	1.664.441.520,00	10	338.486.692,00	10	338.486.692,00	3,00	87.693.905,00	2,00	63.576.500,00		14.590.000,00		128.740.000,00	5,00	294.600.405,00	50,00	87,03	5,00	1.959.041.925,00	50,00	95,30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil			170.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Rapat Koordinasi pencapaian target nasional site kelahiran anak usia 0-18 tahun	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi pencapaian target nasional site kelahiran anak usia 0-18 tahun			220.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi			220.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk																0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil			100.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimbingan Teknis PIKAK	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis PIKAK																0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan			170.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Admnduk (Front Office)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Admnduk (Front Office)			220.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	Tersusunnya Profil Kependudukan Tingkat Provinsi			220.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Penyusunan Buku data kependudukan persemester Tingkat Provinsi	Tersusunnya Buku data kependudukan persemester Tingkat Provinsi																0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Distribusi Blangko KTP-el ke kabupaten/kota	terpenuhinya Pendistribusi Blangko KTP-el ke kabupaten/kota																0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Rakor pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Rakor pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			170.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi			220.000.000,00													0,00	-							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re			
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re										K	Re
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13 = 9+10+11+12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	14 = 13*100	15 = 13*6	15 = 15*100	17				
	Pembinaan Kabupaten/Kota terkait Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya a. terbit administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota		473.187.500,00	473.057.500,00															0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan pencatatan sipil bagi aparatur provinsi/kabupaten/kota	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis provinsi/kabupaten/kota		320.691.000,00	320.691.000,00															0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Facilitasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota	capaian penerbitan KTP- el di Kab/Kota	6	239.420.000,00	239.223.622,00	6	240.125.680,00	6	240.125.680,00	1,00	42.952.805,00	2,00	63.576.500,00	1,00	14.590.000,00	2,00	88.686.000,00	6,00	209.805.305,00	100,00	87,37	6,00	449.028.927,00	100,00	187,55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAK)		231.984.000,00	231.984.000,00										-				-	0,00	-					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Koordinasi dan konsultasi penyenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya a. pelayanan administrasi kependudukan di dalam dan luar provinsi sukawati barat	4	400.479.500,00	399.485.398,00	4	98.361.012,00	4	98.361.012,00	2,00	44.741.100,00	-	-	-	-	2,00	40.054.000,00	4,00	84.795.100,00	100,00	86,21	4,00	484.280.498,00	100,00	120,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																														
	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	Capaian Layanan Administrasi Perkantoran	Persentas e	100	4.398.504.360,00	95	1.137.413.640,00	98	1.278.001.673,00	98	1.155.187.480,00	23,65	189.343.089,00	23,65	336.036.241,00	23,65	300.897.506,00	23,65	267.445.147,00	94,60	1.093.721.983,00	96,53	94,68	94,68	2.231.135.623,00	94,68	50,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang terproses	Surat	10015	225.100.000,00	2500	170.074.000,00	2500	12.000.000,00	2500	6.150.000,00	625,00	1.200.000,00	625,00	2.952.500,00	625,00	1.961.000,00	625,00	-	2500,00	6.113.500,00	100,00	99,41	5000,00	176.187.500,00	49,93	78,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Rekening	120	325.209.676,00	36	53.515.089,00	24	55.000.000,00	36	71.081.660,00	9,00	14.726.521,00	9,00	8.791.944,00	9,00	19.600.191,00	9,00	16.766.247,00	36,00	59.884.903,00	100,00	84,25	72,00	113.399.992,00	60,00	34,87	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memiliki kelengkapan STNK	Unit	130	122.590.000,00	25	8.465.150,00	26	25.000.000,00	25	11.780.000,00	-	5,00	4.600.000,00	1.444.500,00	-	5,00	6.044.500,00	20,00	51,31	30,00	14.509.650,00	23,08	11,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga pembersih yang mendukung terlaksananya kebersihan kantor	Orang	20	307.055.000,00	18	58.909.000,00	4	7.600.000,00	18	7.600.000,00	3,00	3.255.000,00	3,00	1.547.000,00	2.770.000,00	-	6,00	7.572.000,00	33,33	99,63	24,00	66.481.000,00	120,00	21,65	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang didukung	Jenis	165	325.000.000,00	33	78.205.700,00	33	55.000.000,00	33	69.400.100,00	9,00	14.999.000,00	8,00	9.778.000,00	44.510.000,00	-	113.000,00	17,00	69.400.000,00	51,52	100,00	50,00	147.605.700,00	30,30	45,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah belanja cetak dan penggandaan	Jenis	15	110.000.000,00	4	69.320.000,00	3	35.000.000,00	4	33.000.000,00	-	1.500.000,00	-	165.000,00	30.575.000,00	-	760.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	100,00	4,00	102.320.000,00	26,67	93,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan & peraturan perundang- undangan	Jenis	12	42.000.000,00			3	200.000.000,00	3	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pelaksanaan rapat	Kali	120	329.000.000,00	24	94.516.500,00	24	75.000.000,00	24	87.120.000,00	6,00	26.575.778,00	6,00	29.306.500,00	13.284.000,00	-	17.944.700,00	12,00	87.110.978,00	50,00	99,99	36,00	181.627.478,00	30,00	55,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Luar Daerah	Kali	185	1.240.199.376,00	22	329.661.143,00	37	250.000.000,00	22	183.044.000,00	7,00	89.315.350,00	3,00	35.543.297,00	30.729.960,00	-	27.336.200,00	10,00	182.924.807,00	45,45	99,93	32,00	512.585.950,00	17,30	41,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	Kali	325	837.350.308,00	69	274.747.058,00	50	125.201.673,00	69	135.681.500,00	18,00	36.571.440,00	15,00	31.522.000,00	66.622.855,00	-	925.000,00	33,00	135.641.295,00	47,83	99,97	102,00	410.388.353,00	31,38	49,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Jumlah media yang akan menjadi mitra layanan informasi	Media	2	25.000.000,00	0	-	4	35.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah tenaga Administrasi yang dihonor	Orang	84	510.000.000,00			28	403.200.000,00	35	550.330.220,00	1,00	1.200.000,00	35,00	211.830.000,00	89.400.000,00	-	203.600.000,00	36,00	506.030.000,00	102,86	91,95	36,00	506.030.000,00	42,86	99,22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
						Rata-rata capaian kinerja (%)						16,39			29,09												Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
						Predikat Kinerja						-			-			-									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentas e	100	1.515.184.016,00	97	474.227.163,00	100	788.400.000,00	100	529.080.000,00	22,50	47.328.095,00	22,50	77.666.959,00	22,50	366.992.237,00	22,50	26.545.000,00	90,00	518.532.291,00	90,00	98,01	93,61	992.759.454,00	98,01	690,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah jenis pekerjaan yang dilaksanakan	Unit						20.000.000,00		-	-	-					0,00		0,00		-				-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang akan didukung	Unit					3	210.000.000,00		-	-	-					0,00		0,00		-				-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang akan didukung	Jenis	21	187.500.000,00			4	125.000.000,00	29	-	-	-	-	-	-	-	0,00		-	0,00		0,00		-		-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV					K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		K	Re	K	Re						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang akan didaftarkan	Jenis	15	102.634.472,00	24	229.480.900,00	4	70.000.000,00	24	129.090.000,00	-	-	104.350.000,00	23.155.000,00	0,00	127.505.000,00	0,00	98,77	24,00	356.985.900,00	98,77	347,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yg terpelihara	Unit	5	182.340.000,00	1	36.659.578,00	1	45.000.000,00	1	51.670.000,00	1,00	11.478.095,00	31.508.987,00	8.586.339,00	-	1,00	51.573.421,00	100,00	99,81	2,00	88.232.999,00	99,81	48,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yg terpelihara	Unit	122	795.125.037,00	24	171.711.685,00	23	200.000.000,00	24	101.710.000,00	6,00	24.860.000,00	8,00	37.497.972,00	8,00	37.841.300,00	2,00	1.450.000,00	24,00	101.649.272,00	100,00	99,94	48,00	273.360.957,00	99,94	34,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yg terpelihara	Jenis	20	40.474.507,00			4	7.000.000,00	10	6.100.000,00	-	10,00	6.000.000,00	-	-	10,00	6.000.000,00	100,00	98,36	10,00	6.000.000,00	98,36	14,82	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yg terpelihara	Jenis	20	77.110.000,00	53	36.375.000,00	4	36.400.000,00	53	37.930.000,00	13,25	10.990.000,00	8,00	2.660.000,00	32,00	24.210.000,00	-	53,25	37.860.000,00	100,47	99,82	106,25	74.235.000,00	99,82	96,27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah ruangan yang direhab	Ruang	5	130.000.000,00			5	75.000.000,00	9	202.580.000,00	-	-	9,00	192.004.598,00	1.940.000,00	9,00	193.944.598,00	100,00	95,74	9,00	193.944.598,00	95,74	149,19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
						Rata-rata capaian kinerja (%)						8,95		14,68		-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
						Predikat Kinerja						-	-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparat	Persentase	100	406.604.370,00	100	90.935.000,00	100	93.040.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	100,00	90.935.000,00	100,00	22,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian yang akan didaftarkan	Jenis	14	406.604.370,00	2	90.935.000,00	3	93.040.000,00	2	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	2,00	90.935.000,00	14,29	22,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparat	Persentase	99	75.252.625,00	34	8.531.000,00	85	130.000.000,00	85	15.842.000,00	-	85,00	13.076.700,00	-	2.750.000,00	85,00	15.826.700,00	100,00	99,90	59,56	24.357.700,00	60,47	32,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pelaksanaan kursus yang diikuti	Kali	30	75.252.625,00	8	8.531.000,00	7	75.000.000,00	1	15.842.000,00	-	1,00	13.076.700,00	-	2.750.000,00	1,00	15.826.700,00	100,00	99,90	9,00	24.357.700,00	30,00	32,37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	Peningkatan Kapasitas Aparatur lingkup PMD Provinsi	Jumlah peserta yang dibimtek	Orang	0	-	0	-	56	55.000.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
						Rata-rata capaian kinerja (%)						-		82,54		-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
						Predikat Kinerja						-	-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM LAPORAN DAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Kecepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase	98	177.985.012,00	90	245.026.300,00	98	170.814.327,00	98	34.902.200,00	24,50	10.542.000,00	24,50	6.334.000,00	24,50	7.941.800,00	24,50	10.023.000,00	98,00	34.840.800,00	100,00	99,82	93,86	279.867.100,00	95,61	157,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan	Laporan	10	16.964.097,00	3	81.894.200,00	3 Laporan	5.500.000,00	3	2.622.800,00	-	-	-	3,00	2.622.800,00	-	3,00	2.622.800,00	100,00	100,00	6,00	84.517.000,00	60,00	498,21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan semesteran	Laporan	8	13.500.000,00	2	3.934.500,00	2	4.016.000,00	2	1.843.800,00	-	-	-	-	-	2,00	1.833.000,00	2,00	1.833.000,00	100,00	99,41	4,00	5.767.500,00	50,00	42,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis						4	3.500.000,00										0,00		0,00	-	-	0,00	-			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan pelaksanaan	Laporan	10	16.720.915,00	2	3.350.000,00	2	3.545.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	2,00	3.350.000,00	20,00	20,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	Jumlah dokumen	Dokumen	17	15.000.000,00	4		4	4.500.000,00	4	13.522.000,00	2,00	8.762.000,00	-	1,00	3.760.000,00	1,00	1.000.000,00	4,00	13.522.000,00	100,00	100,00	8,00	13.522.000,00	47,06	90,15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	10	19.500.000,00	2	126.731.500,00	2	30.034.900,00	2	8.676.800,00	0,50	1.780.000,00	1,00	6.334.000,00		559.000,00		-	1,50	8.673.000,00	75,00	99,96	3,50	135.404.500,00	35,00	694,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Penyusunan RKA-PIDPP-SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	10	19.500.000,00	2	29.116.100,00	2	29.943.900,00	2	8.236.800,00	-	-	-	1,00	1.000.000,00	1,00	7.190.000,00	2,00	8.190.000,00	100,00	99,43	4,00	37.306.100,00	40,00	191,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah pelaksanaan monv	Kali	4	45.000.000,00	0	-	4	38.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah dokumen yang tersedia	Dokumen	1	1.800.000,00	0	-		1.774.527,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Forum Group Discussion (FGD) DPMD	Jumlah pelaksanaan FGD	Kali	4	30.000.000,00	0	-	4	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
						Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	30,20		18,15		-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
						Predikat Kinerja						0,00	-	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Desa	575	2.265.000.000,00	142	2.564.898.270,00	70	4.016.244.000,00	70	3.211.056.970,00	0,00	50.136.300,00	45,00	474.600.600,00	25,00	360.576.500,00	120,00	2.287.519.934,00	190,00	3.172.833.334,00	271,43	98,81	332,00	5.737.731.604,00	57,74	253,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan BBGRM	Orang	330	525.000.000,00	330	818.290.498,00	330	275.500.000,00	330	362.772.370,00	-	-	-	-	-	330,00	362.772.200,00	330,00	362.772.200,00	100,00	100,00	660,00	1.181.062.698,00	200,00	224,96	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Gelar Karya dan Temu Kader PKK (JAMBORE) Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan gelar karya	Orang	638	570.000.000,00	150	511.653.252,00	102	175.000.000,00	150	700.000.000,00	-	-	-	-	-	150,00	685.545.600,00	150,00	685.545.600,00	100,00	97,94	300,00	1.197.198.852,00	47,02	210,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Rapat Konsultasi (Rakon) PKK Tingkat Pusat dan Provinsi	Jumlah kader PKK yang mengikuti RAKON Tk. Pusat dan Tk. Provinsi	Orang	210	450.000.000,00	51	175.637.300,00	42	175.000.000,00	51	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	51,00	175.637.300,00	24,29	39,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	TOT Teknis Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pelatih yang terlatih	Orang	75	20.000.000,00	0	-	138	135.000.000,00									0,00		0,00	-	-	0,00	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis KAPMDan	Kali	16	170.000.000,00	3	142.877.000,00	2	125.000.000,00	3	32.926.300,00	0,75	32.926.300,00	-	-	-	-	0,75	32.926.300,00	25,00	100,00	3,75	175.803.300,00	23,44	103,41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Pembinaan dan Pengembangan Desa LABSITE	Jumlah Desa Pilot LABSITE	Desa	2	50.000.000,00	0	-	12	110.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	TOT Teknis pengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Air bersih berbasis masyarakat	Jumlah pelatih yang dapat melatih pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air	Orang	30	50.000.000,00	0	-	30	120.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jambore Pendamping	Jumlah pendamping profesional yang mengikuti jambore	Orang	400	50.000.000,00	0	-	360	255.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Dukungan Pelaksanaan Program marasa	Jumlah Tim Pelaksanaan Program Marasa Tk.Prov dan Tk.Kab. yang dibayar	Tim	7	200.000.000,00	7	630.674.200,00	7	2.280.744.000,00	7	1.946.992.100,00		17.210.000,00		427.779.000,00		294.076.500,00	7,00	1.185.662.534,00	7,00	1.924.728.034,00	100,00	98,86	7,00	2.555.402.234,00	100,00	1.277,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Marasa Tk.Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Program Marasa Tk. Provinsi	Kali	7	80.000.000,00	2	285.766.020,00	2	185.000.000,00	2	53.539.600,00	-	-	-	-	-	1,00	53.539.600,00	1,00	53.539.600,00	50,00	100,00	3,00	339.305.620,00	42,86	424,13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program MARASA	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK dan Sosialisasi	orang	918	100.000.000,00			364	180.000.000,00	258	114.826.600,00	-		46.821.600,00	250,00	66.500.000,00		-	250,00	113.321.600,00	96,90	98,69	250,00	113.321.600,00	27,23	113,32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Rata-rata capaian kinerja (%)						1,56		14,78		-		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Predikat Kinerja										-		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN	Cakupan kelompok bisnis lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa	Kelompok	122	1.673.400.000,00	45	202.800.200,00	15	630.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	45,00	202.800.200,00	36,89	12,12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah pengelola BUMDes yang terlatih	Orang	160	533.400.000,00		202.800.200,00												0,00	-	0,00	-	0,00	202.800.200,00	0,00	38,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	TOT Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES/BUMDESA	Jumlah pelatih pengelola BUMDes yang terlatih	Orang	180	820.000.000,00	50	-	138	135.000.000,00	50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	50,00	-	27,78	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Gebyar Inovasi Desa	Jumlah event yang terlaksana	Kali	23	170.000.000,00	0	-	1	250.000.000,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Percepatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Syariah	Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan	Kelompok	45	150.000.000,00	0	-	100	245.000.000,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Rata-rata capaian kinerja (%)										-		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Predikat Kinerja										-		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Cakupan aparat pemerintah desa yang memiliki kompetensi	Persen	100	775.000.000,00	-		730.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	TOT Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah pelatih yang terlatih	Orang	69	300.000.000,00	0	-	138	245.000.000,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah						
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K	Re	K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
	TOT Pendayagunaan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel.	Jumlah pelatih yang terlatih dalam penyusunan data profil Desa dan Kelurahan; Jumlah Aplikasi yang dibuat	Orang	69	300.000.000,00	0	-	138	220.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Pembuatan Aplikasi Pendamping Data Desa	Jumlah aplikasi yg dibuat	Unit	0	-	0	-	1	110.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Jambore Aparatur Desa	Jumlah Kepala Desa yang mengikuti jambore	Orang	575	175.000.000,00	0	-	575	155.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	PROGRAM PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA	Persentase desa yang mengalami perkembangan	Persentase	33	2.725.000.000,00	24	678.061.635,00	29,39	540.000.000,00	29	511.556.200,00	-	9,80	293.844.910,00	9,79	101.761.758,00	9,80	115.465.000,00	29,39	511.071.668,00	100,00	99,91	29,39	1.189.133.303,00	99,91	43,64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Monitoring Evaluasi Pembinaan dan Penguasaan Akuntabilitas Desa Tingkat Provinsi	Jumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan money	Desa	290	1.400.000.000,00	36	337.330.740,00	58	130.000.000,00	36	154.996.680,00	-	16,00	81.908.000,00	12,00	37.094.000,00	8,00	35.675.000,00	36,00	154.677.000,00	100,00	99,79	72,00	492.007.740,00	99,79	35,14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Penyenggaraan Perforaiaan Desa dan Dukungan Penyelenggaraan Dekan Jember (PNN) Desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba	Desa	24	925.000.000,00	6	-	6	235.000.000,00	6	14.762.000,00	-	-	13.134.600,00	-	-	-	1.600.000,00	0,00	14.734.600,00	0,00	99,81	6,00	14.734.600,00	99,81	1,59	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Marasa	Jumlah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan money	Desa	575	400.000.000,00	36	340.730.895,00	180	175.000.000,00	36	341.797.520,00	-	18,00	198.802.310,00	8,00	64.667.758,00	10,00	78.190.000,00	36,00	341.660.068,00	100,00	99,96	72,00	682.390.963,00	99,96	170,60	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
						Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	-	57,44	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
						Predikat Kinerja						0,00	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	PROGRAM PELAYANAN SOSIAL DASAR MASYARAKAT PERDESAAN	Persentase Posyandu aktif	Persentase	100	1.383.000.000,00	65	138.022.600,00	92	490.000.000,00	92	17.322.000,00	0,00	-	92,00	15.536.200,00	-	-	1.700.000,00	92,00	17.236.200,00	100,00	99,50	78,50	155.258.800,00	99,50	23,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Lomba Posyandu	Jumlah posyandu yang akan mengikuti pelaksanaan lomba	Posyandu/ Kab.	30	663.000.000,00	6	138.022.600,00	6	125.000.000,00	6	17.322.000,00	-	-	15.536.200,00	-	-	-	1.700.000,00	0,00	17.236.200,00	0,00	99,50	6,00	155.258.800,00	99,50	23,42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Rakor Polkonal Posyandu	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan rakor	Orang	572	570.000.000,00	0	-	118	115.000.000,00	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	TOT Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	Jumlah pelatih kader posyandu	Orang	69	100.000.000,00	0	-	138	140.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Pembinaan Layanan Sosial Dasar dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	30	50.000.000,00	0	-	30	110.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
						Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	-	89,69	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
						Predikat Kinerja						0,00	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT, NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	Persentase jumlah lembaga adat yang aktif	Lembaga Adat	55	200.000.000,00	-	-	-	207.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Dukungan Pengembangan Seni dan Budaya di perdesaan	Jumlah kelompok kesenian budaya di perdesaan yang	Kelompok	4	200.000.000,00	0	-	6	117.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Survey/Pemetaan Lembaga Adat	Jumlah kegiatan survey lembaga adat	Kali	0	-	0	-	1	90.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
						Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	2.421.900,00									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
						Predikat Kinerja						0,00	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Cakupan sarana prasarana desa yang baik	Persentase	10	332.000.000,00	-	-	-	125.500.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	TOT Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa	Jumlah peserta pengelola pasar desa yang diatih	Orang	69	332.000.000,00	0	-	60	125.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
						Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1.138.169.801,00	-	-	2.724.639.604,00									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
						Predikat Kinerja						0,00	-	-	-	-	-	-	-								Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	Pencapaian dan pemerataan pembangunan desa dalam kawasan perdesaan	Kawasan Perdesaan	19	420.000.000,00	5	-	12	345.000.000,00	12	41.876.000,00	-	3,00	30.768.400,00	-	-	-	10.769.623,00	3,00	41.538.023,00	25,00	99,19	8,00	41.538.023,00	99,19	15,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	Orang	125	270.000.000,00	0	-	271	220.000.000,00	104	41.876.000,00	-	-	30.768.400,00	-	-	-	10.769.623,00	0,00	41.538.023,00	0,00	99,19	0,00	41.538.023,00	99,19	15,38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
												I		II		III		IV											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13*6	16 = 15*100	17													
	Rapat Kerja Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama)	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Kerja	Orang	55	150.000.000,00	0	-	51	125.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	-			73,48		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
						Predikat Kinerja						0,00	-			-		-										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	PROGRAM INOVASI DAN PROMOSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasi	Persentase	42	980.000.000,00	16	336.506.171,00	8	456.000.000,00	8	32.530.000,00	8,00	30.108.100,00			-				2.421.900,00	8,00	32.530.000,00	100,00	100,00	24,00	369.036.171,00	57,14	37,66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pelatihan TTG Produk Unggulan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Orang	165	580.000.000,00		336.506.171,00	30	140.000.000,00											0,00	-	0,00	-	0,00		336.506.171,00	0,00	58,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Promosi/Inovasi/Galeri Teknologi Tepat Guna Perdesaan Tk. Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Nasional	Kali	1	300.000.000,00	1		1	211.000.000,00	1	32.530.000,00		30.108.100,00			-				2.421.900,00	0,00	32.530.000,00	0,00	100,00	1,00	32.530.000,00	100,00	10,84	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pemetaan Kebutuhan Teknologi Tepat Guna	Jumlah dokumen hasil pemetaan	Dokumen	50	100.000.000,00	0	-	6	105.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
DINAS PERHUBUNGAN																													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			8.930.077,00		2.006.600,67		1.254.892,67		703.913,97		97.685,88		314.848,76		187.231,95		214.415,17									Dinas Perhubungan	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa tenaga pendukung surat menyurat	Org/Bln	540	165.439,50	216	176.102,00	108	81.180,00	108	62.487,00	0,72	450,00	64,08	33.365,00	32,40	20.400,00	10,80	27.022,00	108,00	81.237,00	100,00	130,01	324,00	257.339,00	60,00	155,55	Dinas Perhubungan	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rek. listrik dan jaringan internet yang disediakan	Rekening	120	936.450,00	48	93.589,73	24	98.000,00	24	42.076,00	3,07	12.921,20	16,13	17.716,16	0,00	400,00	4,80	-	24,00	31.037,35	100,00	73,76	72,00	124.627,08	60,00	13,31	Dinas Perhubungan	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa tenaga pendukung kebersihan kantor	Org/Bln	180	390.187,50	72	131.151,00	36	70.709,10	36	65.200,00	0,07	4.800,00	17,93	21.514,00	7,20	18.595,50	10,80	25.083,00	36,00	69.992,50	100,00	107,35	108,00	201.143,50	60,00	51,55	Dinas Perhubungan	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis	150	338.162,50	60	123.829,60	30	64.833,56	30	30.119,90	1,65	4.992,92	23,85	19.593,68	4,20	5.171,00	0,30	18.251,68	30,00	48.009,28	100,00	159,39	90,00	171.838,88	60,00	50,82	Dinas Perhubungan	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja cetak, penggandaan dan pencetakan	Jenis	45	338.162,50	18	64.942,10	9	36.750,00	6	21.999,60	0,06	1.250,00	2,94	8.510,00	1,50	6.275,00	1,50	5.964,60	6,00	21.999,60	100,00	100,00	24,00	86.941,70	53,33	25,71	Dinas Perhubungan	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	Jenis	35	26.012,50	0	-	7	5.250,00	6	5.413,40	0,00	-	0,00	-	1,20	931,00	4,80	3.800,00	6,00	4.731,00	100,00	87,39	6,00	4.731,00	17,14	18,19	Dinas Perhubungan	
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	20	510.000,00	0	-	4	53.246,84	0	-	0,00	-	0,00	-				-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis obyek belanja peralatan rumah tangga	Jenis	15	197.695,00	8	46.050,00	3	29.400,00	2	10.000,00	0,00	-	0,02	60,00	1,90	9.472,00	0,08	468,00	2,00	10.000,00	100,00	100,00	10,25	56.050,00	68,33	28,35	Dinas Perhubungan	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	300	322.555,00	120	39.220,00	60	39.900,00	60	5.016,00	0,00	-	0,00	-				-	0,00	-	0,00	-	120,00	39.220,00	40,00	12,16	Dinas Perhubungan	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Kali	240	442.212,50	96	158.822,00	48	91.630,00	48	81.921,27	0,06	4.800,00	16,74	19.573,00	14,40	26.905,00	16,80	30.173,00	48,00	81.451,00	100,00	99,43	144,00	240.273,00	60,00	54,33	Dinas Perhubungan	
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Kali	450	2.040.000,00	180	790.672,26	90	399.550,00	90	246.994,29	0,17	40.890,19	71,83	138.407,58	13,50	52.732,45	4,50	35.252,89	90,00	267.283,11	100,00	108,21	270,00	1.057.955,36	60,00	51,86	Dinas Perhubungan	
20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	Kali	750	1.020.000,00	300	382.221,99	150	200.000,00	150	132.686,51	0,20	27.581,58	97,30	56.109,34	45,00	46.350,00	7,50	68.400,00	150,00	198.440,92	100,00	149,56	450,00	580.662,91	60,00	56,93	Dinas Perhubungan	
26	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Tenaga Administrasi	Jumlah Jasa Tenaga Pendukung/ Administrasi	Kali	600	2.203.200,00	0	-	120	84.443,17		-	-	0,00	-						0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperuhnya sarana dan prasarana aparatur dalam upaya peningkatan kinerja dan sistem layanan oleh			3.655.000,00		789.259,87		411.497,64		245.022,00		9.096,20		137.252,88		55.498,37		34.107,82									Dinas Perhubungan	
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersebutnya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	12	1.160.000,00	3	49.040,00	1	35.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-					0,00	-	0,00	-	3,00	49.040,00	25,00	4,23	Dinas Perhubungan	
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terperuhnya area perlengkapan	Unit	5	170.000,00	0	-	1	20.000,00	4	13.062,00	0,00	-	4,00	12.747,20		-		3.909,82	4,00	16.657,02	100,00	127,52	4,00	16.657,02	80,00	9,80	Dinas Perhubungan	
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terperuhnya salah satu sarana peralatan kantor	Unit	15	150.000,00	2	175.355,70	3	15.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-					0,00	-	0,00	-	2,00	175.355,70	13,33	116,90	Dinas Perhubungan	
10	Pengadaan Mebeleur	Terperuhnya meubel kantor	Unit	3	225.000,00	0	-	0	21.963,64	22	49.862,00	0,00	-	22,00	49.196,00		-			22,00	49.196,00	100,00	98,66	22,00	49.196,00	733,33	21,86	Dinas Perhubungan	
11	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer dan Kelengkapannya	Terperuhnya Komputer/Jaringan Komputer dan Kelengkapannya	Unit	15	300.000,00	20	106.761,70	2	60.984,00	8	34.206,00	0,00	-	8,00	31.540,00		-			8,00	31.540,00	100,00	92,21	28,00	138.321,70	186,67	46,11	Dinas Perhubungan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah						
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K	Re	K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17																		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket	5	500.000,00	2	217.255,00	1	100.000,00	1	42.056,00	0,00	-	0,00	-	0,85	34.298,89	0,15	-	1,00	34.298,89	100,00	81,56	3,00	251.553,89	60,00	50,31	Dinas Perhubungan						
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Unit	129	600.000,00	58	205.727,47	27	123.550,00	10	90.840,00	0,10	9.096,20	5,90	37.429,68	1,50	16.749,48	2,50	26.298,00	10,00	89.573,36	100,00	98,61	68,00	295.300,83	52,71	49,22	Dinas Perhubungan						
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Unit	10	250.000,00	4	35.100,00	2	15.000,00	2	14.996,00	0,00	-	1,00	6.340,00	0,40	4.450,00	0,60	3.900,00	2,00	14.690,00	100,00	97,96	6,00	49.790,00	60,00	19,92	Dinas Perhubungan						
42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	2	300.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan						
xx	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan gedung kantor	Unit	2	750.000,00	0	-	1	20.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya perlengkapan kantor/dinas dalam upaya peningkatan disiplin aparatur			927.000,00				181.704,79		76.016,00	-		69.815,50	-		-	-	-									Dinas Perhubungan						
02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas penglengkapannya a yang tersedia	Pasang	445	309.000,00	0	-	180	120.000,00	94	76.016,00	0,00	-	94,00	69.815,50	-	-	-	-	94,00	69.815,50	100,00	91,84	94,00	69.815,50	21,12	22,59	Dinas Perhubungan						
05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Jumlah jenis pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Pasang	890	618.000,00	180	100.525,10	90	61.704,79	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	180,00	100.525,10	20,22	16,27	Dinas Perhubungan						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM aparatur melalui pelatihan, pendidikan dan bimbingan teknis terciptanya SDM yang berintegritas, Professional dan berprestasi			2.150.000,00				222.683,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									Dinas Perhubungan						
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	200	300.000,00	0	-	40	30.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan						
07	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keuangan dan Kinerja Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis keuangan dan kinerja aparatur	Orang	200	450.000,00	12	88.438,80	40	90.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	12,00	88.438,80	6,00	19,65	Dinas Perhubungan						
08	Peningkatan Kompetensi tentang Tugas Pokok Kepegawain	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi	Orang	400	900.000,00	0	-	80	50.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan						
28	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Perhubungan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang perhubungan	Orang	12	500.000,00	0	-	2	52.683,83	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan			1.271.105,00				199.826,09		231.392,80	9.420,80		50.501,44		56.118,00			75.961,00									Dinas Perhubungan						
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Laporan	60	234.261,50	29	77.652,00	12	43.888,09	12	36.125,20	0,00	-	6,00	14.900,00	3,00	11.500,00	3,00	16.925,20	12,00	43.325,20	100,00	119,93	41,00	120.977,20	68,33	51,64	Dinas Perhubungan						
05	Penyusunan RENSTRA/Renja LAKIP dan LPPD yang disusun	Jumlah laporan RENSTRA/Renja LAKIP dan LPPD yang disusun	Dokumen	15	325.655,00	8	102.626,00	3	72.470,00	3	59.779,20	0,08	5.080,00	0,82	9.660,00	1,05	21.346,00	1,05	21.219,00	3,00	57.305,00	100,00	95,86	11,00	159.931,00	73,33	49,11	Dinas Perhubungan						
06	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Jumlah Laporan RKA/DPA SKPD yang disusun	Dokumen	10	31.515,00	4	11.855,00	2	6.468,00	2	6.230,80	1,50	4.340,80	0,00	-	-	0,50	1.800,00	2,00	6.140,80	100,00	98,56	6,00	17.995,80	60,00	57,10	Dinas Perhubungan							
06	Penyusunan RKA-P/DPPA- SKPD	Jumlah Laporan RKA-P/DPPA- SKPD yang disusun	Dokumen	10	31.515,00	0	-	0	-	2	5.790,80	0,00	-	0,00	-	-	2,00	5.785,80	2,00	5.785,80	100,00	99,91	2,00	5.785,80	20,00	18,36	Dinas Perhubungan							
09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah pelaporan internal/eksternal	Laporan	20	380.281,00	7	126.177,85	4	77.000,00	4	123.466,80	0,00	-	1,20	25.941,44	0,40	23.272,00	2,40	30.231,00	4,00	79.444,44	100,00	64,34	11,00	205.622,29	55,00	54,07	Dinas Perhubungan						
xx	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	Laporan	20	105.050,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan						
xx	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun	Laporan	20	162.827,50	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17												
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana penunjang transportasi yang dapat memberikan dukungan bagi perekonomian daerah yang berkelanjutan (Sustainable Growth)		16.536.022,63		3.580.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan	
01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	Dokumen	2	796.022,63	4	619.630,11	0	500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	4,00	619.630,11	200,00	77,84	-	Dinas Perhubungan
09	Penyusunan Masterplan Bandar Udara Pasangkayu	Jumlah dokumen masterplan pembangunan bandar udara	Dokumen	1	750.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
37	Penyusunan Studi Pembangunan Terminal Angkutan Darat	Jumlah dokumen studi pembangunan terminal angkutan darat	Dokumen	3	1.080.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
39	Penyusunan Masterplan Pembangunan Bandar Udara Polewali Mandar	Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Bandar Udara Polewali Mandar	Dokumen	1	1.500.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
40	Penyusunan Study Pembangunan Pelabuhan Perseberangan Mamuju	Jumlah Dokumen Study Pembangunan Pelabuhan Perseberangan Mamuju	Dokumen	3	2.540.000,00	1	296.629,20		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	296.629,20	33,33	11,68	-	Dinas Perhubungan
41	Penyusunan Masterplan Pembangunan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Terminal Angkutan Darat	Dokumen	1	540.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
42	Penyusunan DED Pembangunan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Terminal Angkutan Darat	Dokumen	1	540.000,00	0	-	1	540.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
43	Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Terminal Angkutan Darat	Dokumen	1	540.000,00	0	-	1	540.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
44	Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan	Jumlah Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan	Dokumen	1	750.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
45	Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan	Jumlah Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Pelabuhan	Dokumen	1	750.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
46	Penyusunan Masterplan Pembangunan Pelabuhan	Jumlah Dokumen Masterplan Pembangunan Pelabuhan	Dokumen	1	750.000,00	0	-	1	750.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
47	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Pelabuhan	Dokumen	1	750.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
48	Penyusunan DED Pembangunan Bandar Udara Polewali Mandar	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Bandar Udara Polewali Mandar	Dokumen	1	750.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
49	Penyusunan DED Pembangunan Bandar Udara Mamuju Utara	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Bandar Udara Mamuju Utara	Dokumen	1	750.000,00	0	-	1	750.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
50	Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Polewali Mandar	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Polewali Mandar	Dokumen	1	1.500.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
51	Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Mamuju Utara	Tersedianya Dokumen Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Bandar Udara Mamuju Utara	Dokumen	1	750.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
52	Study Kelayakan Pembangunan Dermaga Sungai	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Dermaga Sungai	Dokumen	1	500.000,00	0	-	1	500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan
53	Kajian Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Lingkungan Pembangunan Dermaga Sungai	Dokumen	1	500.000,00	0	-		0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	9	Re	K	10	Re	K	11	Re	K									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
54	Penyusunan DED Pembangunan Dermaga Sungai	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Dermaga Sungai	Dokumen	1	500.000,00	0	-		0	-	0,00	-	0,00	-					0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Arus Pergerakan Jumlah awak kendaraan umum teladan/penguji kendaraan bermotor yang mendapat penghargaan						1.073.433,50	465.426,60	35.310,15	149.250,60	100.453,00	178.131,00														Dinas Perhubungan			
23	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraan Umum Teladan/Penguji Kendaraan Bermotor	Jumlah awak kendaraan umum teladan/penguji kendaraan bermotor yang mendapat penghargaan	Orang	10	350.000,00	0	-	2	70.000,00	0	0,00	-	0,00	-					0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
25	Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut, Nelay, dan Tahun Baru	Jumlah pengamanan arus mudik dan balik Lebaran, nelay dan tahun baru yang dilaksanakan	Posko	15	350.000,00	4	136.076,00	3	100.000,00	3	69.999,00	0,00	-	0,00	-	0,00	3,00	69.799,00	3,00	69.799,00	100,00	99,71	7,00	205.875,00	46,67	58,82	Dinas Perhubungan			
33	Pembinaan Pengusaha Jasa Transportasi Laut	Terselenggaranya kegiatan Pembinaan	Pengusaha	30	400.000,00	7	41.656,00	6	150.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-			-	0,00	-	0,00	-	6,98	41.656,00	23,27	10,41	Dinas Perhubungan			
35	Forum SKPD Dishub Se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Forum SKPD Dishub se-Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan	Kegiatan	5	300.000,00	1	27.496,00	1	40.000,00	1	24.962,80	1,00	19.702,80	0,00	-	-			-	1,00	19.702,80	100,00	78,93	2,00	47.198,80	40,00	15,73	Dinas Perhubungan		
36	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat	Jumlah rapat koordinasi teknis bidang perhubungan darat	Kali	20	80.000,00	20	64.346,66	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	5.810,00			-	0,00	5.810,00	0,00	-	20,00	70.156,66	100,00	87,70	Dinas Perhubungan		
38	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan KASP	Jumlah rapat koordinasi teknis bidang perhubungan KASP	Kali	20	80.000,00	20	66.603,22		0	-	0,00	-	0,00	-	20.422,00			456,00	0,00	20.878,00	0,00	-	20,00	87.481,22	100,00	109,35	Dinas Perhubungan			
39	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Laut dan Udara	Jumlah rapat koordinasi teknis bidang perhubungan laut dan udara yang terkoordinir	Kali	20	80.000,00	20	68.284,99		0	-	0,00	-	0,00	-	16.421,00			10.700,00	0,00	27.121,00	0,00	-	20,00	95.405,99	100,00	119,26	Dinas Perhubungan			
41	Pemilihan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah kabupaten yang mengikuti pemilihan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Kabupaten	30	300.000,00	0	-	6	60.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
42	Pembinaan dan Pengembangan SDM Bid. Perhubungan	Tersedianya SDM yang berkualitas bidang perhubungan	Orang	10	250.000,00	5	70.419,00	2	50.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-			-	0,00	-	0,00	-	5,00	70.419,00	50,00	28,17	Dinas Perhubungan			
43	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan	Terselenggaranya rapat-rapat teknis bidang perhubungan	Kegiatan	160	280.000,00	0	-	1	40.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-			-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan			
47	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terselenggaranya a Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Kali	80	320.000,00	20	61.361,42	20	87.736,00	20	56.280,00	0,01	5.100,00	16,00	37.168,20	1,99	-	2,00	-	20,00	42.268,20	100,00	75,10	40,00	103.629,62	50,00	32,38	Dinas Perhubungan		
xx	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pelayaran	Terselenggaranya a Rapat Koordinasi Angkutan Perintis dan Tol Laut	Kali	80	320.000,00	20	76.418,63	20	87.697,50	20	56.040,00	0,18	10.507,35	7,82	7.266,00	6,00	-	6,00	-	20,00	17.773,35	100,00	31,72	40,00	94.191,99	50,00	29,43	Dinas Perhubungan		
49	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Pengembangan Transportasi, Kebudayaan dan Perkeresapan	Terselenggaranya a Rapat Koordinasi Kerjasama Pembangunan Bandar Udara Pelawai Mandiri	Kali	80	320.000,00	20	74.696,72	20	88.000,00	20	56.650,00	0,00	-	5,00	12.518,40	7,00	-	8,00	-	20,00	12.518,40	100,00	22,10	40,00	87.215,12	50,00	27,25	Dinas Perhubungan		
55	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. I	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan rutin dan produktivitas kerja UPTD LLAU Wilayah I	Bulan	60	350.000,00	12	69.604,00	1	100.000,00	12	73.765,60	0,00	-	5,40	31.250,00	3,00	18.750,00	3,60	38.625,00	12,00	88.625,00	100,00	120,14	24,00	158.229,00	40,00	45,21	Dinas Perhubungan		
56	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. II	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan rutin dan produktivitas kerja UPTD LLAU Wilayah II	Bulan	60	350.000,00	12	23.914,00	1	100.000,00	12	79.109,40	0,00	-	6,60	38.658,00	3,00	22.500,00	2,40	38.297,00	12,00	100.455,00	100,00	126,98	24,00	124.369,00	40,00	35,53	Dinas Perhubungan		
57	Pembinaan dan Pengembangan Suber Daya Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Wil. III	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan rutin dan Produktivitas kerja UPTD LLAU Wilayah	Bulan	60	250.000,00	12	33.187,50	1	100.000,00	12	48.619,80	0,00	-	6,00	21.390,00	3,60	16.550,00	2,40	20.254,00	12,00	58.194,00	100,00	119,69	24,00	91.381,50	40,00	36,55	Dinas Perhubungan		
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan			19.378.926,63			2.000.000,00	5.500,00	5.220,00								-									Dinas Perhubungan			
15	Pembangunan Terminal Tipe B	Jumlah terminal type B yang terbangun	Unit	4	7.795.447,34	2	1.573.738,94	1	2.000.000,00	1	5.500,00	1,00	5.220,00	0,00	-	-			-	1,00	5.220,00	100,00	94,91	3,00	1.578.958,94	75,00	20,25	Dinas Perhubungan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17													
16	Peningkatan Prasarana Pembangunan Fasilitas Transportasi	Jumlah fasilitas transportasi yang dibangun	Unit	1	5.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
17	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Budong-Budong	Jalan akses pelabuhan Budong-budong yang dibangun	Kegiatan	1	1.500.000,00	0	-	2	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
18	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Pasangkayu	Jalan akses pelabuhan Pasangkayu yang dibangun	Kegiatan	1	1.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
19	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Belang-belang	Jalan akses pelabuhan Belang-belang yang dibangun	Kegiatan	1	1.174.793,57	0	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
20	Pengadaan Mobil SAR	Mobil SAR	Unit	1	500.000,00	0	-	1	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
21	Pengadaan LPUJ Jalan Bandara dan Pelabuhan	Tersedianya LPUJ Bandara dan Pelabuhan	Unit	5	1.408.685,72	0	-	6	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
22	Pembangunan Jalan Akses Bandar Udara Tampa Padang	Jalan Akses Bandara Udara Tampa Padang yang dibangun	Paket	1	1.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya Pelayanan, Keselamatan dan keamanan transportasi						3.500.000,00		5.120,00		5.120,00		-		-		-									Dinas Perhubungan		
06	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas	Jenis	11	1.250.000,00	3	3.544.042,37	0	2.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	3,00	3.544.042,37	27,27	283,52		Dinas Perhubungan	
13	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jumlah paket pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	0	0	-	3	397.931,30	1	1.500.000,00	1	5.120,00	1,00	5.120,00	0,00	-	-	-	-	1,00	5.120,00	100,00	100,00	4,00	403.051,30	0,00	-		Dinas Perhubungan	
	Program Peningkatan Kelakuan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Anus Penumpang						140.000,00		103.560,20		-		-		100.240,20		2.590,00									Dinas Perhubungan		
04	Penegakan Hukum Perizinan dan Angkutan Secara Nasional	Jumlah kendaraan yang mengikut pengakan hukum perizinan dan angkutan secara nasional	Kendaraan	1500	350.000,00	0	-	300	70.000,00	300	103.560,20	0,00	-	0,00	-	291,00	100.240,20	9,00	2.590,00	300,00	102.830,20	100,00	99,30	300,00	102.830,20	20,00	29,38		Dinas Perhubungan
5	Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Hukum Dimensi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang mengikut peningkatan kompetensi pengelolaan hukum dimensi kendaraan bermotor	Kendaraan			0	-	300	70.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Transportasi	Pemasangan Rambu/pemas an dan pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan			250.000,00			1.050.000,00		-		-		-		-		-									Dinas Perhubungan		
01	Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Tersedianya Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Unit	25	250.000,00	0	55.362,00	5	1.000.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	55.362,00	0,00	22,14		Dinas Perhubungan	
01	Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Tersedianya Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Unit			0	-	0	50.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	Jumlah orang/pengusa h yang mengikut peningkatan kompetensi dalam kaitannya dengan keselamatan			700.000,00			240.000,00		-		-		-		-		-									Dinas Perhubungan		
01	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah kabupaten yang mengikut pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Prov. Subar	Orang	10	350.000,00	4	107.318,30	2	70.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	4,00	107.318,30	40,00	30,66		Dinas Perhubungan	
02	Pekan Nasional KeselamatanTingkat Provinsi	Tersedianya pekan nasional keselamatan tingkat Provinsi Sulawesi Barat	Kegiatan	200	350.000,00	0	289.873,80	1	70.000,00	1	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	289.873,80	0,00	82,82		Dinas Perhubungan	
xx	Peningkatan Kompetensi tentang Keselamatan Pelayaran	Tersedianya sosialisasi tentang peningkatan kompetensi keselamatan pelayaran	-	0	-	0	-	0	100.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perhubungan		
	Program Pengendalian Lalu Lintas	Frekuensi kegiatan Penerbitan Pengendalian Lalu Lintas						150.000,00		105.000,00		-		50.000,00		43.560,00			51.400,00								Dinas Perhubungan		
01	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan di Jalan Raya	Jumlah kegiatan Patrol Pengendalian Lalu Lintas	Orang	360	750.000,00	144	245.285,00	72	150.000,00	72	105.000,00	0,00	-	36,00	50.000,00	28,80	43.560,00	7,20	51.400,00	72,00	144.960,00	100,00	138,06	216,00	390.245,00	60,00	52,03		Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17													
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK																													
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	1		844.460.371,00		843.139.000,00	1	1.440.000.000,00	1	1.096.984.286,00		193.437.593,00		104.201.463,00		559.358.983,00		220.595.080,00		1.077.593.119,00		98,23		1.920.732.119,00		227,45	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pegawai Tetap yang Menangani Surat Menyurat	36 Bulan	1	30.000.000,00	500	21.950.000,00	36 Bulan	35.000.000,00	24	33.570.000,00	6,00	609.000,00	6,00	10.190.000,00	6,00	5.300.000,00	6,00	17.471.000,00	24,00	33.570.000,00	100,00	100,00	524,00	55.520.000,00	52400,00	185,07	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Jasa Komunikasi Lainnya yang disediakan	1 Rekening	1	90.000.000,00	12	60.060.000,00	1 Rekening	70.000.000,00	24	90.540.048,00	3,00	15.097.433,00	3,00	9.100.463,00	3,00	17.942.423,00	3,00	29.237.180,00	12,00	71.377.499,00	50,00	78,84	24,00	131.437.499,00	2400,00	146,04	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor yang Disediakan	12 Unit	20	90.000.000,00	292	65.210.000,00	12 Unit	40.000.000,00	395	13.984.000,00	96,00	995.800,00	0,00	-	196,00	12.135.200,00	101,00	853.000,00	395,00	13.984.000,00	100,00	100,00	687,00	79.194.000,00	3435,00	87,99	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	1930 Unit	1930	80.000.000,00	1578	87.369.000,00	1930 Unit	80.000.000,00	1790	83.276.617,00	447,00	20.116.400,00	447,00	6.609.000,00	447,00	17.612.500,00	449,00	38.938.200,00	1790,00	83.276.100,00	100,00	100,00	3368,00	170.645.100,00	174,51	213,31	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Berkas yang Ditebak dan Digandakan	1000 Epl	1000	34.460.371,00	12	55.500.000,00	1000 Epl	80.000.000,00	560	53.580.000,00	140,00	4.330.000,00	0,00	-	280,00	9.271.300,00	140,00	39.940.700,00	560,00	53.542.000,00	100,00	99,93	572,00	109.042.000,00	57,20	316,43	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	12 Unit	0	-	0	-	12 Unit	350.000.000,00	111	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	45 Pack	30	30.000.000,00	1	11.050.000,00	45 Pack	35.000.000,00	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	11.050.000,00	0,00	36,83	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat	2200 Kotak	12	40.000.000,00	2200	179.000.000,00	2200 Kotak	50.000.000,00	11056	172.165.000,00	276,00	18.003.000,00	276,00	3.402.000,00	10504,00	150.655.500,00	0,00	-	11056,00	172.060.500,00	100,00	99,94	13256,00	351.060.500,00	110466,67	877,65	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi Luar Daerah	50 Laporan	12	250.000.000,00	12	213.000.000,00	50 Laporan	400.000.000,00	50	361.619.501,00	12,00	117.005.960,00	0,00	-	24,00	192.411.100,00	14,00	52.178.000,00	50,00	361.595.060,00	100,00	99,99	62,00	574.595.060,00	516,67	229,84	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Hasil Koordinasi Dalam Daerah	50 Laporan	12	200.000.000,00	12	150.000.000,00	50 Laporan	300.000.000,00	50	288.249.120,00	12,00	17.280.000,00	12,00	74.900.000,00	14,00	154.030.960,00	12,00	41.977.000,00	50,00	288.187.960,00	100,00	99,98	62,00	438.187.960,00	516,67	219,09	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1		796.134.275,00		537.262.000,00	1	1.050.000.000,00	1	991.799.762,00		34.290.012,00		421.495.942,00		146.378.550,00		374.691.136,00		976.855.640,00	0,00	98,49	0,00	1.514.117.640,00	0,00	190,18	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	1 Unit	4	226.134.275,00	12	199.550.000,00	1	600.000.000,00	1	271.942.000,00	0,00	-	1,00	270.842.000,00	0,00	-		1,00	270.842.000,00	100,00	99,60	13,00	470.392.000,00	325,00	208,01	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia	18 Unit	18	200.000.000,00	10	107.000.000,00	18	100.000.000,00	16	320.509.022,00	0,00	-	5,00	65.800.000,00	7,00	61.489.000,00	4,00	185.640.800,00	16,00	312.929.800,00	100,00	97,64	26,00	419.929.800,00	144,44	209,95	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler Kantor yang Disediakan	30 Unit	30	100.000.000,00	0	-	30	100.000.000,00			0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Tetap Layak Pakai	2 Lantai	2	60.000.000,00	1	48.910.000,00	2	100.000.000,00	2	127.843.890,00	0,00	-	1,00	25.600.000,00	0,00	19.200.000,00	1,00	82.000.000,00	2,00	126.800.000,00	100,00	99,18	3,00	175.710.000,00	150,00	292,85	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Layak	25 Unit	30	150.000.000,00	20	104.242.000,00	25	100.000.000,00	23	226.268.850,00	6,00	28.190.012,00	6,00	56.307.442,00	5,00	64.659.550,00	6,00	71.937.336,00	23,00	221.094.340,00	100,00	97,71	43,00	325.336.340,00	143,33	216,89	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Layak Pakai	10 Unit	15	60.000.000,00	12	77.560.000,00	10	50.000.000,00	178	45.236.000,00	44,00	6.100.000,00	44,00	2.946.500,00	46,00	1.030.000,00	44,00	35.113.000,00	178,00	45.189.500,00	100,00	99,90	190,00	122.749.500,00	1266,67	204,58	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	1		304.656.516,00		96.042.000,00	1	205.000.000,00	1	-		-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	96.042.000,00	1,00	31,52	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disiapkan	121 Setel	236	150.000.000,00	0	-	121	75.000.000,00	117	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	121,00	-	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya yang Tersedia	196 Psg	196	154.656.516,00	115	96.042.000,00	196	130.000.000,00	218	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	96.042.000,00	196,00	62,10	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bekerjaan	1		1.613.977.688,00		278.425.500,00	1	798.330.000,00	1	434.974.820,00		75.894.400,00		55.714.600,00		141.854.200,00		157.271.855,00	0,00	430.735.055,00	0,00	-	0,00	709.160.555,00	1,00	43,94	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100			
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Keuangan dan Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Keuangan dan Kinerja	10 Orang	20	200.000.000,00	0	-	10	20.000.000,00	2	32.000.000,00	1,00	8.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	23.800.000,00	2,00	31.800.000,00	3,00	-	0,00	31.800.000,00	13,00	15,90	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Peningkatan Kompetensi terting Tugas Pokok Kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20	300.000.000,00	0	-	10	20.000.000,00			0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
3	Sosialisasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	300 Orang	100	200.000.000,00	0	-	300	283.980.000,00			0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	300,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
4	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi	Jumlah Laporan Sengketa Informasi yang Disediakan	150 Laporan	100	263.977.688,00	12	255.977.500,00	150	333.350.000,00	100	327.539.820,00	37,00	46.594.400,00	37,00	53.299.700,00	37,00	90.234.200,00	39,00	133.471.855,00	150,00	323.600.155,00	263,00	-	0,00	579.577.655,00	413,00	219,56	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Diskusi Publik Regulasi Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diskusi Publik	120 Orang	100	200.000.000,00	0	-	120	101.000.000,00	200	75.435.000,00	50,00	21.300.000,00	50,00	2.414.900,00	100,00	51.620.000,00	0,00	-	200,00	75.334.900,00	350,00	-	0,00	75.334.900,00	470,00	37,67	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknik Dasar	10 Orang	70	250.000.000,00	2	22.448.000,00	10	20.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	22.448.000,00	10,00	8,98	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
7	Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik, Videografi, Desain Media, Fotografi, Editing, dll	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik, Videografi, Desain Media, Fotografi, Editing, dll	5 Orang	30	200.000.000,00	0	-	5	20.000.000,00			0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	5,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1		390.730.893,00		179.530.000,00	1	408.330.000,00	1	281.546.370,00		30.292.800,00		94.426.000,00		41.980.000,00		109.339.600,00	0,00	276.038.400,00	0,00	-	0,00	455.568.400,00	1,00	116,59	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	3	10.100.000,00	3	13.150.000,00	3	13.150.000,00	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	13.150.000,00	3,00	130,20	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPDP	Jumlah Laporan	4 Laporan	3	14.000.000,00	3	21.050.000,00	4	21.050.000,00	4	30.362.000,00	1,00	11.745.000,00	1,00	11.400.000,00	1,00	2.400.000,00	1,00	4.800.000,00	4,00	30.345.000,00	7,00	-	0,00	51.395.000,00	11,00	367,11	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Penyusunan RKA/DPA- SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	2	14.000.000,00	4	24.130.000,00	2	12.065.000,00	2	12.890.800,00	1,00	8.087.800,00	1,00	2.400.000,00	0,00	-	0,00	2.400.000,00	2,00	12.887.800,00	3,00	-	0,00	37.017.800,00	5,00	264,41	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Penyusunan RKA-PDPPA- SKPD	Jumlah Dokumen	2 Laporan	2	25.000.000,00	0	-	2	12.065.000,00	2	12.890.800,00	0,00	-	0,00	-	1,00	2.400.000,00	1,00	10.484.000,00	2,00	12.884.000,00	4,00	-	0,00	12.884.000,00	6,00	51,54	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Merangani Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	132 Bulan	15	177.630.893,00	12	121.200.000,00	132	150.000.000,00	132	165.100.000,00	0,00	-	44,00	55.000.000,00	44,00	25.000.000,00	44,00	80.000.000,00	132,00	160.000.000,00	264,00	-	0,00	281.200.000,00	396,00	158,31	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Rapat Koordinasi/Evaluasi Kebijakan Program dan Kegiatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi/Evaluasi Kebijakan Program dan Kegiatan	40 Orang	40	150.000.000,00	0	-	40	200.000.000,00	120	60.302.770,00	30,00	10.460.000,00	30,00	25.626.000,00	30,00	12.180.000,00	30,00	11.655.600,00	120,00	59.921.600,00	210,00	-	0,00	59.921.600,00	250,00	39,95	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
VI	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penyediaan Penyediaan Informasi Melalui Media Elektronik dan Non Elektronik	1		1.572.341.900,00	868.962.300,00		1	861.218.500,00	1	549.862.458,50		38.681.150,00		114.066.350,00		98.400.000,00		294.247.500,00	0,00	545.395.000,00	0,00	-	0,00	1.414.357.300,00	1,00	89,95	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
1	Pembinaan dan Pengembangan Radio Bonus Masyarakat	Jumlah Jam Siar Radio RbFM	5475 Jam Siar	5475	500.000.000,00	12	175.450.000,00	5475	250.000.000,00	5475	196.524.860,00	0,00	-	0,00	-	1300,00	36.290.000,00	4175,00	159.941.000,00	5475,00	196.231.000,00	10950,00	-	0,00	371.681.000,00	16425,00	74,34	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Pekan Informasi Nasional (PIN)/Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK)	Jumlah Kelompok Pemerua yang Mewakil Provinsi Sulawesi Barat Ditingkat Nasional	1 Klp	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	5	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	300.000.000,00	1,00	100,00	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Penyusunan Sambutan, Pembuatan Pers Release, Pembuatan Kipping dan Analisa Berita	Jumlah Kipping, Analisa Berita, Sambutan dan Per Release yang Disusun	50 laporan	50	137.818.500,00	150	102.699.300,00	50	137.818.500,00	50	176.383.354,30	12,00	14.091.000,00	12,00	48.652.500,00	12,00	37.110.000,00	14,00	76.520.500,00	50,00	176.374.000,00	88,00	-	0,00	279.073.300,00	138,00	202,49	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Peliputan dan Koordinasi Kehumasan	Jumlah Kegiatan Pemprom. Subar yang Diliput dan Dipublikasikan	100 Liputan	100	634.523.400,00	12	290.813.000,00	100	273.400.000,00	100	176.954.244,20	25,00	24.590.150,00	25,00	65.413.850,00	25,00	25.000.000,00	25,00	57.786.000,00	100,00	172.790.000,00	175,00	-	0,00	463.603.000,00	275,00	73,06	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
VII	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase Pemenuhan Kompetensi SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informasi	1		3.803.722.000,00	-		1	1.900.000.000,00	1	443.321.600,00		27.719.339,00		49.260.000,00		361.791.712,00		0,00	438.771.051,00	0,00	-	0,00	438.771.051,00	1,00	11,54	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
												I		II		III		IV											
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13x6	16 = 15/100	17													
1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peserta yang Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50	214.549.000,00	0	-	50	150.000.000,00	50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	50,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Bimbingan Teknis Komunikasi Masyarakat Bagi Kelompok Informasi Masyarakat Informasi (KIM)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek	60 Orang	60	169.161.000,00	0	-	60	150.000.000,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	60,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Festival Media Pertunjukan Rakyat Se-Sulawesi Barat	Jumlah Kelompok Petura yang Mengikuti Festival Media Pertunjukan Rakyat	6 Klp	6	210.743.000,00	0	-	6	150.000.000,00	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan dan Pengembangan TIK	40 Orang	200	209.269.000,00	0	-	40	150.000.000,00	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
5	Pengembangan SDM Tenaga IT SPBE	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tenaga IT SPBE se Substansi	174 Orang	174	3.000.000.000,00	0	-	174	1.300.000.000,00	126	443.321.600,00	45,00	27.719.339,00	0,00	-	45,00	49.260.000,00	92,00	361.791.712,00	182,00	438.771.051,00	319,00	-	0,00	438.771.051,00	493,00	14,63	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
VIII	Program Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase Jenis Informasi yang Wajib Diamankan melalui Penyelenggaraan Persandian (Kripten)	1	-	715.285.000,00	-	-	1	350.000.000,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
1	Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pengamanan Informasi	12 Laporan	12	327.830.000,00	0	-	12	150.000.000,00	2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	12,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Sosialisasi/Bimbingan Teknis Cyber Crime	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	70 Orang	70	387.455.000,00	0	-	70	200.000.000,00	50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	70,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
IX	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Persentase Pengembangan Aplikasi Informatika	1	-	4.138.956.000,00	1.783.274.800,00	1	2.163.300.000,00	1	91.560.000,00	-	-	25.248.979,00	-	-	-	32.824.800,00	-	25.499.478,00	0,00	83.573.257,00	0,00	-	0,00	1.866.948.057,00	1,00	45,10	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1	Pembuatan Standarisasi Teknis dan Biaya Aplikasi/Software	Jumlah Standarisasi Teknis dan Biaya Aplikasi/Software yang Dibuat	1 Dokumen	1	537.080.000,00	0	-	1	50.000.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Integrasi Database Aplikasi	Jumlah Dokumen Integrasi Database Aplikasi Basis Data Elektronik	1 Dokumen	1	177.900.000,00	0	-	1	250.000.000,00	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAYAI-OFFICE	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Aplikasi SIMAYAI Lingkup Pemprov Subbar	420 Orang	420	1.070.980.000,00	0	-	420	537.600.000,00	1	15.680.000,00	31,00	25.248.979,00	0,00	-	42,00	32.824.800,00	0,00	16.350.000,00	73,00	74.423.779,00	115,00	-	0,00	74.423.779,00	535,00	6,95	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
4	Pengembangan Aplikasi Khusus	Jumlah Aplikasi Pengembangan dan Aplikasi Khusus	1 Aplikasi	1	363.456.000,00	0	-	1	700.000.000,00	42	75.880.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	9.149.478,00	1,00	9.149.478,00	2,00	-	0,00	9.149.478,00	3,00	2,52	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5	Peningkatan Keamanan Data Elektronik	Jumlah Dokumen Peningkatan Keamanan Data Elektronik	1 Dokumen	1	291.910.000,00	0	-	1	275.700.000,00	43	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
6	Penyusunan Standar Format Data dan Informasi Digital Aplikasi	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Format Data dan Informasi Digital Aplikasi	1 Dokumen	1	412.020.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
7	Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Website Pemprov Subbar	Jumlah Jaringan Website Pemprov Subbar yang Terpelihara	1 Website	1	500.000.000,00	12	1.783.274.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.783.274.800,00	0,00	356,65	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
8	Pengelolaan Hosting dan Domain OPD	Jumlah OPD Provinsi yang Dilakukan Pembuatan dan Maintenance Hosting dan Domain OPD	43 OPD	43	785.610.000,00	0	-	43	300.000.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	43,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
X	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	0,85	-	648.991.000,00	165.945.000,00	0,85	400.000.000,00	1	1.070.875.500,00	-	-	24.535.800,00	-	6.300.000,00	-	194.459.000,00	-	798.488.725,00	0,00	1.023.783.525,00	0,00	-	0,00	1.189.728.525,00	0,85	183,32	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Sektoral Lingkup Pemrov Subbar	Jumlah Buku Data Profil Statistik Sektoral Prov. Subbar yang Disiapkan	60 Buku	60	648.991.000,00	1	165.945.000,00	60	400.000.000,00	300	1.070.875.500,00	75,00	24.535.800,00	75,00	6.300.000,00	75,00	194.459.000,00	75,00	798.488.725,00	300,00	1.023.783.525,00	525,00	-	0,00	1.189.728.525,00	585,00	183,32	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re		K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	K	Re	15 = 13+6	16 = 15/100	17				
XI	Program Pengembangan Desminasi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat akan Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	5		205.350.000,00			5	448.270.000,00	5	206.782.580,00		44.785.989,00		13.848.000,00		147.780.300,00		-	0,00	206.414.289,00	0,00	-	0,00	206.414.289,00	5,00	100,52	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
1	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik	Jumlah Hasil Laporan Badan Publik yang Mengelola Informasi Publik	24 Laporan	24	205.350.000,00	0	-	24	198.270.000,00	24	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	24,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2	Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Korisidor Informasi Publik yang Terpilih	5 Orang	0	-	0	-	5	250.000.000,00	100	206.782.580,00	25,00	44.785.989,00	25,00	13.848.000,00	50,00	147.780.300,00	0,00	-	100,00	206.414.289,00	175,00	-	0,00	206.414.289,00	180,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
XII	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK	Persentase SDPD Kab/Kota yang Terkoneksi Jaringan Komunikasi dan Informatika	1		1.048.660.500,00		206.168.000,00	1	1.653.921.500,00	1	631.572.810,00		-		58.644.600,00		77.720.904,00		18.300.000,00	0,00	154.665.504,00	0,00	-	0,00	360.833.504,00	1,00	34,41	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
1	Pemeliharaan/Maintenance Jaringan Fiber Optik	Jumlah Sarana dan Prasarana Jaringan Fiber Optik yang Dipelihara	41 Jaringan	41	1.048.660.500,00	43	206.168.000,00	41	1.653.921.500,00	41	631.572.810,00	0,00	-	13,00	58.644.600,00	15,00	77.720.904,00	13,00	18.300.000,00	41,00	154.665.504,00	82,00	-	0,00	360.833.504,00	123,00	34,41	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
XIII	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Penyebutan Informasi Media Elektronik dan Non Elektronik	1		4.450.050.000,00		2.183.571.700,00	1	2.250.000.000,00	1	1.865.896.240,00		250.624.605,00		612.997.423,00		465.671.600,00		526.037.800,00	0,00	1.855.331.428,00	0,00	-	0,00	4.038.903.128,00	1,00	90,76	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
1	Peningkatan Kerjasama dengan Media Massa/Pers	Jumlah Langganan Surat Kabar	10 Media	10	350.050.000,00	12	350.000.000,00	10	300.000.000,00	2100	346.542.000,00	1025,00	115.601.605,00	1025,00	8.236.800,00	1025,00	74.321.600,00	1025,00	148.153.200,00	4100,00	346.313.205,00	7175,00	-	0,00	696.313.205,00	7185,00	198,92	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2	Penyediaan Jasa Publikasi Media	Jumlah Media yang Publikasi Kegiatan Pemprom Subar Melalui Media Cetak dan Elektronik	48 Media	48	2.000.000.000,00	200	733.571.700,00	48	1.000.000.000,00	65	1.359.250.000,00	21,00	122.000.000,00	21,00	600.460.623,00	42,00	388.500.000,00	21,00	248.250.000,00	105,00	1.359.210.623,00	189,00	-	0,00	2.092.782.323,00	237,00	104,64	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
3	Rapat Koordinasi SPBE	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi SPBE Tingkat Provinsi dan Nasional	9 Laporan	9	1.200.000.000,00	0	-	9	450.000.000,00	114	62.103.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	114,00	53.480.600,00	114,00	53.480.600,00	228,00	-	0,00	53.480.600,00	237,00	4,46	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
4	Sosialisasi Regulasi Tindak Lanjut SPBE	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Regulasi SPBE Lingkup Prov. Sulbar	110 Orang	110	400.000.000,00	0	-	110	350.000.000,00	100	43.264.000,00	200,00	13.023.000,00	200,00	4.300.000,00	200,00	2.850.000,00	200,00	22.450.000,00	800,00	42.623.000,00	1400,00	-	0,00	42.623.000,00	1510,00	10,66	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
5	Pembinaan dan Pengembangan e- Government	Tersedianya Layanan e- Government yang Terintegrasi dengan Kabupaten dan Kota	0	12	-	32	1.100.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.100.000.000,00	0,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
6	Pembinaan dan Pengembangan PPD	Jumlah Sengketa Informasi yang Disediakan oleh PPD	50 Laporan	50	500.000.000,00	0	-	50	150.000.000,00	60	54.736.840,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	60,00	53.704.000,00	60,00	53.704.000,00	120,00	-	0,00	53.704.000,00	170,00	10,74	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
XIV	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika				-		-		200.000.000,00										0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	40 Orang	43	-	0	-	40	200.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
XV	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)	Indeks Capaian SPBE yang dievaluasi oleh Pemerintah Pusat	5		15.218.680.000,00		-	5	5.871.630.000,00	5	2.577.001.060,00		8.882.000,00		388.509.102,00		961.892.924,00		0,00	1.359.284.026,00	0,00	-	0,00	1.359.284.026,00	5,00	8,93	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik			
1	Monitoring dan Evaluasi mandiri Penyelenggaraan SPBE Pemprom. Subar	Jumlah Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi SPBE Pemprom. Subar	48 Laporan	48	800.000.000,00	0	-	48	700.000.000,00	7	227.059.060,00	0,00	-	0,00	-	3,00	17.750.000,00	4,00	185.269.000,00	7,00	203.019.000,00	14,00	-	0,00	203.019.000,00	62,00	25,38	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
2	Perumusan Kebijakan dan Regulasi SPBE Pemprom Subar	Jumlah Perda yang Disahkan terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Perda	1	-	0	-	1	50.000.000,00	0		0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemprom. Subar	Jumlah Buku Rencana Induk SPBE Pemprom. Subar yang Disediakan	1 Buku	1	-	0	-	1	241.670.000,00	2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Penyediaan Internet Program Desa Merasa	Jumlah Desa Merasa yang Dilayani/Disediakan Jaringan	70 Desa	70	5.118.680.000,00	0	-	70	1.500.000.000,00	42	588.274.560,00	0,00	-	14,00	332.374.102,00	14,00	98.759.898,00	14,00	151.027.000,00	42,00	582.161.000,00	84,00	-	0,00	582.161.000,00	154,00	11,37	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re			
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re										K	Re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
5	Penyediaan Koneksi Internet Pemprov. Subar	Jumlah OPD Provinsi yang Terkoneksi jaringan Komunikasi dan Informasi	1 Gbps	1	7.000.000.000,00	0	-	1	2.345.460.000,00	1000	1.514.706.000,00	10,00	7.782.000,00	10,00	17.285.000,00	11,00	810.953.026,00	10,00	636.656.419,00	41,00	1.472.676.445,00	72,00	-	0,00	1.472.676.445,00	73,00	21,04	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
6	Pengelolaan dan Pengembangan Website Pemprov. Subar	Jumlah Operasional Jaringan Website Pemprov. Subar	44 Website	44	2.000.000.000,00	0	-	44	850.000.000,00	44	246.961.440,00	11,00	1.100.000,00	11,00	38.850.000,00	11,00	34.430.000,00	11,00	151.417.040,00	44,00	225.797.040,00	77,00	-	0,00	225.797.040,00	121,00	11,29	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik		
7	Penyediaan Arsitektur SPBE Pemprov Subar	Jumlah Dokumen Penyusunan Arsitektur SPBE Pemprov Subar	1 Dokumen	1	300.000.000,00	0	-	1	184.500.000,00	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																														
2.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	75	6.531.597.699,00			730.152.068,00	70	666.410.697,00	75	743.603.256,00	20,00	164.220.477,00	38,00	185.500.761,00	16,00	106.246.597,00	0,00	251.499.455,00	74,00	707.467.290,00	98,67	95,14	74,00	1.437.619.358,00	98,67	22,01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk	Surat	2700	1.087.565.483,00	486		147.081.000,00	300	213.600.000,00	300	211.920.000,00	145,00	34.320.000,00	120,00	53.086.000,00	109,00	49.090.009,00	116,00	56.073.991,00	490,00	192.570.000,00	163,33	90,87	976,00	339.651.000,00	36,15	31,23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbavardkan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbavardkan	Bulan	300	900.000.000,00	36		71.822.226,00	36	100.440.000,00	36	90.260.416,00	9,00	26.854.396,00	9,00	14.726.261,00	9,00	19.310.088,00	9,00	20.073.354,00	36,00	80.964.099,00	100,00	89,70	72,00	152.786.325,00	24,00	16,98	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan	Jenis	76	730.000.000,00	15		35.924.000,00	20	65.675.654,00	18	70.874.700,00	0,00	7.500.000,00	20,00	14.709.000,00	20,00	11.250.000,00	20,00	30.822.000,00	60,00	64.281.000,00	333,33	90,70	75,00	100.205.000,00	98,68	13,73	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang Terselesaikan	Unit	75	141.000.000,00	5		8.800.000,00	4	13.640.000,00	3	22.450.000,00	2,00	1.420.000,00	9,00	5.400.000,00	3,00	2.010.000,00	3,00	13.530.000,00	17,00	22.360.000,00	566,67	99,60	22,00	31.160.000,00	29,33	22,10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang Terselesaikan	Jenis	289	350.000.000,00	45		49.292.000,00	60	51.868.700,00	55	51.868.700,00	0,00	-	60,00	51.706.000,00	0,00	-	0,00	-	60,00	51.706.000,00	109,09	99,69	105,00	100.998.000,00	36,33	28,86	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Mekan Minum yang Terselesaikan	Dos	3000	380.000.000,00	958		47.482.000,00	320	26.500.000,00	250	47.050.000,00	70,00	6.500.000,00	180,00	10.248.500,00	150,00	7.196.500,00	500,00	22.699.000,00	900,00	46.644.000,00	360,00	99,14	1858,00	94.126.000,00	61,93	24,77	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi dan konsultasi (perjalanan dinas) ke luar daerah yang dikembangkan	Kali	200	1.670.000.000,00	23		244.513.829,00	10	130.357.143,00	10	120.322.560,00	9,00	65.746.581,00	0,00	-	2,00	10.570.000,00	4,00	43.842.360,00	15,00	120.158.941,00	150,00	99,86	38,00	364.672.770,00	19,00	21,84	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi (perjalanan dinas) ke dalam daerah yang dikembangkan	Kali	475	1.273.032.216,00	30		125.237.013,00	15	64.329.200,00	21	128.856.880,00	6,00	21.879.500,00	8,00	35.625.000,00	1,00	6.820.000,00	6,00	64.458.750,00	21,00	128.783.250,00	100,00	99,94	51,00	254.020.263,00	10,74	19,95	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	1.083.034.328,00			485.477.584,00	70	244.300.070,00	90	428.365.705,00	5,00	28.373.700,00	11,00	15.069.250,00	58,00	153.616.091,00	11,00	226.489.749,00	85,00	423.548.790,00	94,44	98,88	85,00	909.026.374,00	113,33	83,93	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang Terselesaikan	Jenis	75	125.000.000,00	0	-	11	6.964.000,00	3	2.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	2.000.000,00	3,00	2.000.000,00	100,00	100,00	3,00	2.000.000,00	4,00	1,60	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terselesaikan	Gedung	5	330.000.000,00	1		329.930.000,00	1	122.246.070,00	1	311.347.505,00	0,00	-	0,00	-	1,00	118.800.000,00	0,00	191.950.000,00	1,00	310.750.000,00	100,00	99,81	2,00	640.680.000,00	40,00	194,15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang terselesaikan	Unit	159	628.034.328,00	26		155.547.584,00	13	115.090.000,00	8	115.018.200,00	2,00	28.373.700,00	11,00	15.069.250,00	4,00	34.816.091,00	1,00	32.539.749,00	18,00	110.798.790,00	225,00	96,33	44,00	266.346.374,00	27,67	42,41	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	Persen	75	361.472.912,00			48.133.738,00	70	37.320.052,00	90	37.320.052,00	26,00	21.320.052,00	64,00	16.000.000,00	0,00	-	0,00	-	90,00	37.320.052,00	100,00	100,00	90,00	85.453.790,00	120,00	23,64	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat/kursus	Orang	70	361.472.912,00	7		48.133.738,00	4	37.320.052,00	3	37.320.052,00	3,00	21.320.052,00	3,00	16.000.000,00	0,00	-	0,00	-	6,00	37.320.052,00	200,00	100,00	13,00	85.453.790,00	18,57	23,64	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Keepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	95	390.000.000,00			218.420.000,00	75	118.785.000,00	75	118.535.000,00	25,00	17.470.000,00	25,00	28.930.000,00	25,00	26.920.000,00	0,00	41.560.000,00	75,00	114.880.000,00	100,00	96,92	75,00	333.300.000,00	78,95	85,46	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang terusun	Laporan	21	300.000.000,00	16		185.420.000,00	16	105.465.000,00	16	105.365.000,00	4,00	17.470.000,00	4,00	26.230.000,00	4,00	24.940.000,00	4,00	33.070.000,00	16,00	101.710.000,00	100,00	96,53	32,00	287.130.000,00	152,38	95,71	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	15.000.000,00	1		2.950.000,00	1	1.980.000,00	1	1.980.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1.980.000,00	0,00	-	1,00	1.980.000,00	100,00	100,00	2,00	4.930.000,00	100,00	32,87	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terselesaikan	Laporan	1	15.000.000,00	1		2.750.000,00	1	2.190.000,00	1	2.190.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	2.190.000,00	1,00	2.190.000,00	100,00	100,00	2,00	4.940.000,00	200,00	32,93	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyusunan RKA/DPA- SKPD	Jumlah RKA/DPA SKPD yang terusun	Dokumen	2	30.000.000,00	2		13.650.000,00	2	4.575.000,00	2	4.500.000,00	0,00	-	2,00	2.700.000,00	0,00	-	0,00	-	2,00	1.800.000,00	2,00	100,00	4,00	18.150.000,00	200,00	60,50	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyusunan RKA-PIDPPA- SKPD	Jumlah RKA/DPPA SKPD yang terusun	Dokumen	2	30.000.000,00	2		13.650.000,00	2	4.575.000,00	2	4.500.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	4.500.000,00	2,00	4.500.000,00	100,00	100,00	4,00	18.150.000,00	200,00	60,50	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berkala nasional (PMA/PMN/PMI)	Proyek	5	1.070.000.000,00			93.543.900,00	1	54.952.860,00	5	104.952.700,00	0,00	23.985.785,00	1,00	3.610.000,00	0,00	-	0,00	-	75.089.022,00	1,00	102.684.807,00	20,00	97,84	1,00	196.228.707,00	20,00	18,34	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Koordinasi Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka memediasi Penyelesaian Permasalahan di bidang Pengembangan Modal	Jumlah Pelaksana Rapat Tim Task Force	Kali	8	1.070.000.000,00	1		93.543.900,00	1	54.952.860,00	1	104.952.700,00	0,00	23.985.785,00	0,00	3.610.000,00	0,00	-	1,00	75.089.022,00	1,00	102.684.807,00	100,00	97,84	2,00	196.228.707,00	25,00	18,34	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17												
2.12.21	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Realisasi Penanaman Modal	Persen	50	1.230.000.000	286.463.759,00	35	277.410.520,00	48	290.631.480,00	11,00	38.645.200,00	26,00	215.346.200,00	6,00	18.930.000,00	4,00	16.229.000,00	47,00	289.150.400,00	97,92	99,49	47,00	575.614.159,00	94,00	46,80	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah penerimaan perizinan dan non perizinan	Izin	1100	345.000.000,00	0	400	66.452.200,00	300	80.673.160,00	25,00	38.645.200,00	369,00	19.330.200,00	155,00	6.000.000,00	445,00	16.229.000,00	994,00	80.204.400,00	331,33	99,42	994,00	80.204.400,00	90,36	23,25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyusunan Profil Investasi Sulawesi Barat yang siap diwujudkan	Jumlah Profil Investasi Sulawesi Barat yang siap diwujudkan	Dokumen	5	480.000.000,00	1	199.860.000,00	1	141.296.800,00	1	140.296.800,00	0,00	-	1,00	140.100.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	140.100.000,00	100,00	99,86	2,00	339.960.000,00	40,00	70,83	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Forum Koordinasi Penanaman Modal	Jumlah Peserta Forum Koordinasi Penanaman Modal	Orang	200	405.000.000,00	25	86.603.759,00	20	69.661.520,00	20	69.661.520,00	20,00	-	20,00	55.916.000,00	0,00	12.930.000,00	0,00	-	40,00	68.846.000,00	200,00	98,83	65,00	155.449.759,00	32,50	38,38	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.12.22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	95	3.058.000.000,00	600.556.142,00	75	474.005.740,00	75	739.784.940,00	70,00	113.690.000,00	0,00	128.724.100,00	0,00	201.801.600,00	0,00	279.577.000,00	70,00	723.792.700,00	93,33	97,84	70,00	1.324.348.842,00	73,68	43,31	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Penyelesaian Pemeliharaan (Laporan/Aduan) atas Penyelenggaraan PTSP	Jumlah aduan yang ditangani	Aduan	10	550.000.000,00	5	90.978.677,00	5	70.691.000,00	4	137.934.200,00	2,00	28.290.000,00	1,00	11.495.000,00	1,00	23.372.000,00	5,00	73.536.000,00	9,00	136.693.000,00	225,00	99,10	14,00	227.671.677,00	140,00	41,39	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan PTSP	Jumlah peserta peningkatan kapasitas PTSP	Orang	145	1.100.000.000,00	20	433.232.312,00	46	313.069.400,00	46	463.205.400,00	46,00	85.400.000,00	46,00	96.835.500,00	46,00	118.107.100,00	46,00	148.530.000,00	184,00	448.872.600,00	400,00	96,91	204,00	882.104.912,00	140,69	80,19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Peningkatan Kapasitas Teknis Bagi Aparatur Pelaksana PTSP	Jumlah aparat PTSP yang mengikuti peningkatan kapasitas teknis	Orang	130	888.000.000,00	35	76.345.153,00	40	70.645.340,00	30	110.645.340,00	0,00	-	0,00	5.393.600,00	40,00	58.222.500,00	0,00	46.612.000,00	40,00	110.228.100,00	133,33	99,62	75,00	186.573.253,00	57,69	21,01	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Konsolidasi Kebijakan dan Harmonisasi Peraturan Penyelenggaraan PTSP	Jumlah konsolidasi kebijakan dan harmonisasi peraturan	Peremuan	8	520.000.000,00	0	-	1	19.600.000,00	1	28.000.000,00	0,00	-	0,00	15.000.000,00	1,00	2.100.000,00	0,00	10.899.000,00	1,00	27.999.000,00	100,00	100,00	1,00	27.999.000,00	12,50	5,38	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.12.23	Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis DPMP/PTSP	Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik	Sistem	1	800.000.000,00	314.532.276,00	1	214.913.600,00	1	223.863.500,00	0,00	72.686.139,00	1,00	35.660.000,00	0,00	38.672.500,00	0,00	73.590.000,00	1,00	220.608.639,00	100,00	98,55	1,00	535.140.915,00	100,00	66,89	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur DPMP/PTSP	Jumlah Laporan SKP & TTP	Laporan	56	200.000.000,00	55	126.871.500,00	2	58.844.000,00	2	58.844.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	8.400.000,00	1,00	11.400.000,00	1,00	31.010.000,00	2,00	56.410.000,00	100,00	95,86	57,00	183.281.500,00	101,79	91,64	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran DPMP/PTSP	Jumlah laporan perencanaan dan realisasi anggaran	Laporan	85	600.000.000,00	5	187.660.776,00	5	156.069.600,00	5	165.019.500,00	3,00	67.086.139,00	2,00	27.260.000,00	0,00	27.272.500,00	1,00	42.580.000,00	6,00	164.198.639,00	120,00	99,50	11,00	351.859.415,00	12,94	58,64	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentas e	100	7.188.458.000,00	49	3.514.412.122,00	85	1.922.480.000,00	85	1.334.666.700,00	8,00	101.761.042,00	14,12	188.434.428,00	12,00	155.679.732,00	52,00	698.897.704,00	86,12	1.144.772.906,00	101,32	85,77	135,12	4.659.185.028,00	135,12	64,81	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat keluar	Surat	2500	1.669.398.000,00	1500	446.892.600,00	500	415.000.000,00	500	276.397.800,00	2,00	950.000,00	186,00	103.050.000,00	188,00	103.750.000,00	368,00	203.645.000,00	744,00	411.395.000,00	148,80	148,84	2244,00	858.287.600,00	89,76	51,41	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tahun	5	456.000.000,00	3	260.960.953,00	1	200.000.000,00	1	111.444.000,00	0,25	29.232.426,00	0,25	10.914.272,00	0,25	26.505.732,00	0,25	61.383.917,00	1,00	128.036.347,00	100,00	114,89	4,00	388.997.300,00	80,00	85,31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terawat/di wujudkan	Unit	23	89.000.000,00	16	24.909.328,00	17	20.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	16,00	24.909.328,00	69,57	27,99	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan rumah tangga, peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	jenis	20	197.000.000,00	10	241.700.000,00	15	15.000.000,00	15	10.000.000,00	5,00	3.000.000,00	0,00	-	0,00	-	10,00	6.998.000,00	15,00	9.998.000,00	100,00	99,98	25,00	251.698.000,00	125,00	127,77	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang dapat digunakan	Jenis	8	470.010.000,00	5	123.957.000,00	5	88.000.000,00	5	100.096.000,00	2,00	5.000.000,00	0,00	-	3,00	6.500.000,00	3,00	26.250.000,00	8,00	37.750.000,00	160,00	37,71	13,00	161.707.000,00	162,50	34,41	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	50	325.000.000,00	30	216.310.000,00	50	60.000.000,00	30	62.818.520,00	9,00	18.798.200,00	7,00	14.550.000,00	4,00	7.400.000,00	10,00	21.470.000,00	30,00	62.218.200,00	100,00	99,04	60,00	278.528.200,00	120,00	85,70	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Meter	3480	174.000.000,00	1588	79.445.000,00	780	39.000.000,00	756	38.000.000,00	0,00	-	34,00	1.700.000,00	45,00	2.290.000,00	165,00	8.250.000,00	244,00	12.200.000,00	32,28	32,11	1832,00	91.645.000,00	52,64	52,67	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kerja/Perlengkap an kantor yang disediakan	Jenis	34	795.000.000,00	15	495.233.500,00	6	180.000.000,00	8	183.434.500,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	98.461.000,00	8,00	98.461.000,00	100,00	53,68	23,00	593.694.500,00	67,65	74,68	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang- Undangan	Jumlah Media Cetak	Media	6	48.000.000,00	6	26.720.000,00	6	200.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	26.720.000,00	100,00	55,67	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum rapat dan tamu	Kali	120	367.050.000,00	60	190.640.800,00	30	88.000.000,00	30	85.438.000,00	4,00	11.625.000,00	0,00	-	7,00	9.274.000,00	14,00	19.745.000,00	25,00	40.644.000,00	83,33	47,57	85,00	231.284.800,00	70,83	63,01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil rapat/koordinasi luar	Dokumen	92	1.198.000.000,00	60	622.813.509,00	40	300.000.000,00	40	243.401.600,00	3,00	18.949.476,00	11,00	46.701.216,00	0,00	-	30,00	113.937.407,00	44,00	179.588.099,00	110,00	73,78	104,00	802.401.608,00	113,04	66,98	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil rapat/koordinasi	Dokumen	156	950.000.000,00	80	564.729.432,00	50	267.480.000,00	50	175.236.280,00	4,00	14.205.940,00	7,00	11.218.940,00	0,00	-	47,00	138.757.380,00	58,00	164.182.260,00	116,00	93,69	138,00	728.911.692,00	88,46	76,73	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Jumlah Publikasi dimedia yang akan menjadi matrik layanan informasi	kali	60	450.000.000,00	8	220.100.000,00	13	50.000.000,00	13	48.400.000,00	0,00	-	0,00	300.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	300.000,00	0,00	0,62	8,00	220.400.000,00	13,33	48,98	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentas e	90	3.127.030.000,00	1.777.356.637,00	85	408.890.000,00	85	580.102.000,00	1,00	6.141.001,00	43,00	254.060.000,00	12,00	67.942.416,00	18,00	108.028.415,00	74,00	436.171.832,00	87,06	73,91	74,00	2.213.528.469,00	82,22	70,79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	Unit	8	1.350.000.000,00	5	1.005.746.000,00	5	100.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	5,00	1.005.746.000,00	62,50	74,50	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

50

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
												I		II		III		IV											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11x12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17													
	Seleksi Calon Pasikabraka Nasional	Jumlah Siswa SLTA/Sederajat yang terseleksi sebagai Calon Pasikabraka Tk. Nasional.	Orang	10	400.000.000,00	4	129.355.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	129.355.000,00	40,00	32,34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
	Peningkatan Kapasitas Pemuda Sarjana Penggerak Berprestasi	Jumlah Kader Pemuda Sarjana Desa	Orang	105	1.500.000.000,00	0	-	40	150.000.000,00	30	749.993.720,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	30,00	599.425.500,00	30,00	599.425.500,00	100,00	79,92	30,00	599.425.500,00	28,57	39,96	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Seleksi Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Jambore Pemuda Indonesia	Orang	220	1.630.000.000,00	0	-	30	210.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Seleksi Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	60	140.000.000,00	0	-	30	110.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Seleksi Kapal Pemuda Nusantara	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seleksi Kapal Pemuda Nusantara	Orang	70	230.000.000,00	0	-	25	70.000.000,00	25	30.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	Persentase	20	2.150.000.000,00	8	842.201.700,00	18	300.000.000,00	18	149.999.120,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	30,00	247.370.113,00	30,00	247.370.113,00	166,67	164,91	37,83	1.089.571.813,00	189,15	50,68	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Peningkatan Keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah pemuda Terampil	Orang	140	900.000.000,00	30	146.390.000,00	50	100.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	30,00	146.390.000,00	21,43	16,27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Peningkatan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Jumlah Kader Kewirausahaan Muda	Orang	190	1.250.000.000,00	50	695.811.700,00	50	200.000.000,00	50	149.999.120,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	50,00	247.370.113,00	50,00	247.370.113,00	100,00	164,91	100,00	943.181.813,00	52,63	75,45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	19	50.000.000,00	0	-	19,23	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Faktualisasi Data Olahraga	Jumlah Dokumen Faktualisasi Data	Dokumen	6	50.000.000,00	0	-	-	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase	50	25.480.470.000,00	9	4.400.417.790,00	48,19	7.218.536.486,00	48	2.920.064.536,00	1,30	37.999.629,00	2,46	71.977.871,00	12,00	357.848.716,00	12,00	338.267.228,00	27,76	806.093.444,00	57,61	27,61	36,39	5.206.511.234,00	72,78	20,43	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Penyelenggaraan POPWIL	Jumlah Cabang yang Didiri SLU BAR	Cabor	8	1.800.000.000,00	8	489.092.989,00	8	500.000.000,00	8	299.996.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	489.092.989,00	100,00	27,17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Jumlah Cabang yang Disoragindikan	Cabor	8	1.400.000.000,00	8	523.186.100,00	8	600.000.000,00	8	299.998.100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	523.186.100,00	100,00	37,37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Cabang yang di Kompetisikan	Cabor	5	2.400.000.000,00	3	651.728.882,00	40	1.000.000.000,00	40	400.000.000,00	0,00	15.770.000,00	0,00	13.830.000,00	7,00	70.400.000,00	15,00	150.000.000,00	22,00	250.000.000,00	55,00	62,50	25,00	901.728.882,00	500,00	37,57	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah Insan Olahraga yang memperoleh Penghargaan	Orang	31	1.070.000.000,00	0	-	7	300.000.000,00	7	196.350.460,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabang Olahraga Rekreasi yang dikembangkan	Cabor	5	1.740.000.000,00	3	352.128.882,00	5	600.000.000,00	2	139.997.060,00	0,00	-	0,00	-	1,00	66.123.440,00	0,00	-	1,00	66.123.440,00	50,00	47,23	4,00	418.252.322,00	80,00	24,04	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Peningkatan Jumlah Kualitas serta Kompetensi Pelatih	Jumlah Pelatih Olahraga yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	0	200.000.000,00	40	161.700.000,00	40	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	161.700.000,00	0,00	80,85	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Pembinaan Pusat Pelatihan Pemuda Pelajar (PPLP)	Jumlah Binaan Cabor Unggulan	Cabor	5	3.680.470.000,00	3	1.853.672.337,00	3	600.000.000,00	3	290.469.156,00	22.229.629,00	58.147.871,00	118.920.776,00	3,00	129.714.728,00	3,00	329.013.004,00	100,00	113,27	6,00	2.182.685.341,00	120,00	59,30	196.908.600,00	50,00	6,79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Mengikuti Kompetisi Sepak Bola Usia 14 Tahun Tingkat Nasional	Jumlah Tim ke Tingkat Nasional	Tim	4	2.900.000.000,00	2	196.908.600,00	1	200.000.000,00	3	793.254.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	196.908.600,00	50,00	6,79	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Pelaksanaan TC Tim Sepak Bola Usia 14 Tahun	Jumlah Atlet Subar yang mengikuti Persiapan Kompetisi U-14 Tahun	Orang	90	650.000.000,00	0	-	18	60.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Usia 14 Tk. Provinsi	Jumlah Peserta Kompetisi Tk. Provinsi	Orang	500	1.000.000.000,00	0	-	144	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Peningkatan kesehatan Jasmani dan Rekreasi	Jumlah Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat yang terlibat pada kegiatan Olahraga massal dan olahraga rekreasi	Ong. ASN, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	800	750.000.000,00	200	172.000.000,00	100	100.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	200,00	172.000.000,00	25,00	22,93	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Pembinaan Olahraga Lanjut Usia	Jumlah Olahraga Lanjut Usia	Cabor	90	350.000.000,00	0	-	5	80.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas	Jumlah Olahraga Penyandang Disabilitas	Cabor	4	400.000.000,00	0	-	5	100.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Rekreasi dan Penyandang Disabilitas	Jumlah Atlet yang Mengikuti Kompetisi Penyandang Disabilitas	Orang	180	900.000.000,00	0	-	60	200.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pelaksanaan Try Out	Jumlah Cabor yang Mengikuti Try Out	Cabor	3	900.000.000,00	0	-	3	450.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Kejumas Dayung	Jumlah Provinsi yang Mengikuti Kejumas Dayung	Provinsi	24	2.300.000.000,00	0	-	24	538.536.486,00	24	299.999.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Peningkatan Kapasitas Pembinaan Cabang Olahraga di ppi p	Bertambahnya Cabang Olahraga di ppi p	Cabor	3	1.000.000.000,00	0	-	3	450.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Pembinaan Club Olahraga Di Sulawesi Barat	Jumlah Club Binaan	Club	20	840.000.000,00	0	-	8	640.000.000,00	8	199.999.960,00	0,00	-	0,00	-	5,00	102.404.500,00	3,00	58.552.500,00	8,00	160.957.000,00	100,00	80,48	8,00	160.957.000,00	40,00	19,16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
	Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat	Jumlah Olahraga Tradisional yang Dikembangkan	Cabor	6	1.200.000.000,00	0	-	5	500.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	23	8.900.000.000,00	18	1.687.648.000,00	23	8.500.000.000,00	23	649.988.440,00	0,00	-	0,00	19.800.000,00	23,00	162.174.994,11	68,00	440.458.419,89	91,00	622.433.414,00	395,65	95,76	109,00	2.310.081.414,00	473,91	25,96	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
												I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Pembangunan Sarana Olahraga	gedung	2	8.150.000.000,00	2	1.687.648.000,00	2	8.000.000.000,00	2	599.991.800,00	0,00	-	19.800.000,00	2,00	112.284.994,11	0,00	440.458.419,89	2,00	572.543.414,00	100,00	95,43	4,00	2.260.191.414,00	200,00	27,73	Dinas Kepemanduan dan Olahraga	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana yang Layak digunakan	Lap	2	750.000.000,00	0	-	2	500.000.000,00	2	49.996.640,00	0,00	-	0,00	-	2,00	49.890.000,00	0,00	-	2,00	49.890.000,00	100,00	99,79	2,00	49.890.000,00	100,00	6,65	Dinas Kepemanduan dan Olahraga
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																												
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	5.517.820.000,00	86	4.764.739.000,00	10	772.391.921,00	10	771.145.021,00	2,00	148.830.000,00	2,00	155.360.000,00	3,00	213.884.463,00	3,00	238.235.978,00	10,00	756.310.441,00	100,00	98,08	96,00	5.521.049.441,00	96,00	100,06	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Naskah/Surat Dinas yang diterbitkan/dikurangkan dalam setahun	Naskah/Surat	1355	383.420.000,00	2920	436.052.000,00	1000	82.448.100,00	1000	79.403.100,00	223,00	5.269.000,00	168,00	18.580.000,00	252,00	21.432.100,00	347,00	33.885.056,00	990,00	79.166.156,00	99,00	99,70	3910,00	515.218.156,00	288,56	134,37	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telkom, Listrik dan TV yang terbayarkan dalam setahun	Rekening	216	575.500.000,00	108	420.838.000,00	36	83.388.628,00	36	70.241.748,00	9,00	22.956.000,00	9,00	10.687.000,00	9,00	16.638.863,00	9,00	10.559.822,00	36,00	60.839.685,00	100,00	86,61	144,00	481.677.685,00	66,67	83,70	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan yang memiliki kelengkapan SIM	Unit	66	128.180.000,00	58	60.381.000,00	11	15.000.000,00	11	10.060.000,00				8,00	6.548.700,00	3,00	1.550.000,00	11,00	8.098.700,00	100,00	80,50	69,00	68.479.700,00	104,55	53,42	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor tetap terjaga	Kantor	1	195.880.000,00	1	333.648.000,00	2	35.921.600,00	1	35.921.600,00			12.500.000,00		13.421.600,00	1,00	10.000.000,00	1,00	35.921.600,00	100,00	100,00	2,00	369.569.600,00	200,00	188,67	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang terpelihara	Unit	225	133.200.000,00	121	134.857.000,00	30	18.190.000,00	30	10.440.000,00	1,00	500.000,00	2,00	950.000,00	12,00	3.975.000,00	15,00	5.000.000,00	30,00	10.425.000,00	100,00	99,86	151,00	145.282.000,00	67,11	109,07	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jenis	172	318.480.000,00	114	460.879.000,00	30	53.023.300,00	30	52.253.300,00		30,00	48.193.000,00				3.828.000,00	30,00	52.021.000,00	100,00	99,56	144,00	512.900.000,00	83,72	161,05	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan media cetak	Media Cetak	60	190.000.000,00	15	105.380.000,00	5	10.060.000,00	5	6.750.000,00		2.800.000,00		2.240.000,00	5,00	1.710.000,00		5,00	6.750.000,00	100,00	100,00	20,00	112.130.000,00	33,33	59,02	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhiya kebutuhan konsumsi rapat dan Konsumsi Tamu	Kali	60	298.990.000,00	36	124.600.000,00	12	28.350.000,00	12	33.350.000,00	2,00	3.040.000,00	1,00	2.240.000,00	3,00	6.870.000,00	6,00	21.100.000,00	12,00	33.250.000,00	100,00	99,70	48,00	157.850.000,00	80,00	52,79	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pertemuan/rapat koordinasi dan kegiatan lain yang diikuti di luar daerah	kali	175	1.702.020.000,00	135	1.431.903.000,00	30	221.403.400,00	30	214.630.273,00	11,00	79.526.000,00	4,00	31.796.000,00	1,00	7.770.200,00	12,00	93.866.100,00	28,00	212.958.300,00	93,33	99,22	163,00	1.644.861.300,00	93,14	96,64	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pertemuan/rapat koordinasi dan kegiatan lain yang diikuti di dalam daerah	Kali	500	1.378.180.000,00	335	1.167.051.000,00	50	188.851.893,00	50	222.540.000,00	16,00	37.539.000,00	5,00	27.614.000,00	25,00	99.435.000,00	22,00	56.737.000,00	68,00	221.325.000,00	136,00	99,45	403,00	1.388.376.000,00	80,60	100,74	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
35	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Terkaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi yang menghadirkan seluruh Pemkab se-Sulawesi	Orang	500	213.970.000,00	300	89.150.000,00	200	35.755.000,00	200	35.555.000,00	200,00			35.555.000,00					200,00	35.555.000,00	100,00	100,00	500,00	124.705.000,00	100,00	58,28	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	4.707.880.000,00	80	2.174.158.000,00	10	199.940.000,00	10	232.840.000,00	0,00	4.350.000,00	0,00	17.850.000,00	2,00	43.125.000,00	8,00	167.409.900,00	10,00	232.734.900,00	100,00	99,95	90,00	2.406.892.900,00	90,00	51,12	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Jenis	50	3.680.980.000,00	40	1.275.585.000,00	15	80.000.000,00	15	113.700.000,00							15,00	113.649.900,00	15,00	113.649.900,00	100,00	99,96	55,00	1.389.234.900,00	110,00	37,74	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Kendaraan dinas/jabatan yang terjamin pemeliharaannya	Unit	5	350.000.000,00	7	386.753.000,00	1	69.470.000,00	1	68.670.000,00		4.350.000,00		650.000,00		24.945.000,00	1,00	38.700.000,00	1,00	68.645.000,00	100,00	99,96	8,00	455.398.000,00	160,00	130,11	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang terjamin pemeliharaannya	Unit	60	676.900.000,00	38	511.820.000,00	12	50.470.000,00	12	50.470.000,00		4,00	17.200.000,00	4,00	18.180.000,00	4,00	15.060.000,00	12,00	50.440.000,00	100,00	99,94	50,00	562.260.000,00	83,33	83,06	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai Kompetensi dan integritas ASN Dinas Perustakaan dan Kearsipan	Nilai	84	732.000.000,00	80	194.857.000,00	2	14.600.000,00	2	13.600.000,00	1,00	13.507.000,00						1,00	13.507.001,00	0,00	99,32	81,00	208.364.001,00	96,43	28,47	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SKPD	Orang	54	732.000.000,00	27	194.857.000,00	1	14.600.000,00	1	13.600.000,00	1,00	13.507.000,00						1,00	13.507.000,00	100,00	99,32	28,00	208.364.000,00	51,85	28,47	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Perustakaan dan Kearsipan	Nilai/Predikat	B	606.850.000,00	CC	366.050.000,00	B	81.328.800,00	B	79.278.800,00		3.300.000,00		23.728.000,00		17.851.800,00		33.427.000,00		78.306.800,00		98,77		444.356.800,00		73,22	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pencapaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Laporan	15	213.050.000,00	22	228.958.000,00	12	6.649.600,00	12	6.649.600,00		6,00	1.730.000,00	3,00	2.399.600,00	3,00	2.480.000,00	12,00	6.609.600,00	100,00	99,40	34,00	235.567.600,00	226,67	110,57	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
06	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun	Dokumen	20	183.800.000,00	12	137.092.000,00	4	36.240.800,00	4	35.840.800,00	2,00	3.300.000,00		8.621.000,00	5.191.800,00	2,00	18.467.000,00	4,00	35.579.800,00	100,00	99,27	16,00	172.671.800,00	80,00	93,95	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
24	Penyusunan laporan keuangan triwulan	Jumlah Laporan keuangan triwulan	Laporan	6	210.000.000,00	4	-	2	38.438.400,00	2	36.788.400,00		1,00	13.377.000,00		10.260.400,00	1,00	12.480.000,00	2,00	36.117.400,00	100,00	98,18	6,00	36.117.400,00	100,00	17,20	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Kebijakan Kearsipan yang ditetapkan	Angka	3	300.000.000,00	0	-	1	64.220.000,00	1	64.099.900,00				10.455.000,00	1,00	51.432.500,00	1,00	61.887.500,00	100,00	96,55	1,00	61.887.500,00	33,33	20,63	Dinas Perustakaan dan Kearsipan		
14	Penyusunan Pedoman Kearsipan	Jumlah Dokumen pedoman kearsipan yang ditetapkan	dokumen	3	300.000.000,00	0	-	1	64.220.000,00	1	64.099.900,00				10.455.000,00	1,00	51.432.500,00	1,00	61.887.500,00	100,00	96,55	1,00	61.887.500,00	33,33	20,63	Dinas Perustakaan dan Kearsipan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re		K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re								K	Re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13x6	16 = 15/100	17												
16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baik	Persen	10	1.542.510.000,00	2	227.015.000,00	4,9	112.454.000,00	5	109.754.000,00			41.486.000,00	4,90	63.819.000,00	4,90	105.305.000,00	100,00	95,95	4,90	332.320.000,00	49,00	21,54	Dinas Perustakaan dan Kearsipan			
10	Pengelolaan Jaringan Informasi Kearsipan	Pengelola Jaringan Informasi Kearsipan SKPD dan LKD Kabupaten mampu menerapkan sarky/sarky	Orang	150	905.360.000,00	0	198.865.000,00	30	39.784.000,00	30	39.784.000,00				5,00	36.787.000,00	5,00	36.787.000,00	16,67	92,47	5,00	235.652.000,00	3,33	26,03	Dinas Perustakaan dan Kearsipan			
11	Penilaian dan Akutisi Arsip	Jumlah arsip statis yang diarsipkan	Boks	400	637.150.000,00	50	28.150.000,00	25	72.670.000,00	25	69.970.000,00				20,00	41.486.000,00	5,00	27.032.000,00	25,00	68.518.000,00	100,00	97,92	75,00	96.668.000,00	18,75	15,17	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan masyarakat	Real/Redik aset/Lemb ar	10	548.040.000,00	0		10	18.015.000,00	10	7.682.000,00						7.442.000,00		7.442.000,00		96,88		7.442.010,00		1,36	Dinas Perustakaan dan Kearsipan		
13	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan	Jumlah SKPD yang dimonev	OPD	0	548.040.000,00	40	87.638.400,00	20	18.015.000,00	5	7.682.000,00					5,00	7.442.000,00	5,00	7.442.000,00	100,00	96,88	45,00	95.080.400,00	#DIV/0!	17,35	Dinas Perustakaan dan Kearsipan		
20	Program Peningkatan Minat dan Budaya Baca	Persentase pengunjung per orang	persen	0	1.145.820.000,00	0	430.085.000,00	0,002	112.300.000,00	0	99.600.000,00		728.000,00		25.186.000,00		15.984.000,00		53.756.000,00		95.654.000,00		96,04		525.739.000,00		45,88	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
05	Pelayanan Perustakaan Keliling	Jumlah Pelayanan Perustakaan keliling	Kabupaten	6	1.145.820.000,00	6	430.085.000,00	6	112.300.000,00	6	99.600.000,00		728.000,00	2,00	25.186.000,00	1,00	15.984.000,00	3,00	53.756.000,00	6,00	95.654.000,00	100,00	96,04	12,00	525.739.000,00	200,00	45,88	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perustakaan	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Angka	2	4.354.620.000,00	2	2.603.879.000,00	1,852	680.328.000,00	2	677.578.000,00					48.499.000,00	1,85	612.821.584,00	1,85	661.320.584,00	100,00	97,60	1,85	3.265.199.584,00	98,77	74,98	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
01	Penyediaan Bahan Pustaka Perustakaan Umum Daerah	Peningkatan jumlah koleksi buku yang tersedia di Perustakaan Daerah	Eksampler	39544	2.927.240.000,00	36018	1.699.061.000,00	500	232.624.000,00	500	233.724.000,00					200,00	31.099.000,00	300,00	200.623.900,00	500,00	231.722.900,00	100,00	99,14	36518,00	1.930.783.900,00	92,35	65,96	Dinas Perustakaan dan Kearsipan
02	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perustakaan Umum, Perustakaan Khusus, Perustakaan Sekolah dan Perustakaan Masyarakat	Jumlah Perustakaan yang disupervisi dan diberikan pembinaan	Perpustakaan	60	1.427.380.000,00	33	904.818.000,00	7	447.704.000,00	7	443.854.000,00					17.400.000,00	7,00	412.197.684,00	7,00	429.597.684,00	100,00	96,79	40,00	1.334.415.684,00	66,67	93,49	Dinas Perustakaan dan Kearsipan	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																												
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan dasar operasional DKP guna mendukung tugas pokok dan fungsinya		1	7.786.732.757,00		1.095.923.869,00	1	1.198.919.000,00	293	691.727.874,82		99.381.800,00		166.701.000,00		112.283.400,00		273.294.340,00		651.660.540,00		0,94		1.747.584.409,00		305,93	Dinas Kelautan dan Perikanan
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi jasa surat yang terdapat	Orang	70	848.800.000,00	13	82.797.000,00	15	112.892.000,00	16	77.202.000,00	0,00	-	5,00	25.350.000,00	4,00	20.482.000,00	6,42	31.368.000,00	15,42	77.200.000,00	97,60	100,00	28,05	159.997.000,00	40,07	18,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening (Listrik, telepon, air dan komputer/jaringan) yang terdapat	Rekening	240	518.400.000,00	40	103.498.000,00	200		41	73.848.080,24	0,00	-	13,00	22.808.000,00	16,00	29.708.400,00	-0,72	1.302.460,00	28,28	51.213.940,00	69,64	69,35	68,30	154.711.940,00	28,46	29,84	Dinas Kelautan dan Perikanan
02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang terbeli dan terpelihara (diservice)	Unit	191	1.089.100.000,00	27	84.800.000,00	4	33.022.400,00	37	105.290.000,00	0,00	-	10,00	29.350.000,00	6,00	16.915.000,00	17,46	50.320.000,00	33,46	96.585.000,00	91,60	91,73	60,59	181.385.000,00	31,72	16,65	Dinas Kelautan dan Perikanan
06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor yang terdapat	Orang	10	170.942.800,00	2	31.601.500,00	32	121.200.000,00	2	31.383.800,00	0,00	-	1,00	11.000.000,00	0,00	5.303.000,00	0,96	15.080.000,00	1,96	31.383.000,00	98,05	100,00	3,96	62.984.500,00	39,61	36,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Jenis	15	271.732.360,00	2	63.922.000,00	2	35.000.000,00	1	37.712.936,00	0,00	-	1,00	13.000.000,00	0,00	7.866.000,00	0,67	16.846.700,00	1,67	37.712.700,00	111,41	100,00	3,67	101.634.700,00	24,46	37,40	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	Dokumen	280	41.209.425,00	62	6.750.000,00	2	67.000.000,00	42	4.500.000,00	0,00	-	0,00	-	9,00	990.000,00	32,97	3.510.000,00	41,97	4.500.000,00	99,29	100,00	103,97	11.250.000,00	37,13	27,30	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan yang terdapat	Jenis	51	11.194.897,00	4	1.940.000,00	2	7.100.000,00	4	2.040.700,00	0,00	-	0,00	-	2,00	814.000,00	2,40	1.225.100,00	4,40	2.039.100,00	110,03	99,92	8,40	3.979.100,00	16,47	35,54	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang terdapat	Paket	16	1.263.755.700,00	0	-	36	70.000.000,00	5	7.470.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,51	2.250.000,00	1,51	2.250.000,00	30,12	30,12	1,51	2.250.000,00	9,41	0,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang terdapat	Kali	160	312.581.120,00	36	58.780.000,00	4	2.111.200,00	19	32.560.000,00	0,00	-	8,00	14.012.000,00	3,00	6.000.000,00	7,22	12.443.000,00	18,22	32.455.000,00	96,40	99,68	54,21	91.235.000,00	33,88	29,19	Dinas Kelautan dan Perikanan
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Perijinan Dinas luar daerah yang tersusun	Laporan	225	2.145.465.524,00	38	362.253.369,00	2	62.000.000,00	15	111.269.308,24	11,27	85.510.400,00	0,00	-	0,00	-	3,39	25.695.000,00	14,65	111.205.400,00	99,94	99,94	52,65	473.458.769,00	23,40	22,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah laporan Perijinan dinas dalam daerah yang tersusun	Laporan	455	969.550.931,00	135	299.582.000,00	38	370.000.000,00	111	208.451.050,34	7,41	13.871.400,00	27,00	51.181.000,00	13,00	24.205.000,00	61,93	115.859.000,00	109,34	205.116.400,00	98,14	98,40	244,15	504.698.400,00	53,66	52,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor yang tersedia	Jumlah jasa keamanan kantor yang tersedia	Orang	8	144.000.000,00	0	-	135	318.593.400,00	0	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras untuk kantor, administrasi dan operasional ASN DPK, jumlah jasa kinerja ASN yang terpakai		1	2.714.102.700,00	399.530.821,00	1	387.366.000,00	1	438.101.000,00	-	172.065.000,00	146.908.300,00	93.209.860,00	412.183.160,00	0,94	811.713.981,00	255,60								Dinas Kelautan dan Perikanan				
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	29	470.092.700,00	0	-	5	123.100.000,00	5	69.015.000,00	0,00	-	5,00	68.509.000,00	0,00	420.500,00	-	5,00	68.929.500,00	100,00	99,88	5,00	68.929.500,00	17,24	14,66	Dinas Kelautan dan Perikanan			
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan rehabilitasi gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihar	Unit	5	175.000.000,00	1	80.137.000,00	1	51.166.000,00	1	80.366.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	79.156.000,00	0,00	420.000,00	1,00	79.576.000,00	100,00	99,02	1,99	159.713.000,00	39,76	91,26	Dinas Kelautan dan Perikanan		
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli	Unit	20	295.000.000,00	4	190.709.900,00	6	46.000.000,00	7	114.500.000,00	0,00	-	5,00	81.762.000,00	0,03	420.100,00	1,92	31.616.000,00	6,95	113.798.100,00	99,77	99,39	10,93	304.508.000,00	54,66	103,22	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terbeli (mobil)	unit mobil	9	460.000.000,00	7	15.402.000,00	3	31.100.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	6,67	15.402.000,00	74,17	3,35	Dinas Kelautan dan Perikanan			
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapat pemeliharaan	unit	148	610.510.000,00	34	113.281.921,00	34	119.900.000,00	20	174.220.000,00	0,00	-	3,00	21.794.000,00	8,00	66.911.700,00	7,06	61.173.860,00	18,06	149.879.560,00	89,82	86,03	52,02	263.161.481,00	35,15	43,11	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun/tersedia	Unit	1	600.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan			
	Pengadaan Meubeler Kantor	Jumlah meubeler yang terbeli	Jenis	9	103.500.000,00	0	-	1	16.100.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN lingkup DPK yang memiliki disiplin, etos kerja dan kualitas yang baik		1	210.000.000,00	76.556.800,00	1	75.350.000,00		71.900.000,00	-	71.429.000,00	60.250,00	360.000,00	71.849.250,00	99,93	148.406.050,00	70,67									Dinas Kelautan dan Perikanan			
2	Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian pegawai yang terbeli	org	740	210.000.000,00	108	76.556.800,00	151	75.350.000,00	151	71.900.000,00	0,00	-	150,00	71.429.000,00	0,13	60.250,00	0,76	360.000,00	150,88	71.849.250,00	99,92	99,93	258,88	148.406.050,00	34,98	70,67	Dinas Kelautan dan Perikanan		
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, ASN yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek		1	1.877.000.000,00	96.485.000,00	1	158.165.000,00		13.633.000,00	13.633.000,00	-	-	-	13.633.000,00		100,00		110.118.000,00								9,28	Dinas Kelautan dan Perikanan		
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur dinas yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal	Orang	25	1.187.000.000,00	5	96.485.000,00	7	98.165.000,00	3	13.633.000,00	2,80	13.633.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,80	13.633.000,00	100,00	100,00	7,77	110.118.000,00	31,07	9,28	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Sosialisasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Bid. Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta yang memahami hukum dan peraturan perundang-undangan bid. Kelautan dan perikanan	Orang	120	180.000.000,00	0	-	76	60.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Bimtek Peningkatan Sumberdaya Manusia ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Orang	740	310.000.000,00	0	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Penguatan Kinerja ASN melalui kegiatan Outbond	Jumlah ASN DPK Subpar yang mengikuti outbond	Orang	425	200.000.000,00	0	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
06	Program Peningkatan Pengendalian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada DPK yang akurat, terupdate, transparan dan terpercaya		1	2.722.901.725,00	473.628.900,00	Tepat waktu	541.817.700,00		530.067.400,00	85.931.600,00		70.220.800,00		36.000.000,00		302.555.200,00		494.707.600,00		0,93		968.336.500,00		980,14	Dinas Kelautan dan Perikanan				
02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DPK yang terusun	Laporan	5	29.000.000,00	1	5.770.000,00	1	7.098.000,00	1	6.998.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	6.998.400,00	1,00	6.998.400,00	100,00	100,00	1,82	12.768.400,00	36,49	44,03	Dinas Kelautan dan Perikanan		
04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPK Prox Subpar yang terusun	Laporan	5	29.000.000,00	1	5.100.000,00	1	6.973.000,00	1	6.676.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	6.666.400,00	1,00	6.666.400,00	99,85	99,85	1,76	11.766.400,00	35,25	40,57	Dinas Kelautan dan Perikanan		
05	Penyusunan LKPI, LAKIP dan LPPD SKPD	Jumlah laporan LAKIP, LPPD dan LKPI SKPD yang terusun	Laporan	15	87.000.000,00	2	11.280.000,00	3	17.376.000,00	3	16.160.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,09	11.280.000,00	13,96	12,97	Dinas Kelautan dan Perikanan		
06	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-DPA yang terusun	Dokumen	5	41.000.000,00	2	12.540.000,00	1	14.378.000,00	2	14.040.800,00	0,00	-	0,22	1.540.800,00	0,23	1.600.000,00	1,36	9.580.000,00	1,81	12.720.800,00	90,60	90,60	3,60	25.260.800,00	71,96	61,61	Dinas Kelautan dan Perikanan		
07	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P/DPPA yang terusun	Dokumen	5	41.000.000,00	2	12.540.000,00	1	14.378.000,00	2	14.040.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,22	8.540.800,00	1,22	8.540.800,00	60,83	60,83	3,00	21.080.800,00	60,06	51,42	Dinas Kelautan dan Perikanan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17												
10	Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Sistem Informasi, Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga jasa operator keuangan, komputer dan jaringan yang terpasang	Orang	89	1.251.545.500,00	18	50.940.000,00	4	64.164.000,00	5	62.225.200,00	0,00	-	0,00	-	4,59	58.475.200,00	4,59	58.475.200,00	93,97	93,97	22,58	109.415.200,00	25,37	8,74	Dinas Kelautan dan Perikanan		
47	Rapat Koordinasi Forum SKPD DKP Se-Prov. Subar	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Forum SKPD - DKP se-Prov.Subar	Orang	250	456.356.225,00	49	80.425.700,00	30	77.468.700,00	50	86.320.600,00	49,77	85.931.600,00	0,00	-	0,00	-	49,77	85.931.600,00	99,55	91,85	98,65	166.357.300,00	39,46	36,45	Dinas Kelautan dan Perikanan		
49	Penyusunan RENJA Pokok dan RENJA Perubahan yang terpasang	Jumlah dokumen RENJA dan Renja Perubahan yang terpasang	Dokumen	8	58.000.000,00	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen RENJA 2019 dan RENJA Perubahan 2018 yang terpasang	Dokumen	8	10.000.000,00	2	13.880.000,00	2	18.271.000,00	2	33.876.800,00	0,00	-	0,58	8.680.000,00	0,30	4.400.000,00	1,16	17.156.800,00	2,04	30.236.800,00	89,26	89,26	3,66	44.116.800,00	45,79	441,17	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Forum Musyawarah Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat	Orang	40	65.000.000,00	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Kegiatan Forum petugas statistik Kelautan dan Perikanan Prov Sul-Bar	Jumlah peserta yang mengikuti forum data statistik DKP Se-Provinsi Sulawesi Barat	Orang	30	100.000.000,00	14	109.903.200,00	30	107.601.000,00	15	93.557.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	15,45	93.527.600,00	15,45	93.527.600,00	99,97	99,97	29,36	203.430.800,00	97,88	203,43	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Validasi Data statistik Kelautan dan Perikanan	Jumlah data statistik bidang kelautan dan perikanan yang akurat dan valid	Laporan	4	100.000.000,00	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Pengembangan data/informasi kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen data/informasi bidang kelautan dan perikanan	Dokumen	20	455.000.000,00	5	171.250.000,00	5	214.110.000,00	6	196.170.000,00	0,00	-	1,77	60.000.000,00	0,89	30.000.000,00	3,00	101.610.000,00	5,67	191.610.000,00	97,68	97,68	10,67	362.860.000,00	53,33	79,75	Dinas Kelautan dan Perikanan
30	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Barat		1	3.769.000,00		968.796.310,00	1	1.284.360.000,00		630.581.590,00	-		76.556.000,00		315.496.100,00		72.996.900,00				465.049.000,00	0,74		1.433.845.310,00		305.878,73	Dinas Kelautan dan Perikanan
001	Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Jumlah hari operasi kapal pengawas perikanan	Hari	750	2.610.000,00	137	331.534.550,00	50	350.000.000,00	25	466.527.100,00	0,00	-	4,17	76.556.000,00	17,19	315.496.100,00	3,98	72.996.900,00	25,34	465.049.000,00	99,68	99,68	162,66	796.583.550,00	21,69	30.520,44	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Jumlah data dan informasi terhadap usaha perikanan, pembudidayaan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan, serta usaha pengalihan dan pemasaran ikan yang memenuhi standar	Dokumen	24	160.000,00	0	-	6	50.000.000,00	0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
004	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terpasang	Unit	11	375.000,00	3	473.161.760,00	3	534.360.000,00	1	164.054.490,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,82	473.161.760,00	25,66	126.176,47	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pembinaan POKMASWAS	Jumlah Pokmaswas yang terbiasa dan memiliki administrasi yang baik	kelompok	225	110.000,00	24	164.100.000,00	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	24,30	164.100.000,00	10,80	149.181,82	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Verifikasi, monitoring dan evaluasi POKMASWAS	Jumlah laporan verifikasi dan money pokmaswas yang terpasang				0	-	-	-	0	-	-								0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta yang meningkat kesadarannya terhadap pengelolaan SKPD	Orang	60	50.000,00	0	-	-	-	0	-	-								0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Sosialisasi dan sosialisasi aturan perundang-undangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemberitahuan/informasi yang terdistribusi ke masyarakat terkait PSDKP: Jumlah masyarakat yang terbiasa	Orang	30	25.000,00	0	-	30	100.000.000,00	0	-	-								0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Konservasi, pemantauan dan karantina sumber daya kelautan dan perikanan					0	-	-	-		-	-								0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pembinaan konservasi dan pengendalian lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah kegiatan Pembinaan Konservasi dan Pengendalian Lingkungan SKPD	Kali	6	100.000,00	0	-	-	-	0	-	-								0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11x12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17														
	Bimbingan Teknis Operasi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya dalam Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran	Orang	30	50.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
02	Peningkatan SDM Aparat pengawas dan POMASWAS	Jumlah aparat Pengawas kelautan dan Perikanan yang terlatih scuba diving	Orang	50	79.000,00	0	-	5	100.000.000,00	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Prov. Subar	Jumlah anggota tim terpadu pengawasan SDKP yang terbentuk	Orang	20	25.000,00	0	-	1	50.000.000,00	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Jumlah laporan monev pengawasan dan penegakan hukum SDKP	Laporan	4	50.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Forum Koordinasi Pengawasan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan forum koordinasi	Orang	60	50.000,00	0	-	20	100.000.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Temu Teknis Pengawas Perikanan Tingkat Sulawesi Barat	Jumlah peserta temu teknis pengawas perikanan tingkat Provinsi	Orang	90	85.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengelolaan Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSNKP)										0,00																Dinas Kelautan dan Perikanan			
20	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase perkembangan perikanan budidaya dalam menunjang peningkatan produksi, kesejahteraan pembudidaya dan terwujudnya industri aquaculture yang berdaya saing dan berkelanjutan		1	14.732.400.000,00	2.040.427.674,00	0,07	1.534.460.000,00	701.239.600,00			57.158.800,00	20.000.000,00	88.072.800,00	488.102.700,00	653.334.300,00	0,93							2.693.761.974,00		39,09		Dinas Kelautan dan Perikanan		
17	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang terdistribusi	Unit	118	12.218.000.000,00	12	1.944.552.674,00	3	1.244.460.000,00	7	565.450.000,00	0,05	3.760.000,00	0,24	20.000.000,00	0,17	13.760.000,00	5,89	483.806.700,00	6,34	521.326.700,00	92,20	92,20	18,19	2.465.679.374,00	15,41	20,18	Dinas Kelautan dan Perikanan		
22	Temu Lapang Budidaya Perikanan	Jumlah laporan temu lapang, temu teknis, dan temu usaha budidaya air laut, air payau, dan air tawar yang terdistribusi	Laporan	30	1.205.000.000,00	6	95.875.000,00	2	220.000.000,00	6	135.789.600,00	2,28	53.398.800,00	0,00	-	3,17	74.312.800,00	0,18	4.296.000,00	5,63	132.007.600,00	97,21	97,21	11,59	227.882.600,00	38,63	18,91	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengembangan Budidaya Air Payau, Air Laut dan Air Tawar	Jumlah sarana budidaya air payau, air laut, air tawar yang terdistribusi	Unit	155	-	0	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Sertifikasi bidang tanah pembudidaya	Jumlah sertifikat tanah pembudidaya yang didistribusikan	Sertifikat	500	200.000.000,00	0	-	20	20.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Sertifikasi CBIB dan pengawasan CBIB	Jumlah sertifikat CBIB yang terbit dan pengawasan CBIB	Sertifikat	500	600.000.000,00	0	-	100	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengelolaan perizinan pembudidayaan ikan	Jumlah kawasan budidaya yang usahanya terdistribusi	Kawasan	24	109.000.000,00	0	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengelolaan sistem kesehatan ikan dan budidaya	Jumlah kawasan budidaya bebas residu	Kawasan	24	400.000.000,00	0	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pemeriksaan dan analisis kesehatan ikan dan budidaya				0	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pembinaan, pendampingan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan				0	-	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pengembangan SDM aparatur dan pembudidaya	Jumlah aparatur dan pembudidaya yang terlatih	orang	50	-	0	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan budidaya		Laporan	130	400.000,00	-	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan		
21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase perkembangan perikanan tangkap dalam menunjang peningkatan produksi, kesejahteraan nelayan dan terwujudnya industri perikanan tangkap yang berdaya saing dan berkelanjutan		1	18.541.000.000,00	7.614.680.971,00	0,08	3.098.080.000,00	3.702.226.400,00			29.260.000,00	156.279.500,00	420.391.580,00	2.654.127.960,00	3.293.195.540,00	0,89							10.874.740.011,00		624,74		Dinas Kelautan dan Perikanan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K	Re	K	Re	K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17																				
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia	Unit	141	14.250.000.000,00	26	6.554.749.972,00	6	2.292.880.000,00	13	3.524.209.600,00	0,00	-	0,48	124.227.500,00	1,54	401.731.580,00	9,94	2.598.485.260,00	11,96	3.124.444.340,00	88,66	88,66	38,36	9.679.194.312,00	27,21	67,92	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Replacement sarana perikanan tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang tergantikan/diperbaharui	Unit	25	425.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan	Jumlah peserta kegiatan pengenalan inovasi teknologi penangkapan ikan	Orang	90	175.000.000,00	0	-	220	50.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pengenalan dan penguasaan karakteristik daerah penangkapan ikan	Jumlah peserta kegiatan pengenalan dan penguasaan karakteristik daerah penangkapan ikan	Orang	100	200.000.000,00	19	200.420.000,00	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	19,00	200.420.000,00	0,00	100,21	Dinas Kelautan dan Perikanan								
27	Rakor Forum Kenelayanan se Prov. Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang mengikuti rapat forum kenelayanan	Orang	250	265.000.000,00	72	99.733.000,00	90	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	99.733.000,00	0,00	37,64	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Festhel Nelayan se Sulawesi Barat	Jumlah nelayan yang mengikuti festival nelayan	Orang	400	550.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	Jumlah dokumen katalog alat tangkap yang tersedia	Dokumen	1	50.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
40	Cek Fisik Penerbitan SIPH, SIKPI dan Penerbitan Buku Kapal	Jumlah kapal perikanan yang terfasilitasi cek fisik untuk penerbitan SIPH, SIKPI dan buku kapal	kapal	820	395.000.000,00	100	134.431.800,00	170	265.200.000,00	173	136.856.700,00	37,00	29.260.000,00	40,53	32.052.000,00	23,60	18.660.000,00	70,36	55.642.700,00	171,50	135.614.700,00	99,09	99,09	271,33	270.046.500,00	33,09	68,37	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pelatihan Petugas Cek Fisik Kapal dan Alat Penangkapan Ikan	Jumlah peserta/petugas yang telah melakukan cek fisik kapal dan alat penangkapan ikan	Orang	50	196.000.000,00	16	110.000.000,00	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	16,00	110.000.000,00	32,00	56,12	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pelatihan keahlian BST, ANKAPIN, dan ATKAPIN bagi nelayan	Jumlah nelayan yang terfasilitasi sertifikat keahlian BST, ANKAPIN dan ATKAPIN	Orang	250	260.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pelatihan Penggunaan Alat Bantu Penangkapan Ikan bagi masyarakat nelayan	Jumlah nelayan yang terlatih dan terampil dalam menggunakan alat bantu penangkapan ikan	Orang	500	175.000.000,00	167	515.346.199,00	120	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	167,18	515.346.199,00	33,44	294,48	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pelatihan Pembukuan Kegiatan Nelayan	Jumlah nelayan yang terlatih dalam pembukuan hasil produksi	Orang	40	100.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Asuransi Nelayan Mandiri	Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan Asuransi secara mandiri		0		0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Identifikasi dan sertifikasi bidang tanah nelayan	Jumlah data/laporan persiapan sertifikat tanah nelayan	Laporan	25	181.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pendampingan dan pembinaan Koperasi dan KUB	terfasilitasinya Koperasi dan KUB, Peningkatan Status Koperasi dan KUB	Koperasi	50	179.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
		terfasilitasinya Koperasi dan KUB, Peningkatan Status Koperasi dan KUB	KUB	500		0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Subar Command Center untuk Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah sarana prasarana penunjang Subar Command Center yang tersedia	Unit	230	250.000.000,00	0	-	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok perikanan tangkap	Jumlah laporan/data dan informasi terkait kelompok perikanan tangkap yang layak diberi bantuan	Laporan	36	110.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Identifikasi dan Pengembangan Kampung Nelayan Terintegrasi	Jumlah sarana dan prasarana untuk pengembangan kampung nelayan yang terbangun/direhabilitasi	Unit	250	500.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re					K	Re	K	Re	K	Re	K	Re					
												I	II	III	IV													
1	2	3	4	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	K	Re	15 = 13+6	16 = 15*100	17				
	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Nelayan	Jumlah perempuan nelayan yang terlatih	Orang	50	110.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Pelatihan Keterampilan Keluarga bagi Kelompok Perempuan Nelayan	Jumlah kelompok perempuan nelayan yang terlatih dan terampil	Orang	50	110.000.000,00	0	-	120	50.000.000,00	0	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Pemberdayaan Pengusaha/ Eksportir Lokal Ikan di Desa Nelayan	Jumlah pengusaha/eksp ortir lokal yang meningkat kecapaianannya	Orang	25	60.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan				
52	Perjanjian Kerjasama Nelayan Andon antar Provinsi se-Indonesia	Jumlah Laporan Perjanjian Kerjasama	Laporan	2	255.000.000,00	0	-	1	240.000.000,00	1	41.160.100,00	-	-	-	-	0,50	33.136.500,00	0,50	33.136.500,00	80,51	80,51	0,50	33.136.500,00	25,18	12,99	Dinas Kelautan dan Perikanan		
29	Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan (diast terakreditasi)		1	9.295.000.000,00	6.547.661.540,00	5	403.062.886,00	2.658.765.319,68	4.923,10	10.123.100,00	15.508.500,00	2.163.487.138,90	2.189.123.662,00	0,82	8.736.785.202,00	241,87	Dinas Kelautan dan Perikanan										
05	Pembangunan dan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Palpi	Jumlah sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan palpi yang terbangun dan	Unit	18	4.400.000.000,00	1	6.448.110.640,00	5	302.350.000,00	1	2.593.973.770,00	0,00	-	0,00	5.200.000,00	0,00	1.840.000,00	1,00	2.118.825.260,00	1,00	2.125.865.260,00	187,19	81,95	2,50	8.573.975.900,00	13,87	194,86	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pembangunan Kawasan Pemukiman Nelayan Pelabuhan Perikanan Palpi	Jumlah kawasan pemukiman nelayan yang dibangun	Unit	4	750.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pembangunan Kawasan Pengelolaan Ikan Pelabuhan Perikanan Palpi	Jumlah kawasan pengelolaan ikan yang terbangun	Unit	4	660.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Belanja Penunjang Pelabuhan Perikanan Palpi	Jumlah jenis kegiatan penunjang Pelabuhan Perikanan Palpi yang tersedia	Jenis	23	390.000.000,00	4	86.884.900,00	5	88.050.886,00	4	54.695.549,68	0,00	4.923,10	0,32	4.923.100,00	0,77	11.948.500,00	2,34	36.325.678,90	3,42	53.202.402,00	97,27	97,27	7,86	140.087.302,00	34,19	35,92	Dinas Kelautan dan Perikanan
01	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Pelabuhan Perikanan	Jumlah laporan RKL dan RPL yang tersusun	Laporan	10	205.000.000,00	2	12.666.000,00	2	12.682.000,00	1	10.096.000,00	0,00	-	0,00	-	0,21	1.720.000,00	1,02	8.336.000,00	1,23	10.056.000,00	99,60	99,60	3,22	22.722.000,00	32,16	11,08	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Study Kelayakan dan DED pembangunan PPI	Jumlah laporan study kelayakan dan DED pembangunan PPI yang tersusun	Dokumen	2	265.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Penyusunan AMDAL pembangunan PPI	Jumlah dokumen amdal pembangunan PPI yang tersusun	Dokumen	2	550.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Jumlah pelabuhan perikanan yang dikembangkan	Unit	25	2.075.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
31	Program Pengembangan Balai Benih Ikan/Udang Pantai	Peningkatan pengelolaan Balai Buddidaya Ikan/Udang Pantai yang berdaya saing dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan perikanan budidaya setiap tahun		1	5.037.000.000,00	896.278.534,00	0,85	1.388.177.900,00	597.899.884,00	28.973.200,00	95.253.500,00	231.191.100,00	93.674.574,00	449.092.374,00	0,75	1.345.370.908,00	64,14	Dinas Kelautan dan Perikanan										
02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan/Udang Pantai Poniang	Jumlah sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan/Udang Pantai Poniang yang terbangun/ dikembangkan	Unit	60	2.545.000.000,00	12	594.892.634,00	8	1.006.610.000,00	1	227.474.100,00	0,00	-	0,00	-	0,25	63.018.000,00	0,21	53.120.000,00	0,46	116.138.000,00	51,06	51,06	12,42	711.030.634,00	20,70	27,94	Dinas Kelautan dan Perikanan
01	Belanja Penunjang BBI Poniang	Jumlah kegiatan penunjang di BBI Poniang yang tersedia	Jenis	48	1.752.000.000,00	2	301.385.900,00	9	331.567.900,00	8	370.425.784,00	0,61	28.973.200,00	2,01	95.253.500,00	3,56	168.173.100,00	0,86	40.554.574,00	7,04	332.954.374,00	89,88	89,88	8,98	634.340.274,00	18,70	36,21	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Peningkatan SDM aparatur dan tenaga teknis BBIP Poniang	Jumlah pegawai BBIP yang mengikut pelatihan/ TOT monev	Orang	11	185.000.000,00	0	-	3	30.000.000,00	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Pelatihan Pengelolaan Perikanan	Jumlah peserta yang terlatih dalam pengelolaan perikanan	Orang	95	165.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Temu Lapang	Jumlah laporan temu lapang yang tersusun	Laporan	57	135.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Temu Usaha	Jumlah laporan Temu Usaha yang tersusun	Laporan	36	110.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
	Monitoring dan evaluasi distribusi benih ikan/udang		Laporan	48	145.000.000,00	0	-	12	20.000.000,00	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan		
33	Program Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau- Pulau Kecil	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam mewujudkan keagjahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Subar		1	11.540.000.000,00	1.250.667.900,00	1	830.810.000,00	1.526.023.764,70	-	457.918.300,00	303.114.600,00	684.064.800,00	1.503.900.900,00	0,99	2.695.765.600,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K		R		K		R		K		R		I		II		III		IV		K		R			K		R		K		R	
				K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R	K	R		K	R	K	R	K	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17																				
09	Pemberdayaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah sarana dan prasarana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang terdapat	Unit	56	2.020.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan						
13	Pengadaan sarana air bersih	Jumlah sarana air bersih yang terdapat	Unit	1500	1.860.000.000,00	150	161.945.000,00	4	50.000.000,00	150	92.480.000,00	0,00	-	0,00	-	97,32	59.999.500,00	52,67	32.472.000,00	149,99	92.471.500,00	99,99	99,99	299,90	254.416.500,00	19,99	13,68	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Sosialisasi PERDA RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang meningkat pengetahuannya a mengenai PERDA RZWP3K	Orang	80	250.000.000,00	0	-	75	150.000.000,00	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Penyusunan dokumen rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang	Dokumen	20	450.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah dokumen pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau	Dokumen	2	100.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Penyusunan dokumen rencana aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen rencana aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang	Dokumen	20	400.000.000,00	0	-	-	140.000.000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Penyusunan profil wilayah pantai dan laut Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen profil wilayah pantai dan laut	Dokumen	20	200.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
06	Pelatihan Pembibitan dan Penanaman Mangrove	Jumlah peserta pelatihan pembibitan dan penanaman mangrove	Orang	140	450.000.000,00	0	-	300	50.000.000,00	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pembentukan dan Pengukuhan Badan Konservasi Penyus	Jumlah kegiatan restocking penyus di sekitar umum	Kegiatan	2	130.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pelatihan Penangkaran Penyu	Jumlah orang yang telah dalam penangkaran penyu	Orang	120	250.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Workshop Pengembangan Teluk Mandar	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	Orang	60	200.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Festival bahari dan pesisir	Jumlah festival yang diadakan	Kegiatan	5	800.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Mitigasi Bencana	Jumlah orang yang memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana di wilayah laut/pesisir	Orang	390	750.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pemetaan Daerah Prioritas Rehabilitasi	Jumlah dokumen pemetaan daerah prioritas rehabilitasi yang	dokumen	3	550.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Rehabilitasi habitat pesisir yakni terumbu karang, padang lamun, mangrove dan vegetasi pesisir lainnya	Jumlah kawasan habitat pesisir yang diperbaiki	Kawasan	5	1.050.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Rehabilitasi pelindung pantai	Panjang pelindung pantai yang diperbaiki	Meter	0	100.000.000,00	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Pembangunan Breakwater	Panjang Break Water yang terdapat	Meter	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Pesisir, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terdapat	Jumlah sarana dan prasarana kawasan konservasi pesisir, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat	Unit	36	1.980.000.000,00	2	1.088.722.900,00	4	340.810.000,00	3	1.356.374.564,70	0,00	-	1,10	457.918.300,00	0,58	243.115.100,00	1,57	651.592.800,00	3,25	1.352.626.200,00	99,72	99,72	5,25	2.441.349.100,00	14,58	123,30	Dinas Kelautan dan Perikanan								
26	Survey Kesesuaian Ruang dengan PERDA RZWP3K	Jumlah dokumen rekomendasi kesesuaian ruang dengan PERDA RZWP3K	Dokumen	3	150.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	1	77.169.200,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	58.803.200,00	1,00	58.803.200,00	100,00	76,20	1,00	58.803.200,00	33,33	39,20	Dinas Kelautan dan Perikanan								
34	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya jumlah produk Kelautan dan Perikanan yang semakin berkualitas, memenuhi standar produk dan memiliki daya saing serta terserap pasar pasar Nasional dan Internasional		1	4.565.000.000,00	2.354.916.100,00	103 Ton	3.645.880.000,00	2.319.110.285,55	-	33.070.000,00	201.877.500,00	1.857.484.677,00	0,95	4.447.348.277,00	827,23														Dinas Kelautan dan Perikanan						
04	Pengembangan Pemasaran Sistem Rantai Dingin	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran sistem rantai dingin yang terdapat	Unit	115	1.663.000.000,00	22	1.616.797.700,00	3	2.720.780.000,00	18	1.159.590.685,55	0,00	-	0,51	33.070.000,00	3,13	201.877.500,00	14,22	916.293.500,00	17,87	1.151.241.000,00	99,28	99,28	39,87	2.768.038.700,00	34,67	166,45	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pengembangan Sarana dan Prasana Pengolahan di Sentra Produksi	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan di sentra produksi	Unit	37	350.000.000,00	8	99.291.000,00	1	190.100.000,00	8	544.600.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,05	540.096.000,00	8,05	540.096.000,00	99,17	99,17	16,00	639.387.000,00	43,24	182,68	Dinas Kelautan dan Perikanan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja ja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I				II				III				IV				K			K		K		K	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17																		
	Diversifikasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	Jumlah jenis produk olahan kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh UPI	Jenis	5	25.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Penanganan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah UPI yang tersertifikasi	UPI	20	-	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Penilaian SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan)	Jumlah sertifikat unit penanganan pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	Sertifikat	20	-	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pengembangan Akses Permodalan Bagi UMKM Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah kegiatan pameran investasi Permodalan Tingkat Provinsi dan Nasional yang dilaksanakan	Kegiatan	10	-	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Sosialisasi akses permodalan untuk pengolah dan pemasar	Jumlah peserta UMKM yang meningkat pengetahuannya mengenai akses permodalan	Orang	350	100.000.000,00	70	198.629.000,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	69,52	-	198.629.000,00	19,86	198,63	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pembuatan Profil UMKM Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah profil UMKM Provinsi Sulawesi Barat yang terdistribusi	Dokumen	3	50.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pengembangan Kelayakan Pemasaran Dalam Negeri Sesuai Standar	Jumlah pelaku pemasar yang memiliki pemasaran produk KP yang sesuai standar	Orang	150	202.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pembinaan dan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Supplier	Jumlah UPI yang dibina untuk memperoleh SKP	UPI	10	75.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pengembangan kelembagaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai standar Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practices (GMP)	Jumlah peserta usaha pengolahan skala mikro, menengah dan besar yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan produk kelautan dan perikanan	orang	90	100.000.000,00	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pengembangan dan Penguatan Sistem Logistik Ikan Daerah	Jumlah data dan informasi logistik ikan untuk mendukung keberhasilan sistem informasi logistik yang tepat guna	dokumen	5	100.000.000,00	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pembangunan sentra kuliner	Jumlah kawasan sentra kuliner yang terbangun	unit	5	-	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pembangunan Kios Mini Hasil Olahan Produk Perikanan	Jumlah Kios Mini untuk pemasaran hasil pengolahan perikanan yang terdistribusi	Unit	5	150.000.000,00	0	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
06	Pameran Bazaar Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah pameran tingkat provinsi dan Nasional, serta kegiatan bazar/pasar murah yang dilaksanakan	Kegiatan	15	550.000.000,00	2	215.041.600,00	3	250.000.000,00	1	103.394.400,00	0,00	-	0,00	-	1,47	101.461.077,00	1,47	101.461.077,00	98,13	98,13	3,19	316.502.677,00	21,26	57,55	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Lomba masak serba ikan tingkat Prov. Sulawesi Barat	Jumlah lomba masak tingkat provinsi yang dilaksanakan	Kegiatan	5	300.000.000,00	1	116.460.000,00	1	120.000.000,00	1	88.168.100,00	0,00	-	0,00	-	1,00	88.168.100,00	1,00	88.168.100,00	100,00	100,00	2,00	204.628.100,00	40,00	68,21	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Lomba masak serba ikan tingkat Nasional	Jumlah lomba masak tingkat nasional yang dilaksanakan	Kegiatan	5	300.000.000,00	1	108.696.800,00	1	115.000.000,00	1	101.577.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,99	108.696.800,00	19,85	36,23	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Lomba Inovasi Menu Masakan	Jumlah lomba inovasi menu masakan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	300.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Festival hasil olahan produk perikanan dan kelautan	Jumlah kegiatan festival hasil olahan yang dilaksanakan	Kegiatan	5	-	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar Ikan	Jumlah pasar ikan yang dibangun/ direhabilitasi	Unit	5	-	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur, pengolah dan pemasar ikan	Jumlah aparatur yang meningkatkan pengetahuannya mengenai pembinaan mutu produk KP	Orang	16	180.000.000,00	0	-	62	200.000.000,00	16	212.350.000,00	0,00	-	-	-	16,00	211.466.000,00	16,00	211.466.000,00	100,00	99,58	16,00	211.466.000,00	100,00	117,48	Dinas Kelautan dan Perikanan								
	Verifikasi, monitoring dan evaluasi kelompok pemasar dan pengolah ikan	Jumlah laporan hasil verifikasi dan monitoring kelompok pengolah dan pemasar yang tersusun	Laporan	40	120.000.000,00	0	-	-	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kelautan dan Perikanan								
28	Sosialisasi/Deseminasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	Jumlah kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan di tingkat kabupaten/kota	Kali	1	180.000.000,00	0	-	1	50.000.000,00	1	109.430.100,00	0,00	-	0,00	36.850.100,00	1,00	72.145.000,00	0,00	-	1,00	108.995.100,00	100,00	99,60	1,00	108.995.100,00	100,00	60,55	Dinas Kelautan dan Perikanan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re		K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re								K	Re
1	2	3	4	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 13+6		16 = 15/100		17				
DINAS PARIWISATA																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	90	3.771.338.734,00	90	1.109.564.132,00	90	1.573.809.078,53	90	1.060.227.180,00					90,00	90,00	-	100,00	-	180,00	1.109.564.132,00	200,00	29,42	Dinas Pariwisata			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengantaran lembar	lembar	50000	15.000.000,00	20000	5.024.800,00	20000	5.000.000,00	20000	3.585.000,00	7000,00	1.125.000,00	7000,00	1.046.400,00	3000,00	763.500,00	3000,00	642.100,00	20000,00	3.577.000,00	100,00	99,78	40000,00	8.601.800,00	80,00	57,35	Dinas Pariwisata
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon/Fax/Internet, Jaringan Internet dan Siaran TV yang	rekening	300	250.000.000,00	96	62.962.698,00	96	120.000.000,00	96	65.064.648,00	35,00	17.455.750,00	15,00	7.146.820,00	25,00	15.898.110,00	21,00	19.195.838,00	96,00	59.696.518,00	100,00	91,75	192,00	122.659.216,00	64,00	49,06	Dinas Pariwisata
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Jumlah Pembayaran Surat-surat Kendaraan Dinas/Operasional	unit	30	25.000.000,00	6	2.682.150,00	6	10.000.000,00	6	3.778.000,00				-		-	6,00	3.719.000,00	6,00	3.719.000,00	100,00	98,44	12,00	6.401.150,00	40,00	25,60	Dinas Pariwisata
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan	Jumlah Pembayaran Biaya Perbaikan Peralatan Kantor	unit	50	32.500.000,00	22	6.989.800,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	5,00	1.450.000,00	5,00	1.017.400,00		-	10,00	17.405.300,00	20,00	19.872.700,00	100,00	99,36	42,00	26.862.500,00	84,00	82,65	Dinas Pariwisata
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	jenis	150	212.838.734,00	32	45.548.800,00	32	80.000.000,00	32	51.624.000,00	3,00	14.520.000,00		-	1,00	4.005.000,00	28,00	33.092.300,00	32,00	51.617.300,00	100,00	99,99	64,00	97.166.100,00	42,67	45,65	Dinas Pariwisata
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Spanduk/Baligh o yang dicetak	jenis	5	25.000.000,00	195	10.499.800,00	5	50.000.000,00	5	106.125.000,00		1,00	575.000,00	1,00	27.022.400,00	3,00	73.837.000,00	5,00	101.434.400,00	100,00	95,58	200,00	111.934.200,00	4000,00	447,74	Dinas Pariwisata	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	25	210.000.000,00	5	104.820.500,00	5	162.000.000,00	5	104.199.352,00		1,00	5.981.000,00	3,00	93.700.000,00	1,00	875.500,00	5,00	100.556.500,00	100,00	96,50	10,00	205.377.000,00	40,00	97,80	Dinas Pariwisata	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	25	15.000.000,00	28	8.836.900,00	33	15.000.000,00	33	26.234.300,00	5,00	5.564.900,00	3,00	1.379.000,00	3,00	1.518.000,00	22,00	17.577.400,00	33,00	26.039.300,00	100,00	99,26	61,00	34.876.200,00	244,00	232,51	Dinas Pariwisata
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	rekening	250	50.000.000,00	0	-	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00		1,00	411.000,00		-	2,00	14.243.000,00	3,00	14.654.000,00	100,00	97,69	3,00	14.654.000,00	0,04	29,31	Dinas Pariwisata	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	kotak	7500	75.000.000,00	1350	47.998.000,00	1350	60.000.000,00	1350	55.000.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	400,00	8.474.700,00	750,00	42.372.000,00	1350,00	54.846.700,00	100,00	99,72	2700,00	102.844.700,00	2842,11	137,13	Dinas Pariwisata
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan yang diikuti diluar Daerah	kegiatan	95	920.000.000,00	29	246.919.084,00	29	400.000.000,00	29	120.391.880,00	12,00	35.627.500,00	10,00	61.153.500,00		-	7,00	23.164.260,00	29,00	119.945.260,00	100,00	99,63	58,00	366.864.344,00	15,47	39,88	Dinas Pariwisata
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Koordinasi, Konsultasi dan kegiatan yang diikuti didalam Daerah	kegiatan	375	850.000.000,00	86	249.961.800,00	86	246.684.078,53	86	124.000.000,00	20,00	16.486.000,00	20,00	25.204.000,00	26,00	48.787.000,00	20,00	32.789.200,00	86,00	123.266.200,00	100,00	99,41	172,00	373.228.000,00	781,82	43,91	Dinas Pariwisata
	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Jumlah Pembayaran Biaya Publikasi media Cetak	terbitan	22	66.000.000,00	17	10.000.000,00	5	30.000.000,00	5	15.000.000,00		1,00	450.000,00	1,00	2.000.000,00	3,00	6.798.000,00	5,00	9.248.000,00	100,00	61,65	22,00	19.248.000,00	2,44	29,16	Dinas Pariwisata	
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Pembayaran Jasa Cleaning Service, Security, Driver dan Tenaga Administrasi	orang/bulan	900	1.000.000.000,00	396	307.319.800,00	396	330.125.000,00	396	333.125.000,00		-	50,00	94.205.000,00	50,00	124.392.000,00	296,00	114.528.000,00	396,00	333.125.000,00	100,00	100,00	792,00	640.444.800,00	15840,00	64,04	Dinas Pariwisata
	Penyediaan Jasa Publikasi Media Elektronik	Jumlah Pembayaran Biaya Publikasi media Elektronik	media	5	25.000.000,00	0	-	2	30.000.000,00	1	17.100.000,00				-		-	1,00	17.100.000,00	1,00	17.100.000,00	100,00	100,00	1,00	17.100.000,00	1,11	68,40	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	90	753.402.526,00	90	220.329.587,00	90	312.000.000,00	90	412.953.759,00						-	90,00	-	90,00	-	100,00	-	180,00	220.329.587,00	3000,00	29,24	Dinas Pariwisata
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	jenis	6	87.977.000,00	0	-	1	15.000.000,00	1	91.593.000,00				-		-	1,00	81.902.200,00	1,00	81.902.200,00	100,00	89,42	1,00	81.902.200,00	9,09	93,10	Dinas Pariwisata
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Item Pemeliharaan yang dikerjakan	jenis	11	369.919.000,00	3	115.331.000,00	3	32.000.000,00	3	263.360.759,00		-	1,00	28.750.000,00	1,00	25.102.900,00	1,00	206.155.000,00	3,00	260.007.900,00	100,00	98,73	6,00	375.338.900,00	40,00	101,47	Dinas Pariwisata
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Item Pemeliharaan Mobil Dinas Jabatan yang dikerjakan	jenis	15	215.506.526,00	1	84.999.787,00	4	75.000.000,00	4	49.000.000,00	1,00	10.856.500,00	1,00	12.450.000,00	1,00	12.264.250,00	1,00	13.323.350,00	4,00	48.894.100,00	100,00	99,78	5,00	133.893.887,00	31,25	62,13	Dinas Pariwisata
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Item Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	16	80.000.000,00	5	19.998.800,00	5	190.000.000,00	5	9.000.000,00	1,00	1.445.000,00	2,00	4.661.000,00	1,00	1.765.000,00	1,00	1.053.000,00	5,00	8.924.000,00	100,00	99,16	10,00	28.922.800,00	11,11	36,15	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangannya	Persen	90	1.094.000.000,00	90	68.290.000,00	90	170.000.000,00	90	84.290.800,00						-	90,00	-	90,00	-	100,00	-	180,00	68.290.000,00	87,38	6,24	Dinas Pariwisata
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Anisah/SOP	Orang	206	861.000.000,00	50	28.740.000,00	50	30.000.000,00	50	38.226.800,00						-	50,00	38.082.000,00	50,00	38.082.000,00	100,00	99,62	100,00	66.822.000,00	227,27	7,76	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	13 = 9+10+11+12	K	Re	14 = 13*100	K	Re		15 = 13+6	K	Re	16 = 15*100
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Pengelola Keuangan	Orang	44	233.000.000,00	10	39.550.000,00	50	140.000.000,00	50	46.064.000,00			25,00	44.900.000,00	25,00	969.000,00	50,00	45.869.000,00	100,00	99,58	60,00	85.419.000,00	66,67	36,66	Dinas Pariwisata						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Tingkat Kelengkapan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	90	262.443.382,00	90	207.008.200,00	90	-	90	246.019.322,68				-	90,00	-	90,00	-	100,00	-	180,00	207.008.200,00	1800,00	78,88	Dinas Pariwisata						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP SKPD yang disusun	Dokumen	10	7.500.000,00	3	5.000.000,00	2		2	3.485.200,00			1,00	1.385.200,00	1,00	2.100.000,00	2,00	3.485.200,00	100,00	100,00	5,00	8.485.200,00	100,00	113,14	Dinas Pariwisata						
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Dokumen	5	8.000.000,00	1	4.955.000,00	1		1	2.705.100,00			1,00	2.705.100,00		-	1,00	2.705.100,00	100,00	100,00	2,00	7.660.100,00	40,00	95,75	Dinas Pariwisata						
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Dokumen	5	8.000.000,00	2	5.000.000,00			2	2.645.200,00				-	2,00	1.840.000,00	2,00	1.840.000,00	100,00	69,56	4,00	6.840.000,00	26,67	85,50	Dinas Pariwisata						
	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPKD	jumlah Renstra/Renja/Lakip dan LPKD yang disusun	Dokumen	15	13.943.382,00	3	5.000.000,00	3		3	5.126.500,00			1,00	641.700,00	2,00	4.484.800,00	3,00	5.126.500,00	100,00	100,00	6,00	10.126.500,00	120,00	72,63	Dinas Pariwisata						
	Penyusunan RCA/DPA-SKPD	Jumlah RCA/DPA SKPD yang disusun	Dokumen	5	9.500.000,00	1	4.999.000,00	1		1	4.140.800,00		1,00	4.140.800,00	-		-	1,00	4.140.800,00	100,00	100,00	2,00	9.139.800,00	40,00	96,21	Dinas Pariwisata						
	Penyusunan RCA-PD/PAP-SKPD	Jumlah RCA-PD/PAP SKPD yang disusun	Dokumen	5	9.000.000,00	2	5.000.000,00	1		1	4.030.800,00				545.000,00	1,00	3.485.800,00	1,00	4.030.800,00	100,00	100,00	3,00	9.030.800,00	1,04	100,34	Dinas Pariwisata						
	Penyediaan Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pembayaran Jasa Pengelola SIMDA	orang/bulan	288	108.000.000,00	48	67.130.000,00	48		48	68.311.080,00		15,00	22.400.000,00	15,00	12.183.900,00	18,00	33.600.000,00	48,00	68.183.900,00	100,00	99,81	96,00	135.313.900,00	1920,00	125,29	Dinas Pariwisata					
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	Dokumen	5	8.000.000,00	1	4.954.800,00	1		1	3.632.620,00					1.032.300,00	1,00	2.600.000,00	1,00	3.632.300,00	100,00	99,99	2,00	8.587.100,00	13,33	107,34	Dinas Pariwisata					
	Penyusunan Perencanaan Tahunan	Jumlah kegiatan rapat tahunan yang diikuti	Dokumen	15	42.500.000,00	6	92.869.400,00	7		3	118.101.022,68			-	1,00	1.962.400,00	2,00	111.545.400,00	3,00	113.507.800,00	100,00	96,11	9,00	206.377.200,00	7,50	485,59	Dinas Pariwisata					
	Penyediaan Jasa Pengelola Sistem Informasi Perencanaan SKPD/E-Planning	Jumlah jasa pengelola sistem perencanaan yang dibayarkan	orang/bulan	120	48.000.000,00	12	12.100.000,00	12		24	33.841.000,00		5,00	11.200.000,00	3,00	5.600.000,00	16,00	16.930.000,00	24,00	33.730.000,00	100,00	99,67	36,00	45.830.000,00	78,26	95,48	Dinas Pariwisata					
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	46	2.707.000.000,00	46	363.649.400,00	46	738.000.000,00	46	633.810.656,00				-	46,00	-	46,00	-	100,00	-	92,00	363.649.400,00	836,36	13,43	Dinas Pariwisata						
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Event Promosi Pariwisata yang diikuti	event	11	950.000.000,00	0	-	2	50.000.000,00	1	57.970.000,00			1,00	34.462.000,00		22.387.500,00	1,00	56.849.500,00	100,00	98,07	1,00	56.849.500,00	4,00	5,98	Dinas Pariwisata						
	Dukungan Kegiatan Promosi Pariwisata	Jumlah Jenis Pemasaran Promosi Pariwisata yang dilaksanakan	jenis	25	897.000.000,00	5	363.649.400,00	5	488.000.000,00	2	305.330.400,00		16.000.000,00		-	2,00	286.857.400,00	2,00	302.857.400,00	100,00	99,19	7,00	666.506.800,00	4,67	74,30	Dinas Pariwisata						
	Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata	Jumlah Peserta yang Mengikuti Tour Jelajah Wisata	Orang	150	460.000.000,00	0	-	30	100.000.000,00	16	258.364.256,00			5,00	22.076.000,00	11,00	222.677.956,00	16,00	244.753.956,00	100,00	94,73	16,00	244.753.956,00	13,33	53,21	Dinas Pariwisata						
	Pengembangan Promosi Pariwisata Berbasis IT	Jumlah Pelaku Pariwisata yang diberikan Pelatihan Promosi Pariwisata Berbasis IT	Orang	120	400.000.000,00	0	-	30	100.000.000,00	7	12.146.000,00				-	7,00	12.146.000,00	7,00	12.146.000,00	100,00	100,00	7,00	12.146.000,00	53,64	3,04	Dinas Pariwisata						
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	Persen	13	8.750.000.000,00	13	3.957.552.724,02	13,05	1.500.000.000,00	13	1.595.481.959,82				-	13,05	-	13,05	-	100,00	-	26,10	3.957.552.724,02	93,21	45,23	Dinas Pariwisata						
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dibangun	jenis	28	2.950.000.000,00	6	2.192.494.184,02	4	100.000.000,00	2	1.084.840.800,00				-	2,00	993.177.742,03	2,00	993.177.742,03	100,00	91,55	8,00	3.185.671.926,05	6,67	107,99	Dinas Pariwisata						
	Pengembangan Wisata Agro (Farm Tourism)	Jumlah masyarakat objek wisata agro yang diberikan pelatihan wisata agro	orang	120	400.000.000,00	30	194.136.617,00	30	100.000.000,00	15	66.507.432,00			3,00	6.197.000,00	12,00	49.546.900,00	15,00	55.743.900,00	100,00	83,82	45,00	249.880.517,00	1125,00	62,47	Dinas Pariwisata						
	Pengembangan wisata Seni, Budaya dan Religi	Jumlah Jenis Wisata Seni, Budaya dan Religi yang dikembangkan	Jenis	4	400.000.000,00	30	87.194.928,00	30	100.000.000,00	1	46.069.680,00				7.419.680,00	1,00	37.450.000,00	1,00	44.869.680,00	100,00	97,40	31,00	132.064.608,00	24,80	33,02	Dinas Pariwisata						
	Dukungan Penyelenggaraan Festival Sandeq Race	Jumlah Perahu Layar Tradisional yang Mengikuti Festival Sandeq Race	20 Perahu	125	5.000.000.000,00	22	1.483.726.995,00	20	1.200.000.000,00	20	398.064.047,82				-	20,00	397.869.700,00	20,00	397.869.700,00	100,00	99,95	42,00	1.881.596.695,00	93,33	37,63	Dinas Pariwisata						
	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	Persen	45	600.000.000,00	45	238.157.200,00	45	100.000.000,00	45	269.151.840,00				-	45,00	-	45,00	-	100,00	-	90,00	238.157.200,00	47,37	39,69	Dinas Pariwisata						
	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata yang Mengikuti Pengembangan SDM Kepariwisataan	Orang	190	600.000.000,00	90	238.157.200,00	30	100.000.000,00	30	269.151.840,00	3,00	17.166.840,00		7,00	51.985.000,00	20,00	189.556.900,00	30,00	258.708.740,00	100,00	96,12	120,00	496.865.940,00	266,67	82,81	Dinas Pariwisata					
	Program Pengembangan Industri Pariwisata	Persentase Industri Pariwisata yang Terbina dan Tersertifikasi	Persen	45	1.700.000.000,00	45	141.636.950,00	45	200.000.000,00	45	75.970.020,00					-	45,00	-	45,00	-	100,00	-	90,00	141.636.950,00	60,00	8,33	Dinas Pariwisata					

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re		K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	Peningkatan Promosi Investasi dibidang Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Mengikut Seminar dan pengembangan Investasi Pariwisata	Orang	150	500.000.000,00	70	141.636.950,00	15	100.000.000,00	30	31.419.200,00			15,00	12.977.500,00	15,00	16.098.000,00	30,00	29.075.500,00	100,00	92,54	100,00	170.712.450,00	55,56	34,14	Dinas Pariwisata		
	Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha jasa Pariwisata yang Mengikut pelatihan dan Peningkatan Wawasan Keberwisataannya	Orang	180	1.200.000.000,00	0	-	15	100.000.000,00	50	44.550.820,00	15,00	14.800.600,00	20,00	16.119.700,00	15,00	12.600.000,00	-	50,00	43.520.300,00	100,00	97,69	50,00	43.520.300,00	111,11	3,63	Dinas Pariwisata	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terbina dan Teresertifikasi	Persen	45	1.500.000.000,00	45	-	45	100.000.000,00	45	43.039.000,00				-	45,00		-	45,00	-	100,00	-	90,00	-	120,00	-	Dinas Pariwisata	
	Pengembangan Industri Kreatif Bidang Kepariwisataannya	Jumlah Kelompok Industri Kreatif Bidang Pariwisata yang dibina, disertifikasi dan dikembangkan	kelompok	75	1.500.000.000,00	0	-	1	100.000.000,00	1	43.039.000,00				7.711.200,00	1,00	34.067.800,00	1,00	41.779.000,00	100,00	97,07	1,00	41.779.000,00	2,22	2,79	Dinas Pariwisata		
	Program Kelembagaan dan Kemitraan Pariwisata	Persentase Lembaga Mitra Pariwisata yang terbentuk, Terbina dan Teresertifikasi	Persen	45	700.000.000,00	45	-	45	200.000.000,00	45	106.194.700,00					-	45,00		-	45,00	-	100,00	-	90,00	-	60,00	-	Dinas Pariwisata
	Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi Kepariwisataannya	Jumlah Peserta yang Mengikut Sosialisasi, Sertifikasi dan Pengawasan Standarisasi Kepariwisataannya	Orang	150	500.000.000,00	0	-	30	100.000.000,00	30	35.148.600,00			25,00	29.532.700,00	5,00	2.480.000,00	30,00	32.012.700,00	100,00	91,08	30,00	32.012.700,00	125,00	6,40	Dinas Pariwisata		
	Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata yang dibina dan dikembangkan	Desa	24	200.000.000,00	0	-	6	100.000.000,00	6	71.046.100,00			1,00	7.032.200,00	5,00	64.013.900,00	6,00	71.046.100,00	100,00	100,00	6,00	71.046.100,00	#DIV/0!	35,52	Dinas Pariwisata		
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN																												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan aparatur			2.911.428.796,00		7.368.635.000,00		1.283.647.464,00		1.327.683.577,50	120.737.483,00		352.683.967,00		376.604.154,00		418.401.790,00	683,27	1.268.427.394,00	93,20	95,54	836,41	2.552.074.858,00	4650,43	0,35	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat dan Dokumen Perkantoran		2232	58.774.000,00	3200	123.799.000,00	2000	56.536.400,00	2000	108.798.900,00	200,00	-	700,00	34.874.250,00	600,00	38.068.000,00	500,00	26.680.000,00	2000,00	99.622.250,00	100,00	91,57	4000,00	156.158.650,00	125,00	1,26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
2	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik		4	115.675.095,00	12	1.958.378.000,00	12	184.848.163,00	12	227.949.855,50	3,00	61.317.482,00	3,00	55.173.705,00	3,00	67.832.364,00	3,00	39.222.626,00	12,00	223.546.177,00	100,00	98,07	24,00	408.394.340,00	200,00	0,21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas		30	152.836.271,00	12	617.487.000,00	7	43.238.769,00	12	91.977.800,00		-	3,00	11.587.000,00	9,00	72.443.014,00	12,00	84.030.014,00	100,00	91,36	19,00	127.268.783,00	158,33	0,21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor		5	56.908.000,00	12	166.138.000,00	12	83.895.275,00	12	123.642.225,00	3,00	204.400,00	3,00	3.133.600,00	3,00	84.216.090,00	3,00	31.823.000,00	12,00	119.377.090,00	100,00	96,55	24,00	203.272.365,00	200,00	1,22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		50	78.022.000,00	12	315.783.000,00	12	35.838.600,00	50	23.892.397,00	10,00	-	5,00	13.528.000,00	15,00	4.359.400,00	20,00	4.057.000,00	50,00	21.944.400,00	100,00	91,85	62,00	57.783.000,00	516,67	0,18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		3	30.535.000,00	12	446.228.000,00	12	56.770.000,00	50	34.110.700,00	10,00	-	20,00	28.750.000,00	10,00		10,00	4.745.700,00	50,00	33.495.700,00	100,00	98,20	62,00	90.265.700,00	516,67	0,20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
6	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik, instalasi dan alat penerangan Bangunan		5	10.746.500,00	1	39.221.000,00	7	10.190.500,00	1	77.007.200,00						1,00	75.615.100,00	1,00	75.615.100,00	100,00	98,19	8,00	85.805.600,00	800,00	2,19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan		8	71.890.000,00	12	424.195.000,00	10	26.098.000,00	8	51.746.700,00		-	3,00	12.156.250,00	2,00	18.750.000,00	2,00	12.326.700,00	7,00	43.232.950,00	87,50	83,55	17,00	69.330.950,00	141,67	0,16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		9	15.566.000,00	12	70.398.000,00	12	39.574.500,00	12	26.997.200,00	3,00	1.173.550,00	1,00	7.439.150,00	2,00	8.053.300,00	6,00	9.358.650,00	12,00	26.024.650,00	100,00	96,40	24,00	65.599.150,00	200,00	0,93	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat Internal dan Rapat		2	111.461.470,00	12	271.533.000,00	12	127.967.197,00	7500	41.500.000,00	69,00	361.000,00	1994,35	10.769.500,00	2700,00	15.215.000,00	2500,00	14.917.000,00	7263,35	41.262.500,00	96,84	99,43	7275,35	169.229.697,00	60627,93	0,62	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
10	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah		32	747.450.450,00	12	1.307.382.000,00	12	334.963.260,00	50	200.990.000,00	12,00	43.213.051,00	32,00	118.662.762,00	2,00	12.988.000,00	4,00	25.943.000,00	50,00	200.806.813,00	100,00	99,91	62,00	535.770.073,00	516,67	0,41	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		6	713.764.000,00	12	804.543.000,00	12	204.195.550,00	85	208.812.600,00	9,65	14.468.000,00	20,72	31.078.000,00	40,00	84.535.000,00	15,00	78.550.000,00	85,36	208.631.000,00	100,43	99,91	97,36	412.826.550,00	811,37	0,51	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi media Cetak	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak		3	234.000.000,00	12	589.428.000,00	12	24.280.000,00	5	5.000.000,00	0,00	-		1,00	1.000.000,00			1,00	1.000.000,00	20,00	20,00	13,00	25.280.000,00	108,33	0,04	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa keamanan Kantor		13	110.400.000,00	12	234.122.000,00	12	55.251.250,00	10	105.258.000,00			3,00	37.118.750,00	4,00	30.000.000,00	3,00	22.720.000,00	10,00	89.838.750,00	100,00	85,35	22,00	145.090.000,00	183,33	0,62	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan aparatur		0	8.978.275.823,00		4.562.969.000,00		1.261.011.545,00		407.274.790,00	5.031.600,00		72.372.412,00		114.912.683,00		178.583.469,00	14,60	370.900.164,00	99,99	91,07	14,60	1.631.911.709,00	1188,93	0,36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah						
												I				II				III				IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11x12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17																		
14	Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 4, Roda 3 dan Roda 2		60	1.272.607.000,00	7	1.456.978.000,00	25	723.589.600,00	3	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	25,00	723.589.600,00	357,14	0,50	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
15	Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		7	410.952.900,00	10	1.526.673.000,00	9	301.504.945,00	10	155.146.790,00	0,00	-	-	4,00	65.342.300,00	6,00	85.171.700,00	10,00	150.514.000,00	100,00	97,01	19,00	452.018.945,00	190,00	0,30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas		4	607.897.500,00	1	543.066.000,00	1	109.959.000,00	50	187.580.000,00	0,00	3.751.600,00	18,98	59.916.162,00	11,00	39.570.383,00	20,00	53.775.269,00	49,98	157.013.414,00	99,95	83,70	50,98	266.972.414,00	5097,52	0,49	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan						
18	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tertaksananya Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor				12	60.341.000,00	6	15.118.000,00	10	49.040.000,00	1,00	1.280.000,00	3,00	12.456.250,00	1,00	10.000.000,00	5,00	25.228.500,00	10,00	48.964.750,00	100,00	99,85	16,00	64.082.750,00	133,33	1,06	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan						
19	Kegiatan Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	Tertaksananya Rehabilitasi/Reovasi Seding Gedung Kantor				3	975.911.000,00	2	110.840.000,00	3	15.508.000,00	0,00	-	0,00	-	-	3,00	14.408.000,00	3,00	14.408.000,00	100,00	-	5,00	125.248.000,00	166,67	0,13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan aparat		0	38.299.800,00		658.015.000,00		355.659.380,00		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	355.659.380,00	0,38	0,54	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu				200	354.099.000,00	1	159.883.650,00	1	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	159.883.650,00	0,50	0,45	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
21	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu					400	303.916.000,00	1	195.775.730,00	297	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	195.775.730,00	0,25	0,64	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Jumlah kegiatan aparat		0	38.299.800,00		873.776.000,00		125.494.390,00		22.000.000,00	10.897.400,00		10.497.400,00		-		-	3,50	21.394.800,00	100,00	97,25	3,50	146.889.190,00	91,67	0,17	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
22	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti kpm dan kursus/kursus		5	38.299.800,00	12	618.615.000,00	3	47.494.390,00	7	22.000.000,00	4,00	10.897.400,00	3,00	10.497.400,00				7,00	21.394.800,00	100,00	97,25	10,00	68.889.190,00	83,33	0,11	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
23	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis pengadain Barang dan Jasa				90	255.161.000,00	90	78.000.000,00		-	-	-	-	0,00				0,00	-	0,00	-	90,00	78.000.000,00	100,00	0,31	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
	Program Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah kegiatan aparat		0	296.941.000,00		2.536.715.000,00		464.008.693,00		477.936.400,00	8.495.035,00		99.158.939,00		106.388.950,00		246.080.684,00	1,80	460.123.600,00	100,00	96,27	1,80	924.132.301,00	306,67	0,36	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAPK, LPKD dan LKPD Dinas		1	4.495.000,00	3	39.825.000,00	-	3	16.096.000,00	0,00	-	1,00	3.865.000,00	2,00	12.078.000,00		-	3,00	15.943.000,00	100,00	99,05	3,00	15.943.000,00	100,00	0,40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
25	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran		0	-	2	22.929.000,00	2	20.300.000,00	2	6.351.200,00	0,00	-	1,00	5.419.100,00	1,00		932.100,00	2,00	6.351.200,00	100,00	100,00	4,00	26.651.200,00	200,00	1,16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
26	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan prognosa realisasi Anggaran		0	-	1	18.605.000,00	1	16.950.000,00	1	5.017.500,00	0,00	-	1,00	5.007.400,00		-	1,00	5.007.400,00	100,00	99,80	2,00	21.957.400,00	200,00	1,18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
27	Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun		0	-	1	378.660.000,00	2	42.259.600,00	2	85.817.000,00	0,00	1,00	46.717.650,00		16.297.400,00	1,00	22.333.200,00	2,00	85.348.250,00	100,00	99,45	4,00	127.607.850,00	400,00	0,34	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
28	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Tersusunnya RKA dan DPA		0	-	2	50.284.000,00		2	17.264.000,00			-	1,00	16.364.000,00	1,00		900.000,00	2,00	17.264.000,00	100,00	100,00	2,00	17.264.000,00	100,00	0,34	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
29	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Tersusunnya RKA Perubahan dan DPA Perubahan		1	15.300.000,00	2	47.267.000,00	2	25.540.000,00	2	18.534.000,00	0,00	-	-	-	2,00	17.244.000,00	2,00	17.244.000,00	100,00	93,04	4,00	42.784.000,00	200,00	0,91	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Tertaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Pertanian		1	17.000.000,00	1	353.637.000,00	12	86.311.000,00	1	75.765.900,00	0,00			26.545.050,00	1,00	49.018.000,00	1,00	75.563.050,00	100,00	99,73	13,00	161.874.050,00	1300,00	0,46	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
31	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersusunnya Renstra, Renja dan Masterplan Kawasan Pertanian		0	-	3	659.373.000,00	2	31.257.500,00	3	102.891.800,00	1,00	8.495.035,00	1,00	48.576.289,00		6.680.000,00	1,00	33.062.384,00	3,00	96.813.708,00	100,00	94,09	5,00	128.071.208,00	166,67	0,19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan						
32	Pengelolaan Manajemen Data Statistik (Database) Pertanian	Tersedianya Data Statistik Pertanian		2	135.270.000,00	1	420.816.000,00	1	104.928.000,00	1	66.636.000,00	-	-	-	17.998.000,00	1,00	41.582.000,00	1,00	59.580.000,00	100,00	89,41	2,00	164.508.000,00	200,00	0,39	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
33	Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Pertanian		2	135.270.000,00	1	545.319.000,00	1	136.462.593,00	1	83.563.000,00	-	-	-	-	1,00		81.009.000,00	1,00	81.009.000,00	100,00	96,94	2,00	217.471.593,00	200,00	0,40	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			0	1.587.814.725,00		3.605.795.000,00		5.507.170.520,00		1.911.779.820,00	-		264.241.250,00		274.474.000,00		1.278.463.108,00	0,00	1.817.178.358,00	100,00	95,05	0,00	7.324.348.878,00	214,99	2,03	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
34	Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI TPH	Tertaksananya Pengembangan n Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Dan Hortikultura		0	550.000.000,00	50	490.816.000,00	100	3.389.217.750,00	150	446.874.000,00	0,00	64,98	149.446.000,00	60,00	149.713.400,00	25,00	113.850.000,00	149,98	413.009.400,00	99,98	92,42	249,98	3.802.227.150,00	499,95	7,75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
35	Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis Pertanian	Tersedianya Layanan Jasa alat dan Mesin Pertanian (distripol)		0	550.000.000,00	1500	935.548.000,00		168.802.226,00	1500	233.307.800,00	0,00	568,36	74.193.750,00	610,00	81.286.000,00	322,00	70.547.594,00	1500,36	226.027.344,00	100,02	96,88	1500,36	394.829.570,00	100,02	0,42	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
36	Penyediaan Parasana Dan sarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	Tersedianya alat dan mesin pertanian		1	1.088.544.100,00	30	1.724.585.000,00	36	680.937.143,00	30	363.624.600,00	0,00	-	2,00	20.100.000,00	3,00	30.124.600,00	25,00	311.067.214,00	30,00	361.291.814,00	100,00	99,36	66,00	1.042.228.957,00	220,00	0,60	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah						
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K	Re	K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17																		
38	Pengembangan dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Luas lahan penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura		50,00	50	454.846.000,00	10	1.268.213.401,00	10	867.973.420,00	0,00	1,00	20.501.500,00	1,00	13.350.000,00	8,00	782.998.300,00	10,00	816.849.800,00	100,00	94,11	20,00	2.085.063.201,00	40,00	4,58	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
	Program Peningkatan Produk Pertanian/Perkebunan		0	2.963.841.300,00		7.683.236.000,00		5.560.865.004,00		3.325.159.202,50	53.648.265,33		384.980.050,00		746.793.808,00	1.981.567.447,95	42,90	3.166.989.571,28	90,91	95,24	42,90	8.727.854.575,28	258,44	1,14	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
39	Pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi Pertanian	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Pengelola Irigasi Pertanian	6	113.514.000,00	6	25.901.800,00	6	-		-									-	0,00	-	6,00	25.901.800,00	100,00	0,23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
40	Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terselenggaranya target, sasaran dan rencana aksi/roadmap pengawasan dan sertifikasi benih/bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura	30	162.935.000,00	60	79.409.000,00	30	154.066.580,00	-	15,00	62.500.000,00	7,00	50.000.000,00	8,00	37.500.000,00	30,00	150.000.000,00	100,00	97,36	90,00		229.409.000,00	300,00	1,41	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
41	Pengembangan Kawasan Hortikultura	Terselenggaranya pengembangan Kawasan Sayur dan Buah	1	526.496.300,00	50	583.270.000,00	20	472.935.375,00	50	863.577.220,00			6.050.000,00	10,00	100.189.305,00	40,00	746.356.900,00	50,00	852.596.205,00	100,00	98,73	70,00	1.325.531.580,00	140,00	2,27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
42	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Tersedianya prasarana dan sarana penunjang perbenihan tanaman pangan	1	526.496.300,00	12	368.881.000,00	12	1.562.625.013,00	12	373.890.000,00			6,00	202.208.800,00	5,00	125.095.600,00	1,00	46.106.500,00	12,00	373.410.900,00	100,00	99,87	24,00	1.936.035.913,00	200,00	5,25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
43	Peningkatan Prasarana Irigasi Pertanian	Terbangunnya/tersejahteranya Sumber-Sumber Air Irigasi Pertanian	0	-	5	1.230.500.000,00	12	2.510.470.327,00	12	503.035.000,00	1,00	41.919.583,33	1,00	13.315.000,00			10,00	447.310.732,95	12,00	502.545.316,28	100,00	99,90	24,00	3.013.015.643,28	480,00	2,45	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
47	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Hortikultura	Jumlah bibit/benih hortikultura berkualitas yang dikembangkan		350.000.000,00	7	589.922.000,00	0,76	819.870.151,00	7	381.602.902,50	5.349.400,00	3,00	77.500.000,00	2,00	76.250.000,00	2,00	130.250.000,00	7,00	289.349.400,00	100,00	75,82	7,76	1.109.219.551,00	110,86	1,88	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
48	Pembinaan, pengawasan, dan pemantauan pupuk/pestisida	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan, pemantauan pupuk dan pestisida		80.000.000,00	1	200.365.000,00	6	89.653.338,00	6	50.005.000,00	-		4,00	32.095.000,00	2,00	17.072.000,00	6,00	49.167.000,00	100,00	98,32	12,00	138.820.338,00	1200,00	0,69	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
49	Pengembangan Tanaman Pangan				200	490.672.000,00	0		200	562.137.000,00	2.810.685,00	15,00	5.625.000,00	2,00	489.000,00	183,00	529.446.315,00	200,00	538.371.000,00	100,00	95,77	200,00	538.371.000,00	200,00	1,10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
52	Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan				6	200.000.000,00	0		6	15.000.000,00	-	3,00	5.781.250,00	2,00	5.000.000,00	1,00	3.750.000,00	6,00	14.531.250,00	100,00	96,88	6,00	14.531.250,00	6,00	0,07	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
53	Pengembangan Sistem Perbenihan Tanaman Hortikultura				6	200.000.000,00	0		6	64.985.800,00	-		4,00	25.652.500,00	2,00	23.775.000,00	6,00	49.427.500,00	100,00	76,06	6,00	49.427.500,00	6,00	0,25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
54	Penyediaan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Pangan	Tersedianya Benih/ Bibit Unggul Tanaman Pangan			100	3.543.177.000,00			100	356.859.700,00	3.568.597,00	2,00	12.000.000,00	98,00	332.022.403,00	-	100,00	347.591.000,00	100,00	97,40	100,00	347.591.000,00	100,00	0,10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
	Program Pembudayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		0	400.973.300,00		837.480.000,00		46.680.000,00		110.426.140,00	-		30.050.000,00		33.750.000,00		42.589.800,00	1,00	106.389.800,00	100,00	96,34	1,00	153.069.800,00	150,00	0,18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
60	Temu Teknis dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan temu teknis dan rapat koordinasi penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	-	1	396.480.000,00			1	20.341.540,00		-		-				1,00	20.089.800,00	1,00	20.089.800,00	100,00	98,76	1,00	20.089.800,00	100,00	0,05	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
61	Peningkatan Pengelolaan data dan informasi penyuluhan pertanian	Tersedia dan tersebarnya Materi dan Informasi Penyuluhan pertanian	-	1	441.000.000,00	1	46.680.000,00	1	90.084.600,00		-	0,30	30.050.000,00	0,30	33.750.000,00	0,40	22.500.000,00	1,00	86.300.000,00	100,00	95,80	2,00	132.980.000,00	200,00	0,30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		0	1.439.229.200,00		2.634.722.000,00		518.994.483,00		421.717.084,00	50.970.000,00		72.985.970,00		111.728.000,00	162.372.785,00	1850,02	398.056.755,00	100,00	94,39	1850,02	917.051.238,00	100,60	0,35	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
62	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Facilitasi operasional dan peningkatan kapasitas peternak kesehatan (POH, PHMS, ISKONAS, Laku Lulus Ternak)		249.285.000,00	10000	1.928.809.000,00	3000	361.273.125,00	3000	303.506.875,00	284,88	27.000.000,00	754,16	71.477.250,00	600,00	51.600.000,00	1361,00	131.925.050,00	3000,04	282.002.300,00	100,00	92,91	6000,04	643.275.425,00	60,00	0,33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							
63	Peningkatan Pengelolaan Data Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Terselenggaranya surveillance, pengujian sampel dan pendataan kesehatan hewan	-	500	705.913.000,00	6	157.721.358,00	700	118.210.209,00	169,00	23.970.000,00	10,00	1.508.720,00	400,00	60.128.000,00	121,00	30.447.735,00	700,00	116.054.455,00	100,00	98,18	706,00	273.775.813,00	141,20	0,39	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan								
	Program peningkatan produksi hasil peternakan		0	1.439.229.200,00		7.804.021.000,00		8.296.238.759,20		4.987.962.010,57	80.318.761,00		1.443.037.397,00		215.728.000,00	2.895.414.001,00	63,60	4.802.346.659,00	100,00	96,28	63,60	13.098.585.418,20	155,00	1,68	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan									
64	Pembibitan dan perawatan ternak	Terselenggaranya pemeliharaan ternak sumber bibit dan Penyediaan prasarana dan sarana pemeliharaan ternak	1	565.903.200,00	200	1.492.779.000,00	250	2.451.696.303,20	250	2.149.255.210,57	7,00	42.338.761,00	218,00	1.379.083.897,00	5,00	83.828.000,00	20,00	620.232.701,00	250,00	2.125.483.359,00	100,00	98,89	500,00	4.577.179.662,20	250,00	3,07	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah												
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K		Re		K	Re	K		Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		K	Re	K	Re			K	Re	K	Re		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29												
66	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	Tersedianya bahan dan peralatan pelaksanaan inseminasi Buatan		0	299.310.000,00	2000	654.395.000,00	2000	67.362.086,00	2000	-									0,00	-	0,00		2000,00	67.362.086,00	100,00	0,10	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan												
67	Pengembangan Pembibitan Dan Budidaya Ternak	Terdistribusinya ternak (sapi, kambing dan babi) ke petani		0	-	50	5.028.308.000,00	25	5.660.267.570,00	50	2.582.119.300,00		13.709.500,00		131.900.000,00	50,00	2.275.181.300,00	50,00	2.420.790.800,00	100,00	93,75	75,00	8.081.058.370,00	150,00	1,61	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan														
68	Pengembangan Dan Pengelolaan Pakan Ternak					30	628.539.000,00	18	116.912.800,00	18	256.587.500,00	3,00	37.980.000,00	3,00	50.244.000,00	5,00	80.128.500,00	7,00	87.720.000,00	18,00	256.072.500,00	100,00	99,80	36,00	372.985.300,00	120,00	0,59	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan												
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Perikanan			0	-		2.563.803.000,00		108.188.100,00		312.529.569,00	-		35.736.500,00		-	-	7,50	290.801.700,00	100,00	93,05	7,50	398.989.800,00	120,00	0,16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan														
68	Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Hortikultura					6	548.955.000,00	0	-	6	12.286.080,00	-					6,00	12.035.000,00	6,00	12.035.000,00	100,00	97,96	6,00	12.035.000,00	100,00	0,02	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan													
70	Penanganan Pangan Asal Hewan Yang Aman sehat Ujih Dan Halal	Tersedianya Data Kelompok/Peredia Pangan Asal Hewan ASUHA		0	-	6	308.609.000,00	6	108.188.100,00	6	40.585.200,00		2,00	12.425.000,00	2,00	19.492.000,00	2,00	8.185.200,00	6,00	40.102.200,00	100,00	98,81	12,00	148.290.300,00	200,00	0,48	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan													
78	Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Kelompok tani terbina dan bermitra dengan Konsumen/ Pasar/ Pengusaha Agribisnis dalam pemasaran dan promosi hasil produksi tanaman pangan				6	548.955.000,00			6	15.813.000,00	0,00	-	2,00	6.093.750,00	2,00	5.000.000,00	2,00	4.563.000,00	6,00	15.656.750,00	100,00	99,01	6,00	15.656.750,00	100,00	0,03	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan												
80	Penanganan Panen,Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah kelompok tani terbina dalam penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dengan penerapan standarisasi mutu				6	578.642.000,00			6	191.717.689,00	0,00	-	1,00	5.775.000,00	1,00	5.000.000,00	4,00	160.203.000,00	6,00	170.978.000,00	100,00	89,18	6,00	170.978.000,00	100,00	0,30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan												
82	Penanganan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Jumlah kelompok tani terbina dalam penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Hortikultura dengan penerapan standarisasi mutu				6	578.642.000,00			6	52.127.600,00			2,00	11.442.750,00	2,00	19.950.000,00	2,00	20.637.000,00	6,00	52.029.750,00	100,00	99,81	6,00	52.029.750,00	100,00	0,09	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan												
	Program Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Petani			0	-		1.653.710.000,00		601.042.241,00		237.256.400,00		412.886,67		65.643.750,00		-	-	53,67	227.240.150,00	96,25	95,78	53,67	828.282.391,00	1341,25	0,50	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan													
84	Peningkatan Kapasitas SDM Petani	Jumlah Kegiatan Pelatihan bagi Petani yang dilaksanakan			-	2	535.000.000,00	1	93.738.841,00	50	187.710.000,00		10,00	48.043.750,00	10,00	48.310.000,00	30,00	91.260.000,00	50,00	187.613.750,00	100,00	99,95	51,00	281.352.591,00	2550,00	0,53	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan													
	Apresiasi dan temu petani/petaku usaha pertanian	Terselenggaranya even/temu petani/petaku usaha pertanian dan apresiasi petani/petaku usaha pertanian berprestasi		-	1		462.914.000,00		0		-							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan													
85	Adopsi dan penerapan teknologi pertanian			-	120		655.796.000,00	48	507.303.400,00	120	49.546.400,00	1,00	412.886,67	45,00	17.600.000,00	10,00	2.403.513,33	55,00	19.210.000,00	111,00	39.626.400,00	92,50	79,98	159,00	546.929.800,00	132,50	0,83	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan												
86	Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelenbagaan Petani			-																							Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan													
DINAS PERKEBUNAN																																								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Cakupan dan kualitas layanan administrasi perkantoran	persentase	95		80		90	1.585.798.683,62	80	963.485.722,50	10,64	115.685.418,00	17,33	191.695.855,00	30,00	246.208.943,00	23,17	363.181.590,00	81,14	916.771.806,00	101,43	95,15	81,14	916.771.806,00	85,41	#DIV/0!	Dinas Perkebunan												
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dan dokumen dinas yang dibuat dan didistribusi ke masing-masing stasiun/ kantor	surat/ dokumen	4000		2038	4.050.000,00	2000	39.500.000,00	2000	48.500.000,00	0,00	-	665,08	14.881.250,00	452,00	15.000.000,00	392,00	16.100.000,00	1509,08	45.981.250,00	75,45	94,81	3547,08	50.031.250,00	88,68	95,21	Dinas Perkebunan												
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Mesa/Jumlah waktu/bulan ketersediaan jasa komunikasi, air dan listrik	unit	18		6	45.377.625,00	12/3	120.000.000,00	12	92.359.192,00	3,00	21.567.118,00	2,00	13.833.611,00	4,00	29.386.857,00	3,00	23.009.321,00	12,00	87.796.907,00	100,00	95,06	18,00	133.174.532,00	100,00	80,53	Dinas Perkebunan												
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang siap pakai/layak pakai dan operasional	unit	60		20	32.974.663,00	20	193.000.000,00	20	118.012.000,00	0,00	-	6,00	34.822.744,00	5,00	42.511.717,00	7,00	22.614.121,00	18,00	99.948.582,00	90,00	84,69	38,00	132.923.245,00	63,33	58,82	Dinas Perkebunan												
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung/ruang kantor yang memenuhi standar kebersihan	unit/ kompleks	23		20	15.000.000,00	3	90.000.000,00	3	80.470.000,00	0,00	-	0,93	23.470.300,00	1,00	26.508.409,00	2,00	28.675.500,00	3,93	78.654.209,00	131,00	97,74	23,93	93.654.209,00	104,04	89,19	Dinas Perkebunan												

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re			
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8*100	15 = 13+6	16 = 15/5*100	17														
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang siap dan layak pakai	unit	80	34.550.000,00	28	4.550.000,00	12	30.000.000,00	20	16.168.000,00	0,00	-	0,00	-	6,00	-	15,00	16.040.000,00	21,00	16.040.000,00	105,00	99,21	49,00	20.590.000,00	61,25	59,59	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu/bulan ketersediaan alat tulis kantor	bln	18	115.493.683,62	6	20.595.000,00	35	94.898.683,62	12	42.124.080,50	4,09	11.471.000,00	5,05	14.140.700,00	2,50	7.270.450,00	0,36	9.241.000,00	12,00	42.123.150,00	100,00	100,00	18,00	62.718.150,00	100,00	54,30	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Jumlah waktu/bulan ketersediaan barang cetakan dan pengandaian	bln	18	32.913.000,00	6	5.913.000,00	12	27.000.000,00	12	19.750.000,00	0,00	-	0,00	-	9,00	1.800.000,00	3,00	17.950.000,00	12,00	19.750.000,00	100,00	100,00	18,00	25.663.000,00	100,00	77,97	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah gedung/ruang kantor yang terpenuhi kebutuhan penerapangan kantor	unit	60	24.895.000,00	2	4.895.000,00	2	20.000.000,00	54	11.899.000,00	11,34	2.500.000,00	13,61	3.000.000,00	18,00	3.259.150,00	13,05	2.938.000,00	56,00	11.697.150,00	103,70	98,30	58,00	16.592.150,00	96,67	66,65	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	unit	40	224.652.000,00	9	64.652.000,00	9	160.000.000,00	36	49.773.900,00	0,00	-	4,00	5.000.000,00	5,00	10.000.000,00	8,00	33.484.000,00	17,00	48.484.000,00	47,22	97,41	26,00	113.136.000,00	65,00	50,36	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang disediakan	paket	2	8.000.000,00	0	-	1	8.000.000,00	1	3.190.000,00	0,00	-	0,00	-	0,25	-	0,75	3.178.000,00	1,00	3.178.000,00	100,00	99,62	1,00	3.178.000,00	50,00	39,73	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan frekuensi ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bln	12	30.000.000,00	0	-	12	30.000.000,00	12	34.600.000,00	0,00	-	3,72	9.962.500,00	5,00	7.500.000,00	3,28	16.996.000,00	12,00	34.458.500,00	100,00	99,59	12,00	34.458.500,00	100,00	114,86	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	jenis	20	26.000.000,00	12	8.000.000,00	1/7	18.000.000,00	7	21.000.000,00	0,00	-	2,22	6.268.750,00	4,00	6.517.040,00	3,78	6.178.900,00	10,00	18.964.690,00	142,86	90,31	22,00	26.964.690,00	110,00	103,71	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kebutuhan makan minum rapat makan minum tamu dinas yang disediakan/jumlah waktu ketersediaan	pax	500	108.950.000,00	175	9.950.000,00	175	99.000.000,00	12	30.860.000,00	0,00	-	4,16	4.775.000,00	5,00	5.000.000,00	4,00	20.850.000,00	13,16	30.625.000,00	109,67	99,24	188,16	40.575.000,00	37,63	37,24	Dinas Perkebunan		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah keikutsertaan pada rapat dan jumlah pelaksanaan koordinasi/konsultasi ke luar daerah	kali	50	299.792.249,00	10	69.792.249,00	28	230.000.000,00	28	147.299.000,00	9,00	57.162.300,00	2,00	15.818.000,00	0,00	-	12,00	73.048.748,00	23,00	146.049.048,00	82,14	99,15	33,00	189.839.468,00	66,00	63,32	Dinas Perkebunan		
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah keikutsertaan pada rapat dan jumlah pelaksanaan koordinasi/konsultasi dalam daerah	kali	150	263.790.420,00	16	43.790.420,00	80	220.000.000,00	80	163.966.650,00	12,00	22.965.000,00	17,00	32.923.000,00	30,00	79.255.320,00	24,00	28.812.000,00	83,00	163.955.320,00	103,75	99,99	99,00	173.955.320,00	66,00	65,94	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Jumlah publikasi dan media cetak yang diakses setiap bulan	jenis	8	130.000.000,00	2	10.000.000,00	3	120.000.000,00	3	30.666.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	30.666.000,00	3,00	30.666.000,00	100,00	100,00	5,00	40.666.000,00	62,50	31,28	Dinas Perkebunan		
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpenuhi jasa keamanan	gedung/kantor	8	88.550.000,00	2	2.150.000,00	3	86.400.000,00	3	52.847.900,00	0,00	-	0,48	12.800.000,00	1,00	12.200.000,00	1,52	13.400.000,00	3,00	38.400.000,00	100,00	72,66	5,00	40.550.000,00	62,50	45,79	Dinas Perkebunan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase	50	1.720.000.000,00			70	1.720.000.000,00	35	279.999.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	10,00	209.761.400,00	10,00	209.761.400,00	28,57	74,91	10,00	209.761.400,00	20,00	12,20	Dinas Perkebunan		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	unit	15	670.000.000,00	0	-	4	670.000.000,00	4	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perkebunan	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	unit/paket	2	150.000.000,00	0	-	2	150.000.000,00	2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perkebunan	
	Pengadaan meubeler	Jumlah meubeler yang disediakan	set	20	100.000.000,00	0	-	15	100.000.000,00	15	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perkebunan	
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dibangun	unit	2	400.000.000,00	0	-	1	400.000.000,00	2	279.999.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	209.761.400,00	0,00	209.761.400,00	0,00	74,91	0,00	209.761.400,00	0,00	52,44	Dinas Perkebunan
	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	unit	3	400.000.000,00	0	-	1	400.000.000,00	2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perkebunan	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran dan kaptauhan aparat	%	90	72.000.000,00			90	72.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perkebunan	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	stel	175	36.000.000,00	0	-	72	36.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perkebunan	
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga/baju khusus yang disediakan	stel	140	72.000.000,00	72	36.000.000,00	72	36.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	72,00	0,00	-	0,00	72,00	0,00	-	72,00	36.000.072,00	51,43	50,00	Dinas Perkebunan		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kesesuaian/pemenuhan kompetensi aparatut dengan kompetensi jabatan	%	95	135.000.000,00			60	135.000.000,00	80	32.500.000,00	5,71	4.000.000,00	0,00	-	35,00	-	25,00	-	65,71	4.000.000,00	82,14	12,31	65,71	4.000.000,00	69,17	2,96	Dinas Perkebunan		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN dan PTT yang meningkat kapasitas teknis dan administrasi	orang	40	135.000.000,00	0	-	10	135.000.000,00	6	32.500.000,00	0,57	4.000.000,00	0,00	-	1,00	-	2,00	-	3,57	4.000.000,00	59,50	12,31	3,57	4.000.000,00	8,93	2,96	Dinas Perkebunan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah					
				K		Re		K		Re		K		Re		K		Re		K		Re							
				K		Re		K		Re		K		Re		K		Re		K		Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re						
				13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		5 = 13+6		16 = 15*100																			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN dan PTT yang memahami peraturan yang terkait dengan tupoksi ASN dan PTT	orang	85	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu dan akurabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan		50	481.000.000,00			90	481.000.000,00	90	290.777.830,00	0,26	23.728.000,00	0,75	67.774.200,00	62,50	49.681.000,00	30,00	142.217.500,00	93,51	283.400.700,00	103,90	97,46	93,51	283.400.700,00	187,03	58,92	Dinas Perkebunan	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SPD yang terusun	laporan/ dokumen	12	50.000.000,00	5	12.565.000,00	5	32.000.000,00	5	31.991.750,00	0,00	-	1,14	7.350.000,00	3,00	11.156.000,00	1,86	12.130.000,00	6,00	30.636.000,00	120,00	95,76	11,00	43.201.000,00	91,67	86,40	Dinas Perkebunan	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang terusun	laporan/ dokumen	4	17.500.000,00	2	2.500.000,00	2	15.000.000,00	2	6.998.400,00	0,00	-	0,00	-	1,00	6.266.000,00	1,00	-	2,00	6.266.000,00	100,00	89,53	4,00	8.766.000,00	100,00	50,09	Dinas Perkebunan	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang terusun	laporan/ dokumen	2	5.000.000,00	0	-	2	7.000.000,00	2	5.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	-	1,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00	100,00	100,00	2,00	5.000.000,00	100,00	100,00	Dinas Perkebunan	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan pengelolaan aset SKPD	laporan/ dokumen	2	18.550.000,00	1	3.550.000,00	2	15.000.000,00	1	17.000.000,00	0,00	-	0,31	4.975.000,00	0,50	5.000.000,00	0,19	5.000.000,00	1,00	14.975.000,00	100,00	88,09	2,00	18.525.000,00	100,00	99,87	Dinas Perkebunan	
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA-SKPD yang terusun	laporan/ dokumen	4	41.850.000,00	2	9.850.000,00	2	32.000.000,00	2	16.819.200,00	0,00	-	0,00	-	1,00	4.274.000,00	1,00	12.279.100,00	2,00	16.553.100,00	100,00	98,42	4,00	26.403.100,00	100,00	63,09	Dinas Perkebunan	
	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P/DPPA-SKPD yang terusun	laporan/ dokumen	2	7.995.000,00	2	2.995.000,00	2	5.000.000,00	2	2.999.900,00	0,00	-	0,00	-	1,00	1.280.000,00	1,00	1.694.800,00	2,00	2.974.800,00	100,00	99,16	4,00	5.969.800,00	200,00	74,67	Dinas Perkebunan	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah laporan monitoring evaluasi dan pelaporan progrm SKPD dan jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Renja/Renstra	laporan/ dokumen	14	89.030.000,00	6	24.030.000,00	6	65.000.000,00	6	48.760.000,00	0,00	-	0,75	6.135.000,00	4,00	8.955.000,00	1,25	33.350.600,00	6,00	48.440.600,00	100,00	99,34	12,00	72.470.600,00	85,71	81,40	Dinas Perkebunan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang terusun (Renstra, Renja, Master)	laporan/ dokumen	8	186.932.500,00	3	21.932.500,00	3	165.000.000,00	3	95.787.780,00	0,00	-	0,79	20.478.000,00	2,00	12.750.000,00	1,21	61.507.000,00	4,00	94.735.000,00	133,33	98,90	7,00	116.667.500,00	87,50	62,41	Dinas Perkebunan	
	Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen usulan e-proposal dan dokumen hasil rapat koordinasi/Forum SKPD pembangunan perkebunan	laporan/ dokumen	6	80.000.000,00	0	-	2	80.000.000,00	2	65.420.800,00	0,72	23.728.000,00	0,88	28.836.200,00	0,40	-	1,00	11.256.000,00	3,00	63.820.200,00	150,00	97,55	3,00	63.820.200,00	50,00	79,78	Dinas Perkebunan	
	Pengelolaan Manajemen Data Statistik (Database) Pertanian	Jumlah laporan dan data statistik perkebunan yang terusun	laporan/ dokumen	4	65.000.000,00	1	-	1	65.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	25,00	-	Dinas Perkebunan	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah petani yang mengadopsi teknologi inovasi budidaya perkebunan berkelanjutan	petani	5000	1.315.000.000,00				1.315.000.000,00	2000	357.632.400,00	90,00	-	102,00	91.424.400,00	204,00	67.497.505,00	204,00	140.661.198,00	600,00	299.583.103,00	30,00	83,77	600,00	299.583.103,00	12,00	22,78	Dinas Perkebunan	
	Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT/DPI dan Pengujian Teknologi Tanaman Perkebunan	Luas areal penerapan teknologi pengendalian OPT dan DPI tanaman perkebunan	Ha	25	250.000.000,00	6	63.699.000,00	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	63.699.000,00	24,00	25,48	Dinas Perkebunan	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Tanaman Perkebunan	Jumlah area lahan perkebunan yang telah dilakukan mitigasi, jumlah petani kelapa sawit/lahan perusahahan sawit yang dilakukan rehabilitasi	Ha	50	350.000.000,00	16	66.006.000,00	22/1000	225.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	16,00	66.006.000,00	32,00	18,86	Dinas Perkebunan	
	Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar	Jumlah demplot/demfar m kakao/kopi yang dikembangkan dan Jumlah petani yang mengadopsi	unit	50	200.000.000,00	0	-	5/120	200.000.000,00	5	46.481.800,00	0,00	-	0,00	-	2,00	5,00	3,00	39.563.198,00	5,00	39.563.203,00	100,00	85,12	5,00	39.563.203,00	10,00	19,78	Dinas Perkebunan	
	Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah	Jumlah demplot/demfar m kakao/kopi yang dikembangkan dan jumlah petani yang mengadopsi	unit	3	120.000.000,00	0	-	3	120.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Teknologi APH dan Nabati	Jumlah varian serta volume APH dan Nabati yang dikembangkan	jenis	6	150.000.000,00	0	-	2	150.000.000,00	2	25.403.200,00	0,00	-	0,38	5.776.200,00	0,80	9.019.000,00	1,00	9.358.000,00	2,18	24.153.200,00	109,00	95,08	2,18	24.153.200,00	24,22	16,10	Dinas Perkebunan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Pengkajian Teknologi Pengendalian OPT	Jumlah rekomendasi Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Rekomenda- si Teknis	9	150.000.000,00	0	-	2	150.000.000,00	2	31.509.800,00	0,00	-	0,78	11.409.000,00	0,50	7.500.000,00	0,72	10.000.000,00	2,00	28.909.000,00	100,00	91,75	2,00	28.909.000,00	4,00	19,27	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Pengkelolaan Kebun Induk	Luas lahan sumber entris/sumber benih (calon sumber benih) kakao, kopi, kelapa dalam dan kebun produksi kakao dan kelapa dalam	Ha	50	335.000.000,00	0	-	15/10	335.000.000,00	15	223.624.000,00	0,00	-	4,54	62.814.500,00	8,00	43.000.000,00	3,50	72.500.000,00	16,04	178.314.500,00	106,93	79,74	16,04	178.314.500,00	178,22	53,23	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Perkebunan	Jumlah varietas komoditi unggulan yang dikembangkan hingga pelepasan varietas	jenis	9	100.000.000,00	0	-	3	100.000.000,00	3	24.810.000,00	0,00	-	1,23	6.981.500,00	1,50	7.678.500,00	0,27	9.240.000,00	3,00	23.900.000,00	100,00	96,33	3,00	23.900.000,00	3,00	23,90	Dinas Perkebunan
	Pengelolaan Administrasi UPTD dan Layanan UPTD Perbenihan Tanaman Perkebunan	Capaian dan kualitas layanan UPTD	%	100	35.000.000,00	0	-	100	35.000.000,00	100	5.803.600,00	0,00	-	76,55	4.443.200,00	15,00	300.000,00	8,45	-	100,00	4.743.200,00	100,00	81,73	100,00	4.743.200,00	#REF!	13,55	Dinas Perkebunan
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (kakao, kelapa sawit, kelapa dalam, lada dan cedapa)			5.705.000.000,00			0,05	5.705.000.000,00	0	3.120.906.318,00	0,00	25.157.200,00	0,00	173.382.148,00	0,00	164.437.400,00	0,00	2.453.055.800,00	0,00	2.816.032.548,00	0,00	90,23	0,00	2.816.032.548,00	#DIV/0!	49,36	Dinas Perkebunan
	Pembinaan dan Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah penangkar yang mengproduksi benih bermutu sesuai standar	Klp/ penangkar	6	305.340.000,00	6	105.340.000,00	25	200.000.000,00	50	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	105.340.000,00	100,00	34,50	Dinas Perkebunan
	Pengawasan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Unggul Tanaman Perkebunan	Jumlah benih tanaman perkebunan yang dijual	Ha	1000	88.473.300,00	266	88.473.300,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	266,00	88.473.300,00	26,60	100,00	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah pengembangan tanaman perkebunan	ha	1000	628.018.624,00	27	628.018.624,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	27,00	628.018.624,00	2,70	100,00	Dinas Perkebunan
	Penyediaan Bibit Unggul Tanaman perkebunan	Jumlah benih tanaman yang diberikan ke petani	pohon	350000	2.278.099.599,00	80000	1.278.099.599,00	2050	1.000.000.000,00	20000	1.871.199.486,00	387,80	19.937.200,00	892,33	45.875.450,00	0,00	45.496.000,00	43500,00	1.584.853.600,00	44780,13	1.696.162.250,00	223,90	90,65	124780,13	2.974.261.849,00	35,65	130,56	Dinas Perkebunan
	Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan	Jumlah rencana usulan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang dijual	Kegiatan	13	66.066.085,00	13	66.066.085,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	13,00	66.066.085,00	100,00	100,00	Dinas Perkebunan
	Penanganan Gangguan Usaha serta Konflik Perkebunan	Jumlah kasus/gangguan usaha serta konflik perkebunan yang ditangani	Kasus	20	317.067.250,00	5	67.067.250,00	55%/1/ 1.000/500	250.000.000,00	75	56.226.400,00	0,00	-	12,21	8.955.000,00	65,00	34.738.000,00	15,00	12.004.400,00	92,21	55.697.400,00	122,95	99,06	97,21	122.764.650,00	486,05	38,72	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan (DAK)	Luas lahan kebudayaan kebudayaan kebudayaan kebudayaan	Ha	50	1.955.538.937,00	20	1.955.538.937,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	20,00	1.955.538.937,00	40,00	100,00	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyebar	Luas lahan tanaman tahunan dan penyebar yang dikembangkan dan dijual	Ha	2000	750.000.000,00	0	-	200	750.000.000,00	50	220.907.000,00	0,00	-	7,22	29.468.750,00	25,00	32.420.000,00	35,00	69.527.700,00	67,22	131.416.450,00	134,44	59,49	67,22	131.416.450,00	3,36	17,52	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Luas lahan tanaman semusim dan rempah yang dikembangkan/ jumlah petani yang dibina	ha	500	521.404.500,00	50	166.404.500,00	100/100	355.000.000,00	200	231.826.000,00	0,00	-	4,23	4.856.250,00	100,00	14.778.200,00	15,77	211.191.600,00	120,00	230.826.050,00	60,00	99,57	170,00	397.230.550,00	34,00	76,18	Dinas Perkebunan
	Pengelolaan Data dan Peramalan Serangan OPT Tanaman Perkebunan	Data tingkat serangan OPT dan ramalan potensi serangan OPT pada Komoditi unggulan perkebunan	Laporan/ dokumen	24	242.572.447,00	3	42.572.447,00	12/3	200.000.000,00	12	65.354.412,00	0,00	-	4,26	23.201.248,00	7,00	-	0,74	40.711.300,00	12,00	63.912.548,00	100,00	97,79	15,00	106.484.995,00	62,50	43,90	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Kebudayaan dan Pembinaan Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan	Jumlah brigade proteksi tanaman perkebunan dan luas lahan yang dijual	orang	24	260.000.000,00	0	-	10/5000	260.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan
	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Luas lahan dan jumlah kelompok tani yang melakukan pengendalian OPT sesuai aturan teknis	Ha	1000	626.330.100,00	125	226.330.100,00	500/25	400.000.000,00	700	102.479.420,00	36,09	5.220.000,00	55,90	8.085.000,00	100,00	-	350,00	82.669.100,00	541,99	95.974.100,00	77,43	93,65	666,99	322.304.200,00	66,70	51,46	Dinas Perkebunan
	Penilaian Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Luas lahan dan jumlah kelompok tani yang dinilai			200.000.000,00	0	-	160/65	200.000.000,00	65	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan
	Pengembangan Lahan dan Irigasi	Jumlah sumber air bagi lahan perkebunan yang terdampak	ha	15	450.000.000,00	0	-	5	450.000.000,00	10	151.259.100,00	0,00	-	1,31	14.634.450,00	0,00	5.000.000,00		114.308.900,00	1,31	133.943.350,00	13,10	88,55	1,31	133.943.350,00	0,03	29,77	Dinas Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17													
		Jumlah petani yang memahami dan menerapkan pengolahan lahan secara berkelompok	orang	5000	-	0	-	100		100		0,00		0,00	-	25,00		25,00		50,00	-	50,00		50,00	-	16,67	#DIV/0!	Dinas Perkebunan	
		Jumlah luas lahan baru tanaman perkebunan	ha	300	-	0	-	30		0		0,00		0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	#DIV/0!	Dinas Perkebunan	
		Panjang jalan produksi/jalan akses kebun yang terawat	km	30	-	0	-	2		0		0,00		0,00	-	0,00				0,00	-	0,00		0,00	-	#REF!	#DIV/0!	Dinas Perkebunan	
	Pengembangan Pembiayaan dan Investasi	Jumlah petani yang memenuhi syarat kredit	orang		150.000.000,00	0	-	100	150.000.000,00	2000	-	0,00	-	0,00	-	-	-			0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	Dinas Perkebunan	
	Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alasiran	Dokumen (data) kebutuhan pupuk tanaman perkebunan	dokumen	9	250.000.000,00	0	-	3/3	250.000.000,00	3	250.067.000,00	0,00	-	0,02	2.317.000,00	0,50	5.500.000,00	0,48	233.380.000,00	1,00	241.197.000,00	33,33	96,45	1,00	241.197.000,00	11,11	96,48	Dinas Perkebunan	
		Jumlah kelompok yang menerima bantuan pupuk	laporan/ dokumen	18	-	0	-			4		0,00		0,00		0,00		4,00		4,00	-	100,00		4,00	-	22,22	#DIV/0!	Dinas Perkebunan	
	Pembinaan Peredaran Pupuk, Pestisida dan Alasiran	Jumlah laporan hasil pengawasan peredaran pupuk, pestisida dan alasiran			150.000.000,00	0	-	6/6	150.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan	
	Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan	Persentase penyelesaian pengujian mutu benih yang akan disertifikasi	%	100	375.000.000,00	0	-	100	375.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan	
		Jumlah alat kelengkapan laboratorium pengujian mutu benih	set/unit	3	-	0	-	1		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan	
		Operasionalnya laboratorium pengujian mutu benih	unit	1	-	0	-	1		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan	
	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi	pohon	2500000	350.000.000,00	0	-	8500000	350.000.000,00	850000	98.243.600,00	0,00	-	130520,85	14.893.750,00	300000,00	7.820.000,00	1216669,00	74.238.600,00	1647189,85	96.952.350,00	193,79	98,69	1647189,85	96.952.350,00	1647189,85	27,70	Dinas Perkebunan	
		Target PAD Sertifikasi Benih		100	-	0	-	80000000		5000000								160049700,00		160049700,00	-	3200,99		160049700,00	-	160049700,00	#DIV/0!	Dinas Perkebunan	
	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Menurunnya persentase peredaran benih palsu/legal	%	100	300.000.000,00	0	-	75	300.000.000,00	75	61.245.200,00	0,00	-	20,66	16.531.150,00	50,00	18.685.200,00	10,00	25.516.000,00	80,66	60.732.350,00	107,55	99,16	80,66	60.732.350,00	806,60	20,24	Dinas Perkebunan	
	Peningkatan Kapasitas PPNS dan PBT	Jumlah PPNS dan PBT yang memenuhi kapasitas yang ditetapkan	orang	10	30.000.000,00	0	-	2	30.000.000,00	2	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#REF!	-	#REF!	-	Dinas Perkebunan	
	Pengelolaan Administrasi UPTD dan Layanan UPTD PSMBP	Meningkatnya capaian dan kualitas layanan UPTD	%	100	35.000.000,00	0	-	100	35.000.000,00	100	12.098.700,00	0,00	-	59,54	4.564.100,00	25,00		15,46	4.654.600,00	100,00	9.218.700,00	100,00	76,20	#REF!	9.218.700,00	#REF!	26,34	Dinas Perkebunan	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kinerja penyuluh dan pendamping perkebunan	orang	103	125.000.000,00		-	60	125.000.000,00	60	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Perkebunan	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah aparat penyuluh perkebunan/tenaga pendamping/fasilitator yang meningkatkan kapasitasnya	orang	103	606.924.000,00	102	481.924.000,00	20	125.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	102,00	481.924.000,00	99,03	79,40	Dinas Perkebunan	
		Database kementerian petani perkebunan	dokumen	1	/2	1		1		0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	100,00	#VALUE!	Dinas Perkebunan	
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase produksi perkebunan yang memenuhi SNI dan standar pasar global	%	15	1.845.000.000,00			15	1.845.000.000,00	15	636.584.880,00	0,39	14.649.200,00	0,52	19.700.000,00	8,40	181.834.600,00	8,40	362.534.700,00	17,70	578.718.500,00	118,03	90,91	17,70	578.718.500,00	118,03	31,37	Dinas Perkebunan	
	Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan	Jumlah kelompok yang menerapkan pasca panen sesuai standar teknis	kip	30	688.819.550,00	7	388.819.550,00	15	300.000.000,00	15	158.406.600,00	0,00	-	0,00	-	10,00	38.148.000,00	7,00	97.508.000,00	17,00	135.656.000,00	113,33	85,64	24,00	524.475.550,00	80,00	76,14	Dinas Perkebunan	
	Pembinaan Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang terbina dalam pengolahan hasil perkebunan sesuai standar dahan pangan/standar nasional	kip	20	499.006.180,00	5	149.006.180,00		350.000.000,00	8	72.730.000,00	0,69	6.330.000,00	0,00		-	4,00	11.285.000,00	4,31	50.365.000,00	9,00	67.980.000,00	112,50	93,47	14,00	216.986.180,00	70,00	43,48	Dinas Perkebunan
		Jumlah UPH yang berproduksi secara mandiri	unit	15	-	5		8		0	-	0,00	-	0,00	-		-			-	0,00	-	0,00	-	5,00	-	33,33	#DIV/0!	Dinas Perkebunan
	Pembinaan Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang memenuhi syarat dan menerapkan pengolahan hasil produksi perkebunan sesuai standar (ISPO, SK, IS CoCoc)	unit usaha	11	560.775.250,00	8	210.775.250,00	6	350.000.000,00	8	62.862.400,00	0,00	-	0,61	4.868.750,00	5,00	52.852.400,00	3,89	3.750.000,00	9,50	61.471.150,00	118,75	97,79	17,00	272.246.400,00	154,55	48,55	Dinas Perkebunan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		Pemenuhan legalitas perijinan PKS dan kepemilikan STDB petani	petani	2500	-	300	3500	300		0,00	0,00	500,00	725,00		1225,00	-	408,33		1525,00	-	61,00	#DIV/0!	Dinas Perkebunan					
	Peningkatan Mutu dan Penerapan Standardisasi Produk Perkebunan	Pemenuhan standar SHL produksi komoditi perkebunan	kelompok	50	270.000.000,00	0	5	270.000.000,00	5	56.609.980,00	0,00	-	0,44	4.875.000,00	4,00	28.279.800,00	1,56	18.110.000,00	6,00	51.264.800,00	120,00	90,56	6,00	51.264.800,00	12,00	18,99	Dinas Perkebunan	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah kemitraan dan jejaring pemasaran yang terbentuk	kerja sama	15	475.925.680,00	3	125.925.680,00	2/1	350.000.000,00	2	255.326.900,00	0,08	8.319.200,00	0,09	9.956.250,00	1,00	44.069.400,00	0,00	172.742.700,00	1,17	235.087.550,00	58,50	92,07	4,17	361.013.230,00	27,80	75,85	Dinas Perkebunan
		Harga dasar pembelian TBS kelapa sawit yang ditetapkan setiap bulan	kali	18	-	7	12	12		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		12,00	-	100,00		19,00	-	105,56	#DIV/0!	Dinas Perkebunan	
	Pengelolaan Data dan Informasi Pasar (Pemasaran) Hasil Perkebunan	Jumlah informasi harga komoditi yang tersaji setiap bulannya	kali	18	225.000.000,00	0	10	225.000.000,00	10	30.649.000,00	0,00	-	0,00	-	9,00	7.200.000,00	1,00	20.059.000,00	10,00	27.259.000,00	100,00	88,94	10,00	27.259.000,00	55,56	12,12	Dinas Perkebunan	
	Program Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang menerapkan GDP dan GDP	%	15	474.000.000,00		1000	474.000.000,00	500	241.445.900,00	0,00	-	0,94	7.302.800,00	101.318.200,00	127.033.545,00	0,94	235.654.545,00	0,19	97,60	0,94	235.654.545,00	6,26	49,72	Dinas Perkebunan			
	Peningkatan Kapasitas Petani	Jumlah petani dan kelompok tani yang memahami dan menerapkan usahatani perkebunan sesuai rekomendasi teknis	orang	466	474.000.000,00	0	-	250 petani/50 Poktan 1 dokumen/ database	474.000.000,00	250	241.445.900,00	0,00	-	7,83	7.302.800,00	150,00	101.318.200,00	145,17	127.033.545,00	303,00	235.654.545,00	121,20	97,60	303,00	235.654.545,00	65,02	49,72	Dinas Perkebunan
		Jumlah fasilitas kelompok tani mengikuti PKKS	kelompok	50	-	0	-	20	0	-	0,00		0,00		20,00		0,00		20,00	-	0,00	-	20,00	-	40,00	#DIV/0!	Dinas Perkebunan	
DINAS KEHUTANAN																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	%	500	12.633.306.275,73	154	2.356.171.200,00	100	490.591.500,00	100	603.590.408,00	0,00	-	33,47	202.033.900,00	21,54	129.995.900,00	40,94	247.132.700,00	95,95	579.162.500,00	95,95	95,95	249,72	2.935.333.700,00	49,94	23,23	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	surat	2500	40.454.287,50	407	5.560.500,00	60	2.800.000,00	60	3.800.000,00	0,00	-	0,00	-	30,00	1.953.500,00	15,00	582.000,00	45,00	2.535.500,00	75,00	66,72	452,00	8.096.000,00	18,08	20,01	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik yang Disediakan	kantor	65	2.848.858.349,56	26	290.377.000,00	13	74.374.000,00	13	69.893.608,00	0,00	-	7,00	30.956.100,00	4,00	16.354.900,00	2,00	19.244.300,00	13,00	66.555.300,00	100,00	95,22	39,00	356.932.300,00	60,00	12,53	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah	Jumlah Jasa Jaminan Barang Milik Daerah yang Disediakan	unit	52	352.356.844,13	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan	unit	743	1.449.544.544,94	107	114.123.300,00	40	36.860.000,00	40	36.860.000,00	0,00	-	6,00	5.692.700,00	14,00	12.850.500,00	14,00	13.507.700,00	34,00	32.050.900,00	85,00	86,95	141,00	146.174.200,00	18,98	10,08	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	kantor	65	1.319.678.460,80	26	318.189.000,00	13	68.466.500,00	13	71.466.500,00	0,00	-	4,00	22.400.000,00	4,00	20.466.500,00	5,00	15.798.500,00	13,00	58.665.000,00	100,00	82,09	39,00	376.854.000,00	60,00	28,56	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Disediakan	unit	207	221.015.520,00	65	49.645.000,00	20	13.200.000,00	20	13.200.000,00	0,00	-	0,00	-	13,00	8.715.000,00	7,00	4.270.000,00	20,00	12.985.000,00	100,00	98,37	85,00	62.630.000,00	41,06	28,34	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	kantor	65	2.027.291.274,88	26	396.473.700,00	13	63.903.900,00	13	63.893.200,00	0,00	-	6,00	27.767.400,00	4,00	18.652.400,00	3,00	17.429.400,00	13,00	63.849.200,00	100,00	99,93	39,00	460.322.900,00	60,00	22,71	Dinas Kehutanan
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Blok	348	357.643.296,00	6	96.464.100,00	30	20.500.700,00	30	19.891.700,00	0,00	-	13,00	9.171.400,00	5,00	3.647.100,00	12,00	6.690.000,00	30,00	19.508.500,00	100,00	98,07	36,00	115.972.600,00	10,34	32,43	Dinas Kehutanan
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	388	219.780.214,40	105	47.251.000,00	13	8.278.400,00	13	8.278.400,00	0,00	-	0,00	-	13,00	8.278.000,00	0,00	-	13,00	8.278.000,00	100,00	100,00	118,00	55.529.000,00	30,41	25,27	Dinas Kehutanan
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	media cetak	20	75.681.072,00	3	5.640.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3,00	5.640.000,00	15,00	7,45	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang	Dus	3695	292.306.048,00	1548	68.660.000,00	445	25.300.000,00	445	25.300.000,00	0,00	-	0,00	-	225,00	12.800.000,00	200,00	11.360.000,00	425,00	24.160.000,00	95,51	95,49	1973,00	92.820.000,00	53,40	31,75	Dinas Kehutanan
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	kali	142	1.814.047.761,92	41	580.086.800,00	8	120.598.000,00	8	136.839.000,00	0,00	-	5,00	70.832.900,00	1,00	13.738.000,00	2,00	52.184.200,00	8,00	136.755.100,00	100,00	99,94	49,00	716.841.900,00	34,51	39,52	Dinas Kehutanan
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	kali	224	1.116.240.000,00	64	275.044.800,00	7	38.800.000,00	7	136.658.000,00	0,00	-	2,00	32.753.400,00	0,00	-	5,00	103.706.600,00	7,00	136.460.000,00	100,00	99,86	71,00	411.504.800,00	31,70	36,87	Dinas Kehutanan
	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Jumlah Jasa Publikasi Media Cetak yang Disediakan	kali	90	126.328.601,60	11	8.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	11,00	8.000.000,00	12,22	6,33	Dinas Kehutanan
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	dokumen	65	372.080.000,00	26	100.656.000,00	13	17.510.000,00	13	17.510.000,00	0,00	-	2,00	2.460.000,00	9,00	12.540.000,00	2,00	2.360.000,00	13,00	17.360.000,00	100,00	99,14	39,00	118.016.000,00	60,00	31,72	Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	%	500	5.558.248.577,00	179	2.067.795.100,00	100	1.255.568.600,00	100	1.360.320.492,00	0,00	-	80,26	1.091.741.200,00	2,40	32.618.400,00	15,90	216.307.100,00	98,56	1.340.666.700,00	98,56	98,56	277,56	3.408.461.800,00	55,51	61,32	Dinas Kehutanan
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasio nal yang Dibekukan	unit	15	781.100.000,00	14	469.252.000,00	0	20.636.600,00	2	70.161.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	68.600.000,00	2,00	68.600.000,00	100,00	97,77	16,00	537.852.000,00	106,67	68,86	Dinas Kehutanan
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan/Perlen gapan Gedung Kantor yang dibekukan	unit	40	1.516.095.680,00	45	805.729.300,00	16	1.058.306.000,00	113	1.096.806.000,00	0,00	-	107,00	1.039.365.900,00	0,00	-	6,00	54.094.000,00	113,00	1.093.459.900,00	100,00	99,69	158,00	1.899.189.200,00	395,00	125,27	Dinas Kehutanan
	Pengadaan Meubeler	Jumlah Meubeler yang dibekukan	unit	80	710.000.000,00	122	220.300.000,00	0	5.000.000,00	1	11.420.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	11.300.000,00	1,00	11.300.000,00	100,00	98,96	123,00	231.600.000,00	153,75	32,62	Dinas Kehutanan
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dioptimalkan	kantor	65	1.489.309.696,00	26	385.388.000,00	13	77.536.000,00	13	87.898.000,00	0,00	-	4,00	24.000.000,00	2,00	14.400.000,00	7,00	49.000.000,00	13,00	87.400.000,00	100,00	99,43	39,00	472.788.000,00	60,00	31,75	Dinas Kehutanan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dioptimalkan	unit	5	264.301.345,00	2	68.781.800,00	1	68.370.000,00	1	68.314.892,00	0,00	-	1,00	19.776.000,00	0,00	12.304.400,00	0,00	25.628.200,00	1,00	57.708.600,00	100,00	84,47	3,00	126.490.400,00	60,00	47,86	Dinas Kehutanan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dioptimalkan	unit	119	797.441.856,00	23	118.344.000,00	3	25.720.000,00	1	25.720.000,00	0,00	-	1,00	8.599.300,00	0,00	5.914.000,00	0,00	7.684.900,00	1,00	22.198.200,00	100,00	86,31	24,00	140.542.200,00	20,17	17,62	Dinas Kehutanan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya perangkat aparatur	%	500	964.400.000,00	99	323.630.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	99,00	323.630.000,00	19,80	33,56	Dinas Kehutanan
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakelan Dinas Beserta Perlengkapannya	set	781	487.400.000,00	258	323.630.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	258,00	323.630.000,00	33,03	66,40	Dinas Kehutanan
	Pengadaan Pakelan Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakelan Khusus Hari- hari Tertentu yang Dibekukan	set	785	477.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	orang	65	2.423.820.000,00	14	351.686.499,00	35	29.520.000,00	35	26.200.000,00	0,00	-	1,00	18.942.000,00	1,00	6.040.000,00	0,00	-	2,00	24.982.000,00	5,71	95,35	16,00	376.688.499,00	24,62	15,54	Dinas Kehutanan
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	65	1.993.820.000,00	14	291.702.499,00	2	29.520.000,00	2	26.200.000,00	0,00	-	1,00	18.942.000,00	1,00	6.040.000,00	0,00	-	2,00	24.982.000,00	100,00	95,35	16,00	316.684.499,00	24,62	15,88	Dinas Kehutanan
	Pembinaan, Monitoring Data dan Kepegawaian	Pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan	kali	16	430.000.000,00	4	59.984.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00	59.984.000,00	25,00	13,95	Dinas Kehutanan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan-laporan SKPD	Dokumen	20	11.495.367.857,60	8	319.880.000,00	4	109.394.800,00	4	109.394.800,00	0,00	-	2,00	46.046.500,00	0,00	15.000.000,00	2,00	42.097.400,00	4,00	103.143.900,00	100,00	94,29	12,00	423.023.900,00	60,00	3,68	Dinas Kehutanan
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	laporan	60	10.788.901.000,00	13	120.901.000,00	7	96.500.000,00	7	96.500.000,00	0,00	-	3,00	39.600.000,00	1,00	15.000.000,00	3,00	35.650.000,00	7,00	90.250.000,00	100,00	93,52	20,00	211.151.000,00	33,33	1,96	Dinas Kehutanan
	Penyusunan RKAD/DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKAD/DPA SKPD yang Disusun	dokumen	10	78.590.737,60	4	22.984.000,00	2	6.447.400,00	2	6.447.400,00	0,00	-	2,00	6.446.500,00	0,00	-	0,00	-	2,00	6.446.500,00	100,00	99,99	6,00	29.430.500,00	60,00	37,45	Dinas Kehutanan
	Penyusunan RKAP/DPPA SKPD	Jumlah Dokumen RKAP/DPPA SKPD yang Disusun	dokumen	35	72.380.000,00	4	24.200.000,00	2	6.447.400,00	2	6.447.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	6.447.400,00	2,00	6.447.400,00	100,00	100,00	6,00	30.647.400,00	17,14	42,34	Dinas Kehutanan
	Sinkronisasi dan Konsiliasi Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Sinkronisasi dan Konsiliasi Laporan Pertanggungjaw aban	kali	50	555.496.120,00	22	151.795.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	22,00	151.795.000,00	44,00	27,33	Dinas Kehutanan
	Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dan capaian strategis perencanaan pembangunan kehutanan	%	435	2.333.216.000,00	138	584.052.000,00	90	52.108.000,00	90	52.108.000,00	0,00	-	0,00	-	54,12	31.333.000,00	27,46	15.898.900,00	81,58	47.231.900,00	90,64	90,64	219,58	631.283.900,00	50,48	27,06	Dinas Kehutanan
	Rapat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan	Jumlah Dokumen Rapat dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan	laporan	14	1.127.133.000,00	3	432.514.500,00	2	40.802.000,00	2	40.802.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	20.093.000,00	1,00	15.898.900,00	2,00	35.991.900,00	100,00	88,21	5,00	468.506.400,00	35,71	41,57	Dinas Kehutanan
	Penyusunan Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat yang Disusun	laporan	5	379.000.000,00	1	59.887.500,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	59.887.500,00	20,00	15,80	Dinas Kehutanan
	Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang- Undangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang- Undangan Kehutanan yang Disosialisasi dan Dipublikasikan	dokumen	4	325.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	kali	78	502.083.000,00	11	91.650.000,00	12	11.306.000,00	12	11.306.000,00	0,00	-	0,00	-	12,00	11.240.000,00	0,00	-	12,00	11.240.000,00	100,00	99,42	23,00	102.890.000,00	29,49	20,49	Dinas Kehutanan
	Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Luas Kawasan Hutan yang diklasifikasi melalui PPTKH untuk sumber TOBA	hektar	30000	10.567.000.000,00	12000	220.880.600,00	6000	24.600.000,00	6000	78.760.000,00	0,00	-	0,00	3.400.000,00	0,00	-	6000,00	73.744.000,00	6000,00	77.144.000,00	100,00	97,95	18000,00	298.024.600,00	60,00	2,82	Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17												
	Sosialisasi tata batas untuk pemberdayaan masyarakat	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tata batas pemberdayaan masyarakat	kali	7	800.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Bimtek Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Oleh KPH	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Oleh KPH	orang	138	756.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Bimtek Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Oleh KPH	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek Oleh KPH	orang	138	673.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Revisi Penyusunan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Oleh KPH	Jumlah Dokumen Revisi Penyusunan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Oleh KPH yang Disetujui	dokumen	22	748.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang Disusun dan Disetujui	dokumen	2	970.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Penyusunan Nercasa Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Nercasa Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi yang Disusun	dokumen	2	834.000.000,00	0	-	1	24.600.000,00	1	78.760.000,00	0,00	-	0,00	3.400.000,00	0,00	-	1,00	73.744.000,00	1,00	77.144.000,00	100,00	97,95	1,00	77.144.000,00	50,00	9,25	Dinas Kehutanan
	Penyusunan Register Kawasan Hutan	Jumlah Laporan Register Kawasan Hutan yang Disusun	laporan	2	855.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Pengukuran dan Pembuatan Jalan Inspeksi Batas Petak	Jumlah Petak yang Diukur dan Dibuat Jalan Inspeksi Batas Petak	petak	120	680.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Pengendalian Evaluasi Penyusunan RKT dan RKT Izin Pemanfaatan Hutan	Jumlah Pengendalian Evaluasi Penyusunan RKT dan RKT Izin Pemanfaatan Hutan	kali	20	1.032.500.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Penyusunan RKT dan RPJWP	Jumlah Dokumen RKT dan RPJWP yang Disusun	dokumen	48	690.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Pengembangan dan Pengelolaan SIG dalam Pengelolaan KPH	Jumlah Paket SIG dalam Pengelolaan KPH yang Dikembangkan dan Disetujui	kegiatan	5	1.042.000.000,00	1	100.736.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	100.736.000,00	20,00	9,67			Dinas Kehutanan
	Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Jumlah Luasan Tanah Obyek Reforma Agraria yang Disetujui	hektar	30000	1.486.000.000,00	6000	120.144.600,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6000,00	120.144.600,00	20,00	8,09			Dinas Kehutanan
	Program Pengendalian Perubahan Iklim	Jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan	titik panas	15	5.609.000.000,00	18	315.906.000,00	25	303.454.000,00	25	337.119.000,00	0,00	-	1,00	8.052.000,00	15,00	177.272.000,00	8,00	137.070.700,00	24,00	322.394.700,00	96,00	95,63	42,00	638.300.700,00	280,00	11,38	Dinas Kehutanan
	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah unit dukungan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	unit	15	4.500.000.000,00	18	260.691.500,00	1	125.854.000,00	1	120.559.000,00	0,00	-	0,00	8.052.000,00	0,00	11.822.000,00	1,00	96.970.700,00	1,00	116.844.700,00	100,00	96,92	19,00	377.536.200,00	126,67	8,39	Dinas Kehutanan
	Pengembangan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah unit sarana prasarana kebakaran KPH	unit	4	325.000.000,00	0	-	1	177.600.000,00	1	216.560.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	165.450.000,00	0,00	40.100.000,00	1,00	205.550.000,00	100,00	94,92	1,00	205.550.000,00	25,00	63,25	Dinas Kehutanan
	Pembentukan dan Pembinaan /Penyegaran Brigade Dakartu	Jumlah Brigade Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan terlatih dan tersertifikasi	kelompok	18	460.000.000,00	4	55.214.500,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00	55.214.500,00	22,22	12,00			Dinas Kehutanan
	Pembentukan dan Pembinaan /Penyegaran Masyarakat Peduli Api	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibentuk dan Dibina/Pergerakan	kelompok	18	324.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Jumlah pengelolaan wisata alam dan jasa lingkungan	unit	12	13.020.000,00	2	13.020.000,00	9	13.020.000,00	9	50.720.000,00	0,00	-	0,00	-	3,00	13.020.000,00	3,00	37.150.000,00	6,00	50.170.000,00	66,67	98,92	8,00	63.190.000,00	66,67	485,33	Dinas Kehutanan
	Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan	unit	12	384.000.000,00	0	-	6	13.020.000,00	6	50.720.000,00	0,00	-	0,00	-	3,00	13.020.000,00	3,00	37.150.000,00	6,00	50.170.000,00	100,00	98,92	6,00	50.170.000,00	50,00	13,07	Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17														
	Pembinaan dan Pengendalian TAHURA	Lumlah Lokasi TAHURA yang Dibina dan Dikembangkan	lokasi	13	320.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Pembinaan dan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi (Appendix)	Jumlah Luasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi yang Dibina dan Dikembangkan	hektar	671	415.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Peningkatan Kapasitas SDM pada Daerah Penyangga Kawasan	Jumlah Desa Daerah Penyangga Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitas SDM-nya	desa	20	643.000.000,00	6	248.682.800,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6,00	248.682.800,00	30,00	38,68	Dinas Kehutanan		
	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	Jumlah kawasan ekosistem esensial yang dibentuk dan ditetapkan penataan penanahannya	lokasi	7	398.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Program Pengenakan Hukum Kehutanan	Persentase Tindakan pidana kehutanan yang ditegasi	%	24	5.286.000.000,00	23	3.893.806.400,00	24	72.040.000,00	24	158.140.000,00	0,00	-	6,02	39.638.000,00	1,71	11.250.000,00	16,15	106.408.000,00	23,87	157.296.000,00	99,47	99,47	46,87	4.051.102.400,00	195,30	76,64	Dinas Kehutanan		
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	KPH	60	1.000.000.000,00	24	3.893.806.400,00	12	72.040.000,00	5	158.140.000,00	0,00	-	1,00	39.638.000,00	1,00	11.250.000,00	3,00	106.408.000,00	5,00	157.296.000,00	100,00	99,47	29,00	4.051.102.400,00	48,33	405,11	Dinas Kehutanan		
	Penegakan Hukum Bidang Kehutanan	Jumlah Kasus Penegakan Hukum Bidang Kehutanan	kasus	14	540.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Pembentukan Forum/Kelembagaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Forum/Kelembagaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang Dibentuk	kelompok	43	549.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Pemberian Advokasi, Konsultasi dan Bantuan Hukum Perkara Bidang Kehutanan	Jumlah Kasus Perkara Bidang Kehutanan yang Diberi Advokasi, Konsultasi dan Bantuan Hukum	kasus	26	550.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan yang Dilakukan	kali	97	581.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang Dikembangkan	paket	65	650.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Operasi Gabungan	Jumlah Operasi Gabungan yang Dilakukan	kali	66	590.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Identifikasi Kawasan Rawan Gangguan, Lahan Kritis dan Potensi Jasa Lingkungan	Jumlah Luasan Kawasan Rawan Gangguan, Lahan Kritis dan Potensi Jasa Lingkungan yang Dikembangkan	hektar	400	376.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Perlindungan dan pengamanan hutan	Jumlah pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan dan lahan, kawasan hutan dan hasil hutan melalui DBH Kabupaten-DB	kali	12	450.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Program Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah luasan hutan dan lahan yang direhabilitasi	hektar	7641	16.357.950.000,00	4606	5.368.513.400,00	5306	41.300.000,00	5306	91.300.000,00	0,00	-	0,00	-	55,00	41.236.000,00	80,00	49.504.000,00	135,00	90.740.000,00	2,54	99,39	4741,00	5.459.253.400,00	62,05	33,37	Dinas Kehutanan		
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen dan Peraturan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	dokumen	6	1.897.950.000,00	3	222.513.100,00	1	12.140.000,00	1	12.140.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	12.140.000,00	0,00	-	1,00	12.140.000,00	100,00	100,00	4,00	234.653.100,00	66,67	12,36	Dinas Kehutanan		
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Luasan Hutan dan Lahan yang Direhabilitasi	hektar	302	2.405.000.000,00	149	2.122.734.300,00	55	29.160.000,00	55	79.160.000,00	0,00	-	0,00	-	55,00	29.096.000,00	0,00	49.504.000,00	55,00	78.600.000,00	100,00	99,29	204,00	2.201.334.300,00	67,55	91,53	Dinas Kehutanan		
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan KTA	Jumlah Unit dan Luasan Rehabilitasi Hutan dan KTA	unit	32	1.692.000.000,00	1	119.151.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	119.151.000,00	3,13	7,04	Dinas Kehutanan		
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Perbenihan Tumbuhan Hutan	Jumlah Unit Sumber Benih yang Dikembangkan dalam Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Perbenihan Tumbuhan	unit	25	1.701.000.000,00	9	1.083.091.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	9,00	1.083.091.000,00	36,00	63,67	Dinas Kehutanan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re		K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/3*100	15 = 13+6	16 = 15/3*100	17														
	Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove	Jumlah Luasan Hutan Mangrove yang Diselenggarakan dan Dilaksanakan	hektar	57	1.250.000.000,00	25	477.953.500,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	25,00	477.953.500,00	43,86	38,24	Dinas Kehutanan		
	Pengkayaan Tanaman Pola Agroforestry	Jumlah Luasan Pengkayaan Tanaman Pola Agroforestry	hektar	444	1.520.000.000,00	114	951.520.500,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	114,00	951.520.500,00	25,68	62,60	Dinas Kehutanan		
	Pembuatan Bangunan Konservasi	Berkurangnya Laju Erosi dan sedimentasi / Terbanggunya DAM Pengendali, DAM Penahan, Gully Plug dan Sesar Pelawan	unit	8	542.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi	Jumlah luasan dan unit rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan melalui DBH	hektar	300	2.400.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Pengembangan Perbenihan	Jumlah Unit pengembangan perbenihan yang dilaksanakan melalui DBH	unit	9	900.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Penyelenggaraan Pengembangan/Persuteraan Alam	Jumlah Kelompok Persuteraan Alam yang Diselenggarakan dan Dilaksanakan	kelompok	13	2.050.000.000,00	2	391.550.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	391.550.000,00	15,38	19,10	Dinas Kehutanan		
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penerbitan SDM yang diinginkan kegiatan	%	90	2.738.623.000,00	60	176.602.100,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	60,00	176.602.100,00	66,67	6,45	Dinas Kehutanan		
	Pembentukan/Pembinaan/Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Mitra KPH	Jumlah Kelompok Tani Hutan Mitra KPH yang Dibentuk/dibina/dikembangkan	kelompok	40	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Pembinaan, Pengembangan dan Move Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Kelompok yang Dibina, Dikembangkan dan Move Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	kelompok	8	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Dokumen Program Penyuluhan yang Disusun	dokumen	5	548.623.000,00	2	176.602.100,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	176.602.100,00	40,00	32,19	Dinas Kehutanan		
	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Kehutanan	Jumlah SDM Penyuluhan Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitas	orang	176	200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Pembuatan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan yang Dibuat	unit	48	390.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Penyuluhan kelompok tani kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang ditingkatkan kelembagaan, kelas kawasan dan usaha melalui DBH Kehutanan-DBH	kelompok	9	1.200.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan		
	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Luas hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HR, HTR, HA dan kemitraan (Jah)	hektar	39000	12.683.020.000,00	31000	1.118.005.850,00	7000	12.572.000,00	7000	85.588.000,00	0,00	-	990,28	12.108.000,00	5974,06	73.044.000,00	6964,34	85.152.000,00	99,49	99,49	37964,34	1.203.157.850,00	97,34	9,49	Dinas Kehutanan				
	Pengembangan Ekowisata	Jumlah Unit Ekowisata yang Dikembangkan	unit	24	1.572.000.000,00	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Kehutanan	
	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Jumlah Luasan Kawasan Perhutanan Sosial yang Dibuat	usulan	56	2.001.020.000,00	2	16.680.000,00	3	12.572.000,00	3	85.588.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	12.108.000,00	2,00	73.044.000,00	3,00	85.152.000,00	100,00	99,49	5,00	101.832.000,00	8,93	5,09	Dinas Kehutanan		
	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	Jumlah Unit dan Luasan Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	unit	16	3.260.000.000,00	2	350.025.750,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	350.025.750,00	12,50	10,74	Dinas Kehutanan		
	Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen dan Luasan Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	9	2.650.000.000,00	1	257.710.600,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	257.710.600,00	11,11	9,72	Dinas Kehutanan		
	Pelatihan/Bimtek Pengembangan H&BK	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Bimtek Pengembangan H&BK	kegiatan	48	2.000.000.000,00	3	110.951.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3,00	110.951.000,00	6,25	5,55	Dinas Kehutanan		
	Pengembangan MPST	Jumlah Luasan MPST yang Dikembangkan	hektar	123	1.200.000.000,00	118	382.638.500,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	118,00	382.638.500,00	95,93	31,89	Dinas Kehutanan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah					
				K		Re		K		Re		K		Re		K		Re		K		Re							
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17													
	Program Pengelolaan Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	%	43	2.411.000.000,00	43	431.248.600,00	43,11	101.631.000,00	43	161.751.100,00	0,00	-	0,00	-	43,11	38.234.000,00	0,00	121.659.300,00	43,11	159.893.300,00	100,00	98,85	86,22	591.141.900,00	200,00	24,52	Dinas Kehutanan	
	Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Hutan	Jumlah Perizinan Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Hutan	izin	30	698.750.000,00	9	219.788.700,00	1	84.931.000,00	4	119.931.100,00	0,00	-	0,00	-	1,00	21.534.000,00	3,00	98.163.300,00	4,00	119.697.300,00	100,00	99,81	13,00	339.486.000,00	43,33	48,58	Dinas Kehutanan	
	Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Hasil Hutan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penedaran Hasil Hutan	kali	18	343.250.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kehutanan
	Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan	Jumlah Penatausahaan Hasil Hutan	kali	40	698.750.000,00	13	180.987.900,00	4	16.700.000,00	4	41.820.000,00	0,00	-	0,00	-	2,00	16.700.000,00	2,00	23.496.000,00	4,00	40.196.000,00	100,00	96,12	17,00	221.183.900,00	42,50	31,65	Dinas Kehutanan	
	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Hutan Hak/Hutan Rakyat	Jumlah Unit Hutan Hak/Hutan Rakyat yang Dibina, Diendalikan dan Diawasi	unit	18	348.250.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	Dinas Kehutanan
	Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu/HBK	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Bukan Kayu/HBK	kegiatan	4	322.000.000,00	1	30.472.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	30.472.000,00	25,00	9,46	Dinas Kehutanan	
	Program Pengelolaan Hutan	KPH yang beroperasi	KPH	12	17.665.000.000,00	11	22.833.294.425,86	9	3.980.625.700,00	12	4.471.433.800,00	0,00	-	3,00	1.001.568.000,00	2,00	743.294.500,00	7,00	2.652.914.200,00	12,00	4.397.776.700,00	100,00	98,35	23,00	27.231.071.125,86	191,67	154,15	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Sarudu	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	unit	22	1.460.000.000,00	10	1.465.365.500,00	1	222.995.100,00	1	222.995.100,00	0,00	-	0,00	92.231.100,00	1,00	55.049.500,00	0,00	67.450.300,00	1,00	214.730.900,00	100,00	96,29	11,00	1.680.096.400,00	50,00	115,08	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Lariang	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	41	1.475.000.000,00	5	2.938.723.100,00	1	178.595.100,00	1	220.353.100,00	0,00	-	0,00	62.750.000,00	1,00	42.226.000,00	0,00	102.148.500,00	1,00	207.124.500,00	100,00	94,00	6,00	3.145.847.600,00	14,63	213,28	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Pasang Kayu	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	76	1.460.000.000,00	70	719.586.000,00	1	132.995.100,00	1	132.995.100,00	0,00	-	0,00	58.057.300,00	1,00	26.400.000,00	0,00	47.957.200,00	1,00	132.414.500,00	100,00	99,56	71,00	852.000.500,00	93,42	58,36	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Karossa	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	375	1.475.000.000,00	224	2.084.587.500,00	5	223.687.500,00	5	223.687.800,00	0,00	-	0,00	71.246.000,00	0,00	41.801.500,00	5,00	108.992.100,00	5,00	222.039.600,00	100,00	99,26	229,00	2.306.627.100,00	61,07	156,38	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Budung-Budung	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	375	1.460.000.000,00	224	1.337.661.136,00	5	815.450.100,00	5	815.450.100,00	0,00	-	0,00	120.182.000,00	0,00	76.500.600,00	5,00	607.763.100,00	5,00	804.445.700,00	100,00	96,65	229,00	2.142.106.836,00	61,07	146,72	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Bonehau Kalumpang	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	71	1.475.000.000,00	39	2.822.130.450,00	1	308.665.100,00	1	785.593.300,00	0,00	-	0,00	90.068.100,00	0,00	77.002.000,00	1,00	617.505.000,00	1,00	784.575.100,00	100,00	99,87	40,00	3.606.705.550,00	56,34	244,52	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Karama	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	289	1.460.000.000,00	148	1.915.582.400,00	10	782.896.500,00	10	732.584.500,00	0,00	-	0,00	142.934.000,00	2,00	150.695.200,00	8,00	431.143.200,00	10,00	724.772.400,00	100,00	96,93	158,00	2.640.354.800,00	54,67	180,85	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Malunda	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	515	1.465.000.000,00	348	1.880.054.839,86	40	248.611.100,00	40	248.611.300,00	0,00	-	0,00	62.750.000,00	0,00	43.791.000,00	40,00	141.819.300,00	40,00	248.360.300,00	100,00	99,90	388,00	2.128.415.139,86	75,34	145,28	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Mapii	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	405	1.490.000.000,00	149	2.210.448.500,00	6200	529.292.400,00	16	551.732.400,00	0,00	-	0,00	128.099.500,00	0,00	108.680.000,00	15,50	296.721.900,00	15,50	533.501.400,00	100,00	96,70	164,50	2.743.949.900,00	40,62	184,16	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Timur	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	102	1.485.000.000,00	43	718.166.250,00	1	181.836.500,00	1	181.829.900,00	0,00	-	0,00	62.750.000,00	0,00	39.579.000,00	1,00	76.171.300,00	1,00	178.500.300,00	100,00	98,17	44,00	896.666.550,00	43,14	60,38	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Tengah	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	75	1.485.000.000,00	76	1.712.960.000,00	5	205.450.100,00	5	205.450.100,00	0,00	-	0,00	59.000.000,00	0,00	51.799.900,00	5,00	88.119.300,00	5,00	198.919.200,00	100,00	96,82	81,00	1.911.879.200,00	108,00	128,75	Dinas Kehutanan	
	Pengelolaan Hutan pada KPH Mamasa Barat	Operasionalisasi KPH berjalan dengan baik dan lusan lahan kritis berkurang	hektar unit	60	1.475.000.000,00	408	3.028.028.750,00	1	150.151.100,00	1	150.151.100,00	0,00	-	0,00	51.500.000,00	0,00	29.769.800,00	1,00	67.123.000,00	1,00	148.392.800,00	100,00	98,83	409,00	3.176.421.550,00	681,67	215,35	Dinas Kehutanan	
DINAS TRANSIGRASI																													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen		7.636.000.000,00		3.101.253.640,00												0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	3.101.253.640,00	#DIV/0!	40,61	Dinas Transigrasi		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa surat menyurat yang dibayarkan honorariumnya	Orang	80	1.875.000.000,00	48	692.507.000,00	16	277.000.000,00	16	243.000.000,00	0,00	-	16,00	75.900.000,00	0,00	56.850.000,00	0,00	95.250.000,00	16,00	228.000.000,00	100,00	93,83	64,00	920.507.000,00	80,00	49,09	Dinas Transigrasi	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan listrik dan telepon yang dibayar	Rekening	120	720.000.000,00	72	390.009.927,00	24	76.811.479,50	24	86.119.350,54	6,00	21.893.367,00	6,00	17.421.809,00	6,00	14.045.245,00	6,00	22.820.441,00	24,00	76.180.862,00	100,00	88,46	96,00	466.190.789,00	80,00	64,75	Dinas Transigrasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9a/10a/11a/12	14 = 13a/100	15 = 13a/6	16 = 15/5/100	17												
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	Orang	10	220.000.000,00	4	60.352.000,00	2	47.000.000,00	2	45.487.600,00	0,00	-	2,00	18.387.600,00	0,00	14.300.000,00	0,00	12.800.000,00	2,00	45.487.600,00	100,00	100,00	6,00	105.839.600,00	60,00	48,11	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kerja yang terpelihara	Unit	236	325.000.000,00	112	77.415.200,00	56	73.000.000,00	55	35.652.000,00	5,00	2.950.000,00	12,00	8.300.000,00	12,00	9.300.000,00	26,00	15.102.000,00	55,00	35.652.000,00	100,00	100,00	167,00	113.067.200,00	70,76	34,79	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	35	422.000.000,00	35	184.261.200,00	85	85.000.000,00	35	51.897.428,96	18,00	23.078.600,00	0,00	-	5,00	10.000.000,00	12,00	18.817.000,00	35,00	51.895.600,00	100,00	100,00	70,00	236.156.800,00	200,00	55,96	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	Jenis	5	343.000.000,00	5	169.630.549,00	5	70.000.000,00	2	27.500.000,00	0,00	-	2,00	11.750.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	7.550.000,00	2,00	27.500.000,00	100,00	100,00	7,00	197.130.549,00	140,00	57,47	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Unit	500	67.000.000,00	354	21.437.600,00	25	13.000.000,00	25	9.376.000,00	25,00	9.376.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	25,00	9.376.000,00	100,00	100,00	379,00	30.813.600,00	75,80	45,99	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah jenis bahan baku dan peraturan perundang- undangan	Jenis	120	106.000.000,00	84	32.503.400,00	25	25.000.000,00	5	7.470.000,00	0,00	-	4,00	3.510.000,00	1,00	600.000,00	0,00	3.360.000,00	5,00	7.470.000,00	100,00	100,00	89,00	39.973.400,00	74,17	37,71	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta rapat dan tamu kantor yang disediakan hidangan maksudnya	Orang	8820	360.000.000,00	3520	171.485.000,00	1875	70.000.000,00	960	60.800.000,00	145,00	4.960.000,00	500,00	17.600.000,00	145,00	14.400.000,00	170,00	23.840.000,00	960,00	60.800.000,00	100,00	100,00	4480,00	232.285.000,00	50,79	64,52	Dinas Transmigrasi
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang diikuti	Kali	203	1.750.000.000,00	86	766.806.135,00	40	300.000.000,00	19	174.042.379,00	5,00	55.117.956,00	1,00	6.657.516,00	0,00	-	13,00	112.211.228,00	19,00	173.986.700,00	100,00	99,97	105,00	940.792.835,00	51,72	53,76	Dinas Transmigrasi
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	Kali	220	1.250.000.000,00	119	455.767.229,00	45	210.000.000,00	30	110.070.000,00	4,00	7.018.000,00	11,00	21.975.000,00	7,00	34.893.000,00	8,00	46.116.000,00	30,00	110.002.000,00	100,00	99,94	149,00	565.769.229,00	67,73	45,26	Dinas Transmigrasi
	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Jumlah kegiatan penyediaan jasa publikasi media cetak	Kali	50	198.000.000,00	22	79.078.400,00	10	45.000.000,00	10	48.132.000,00	3,00	12.132.000,00	2,00	8.000.000,00	1,00	2.000.000,00	4,00	26.000.000,00	10,00	48.132.000,00	100,00	100,00	32,00	127.210.400,00	64,00	64,25	Dinas Transmigrasi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	3.400.000.000,00		1.645.993.511,00													0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	1.645.993.511,00	0,00	48,41	Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	Unit	115	900.000.000,00	74	523.485.000,00	25	80.000.000,00	1	20.000.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	100,00	100,00	75,00	543.485.000,00	65,22	60,39	Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Mebelur	Jumlah meubelir kantor yang disediakan	Unit	147	875.000.000,00	61	294.086.100,00	30	80.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	61,00	294.086.100,00	41,50	33,61	Dinas Transmigrasi
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin	Gedung	1	750.000.000,00	1	465.060.100,00	1	90.000.000,00	1	5.310.000,00	1,00	5.310.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	5.310.000,00	100,00	100,00	2,00	470.370.100,00	200,00	62,72	Dinas Transmigrasi
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasion al yang disediakan jasa pemeliharaan secara rutin	Unit	10	875.000.000,00	7	363.362.311,00	8	164.400.000,00	8	153.760.000,00	3,00	41.984.168,00	2,00	21.214.100,00	2,00	35.949.049,00	1,00	51.149.980,00	8,00	150.297.297,00	100,00	97,75	15,00	513.659.608,00	150,00	58,70	Dinas Transmigrasi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	Persen	100	730.000.000,00		164.562.000,00													0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	164.562.000,00	0,00	22,54	Dinas Transmigrasi
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang menerima pengadaan pakaian dinas harian	Orang	425	853.606.805,00	240	164.562.000,00	85	84.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	240,00	164.562.000,00	56,47	19,28	Dinas Transmigrasi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai kebidanan	Persen	24	312.717.176,00	-			70.000.000,00		38.628.000,00									0,00	-	#DIV/0!	-	0,00	-	0,00	-	Dinas Transmigrasi
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal	Orang	17	312.717.176,00	0	-	5	70.000.000,00	4	38.628.000,00	3,00	35.349,99	0,00	35.349.994,00	0,00	-	1,00	2.500.000,00	4,00	37.885.343,99	100,00	98,08	4,00	37.885.343,99	23,53	12,11	Dinas Transmigrasi
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	4.336.000.000,00		1.078.285.500,00		436.500.000,00		396.519.200,00		230.887.800,00							0,00	230.887.800,00	#DIV/0!	58,23	0,00	1.309.173.300,00	0,00	30,19	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi	Dokumen	5	200.000.000,00	2	66.656.000,00	1	7.500.000,00	1	7.985.200,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	66.656.000,00	40,00	33,33	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Dokumen	10	400.000.000,00	4	90.470.000,00	2	34.750.000,00	2	34.118.400,00	0,00	-	1,00	16.800.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	16.800.000,00	50,00	49,24	5,00	107.270.000,00	50,00	26,82	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	5	200.000.000,00	2	54.901.500,00	1	34.750.000,00	1	34.436.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	54.901.500,00	40,00	27,45	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPD	Jumlah dokumen perencanaan renstra, renja, lakip, dan lpd	Dokumen	20	600.000.000,00	12	118.150.000,00	3	39.000.000,00	4	39.659.200,00	2,00	19.722.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-	0,00	-	2,00	21.122.000,00	50,00	53,26	14,00	139.272.000,00	70,00	23,21	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan RKA/DPA- SKPD	Jumlah dokumen RKA	Dokumen	10	350.000.000,00	4	52.993.000,00	2	20.000.000,00	2	17.490.800,00	2,00	13.290.800,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-	0,00	-	2,00	14.690.800,00	100,00	83,99	6,00	67.683.800,00	60,00	19,34	Dinas Transmigrasi
	Penyusunan RKA-PDPPA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- PDPPA	Dokumen	10	350.000.000,00	4	58.245.000,00	2	19.000.000,00	2	16.390.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	58.245.000,00	40,00	16,64	Dinas Transmigrasi
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi SKPD	Dokumen	15	550.000.000,00	8	155.962.000,00	6	97.000.000,00	6	68.970.000,00	4,00	25.237.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	25.237.000,00	66,67	36,59	12,00	181.199.000,00	80,00	32,95	Dinas Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah			
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re		K	Re	K	Re		K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re				K				Re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/3*100	15 = 13+6	16 = 15/3*100	17															
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban	Dokumen	5	350.000.000,00	2	19.749.000,00	1	4.500.000,00	1	4.298.400,00	0,00	-	1,00	4.298.400,00	0,00	-	0,00	-	1,00	4.298.400,00	100,00	100,00	3,00	24.047.400,00	60,00	6,87	Dinas Transmigrasi			
	Rapat Koordinasi Ketransmigrasian	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi ketransmigrasian	Orang	250	700.000.000,00	140	347.109.000,00	50	105.000.000,00	40	107.360.000,00	40,00	107.360.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	107.360.000,00	100,00	100,00	180,00	454.469.000,00	72,00	64,92	Dinas Transmigrasi			
	Forum Komunikasi Internal Bidang Ketransmigrasian	Jumlah peserta yang mengikuti forum komunikasi internal bidang ketransmigrasian	Orang	200	636.000.000,00	70	114.050.000,00	40	75.000.000,00	30	65.810.000,00	30,00	65.278.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	30,00	65.278.000,00	100,00	99,19	100,00	179.328.000,00	50,00	28,20	Dinas Transmigrasi			
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah permukiman yang dibangun pada kawasan transmigrasi dan Jumlah transmigran yang diidentifikasi penempatannya pada permukiman transmigrasi	SP/Satuan Permukiman KK	1 575	1.453.000.000,00		305.440.648,00		292.079.013,00		-									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	305.440.648,00	#VALUE!	21,02	Dinas Transmigrasi			
	Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah transmigran yang diidentifikasi penempatan pada permukiman transmigrasi	KK	575	715.000.000,00	140	113.500.000,00	225	184.079.013,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	140,00	113.500.000,00	24,35	15,87	Dinas Transmigrasi			
	Kesepakatan Kerja Antar Daerah (KSAD) Transmigrasi	Jumlah naskah MOU/Perjanjian Kerjasama dengan daerah asal transmigran	Dokumen	17	738.000.000,00	6	191.940.648,00	2	108.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	6,00	191.940.648,00	35,29	26,01	Dinas Transmigrasi			
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi desa madani	SP/Satuan Permukiman	7	365.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Dinas Transmigrasi			
	Penyusunan Profil UPT Bina	Jumlah dokumen profil UPT Bina yang	Dokumen	7	365.000.000,00	2	80.417.000,00	2	100.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	80.417.000,00	28,57	22,03	Dinas Transmigrasi			
	Monitoring dan Evaluasi UPT Bina	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi perkembangan UPT Bina	Dokumen	4	370.000.000,00	2	48.557.000,00	2	80.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	48.557.000,00	50,00	13,12	Dinas Transmigrasi			
	Program Fasilitas Pertanian Transmigrasi	Jumlah lokasi calon areal permukiman transmigrasi dengan kriteria clean and clear yang teridentifikasi dan Persentase transmigran yang mendapatkan pelatihan kompetensi dasar dan penguasaan	Lokasi Persen	8 50	5.409.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#VALUE!	-	Dinas Transmigrasi			
	Identifikasi Calon Areal Transmigrasi	Jumlah lokasi calon areal permukiman transmigrasi dengan luas kurang lebih 1000 Ha yang teridentifikasi	Lokasi	22	1.450.000.000,00	4	220.679.000,00	5	300.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00	220.679.000,00	18,18	15,22	Dinas Transmigrasi			
	Monitoring/Evaluasi Transmigrasi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi UPT	Dokumen	10	865.000.000,00	6	398.337.974,00	2	95.000.000,00	2	62.110.000,00	1,00	29.920.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	31.984.000,00	2,00	61.904.000,00	100,00	99,67	8,00	460.241.974,00	80,00	53,21	Dinas Transmigrasi			
	Pendidikan dan Pelatihan Warga Transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditingkatkan kompetensi dasar dan penunjang usahanya	Orang	355	1.230.000.000,00	100	330.816.000,00	75	225.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	330.816.000,00	28,17	26,90	Dinas Transmigrasi			
	Utulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi	Luas areal penggunaan SK HPL Transmigrasi	Ha	2100	1.020.000.000,00	1100	296.749.000,00	500	200.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1100,00	296.749.000,00	52,38	29,09	Dinas Transmigrasi			
	Sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketransmigrasian	Orang	210	844.000.000,00	65	132.194.000,00	30	85.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	65,00	132.194.000,00	30,95	15,66	Dinas Transmigrasi			
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah perencanaan transmigrasi yang terrealisasi menjadi kegiatan teknis	Dokumen	36	2.835.000.000,00	9	497.633.000,00													0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	9,00	497.633.000,00	25,00	17,55	Dinas Transmigrasi			
	Penyusunan Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pengembangan (RKS KP)	Jumlah dokumen rencana kerangka satuan kawasan pengembangan (RKS KP) transmigrasi	Dokumen	5	1.410.000.000,00	1	103.340.000,00	2	270.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	103.340.000,00	20,00	7,33	Dinas Transmigrasi			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	Penyusunan DED Sarana dan Prasarana Transmigrasi	Jumlah dokumen DED sarana dan prasarana transmigrasi	Dokumen	19	1.425.000.000,00	7	345.393.000,00	7	315.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	7,00	345.393.000,00	36,84	24,24	Dinas Transmigrasi	
	Monitoring Kondisi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPT Bina	Jumlah dokumen hasil monitoring kondisi dan pemenuhan sarana dan prasarana UPT Bina	Dokumen	4	-	1	48.900.000,00	7	80.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	48.900.000,00	25,00	#DIV/0!	Dinas Transmigrasi	
BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			450909	9.139.023.906,00	32767	3.169.755.712,00	1290	2.807.870.000,00	41573	1.217.093.645,00	14008,00	154.339.347,00	27,00	188.795.700,00	11137,00	181.594.140,00	15199,00	679.082.057,00	40371,00	1.203.811.244,00	97,11	0,99	41661,00	4.011.681.244,00	9,24	43,90	Biro Tata Pemerintahan Setda	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	Jenis	165	451.765.165,00	40	179.353.300,00	28	200.870.000,00	40	89.999.020,00	15,00	13.956.700,00		9.153.500,00	23,00	21.919.540,00	2,00	41.668.380,00	40,00	86.698.120,00	100,00	0,96	68,00	287.568.120,00	41,21	63,65	Biro Tata Pemerintahan Setda	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Lembar	443054	265.628.054,00	29755	51.657.600,00	100	90.700.000,00	39827	45.839.900,00	13695,00	12.668.500,00		3.905.200,00	10635,00	5.880.600,00	14373,00	22.054.900,00	38703,00	44.509.200,00	97,18	0,97	38803,00	135.209.200,00	8,76	50,90	Biro Tata Pemerintahan Setda	
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Dos Makanan yang dibeli	Dos	7170	404.031.170,00	2870	254.225.000,00	1000	300.000.000,00	1636	147.750.000,00	282,00	12.695.000,00		9.665.000,00	462,00	11.170.000,00	814,00	107.244.000,00	1558,00	140.774.000,00	95,23	0,95	2558,00	440.774.000,00	35,68	109,09	Biro Tata Pemerintahan Setda	
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti	Kali	218	2.399.734.218,00	38	1.258.157.663,00	75	650.000.000,00	13	235.196.000,00	3,00	31.586.547,00	1,00	11.092.100,00	0,00	-	9,00	192.344.285,00	13,00	235.022.932,00	100,00	1,00	88,00	885.022.932,00	40,37	36,88	Biro Tata Pemerintahan Setda	
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti	Kali	279	2.297.997.279,00	59	1.265.199.149,00	75	540.000.000,00	54	504.444.625,00	13,00	66.962.600,00	24,00	122.079.900,00	17,00	79.324.000,00	0,00	235.916.352,00	54,00	504.302.892,00	100,00	1,00	129,00	1.044.302.892,00	46,24	45,44	Biro Tata Pemerintahan Setda	
6	Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan dan ketatausahaan	Dokumen	13	215.510.012,00	5	161.163.000,00	5	650.000.000,00	3	193.864.100,00	0,00	16.450.000,00	2,00	32.900.000,00	0,00	63.300.000,00	1,00	79.854.100,00	3,00	192.504.100,00	100,00	0,99	8,00	842.504.100,00	61,54	390,94	Biro Tata Pemerintahan Setda	
7	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi pegawai	Dokumen	5	1.552.179.004,00	0	-	5	300.300.000,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,00	300.300.000,00	100,00	19,35	Biro Tata Pemerintahan Setda
8	Penyediaan Penataan Administrasi Pada Biro Tata Pemerintahan	Jumlah penyediaan penataan administrasi biro tata pemerintahan	Dokumen	5	1.552.179.004,00	0	-	2	76.000.000,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	76.000.000,00	40,00	4,90	Biro Tata Pemerintahan Setda
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			93	1.921.200.113,00	53	1.856.584.333,00	37	1.208.000.000,00	14	120.621.600,00	2,00	19.843.674,00	2,00	7.650.000,00	2,00	14.122.652,00	0,00	50.522.924,00	6,00	92.139.250,00	42,86	0,76	43,00	1.300.139.250,00	46,24	67,67	Biro Tata Pemerintahan Setda	
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kerja gedung	Unit	78	663.370.069,00	41	1.519.601.896,00	10	870.000.000,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10,00	870.000.000,00	12,82	131,15	Biro Tata Pemerintahan Setda
9	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional	Unit	5	446.910.004,00	2	202.122.437,00	3	105.000.000,00	10	87.931.600,00	1,00	13.953.674,00		6.650.000,00	1,00	12.122.652,00		29.732.924,00	2,00	62.099.250,00	20,00	0,71	5,00	167.099.250,00	100,00	37,39	Biro Tata Pemerintahan Setda	
10	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah service peralatan gedung kantor	Jenis	5	405.460.020,00	5	67.430.000,00	14	105.000.000,00	4	32.690.000,00	1,00	6.250.000,00	2,00	1.000.000,00	1,00	2.000.000,00		20.790.000,00	4,00	30.040.000,00	100,00	0,92	18,00	135.040.000,00	360,00	33,31	Biro Tata Pemerintahan Setda	
11	Pengadaan dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Kinerja Pada Biro Tata Pemerintahan	Jumlah pengadaan dan perbaikan fasilitas biro tata pemerintahan	Jenis	5	405.460.020,00	5	67.430.000,00	10	128.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	10,00	128.000.000,00	200,00	31,57	Biro Tata Pemerintahan Setda	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			566	1.253.586.458,00	108	201.651.200,00	108	517.100.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	108,00	517.100.000,00	19,08	41,25	Biro Tata Pemerintahan Setda	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang diadakan	Pasang	283	620.336.229,00	54	50.842.000,00	54	259.000.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	54,00	259.000.000,00	19,08	41,75	Biro Tata Pemerintahan Setda
12	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pasang	283	633.250.229,00	54	150.809.200,00	54	258.100.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	54,00	258.100.000,00	19,08	40,76	Biro Tata Pemerintahan Setda	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			575	5.053.456.532,00	7	273.811.818,00	18	1.869.698.439,00	6	31.623.600,00	2,00	22.047.600,00	3,00	9.576.000,00	0,00	-	1,00	-	6,00	-	31.623.600,00	100,00	1,00	24,00	1.901.322.039,00	4,17	37,62	Biro Tata Pemerintahan Setda
13	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan Batas Wilayah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Aparatur	15	733.500.012,00	-	-	1	400.000.439,00									-	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	400.000.439,00	6,67	54,53	Biro Tata Pemerintahan Setda	
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	Aparatur	50	1.658.810.040,00	7	273.811.818,00	10	340.000.000,00	6	31.623.600,00	2,00	22.047.600,00	3,00	9.576.000,00	0,00	-	1,00	-	6,00	-	31.623.600,00	100,00	1,00	16,00	371.623.600,00	32,00	22,40	Biro Tata Pemerintahan Setda
15	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Jumlah Aparatur lurah yang mengikuti peningkatan kapasitas	Aparatur	170	850.222.160,00	-	-	1	532.000.000,00									-	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	532.000.000,00	0,59	62,57	Biro Tata Pemerintahan Setda	
16	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti peningkatan kapasitas	Aparatur	170	905.462.160,00	-	-	1	452.098.000,00									-	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	452.098.000,00	0,59	49,93	Biro Tata Pemerintahan Setda	
17	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Lingkup Biro Tata Pemerintahan	Jumlah aparatur biro tapem yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Aparatur	170	905.462.160,00	-	-	5	145.600.000,00									-	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,00	145.600.000,00	2,94	16,08	Biro Tata Pemerintahan Setda	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100	1.229.724.080,00	12	499.456.700,00	44	399.430.000,00	7	51.130.500,00	2,00	6.610.800,00	0,00	4.600.000,00	2,00	9.200.000,00	3,00	28.316.400,00	7,00	48.727.200,00	100,00	0,95	51,00	448.157.200,00	51,00	36,44	Biro Tata Pemerintahan Setda	
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	Laporan	50	528.244.040,00	4	454.608.700,00	10	135.630.000,00	3	39.169.000,00		2.300.000,00		4.600.000,00	2,00	9.200.000,00	1,00	20.665.700,00	3,00	36.765.700,00	100,00	0,94	13,00	172.395.700,00	26,00	32,64	Biro Tata Pemerintahan Setda	
18	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dok RKA/DPA-SKPD	Dokumen	10	45.300.008,00	4	20.996.500,00	2	10.500.000,00	2	4.310.800,00	2,00	4.310.800,00					0,00	-	2,00	-	4.310.800,00	100,00	1,00	4,00	14.810.800,00	40,00	32,69	Biro Tata Pemerintahan Setda
19	Penyusunan RKA-PIDPPA-SKPD	Jumlah dok RKA-PIDPPA-SKPD	Dokumen	10	45.300.008,00	4	23.851.500,00	2	10.500.000,00	2	7.650.700,00	0,00	-					2,00	7.650.700,00	2,00	7.650.700,00	100,00	1,00	4,00	18.150.700,00	40,00	40,07	Biro Tata Pemerintahan Setda	
20	Pembuatan Laporan Penatausahaan Kepegawaian dan aset	Jumlah laporan penatausahaan	Laporan	15	305.440.012,00	-	-	25	143.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	25,00	143.000.000,00	166,67	46,82	Biro Tata Pemerintahan Setda	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8*100	15 = 13+6	16 = 15/5*100	17													
20	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Pembantu Bendahara, Bendahara Barang dan Aset Serta Laporan Kinerja Biro Tata Pemerintahan	Jumlah laporan pertanggungjawaban dan bendahara, bendahara barang dan aset serta laporan kinerja biro tata pemerintahan	Laporan	15	305.440.012,00	-	5	99.800.000,00	0	-									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,00	99.800.000,00	33,33	32,67	Biro Tata Pemerintahan Setda		
6	Program Penataan, pengusahan, pemilikan, penggunaan dan pencadangan tanah	Jumlah laporan penataan aset penggunaan tanah		1341	68.242.419.109,00	145	80.308.077.559,00	187	45.000.000.000,00	16	15.488.390.840,00	1,50	4.960.495.440,00	0,00	1.974.141.400,00	0,00	14.261.320,00	0,00	8.388.559.905,00	1,50	15.337.458.065,00	9,38	0,99	188,50	60.337.458.065,00	14,06	88,42	Biro Tata Pemerintahan Setda	
21	Penataan Aset Pengadaan Tanah Berbasis Website	Jumlah website penataan aset pengadaan tanah	Website	5	357.472.004,00	1	272.400.681,00	0	-	0	-								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
22	Bimbingan Teknis Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan bimbingan penanganan dan sengketa pertanahan	Orang	275	379.190.220,00	-	1	145.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	145.000.000,00	0,36	38,24	Biro Tata Pemerintahan Setda		
23	Pengadaan Patok Batas Tanah	Jumlah Patok Batas Tanah yang disediakan	Patok	183	308.670.153,00	-	17	157.000.000,00	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	17,00	157.000.000,00	9,29	50,86	Biro Tata Pemerintahan Setda		
24	Pemeliharaan Patok Batas Tanah	Jumlah Patok Batas tanah yang dipelihara	Patok	183	204.320.153,00	-	1	50.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	50.000.000,00	0,55	24,47	Biro Tata Pemerintahan Setda	
25	Inventarisasi Data Permasalahan Pertanahan	Jumlah laporan inventarisasi permasalahan pertanahan	Laporan	5	396.220.004,00	-	1	155.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	155.000.000,00	20,00	39,12	Biro Tata Pemerintahan Setda		
26	Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Pertanahan	Jumlah dokumen kebijakan	Dokumen	5	304.730.004,00	2	160.208.108,00	1	135.000.000,00	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	135.000.000,00	20,00	44,30	Biro Tata Pemerintahan Setda		
27	Penyusunan Grand Desain Penataan Kawasan Pemerintahan dan Perekonomian	Jumlah dokumen penyusunan grand desain penataan kawasan pemerintahan dan	Dokumen	5	278.200.004,00	1	248.605.911,00	1	350.000.000,00	0	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	350.000.000,00	20,00	125,81	Biro Tata Pemerintahan Setda		
28	Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah laporan pemeliharaan database sistem informasi pertanahan	Laporan	5	1.006.110.004,00	1	93.225.500,00	1	150.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	150.000.000,00	20,00	14,91	Biro Tata Pemerintahan Setda	
29	Persertifikatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan	Titik	125	869.590.110,00	30	640.335.800,00	70	350.000.000,00	1	133.661.700,00	-	7.116.000,00	-	3.120.000,00	-	4.461.320,00	-	9.488.905,00	0,00	24.186.225,00	0,00	0,18	70,00	374.186.225,00	56,00	43,03	Biro Tata Pemerintahan Setda	
30	Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan	Dokumen	15	983.110.012,00	8	694.040.696,00	5	350.000.000,00	0	23.547.000,00	-	14.351.000,00	-	8.928.000,00	-	-	0,00	-	0,00	23.279.000,00	#DIV/0!	0,99	5,00	373.279.000,00	33,33	37,97	Biro Tata Pemerintahan Setda	
31	Penataan dan Pengamanan Aset Pengadaan Tanah	Jumlah laporan pengadaan tanah yang tertata dan diamankan	Laporan	5	1.002.640.004,00	0	180.000,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda	
32	Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	Jumlah konflik dan sengketa tanah yang diproses	Kasus	20	1.312.680.018,00	18	751.429.729,00	2	450.000.000,00	0	24.160.140,00	-	16.284.140,00	-	7.680.000,00	-	-	0,00	-	0,00	23.964.140,00	#DIV/0!	0,99	2,00	473.964.140,00	10,00	36,11	Biro Tata Pemerintahan Setda	
33	Penanganan Permasalahan Pertanahan	Jumlah kasus permasalahan pertanahan yang ditangani	Kasus	5	364.880.004,00	0	-	5	150.000.000,00	0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,00	150.000.000,00	100,00	41,11	Biro Tata Pemerintahan Setda		
34	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah luas tanah yang dibebaskan	Ha	105	56.682.420.095,00	73	76.298.824.802,00	75	42.000.000.000,00	15	15.232.830.000,00	1,50	4.882.640.000,00	-	1.927.193.000,00	4,00	5.000.000,00	9,00	8.379.071.000,00	14,50	15.193.904.000,00	96,67	1,00	89,50	57.193.904.000,00	85,24	100,90	Biro Tata Pemerintahan Setda	
35	Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	Jumlah rapat koordinasi bidang pertanahan yang dilaksanakan	Rapat	5	701.210.004,00	4	411.037.801,00	1	134.000.000,00	0	24.675.000,00	-	19.024.300,00	-	5.520.000,00	-	-	0,00	-	0,00	24.544.300,00	#DIV/0!	0,99	1,00	158.544.300,00	20,00	22,61	Biro Tata Pemerintahan Setda	
36	Penyuluhan Bidang Pertanahan	Jumlah laporan kegiatan penyuluhan bidang pertanahan	Laporan	5	1.135.800.004,00	0	-	1	150.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	150.000.000,00	20,00	13,21	Biro Tata Pemerintahan Setda		
37	Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah dokumen persiapan pengadaan	Dokumen	15	1.058.980.012,00	6	476.840.231,00	5	124.000.000,00	0	49.517.000,00	0,00	21.080.000,00	-	21.700.400,00	-	4.800.000,00	0,00	-	0,00	47.580.400,00	#DIV/0!	0,96	5,00	171.580.400,00	33,33	16,20	Biro Tata Pemerintahan Setda	
38	Sosialisasi Aturan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi aturan pengadaan tanah	Orang	375	896.196.300,00	1	260.948.300,00	0	150.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	150.000.000,00	0,00	16,74	Biro Tata Pemerintahan Setda		
7	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah		465	8.742.452.582,00	260	1.958.517.107,00	6	704.000.000,00	81	180.889.720,00	80,00	93.939.500,00	0,00	82.616.000,00	0,00	-	0,00	-	3.400.000,00	80,00	179.955.500,00	98,77	0,99	86,00	883.955.500,00	18,49	10,11	Biro Tata Pemerintahan Setda
39	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Orang	242	3.389.919.320,00	181	1.186.367.938,00	1	235.000.000,00	80	180.889.720,00	80,00	93.939.500,00	0,00	82.616.000,00	-	-	-	3.400.000,00	80,00	179.955.500,00	100,00	0,99	81,00	414.955.500,00	33,47	12,24	Biro Tata Pemerintahan Setda	
40	Peran serta Masyarakat dan Swasta dalam Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah laporan partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan	Laporan	5	1.109.679.004,00	0	-	1	84.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	84.000.000,00	20,00	7,57	Biro Tata Pemerintahan Setda		
41	Rencana Aksi Percepatan Penerapan SPM	Jumlah dokumen rencana	Dokumen	5	567.460.004,00	0	-	0	-	1	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	Biro Tata Pemerintahan Setda	
42	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen LPPD Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Aplikasi SIM LPPD yang diupdate	Unit	5	964.504.004,00	2	90.847.000,00	1	75.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	75.000.000,00	20,00	7,78	Biro Tata Pemerintahan Setda	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13*6	16 = 15*100	17													
43	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten se Prov. Subar	Jumlah Laporan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan	5	882.440.004,00	3	142.228.601,00	1	75.000.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	75.000.000,00	20,00	8,50	Biro Tata Pemerintahan Setda		
44	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penyelenggara PATEN	Jumlah Aparatur yang mengikuti penyelenggaraan PATEN	Aparatur	200	749.460.240,00	72	267.226.568,00	1	165.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	165.000.000,00	0,50	22,02	Biro Tata Pemerintahan Setda		
45	Sistem Informasi Manajemen LPPD Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Aplikasi SIM LPPD yang diadopsi	Unit	1	724.190.004,00	1	187.009.000,00	1	70.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	70.000.000,00	100,00	9,67	Biro Tata Pemerintahan Setda		
46	Penyusunan Memory Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Memory jabatan Gubernur dan wakil gubernur yang disusun	Dokumen	2	354.800.002,00	1	84.838.000,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
8	Program Fasilitas Pemilihan, Pengawasan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			21	4.589.567.017,00	7	1.279.591.142,00	2	268.500.000,00	4	280.281.360,00	0,00	16.424.900,00	0,00	37.194.000,00	0,00	72.367.000,00	4,00	153.775.100,00	4,00	279.761.000,00	100,00	1,00	6,00	548.261.000,00	28,57	11,95	Biro Tata Pemerintahan Setda	
47	Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pikada Serentak	Jumlah Rapat koordinasi dan pemantauan Pelaksanaan Pikada serentak	Rapat	10	1.905.800.008,00	4	602.693.785,00	1	133.500.000,00	4	263.856.460,00	-	-	-	37.194.000,00	-	72.367.000,00	4,00	153.775.100,00	4,00	263.336.100,00	100,00	1,00	5,00	396.836.100,00	50,00	20,82	Biro Tata Pemerintahan Setda	
48	Administrasi Pengawasan Pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada hasil pikada	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diangkat	Pasang	10	2.320.767.008,00	3	586.897.357,00	1	135.000.000,00	0	16.424.900,00	0,00	16.424.900,00	-	-	-	0,00	-	0,00	16.424.900,00	#DIV/0!	1,00	1,00	151.424.900,00	10,00	6,52	Biro Tata Pemerintahan Setda		
49	Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pemilihan Umum	Jumlah Rakor dan pemantauan Pemilihan Umum	Rapat	1	363.000.001,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
9	Program persiapan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat			100	1.890.269.080,00	50	497.203.237,00	8	247.900.000,00	0	14.475.000,00	0,00	-	0,00	14.474.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	14.474.900,00	#DIV/0!	1,00	8,00	262.374.900,00	8,00	13,88	Biro Tata Pemerintahan Setda	
50	Pengelolaan Administrasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Anggota DPRD	Jumlah pengelolaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan anggota DPRD	Dokumen	50	1.167.769.040,00	28	42.188.300,00	5	114.900.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	5,00	114.900.000,00	10,00	9,84	Biro Tata Pemerintahan Setda		
51	Pengelolaan Administrasi PAW DPRD Provinsi dan Kabupaten	Jumlah Anggota DPRD yang di PAW	Orang	50	722.500.040,00	22	455.014.937,00	3	133.000.000,00	0	14.475.000,00	0,00	-	0,00	14.474.900,00	-	-	0,00	-	0,00	14.474.900,00	#DIV/0!	1,00	3,00	147.474.900,00	6,00	20,41	Biro Tata Pemerintahan Setda	
10	Program Pembinaan Wilayah			15	4.464.965.012,00	0	-	0	-	0	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.237.000,00	#DIV/0!	1,00	0,00	2.237.000,00	0,00	0,05	Biro Tata Pemerintahan Setda	
52	Updating Kode Wilayah Administrasi	Jumlah laporan kode wilayah yang terupdate	Laporan	5	903.519.004,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
53	Rapat Koordinasi Bidang Bina Administrasi Kewilayahan	Jumlah rapat koordinasi bidang administrasi kewilayahan	Rapat	5	1.745.204.004,00	0	-	0	-	0	2.237.000,00	0,00	2.237.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.237.000,00	#DIV/0!	1,00	0,00	2.237.000,00	0,00	0,13	Biro Tata Pemerintahan Setda
54	Inventarisasi Kode Wilayah Kecamatan dan Desa se Prov. Subar	Jumlah Laporan kode wilayah kecamatan dan desa yang terinventarisasi	Laporan	5	1.816.242.004,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda
11	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			289	4.644.710.322,00	99	4.687.480.433,00	55	800.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	55,00	800.000.000,00	19,03	17,22	Biro Tata Pemerintahan Setda	
55	Perapatan Pilar Batas Utama (PBU) Prov. Sulawesi Barat dengan Prov. Sulawesi Tengah	Jumlah pilar batas utama yang terpasang	Pilar	50	1.261.390.040,00	29	2.188.384.954,00	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
56	Pembangunan Gerbang Batas Wilayah Kab. Poleman Prov. Subar dan Kab. Pangkajene-ene, Subul	Jumlah Gerbang yang dibangun	Unit	2	491.500.002,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
57	Pemasangan Pilar Batas Utama di Segmen Batas antar Provinsi Sulawesi Barat dan Prov. Sultel	Jumlah pilar batas utama di segmen antar Provinsi Sulawesi Barat dan Prov. Sultel yang terpasang	Pilar	90	858.700.100,00	35	1.197.053.570,00	30	450.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	30,00	450.000.000,00	33,33	52,40	Biro Tata Pemerintahan Setda		
58	Penyediaan, Pengembalian dan Pemeliharaan Pilar Batas Utama (PBU) di Prov. Subar	Jumlah pilar yang diperbaiki	Pilar	90	767.610.100,00	35	1.302.041.908,00	25	350.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	25,00	350.000.000,00	27,78	45,60	Biro Tata Pemerintahan Setda		
59	Penyediaan, Pengembalian dan Pemeliharaan Pilar Batas Utama (PBU) Prov. Subar dengan Prov. Sultel	Jumlah pilar yang diperbaiki	Pilar	35	914.360.040,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
60	Pemasangan Tugu Batas Pulau di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Tugu batas pulau yang terpasang	Tugu	22	351.150.040,00	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
12	Program Layanan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah dan Topografi			30	5.207.132.024,00	30	2.599.551.377,00	2	400.000.000,00	0	27.938.400,00	0,00	27.938.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	27.938.400,00	#DIV/0!	1,00	2,00	427.938.400,00	6,67	8,22	Biro Tata Pemerintahan Setda	
61	Rapat Koordinasi Penataan Batas Wilayah	Jumlah rapat koordinasi penataan batas wilayah	Rapat	5	1.321.080.004,00	5	551.442.927,00	0	-	0	16.559.400,00	0,00	16.559.400,00	-	-	-	0,00	-	0,00	16.559.400,00	#DIV/0!	1,00	0,00	16.559.400,00	0,00	1,25	Biro Tata Pemerintahan Setda		
62	Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas antar Provinsi	Jumlah rapat batas wilayah segmen batas antar provinsi yang dilaksanakan	Rapat	5	1.261.900.004,00	12	1.344.305.662,00	1	250.000.000,00	0	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	250.000.000,00	20,00	19,81	Biro Tata Pemerintahan Setda		
63	Penegasan Batas Wilayah Segmen Batas Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah rapat penegasan batas wilayah segmen batas dalam wilayah prov. Subar	Rapat	5	741.317.004,00	13	703.802.788,00	1	150.000.000,00	0	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	150.000.000,00	20,00	20,23	Biro Tata Pemerintahan Setda		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
64	Penegasan Batas Daerah	Jumlah rapat pengesahan batas secara pasti di Prov. Sulbar	Rapat	5	639.960.004,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-			0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
65	Inventarisasi Pulau-pulau Baru di Prov. Sulbar	Jumlah dokumen pulau- pulau yang	Dokumen	5	615.590.004,00	0		0		0	-	0,00	-					0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda		
66	Inventarisasi Rupabumi Unsur Butan di Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen rupabumi unsur butan yang inventarisasi	Dokumen	5	627.285.004,00	0		0		0	11.379.000,00	0,00	11.379.000,00					0,00	11.379.000,00	#DIV/0!	1,00	0,00	11.379.000,00	0,00	1,81	Biro Tata Pemerintahan Setda		
13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			100	1.172.125.852,00	0	-	1	185.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	185.000.000,00	1,00	15,78	Biro Tata Pemerintahan Setda		
67	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Teknis dan Pedoman Tata cara Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Pengganti Antar waktu	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Orang	100	1.172.125.852,00	0	-	1	185.000.000,00			0,00	-					0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	185.000.000,00	1,00	15,78	Biro Tata Pemerintahan Setda		
14	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			5	1.145.320.004,00	0	-	1	101.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	101.000.000,00	20,00	8,82	Biro Tata Pemerintahan Setda		
68	Pelayanan Administrasi Kedinasan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kedinasan pejabat negara	Dokumen	5	1.145.320.004,00	0	-	1	101.000.000,00			0,00	-					0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	101.000.000,00	20,00	8,82	Biro Tata Pemerintahan Setda		
15	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			20	4.673.015.016,00	20	1.681.325.424,00	2	505.500.000,00	1	98.352.435,00	0,00	71.017.235,00	0,00	22.859.200,00	1,00	4.470.000,00	0,00	-	1,00	98.346.435,00	100,00	1,00	3,00	603.846.435,00	15,00	12,92	Biro Tata Pemerintahan Setda
69	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan kerjasama	Dokumen	5	1.574.008.004,00	10	1.176.629.624,00	1	304.500.000,00	1	89.166.435,00	0,00	61.831.235,00		22.859.200,00	1,00	4.470.000,00		-	1,00	89.160.435,00	100,00	1,00	2,00	393.660.435,00	40,00	25,01	Biro Tata Pemerintahan Setda
70	Inventarisasi Kerjasama antar Daerah dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen kerjasama antar daerah dalam wilayah prov sulawesi barat	Dokumen	5	821.957.004,00	10	504.695.800,00	1	201.000.000,00	0	9.186.000,00	0,00	9.186.000,00					-		0,00	9.186.000,00	#DIV/0!	1,00	1,00	210.186.000,00	20,00	25,57	Biro Tata Pemerintahan Setda
71	Inventarisasi Kerjasama Daerah antar Provinsi	Jumlah dokumen kerjasama daerah antar provinsi yang	Dokumen	5	1.044.980.004,00		-		-	0	-	0,00	-					0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda
72	Pengembangan Kerjasama antara Daerah	Jumlah dokumen pengembangan kerjasama antar daerah	Dokumen	5	1.232.070.004,00		-		-	0	-	0,00	-					0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda
16	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			22	5.982.590.024,00	5	443.504.471,00	6	477.500.000,00	0	33.265.900,00	0,00	20.013.100,00	0,00	13.252.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	33.265.900,00	#DIV/0!	1,00	6,00	510.765.900,00	27,27	8,54	Biro Tata Pemerintahan Setda
73	Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraa n otonomi daerah yang dimonitoring	Laporan	5	998.430.004,00		-	1	103.000.000,00	0	-							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	103.000.000,00	20,00	10,32	Biro Tata Pemerintahan Setda		
74	Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Jumlah rapat penataan dan pembentukan daerah otonomi baru	Rapat	5	1.556.370.004,00	5	443.504.471,00	1	105.100.000,00	0	33.265.900,00	0,00	20.013.100,00		13.252.800,00		-	0,00	-	0,00	33.265.900,00	#DIV/0!	1,00	1,00	138.365.900,00	20,00	8,89	Biro Tata Pemerintahan Setda
75	Evaluasi Daerah Otonomi Baru	Jumlah laporan daerah otonomi baru yang di evaluasi	Laporan	5	1.184.746.004,00		-	1	73.400.000,00	0	-							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	73.400.000,00	20,00	6,20	Biro Tata Pemerintahan Setda		
76	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi Baru	Jumlah dokumen penyelenggaraa n otonomi daerah dan daerah otonomi baru yang dimonitoring dan dievaluasi	Laporan	5	1.059.759.004,00		-	1	95.000.000,00	0	-							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	95.000.000,00	20,00	8,96	Biro Tata Pemerintahan Setda		
77	Sinkronisasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Jumlah dokumen Sinkronisasi pembentukan	Dokumen	2	1.183.285.008,00		-	2	101.000.000,00	0	-							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	101.000.000,00	100,00	8,54	Biro Tata Pemerintahan Setda		
17	Program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah			279	6.415.984.065,00	10	944.920.341,00	14	746.264.431,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	14,00	746.264.431,00	5,02	11,63	Biro Tata Pemerintahan Setda		
78	Rapat koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran Berjalan	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Rapat	5	1.109.660.004,00	0	-	0	-									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda
79	Seminar Otonomi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti seminar otonomi daerah	Orang	250	909.038.004,00	0	-	0	110.100.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	110.100.000,00	0,00	12,11	Biro Tata Pemerintahan Setda		
80	Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengukuran kinerja penyelenggaraa n pemerintah daerah	Laporan	5	1.122.725.004,00	2	527.643.856,00	1	71.000.000,00	0	-			0,00	-			-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	71.000.000,00	20,00	6,32	Biro Tata Pemerintahan Setda		
81	Rapat Koordinasi Gubernur Sebagai Kepala Daerah	Jumlah Rapat koordinasi gubernur yang dilaksanakan	Rapat	12	1.570.272.048,00	6	223.620.329,00	12	289.164.431,00	0	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	12,00	289.164.431,00	100,00	18,41	Biro Tata Pemerintahan Setda		
82	Penyusunan Panduan Mekanisme Tugas Pembantuan Provinsi Ke Kabupaten	Jumlah dokumen Penyusunan panduan mekanisme tugas pembantuan provinsi ke kabupaten	Dokumen	2	243.450.001,00	1	26.632.300,00	0	-	0	-							-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Tata Pemerintahan Setda
83	Monitoring dan Evaluasi Tugas Pembantuan Tahun Anggaran Berjalan	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Tugas pembantuan yang dilaksanakan	Laporan	5	1.460.839.004,00	1	167.023.856,00	1	276.000.000,00	0	-							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	276.000.000,00	20,00	18,89	Biro Tata Pemerintahan Setda		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah								
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II				III				IV					K	Re	K	Re	K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH																																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	Cakupan layanan administrasi perkantoran		51	1.900.000,00	54	963.767.810,00	51	1.400.000.000,00	51	924.079.880,00	6,00	75.431.964,00	4,00	193.384.250,00	3,00	63.380.000,00	138,00	569.175.869,00	151,00	901.372.083,00	296,08	97,54	205,00	1.865.139.893,00	401,96	98.165,26	Biro Hukum Setda								
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan	20	600.000,00	26	406.546.540,00	20	400.000.000,00	20	240.780.000,00	4,00	47.215.564,00	2,00	18.594.800,00	0,00	-	32,00	174.320.059,00	38,00	240.130.423,00	190,00	99,73	64,00	646.676.963,00	320,00	107.779,49	Biro Hukum Setda								
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Laporan	30	600.000,00	27	191.292.820,00	30	400.000.000,00	30	241.358.640,00	2,00	10.955.000,00	2,00	3.296.000,00	2,00	7.090.000,00	106,00	219.141.810,00	112,00	240.482.810,00	373,33	99,64	139,00	431.775.630,00	463,33	71.962,61	Biro Hukum Setda								
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Personel	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen	1	700.000,00	1	365.928.450,00	1	600.000.000,00	1	441.941.240,00	0,00	17.261.400,00	0,00	171.493.450,00	1,00	56.290.000,00	0,00	175.714.000,00	1,00	420.758.850,00	100,00	95,21	2,00	786.687.300,00	200,00	112.383,90	Biro Hukum Setda								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur		3	300.000,00	3	54.003.965,00	3	130.000.000,00	3	78.135.000,00	0,00	3.681.414,00	0,00	15.910.785,00	1,00	10.517.800,00	22,00	40.296.821,00	23,00	70.406.820,00	766,67	90,11	26,00	124.410.785,00	866,67	41.470,26	Biro Hukum Setda								
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	Unit	3	300.000,00	3	54.003.965,00	3	130.000.000,00	3	78.135.000,00	0,00	3.681.414,00	0,00	15.910.785,00	1,00	10.517.800,00	22,00	40.296.821,00	23,00	70.406.820,00	766,67	90,11	26,00	124.410.785,00	866,67	41.470,26	Biro Hukum Setda								
	Pembuatan Laporan Penatausahaan Kepegawaian, Keuangan dan Aset	Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan		15	400.000,00	14	155.187.400,00	15	250.000.000,00		41.810.600,00	4,00	21.266.000,00	4,00	1.629.200,00	4,00	-	3,00	11.260.700,00	15,00	34.155.900,00	#DIV/0!	81,69	29,00	189.343.300,00	193,33	47.335,83	Biro Hukum Setda								
	Pembuatan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Aset	Dokumen laporan Penatausahaan yang dihasilkan	Dokumen	15	400.000,00	14	155.187.400,00	15	250.000.000,00	15	41.810.600,00	4,00	21.266.000,00	4,00	1.629.200,00	4,00	-	3,00	11.260.700,00	15,00	34.155.900,00	100,00	81,69	29,00	189.343.300,00	193,33	47.335,83	Biro Hukum Setda								
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah penanganan perkara litigasi, non litigasi dan HAM		13	1.925.000,00	8	656.330.432,00	15	1.725.000.000,00	7	409.723.300,00	1,00	25.931.400,00	0,00	156.841.400,00	3,00	115.261.700,00	4,00	105.155.000,00	8,00	403.189.500,00	114,29	98,41	16,00	1.059.519.932,00	123,08	55.040,00	Biro Hukum Setda								
	Koordinasi rencana aksi nasional Hak asasi manusia	Jumlah kabupaten yang ikut serta dalam rencana aksi HAM	Laporan	4	375.000,00	6	305.309.584,00	6	325.000.000,00	4	64.968.800,00	0,00	11.466.800,00	0,00	20.891.000,00	3,00	19.668.000,00	1,00	11.962.000,00	4,00	63.987.800,00	100,00	98,49	10,00	369.297.384,00	250,00	98.479,30	Biro Hukum Setda								
	Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi	Jumlah kasus yang disidangkan	Kasus	7	750.000,00	1	175.510.424,00	7	650.000.000,00	1	285.181.500,00	1,00	5.645.600,00	0,00	118.819.150,00	0,00	77.277.000,00	1,00	80.288.000,00	2,00	282.029.750,00	200,00	98,89	3,00	457.540.174,00	42,86	61.005,36	Biro Hukum Setda								
	Penanganan Perkara pada Kasus Non Litigasi	Jumlah kasus yang disidangkan	Kasus	2	800.000,00	1	175.510.424,00	2	750.000.000,00	2	59.573.000,00	0,00	8.819.000,00	0,00	17.131.250,00	0,00	18.316.700,00	2,00	12.905.000,00	2,00	57.171.950,00	100,00	95,97	3,00	232.682.374,00	150,00	29.085,30	Biro Hukum Setda								
	Program Penetapan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		632	1.364.750,00	912	973.636.754,00	611	1.285.000.000,00	611	257.835.940,00	283,00	56.870.100,00	139,00	83.240.320,00	203,00	67.619.200,00	219,00	44.380.600,00	844,00	252.110.220,00	138,13	97,78	1756,00	1.225.746.974,00	277,85	89.814,76	Biro Hukum Setda								
	Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat	Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat yang dievaluasi dan diklarifikasi	Ranperda dan Ranperbup	60	214.750,00	194	248.618.987,00	40	204.750.000,00	40	75.404.900,00	64,00	22.376.600,00	49,00	25.229.050,00	45,00	17.038.000,00	78,00	7.500.000,00	236,00	72.143.650,00	590,00	95,68	430,00	320.762.637,00	716,67	149.365,61	Biro Hukum Setda								
	Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ranperda	7	342.650,00	16	249.486.832,00	6	332.650.000,00	6	23.452.060,00	2,00	12.060.500,00	0,00	1.239.500,00	0,00	4.509.300,00	7,00	5.615.000,00	9,00	23.424.300,00	150,00	99,88	25,00	272.911.132,00	357,14	79.647,20	Biro Hukum Setda								
	Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya yang sesuai	Kep. Gubernur dan Prod. Hukum Lainnya	520	700.000,00	651	331.136.135,00	520	650.250.000,00	520	83.818.560,00	206,00	15.346.000,00	84,00	28.368.470,00	153,00	24.423.700,00	100,00	14.209.600,00	543,00	82.347.770,00	104,42	98,25	1194,00	413.483.905,00	229,62	59.069,13	Biro Hukum Setda								
	Harmonisasi dan pembahasan peraturan Gubernur	Jumlah rancangan peraturan gubernur yang dibahas dan harmonisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ranpergub	45	107.350,00	51	144.394.800,00	45	97.350.000,00	45	75.160.420,00	11,00	7.087.000,00	6,00	28.403.300,00	5,00	21.648.200,00	34,00	17.056.000,00	56,00	74.194.500,00	124,44	98,71	107,00	218.589.300,00	237,78	203.623,01	Biro Hukum Setda								
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah jejaring pemberi layanan dan akses terhadap produk hukum daerah		12	660.000,00	7	334.923.748,00	7	580.000.000,00	1000	122.817.920,00	438,00	13.238.000,00	180,00	42.728.500,00	316,00	29.660.000,00	282,00	34.460.500,00	1216,00	120.087.000,00	121,60	97,78	1223,00	455.010.748,00	10191,67	68.941,02	Biro Hukum Setda								
	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov. Sulawesi Barat	Akses Publik atas Informasi Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah	6	300.000,00	1	160.866.148,00	1	260.000.000,00	500	57.034.820,00	219,00	5.581.000,00	90,00	19.743.750,00	158,00	16.400.000,00	141,00	14.221.000,00	608,00	55.945.750,00	121,60	98,09	609,00	216.811.898,00	10150,00	72.270,63	Biro Hukum Setda								
	Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat	Produk Hukum Daerah	6	360.000,00	6	174.057.600,00	6	320.000.000,00	500	65.783.100,00	219,00	7.657.000,00	90,00	22.984.750,00	158,00	13.260.000,00	141,00	20.239.500,00	608,00	64.141.250,00	121,60	97,50	614,00	238.198.850,00	10233,33	66.166,35	Biro Hukum Setda								
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH																																				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	5.691.067.000,00		878.570.428,00		778.500.000,00	100	456.036.101,00	30,00	109.326.618,00	10,00	49.869.600,00	20,00	107.827.223,00	40,00	183.511.180,00	100,00	450.534.621,00	100,00	98,79	100,00	1.329.105.049,00	100,00	23,35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda								
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	125	197.310.000,00	15	5.754.250,00	25	8.500.000,00	28	9.000.000,00						20,00	8.071.400,00	20,00	8.071.400,00	71,43	89,68	35,00	13.825.650,00	28,00	7,01	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	13 = 9x10+11+12	K	Re	14 = 13x100	K	Re		15 = 13x6	K	Re	16 = 15x100
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	Jenis	150	378.099.600,00	50	60.265.000,00	50	70.000.000,00	50	38.371.800,00	15,00	11.373.500,00	13,00	6.514.000,00	13,00	10.545.000,00	9,00	9.914.500,00	50,00	38.347.000,00	100,00	99,94	100,00	98.612.000,00	66,67	26,08	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat rumah tangga yang terpenuhi	Jenis	60	91.613.800,00	12	18.970.000,00	12	20.000.000,00	12	17.390.000,00	2,00	1.957.000,00	0,00	-	-	10,00	14.991.000,00	12,00	16.948.000,00	100,00	97,46	24,00	35.918.000,00	40,00	39,21	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda					
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Laporan	160	2.395.280.000,00	30	382.488.678,00	29	350.000.000,00	29	175.909.600,00	13,00	54.486.268,00	0,00	-	10,00	59.711.623,00	6,00	58.548.680,00	29,00	172.746.571,00	100,00	98,20	59,00	555.235.249,00	36,88	23,18	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan Minuman Yang tersedia	pax	4324	367.596.800,00	581	140.360.000,00	588	50.000.000,00	581	58.958.000,00	177,00	15.653.000,00	88,00	4.890.000,00	174,00	15.388.000,00	142,00	22.950.000,00	581,00	58.881.000,00	100,00	99,87	1162,00	199.241.000,00	26,87	54,20	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Jumlah barang cetakan yang tersedia	eksamplar	215	214.872.800,00	43	15.785.000,00	43	30.000.000,00	43	15.156.275,00	9,00	3.311.100,00	7,00	3.135.600,00	10,00	3.537.600,00	17,00	5.125.600,00	43,00	15.109.900,00	100,00	99,69	86,00	30.894.900,00	40,00	14,38	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Laporan	190	1.324.968.000,00	25	166.533.500,00	25	150.000.000,00	24	96.250.426,00	4,00	12.102.000,00	7,00	24.080.000,00	2,00	7.395.000,00	11,00	52.660.000,00	24,00	96.237.000,00	100,00	99,99	49,00	262.770.500,00	25,79	19,83	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Peningkatan pengelolaan administrasi pegawai	Jumlah tenaga yang menangani pengelolaan administrasi	Orang	215	721.326.000,00	72	88.414.000,00	43	100.000.000,00	43	45.000.000,00	9,00	10.443.750,00	9,00	11.250.000,00	9,00	11.250.000,00	9,00	11.250.000,00	36,00	44.193.750,00	83,72	98,21	108,00	132.607.750,00	50,23	18,38	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	896.216.600,00		161.242.500,00		255.000.000,00	100	88.273.100,00	12,00	18.980.000,00	17,00	30.661.700,00	5,00	8.627.803,00	66,00	29.883.100,00	100,00	88.152.603,00	100,00	99,86	100,00	249.395.103,00	100,00	27,83	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua dalam kondisi layak pakai	unit	125	595.105.000,00	25	104.741.000,00	24	100.000.000,00	24	71.870.000,00	6,00	17.305.000,00	12,00	30.661.700,00	1,00	8.627.803,00	5,00	15.170.000,00	24,00	71.764.503,00	100,00	99,85	49,00	176.505.503,00	39,20	29,66	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Jenis	125	225.561.600,00	31	30.997.000,00	10	75.000.000,00	10	9.858.000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	10,00	9.858.000,00	10,00	9.858.000,00	100,00	100,00	41,00	40.855.000,00	32,80	18,11	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jenis	100	75.550.000,00	50	25.504.500,00	50	80.000.000,00	40	6.545.100,00	5,00	1.675.000,00	0,00	-	-	-	20,00	4.855.100,00	25,00	6.530.100,00	62,50	99,77	75,00	32.034.600,00	75,00	42,40	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Persen	100	293.510.400,00		44.050.000,00		100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0	0	43,00	44.050.000,00	43,00	15,01	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda					
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pegawai yang terpenuhi	Orang	225	293.510.400,00	43	44.050.000,00	45	100.000.000,00	42	0		0		0		0		0,00	0	0,00	0	43,00	44.050.000,00	19,11	15,01	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda					
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangannya	Persen	100	340.325.313,00		17.000.000,00		100.000.000,00	100	8.000.000,00	-	-	100,00	8.000.000,00	-	100,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	100,00	100,00	100,00	25.000.000,00	100,00	7,35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	27	340.325.313,00	4	17.000.000,00	8	100.000.000,00	2	8.000.000,00	-	-	2,00	8.000.000,00	-	2,00	8.000.000,00	2,00	8.000.000,00	100,00	100,00	6,00	25.000.000,00	22,22	7,35	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	1.021.409.000,00				220.000.000,00	100	127.245.500,00	20,00	33.317.800,00	25,00	27.991.000,00	30,00	29.906.300,00	25,00	33.516.500,00	100,00	124.731.600,00	100,00	98,02	100,00	124.731.600,00	100,00	12,21	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LUPD	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	20	532.478.000,00	4	88.849.402,00	4	120.000.000,00	4	46.172.900,00	1,00	16.245.050,00	1,00	8.541.000,00	1,00	8.939.300,00	1,00	10.114.300,00	4,00	43.839.650,00	100,00	94,95	8,00	132.689.052,00	40,00	24,92	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Penyusunan RKA/DPA OPD	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	10	40.500.000,00	2	9.847.300,00	2	20.000.000,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	2,00	9.847.300,00	20,00	24,31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan dan indikator realisasi yang tersedia	dokumen	72	448.431.000,00	24	115.936.500,00	24	80.000.000,00	24	81.072.600,00	1,00	17.072.750,00	5,00	19.450.000,00	13,00	20.967.000,00	5,00	23.402.200,00	24,00	80.891.950,00	100,00	99,78	48,00	196.828.450,00	66,67	43,89	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Program Penguatan Ekonomi Daerah	Persentase Bahan Kebijakan dan Pembinaan terkait Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Inflasi		100	8.308.307.319,00		1.341.547.034,00		1.972.449.341,00	100	323.639.304,00	45,00	82.471.754,00	20,00	109.310.000,00	0,00	26.250.000,00	35,00	95.334.647,00	100,00	313.366.401,00	100,00	96,83	100,00	1.654.913.435,00	100,00	19,92	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Rapat koordinasi TPID Se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen	dokumen	2	88.000.000,00			1	120.000.000,00															-		-		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				
	Penyediaan Administrasi Tim Pengendali Inflasi Prov. Subar	Jumlah dokumen yang terpenuhi	dokumen	20	1.832.599.000,00	4	393.940.830,00	4	400.000.000,00	4	69.670.400,00	0,00	9.487.600,00	2,00	21.400.000,00	0,00	15.000.000,00	2,00	17.146.800,00	4,00	63.034.400,00	100,00	90,48	8,00	456.975.230,00	40,00	24,94	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17												
	Koordinasi Kebijakan pengelolaan program BUMD	Jumlah Dokumen/peratu- ran tentang kebijakan pengelolaan program BUMD	dokumen	5	900.409.500,00	1	130.366.842,00	1	100.000.000,00	0														130.366.842,00		14,48	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (High Level Meeting)	Jumlah Laporan yang terpenuhi	Laporan	10	750.412.964,00	2	110.842.356,00	2	129.694.400,00	2	28.507.400,00	2,00	28.507.400,00	0,00	-	-	-	-	-	2,00	28.507.400,00	100,00	100,00	4,00	139.349.756,00	40,00	18,57	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Penyediaan Administrasi TPAKD Prov. Subar	Jumlah dokumen yang terpenuhi	dokumen	5	1.580.501.000,00	1	303.474.858,00	1	100.000.000,00	1	69.309.000,00	0,00	15.165.250,00	0,00	26.160.000,00	0,00	11.250.000,00	1,00	15.539.000,00	1,00	68.114.250,00	100,00	98,28	2,00	371.589.108,00	40,00	23,51	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD	Tingkat Pengawasan dan Pembinaan BUMD	Persen	100	745.800.000,00	80	229.670.148,00	80	180.000.000,00	80	73.163.504,00	78,00	23.163.504,00	0,00	-	0,00	-	2,00	47.830.847,00	80,00	70.994.351,00	100,00	97,04	160,00	300.664.499,00	160,00	40,31	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Penyusunan Standarisasi harga satuan Barang Prov. Subar	Jumlah buku standarisasi harga satuan barang prov.subar yang di susun	dokumen	5	763.653.055,00	1	173.252.000,00	1	126.974.941,00	1	82.989.000,00	0,00	6.148.000,00	1,00	61.750.000,00	0,00	-	0,00	14.818.000,00	1,00	82.716.000,00	100,00	99,67	2,00	255.968.000,00	40,00	33,52	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Prov. Subar	Jumlah Peserta Rapat	Orang	30	100.000.000,00			30	120.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Monitoring Harga Sembako Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Hasil Laporan Setiap Kabupaten	Laporan	18	397.200.000,00			6	120.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	40	270.000.000,00			20	175.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Monitoring dan Pengawasan Distribusi BBM dan LPG	Jumlah Laporan yang terpenuhi	Laporan	18	333.581.800,00			6	100.780.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Tingkat Inklus Keuangan Daerah Mengusat	Persen	100	546.150.000,00			60	300.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Peningkatan perangkit daerah yang telah menggunakan layanan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sesuai prosedur	Persen	100	6.758.355.000,00	100	1.017.601.172,00	100	2.168.500.000,00	100	1.849.915.525,00	10,00	191.250.250,00	0,00	96.610.220,00	15,00	164.119.500,00	75,00	402.550.528,00	100,00	854.530.498,00	100,00	46,19	200,00	1.872.131.670,00	200,00	27,70	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal/Penyusunan SOP Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen SPM/SOP	dokumen	5	438.575.000,00			1	192.500.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Koordinasi dalam Pendampingan dan Perindungan Hukum Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	dokumen	20	1.158.150.000,00	4	455.197.372,00	4	285.000.000,00	4	201.379.800,00	0,00	32.487.050,00	2,00	42.312.500,00	1,00	44.950.000,00	1,00	78.311.950,00	4,00	198.061.500,00	100,00	98,35	8,00	653.258.872,00	40,00	56,41	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Sewa Jasa Internet/Bandwidth Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah sarana dan Prasarana bandwidth untuk operasional kerja Layanan Pengadaan	unit	1	150.000.000,00			1	150.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Rapat Koordinasi Layanan Pengadaan Se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	250	604.000.000,00	50	145.291.100,00	50	165.000.000,00	0															145.291.100,00		24,05	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah sarana dan Prasarana operasional kerja Layanan Pengadaan	Unit	3	496.500.000,00			1	200.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan bagi penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	100	240.000.000,00			50	110.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Penataan Administrasi Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	dokumen	5	531.780.000,00	1	306.211.332,00	1	100.000.000,00	1	447.448.000,00	0,00	87.454.000,00	0,00	49.727.120,00	0,00	106.205.500,00	1,00	194.459.748,00	1,00	437.846.368,00	100,00	97,85	2,00	744.057.700,00	40,00	139,92	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Pelatihan dan Bimbingan Teknis sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	150	268.000.000,00			50	80.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan, POKJA, PPHP dalam Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	300	549.300.000,00	100	110.901.368,00	75	130.000.000,00	0															110.901.368,00		20,19	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Proyek Lingkup SKPD Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	300	225.050.000,00			100	68.000.000,00	0															-	-	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100		17							
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Laporan yang terpenuhi	Laporan	40	60.000.000,00			40	60.000.000,00	0																	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Unit	36	670.000.000,00			12	250.000.000,00	12	1.050.643.925,00	0,00	-	0,00	-	0,00	1.360.000,00	6,00	67.867.930,00	6,00	69.227.930,00	50,00	6,59	6,00	69.227.930,00	16,67	10,33	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Penyusunan Katalog Elektronik Lokal	Jumlah dokumen katalog Elektronik Lokal	dokumen	30	331.000.000,00			10	73.000.000,00	10	74.564.000,00	0,00	-	0,00	-	3,00	11.604.000,00	7,00	61.910.900,00	10,00	73.514.900,00	100,00	98,59	10,00	73.514.900,00	33,33	22,21	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Workshop Penyusunan dan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	240	605.000.000,00			80	75.000.000,00	80	75.879.800,00	80,00	71.309.200,00	0,00	4.570.600,00	0,00	-	0,00	-	80,00	75.879.800,00	100,00	100,00	80,00	75.879.800,00	33,33	12,54	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Penyusunan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Jumlah Laporan yang terpenuhi	Laporan	6	100.000.000,00			6	130.000.000,00	0																	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Pelaksanaan Inpassing Personil Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	45	331.000.000,00			15	100.000.000,00	0																	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	Persen	100	3.568.780.500,00	100	478.728.020,00	100	892.950.000,00	100	139.813.900,00	5,00	15.196.200,00	30,00	30.067.950,00	17,00	47.535.000,00	15,00	39.491.000,00	67,00	132.290.150,00	67,00	94,62	167,00	611.018.170,00	167,00	17,12	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Se Suber	Jumlah Laporan yang terpenuhi	Laporan	150	1.348.869.000,00	17	239.451.020,00	30	280.000.000,00	17	65.775.720,00	0,00	-	8,00	15.599.200,00	4,00	40.035.000,00	2,00	3.150.000,00	14,00	58.784.200,00	82,35	89,37	31,00	298.235.220,00	20,67	22,11	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Pengembangan Sistem eMonitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Laporan yang terpenuhi	Laporan	150	465.285.000,00	17	60.307.000,00	30	120.000.000,00	17	54.858.200,00	2,00	15.196.200,00	6,00	14.468.750,00	4,00	7.500.000,00	5,00	17.162.000,00	17,00	54.326.950,00	100,00	99,03	34,00	114.633.950,00	22,67	24,64	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Penyediaan dan Analisis Data Sarana Prasarana Pembangunan	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	dokumen	24	316.345.000,00			6	100.000.000,00	6																	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Bimtek Penginputan SISMON TEPRA Prov. Sulawesi Barat	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	150	127.435.000,00			50	38.500.000,00	0																	-	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
	Bimtek Penginputan SIMOLEK Prov. Sulawesi Barat	Jumlah Peserta yang terpenuhi	Orang	200	351.717.000,00	100	56.365.000,00	50	80.000.000,00	0																56.365.000,00		16,03	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan yang terpenuhi	Laporan	20	959.129.500,00	5	122.605.000,00	5	274.450.000,00	5	19.179.980,00	0,00	-	0,00	-		-	1,00	19.179.000,00	1,00	19.179.000,00	20,00	99,99	6,00	141.784.000,00	30,00	14,78	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	
BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SEKRETARIAT DAERAH																													
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	4.025.890.000,00	90	839.407.478,00	90	467.636.450,00	90	467.636.450,00	22,50	152.197.213,00	22,50	44.832.000,00	22,50	93.000.234,00	22,50	165.164.250,00	90,00	455.193.697,00	100,00	97,34	180,00	1.294.601.175,00	180,00	32,16	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti	Kali	150	1.956.800.000,00	12	365.607.636,00	50	155.828.000,00	16	155.828.000,00	8,00	98.705.713,00	1,00	4.832.000,00	2,00	21.529.254,00	5,00	30.615.950,00	16,00	155.682.917,00	100,00	99,91	28,00	521.290.553,00	18,67	26,64	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Peralatan & perlengkapan yang disediakan	Unit	20	166.080.000,00	4	64.149.500,00													0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4,00	64.149.500,00	20,00	38,63	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dos makanan yang diikut	Dos	25000	402.050.000,00	12	53.045.000,00	200	37.770.000,00	200	37.770.000,00	50,00	9.000.000,00	20,00	5.000.000,00	50,00	9.500.000,00	80,00	14.270.000,00	200,00	37.770.000,00	100,00	100,00	212,00	90.815.000,00	0,85	22,59	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Penyediaan Barang cetakan dan pengendalian	Jumlah nilai barang cetakan yang disediakan	Item	60	97.000.000,00	12	19.973.000,00	250	29.989.350,00	250	29.989.350,00	60,00	6.000.000,00		90,00	9.510.000,00	100,00	14.390.000,00	250,00	29.990.000,00	100,00	99,70	262,00	49.873.000,00	436,67	51,42	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti	Kali	150	1.070.120.000,00	12	218.226.442,00	30	103.480.200,00	30	103.480.200,00	10,00	28.374.000,00		5,00	8.883.980,00	15,00	65.426.200,00	30,00	102.684.180,00	100,00	99,23	42,00	320.910.622,00	28,00	29,99	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah nilai peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	100	17.000.000,00	10	16.585.900,00	8	3.630.600,00	8	3.630.600,00	2,00	1.184.000,00		2,00	1.685.000,00	4,00	748.600,00	8,00	3.617.600,00	100,00	99,64	18,00	20.203.500,00	18,00	118,84	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	Jenis	2000	238.040.000,00	40	43.820.000,00	40	31.938.300,00	40	31.938.300,00	8,00	8.933.500,00		15,00	10.642.000,00	17,00	12.213.500,00	40,00	31.789.000,00	100,00	99,53	80,00	75.609.000,00	4,00	31,76	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Surat	50000	78.800.000,00	1000	58.000.000,00	5300	105.000.000,00	2000	105.000.000,00		500,00	35.000.000,00	500,00	31.250.000,00	1000,00	27.500.000,00	2000,00	93.750.000,00	100,00	89,29	3000,00	151.750.000,00	6,00	192,58	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Layanan Sarana Prasarana Aparatur	Persen	100	1.941.480.000,00	100	73.836.421,00	100	75.000.000,00	100	69.491.700,00		12.495.336,00		-	12.517.866,00	100,00	39.393.750,00	100,00	64.406.952,00	100,00	92,68	200,00	138.243.373,00	200,00	7,12	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	5	1.578.680.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang melibara	Unit	60	362.800.000,00	12	73.836.421,00	9	75.000.000,00	4	69.491.700,00	1,00	12.495.336,00		1,00	12.517.866,00	2,00	39.393.750,00	4,00	64.406.952,00	100,00	92,68	16,00	138.243.373,00	26,67	38,10	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepastian Waktu Pelaksanaan			99.180.000,00		97.917.200,00		-																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah						
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II		III		IV		K		Re		K			Re		K		Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		K	Re	K	Re	K	Re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13*6	16 = 15*100	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Pasang	132	99.180.000,00	132	97.917.200,00																						Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Kecepatan Waktu Pelaporan	Tepat waktu, tidak tepat waktu	Tepat Waktu	741.300.000,00	Tepat Waktu	170.203.000,00	Tepat Waktu	269.325.000,00	Tepat Waktu	146.400.000,00	-		48.000.000,00		48.000.000,00		Tepat Waktu	50.400.000,00	Tepat Waktu	146.400.000,00	Tepat Waktu	100,00	Tepat Waktu	316.603.000,00	Tepat Waktu	42,71	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, Jumlah honor yang dibayarkan	Laporan :Orang	8 Lap: 12 Orang	741.300.000,00	12	170.203.000,00	8 Lap: 12 Orang	269.325.000,00	3 Lip: 9 Orang	146.400.000,00	1,00		48.000.000,00	1,00	48.000.000,00	1,00	50.400.000,00	3 lip: 9 Orang	146.400.000,00	100: 9 Orang	100,00	3: 9 Orang	316.603.000,00	37,5: 75	42,71	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda							
	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik, Penertase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100: 50	722.731.630,00	70: 25	184.306.800,00	80: 30	391.407.930,00	80: 30	42.776.670,00	-		13.969.500,00		13.969.500,00	80: 30	22.682.900,00	80: 30	36.652.400,00	100,00	85,68	80: 30	220.959.200,00	80: 60	30,57	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda							
	Coaching clinic kompetisi inovasi pelayanan publik lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Sulbar	Jumlah Laporan hasil pembinaan pelayanan publik	Laporan	1	120.000.000,00			1	120.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan SP4N (Sistem Pengendalian Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Pemprov. Sulbar	Jumlah Peserta	Peserta	200	380.000.000,00	60	112.983.100,00	41	120.000.000,00	41	13.807.170,00						41,00	9.223.900,00	41,00	9.223.900,00	100,00	66,81	101,00	122.207.000,00	50,50	32,16	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda							
	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Pemprov. Sulbar.	Jumlah Unit Layanan yang mengikuti Kompetisi inovasi pelayanan publik	PD	41	30.000.000,00			41	30.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Bimtek Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat (IKM) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah OPD yang divalidasi	PD	200	71.323.700,00	60	71.323.700,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah unit layanan yang disupervisi	PD	41	121.407.930,00			41	121.407.930,00	41	28.969.500,00			13.969.500,00	41,00	13.459.000,00	41,00	27.428.500,00	100,00	94,68	41,00	27.428.500,00	100,00		22,59	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda								
	Program Pengukuran Akutabilitas Kinerja	Nilai Predikat SAKIP	Nilai	85	473.569.300,00	61	278.080.400,00	80	291.000.000,00	80	230.801.800,00	51.271.600,00	-	35.954.300,00	60,61	116.464.450,00	60,61	203.690.350,00	75,76	88,25	60,61	481.770.750,00	71,31	101,73	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda									
	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Lakip	Dokumen	2	125.000.000,00	2	95.511.100,00	1	125.000.000,00	1	120.602.600,00	51.271.600,00		6.614.100,00	1,00	59.488.750,00	1,00	117.374.450,00	100,00	97,32	3,00	212.885.550,00	150,00	170,31	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda									
	Workshop dan Evaluasi Sistem Akutabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Peserta	Peserta	41	100.000.000,00			41	100.000.000,00	41	110.199.200,00			29.340.200,00	41,00	56.975.700,00	41,00	86.315.900,00	100,00	78,33	41,00	86.315.900,00	100,00		86,32	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda								
	Revisi indikator kinerja utama (IKU) lingkup Pemrov.Sulbar	Jumlah Indikator kinerja yang direvisi	Dokumen	42	36.000.000,00			42	36.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Rapat Koordinasi, Penyusunan dan Penandatangan Perjanjian Kinerja Pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen	1	30.000.000,00			1	30.000.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Rapat Koordinasi dan Penandatangan Perjanjian Kinerja (PK) Pemrov. Sulbar	Jumlah Dokumen PK	Dokumen	41	27.198.000,00	41	27.198.000,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Bimtek Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta	Peserta	50	63.773.200,00	50	63.773.200,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Rapat Koordinasi Evaluasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemrov. Sulbar	Jumlah OPD	OPD	20	91.598.100,00	20	91.598.100,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Program Pengukuran Organisasi	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	80	1.277.669.000,00	55	424.820.687,00	65	607.310.568,00	65	330.933.850,00	171.586.128,00	16.440.000,00	28.202.700,00	65,00	107.427.552,00	65,00	323.656.380,00	100,00	97,80	120,00	748.477.067,00	150,00	58,58	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda									
	Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat	Dokumen	30	450.450.000,00	6	112.329.700,00	30	97.310.568,00	30	94.287.722,00	5,00	9.940.000,00	5,00	16.440.000,00	10,00	39.552.552,00	30,00	94.135.252,00	100,00	99,84	36,00	206.464.952,00	120,00	45,84	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda								
	Sosialisasi perundang undangan tentang organisasi perangkat daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	Peserta	50	225.000.000,00	50	83.871.800,00	41	280.000.000,00	41	33.239.318,00	41,00	33.239.318,00							41,00	33.239.318,00	100,00	100,00	91,00	117.111.118,00	182,00	52,05	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	PD	40	150.000.000,00	40	130.000.000,00	40	75.000.000,00					40,00	67.875.000,00	40,00	67.875.000,00	100,00	90,50	40,00	67.875.000,00	100,00		45,25	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda									
	Pendampingan tentang Tata Cara Penyusunan Budya Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta	Orang	5	150.000.000,00			5	100.000.000,00	5	128.406.810,00	5,00	128.406.810,00							5,00	128.406.810,00	100,00	100,00	5,00	128.406.810,00	100,00	85,60	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Facilitasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah kabupaten	Kabupaten	6	105.219.000,00	6	101.611.400,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Revisi Perda/Perqub Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	197.000.000,00	2	127.007.787,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda						
	Program Penataan Tata Laksana	Cakupan OPD yang telah menyusun SOP sesuai Tupoksi, Indeks RR	Persentase; Predikat	87,80; A	3.925.324.344,00	19,51;B	650.051.320,00	58,54 %; B	3.590.184.140,00	58,54 %; B	277.398.570,00	-	40.406.500,00	37.160.900,00	19,51;B	192.868.043,00	19,51;B	270.435.443,00	33,33;B	97,49	19,51;B	920.486.763,00	0,22;B	23,45	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda									

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan						Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
	Asistensi Reformasi Birokrasi Provinsi dan Kabupaten	Jumlah Dokumen Asistensi	Dokumen	1	196.392.000,00			1	196.392.000,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Penyusunan Road Map RB 2020-2025 Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Roadmap	Dokumen	1	148.992.900,00			1	148.992.900,00	1	128.674.900,00			22.822.900,00		37.160.900,00	1,00	67.794.343,00	1,00	127.778.143,00	100,00	99,30	1,00	127.778.143,00	100,00	85,76	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Coaching clinic penyusunan program kerja pada 9 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Prov. Subar	Jumlah PD	PD	41	227.203.000,00			41	227.203.000,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	In house training agen perubahan Pemprov. Subar	Jumlah Peserta	Peserta	41	169.058.400,00			41	169.058.400,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	TOT Tim Assessment Internal RB dan Tim Penilai Internal Zona Integrasi Pemprov. Subar	Jumlah Peserta	Peserta	41	190.716.960,00			41	190.716.960,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Fasilitasi Pelaksanaan Pengelbiran Kinerja Daerah	Jumlah Pertemuan	Pertemuan	6	300.000.000,00			6	300.000.000,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Penyediaan Aplikasi Pengukuran Kinerja Organisasi	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	1	250.000.000,00			1	250.000.000,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta Rapat	Orang	120	149.236.200,00			120	149.236.200,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Pembangunan Aplikasi E- PMRIS Prov. Subar	Jumah Aplikasi	Aplikasi	1	150.000.000,00			1	150.000.000,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Sosialisai dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Prov. Subar	Jumlah Peserta Sosialisasi	Peserta	41	180.332.560,00			41	180.332.560,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Prov. Subar	Jumlah PD	PD	41	167.104.560,00			41	167.104.560,00	41	24.367.250,00					41,00	20.120.600,00	41,00	20.120.600,00	100,00	82,57	41,00	20.120.600,00	100,00	12,04	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Evaluasi Internal Zona Integrasi Prov. Subar	Jumlah PD	PD	41	91.131.560,00			41	91.131.560,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Zona Integrasi Menuju WBK / WBKM Reformasi Birokrasi Prov. Subar	Jumlah PD	PD	41	84.684.800,00			41	84.684.800,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Coaching Clinic Penyusunan SPM se-Prov. Subar	Jumlah Peserta	Peserta	41	149.655.240,00			41	149.655.240,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Penyusunan Peta Proses Bisnis Lingkup Pemrov. Subar	Jumlah Dokumen	Dokumen	41	188.027.240,00			41	188.027.240,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Revisi Pergub Tentang Jam Kerja ASN Lingkup Pemrov. Subar	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	50.000.000,00			1	50.000.000,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Penyusunan Pergub tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis	Jumlah Dokumen Pergub	Dokumen	1	179.907.240,00			1	179.907.240,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Evaluasi Penerapan SOP SKPD	Jumlah PD	PD	41	68.713.000,00			41	68.713.000,00	41	106.772.820,00					41,00	104.953.100,00	41,00	104.953.100,00	100,00	98,30	41,00	104.953.100,00	100,00	152,74	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Evaluasi Peta Proses Bisnis Lingkup Pemrov. Subar	Jumlah Dokumen	Dokumen	41	140.677.240,00			41	140.677.240,00	10	17.583.600,00		10,00	17.583.600,00			10,00	17.583.600,00	100,00	100,00	10,00	17.583.600,00	24,39	12,50	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SPM Se- Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen	Dokumen	41	158.450.000,00			41	158.450.000,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Pelaksanaan Pemetaan Strategis Berbasis BSC dalam mendukung sistem pengelolaan kegiatan daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	41	34.990.124,00			41	349.901.240,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda			
	Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Prov. Subar	Jumlah Peserta	Peserta	41	84.721.500,00	41	84.721.500,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang RB	Jumlah Peserta	Peserta	80	140.103.160,00	80	140.103.160,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Rapat Koordinasi pelaksanaan RB se Prov. Subar	Jumlah rapat	Rapat	2	68.035.800,00	2	68.035.800,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Pokja	Pokja	8	35.545.000,00	8	35.545.000,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tatakelola Dinas dan Pektan Dinas	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	68.635.500,00	1	68.635.500,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Dasar Berbasis SPM	Jumlah Perangkat daerah	PD	7	39.178.600,00	7	39.178.600,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Bimtek penyusunan rencana aksi dalam manajemen perubahan menuju RB se Prov. Subar	Jumlah Peserta	Peserta	60	86.911.000,00	60	86.911.000,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Pelatihan Asesor RB	Jumlah Peserta	Peserta	40	126.920.760,00	40	126.920.760,00																			Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		
	Program Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	Persen	75	854.859.000,00	60	421.897.709,00	65	621.982.637,50	65	274.560.830,00		25.597.860,00	39.260.740,00		118.183.380,00	65,00	91.318.000,00	65,00	274.359.980,00	100,00	99,93	125,00	696.257.689,00	166,67	81,45	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Se- Sulawesi Barat	Jumlah OPD yang di evaluasi	PD	20	20.000.000,00			10	100.000.000,00	10	70.093.950,00	2,00	19.858.600,00		6,00	30.452.000,00	2,00	19.618.000,00	10,00	69.928.600,00	100,00	99,76	10,00	69.928.600,00	50,00	349,64	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda	
	Penyusunan Standar kompetensi jabatan perangkat daerah se Prov Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Standar kompetensi jabatan	Dokumen	20	20.000.000,00			10	100.000.000,00	10	56.310.500,00			5,00	29.575.000,00	5,00	26.700.000,00	10,00	56.275.000,00	100,00	99,94	10,00	56.275.000,00	50,00	281,38	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17												
	Penataan Administrasi KGB,KP, dan Pensusn Lingkup Setda Prov. Subar	Jumlah Dokumen AdministrasiKGB, KJP dan Pensusn	Dokumen	500	350.000.000,00	200	142.820.700,00	200	260.000.000,00	200	148.156.380,00	20,00	5.739.260,00	50,00	39.260.740,00	80,00	58.156.380,00	50,00	45.000.000,00	200,00	148.156.380,00	100,00	100,00	400,00	290.977.080,00	80,00	83,14	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
	Pengadaan Buku Kerja Pegawai	Jumlah Buku Kerja	Buku	500	160.000.000,00			500	146.500.000,00											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
	Perengkapan Atribut Kepegawaian Lingkup Setda Provinsi Sulawesi Barat	Persentase ASN yang Menggunakan Atribut	Persen	100	25.000.000,00			100	15.482.637,50											0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
	Bimtek Penginputan Aplikasi E-Anjab, ABK dan Ejab Dns Subar	Jumlah Peserta	Peserta	100	108.302.000,00	100	105.375.000,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
	Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN Lingkup Pemprov. Subar	Jumlah Peserta	Peserta	50	69.630.000,00	50	65.718.200,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
	Penyusunan Pergub ANUAB, ABK dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen	Dokumen	4	101.927.000,00	1	107.983.809,00																					Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda
BIRO UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL SEKRETARIA DAERAH																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,				251.788.478.405,00		102.913.421.506,00		38.902.142.057,00		38.902.502.057,00		7.088.563.171,00		6.022.934.992,00		4.270.363.096,00		19.874.488.913,00		37.256.350.172,00							Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang Dikeluarkan	Surat	36500	3.611.833.958,00	20200	845.935.185,00	5300	303.109.720,00	5300	303.109.720,00	1712,00	45.156.400,00	752,00	69.453.440,00	1199,00	68.141.720,00	1202,00	117.194.280,00	4865,00	299.945.840,00	91,79	98,96	10165,00	603.055.560,00	27,85	16,70	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Rekening yang Terbuka dan Sistem Satu Tahun	Rekening	29	24.846.379.037,00	17	8.145.759.547,00	4	2.078.757.880,00	4	2.078.757.880,00	1,00	568.239.182,00	1,00	442.125.445,00	1,00	486.782.908,00	1,00	505.788.557,00	4,00	2.002.936.092,00	100,00	96,35	8,00	4.081.693.972,00	27,59	16,43	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	Item	76	867.495.743,00	45	388.306.500,00	15	617.304.500,00	15	617.304.500,00	5,00	24.399.100,00	2,00	51.905.200,00	3,00	29.958.750,00	5,00	489.895.060,00	15,00	596.158.110,00	100,00	96,57	30,00	1.213.462.610,00	39,47	139,88	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman (kue/nasi dan Prasmanan) yang disediakan	Jenis	192	65.107.183.582,00	60	29.544.374.460,00	36	11.346.287.887,00	36	11.346.287.887,00	12,00	2.204.904.440,00	10,00	1.308.902.920,00	7,00	308.224.280,00	7,00	7.523.903.960,00	36,00	11.345.935.600,00	100,00	100,00	72,00	22.692.223.487,00	37,50	34,85	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan dan Dilaksanakan di Luar Daerah	kegiatan	1543	12.584.169.856,00	273	4.955.821.157,00	220	1.359.800.160,00	220	1.359.800.160,00	53,00	202.383.778,00	20,00	121.899.130,00	60,00	203.255.322,00	87,00	832.169.777,00	220,00	1.359.708.007,00	100,00	99,99	440,00	2.719.508.167,00	28,52	21,61	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilak dan dilaksanakan di Dalam Daerah	Kegiatan	753	2.338.896.090,00	113	745.511.942,00	100	421.290.600,00	100	421.290.600,00	12,00	31.420.400,00	14,00	73.433.780,00	6,00	7.684.000,00	68,00	308.579.020,00	100,00	421.117.200,00	100,00	99,96	200,00	842.407.800,00	26,56	36,02	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
24	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan	Sop	150	272.658.953,00	75	75.044.930,00	25	26.404.900,00	25	26.404.900,00	12,00	1.680.000,00	4,00	17.684.900,00	10,00	7.040.000,00	0,00	-	26,00	26.404.900,00	104,00	100,00	51,00	52.809.800,00	34,00	19,37	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
25	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah Data/Informasi Kepegawaian	Dokumen	440	3.857.110.971,00	235	823.935.110,00	70	340.483.700,00	70	340.843.700,00	15,00	44.778.100,00	15,00	61.630.460,00	20,00	55.126.520,00	20,00	163.730.320,00	70,00	325.265.400,00	100,00	95,43	140,00	666.109.100,00	31,82	17,27	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
26	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah	Jumlah Urusan Ketatausahaan Administrasi dan Perjalanan Dinas	Kegiatan	2100	10.184.053.930,00	1050	4.235.571.698,00	330	1.326.324.020,00	330	1.326.324.020,00	65,00	246.973.690,00	74,00	169.039.421,00	95,00	160.584.996,00	96,00	505.040.368,00	330,00	1.081.638.475,00	100,00	81,55	660,00	2.407.962.495,00	31,43	23,64	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
27	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan Administrasi dan Perjalanan Dinas	kegiatan	2700	11.067.989.246,00	1350	7.659.833.842,00	420	2.221.498.240,00	420	2.221.498.240,00	57,00	155.547.964,00	140,00	378.719.773,00	137,00	388.757.170,00	86,00	1.198.759.074,00	420,00	2.121.783.981,00	100,00	95,51	840,00	4.343.282.221,00	31,11	39,24	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
28	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan Administrasi dan Perjalanan Dinas	kegiatan	1800	7.644.043.057,00	900	4.545.140.000,00	210	1.004.981.900,00	210	1.004.981.900,00	43,00	110.660.273,00	63,00	190.494.900,00	53,00	88.873.759,00	51,00	322.018.496,00	210,00	712.047.428,00	100,00	70,85	420,00	1.717.029.328,00	23,33	22,46	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
29	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Urusan Ketatausahaan Administrasi dan Perjalanan Dinas	kegiatan	1800	11.182.355.709,00	900	4.100.020.055,00	270	1.512.293.400,00	270	1.512.293.400,00	52,00	262.641.789,00	70,00	258.561.582,00	69,00	201.314.551,00	79,00	401.740.763,00	270,00	1.124.258.685,00	100,00	74,34	540,00	2.636.552.085,00	30,00	23,58	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
30	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Staf Ahli Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan Administrasi dan Perjalanan Dinas	kegiatan	1800	8.712.159.555,00	900	4.069.930.528,00	270	1.618.024.720,00	270	1.618.024.720,00	36,00	247.858.580,00	72,00	207.874.176,00	102,00	309.997.520,00	60,00	566.866.738,00	270,00	1.332.597.014,00	100,00	82,36	540,00	2.950.621.734,00	30,00	33,87	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
32	Penyediaan pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Rumah Tangga Pimpinan yang Dikelola dengan Baik	Pimpinan	18	54.971.433.093,00	9	22.245.024.144,00	3	8.680.596.860,00	3	8.680.596.860,00	0,50	2.070.734.000,00	1,00	1.938.308.090,00	0,50	1.522.355.140,00	1,00	3.120.126.440,00	3,00	8.651.523.670,00	100,00	99,67	6,00	17.332.120.530,00	33,33	31,53	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
34	Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	kegiatan	1200	34.540.715.625,00	600	10.443.358.608,00	150	5.951.044.410,00	150	5.951.044.410,00	43,00	871.185.475,00	35,00	697.545.575,00	15,00	430.366.460,00	57,00	3.762.924.160,00	150,00	5.762.021.670,00	100,00	96,82	300,00	11.713.066.080,00	25,00	33,91	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
37	Penataan Kearsipan Lingkup Biro Umum dan Perengkapan	Jumlah Tenaga Kearsipan yang Handal	Orang	120	-	30	89.853.800,00	20	93.939.160,00	20	93.939.160,00	0,00	-	15,00	35.356.200,00	5,00	1.900.000,00	0,00	55.751.900,00	20,00	93.008.100,00	100,00	99,01	40,00	186.947.260,00	33,33	-	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur				276.946.539.318,00		83.060.350.830,00		30.687.443.320,00		30.687.443.320,00		2.868.778.647,00		2.582.395.755,00		3.986.255.337,00		20.483.697.279,00		29.921.127.018,00							Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda
05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Didapatkan	Unit	50	49.982.820.655,00	20	8.423.815.700,00	5	6.217.081.000,00	5	6.217.081.000,00	0,00	-	-	2,00	908.000.000,00	3,00	5.183.570.000,00	5,00	6.091.570.000,00	100,00	97,98	10,00	12.308.651.000,00	20,00	24,63	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda	
06	Pengadaan Perengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perengkapan Rumah Jabatan yang Didapatkan	Jenis	54	4.468.788.858,00	24	3.985.049.363,00	10	1.102.185.144,00	10	1.102.185.144,00	0,00	-	-	1,00	194.865.000,00	9,00	906.321.350,00	10,00	1.101.186.350,00	100,00	99,91	20,00	2.203.371.494,00	37,04	49,31	Biro Umum, Perengkapan dan Protokol Setda	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o	I		II		III		IV		K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o		K	R _o
												K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11x12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17														
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Didirikan	Jenis	62	44.948.634.862,00	29	8.097.417.131,00	4	1.049.071.000,00	4	1.049.071.000,00	0,00	-	-	2,00	166.633.500,00	2,00	875.306.630,00	4,00	1.041.940.130,00	100,00	99,32	8,00	2.091.011.130,00	12,90	4,65	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda			
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kerja Di Kantor	Jenis	168	36.078.098.692,00	84	10.663.838.963,00	10	1.891.452.500,00	10	1.891.452.500,00	0,00	-	-	3,00	437.615.200,00	7,00	1.441.334.400,00	10,00	1.878.949.600,00	100,00	99,34	20,00	3.770.402.100,00	11,90	10,45	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda			
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang Terpeliharanya dengan Baik	Rujab	18	12.781.533.031,00	9	5.330.209.304,00	3	2.132.364.500,00	3	2.132.364.500,00	0,50	238.248.500,00	0,50	154.699.250,00	1,00	243.769.000,00	1,00	1.495.568.750,00	3,00	2.132.285.500,00	100,00	100,00	6,00	4.264.650.000,00	33,33	33,37	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik	Gedung	6	31.688.266.133,00	3	11.795.992.019,00	4	6.590.024.000,00	4	6.590.024.000,00	1,00	396.518.000,00	0,50	956.689.994,00	1,00	1.114.688.646,00	1,00	4.071.898.340,00	3,50	6.539.794.980,00	87,50	99,24	7,50	13.129.818.980,00	125,00	41,43	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara dengan Baik	Unit	48	12.637.810.000,00	15	5.504.327.294,00	17	1.577.070.000,00	17	1.577.070.000,00	4,00	260.075.966,00	3,00	193.373.189,00	4,00	113.813.096,00	6,00	812.157.057,00	17,00	1.379.419.308,00	100,00	87,47	34,00	2.956.489.308,00	70,83	23,39	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	784	28.289.248.625,00	221	9.780.777.615,00	164	3.534.210.000,00	164	3.534.210.000,00	41,00	897.492.381,00	19,00	299.133.925,00	46,00	166.293.906,00	58,00	1.837.621.349,00	164,00	3.200.541.561,00	100,00	90,56	328,00	6.734.751.561,00	41,84	23,81	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Didirikan	Jenis	210	8.877.228.675,00	105	3.051.892.028,00	35	1.197.849.856,00	35	1.197.849.856,00	8,00	187.490.300,00	8,00	274.224.174,00	8,00	306.533.780,00	11,00	412.165.479,00	35,00	1.180.413.733,00	100,00	98,54	70,00	2.378.263.589,00	33,33	26,79	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Didirikan	Jenis	210	5.480.276.375,00	105	2.123.582.844,00	35	970.880.620,00	35	970.880.620,00	8,00	128.607.400,00	8,00	240.809.323,00	8,00	198.590.209,00	11,00	392.787.210,00	35,00	960.794.142,00	100,00	98,96	70,00	1.931.674.962,00	33,33	35,25	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung VIP Room Bandara	Jumlah Gedung VIP Room Bandara yang Terpelihara	Unit	12	7.327.688.837,00	6	2.853.739.000,00	1	1.035.254.500,00	1	1.035.254.500,00	0,25	132.102.000,00	0,25	125.407.000,00	0,25	107.154.500,00	0,25	660.137.214,00	1,00	1.024.800.714,00	100,00	98,99	2,00	2.060.055.214,00	16,67	28,11	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
43	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi	Unit	42	13.484.762.500,00	15	4.518.902.687,00	9	1.295.000.000,00	9	1.295.000.000,00	4,00	146.117.600,00	2,00	170.093.900,00	2,00	13.698.500,00	1,00	964.551.500,00	9,00	1.294.461.500,00	100,00	99,96	18,00	2.589.461.500,00	42,86	19,20	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Direhabilitasi	Unit	738	20.901.381.875,00	222	6.930.806.882,00	100	2.095.000.000,00	100	2.095.000.000,00	43,00	482.126.500,00	29,00	167.965.000,00	12,00	14.600.000,00	16,00	1.430.278.000,00	100,00	2.094.969.500,00	100,00	100,00	200,00	4.189.969.500,00	27,10	20,05	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				1.910.038.345,00		1.619.016.000,00												-								-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Didirikan Beserta Kelengkapannya	Jenis	78	1.910.038.345,00	21	1.619.016.000,00												0,00	-			0,00	-			-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				4.772.804.000,00		1.416.811.957,00		238.581.000,00		238.581.000,00		55.777.332,00		181.293.534,00		-		1.500.000,00		238.570.866,00							Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	Orang	120	3.746.714.000,00	36	885.411.635,00	19	238.581.000,00	15	238.581.000,00	2,00	55.777.332,00	16,00	181.293.534,00	0,00	-	1,00	1.500.000,00	19,00	238.570.866,00	126,67	100,00	34,00	477.151.866,00	28,33	12,74	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
64	Sosialisasi Sistem Administrasi Persuratan Elektronik	Jumlah Pegawai yang Mampu Mengelola Administrasi Persuratan Elektronik	Orang	50	200.000.000,00			0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
48	Workshop Nubulensi dan Dokumentasi Acara	Tersedianya Staf yang Profesional dalam Mendokumentasikan Acara/Kegiatan Pimpinan	Orang	150	200.000.000,00	0	82.305.046,00	0	-	0		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Workshop Peningkatan Pelayanan Pramudita dan Pramusaji Lingkup Biro Umum dan Disdikbud	Jumlah pramusaji dan pramudai yang profesional	Orang	60	300.000.000,00	60	195.800.000,00		0		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
	Pembekalan teknis ketatausahaan dalam pengelolaan persuratan dan arsip lingkup biro umum dan disdikbud	Tercapainya pengetahuan pengelolaan persuratan dan arsip yang profesional	Persen	100	159.300.000,00	100	105.157.949,00	0	-	0		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Sosialisasi pengelolaan administrasi inventarisasi barang sesuai permendagri no.19 tahun 2016 lingkup sekretariat daerah	Meningkatnya pemahaman pegawai/koordin ator ruangan dalam hal inventarisasi barang	Pertemuan	1	166.790.000,00	1	148.137.327,00					0,00	-						0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				30.984.080.399,00		9.263.399.139,00		2.911.568.010,00		2.911.568.010,00		389.173.521,00		465.883.630,00		586.021.290,00		1.429.080.777,00		2.870.159.218,00							Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	Laporan	60	492.193.831,00	24	276.170.120,00	6	148.690.320,00	6	148.690.320,00	3,00	26.790.220,00	1,00	25.444.100,00	1,00	27.906.860,00	1,00	68.503.040,00	6,00	148.644.220,00	100,00	99,97	12,00	297.334.540,00	20,00	60,41	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
102	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah Laporan Keuangan Semester Sekretariat Daerah	Laporan	8	303.407.156,00	2	69.545.800,00	2	22.264.360,00	2	22.264.360,00	0,00	-	0,00	-	1,00	10.719.380,00	1,00	11.514.980,00	2,00	22.234.360,00	100,00	99,87	4,00	44.498.720,00	50,00	14,67	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		
95	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan Sekretariat Daerah	Laporan	24	326.003.032,00	12	615.940.865,00	4	50.312.600,00	4	50.312.600,00	0,00	-	1,00	5.409.200,00	0,00	9.110.000,00	3,00	35.793.400,00	4,00	50.312.600,00	100,00	100,00	8,00	100.625.200,00	33,33	30,87	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/3*100	15 = 13+6	16 = 15/5*100	17													
27	Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Barang yang Efektif	Jumlah Pengelatan Gedung dan Pendistribusian Barang yang Efektif	Objek Pengguna Barang	150	2.274.439.079,00	75	773.566.095,00	25	268.523.500,00	25	268.523.500,00	7,00	33.200.000,00	7,00	35.618.280,00	6,00	92.007.090,00	5,00	106.637.840,00	25,00	267.463.210,00	100,00	99,61	50,00	535.986.710,00	33,33	23,57	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
96	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Dokumen	50	2.386.270.313,00	20	661.195.889,00	6	312.480.280,00	6	312.480.280,00	3,00	51.469.900,00	2,00	65.675.950,00	0,40	67.567.100,00	0,60	118.207.100,00	6,00	302.920.050,00	100,00	96,94	12,00	615.400.330,00	24,00	25,79	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
54	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Lingkup Biro Umum dan Perencanaan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa	Dokumen	6	3.669.293.198,00	3	1.423.207.522,00	1	387.565.640,00	1	387.565.640,00	0,25	10.000.000,00	0,25	47.539.120,00	0,25	79.266.700,00	0,25	250.042.657,00	1,00	386.848.477,00	100,00	99,81	2,00	774.414.117,00	33,33	21,11	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
55	Pengelolaan Pertanggung jawaban Bendahara Sekretariat	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Daerah	Laporan	60	1.011.357.187,00	24	358.117.220,00	12	216.051.800,00	12	216.051.800,00	3,00	63.393.050,00	3,00	29.955.000,00	3,00	43.977.800,00	3,00	77.994.800,00	12,00	215.320.650,00	100,00	99,66	24,00	431.372.450,00	40,00	42,65	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
56	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	Laporan	60	2.424.351.446,00	24	605.897.510,00	12	289.075.920,00	12	289.075.920,00	3,00	49.449.960,00	3,00	63.164.440,00	3,00	67.447.200,00	3,00	109.014.320,00	12,00	289.075.920,00	100,00	100,00	24,00	578.151.840,00	40,00	23,85	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
57	Pengelolaan Pertanggung jawaban Bendahara KDH dan WKDH	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban KDH dan WKDH	Laporan	60	1.011.357.187,00	24	125.230.500,00	12	41.388.200,00	12	41.388.200,00	3,00	7.545.400,00	3,00	8.892.400,00	3,00	10.137.800,00	3,00	14.812.600,00	12,00	41.388.200,00	100,00	100,00	24,00	82.776.400,00	40,00	8,18	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
98	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuguan Sekretariat Daerah	Laporan	24	486.128.322,00	24	508.673.650,00	12	89.241.200,00	12	89.241.200,00	3,00	12.760.000,00	3,00	14.611.600,00	3,00	20.269.400,00	3,00	41.600.200,00	12,00	89.241.200,00	100,00	100,00	24,00	178.482.400,00	100,00	36,72	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
99	Monitoring Penggunaan Barang dan Pemasrifatan Monitoring	Jumlah Titik Pelaksanaan Monitoring	Titik	113	1.522.307.343,00	29	579.994.660,00	28	372.337.380,00	28	372.337.380,00	7,00	37.158.000,00	8,00	44.242.300,00	5,00	68.147.400,00	8,00	203.242.400,00	28,00	352.790.100,00	100,00	94,75	56,00	725.127.480,00	49,56	47,63	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
104	Penyusunan HPS dan Pengadministrasian Dokumen Proses Pengadaan	Jumlah Dokumen Proses Pengadaan	Dokumen	636	3.129.674.289,00	212	1.006.612.784,00	80	404.490.390,00	80	404.490.390,00	14,00	44.307.271,00	20,00	72.290.000,00	11,00	24.632.000,00	5,00	255.192.180,00	50,00	396.421.451,00	62,50	98,01	130,00	800.911.841,00	20,44	25,59	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
101	Penatausahaan PPK SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan PPK SKPD	Laporan	6	2.022.714.375,00	2	358.136.110,00	1	154.116.520,00	1	154.116.520,00	0,25	29.963.120,00	0,25	31.583.160,00	0,25	42.828.080,00	0,25	49.522.560,00	1,00	153.896.920,00	100,00	99,86	2,00	308.013.440,00	33,33	15,23	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
97	Konsolidasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Konsolidasi Sekretariat yang Tersedia	Laporan	48	1.228.279.554,00	12	91.411.700,00	12	63.654.600,00	12	63.654.600,00	3,00	11.536.600,00	3,00	13.086.200,00	3,00	14.003.000,00	3,00	25.024.000,00	12,00	63.649.800,00	100,00	99,99	24,00	127.304.400,00	50,00	10,36	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
100	Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Barang	Jumlah Pencatatan dan Pendataan Barang Secara Elektronik	Titik	114	6.347.400.804,00	30	1.216.117.614,00	25	91.375.300,00	25	91.375.300,00	7,00	11.600.000,00	4,00	8.371.880,00	7,00	8.001.480,00	7,00	61.978.700,00	25,00	89.952.060,00	100,00	98,44	50,00	181.327.360,00	43,86	2,86	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	Tersedianya Laporan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	Laporan	4	354.000.000,00	4	28.128.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Tercapainya Penyusunan Anggaran pada Biro Umum dan Perencanaan	Laporan	4	50.004.902,00	4	50.040.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Tercapainya Pengelolaan Keuangan yang Profesional	Tahun	1	334.650.873,00	1	260.391.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Pembukuan dan Validasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Tersedianya laporan pembukuan dan validasi lingkup provinsi sulawesi barat di dalam dan luar daerah	Persen	100	1.610.247.508,00	100	255.020.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah dan pemerintah provinsi sulawesi barat di dalam dan luar daerah			96.391.899.384,00		22.845.510.583,00		8.994.761.120,00		8.994.761.120,00		1.509.789.580,00		1.356.876.507,00		517.465.921,00		5.530.396.050,00		8.914.528.058,00								Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda
01	Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat	Kegiatan	1500	32.250.011.096,00	750	9.133.915.900,00	250	3.986.813.500,00	250	3.986.813.500,00	56,00	1.035.134.320,00	118,00	424.184.000,00	48,00	145.825.500,00	28,00	2.381.541.840,00	250,00	3.986.685.660,00	100,00	100,00	500,00	7.973.499.160,00	33,33	24,72	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
09	Koordinasi Unsur Muspida	Jumlah Kegiatan Koordinasi Unsur Muspida	Kegiatan	570	25.598.334.375,00	285	5.893.613.500,00	95	2.754.829.960,00	95	2.754.829.960,00	14,00	325.392.120,00	46,00	332.844.800,00	8,00	12.988.000,00	27,00	2.083.247.100,00	95,00	2.754.472.020,00	100,00	99,99	190,00	5.509.301.980,00	33,33	21,52	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
05	Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kegiatan	258	20.578.667.500,00	129	3.121.401.283,00	43	913.077.080,00	43	913.077.080,00	6,00	6.729.020,00	17,00	198.678.667,00	10,00	155.531.141,00	10,00	498.215.330,00	43,00	859.154.158,00	100,00	94,09	86,00	1.772.231.238,00	33,33	8,61	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kegiatan	900	13.113.571.875,00	450	3.148.162.114,00	85	381.451.680,00	85	381.451.680,00	11,00	38.134.700,00	55,00	132.774.900,00	12,00	25.754.760,00	7,00	164.620.300,00	85,00	361.284.660,00	100,00	94,71	170,00	742.736.340,00	18,89	5,66	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
23	Pelayanan Kedinasan Protokol	Jumlah Kegiatan Keprotokoliran yang Berjalan dengan Baik	Kegiatan	700	4.851.314.538,00	200	1.548.417.786,00	150	958.588.900,00	150	958.588.900,00	68,00	104.399.420,00	20,00	268.394.140,00	39,00	177.366.520,00	23,00	402.771.480,00	150,00	952.931.560,00	100,00	99,41	300,00	1.911.520.460,00	42,86	39,40	Biro Umum, Perencanaan dan Protokol Setda	
SEKRETARIAT DPRD																													
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			60.710.937.447,50		40.871.422.347,00		20.837.463.780,50	100	22.163.128.830,50	80,00	3.835.465.405,00	85,00	4.712.321.780,00	90,00	1.210.846.655,00	100,00	11.687.131.893,00	100,00	21.445.765.733,00	100,00	96,76	100,00	62.317.188.080,00				Sekretariat DPRD
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat dan Materai	Lembar	7960	22.144.000,00	7100	15.994.000,00	3600	6.150.000,00	3600	6.150.000,00	900,00	-	900,00	-	900,00	-	900,00	6.150.000,00	3600,00	6.150.000,00	100,00	100,00	10700,00	22.144.000,00	134,42	100,00	Sekretariat DPRD	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Air dan Listrik	Bulan	36	5.704.931.143,00	24	4.301.543.703,00	12	2.305.428.720,00	12	2.305.428.720,00	3,00	309.662.539,00	3,00	600.028.490,00	3,00	28.000.000,00	3,00	1.226.740.276,00	12,00	2.164.431.305,00	100,00	93,88	36,00	6.465.975.008,00	100,00	113,34		Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah	
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re		K	Re	K	Re		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re						K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17													
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaran yang disediakan jasa pemeliharaan dan perzinan	Unit	59	3.309.891.842,00	42	2.372.617.842,00	17	1.753.234.000,00	93	1.753.234.000,00	46,00	341.912.218,00	7,00	42.068.393,00	1,00	4.087.769,00	35,00	1.278.506.023,00	89,00	1.666.574.403,00	95,70	95,06	131,00	4.039.192.245,00	222,03	122,03	Sekretariat DPRD	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Bekerja	Orang	79	6.119.493.339,50	56	3.407.716.847,00	23	2.899.166.892,50	28	3.361.346.192,50	10,00	511.677.200,00	7,00	1.132.280.194,00	3,00	171.195.000,00	8,00	1.469.561.436,00	28,00	3.284.713.830,00	100,00	97,72	84,00	6.692.430.677,00	106,33	109,36	Sekretariat DPRD	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Bekerja	Paket	3	3.211.717.100,00	2	1.974.948.100,00	1	1.236.769.000,00	1	1.236.769.000,00	0,25	89.181.160,00	0,25	458.781.148,00	0,25	179.811.886,00	0,25	431.245.966,00	1,00	1.159.020.160,00	100,00	93,71	3,00	3.133.968.260,00	100,00	97,58	Sekretariat DPRD	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	146	666.732.168,00	96	455.468.500,00	50	161.260.968,00	46	276.962.618,00	15,00	42.187.499,00	20,00	119.072.700,00	0,00	-	11,00	115.699.000,00	46,00	276.959.199,00	100,00	100,00	142,00	732.427.699,00	97,26	109,85	Sekretariat DPRD	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Cetak Dan Penggandaan	Jenis	38	548.318.500,00	8	472.818.500,00	30	32.800.000,00	20	286.856.100,00	6,00	5.052.000,00	14,00	27.747.900,00	0,00	-	-	254.051.200,00	20,00	286.851.100,00	100,00	100,00	28,00	759.669.600,00	73,68	138,55	Sekretariat DPRD	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jenis	38	1.566.261.000,00	6	1.129.911.000,00	32	436.352.700,00	10	689.502.700,00	7,00	300.000.000,00	1,00	152.700,00	0,00	-	2,00	389.350.000,00	10,00	689.502.700,00	100,00	100,00	16,00	1.819.413.700,00	42,11	116,16	Sekretariat DPRD	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Buku	257	302.626.400,00	129	202.624.400,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	129,00	202.624.400,00	50,19	66,91	Sekretariat DPRD
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makan Dan Minum Kantor	Bulan	36	7.185.777.200,00	24	4.932.191.200,00	12	2.248.614.000,00	12	2.351.614.000,00	3,00	684.219.172,00	3,00	213.346.000,00	3,00	-	3,00	1.453.681.000,00	12,00	2.351.246.172,00	100,00	99,98	36,00	7.283.437.372,00	100,00	101,36	Sekretariat DPRD	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah Sekretariat	Orang	195	4.498.946.033,00	83	3.537.161.033,00	112	354.674.000,00	114	887.149.000,00	36,00	238.231.982,00	12,00	72.402.355,00	0,00	-	66,00	576.239.942,00	114,00	886.874.279,00	100,00	99,97	197,00	4.424.035.312,00	101,03	98,33	Sekretariat DPRD	
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Sekretariat	Orang	167	1.912.805.975,00	55	1.644.595.975,00	112	124.124.000,00	114	446.490.000,00	21,00	74.390.140,00	13,00	48.800.000,00	0,00	-	80,00	322.682.000,00	114,00	445.872.140,00	100,00	99,86	169,00	2.090.468.115,00	101,20	109,29	Sekretariat DPRD	
13	Penyediaan Jasa Keasmanan Kantor	Jumlah Pengamanan Dalam Kantor Sekretariat	Orang	55	885.250.000,00	35	553.960.000,00	23	441.690.000,00	20	441.690.000,00	0,00	-	14,00	156.889.900,00	4,00	36.800.000,00	2,00	248.000.000,00	20,00	441.689.900,00	100,00	100,00	55,00	995.649.900,00	100,00	112,47	Sekretariat DPRD	
14	Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Rumah Tangga Pimpinan Yang Dikelola	Unit	12	13.752.816.260,00	8	9.442.494.260,00	4	4.174.070.000,00	22	4.541.407.000,00	6,00	486.330.000,00	10,00	1.367.266.000,00	4,00	212.700.000,00	1,00	2.174.621.050,00	21,00	4.240.917.050,00	95,45	93,38	29,00	13.683.411.310,00	241,67	99,50	Sekretariat DPRD	
15	Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	Jumlah Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	Jenis	237	11.023.026.487,00	28	6.427.376.987,00	209	4.663.129.500,00	209	3.578.529.500,00	100,00	752.621.495,00	30,00	473.486.000,00	40,00	578.252.000,00	39,00	1.740.604.000,00	209,00	3.544.963.495,00	100,00	99,06	237,00	9.972.340.482,00	100,00	90,47	Sekretariat DPRD	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	22.460.725.281,00	80	13.758.494.106,00	100	7.146.022.393,00	100	7.218.361.373,00	80,00	3.008.417.000,00	85,00	1.268.446.500,00	90,00	805.666.000,00	100,00	1.720.265.400,00	100,00	6.802.794.900,00	100,00	94,24		20.561.289.006,00			Sekretariat DPRD	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	Unit	4	2.170.138.525,00	1	29.573.150,00	3	2.140.565.375,00	3	2.276.853.375,00	3,00	2.082.000.000,00	0,00	2.345.000,00	0,00	-	-	130.300.000,00	3,00	2.214.645.000,00	100,00	97,27	4,00	2.244.218.150,00	100,00	103,41	Sekretariat DPRD	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	Jenis	23	3.293.673.600,00	15	1.617.287.600,00	8	418.834.000,00	15	578.834.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	489.562.000,00	13,00	489.562.000,00	86,67	84,58	28,00	2.106.849.600,00	121,74	63,97	Sekretariat DPRD	
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	Jenis	17	4.295.469.600,00	10	2.307.532.100,00	7	1.298.300.000,00	15	1.433.599.530,00	0,00	-	7,00	846.416.000,00	5,00	90.255.000,00	2,00	360.383.400,00	14,00	1.297.054.400,00	93,33	90,48	24,00	3.604.586.500,00	141,18	83,92	Sekretariat DPRD	
4	Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	Jenis	8	2.598.387.200,00	8	2.598.387.200,00													0,00	-	8,00	2.598.387.200,00	100,00	100,00		100,00	Sekretariat DPRD	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang pemeliharaan	unit	4	888.260.300,00	0	-	4	944.521.018,00	4	1.016.230.768,00	0,00	-	1,00	199.200.000,00	2,00	312.611.000,00	1,00	381.920.000,00	4,00	893.731.000,00	100,00	87,95	4,00	893.731.000,00	100,00	100,62	Sekretariat DPRD	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Unit	6	3.487.498.000,00	2	2.293.578.000,00	4	1.526.120.000,00	1	1.097.681.700,00	0,42	713.667.000,00	0,30	219.409.000,00	0,20	162.800.000,00	0,08	-	1,00	1.095.876.000,00	100,00	99,84	3,00	3.389.454.000,00	50,00	97,19	Sekretariat DPRD	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jenis	40	2.176.707.556,00	10	1.551.520.556,00	30	625.187.000,00	1	625.187.000,00	0,30	212.750.000,00	0,10	1.076.500,00	0,35	240.000.000,00	0,25	171.360.000,00	1,00	625.186.500,00	100,00	100,00	11,00	2.176.707.056,00	27,50	100,00	Sekretariat DPRD	
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Unit	8	3.550.590.500,00	4	3.360.615.500,00	4	192.495.000,00	1	189.975.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	186.740.000,00	1,00	186.740.000,00	100,00	98,30	5,00	3.547.355.500,00	62,50	99,91	Sekretariat DPRD	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		100	2.682.836.500,00	80	1.872.108.500,00	100	201.000.000,00	100	481.405.000,00	80,00	-	85,00	-	90,00	-	100,00	481.395.000,00	100,00	481.395.000,00	100,00	100,00		2.353.503.500,00			Sekretariat DPRD	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas berserta kelengkapannya yang disediakan	Pasang	530	2.682.836.500,00	524	1.872.108.500,00	2	201.000.000,00	226	481.405.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	226,00	481.395.000,00	226,00	481.395.000,00	100,00	100,00	750,00	2.353.503.500,00	141,51	87,72	Sekretariat DPRD	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangny		100	3.711.251.227,00	100	2.463.302.027,00	100	71.250.000,00	100	71.250.000,00	100,00	50.893.600,00	100,00	20.150.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00	71.043.600,00	100,00	99,71		737.975.000,00			Sekretariat DPRD	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undaran	Jumlah Staf Yang Mengikuti Bimtek	Orang	222	1.914.880.600,00	110	666.931.400,00	6	71.250.000,00	6	71.250.000,00	4,00	50.893.600,00	2,00	20.150.000,00	0,00	-	-	6,00	71.043.600,00	100,00	99,71	116,00	737.975.000,00	52,25	38,54	Sekretariat DPRD		
2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pejabat Yang Mengikuti Pelatihan Formal	Orang	115	1.796.370.627,00	115	1.796.370.627,00													0,00	-	115,00		1.796.370.627,00	100,00	100,00		100,00	Sekretariat DPRD
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	2.316.809.572,00	100	844.652.612,00	100	957.458.920,00	100	1.493.256.920,00	100,00	26.100.000,00	100,00	237.781.500,00	100,00	126.858.000,00	100,00	1.098.415.349,00	100,00	1.489.154.849,00	100,00	99,73		2.333.807.461,00			Sekretariat DPRD	
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Laporan	24	2.003.464.572,00	12	844.652.612,00	12	644.113.920,00	11	1.170.211.920,00	3,00	23.100.000,00	3,00	60.074.000,00	3,0													

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13 = 9+10+11+12	13 = 13%	14 = 13%*Re	15 = 13+6	16 = 15%*100	17			
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	24.880.000,00		-	2	24.880.000,00	1	24.880.000,00	0,00	-	1,00	24.880.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	24.880.000,00	100,00	100,00	1,00	24.880.000,00	50,00	100,00	Sekretariat DPRD
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	4	35.060.000,00		-	4	35.060.000,00	4	35.060.000,00	1,00	600.000,00	1,00	33.010.000,00	1,00	-	1,00	1.450.000,00	4,00	35.060.000,00	100,00	100,00	4,00	35.060.000,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	37.230.000,00		-	1	37.230.000,00	1	37.230.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	37.215.000,00	1,00	37.215.000,00	100,00	99,96	1,00	37.215.000,00	100,00	99,96	Sekretariat DPRD
5	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPKD	Jumlah Laporan Renstra/ Renja/LAKIP dan LPKD	Dokumen	6	16.535.000,00		-	6	16.535.000,00	6	16.535.000,00	2,00	2.400.000,00	4,00	10.210.000,00	0,00	-	0,00	3.800.000,00	6,00	16.410.000,00	100,00	99,24	6,00	16.410.000,00	100,00	99,24	Sekretariat DPRD
6	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA/DPA-SKPD	Dokumen	2	122.400.000,00		-	2	122.400.000,00	2	122.400.000,00	0,00	-	1,00	62.647.500,00	0,00	-	1,00	59.607.500,00	2,00	122.255.000,00	100,00	99,88	2,00	122.255.000,00	100,00	99,88	Sekretariat DPRD
7	Penyusunan RKA-PD/PPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD/PPA-SKPD	Dokumen	2	77.240.000,00		-	2	77.240.000,00	2	86.940.000,00	0,00	-	1,00	46.960.000,00	0,00	-	1,00	39.970.000,00	2,00	86.930.000,00	100,00	99,99	2,00	86.930.000,00	100,00	112,55	Sekretariat DPRD
VI	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persen		130.145.281.138,00	82.028.079.258,00		44.486.508.280,00	90	49.965.132.660,00	16,20	9.700.091.740,00	31,34	8.509.402.891,00	37,68	1.548.482.900,00	91,55	29.637.830.847,00	91,55	49.396.808.378,00	101,72	96,86		131.423.887.636,00			Sekretariat DPRD	
1	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang dibahas	Perda	18	17.276.334.210,00	15	11.061.832.330,00	12	4.704.640.120,00	6	5.384.054.120,00	1,00	268.572.000,00	2,00	587.429.040,00	2,00	944.973.900,00	2,00	3.522.850.538,00	7,00	5.323.825.478,00	116,67	98,88	22,00	16.385.657.808,00	122,22	94,84	Sekretariat DPRD
2	Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Jumlah Pertemuan DPRD dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kegiatan	10	4.724.284.600,00	5	384.541.400,00	12	2.219.901.920,00	5	3.329.372.880,00	2,00	1.431.224.000,00	1,00	453.672.000,00	1,00	128.638.000,00	1,00	1.310.980.000,00	5,00	3.324.514.000,00	100,00	99,85	10,00	3.709.055.400,00	100,00	78,51	Sekretariat DPRD
3	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Laporan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Laporan	213	35.480.275.934,00	9	19.483.848.394,00	12	9.582.620.080,00	200	12.310.225.620,00	32,00	2.904.130.955,00	25,00	1.445.058.600,00	10,00	30.274.000,00	115,00	7.743.523.564,00	182,00	12.122.987.119,00	91,00	98,48	191,00	31.606.835.513,00	89,67	89,08	Sekretariat DPRD
4	Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Pelaksanaan Rapat Paripurna	Rapat	30	2.592.153.172,00	6	2.245.643.172,00	12	367.960.000,00	24	393.960.000,00	6,00	120.850.000,00	3,00	216.000,00	0,00	-	16,00	272.884.000,00	25,00	393.950.000,00	104,17	100,00	31,00	2.639.593.172,00	103,33	101,83	Sekretariat DPRD
5	Kegiatan Reses	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD	Reses	9	22.375.081.598,00	6	16.228.101.798,00	3	9.193.349.760,00	3	9.193.349.760,00	1,00	2.823.009.050,00	1,00	2.693.306.158,00	1,00	163.996.000,00		3.288.002.246,00	3,00	8.968.313.454,00	100,00	97,55	9,00	25.196.415.252,00	100,00	112,61	Sekretariat DPRD
6	Kunjungan Kerja dan Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Koordinasi dan Pimpinan dan Anggota DPRD	Laporan	771	15.921.753.421,00	759	12.060.549.461,00	12	10.569.150.720,00	12	12.889.731.520,00	2,00	991.022.835,00	4,00	1.709.977.692,00	0,00	-	6,00	10.188.147.131,00	12,00	12.889.147.658,00	100,00	100,00	771,00	24.949.697.119,00	100,00	156,70	Sekretariat DPRD
7	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Regulasi Perundang-undangan Lainnya	Jumlah Perda yang disosialisasikan	Perda	22	16.285.161.951,00	12	10.736.032.451,00	12	4.343.499.680,00	4	3.257.624.760,00	1,00	1.024.338.100,00	1,00	780.265.600,00	1,00	245.011.000,00	1,00	1.189.434.968,00	4,00	3.239.049.668,00	100,00	99,43	16,00	13.975.082.119,00	72,73	85,81	Sekretariat DPRD
8	Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah Media Publikasi Kegiatan DPRD	Media	210	8.808.558.000,00	140	5.949.910.000,00	12	2.858.648.000,00	12	2.858.648.000,00	0,00	-	5,00	724.478.000,00	3,00	35.590.000,00	4,00	2.060.240.000,00	12,00	2.820.308.000,00	100,00	98,66	152,00	8.770.218.000,00	72,38	99,56	Sekretariat DPRD
9	Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	Jumlah Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	Kegiatan	8	5.020.498.571,00	4	2.871.478.571,00	2	252.300.000,00	2	252.300.000,00	1,00	136.944.800,00	1,00	114.999.801,00	0,00	-	-	2,00	251.944.601,00	100,00	99,86	6,00	3.123.423.172,00	75,00	62,21	Sekretariat DPRD	
10	Forum Komunikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia	Jumlah Anggota DPRD & Sekretariat yang Menghadiri Forum Komunikasi	Orang	18	1.436.210.681,00	2	781.172.681,00	12	394.438.000,00	12	95.866.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	8,00	61.768.400,00	8,00	61.768.400,00	66,67	64,43	10,00	842.941.081,00	55,56	58,69	Sekretariat DPRD
11	Fit and Proport Test KPUD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fit and Proport test KPUD	Laporan	1	224.969.000,00	1	224.969.000,00	0	0	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	1,00	224.969.000,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD	
VII	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Aduan Masyarakat yang ditanggapi	Aduan	52	1.023.448.300,00	4	590.959.300,00	48	123.239.000,00	48	123.239.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	48,00	122.745.000,00	48,00	122.745.000,00	100,00	99,60		713.704.300,00			Sekretariat DPRD
1	Pelaksanaan Dukungan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Aduan Masyarakat yang ditanggapi	Aduan	52	663.968.000,00	4	351.479.000,00	48	123.239.000,00	48	123.239.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	48,00	122.745.000,00	48,00	122.745.000,00	100,00	99,60	52,00	474.224.000,00	100,00	71,42	Sekretariat DPRD
2	Penyebareluasan Informasi DPRD Provinsi Sulawesi barat	Jumlah Penerbitan Informasi melalui Buletin	Buletin	24	359.480.300,00	12	239.480.300,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	12,00	239.480.300,00	50,00	66,62	Sekretariat DPRD	
VIII	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perda		41	23.066.001.369,00	27	16.109.763.549,00	14	5.138.674.620,00	13	3.424.570.580,00	5,00	3.271.541.582,00	1,00	16.689.000,00	0,00	-	5,00	125.356.500,00	11,00	3.413.587.082,00	84,62	99,68		19.523.350.631,00			Sekretariat DPRD
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Perda	Rancangan Perda	41	23.066.001.369,00	27	16.109.763.549,00	14	5.138.674.620,00	13	3.424.570.580,00	5,00	3.271.541.582,00	1,00	16.689.000,00	0,00	-	5,00	125.356.500,00	11,00	3.413.587.082,00	84,62	99,68	38,00	19.523.350.631,00	92,68	84,64	Sekretariat DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	7.628.286.633,00	72	3.832.181.099,00	100	1.274.689.588,00	100	1.305.101.638,00	54,00	314.900.716,00	12,00	205.076.136,00	8,00	277.423.290,00	17,00	335.448.414,00	91,00	1.132.848.556,00	91,00	86,80	163,00	4.965.029.655,00	163,00	65,09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga administrasi jasa surat menyurat	orang	10	652.681.760,00	9	316.829.000,00	10	152.750.000,00	10	155.510.000,00	9,00	23.700.000,00	9,00	35.300.000,00	9,00	33.750.000,00		22.500.000,00	9,00	115.250.000,00	90,00	74,11	9,00	432.079.000,00	90,00	66,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik dan telekomunikasi	Rek	3	850.000.000,00	3	268.247.190,00	3	171.041.608,00	3	171.461.608,00	3,00	31.126.495,00	3,00	18.446.016,00	3,00	29.025.085,00		32.507.414,00	3,00	111.105.010,00	100,00	64,80	3,00	379.352.200,00	100,00	44,63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	Orang	12	790.000.000,00	9	357.200.000,00	10	40.359.300,00	10	58.760.448,00	9,00	7.098.700,00	9,00	6.442.000,00	9,00	6.318.600,00		25.396.700,00	9,00	45.256.000,00	90,00	77,02	9,00	402.456.000,00	75,00	50,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	65	92.250.000,00	25	19.800.000,00	20	17.915.000,00	32	21.565.000,00	0,00	-	5,00	2.070.000,00	0,00	-	27,00	19.310.000,00	32,00	21.380.000,00	100,00	99,14	32,00	41.180.000,00	49,23	44,64	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

94

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o	I		II		III		IV		K		R _o		K		R _o			K		R _o	
												K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o	K	R _o		K	R _o	K	R _o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11x12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17																
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban SKPD	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bappeda Provinsi Sulawesi Barat yang disusun	Dok	4	15.500.000,00	1	5.905.000,00	1 Dok	2.059.100,00	1	2.059.100,00	1,00	-	0,00	2.059.100,00	0,00	-	0,00	-	1,00	2.059.100,00	100,00	100,00	2,00	7.964.100,00	50,00	51,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan	%	4	750.000.000,00	2	325.487.551,00	2	89.050.000,00	2	75.430.000,00	0,00	-	0,00	21.450.000,00	0,00	2.200.000,00	2,00	34.660.000,00	2,00	58.310.000,00	100,00	77,30	4,00	383.797.551,00	100,00	51,17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Penyusunan data/informasi kebutuhan program dokumen perencanaan	Persentase ketersediaan edatabase SIPD	Dok	3	550.000.000,00	2	325.487.551,00	1	21.450.000,00	1	21.450.000,00	0,00	-	0,00	21.450.000,00	0,00	-	1,00	-	1,00	21.450.000,00	100,00	100,00	3,00	346.937.551,00	100,00	63,08	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Koordinasi Pengumpulan Data	Jumlah Dokumen Koordinasi pengumpulan Data	Dok	1	200.000.000,00	0	-	1	67.600.000,00	1	53.980.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	2.200.000,00	1,00	34.660.000,00	1,00	36.860.000,00	100,00	68,28	1,00	36.860.000,00	100,00	18,43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerjasama Lembaga Pembangunan Daerah	Dok	6	1.175.000.000,00	4	516.063.185,00	1	76.819.000,00	1	76.819.000,00	1,00	72.624.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	76.224.000,00	100,00	99,23	5,00	592.287.185,00	83,33	50,41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Koordinasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah dokumen fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (Sulawesi Expo dan Expo)	Dok	3	575.000.000,00	2	220.196.200,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	220.196.200,00	66,67	38,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah (Forum Bappeda)	Jumlah dokumen Hasil Rapat koordinasi dan kerjasama lembaga perencanaan pembangunan daerah (Forum Bappeda)	Dok	3	600.000.000,00	2	295.866.985,00	1 Dok	76.819.000,00	1	76.819.000,00	1,00	72.624.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	76.224.000,00	100,00	99,23	3,00	372.090.985,00	100,00	62,02	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Bidang Perencanaan	Orang	230	600.000.000,00	215	420.970.388,00	50 Orang	51.718.140,00	50	51.718.140,00	0,00	-	0,00	-	0,00	3.618.000,00	50,00	48.093.200,00	50,00	51.711.200,00	100,00	99,99	265,00	472.681.588,00	115,22	78,78	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Bimbingan Teknis Perencanaan Lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang ditrimbing	Jumlah aparat perencana lingkup Provinsi Sulawesi Barat yang ditrimbing	Orang	180	450.000.000,00	215	420.970.388,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	215,00	420.970.388,00	119,44	93,55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jumlah Aparat yang memahami penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang PU dan Perumahan Rakyat	Orang	50	150.000.000,00	0	-	50 Orang	51.718.140,00	50	51.718.140,00	0,00	-	0,00	-	0,00	3.618.000,00	50,00	48.093.200,00	50,00	51.711.200,00	100,00	99,99	50,00	51.711.200,00	100,00	34,47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	95	9.886.000.000,00	49	5.676.315.601,00	29	1.274.003.281,00	29	1.236.698.672,00	8,00	591.971.810,00	7,00	146.843.600,00	2,00	100.075.000,00	12,00	340.959.115,00	29,00	1.179.849.525,00	100,00	95,40	78,00	6.856.165.126,00	82,11	69,35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen penyusunan rancangan RKPD Daerah	Dok	15	645.000.000,00	8	207.348.800,00	4	103.455.000,00	4	126.715.400,00	1,00	61.205.000,00	3,00	13.200.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	18.100.000,00	4,00	126.505.000,00	100,00	99,83	12,00	333.853.800,00	80,00	51,76	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan musrenbang RKPD	Dok	5	2.500.000.000,00	2	637.390.333,00	1	200.815.652,00	1	183.994.652,00	0,00	155.894.700,00	1,00	18.100.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	173.994.700,00	100,00	94,57	3,00	811.385.033,00	60,00	32,46	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJ-PJ)	Jumlah dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban	Dok	3	600.000.000,00	2	214.683.273,00	1	85.769.400,00	1	83.829.400,00	1,00	82.409.400,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	82.409.400,00	100,00	98,31	3,00	297.092.673,00	100,00	49,52	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang Bersumber dari Dana APBDN	Jumlah dokumen hasil monev SKPD per triwulan dan akhir tahun	Dok	18	666.000.000,00	8	150.931.600,00	4	26.240.840,00	4	9.500.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	9.400.000,00	3,00	-	4,00	9.400.000,00	100,00	98,95	12,00	160.331.600,00	66,67	24,07	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan - Rencana Pembangunan Daerah yang Sumber dari Dana APBD	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan	Dok	18	650.000.000,00	7	361.199.000,00	6	63.976.040,00	6	63.480.000,00	0,00	51.160.000,00	2,00	-	1,00	11.990.000,00	3,00	-	6,00	63.150.000,00	100,00	99,48	13,00	424.349.000,00	72,22	65,28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen koordinasi dengan OPD, kabupaten dan kementerian/lembaga	Dok	3	600.000.000,00	2	145.496.400,00	1	82.511.600,00	1	21.013.600,00	0,00	-	0,00	18.758.600,00	0,00	-	1,00	-	1,00	18.758.600,00	100,00	89,27	3,00	164.255.000,00	100,00	27,38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Koordinasi Pelaporan Monitoring rencana Aksi Daerah HAM/Asasi Manusia (RAD-HAM)	Jumlah laporan hasil rencana aksi daerah Hak Asasi Manusia (RAD-HAM)	Dok	3	450.000.000,00	2	218.929.611,00	1	104.980.000,00	1	62.162.000,00	0,00	-	0,00	21.045.000,00	0,00	798.000,00	1,00	26.986.000,00	1,00	48.829.000,00	100,00	78,55	3,00	267.758.611,00	100,00	59,50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17												
	Koordinasi Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pemerintahan makro dan pengolahan data	Dok	3	900.000.000,00	2	2.486.935.173,00	1	213.552.449,00	1	303.706.000,00	0,00	111.937.449,00	0,00	33.640.000,00	0,00	10.450.000,00	1,00	143.505.532,00	1,00	299.532.981,00	100,00	98,63	3,00	2.786.468.154,00	100,00	309,61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan	Dok	3	900.000.000,00	2	613.956.938,00	1	193.292.420,00	1	175.082.220,00	0,00	38.121.511,00	0,00	11.500.000,00	0,00	9.187.000,00	1,00	110.568.283,00	1,00	169.376.794,00	100,00	96,74	3,00	783.333.732,00	100,00	87,04	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan penilaian perencanaan pembangunan daerah	Dok	18	775.000.000,00	13	571.926.473,00	6	69.676.480,00	6	66.144.800,00	6,00	65.686.100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	6,00	65.686.100,00	100,00	99,31	19,00	637.612.573,00	105,56	82,27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pengarusutamaan gender	Jumlah kebijakan Pengarusutamaan Gender	Dok	2	450.000.000,00	0	-	1	4.962.400,00	1	10.422.600,00	0,00	-	0,00	-	0,00	3.150.000,00	1,00	3.622.600,00	1,00	6.772.600,00	100,00	64,98	1,00	6.772.600,00	50,00	1,51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Fasilitas RKPD	Jumlah Dokumen Fasilitas RKPD Kabupaten se Sulawesi Barat	Dok	3	550.000.000,00	1	67.518.000,00	1	37.750.000,00	1	68.950.000,00	0,00	-	1,00	30.600.000,00	0,00	-	0,00	26.200.000,00	1,00	56.800.000,00	100,00	82,38	2,00	124.318.000,00	66,67	22,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Fasilitas RKPD Kabupaten se Sulawesi Barat	Dok	1	200.000.000,00	0	-	1	87.021.000,00	1	61.698.000,00	0,00	25.557.650,00	0,00	-	0,00	21.100.000,00	1,00	11.976.700,00	1,00	58.634.350,00	100,00	95,03	1,00	58.634.350,00	100,00	29,32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Ekonomi	%	3	750.000.000,00	2	705.776.781,00	1	448.878.720,00	1	398.878.720,00	0,00	66.464.500,00	0,00	79.720.400,00	0,00	21.387.100,00	1,00	178.106.500,00	1,00	345.678.500,00	100,00	86,66	3,00	1.051.455.281,00	100,00	140,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dok	3	750.000.000,00	2	705.776.781,00	1	448.878.720,00	1	398.878.720,00	0,00	66.464.500,00	0,00	79.720.400,00	0,00	21.387.100,00	1,00	178.106.500,00	1,00	345.678.500,00	100,00	86,66	3,00	1.051.455.281,00	100,00	140,19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Sosial Budaya	%	4	400.000.000,00	2	640.185.540,00	2	226.953.400,00	2	744.159.400,00	0,00	54.081.790,00	0,00	33.647.400,00	0,00	4.000.000,00	2,00	622.491.000,00	2,00	714.220.190,00	100,00	95,98	4,00	1.354.405.730,00	100,00	338,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Dok	3	350.000.000,00	2	640.185.540,00	1	134.276.000,00	1	622.683.160,00	0,00	54.081.790,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1,00	536.713.000,00	1,00	598.794.790,00	100,00	96,16	3,00	1.238.980.330,00	100,00	353,99	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Konvergensi Stunting	Jumlah laporan Hasil Koordinasi penganganan stunting	Dok	1	50.000.000,00	0	-	1	92.677.400,00	1	121.476.240,00	0,00	-	0,00	29.647.400,00	0,00	-	1,00	85.778.000,00	1,00	115.425.400,00	100,00	95,02	1,00	115.425.400,00	100,00	230,85	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Kewilayahan dan Sumber Daya Alam	Persen	100	650.000.000,00	67	396.434.291,00	1 Dok	128.643.140,00	1	128.642.980,00	0,00	26.269.400,00	0,00	9.615.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00	89.630.700,00	100,00	127.185.100,00	10000,00	98,87	167,00	523.619.391,00	167,00	80,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan (AMPL) dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan (AMPL) dan kawasan permukiman	Dok	3	650.000.000,00	2	396.434.291,00	1 Dok	128.643.140,00	1	128.642.980,00	0,00	26.269.400,00	0,00	9.615.000,00	0,00	1.670.000,00	1,00	89.630.700,00	1,00	127.185.100,00	100,00	98,87	3,00	523.619.391,00	100,00	80,56	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Tata Ruang	%	100	1.250.000.000,00	67	502.628.983,00	2 Dok	157.669.480,00	2	145.859.480,00	0,00	19.924.600,00	0,00	6.841.600,00	0,00	7.082.000,00	2,00	106.062.900,00	2,00	139.911.100,00	100,00	95,92	69,00	642.540.083,00	69,00	51,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pengembangan Wilayah dan	Dok	3	600.000.000,00	2	246.260.125,00	1 Dok	43.644.680,00	1	42.169.680,00	0,00	-	0,00	6.475.000,00	0,00	7.082.000,00	1,00	27.808.100,00	1,00	41.365.100,00	100,00	98,09	3,00	287.625.225,00	100,00	47,94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17												
	Penyusunan dan Pengelolaan Informasi Spasial Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pengelolaan informasi spasial pembangunan Provinsi Sulawesi Barat	Dok	3	650.000.000,00	2	256.368.858,00	1 Dok	114.024.800,00	1	103.689.800,00	0,00	19.924.600,00	0,00	366.600,00	0,00	-	1,00	78.254.800,00	1,00	98.546.000,00	100,00	95,04	3,00	354.914.858,00	100,00	54,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah dan Pelaporan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	100	1.875.000.000,00	48	1.242.590.173,00	1	463.212.840,00	1	492.499.294,00	6,25	21.797.551,00	6,25	50.366.000,00	6,25	47.980.000,00	81,25	351.860.177,00	100,00	472.003.728,00	100,00	95,84	17,00	1.714.593.901,00	17,00	91,45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kordinasi Bidang Pengendalian Pembangunan dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pengendalian pembangunan	Laporan	36	650.000.000,00	31	838.487.727,00	30 Laporan	361.697.840,00	12	367.226.000,00	3,00	21.797.551,00	3,00	29.961.000,00	3,00	5.900.000,00	3,00	301.845.577,00	12,00	359.504.128,00	100,00	97,90	43,00	1.197.991.855,00	119,44	184,31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pengendalian dan Evaluasi RKPD/Renja SKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen hasil evaluasi Renja OPD provinsi dan RKPD Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	Dok	21	625.000.000,00	8	196.829.746,00	4 Dok	16.240.000,00	10	14.973.694,00	0,00	-	-	0,00	3.200.000,00	10,00	-	10,00	3.200.000,00	100,00	21,37	18,00	200.029.746,00	85,71	32,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kordinasi Penyusunan Laporan Dana Abkasi Khusus (DAK)	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan DAK dan usaha DAK	Dok	6	450.000.000,00	4	207.272.700,00	2 Dok	8.838.000,00	2	3.850.000,00	0,00	-	-	3.850.000,00	0,00	-	2,00	-	2,00	3.850.000,00	100,00	100,00	6,00	211.122.700,00	100,00	46,92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kaji Ulang terhadap Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang RAD-GRK Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah dokumen Kaji Ulang terhadap Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012 tentang RAD-GRK Prov. Subar	Dok	1	150.000.000,00	0	-	1 Dok	76.437.000,00	1	106.449.600,00	0,00	-	-	16.555.000,00	0,00	38.880.000,00	1,00	50.014.600,00	1,00	105.449.600,00	100,00	99,06	1,00	105.449.600,00	100,00	70,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	4.870.015.349,00	48	2.870.518.181,00	100	594.392.400,00	100	594.392.400,00	65,30	90.329.736,00	9,40	183.727.894,00	16,14	145.552.748,00	8,43	161.270.413,00	99,28	580.880.791,00	99,28	97,73	107,47	3.451.398.972,00	107,47	70,87	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan layanan jaringan internet dan daya listrik	rekening	72	281.565.000,00	36	64.351.759,00	12	1.468.200,00	12	1.468.200,00	3,00	1.348.200,00	3,00	-	3,00	-	3,00	-	12,00	1.348.200,00	100,00	91,83	48,00	66.699.959,00	66,67	23,33	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di tahun berjalan	unit	72	544.000.000,00	36	361.215.153,00	31	90.070.000,00	31	90.070.000,00	6,00	3.111.156,00	2,00	20.920.193,00	13,00	46.181.296,00	10,00	18.442.492,00	31,00	88.655.139,00	100,00	98,43	67,00	449.870.292,00	93,06	82,70	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan peralatan kerja	unit	72	85.500.000,00	36	33.255.000,00	10	5.241.800,00	7	5.241.800,00	1,00	-	0,00	1.300.000,00	3,00	3.900.000,00	0,00	-	4,00	5.200.000,00	57,14	99,20	40,00	38.455.000,00	55,56	44,96	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor tahun berjalan	jenis	72	244.977.175,00	36	171.840.900,00	28	31.911.620,00	28	31.361.620,00	20,00	9.355.220,00	2,00	3.287.000,00	6,00	13.944.000,00	0,00	4.743.000,00	28,00	31.329.220,00	100,00	99,90	64,00	203.170.120,00	88,89	82,93	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	blok	72	121.300.000,00	36	43.611.153,00	41	10.175.100,00	41	10.175.100,00	0,00	-	7,00	-	12,00	7.698.450,00	22,00	1.836.650,00	41,00	9.535.100,00	100,00	93,71	77,00	53.146.253,00	106,94	43,81	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang terbeli	jenis	72	225.000.000,00	36	91.229.800,00	10	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	36,00	91.229.800,00	50,00	40,55	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman tahun berjalan	kotak	72	212.832.000,00	36	130.677.400,00	290	10.990.900,00	250	11.540.900,00	220,00	5.027.800,00	0,00	1.500.000,00	30,00	2.665.000,00	0,00	-	250,00	9.192.800,00	100,00	79,65	286,00	139.870.200,00	397,22	65,72	Badan Kepegawaian Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah	Konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	kali	72	1.188.690.574,00	36	1.374.795.176,00	23	224.024.180,00	23	224.024.180,00	13,00	53.039.360,00	10,00	92.908.901,00	0,00	28.589.000,00	0,00	49.380.812,00	23,00	223.918.073,00	100,00	99,95	59,00	1.598.713.249,00	81,94	134,49	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	orang	48	961.509.260,00	12	146.160.000,00	11	171.800.000,00	11	171.800.000,00	0,00	291.000,00	11,00	53.555.000,00	0,00	42.575.000,00	0,00	66.739.000,00	11,00	163.160.000,00	100,00	94,97	23,00	309.320.000,00	47,92	32,51	Badan Kepegawaian Daerah
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah	Koordinasi ke dalam daerah	kali	72	1.014.641.340,00	36	453.381.840,00	12	48.710.600,00	12	48.710.600,00	8,00	18.157.000,00	4,00	10.256.800,00	0,00	-	0,00	20.128.459,00	12,00	48.542.259,00	100,00	99,65	48,00	501.924.099,00	66,67	49,47	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	382.840.257,00	83	697.532.000,00	100	29.540.000,00	100	29.540.000,00	0,00	-	0,00	-	50,00	14.996.750,00	50,00	12.599.946,00	100,00	27.596.696,00	100,00	93,42	116,67	725.128.696,00	116,67	189,41	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	6	382.840.257,00	5	697.532.000,00	1	29.540.000,00	2	29.540.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	14.996.750,00	1,00	12.599.946,00	2,00	27.596.696,00	100,00	93,42	7,00	725.128.696,00	116,67	189,41	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rasio jumlah pegawai yang diberikan sanksi dengan jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran	Persen	100	1.613.146.648,00	95	449.963.600,00	100	91.098.160,00	100	91.098.160,00	100,00	5.278.100,00	100,00	15.890.000,00	100,00	24.010.500,00	100,00	42.144.420,00	100,00	87.323.020,00	100,00	95,86	100,00	537.286.620,00	100,00	33,31	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jenis	5	366.160.000,00	1	69.276.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	69.276.000,00	20,00	18,92	Badan Kepegawaian Daerah
	Penilaian Kinerja PNS	Hasil Penilaian Kinerja PNS di Satuan OPD	OPD	41	623.493.324,00	41	139.254.500,00	42	19.930.000,00	42	19.930.000,00	42,00	-	42,00	4.880.000,00	42,00	3.750.000,00	42,00	10.726.120,00	42,00	19.356.120,00	100,00	97,12	42,00	158.610.620,00	102,44	25,44	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11x12	14 = 13x8/100	15 = 13x6	16 = 15x5/100	17												
	Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah	Pengelolaan administrasi disiplin ASN lingkup Pemprov sulawesi	OPD	41	623.493.324,00	41	241.433.100,00	42	71.168.160,00	42	71.168.160,00	42,00	5.278.100,00	42,00	11.010.000,00	42,00	20.260.500,00	42,00	31.418.300,00	42,00	67.966.900,00	100,00	95,50	42,00	309.400.000,00	102,44	49,62	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas ASN melalui pendidikan lanjutan	Persen	5	14.402.000.000,00	4	3.755.040.768,00	1,07	729.320.280,00	1	729.320.280,00	0,46	7.196.146,00	0,09	423.605.000,00	0,00	245.720.120,00	0,44	51.750.000,00	0,98	728.271.266,00	91,96	99,86	5,43	4.483.312.034,00	108,60	31,13	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	orang	240	14.402.000.000,00	244	3.755.040.768,00	30	729.320.280,00	30	729.320.280,00	25,00	7.196.146,00	5,00	423.605.000,00	0,00	245.720.120,00	24,00	51.750.000,00	54,00	728.271.266,00	180,00	99,86	298,00	4.483.312.034,00	124,17	31,13	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Kecepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persen	100	117.737.065,00	49	427.970.259,00	100	80.445.000,00	100	80.445.000,00	33,33	36.774.300,00	14,29	24.292.900,00	19,05	6.400.000,00	33,33	6.790.800,00	100,00	74.258.000,00	100,00	92,31	64,66	502.228.259,00	64,66	426,57	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahsilat Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi kinerja opd	dokumen	72	25.750.000,00	36	185.160.000,00	12	5.345.200,00	12	5.345.200,00	3,00	2.467.500,00	3,00	1.500.000,00	3,00	-	3,00	-	12,00	3.967.500,00	100,00	74,23	48,00	189.127.500,00	66,67	734,48	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	dokumen	12	14.250.000,00	5	71.461.700,00	1	-	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	1,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	6,00	71.461.700,00	50,00	501,48	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	laporan keuangan akhir tahun	dokumen	6	14.252.000,00	2	36.772.600,00	1	-	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	-	1,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	3,00	36.772.600,00	50,00	258,02	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyusunan Renstra/Revisi/LAKIP dan LUPD	Jenis laporan yang selesai	jenis	19	28.150.896,00	10	72.784.859,00	3	39.251.200,00	3	39.251.200,00	2,00	20.196.000,00	0,00	7.132.300,00	1,00	6.400.000,00	0,00	3.200.000,00	3,00	36.928.300,00	100,00	94,08	13,00	109.713.159,00	68,42	389,73	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jenis dokumen	jenis	12	17.228.984,00	6	35.990.100,00	2	32.037.800,00	2	32.037.800,00	2,00	14.110.800,00	0,00	15.660.600,00	0,00	-	0,00	-	2,00	29.771.400,00	100,00	92,93	8,00	65.761.500,00	66,67	381,69	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyusunan RKA-PIDPPA-SKPD	Jenis dokumen	jenis	12	18.105.185,00	6	25.801.000,00	2	3.810.800,00	2	3.810.800,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	-	2,00	3.590.800,00	100,00	94,23	8,00	29.391.800,00	66,67	162,34	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi	Persen	100	18.770.885.350,00	100	7.549.774.636,00	100	1.928.804.160,00	100	1.928.804.160,00	100,00	582.617.730,00	100,00	399.184.411,00	100,00	230.316.020,00	100,00	641.424.868,00	100,00	1.853.543.029,00	100,00	96,10	100,00	9.403.317.665,00	100,00	50,10	Badan Kepegawaian Daerah
	Seleksi Penerimaan CPNS dan Proses Penyelesaian Penetapan NIP	Penyelesaian administrasi penetapan NIP CPNS	orang	5650	622.440.000,00	548	626.156.533,00	770	641.982.280,00	770	641.982.280,00	770,00	425.045.000,00	0,00	129.346.531,00	0,00	24.741.400,00	289,00	57.271.120,00	1059,00	636.404.051,00	137,53	99,13	1607,00	1.262.560.584,00	28,44	202,84	Badan Kepegawaian Daerah
	Seleksi Penerimaan Calon Paga IPDN	Facilitas bagi peserta calon IPDN	orang	135	1.418.000.000,00	0	-	15	34.444.000,00	15	34.444.000,00	0,00	-	0,00	4.955.000,00	15,00	3.750.000,00	0,00	25.652.768,00	15,00	34.357.768,00	100,00	99,75	15,00	34.357.768,00	11,11	2,42	Badan Kepegawaian Daerah
	Seleksi Penerimaan Calon Taruna STTD	Facilitas bagi peserta calon Taruna STTD	orang	30	676.000.000,00	0	-	2	8.901.000,00	2	8.901.000,00	0,00	-	0,00	8.775.900,00	0,00	-	0,00	-	0,00	8.775.900,00	0,00	98,59	0,00	8.775.900,00	0,00	1,30	Badan Kepegawaian Daerah
	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	orang	1600	785.510.000,00	1371	468.389.983,00	321	109.359.280,00	321	109.359.280,00	321,00	87.395.240,00	0,00	11.363.120,00	0,00	3.750.000,00	0,00	6.250.000,00	321,00	108.758.360,00	100,00	99,45	1692,00	577.148.343,00	105,75	73,47	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan Sumpah PNS	Jumlah SK PNS dan Sumpah PNS	SK	1650	558.912.900,00	467	148.298.847,00	276	15.424.280,00	276	15.424.280,00	0,00	-	276,00	6.798.120,00	0,00	5.250.000,00	0,00	3.100.000,00	276,00	15.148.120,00	100,00	98,21	743,00	163.446.967,00	45,03	29,24	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyusunan Rencana Pengembangan Karier dan Pola Karier	Standar baku pedoman pelaksanaan pengembangan karier dan pola karier	dokumen	8	611.950.000,00	2	125.368.720,00	2	11.632.120,00	2	11.632.120,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	4.476.120,00	2,00	4.476.120,00	100,00	38,48	4,00	129.844.840,00	50,00	21,22	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	SK Kenaikan Pangkat	SK	10653	1.350.430.500,00	4081	516.046.649,00	1200	83.241.300,00	1200	83.241.300,00	213,00	-	800,00	15.142.700,00	0,00	15.523.820,00	187,00	36.763.900,00	1200,00	67.430.420,00	100,00	81,01	5281,00	583.477.069,00	49,57	43,21	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengelolaan Penjurusan Masa Kerja PNS	SK penjurusan masa kerja PNS	SK	165	95.366.700,00	116	63.480.120,00	5	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	116,00	63.480.120,00	70,30	66,56	Badan Kepegawaian Daerah	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional	SK kenaikan pangkat	SK	13000	917.413.850,00	114	917.798.199,00	800	82.938.900,00	800	82.938.900,00	109,00	1.894.500,00	580,00	18.334.000,00	0,00	17.519.700,00	111,00	40.689.040,00	800,00	78.437.240,00	100,00	94,57	914,00	996.235.439,00	7,03	108,59	Badan Kepegawaian Daerah
	Rapat Koordinasi Kepegawaian	Jumlah peserta rapat	orang	375	965.750.000,00	150	268.159.540,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	150,00	268.159.540,00	40,00	27,77	Badan Kepegawaian Daerah	
	Pengelolaan dan Penataan Tata Naskah Kepegawaian	Pengelolaan dokumen kepegawaian	OPD	72	1.268.224.000,00	36	492.134.744,00	42	84.839.080,00	42	84.839.080,00	42,00	5.959.300,00	42,00	13.315.000,00	42,00	32.479.400,00	42,00	28.200.000,00	42,00	79.953.700,00	100,00	94,24	78,00	572.088.444,00	108,33	45,11	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengolahan Data Kepegawaian	Sinkronisasi dan Update data antara Simpeg dan SAPK	OPD	41	551.344.000,00	41	489.338.800,00	42	136.806.300,00	42	136.806.300,00	42,00	16.878.090,00	42,00	7.760.000,00	42,00	32.428.000,00	42,00	72.785.000,00	42,00	129.851.090,00	100,00	94,92	83,00	619.189.890,00	202,44	112,31	Badan Kepegawaian Daerah
	Pengolahan Informasi Kepegawaian	Update informasi data kepegawaian	OPD	48	656.718.000,00	12	444.580.319,00	42	81.626.800,00	42	81.626.800,00	42,00	3.737.000,00	42,00	11.858.000,00	42,00	19.654.000,00	42,00	43.602.180,00	42,00	78.851.180,00	100,00	96,60	54,00	523.431.499,00	112,50	79,70	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyelesaian Administrasi Karir Karu dan Baperatur PNS	Jumlah Karir Karu dan Baperatur PNS	orang	3170	501.360.000,00	2299	155.521.250,00	120	38.961.360,00	120	38.961.360,00	0,00	800.000,00	0,00	4.860.000,00	54,00	17.805.350,00	43,00	15.300.000,00	97,00	38.765.350,00	80,83	99,50	2396,00	194.296.600,00	75,58	38,75	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyelesaian Administrasi KARPENG dan TASPEN PNS	Jumlah Karpeng dan Taspeng PNS	orang	1875	359.095.000,00	834	152.192.508,00	100	32.635.960,00	100	32.635.960,00	0,00	800.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	7.763.000,00	57,00	15.952.000,00	57,00	29.500.000,00	57,00	90,39	891,00	181.692.508,00	47,52	50,60	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyelesaian Administrasi Penatun/Purna Tugas PNS	Jumlah SK penatun PNS	SK	675	570.000.000,00	105	109.160.250,00	70	50.847.660,00	70	50.847.660,00	12,00	1.185.000,00	22,00	16.025.000,00	47,00	16.624.450,00	56,00	16.722.900,00	137,00	50.557.350,00	195,71	99,43	242,00	159.717.600,00	35,85	28,02	Badan Kepegawaian Daerah
	Penyelesaian Administrasi Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS	Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya PNS	orang	1620	466.395.000,00	537	189.561.950,00	100	15.800.000,00	100	15.800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	15.240.000,00	0,00	96,46	537,00	204.801.950,00	33,15	43,91	Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K 13 = 9+10+11+12	Rp	K 14 = 13*100	Rp	K 15 = 13+6	Rp	K 16 = 15*100		
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	Proses Pengangkatan, Pendidikan dan Pemberhentian PNS dalam JPT, Administrator & Fungsional	Mutasi Jabatan dan Pengangkatan PNS Ke Dalam JPT, Administrator & Fungsional	orang	3300	3.530.945.000,00	1799	1.147.594.912,00	553	241.603.880,00	553	241.603.880,00	402,00	36.609.100,00	151,00	134.816.240,00	71,00	13.873.500,00	48,00	51.414.420,00	672,00	236.713.260,00	121,52	97,98	2471,00	1.384.308.172,00	74,88	39,21	Badan Kepegawaian Daerah
	Proses Perpindahan dan Penempatan PNS	Penempatan/Per pindahan PNS Daerah	orang	2820	758.770.900,00	1143	318.193.113,00	200	58.689.960,00	200	58.689.960,00	75,00	1.514.500,00	57,00	6.409.800,00	119,00	15.403.400,00	0,00	30.726.420,00	251,00	54.054.120,00	125,50	92,10	1394,00	372.247.233,00	49,43	49,06	Badan Kepegawaian Daerah
	Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Peserta telah jabatn pimpinan tinggi	orang	500	2.106.259.500,00	114	917.798.199,00	10	199.070.000,00	10	199.070.000,00	0,00	-	0,00	-	10,00	-	0,00	186.269.000,00	10,00	186.269.000,00	100,00	93,57	124,00	1.104.067.199,00	24,80	52,42	Badan Kepegawaian Daerah
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	12.530.000.000,00	100	3.843.834.179,00	100	1.610.556.444,00	100	1.708.684.444,00	21,20	362.325.945,00	21,76	371.813.747,00	13,11	223.994.021,00	42,38	724.184.310,00	98,46	1.682.318.023,00	98,46	98,46	198,46	5.526.152.202,00	198,46	44,10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat- surat yang terkirim	Lembar	2405	3.277.000.000,00	590	890.770.000,00	649	396.700.000,00	649	341.700.000,00	73,00	42.890.000,00	245,00	111.170.000,00	96,00	76.470.000,00	235,00	104.420.000,00	649,00	334.950.000,00	100,00	98,02	1239,00	1.225.720.000,00	51,52	37,40	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening/kwitansi dan Listrik	Paket	23	1.349.000.000,00	5	342.151.380,00	5	143.072.400,00	5	173.018.700,00	2,00	50.664.419,00	1,00	36.452.327,00	1,00	19.871.456,00	1,00	55.243.627,00	5,00	162.231.829,00	100,00	93,77	10,00	504.383.209,00	43,48	37,39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan	Unit	155	1.190.000.000,00	28	303.095.315,00	31	139.530.000,00	31	214.770.000,00	5,00	34.847.118,00	9,00	54.625.422,00	4,00	23.848.565,00	13,00	94.138.922,00	31,00	207.460.027,00	100,00	96,60	59,00	510.555.342,00	38,06	42,90	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki	Unit	44	183.000.000,00	28	80.000.000,00	30	31.330.000,00	30	61.610.000,00	16,00	22.380.000,00	6,00	7.970.000,00		860.000,00	8,00	30.359.000,00	30,00	61.569.000,00	100,00	99,93	58,00	141.569.000,00	131,82	77,36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Paket	60	415.000.000,00	18	72.824.700,00	40	50.137.800,00	40	50.137.800,00	10,00	10.341.800,00	10,00	15.454.500,00	15,00	20.625.800,00	5,00	3.680.000,00	40,00	50.102.100,00	100,00	99,93	58,00	122.926.800,00	96,67	29,62	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Lembar	1200	342.000.000,00	242	106.940.000,00	266	23.590.000,00	266	23.590.000,00	0,00	-	133,00	11.250.000,00	133,00	12.000.000,00		-	266,00	23.250.000,00	100,00	98,56	508,00	130.190.000,00	42,33	38,07	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	Unit	57	1.209.000.000,00	10	681.503.000,00	240	130.991.244,00	12	145.906.244,00	0,00	-	-	-	-	12,00	145.298.000,00	12,00	145.298.000,00	100,00	99,58	22,00	826.801.000,00	38,60	68,39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang di beli	Unit	22	24.000.000,00	8	187.264.000,00	18	2.895.000,00	18	2.895.000,00	0,00	-	-	18,00	2.845.000,00		-	18,00	2.845.000,00	100,00	98,27	26,00	190.109.000,00	118,18	792,12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah jenis Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terbitan	104	220.000.000,00		36.775.000,00	44	60.080.000,00	44	60.080.000,00	0,00	-	-	-	-	44,00	60.000.000,00	44,00	60.000.000,00	100,00	99,87	44,00	96.775.000,00	42,31	43,99	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ASN dan Non ASN	Kotak	3093	433.000.000,00	653	161.574.000,00	719	55.290.000,00	719	58.036.700,00	240,00	21.255.000,00	120,00	10.440.000,00	190,00	14.200.000,00	169,00	12.100.000,00	719,00	57.995.000,00	100,00	99,93	1372,00	219.569.000,00	44,36	50,71	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti	Laporan	275	1.618.000.000,00	47	455.587.009,00	52	306.121.000,00	52	306.121.000,00	17,00	131.380.608,00	7,00	41.901.498,00	8,00	42.823.200,00	20,00	89.957.761,00	52,00	306.063.067,00	100,00	99,98	99,00	761.650.076,00	36,00	47,07	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang diikuti	Laporan	447	1.832.000.000,00	83	499.861.000,00	92	260.535.000,00	92	260.535.000,00	17,00	46.003.000,00	32,00	82.550.000,00	1,00	8.360.000,00	42,00	123.357.000,00	92,00	260.270.000,00	100,00	99,90	175,00	760.131.000,00	39,15	41,49	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Jumlah ASN peserta rapat	Laporan	40	200.000.000,00	-	44	5.630.000,00	1	5.630.000,00	0,00	-	-	-	-	-	1,00	5.630.000,00	1,00	5.630.000,00	100,00	100,00	1,00	5.630.000,00	2,50	2,82	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah alat pembersih	Unit	51	43.000.000,00	-	40	4.654.000,00	40	4.654.000,00	23,00	2.564.000,00	-	17,00	2.090.000,00		-	40,00	4.654.000,00	100,00	100,00	40,00	4.654.000,00	78,43	10,82	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	74.990.000.000,00	0	-	100	538.605.000,00	100	538.605.000,00	99,70	537.000.000,00	-	-	-	-	-	99,70	537.000.000,00	99,70	99,70	99,70	537.000.000,00	99,70	0,72	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang didadikan	unit	1	250.000.000,00			1	538.605.000,00	1	538.605.000,00	1,00	537.000.000,00			0,00	-	0,00	-	1,00	537.000.000,00	100,00	99,70	1,00	537.000.000,00	100,00	214,80	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pengadaan Gedung Pusat Pengembangan SDM	Jumlah prasarana/Gedu- ng	unit																0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	Patuh		642.000.000,00	98.550.000,00		83.405.000,00		83.405.000,00		-	50.760.000,00		-			32.630.000,00	0,00	83.390.000,00	#DIV/0!	99,98	0,00	181.940.000,00	#DIV/0!	28,34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pasang	205	179.000.000,00	60	46.300.000,00	68	50.775.000,00	68	50.775.000,00	0,00	68,00	50.760.000,00		-		-	68,00	50.760.000,00	100,00	99,97	128,00	97.060.000,00	62,44	54,22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pasang	140	95.000.000,00	60	52.250.000,00	72	32.630.000,00	72	32.630.000,00	0,00						32.630.000,00	0,00	32.630.000,00	0,00	100,00	60,00	84.880.000,00	42,86	89,35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Pengadaan Pakaian Adat/Kedasterahan	Jumlah Pasang Pakaian adat/Kedasterahan	Pasang	40	50.000.000,00			68	-	68	-	0,00							0,00	-	0,00	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	-	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas	Persen	180	15.587.000.000,00		1.504.677.514,00	100	207.341.900,00	100	193.456.900,00	40,74	49.078.400,00		31.400.000,00	59,26	98.294.000,00	0,00	10.366.900,00	100,00	189.139.300,00	100,00	97,77	100,00	1.693.816.814,00	55,56	10,87	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
												I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13x100		15 = 13x6		16 = 15x100				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Peserta Diklat	Orang	122	1.252.000.000,00	22	334.790.400,00	24	56.226.000,00	24	56.226.000,00	22,00	49.078.400,00			2,00	5.634.000,00			-	24,00	54.712.400,00	100,00	97,31	46,00	389.502.800,00	37,70	31,11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	60	960.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Diklat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan	Jumlah ASN Peserta Diklat	Orang	186	1.462.000.000,00	30	249.852.000,00	30	151.115.900,00	30	137.230.900,00	0,00		31.400.000,00	30,00	92.660.000,00		10.366.900,00	30,00	134.426.900,00	100,00	97,96	60,00	384.278.900,00	32,26	26,28		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	44.000.000,00	Tepat Waktu	32.942.000,00	Tepat Waktu	36.900.000,00	Tepat Waktu	36.900.000,00	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	36.900.000,00	Tepat Waktu	36.900.000,00	Tepat Waktu	100,00	Tepat Waktu	69.842.000,00	Tepat Waktu	158,73		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan	dokumen	4	9.000.000,00	4	6.516.000,00	4	4.550.000,00	4	4.550.000,00							4,00	4.550.000,00	4,00	4.550.000,00	100,00	100,00	8,00	11.066.000,00	200,00	122,96		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan	dokumen	3	7.000.000,00	2	5.016.000,00	2	4.550.000,00	2	4.550.000,00							2,00	4.550.000,00	2,00	4.550.000,00	100,00	100,00	4,00	9.566.000,00	133,33	136,66		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan	dokumen	1	7.000.000,00	1	5.020.000,00	1	4.550.000,00	1	4.550.000,00							1,00	4.550.000,00	1,00	4.550.000,00	100,00	100,00	2,00	9.570.000,00	200,00	136,71		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyusunan Renstra/Renja/Lakip dan LPPD	Jumlah dokumen laporan	dokumen	3	7.000.000,00	4	5.020.000,00	4	4.550.000,00	4	4.550.000,00							4,00	4.550.000,00	4,00	4.550.000,00	100,00	100,00	8,00	9.570.000,00	266,67	136,71		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyusunan RKA/DPA- SKPD	Jumlah dokumen laporan	dokumen	2	7.000.000,00	1	5.350.000,00	1	9.350.000,00	1	9.350.000,00							1,00	9.350.000,00	1,00	9.350.000,00	100,00	100,00	2,00	14.700.000,00	100,00	210,00		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Penyusunan RKA-PIDPPA- SKPD	Jumlah dokumen laporan	dokumen	2	7.000.000,00	1	6.020.000,00	1	9.350.000,00	1	9.350.000,00							1,00	9.350.000,00	1,00	9.350.000,00	100,00	100,00	2,00	15.370.000,00	100,00	219,57		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Proporsi ASN yang memperoleh pembinaan dan Pengembangan	Persen	120	17.972.000.000,00		6.438.215.076,00	100	1.588.336.400,00	100	1.504.093.400,00	1,99	46.723.800,00	1,33	107.130.000,00	93,69	932.244.296,00	1,99	381.910.000,00	99,00	1.468.008.096,00	99,00	97,60	99,00	7.906.223.172,00	82,50	43,99		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Diklat Kepemimpinan	Jumlah Peserta	Orang	274	9.127.000.000,00	50	2.315.183.091,00	55	1.064.856.200,00	55	1.015.453.200,00	0,00	4.038.000,00	3,00	98.513.000,00	40,00	618.382.196,00	2,00	271.152.000,00	45,00	992.085.196,00	81,82	97,70	95,00	3.307.268.287,00	34,67	36,24		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Pengembangan Widyaiswara	Jumlah Peserta	Orang	15	762.000.000,00	6	346.065.967,00	6	150.924.000,00	6	150.924.000,00	6,00	42.685.800,00	1,00	8.617.000,00	2,00	16.060.900,00	4,00	71.638.000,00	13,00	139.001.700,00	216,67	92,10	19,00	485.067.667,00	126,67	63,66		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Diklat Dasar Bagi CPNS	Jumlah Peserta	Orang	355	998.000.000,00	274	2.102.438.828,00	280	-	-	-	0,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	274,00	2.102.438.828,00	77,18	210,67		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Melaksanakan Uji Kompetensi Bagi ASN	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	30	370.000.000,00		0	-	-	-	-	0,00								0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Peningkatan Kapasitas LSP - PDN se-Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Peserta Diklat	Orang	30	550.000.000,00		0	240	372.556.200,00	240	337.716.200,00	0,00				240,00	297.801.200,00		39.120.000,00	240,00	336.921.200,00	100,00	99,76	240,00	336.921.200,00	800,00	61,26		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																														
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		549630700		64628760		0		307867430		150825357,00		523321547,00		95,21														Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96	122400000	3,00	1080000	-	0	63,00	81320000	30,00	40000000,00	96,00	122400000,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tidak Ada			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	32	39046780	6,00	8693540	-	0	16,00	19829000	10,00	10134000,00	32,00	38656540,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	4	10448900	-	0	-	0	2,00	6019700	2,00	4419000,00	4,00	10438700,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	4	4114000	1,00	1920000	-	0	1,00	1654400	2,00	539600,00	4,00	4114000,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundangan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12	1237000	-	0	-	0	6,00	632000	6,00	500000,00	12,00	1132000,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman	3	56932000	0,50	12375000	-	0	2,00	32690000	0,50	11374000,00	3,00	56439000,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi	19	133692000	2,00	22416200	-	0	15,00	75636198	2,00	12471629,00	19,00	110526027,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi	44	181760020	4,00	18142020	-	0	25,00	90086132	15,00	71387128,00	44,00	179615280,00							Balitbangda	Subar	Januari s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
10	Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak	Jumlah Jasa Publikasi Media Cetak	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00							Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
11	Rapat Koordinasi Kelitbang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00											Tidak ada di Tahun 2020				Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		119890000		7877017		0		58994588		32108822,00		98980407,00																Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020			Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020			Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capatan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K			K			K			K			I		II		III		IV		K		K		K		K		
				K	Re		K	Re		K	Re		K	Re		K	Re		K	Re		K	Re		K	Re		K	Re		K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13x100	15 = 13x6	16 = 15x100	17																
1	Pengadaan Kendaraan Dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Tidak ada di Tahun 2020	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
4	Pengadaan Meubelur	Jumlah Mebeleur	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki	16	6340000	3,00	1980000	-	0	5,00	1785000	8,00	2500000,00	16,00	6265000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	29	10960000	-	0	-	0	15,00	5055000	14,00	5055000,00	29,00	10110000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
7	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diperbaiki	7	102590000	0,50	5897017	0	4,00	52154568	2,50	24553822,00	7,00	82605407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		44232000	0	0	0	43350000	0,00	43350000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1	Pengadaan pakaian Dinas serta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	55	44232000	-	0	-	0	55,00	43350000	-	0,00	55,00	43350000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d April	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2	Pengadaan Pakaian Seragam Olahraga	Jumlah Pakaian Seragam Olahraga	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	-	-	-	Tidak ada di Tahun 2020	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangannya		23928800	23928800	0	0	0	0,00	-	23928800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi melalui pendidikan formal	5	23928800	5,00	23928800	-	0	-	0	-	0,00	5,00	23928800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Maret	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		154298700	12133500	0	0	85724400	52840800,00	-	150698700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	1	115985200	-	0	-	0	-	73385200	1,00	39000000,00	1,00	112385200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	1	3638400	-	0	-	0	1,00	3638400	-	0,00	1,00	3638400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	11143200	1,00	11143200	-	0	-	0	-	0,00	1,00	11143200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
4	Penyusunan RKA/DPA SKPD	Jumlah RKA/DPA SKPD	2	9190800	-	0	-	0	1,00	4540800	1,00	4650000,00	2,00	9190800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5	Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD	Jumlah RKA/DPA SKPD	2	9190800	-	0	-	0	-	0	2,00	9190800,00	2,00	9190800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
6	Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPD)	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD)	1	5150300	-	990300	-	0	1,00	4160000	-	0,00	1,00	5150300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
7	Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	1	4741200	1,00	4741200	-	0	-	0	-	0,00	1,00	4741200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
8	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Pemerintahan Daerah (LPPD)	1	5477200	-	0	-	0	1,00	5477200	-	0,00	1,00	5477200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
9	Penyusunan rencana kerja (renja) OPD	Jumlah rencana kerja Perubahan (Renja) OPD	2	12376800	-	0	-	0	1,00	8956800	1,00	3420000,00	2,00	12376800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
VI	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK			347051000	0	0	0	51103499	275973800,00	327077299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1	Festival Teknologi daerah dan Nasional	Jumlah Peserta Festival	25	200000000	-	0	-	0	-	0	25,00	189972000,00	25,00	189972000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	Oktober s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2	Focus Group Discussion Pengembangan IPTEK	Jumlah Laporan Hasil FGD	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	Mamuju	-	-	-	Tidak Ada di Tahun 2020	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
3	Penyusunan Jurnal Kelitbang "Melayati"	Jumlah Cetakan Jurnal	2	100000000	-	0	-	0	2,00	24380000	2,00	67881800,00	2,00	92279800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	-	-	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
4	Lomba Penulisan Karya Ilmiah Penerapan IPTEK	Jumlah Peserta Lomba	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Balitbangda	-	-	-	-	Tidak Ada di Tahun 2020	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020				Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17																		
5	Koordinasi dan Konsultasi Bidang IPTEK	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Konsultasi	9	47051000	-	0	-	0	6,00	26705499	3,00	18120000,00	9,00	44825499,00					Balitbangda		Januari s/d Desember	Dana Bagi Hasil (DBH)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
6	Dewan Riset Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Daerah	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
VII	Program Pengembangan Sosial Budaya			368817600		0		0		107737000		251281400,00		359018400,00															Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Penelitian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian	1	321283000	-	0	-	0	-	95997000	1,00	223281400,00	1,00	318878400,00					Balitbangda	Subar	April s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
2	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sosial Budaya	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Konsultasi	9	47534600	-	0	-	0	2,00	12140000	7,00	28000000,00	9,00	40140000,00					Balitbangda	Subar	Januari s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
VIII	Program Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah			50036000		22992900		0		20630000		4520000,00	-	48142900,00															Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Focus Group Discussion Bidang Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah	Jumlah Laporan Hasil FGD	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda								Tidak Ada di Tahun 2020		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
2	Kajian Pengembangan Sumber Daya Genetik Prov. Subar	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda	Mamuju		Dana Bagi Hasil (DBH)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
3	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi & Prasarana Wilayah	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Konsultasi	9	50036000	4,00	22992900	-	0	4,00	20630000	1,00	4520000,00	9,00	48142900,00					Balitbangda	Subar	Januari s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4	Kajian Mitigasi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda								Tidak Ada di Tahun 2020		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
5	Kajian Pengembangan Komoditas Sumber Daya Lokal dalam Upaya Mendukung OVP	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Konsultasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda								Tidak Ada di Tahun 2020		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
IX	Program Sistem Inovasi Daerah			308750000		0		0		1470000		306577000,00		308047000,00															Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Kajian Pengembangan Industri Perikanan Prov. Subar	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1	308750000	-	0	-	0	-	1470000	1,00	306577000,00	1,00	308047000,00					Balitbangda	Subar	April s/d Desember	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tidak Ada	Tidak Ada					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
2	Kajian Pengembangan Industri Pertanian Prov. Subar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kajian	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda								Tidak Ada di Tahun 2020		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
X	Program Pengembangan Sumber Daya Alam & Lingkungan			1470000		0		0		1470000		0,00		1470000,00															Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Kajian Pengelolaan & Pengembangan Hutan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1	1470000	-	0	-	0	1,00	1470000	-	0,00	-	1470000,00					Balitbangda		Februari	Dana Bagi Hasil (DBH)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
XI	Program Tata Kelola Pemerintahan			0		0		0		0		0,00		0,00															Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
1	Focus Group Discussion Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah Laporan hasil FGD	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda									Tidak Ada di Tahun 2020		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
2	Facilitasi Majelis Perimbangan/Tim Pengendali Mutu/Tim Kelengkapan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda			Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Refocusing - Covid 19	Tambahan Anggaran					Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
3	Survey Pelayanan Pemerintah tnd Publik	Jumlah Dokumen Hasil Survey	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00					Balitbangda								Tidak Ada di Tahun 2020		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI																																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian layanan administrasi perkantoran	%	455	12.337.035.215,00	240	1.789.324.757,00	90	1.195.671.630,00	90	1.184.949.430,00	21,96	289.123.827,00	23,99	315.918.121,00	20,58	270.928.084,00	23,34	307.250.678,00	89,87	1.183.220.710,00	99,85	99,85	329,87	2.972.545.467,00	72,50	24,09			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Paket dan Dokumen yang dihasilkan	lembar	2500	2.676.300.000,00	1500	406.179.000,00	500	408.618.000,00	500	389.079.000,00	2,70	2.100.000,00	245,14	190.761.000,00	126,48	98.418.000,00	125,68	97.800.000,00	500,00	389.079.000,00	100,00	100,00	2000,00	795.258.000,00	80,00	29,71			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbawakan	rekening	25	1.366.068.000,00	12	182.829.243,00	4	192.032.400,00	4	192.033.736,00	1,14	54.586.027,00	0,79	38.145.621,00	1,09	52.254.384,00	0,98	47.007.078,00	4,00	191.993.110,00	99,98	99,98	16,00	374.822.353,00	64,00	27,44			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan jasa kebersihan	Jumlah jasa outsourcing yang dianggarkan	orang	16	1.537.359.000,00	9	282.471.000,00	4	234.683.500,00	4	188.135.500,00	1,00	47.032.000,00	0,57	26.862.000,00	1,14	53.724.000,00	1,26	59.162.000,00	3,97	186.780.000,00	99,28	99,28	12,97	469.251.000,00	81,07	30,52			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dianggarkan	jenis	230	465.526.000,00	137	52.356.000,00	45	31.531.980,00	45	46.412.180,00	25,86	26.670.000,00	1,43	1.470.000,00	3,29	3.391.500,00	14,43	14.880.500,00	45,00	46.412.000,00	100,00	100,00	182,00	98.768.000,00	79,13	21,22			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan cetak dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang dianggarkan	jenis	55	324.476.250,00	33	47.682.000,00	11	32.773.750,00	11	32.773.750,00	8,42	25.100.000,00	2,23	6.650.000,00	0,34	1.020.000,00	0,00	-	11,00	32.770.000,00	99,99	99,99	44,00	80.452.000,00	80,00	24,79			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik dan elektrik yang dianggarkan	jenis	110	237.542.600,00	66	44.211.000,00	22	23.452.000,00	22	37.310.264,00	13,72	23.260.000,00	0,11	192.000,00	0,00	-	8,17	13.858.000,00	22,00	37.310.000,00	100,00	100,00	88,00	81.521.000,00	80,00	34,32			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dianggarkan	jenis	30	707.701.000,00	18	63.418.000,00	24	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	18,00	63.418.000,00	0,00	8,96			Badan Penghubung Provinsi				
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplar	115	1.235.624.000,00	69	164.688.000,00	23	8.802.000,00	23	8.802.000,00	9,41	3.600.000,00	6,27	2.400.000,00	7,32	2.800.000,00	0,00	-	22,99	8.800.000,00	99,98	99,98	91,99	173.488.000,00	80,00	14,04			Badan Penghubung Provinsi				

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kunjungan dan rapat yang terlaksana	kali	120	341.030.000,00	72	59.060.000,00	24	24.520.000,00	24	44.995.000,00	7,96	14.930.000,00	1,59	2.990.000,00	3,12	5.850.000,00	11,32	21.225.000,00	24,00	44.995.000,00	100,00	100,00	96,00	104.055.000,00	80,00	30,51	Badan Penghubu ng Provinsi
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah yang diterima	laporan	300	2.158.540.000,00	180	315.376.514,00	60	134.498.000,00	60	141.248.000,00	35,50	83.575.800,00	0,00	-	11,81	27.800.200,00	12,58	29.618.100,00	59,89	140.994.100,00	99,82	99,82	239,89	456.370.614,00	79,96	21,14	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga security yang digunakan	orang	18	676.738.000,00	9	140.004.000,00	4	93.600.000,00	4	93.000.000,00	0,06	1.500.000,00	1,91	44.328.000,00	1,01	23.400.000,00	1,02	23.700.000,00	4,00	92.928.000,00	99,92	99,92	13,00	232.932.000,00	72,21	34,42	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyediaan jasa tol dan parkir	Jumlah kendaraan yang menggunakan akomodasi tol dan parkir	unit	53	609.930.365,00	30	31.050.000,00	13	11.160.000,00	8	11.160.000,00	4,85	6.770.000,00	1,52	2.119.500,00	1,63	2.270.000,00	0,00	-	8,00	11.159.500,00	100,00	100,00	38,00	42.209.500,00	71,70	6,92	Badan Penghubu ng Provinsi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	455	14.806.651.658,00	240	1.705.141.395,00	100	854.390.500,00	95	1.215.090.900,00	15,11	193.306.552,00	43,75	559.629.460,00	3,28	42.000.000,00	32,85	420.127.040,00	95,00	1.215.063.052,00	100,00	100,00	335,00	2.920.204.447,00	73,63	19,72	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	17	4.376.839.000,00	3	452.860.000,00	1	532.730.500,00	2	519.810.000,00	0,00	-	1,99	517.400.000,00	0,00	-	0,01	2.410.000,00	2,00	519.810.000,00	100,00	100,00	5,00	972.670.000,00	29,41	22,22	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	25	1.081.120.000,00	15	196.743.000,00	18	7.900.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	15,00	196.743.000,00	60,00	18,20	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	gedung	13	4.636.455.658,00	6	206.602.584,00	3	69.620.000,00	3	138.320.000,00	0,00	-	0,19	8.688.460,00	0,74	34.000.000,00	2,07	95.631.540,00	3,00	138.320.000,00	100,00	100,00	9,00	344.922.584,00	69,23	7,44	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	unit	19	1.836.610.000,00	9	336.832.500,00	2	88.950.000,00	4	230.130.000,00	1,10	63.058.451,00	0,29	16.621.000,00	0,00	-	2,61	150.437.500,00	4,00	230.116.951,00	99,99	99,99	13,00	566.949.451,00	68,42	30,87	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional al yang terpelihara	unit	66	2.592.110.000,00	36	449.815.311,00	14	134.020.000,00	12	295.900.900,00	4,89	120.648.101,00	0,43	10.500.000,00	0,12	2.850.000,00	6,57	161.898.000,00	12,00	295.896.101,00	100,00	100,00	48,00	745.711.412,00	72,73	28,77	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	jenis	18	283.517.000,00	9	62.288.000,00	5	21.170.000,00	5	30.930.000,00	1,55	9.600.000,00	1,04	6.420.000,00	0,83	5.150.000,00	1,58	9.750.000,00	5,00	30.920.000,00	99,97	99,97	14,00	93.208.000,00	77,77	32,88	Badan Penghubu ng Provinsi
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan aparatur	Tingkat Kepatuhan	Patuh	405.645.000,00	Patuh	122.153.000,00	Patuh	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Patuh	122.153.000,00	Patuh	30,11	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	set	19	405.645.000,00	3	122.153.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	122.153.000,00	15,79	30,11	Badan Penghubu ng Provinsi
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya	%	455	352.000.000,00	240	64.836.400,00	95	7.640.000,00	95	6.640.000,00	31,67	2.580.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	-	0,00	-	31,67	6.580.000,00	33,33	99,10	271,67	71.416.400,00	59,71	20,29	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikut pendidikan dan pelatihan formal	orang	13	352.000.000,00	11	64.836.400,00	3	7.640.000,00	3	6.640.000,00	1,00	2.580.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	-	0,00	-	1,00	6.580.000,00	33,33	99,10	12,00	71.416.400,00	92,31	20,29	Badan Penghubu ng Provinsi
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tepat Waktu/Tid ak		871.048.127,00	Tepat Waktu	120.470.500,00	Tepat Waktu	122.402.000,00	Tepat Waktu	140.495.800,00	Tepat Waktu	11.680.800,00	Tepat Waktu	47.700.000,00	Tepat Waktu	26.180.000,00	Tepat Waktu	54.934.800,00	Tepat Waktu	140.495.600,00	50,93	100,00	Tepat Waktu	260.966.100,00	Tepat Waktu	29,96	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	laporan	60	695.001.127,00	36	104.385.500,00	12	101.860.200,00	12	101.860.200,00	3,00	4.130.000,00	3,00	47.700.000,00	3,00	26.180.000,00	3,00	23.850.000,00	12,00	101.860.000,00	100,00	100,00	48,00	206.245.500,00	80,00	29,68	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan semesteran yang tersusun	laporan	10	22.262.000,00	0	-	2	3.826.600,00	2	7.655.600,00	0,00	-	0,00	-	-	-	2,00	7.655.600,00	2,00	7.655.600,00	100,00	100,00	2,00	7.655.600,00	20,00	34,39	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	laporan	5	35.907.000,00	1	7.707.000,00	1	2.836.400,00	1	4.116.400,00	0,00	-	0,00	-	-	-	1,00	4.116.400,00	1,00	4.116.400,00	100,00	100,00	2,00	11.823.400,00	40,00	32,93	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPD	Jumlah dokumen Renstra/Renja/ LAKIP dan LPD SKPD	dokumen	5	35.078.000,00	0	-	4	6.328.000,00	4	13.082.000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	4,00	13.082.000,00	4,00	13.082.000,00	100,00	100,00	4,00	13.082.000,00	80,00	37,29	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyusunan Laporan RKA-DIPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- DIPA SKPD yang tersusun	dokumen	5	27.000.000,00	1	8.378.000,00	1	7.550.800,00	1	7.550.800,00	1,00	7.550.800,00	0,00	-	-	-	0,00	-	1,00	7.550.800,00	100,00	100,00	2,00	15.928.800,00	40,00	59,00	Badan Penghubu ng Provinsi
	Penyusunan Laporan RKAP/DPPA SKPD	Jumlah Dokumen RKAP/DPPA- SKPD yang tersusun	dokumen	20	55.800.000,00	0	-	1	-	1	6.230.800,00	0,00	-	0,00	-	-	-	1,00	6.230.800,00	1,00	6.230.800,00	100,00	100,00	1,00	6.230.800,00	5,00	11,17	Badan Penghubu ng Provinsi
	Bidang Urutan Pemerintahan																											Badan Penghubu ng Provinsi
	Program peningkatan pelayanan kedinas kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di luar dan dalam daerah	%	300	4.072.160.000,00	300	1.072.251.174,00	100	723.141.595,00	100	706.069.595,00	47,62	136.599.300,00	1,19	247.020.000,00	15,48	126.850.000,00	55,95	195.586.600,00	120,24	706.055.900,00	120,24	100,00	420,24	1.778.307.074,00	140,08	43,67	Badan Penghubu ng Provinsi
	Pelayanan Kedinasan Protokoler	Jumlah Kegiatan Fasilitas Pelayanan Kedinasan Protokoler	kali	419	4.072.160.000,00	335	1.072.251.174,00	84	723.141.595,00	84	706.069.595,00	40,00	136.599.300,00	1,00	247.020.000,00	13,00	126.850.000,00	47,00	195.586.600,00	101,00	706.055.900,00	120,24	100,00	436,00	1.778.307.074,00	104,06	43,67	Badan Penghubu ng Provinsi
	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah	%	100	287.000.000,00	0	-	100	121.753.900,00	100	121.753.900,00	0,00	4.000.000,00	0,00	56.406.000,00	0,00	29.400.000,00	0,00	22.351.000,00	0,00	112.157.000,00	0,00	92,12	0,00	112.157.000,00	0,00	39,08	Badan Penghubu ng Provinsi

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	15 = 13+6	16 = 15*100	17												
	Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di Jakarta	Jumlah kerjasama promosi potensi daerah pada event promosi di Jakarta	event	4	287.000.000,00	3	-	1	121.753.900,00	1	121.753.900,00	0,00	4.000.000,00	0,00	56.406.000,00	0,00	29.400.000,00	0,00	22.351.000,00	0,00	112.157.000,00	0,00	92,12	3,00	112.157.000,00	75,00	39,08	Badan Penghubung Provinsi
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Data dan Informasi; Pengadaan Audio Visual dan Media Display untuk Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Subur	data dan paket	1	410.000.000,00	0	-	1 data	-	100	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Penghubung Provinsi
	Pengadaan Media Audio Visual Layer Semuh dan Media Display Produk khas Sulawesi Barat	Jumlah data dan informasi Provinsi Sulawesi Barat	paket	1	244.800.000,00	0	-	1	-	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Penghubung Provinsi
	Pengelolaan Website Badan Penghubung Provinsi	Pengadaan Audio Visual dan Media Display untuk Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Sulawesi Barat Kepada Masyarakat dan Stakeholder	data	1	165.200.000,00	0	-	1	-	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Penghubung Provinsi
INSPEKTORAT																												
4.02.4.02. 01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi pengelolaan	0,96	96	7.239.716.351,00	1	4.783.450.677,00	0,97	1.594.008.100,00	1	1.559.020.448,00	0,24	319.789.193,00	0,23	222.605.647,00	0,25	435.788.860,00	0,25	580.836.748,00	0,97	1.559.020.448,00	100,00	100,00	1,96	6.342.471.125,00	2,04	87,61	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga yang menangani surat menyurat	1	1	231.643.000,00	1	103.095.350,00	1	110.010.000,00	1	107.485.000,00	0,25	16.285.800,00	0,25	23.046.000,00	0,25	29.218.700,00	0,25	38.934.500,00	1,00	107.485.000,00	100,00	100,00	2,00	210.580.350,00	200,00	90,91	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening yang terbayarkan	36 Rekening	144	701.937.600,00	108	448.598.915,00	36	95.156.600,00	36	81.154.397,00	9,00	22.273.900,00	9,00	11.234.670,00	9,00	26.414.010,00	9,00	21.231.817,00	36,00	81.154.397,00	100,00	100,00	144,00	529.753.312,00	100,00	75,47	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.05	Penyediaan jasa jaminan milk daerah	Jumlah Barang Milk Daerah yang diserahkan	2 Unit	12	93.115.410,00	8	92.911.765,00													0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	8,00	92.911.765,00	66,67	99,78	Inspektorat	
4.02.4.02. 01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang dioperasikan	24	104	1.522.457.495,00	72	723.841.404,00	24	323.430.000,00	24	312.774.720,00	4,00	34.377.577,00	4,00	62.104.397,00	8,00	109.687.590,00	8,00	106.605.156,00	24,00	312.774.720,00	100,00	100,00	96,00	1.036.616.124,00	92,31	68,09	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah ruangan yang bersih	0,73	171	1.159.905.000,00	27	840.901.170,00	9	248.251.000,00	9	248.249.560,00	3,00	47.826.200,00	3,00	57.600.000,00	2,00	69.451.550,00	2,00	73.371.810,00	10,00	248.249.560,00	111,11	100,00	37,00	1.089.150.730,00	21,64	93,90	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerja	Jumlah alat kantor yang diperbaiki	0,9956	1	110.029.000,00	1	79.033.738,00	1	30.335.000,00	1	30.335.000,00	0,25	8.771.000,00	0,25	15.235.000,00	0,25	6.329.000,00	0,25	6.329.000,00	1,00	30.335.000,00	100,00	100,00	2,00	109.368.738,00	200,00	99,40	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat kantor yang disediakan	0,9994	1	442.244.146,00	1	334.986.000,00	1	124.787.100,00	1	124.782.800,00	0,25	29.140.000,00	0,25	10.000.000,00	0,25	54.030.000,00	0,25	31.612.800,00	1,00	124.782.800,00	100,00	100,00	2,00	459.768.800,00	200,00	103,96	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah ruangan yang terfasilitasi komponen instalasi listrik dan penerangan	9	36	61.292.300,00	27	38.326.000,00	9	47.084.000,00	9	47.084.000,00	3,00	2.379.400,00	3,00	532.000,00	2,00	5.882.000,00	2,00	38.290.600,00	10,00	47.084.000,00	111,11	100,00	37,00	85.410.000,00	102,78	139,35	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50 macam	20	54.682.000,00	40	39.445.000,00	10	7.752.000,00	10	114.000,00								114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	100,00	40,00	39.559.000,00	200,00	72,34	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	0,9988	1	483.005.000,00	100%	333.995.856,00	1	148.529.000,00	1	148.528.105,00	0,25	32.851.630,00	0,25	16.293.100,00	0,25	63.190.850,00	0,25	36.192.525,00	1,00	148.528.105,00	100,00	100,00	2,00	482.523.961,00	200,00	99,90	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Provinsi)	7 Provinsi	37	1.540.247.000,00	100%	1.115.106.659,00	1	293.895.000,00	1	293.806.906,00	0,25	113.845.746,00	0,25	-	0,25	23.134.600,00	0,25	156.826.560,00	1,00	293.806.906,00	100,00	100,00	2,00	1.408.913.565,00	5,41	91,47	Inspektorat
4.02.4.02. 01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah wilayah tujuan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (Kabupaten/Kota)	6 Kabupaten	58	839.158.400,00	100%	633.208.820,00	1	164.778.400,00	1	164.705.960,00	0,25	12.037.940,00	0,25	41.795.480,00	0,25	39.544.560,00	0,25	71.327.980,00	1,00	164.705.960,00	100,00	100,00	2,00	797.914.780,00	3,45	95,09	Inspektorat
4.02.4.02. 01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	1.158.549.000,00		504.997.400,00	0,99	86.881.000,00	1	86.235.000,00	0,19	35.200.000,00			0,60	4.800.000,00	0,20	46.235.000,00	0,99	86.235.000,00	100,00	100,00	0,99	591.232.400,00	99,00	51,03	Inspektorat
4.02.4.02. 01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	24 Unit	5	99.670.000,00	2	89.190.000,00													0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2,00	89.190.000,00	40,00	89,49	Inspektorat
4.02.4.02. 01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0,9964	25	337.692.000,00	30	173.635.000,00	10	38.854.000,00	10	38.210.000,00							10,00	38.210.000,00	10,00	38.210.000,00	100,00	100,00	40,00	211.845.000,00	160,00	62,73	Inspektorat
4.02.4.02. 01.02.10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah mebeulair yang disediakan		28	129.631.000,00	15	50.890.000,00	5												0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	15,00	50.890.000,00	53,57	39,26	Inspektorat
4.02.4.02. 01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/Luas gedung kantor yang diceklabara	2.500 m2	2500 M2	591.556.000,00	2500	191.282.400,00	2500	48.027.000,00	2500	48.025.000,00	2500,00	35.200.000,00		4.800.000,00				8.025.000,00	2500,00	48.025.000,00	100,00	100,00	5000,00	239.307.400,00	#VALUE!	40,45	Inspektorat
4.02.4.02. 01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	1	1	336.033.000,00	1	212.583.000,00	100	125.063.000,00	100	124.623.000,00			100,00	122.980.000,00				1.643.000,00	100,00	124.623.000,00	100,00	100,00	101,00	337.206.000,00	10100,00	100,35	Inspektorat
4.02.4.02. 01.03.03.2	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut sebanyak jumlah pegawai	pasang	470	336.033.000,00	325	212.583.000,00	170	125.063.000,00		124.623.000,00			170,00	122.980.000,00				1.643.000,00	170,00	124.623.000,00	#DIV/0!	100,00	495,00	337.206.000,00	105,32	100,35	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I				II		III		IV		K	Re		K	Re	K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
4.02.4.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan	0,93	1	2.033.894.000,00	1.362.655.649,00	0,99	160.964.000,00	1	160.646.700,00	0,30	87.064.900,00	0,20	14.971.800,00	0,19	2.081.000,00	0,30	56.529.000,00	0,99	160.646.700,00	100,00	100,00	0,99	1.523.302.349,00	99,00	74,90	Inspektorat	
4.02.4.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Dilat Pembentukan, Penjenjangan Tenaga Fungsional Pengawas dan Teknis Substansi	34 Orang	193	1.620.957.000,00	1.114.617.969,00	12	103.113.000,00	12	102.795.700,00	3	65.914.900,00	3	14.971.800,00	3	480.000,00	3	21.429.000,00	12,00	102.795.700,00	100,00	100,00	45,00	1.217.413.669,00	23,32	75,10	Inspektorat	
4.02.4.02.01.05.60	Pelatihn pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	Jumlah jam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sengketa (PKS)	200 Jam	193	412.937.000,00	248.037.680,00	70	57.851.000,00	70	57.851.000,00	20,00	21.150.000,00	20,00		20,00	1.601.000,00	20,00	35.100.000,00	80,00	57.851.000,00	114,29	100,00	295,00	305.888.680,00	152,85	74,08	Inspektorat	
4.02.4.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1		-														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu (Paling lambat tanggal 10 bulan kemudian)			-														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan tepat waktu (Paling lambat tanggal 10 Januari tahun)			-														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
	Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	SPM, Register Pengesahan, Narsa, LRA, Cak			-														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDL	Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	0,97	1	20.062.570.585,00	13.370.903.504,00	1	3.798.193.000,00	1	3.779.084.281,00	0,25	893.536.526,00	0,25	849.890.595,00	0,25	819.118.780,00	0,25	1.216.538.380,00	1,00	3.779.084.281,00	100,00	100,00	1,00	17.149.987.785,00	100,00	85,48	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Komprehensif / PKPT	186 LHP	124	6.142.314.100,00	3.968.824.840,00	47	713.572.000,00	47	713.551.800,00	5,00	191.949.000,00	20,00	76.100.800,00	20,00	215.746.200,00	25,00	229.755.800,00	70,00	713.551.800,00	148,94	100,00	160,00	4.682.376.640,00	129,03	76,23	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.04	Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	1	1	1.930.321.509,00	1.208.041.600,00	1	798.652.300,00	1	793.246.820,00	0,25	206.213.940,00	0,25	175.935.800,00	0,25	238.715.500,00	0,25	172.381.580,00	1,00	793.246.820,00	100,00	100,00	2,00	2.001.288.420,00	200,00	103,68	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengesahan	Persentase temuan BPK yang dididaktikan	0,5	1	1.617.223.372,00	1.164.207.510,00	0,8	300.180.000,00	1	299.932.080,00	0,15	30.870.000,00	0,15	85.625.000,00	0,20	108.497.080,00	0,30	74.940.000,00	0,80	299.932.080,00	100,00	100,00	1,73	1.464.139.590,00	216,54	90,53	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.09	Revisi Laporan Keuangan QCD	Jumlah Laporan Hasil Revisi	40 LHP	164	361.550.000,00	216.491.382,00	42	105.842.000,00	42	105.219.400,00	41,00	59.437.400,00	41,00	21.420.000,00	41,00	480.000,00	41,00	23.882.000,00	164,00	105.219.400,00	390,48	100,00	287,00	321.710.782,00	175,00	88,98	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.10	Pelaksanaan Revisi Perencanaan OPD	Jumlah Laporan Hasil Revisi	40 LHR	281	652.834.000,00	322.565.000,00	168	232.675.000,00	168	232.500.000,00	42,00	36.370.000,00	75,00	99.490.000,00	51,00			136.640.000,00	168,00	232.500.000,00	100,00	100,00	316,00	555.065.000,00	112,46	85,02	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.20	Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Revisi LKIP	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi	9 LHE	167	197.614.000,00	179.393.400,00	42	27.746.000,00	42	26.086.000,00				23.730.000,00				2.356.000,00	0,00	26.086.000,00	0,00	100,00	130,00	205.479.400,00	77,84	103,98	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.14	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Jumlah Pemerintah Daerah yang dievaluasi	30 LHE	24	621.656.000,00	437.022.190,00	6	51.814.000,00	6	51.804.000,00				47.590.000,00				4.214.000,00	0,00	51.804.000,00	0,00	100,00	15,00	488.826.190,00	62,50	78,63	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.21	Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Penjab	5 LHP	0	-													0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Inspektorat		
4.02.4.02.01.20.11	Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov. Suber	Jumlah OPD yang mendapatkan pengawasan	50 SKPD	165	6.968.213.804,00	4.857.849.762,00	109	1.323.285.700,00	109	1.321.713.686,00	10,00	396.136.186,00	72,00	361.522.500,00	27,00	106.470.000,00	23,00	457.585.000,00	132,00	1.321.713.686,00	121,10	100,00	227,00	6.179.563.448,00	137,58	88,68	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.16	Pelaksanaan Monitoring Implementasi SPIP	Jumlah sampel OPD untuk menilai Tingkat Maturity SPIP	80 OPD	65	477.350.000,00	277.373.900,00	20	89.703.000,00	20	85.264.495,00			10,00	40.501.495,00	10,00	3.680.000,00	6,00	41.083.000,00	26,00	85.264.495,00	130,00	100,00	75,00	362.638.395,00	115,38	75,97	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.15	Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)	Terbitnya SK Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	5 SK	4	801.064.800,00	675.913.920,00	3												0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3,00	675.913.920,00	75,00	84,38	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.17	Pelaksanaan Revisi Penyerapan Anggaran dan PKJ	Jumlah Laporan Hasil Revisi	4 LHR	12	132.066.000,00	63.220.000,00	4	9.684.000,00	4	9.654.000,00	1,00	8.930.000,00	1,00		1,00			724.000,00	4,00	9.654.000,00	100,00	100,00	16,00	72.874.000,00	133,33	55,18	Inspektorat	
4.02.4.02.01.20.22	Revisi Dana DAK	Jumlah Laporan Hasil Revisi	3 LHR	4	160.363.000,00		33	145.039.000,00	33	140.112.000,00				52.415.000,00		14.720.000,00		72.977.000,00	0,00	140.112.000,00	0,00	100,00	0,00	140.112.000,00	0,00	87,37	Inspektorat	
4.01.4.02.01.53	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL	Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber Rendah)	%	1	4.820.594.600,00	2.859.537.673,00	100	431.641.600,00	100	427.303.810,00		3.700.000,00		960.000,00		225.835.750,00		196.808.060,00	100,00	427.303.810,00	100,00	100,00	100,00	3.286.841.483,00	10000,00	68,18	Inspektorat	
4.01.4.02.01.53.01	Money Dana Desa	% Desa terpenuhi peraturan Desa mengenai APBDesa dan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output desa	%	1	313.149.000,00	97.850.000,00	100	40.886.000,00	1	40.882.000,00						35.290.000,00	1,00	5.592.000,00	1,00	40.882.000,00	100,00	100,00	2,00	138.732.000,00	200,00	44,30	Inspektorat	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13*100		15 = 13+6		16 = 15*100		
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
4.01.4.02.01.53.02	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	% Sekolah yang dijdikan sampel Pemantauan Dana BOS	%	1	399.284.000,00	1	104.545.000,00	100	36.260.000,00	1	35.520.000,00					2.720.000,00	1,00	32.800.000,00	1,00	35.520.000,00	100,00	100,00	2,00	140.065.000,00	400,00	35,08	Inspektorat	
4.01.4.02.01.53.03	Operasionalisasi pemberantasan pungenitan liar (Pungli)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pungenitan Liar	%	32	4.108.161.600,00	28	2.657.142.673,00	6	354.495.600,00	6	350.901.810,00	1,00	3.700.000,00	1,00	960.000,00	2,00	187.825.750,00	2,00	158.416.060,00	6,00	350.901.810,00	100,00	100,00	34,00	3.008.044.483,00	106,25	73,22	Inspektorat
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	80	1	210.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup ODD	25	1	14.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	8	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	2	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	2	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	2	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun	Dokumen	2	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Laporan	8	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	14	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lokasi ODD	%	1	16.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	170	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	Persen	1	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD	Laporan	24	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD	Laporan	24	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun	Laporan	2	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disediakan	Persen	1	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Tersusun	Laporan	4	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	4	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen	1	14.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Disauragalkan	Unit	6	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat
6.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai	Unit	100	2.000.000,00															0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/3*100	15 = 13+6	16 = 15/3*100	17								
6.01.01.1. 03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 03.06	Penetusaahan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatusaahan Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 03.07	Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milk Daerah SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen	1	22.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disipln Pegawai	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan	Jenis	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a yang	Pasang	352	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaa	Dokumen	2	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kerukunannya	Persen	1	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kerukunannya	Persen	1	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitasi Pindah Tugas	Persen	1	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	48	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kelulusan pada Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Persen	1	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kelulusan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Persen	1	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen	1	22.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	6	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	6	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	6	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	6	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Diorganisasi	Jenis	6	2.000.000,00									0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2022	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggar Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re						
										K	Re	K	Re	K	Re	K	Re												
1	2	3	4	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	13 = 9+10+11+12	14 = 13*100	K	Re	15 = 13+6	16 = 15*100	17					
6.01.01.1. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Jenis	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material	Jenis	6	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu yang	Kunjungan Tamu yang	Persen	1	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	40	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 06.10	Penatausahaan Anisip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Anisip Dinamis SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Dokumen	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	1	90.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang	Unit	2	70.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang	Jenis	6	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang	Unit	45	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	1	8.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang	Persen	1	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang	Rekening Tagihan	48	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Phisik Keluar	Unit	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang	Jenis	2	2.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat
6.01.01.1. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	1	24.000.000,00													0,00		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		-	0,00		-	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
												I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17								
6.01.01.1. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaran Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	62	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	62	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	37	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.01.1. 09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	M2	2	2.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK atas penyajian laporan keuangan resmi	WTP	WTP	6.309.000.001,34							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	#VALUE!	-		-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	414	5.909.000.001,34							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	62	1.680.000.000,98							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	82	1.000.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01.03	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi	Laporan	164	429.000.000,36							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01.04	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi	Laporan	82	400.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	8	400.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan	Laporan	4	400.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Laporan Hasil Move	Laporan	12	1.600.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	Laporan	1	7.322.000.001,50							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	8	2.000.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.02.2. 02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	24	2.000.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti	Persen	1	2.422.000.001,50							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		
6.01.03.2. 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	8	900.000.000,00							0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Inspektorat		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	4	450.000.000,00														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen	4	450.000.000,00														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	% perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	%	1	1.522.000.001,50														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	8	522.000.001,50														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	4	300.000.000,00														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pembudayaan Korupsi	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	12	300.000.000,00														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan yang terbit	Laporan	6	400.000.000,00														0,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	-	0,00	-	Inspektorat	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																												
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.486.300,00		1.109.645,00		1.387.855,00		1.136.123,00		159.943,00		242.625,00		372.000,00		376.420,00		1.150.988,00							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah PTT yang diayaskan gajinya dan jumlah surat masuk keluar	PTT & Surat Masuk-Keluar/Bulan	60	525.500,00	12	408.390,00	12	420.692,00	12	350.858,00	0,00	-	6,00	147.037,00	3,00	158.327,00	3,00	152.225,00	12,00	457.588,00	100,00	130,42	24,00	808.447,00	40,00	153,84	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran bulan rekening telepon, air dan listrik	Bln	60	24.550,00	36	12.273,00	36	12.000,00	12	12.330,00	3,00	2.075,00	3,00	3.066,00	3,00	4.111,00	3,00	2.992,00	12,00	12.244,00	100,00	99,30	24,00	24.574,00	40,00	100,10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah item alat tulis kantor	Macam	22	65.000,00	22	43.837,00	22	45.393,00	12	50.328,00	3,00	11.721,00	3,00	11.600,00	3,00	16.230,00	3,00	16.412,00	12,00	55.963,00	100,00	111,20	24,00	106.291,00	109,09	163,52	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar fotocopy dan scan	Lembar Fotocopy & Scan/Bulan	3600	57.000,00	3600	34.673,00	3600	35.400,00	12	51.990,00	3,00	2.410,00	3,00	1.452,00	3,00	8.200,00	3,00	16.570,00	12,00	28.632,00	100,00	55,07	24,00	80.622,00	0,67	141,44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penerbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kali Terbit	10	58.250,00	10	24.000,00	10	200.000,00	12	56.150,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	12,00	56.150,00	120,00	96,39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kotak makan minum (sediakan)	Kotak	1272	75.000,00	1272	35.390,00	1272	48.240,00	12	50.090,00	3,00	12.320,00	3,00	5.200,00	3,00	22.890,00	3,00	23.280,00	12,00	63.690,00	100,00	127,15	24,00	113.780,00	1,89	151,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi	40	305.250,00	40	239.766,00	40	326.130,00	12	278.002,00	3,00	65.189,00	3,00	16.138,00	3,00	25.956,00	3,00	68.954,00	12,00	176.237,00	100,00	63,39	24,00	454.239,00	60,00	148,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Koordinasi	75	375.750,00	75	311.316,00	75	300.000,00	12	286.375,00	3,00	66.228,00	3,00	58.132,00	3,00	136.286,00	3,00	95.987,00	12,00	356.633,00		124,53	24,00	643.008,00	32,00	171,13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				605.636,00		237.511,00		242.159,00		227.220,00		16.845,00		18.839,00		55.619,00		155.685,00		246.988,00							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Unit	8	259.386,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Unit	4	-	1	45.305,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	s	Bulan	60	80.250,00	12	64.472,00	12	105.700,00	12	77.370,00	3,00	7.180,00	3,00	7.916,00	3,00	26.793,00	3,00	21.626,00	12,00	63.515,00	100,00	60,09	24,00	140.885,00	40,00	175,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional setiap bulan	Bulan	60	145.500,00	12	104.074,00	12	130.300,00	12	130.080,00	3,00	9.665,00	3,00	9.723,00	3,00	22.456,00	3,00	115.955,00	12,00	157.799,00	100,00	121,10	24,00	287.879,00	40,00	197,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor setiap bulan	Bulan	60	45.500,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor setiap bulan	Bulan	60	75.000,00	12	23.660,00	12	6.159,00	12	19.770,00	0,00	-	3,00	1.200,00	3,00	6.370,00	3,00	18.104,00	9,00	25.674,00	75,00	416,85	21,00	45.444,00	35,00	60,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				139.700,00		97.162,00		154.305,00		49.601,00		-		-		47.503,00		-		47.503,00		30,79				69,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Peningkatannya	Jumlah pakaian dinas yang telah bersedia	Pasang	78	139.700,00	78	97.162,00	76	154.305,00	76	49.601,00	0,00	-	0,00	-	1,00	47.503,00	0,00	-	1,00	47.503,00	1,32	30,79	77,00	97.104,00	98,72	69,51	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				925.000,00		336.499,00		426.000,00		326.900,00		9.513,00		24.060,00		92.302,00		99.634,00		225.509,00							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang telah mengikuti PIM III, IV dan pelatihan lainnya	Orang	32	50.000,00	5	18.500,00	10	27.000,00	5	26.900,00	2,00	9.513,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	9.513,00	20,00	35,23	7,00	36.413,00	21,88	72,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Rapat Kerja Teknis & Sinkronisasi Kegiatan Kesbangpol se-Sulawesi Barat	Jumlah peserta yg mengikuti raketek dan sinkronisasi kegiatan kesbangpol se-Sulawesi Barat	Orang	200	150.000,00	1	51.970,00	40	125.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-			0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
												I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 13+6		16 = 15/5*100		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
3	Rapat Koordinasi Tim Verifikasi, Move dan Pelaporan Bantuan Dana Hibah.	Jumlah peserta yg mengikuti rakor tim verifikasi, movev & pelaporan Bantuan Dana Hibah.	Orang	50	100.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
4	Rapat Koordinasi serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Subar.	Jumlah peserta movev pelaksanaan penyusunan SOP Badan Kesbangpol. Prov. Subar.	Orang	200	75.000,00	0	-	40	50.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
5	Tim Fasilitasi Pengolahan Data, Analisis Informasi & Kajian Strategis.	Jumlah tim fasilitasi pengolah data, analisis informasi & kajian strategis	Orang	1	150.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
6	Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah (RakorPinda) / Rapat Fasilitas Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FORKOPIMDA)	Jumlah pertemuan rapat fasilitas FORKOPIMDA	Orang/Kali	20	400.000,00	3	266.029,00	100	224.000,00	50	300.000,00	0,00	-	1,00	24.060,00	1,00	92.302,00	1,00	99.634,00	3,00	215.996,00	3,00	96,43	53,00	515.996,00	265,00	129,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				407.500,00		123.582,00		134.801,00		100.876,00	-		9.051,00		4.800,00		65.430,00		79.281,00							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	Dokumen Laporan	8	12.500,00	1	10.500,00	1	10.000,00	1	8.918,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	4.628,00	1,00	4.628,00	100,00	46,28	2,00	13.546,00	25,00	108,37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Dokumen Laporan	4	12.500,00	1	9.810,00	1	9.500,00	1	5.396,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	4.946,00	1,00	4.946,00	100,00	52,06	2,00	10.342,00	50,00	82,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Penyusunan Renstra-Renja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi	Dokumen Perencanaan	6	200.000,00	2	14.679,00	1	10.000,00	1	4.524,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	2.573,00	1,00	2.573,00	100,00	25,73	2,00	7.097,00	33,33	3,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Penyusunan RKA/DPA - SKPD.	Jumlah dokumen RKA / DPA - SKPD yang tersusun	Dokumen Penganggaran	8	15.000,00	2	12.482,00	2	10.000,00	2	13.851,00	0,00	-	1,00	9.051,00	1,00	4.800,00	0,00	-	2,00	13.851,00	100,00	138,51	4,00	27.702,00	50,00	184,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Penyusunan RKA-P/ DPPA - SKPD.	Jumlah dokumen RKA-P / DPPA-SKPD yang tersusun	Dokumen Penganggaran	8	15.000,00	2	12.500,00	2	8.728,00	2	13.851,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	13.400,00	2,00	13.400,00	100,00	153,53	4,00	27.251,00	50,00	181,67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan program SKPD	Dokumen Laporan	20	80.000,00	1	49.066,00	4	75.000,00	4	49.999,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4,00	49.999,00	20,00	62,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPL.	Jumlah dokumen laporan yang tersusun	Dokumen Laporan	15	15.000,00	3	14.545,00	3	11.573,00	3	4.337,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3,00	39.883,00	3,00	39.883,00	100,00	344,62	6,00	44.220,00	40,00	294,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Penyusunan ANUAB dan ABK	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah	Dokumen Kepegawaian	2	57.500,00		-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lindungan				915.000,00		398.274,00		628.000,00		299.957,00	-		20.045,00		-		76.643,00		96.688,00							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial.	Jumlah pertemuan tim terpadu penanganan konflik sosial	Orang	200	225.000,00	40	187.051,00	40	200.000,00	80	199.981,00	0,00	-	0,00	20.045,00	0,00	-	40,00	76.643,00	40,00	96.688,00	100,00	48,34	120,00	296.669,00	60,00	131,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.	Jumlah kabupaten yang disertai untuk mengawasi orang asing dan lembaga asing	Kabupaten	6	100.000,00	40	143.915,00	40	100.000,00	40	99.976,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	99.976,00	666,67	99,98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Antisipasi Diri dan Cegah Diri Terhadap Dampak Teknologi dan Informasi (Media Online).	Jumlah peserta yang mampu antisipasi diri dan cegah diri	Orang	120	100.000,00	0	-	40	100.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Pembentukan dan Fasilitas Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kader yang dibentuk untuk Revolusi Mental	Orang	80	75.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Pengembangan Kapasitas Komunitas Intelektual Aparat & Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kelas pelatihan	Orang	80	80.000,00	0	-	80	228.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Diri Daerah.	Jumlah laporan movev pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dan kewaspadaan diri daerah	Orang	2	75.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Forum Komunikasi dan Konsolidasi Intelektual Daerah Subar.	Jumlah peserta forum komunikasi dan konsolidasi intelektual Daerah Subar	Orang	80	85.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Antisipasi Diri, Cegah Diri, Paham Radikalisme dan Terorisme.	Jumlah peserta antisipasi diri, cegah diri, paham radikalisme dan terorisme	Orang	40	100.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah				
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K	Re	13 = 9+10+11+12	K	Re	14 = 13*100	K	Re		15 = 13+6	K	Re	16 = 15*100
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
9	Dukungan Operasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dukungan operasional tim terpadu penanganan konflik sosial	Orang	37	75.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
10	Pemantauan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif	Jumlah kabupaten yang dipantau Pilpres dan Legislatif	Kabupaten	0	-	6	67.308,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				85.000,00		127.409,00		100.000,00		199.999,00		8.216,00		-		-		140.820,00		149.036,00		149,04					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM)	Jumlah peserta fasilitasi forum kewaspadaan diri masyarakat	Orang	200	85.000,00	40	127.409,00	40	100.000,00	80	199.999,00		8.216,00	0,00	-	0,00	-	40,00	140.820,00	40,00	149.036,00	100,00	149,04	120,00	349.035,00	60,00	410,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Program Fasilitas Politik Dalam Negeri				500.000,00		554.700,00		650.000,00		614.987,00		33.979,00		10.812,00		50.587,00		224.237,00		319.615,00		136,35					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Partai	16	100.000,00	11	60.663,00	10	100.000,00	10	74.989,00		0,00	-	0,00	-	10,00	33.284,00	40,00	3.954,00	50,00	37.238,00	500,00	37,24	60,00	112.227,00	375,00	112,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
2	Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula)	Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi	Indikator	42	200.000,00	42	161.049,00	40	250.000,00	40	299.999,00		0,00	-	0,00	-	40,00		74.769,00	40,00	74.769,00	100,00	29,91	80,00	374.768,00	190,48	187,38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
3	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah	Menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif	6 Tahapan	5	200.000,00	1	332.988,00	5	300.000,00	5	239.999,00		1,00	33.979,00	1,00	10.812,00	1,00	17.303,00	40,00	145.514,00	43,00	207.608,00	860,00	69,20	48,00	447.607,00	960,00	223,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Program Pendidikan Politik Masyarakat				500.000,00		666.779,00		350.000,00		74.919,00		-		-	-	-		-	-	-	-	-					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1	Pengembangan Etna dan Budaya Politik Berbasis Budaya Lokal Bagi Masyarakat	Mampu memahami budaya dan kebiasaan masyarakat di tempat dimana dia berada	Orang	2	75.000,00	0	-	0	-	-	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
2	Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula	Meningkatnya pemahaman tentang politik bagi masyarakat bagi pemilih pemula	Orang	40	75.000,00	400	666.779,00	80	150.000,00	40	74.919,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	74.919,00	100,00	99,89	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
3	Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi	Meningkatnya pemahaman tentang berpolitik bagi kaum perempuan dalam kehidupan berdemokrasi	Orang	40	85.000,00	0	-	0	-	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
4	Workshop Penguatan Fungsi Lembaga Partai Politik Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi	Pelaksanannya fungsi lembaga partai politik dalam kehidupan berdemokrasi	Orang	3	95.000,00	0	-	40	100.000,00	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
5	Sosialisasi Peran dan Fungsi Lembaga - Lembaga Demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat	Meningkatnya sosialisasi pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga - lembaga demokrasi di Provinsi Sulawesi Barat	Orang	40	85.000,00	0	-	0	-	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
6	Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Mengembangkan Kehidupan Demokrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan politik bagi perempuan dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi	Orang	0	0	0	-	40	100.000,00	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
7	Sosialisasi Pemendagri Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	Meningkatnya pemahaman sosialisasi Pemendagri tentang Bantuan Partai Politik	Orang	40	85.000,00	0	-	0	-	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kesevakan				825.000,00		259.156,00		550.000,00		744.346,00		102.212,00		47.053,00		175.355,00		74.039,00		398.659,00								Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Se-Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang mengikuti Rakorda FKUB se-Sulawesi Barat	Orang	0	-	0	-	40	150.000,00	40	74.799,00		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	74.799,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
2	Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama	Jumlah peserta yang mengikuti peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Orang	0	-	40	85.752,00	0	-	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
3	Penguatan Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama se - Sulawesi Barat	Jumlah peserta yang mengikuti penguatan kelembagaan FKUB se-Sulawesi Barat	Orang	40	150.000,00	0	-	0	-	0	-		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/100		15 = 13+6		16 = 15/100		
1	2	3	4	5	Re	6	Re	7	Re	8	Re	9	Re	10	Re	11	Re	12	Re	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17				
4	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Kesenian Daerah.	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian kesenian daerah.	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
5	Fasilitasi Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal.	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pelestarian budaya lokal.	Orang	0	-	0	-	80	125.000,00	40	74.846,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	74.846,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Sarasehan dan Dialog Agama dan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan dan dialog agama dan ormas.	Orang	0	-	0	-	40	50.000,00	500	449.998,00	40,00	32.936,00	40,00	47.053,00	70,00	175.355,00	0,00	-	150,00	255.344,00	0,00	-	650,00	705.342,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama se - Subar.	Jumlah peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Subar.	Orang	160	175.000,00	80	173.404,00	40	75.000,00	40	69.703,00	40,00	69.276,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	69.276,00	0,00	-	80,00	138.979,00	50,00	79,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Forum Komunikasi dan Konsultasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Forkomkita P4GN).	Jumlah pelaksanaan Forkomkita P4GN.	Orang	3	300.000,00	0	-	80	150.000,00	40	75.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	74.039,00	1,00	74.039,00	0,00	-	41,00	149.039,00	1366,67	49,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Rapat Koordinasi dan Pemantauan Perkembangan Ketahanan Ekonomi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti rakor dan pemantauan perkembangan ketahanan ekonomi Sulawesi Barat.	Orang	40	200.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Sosialisasi Perda No.03 Tahun 2016 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Perda No.03 Tahun 2016 tentang pencegahan, penyalahgunaan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.	Orang	-	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.				275.000,00		173.423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Tim Identifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Penanganan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti tim identifikasi, monitoring, evaluasi dan penanganan ormas.		120	150.000,00	40	98.780,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Dialog Pemerintah Daerah dan Ormas.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan ormas.		120	125.000,00	40	74.643,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan Karakter Bangsa.				75.000,00		143.560,00		300.000,00		300.000,00		22.902,00		1.408,00		94.718,00		57.742,00		176.770,00							Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Pembinaan Kesadaran Generasi Muda Tentang Cinta Tanah Air Dalam Rangka Revolusi Mental.	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kesadaran generasi muda tentang cinta tanah air dalam rangka Revolusi Mental.	Orang	80	75.000,00	0	-	80	100.000,00		150.000,00	0,00	22.902,00	0,00	1.408,00	40,00	94.718,00	40,00	57.742,00	80,00	176.770,00	0,00	-	80,00	326.770,00	100,00	435,69	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Pembentukan Kader Bela Negara Bagi Generasi dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti pembentukan kader bela negara bagi generasi dan masyarakat dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	Orang	0	-	40	143.560,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Forum Dialog Dalam Rangka penguatan Kesadaran Masyarakat Tentang Bhinneka Tunggal Ika Bagi Aparat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog dalam rangka penguatan kesadaran masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika bagi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	Orang	0	-	0	-	80	200.000,00	40	150.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	150.000,00	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.				925.000,00		422.268,00		300.000,00		200.000,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	Musyawarah kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019 - 2024.	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Sulbar dalam rangka pembentukan pengurus baru untuk periode 2019-2024.	Kali	1	-	40	74.947,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2022		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran DPA PD Tahun 2020		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Triwulan								Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah		
				K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	I		II		III		IV		K		Re	K	Re	K	Re		K	Re
												K	Re	K	Re	K	Re	K	Re	K	Re								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/100	15 = 13+6	16 = 15/100	17													
2	Musyawarah Kerja FPK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2021 - 2025.	Jumlah pelaksanaan musyawarah kerja PPWK Subar dalam rangka pembentukan Pengurus Baru untuk periode 2019-2024.	Kali	1	-	0	-	40	100.000,00	40	50.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	50.000,00	4000,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
3	Forum Koordinasi Antar FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang mengikuti forum koordinasi antar FPK se-Sulawesi Barat.	Orang	40	-	40	74.017,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
4	Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Jumlah peserta yang Forum Koordinasi Antar PPWK (Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan) se-Sulawesi Barat.	Orang	40	200.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
5	Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malagbi.	Jumlah peserta yang mengikuti dialog Lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulbar Malagbiq.	Orang	40	75.000,00	40	198.868,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
6	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.	Jumlah peserta yang mengikuti revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan.	Orang	80	-	40	74.436,00	40	200.000,00	40	150.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	40,00	150.000,00	50,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
7	Forum dialog Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat Bagi Generasi Muda.	Jumlah peserta yang mengikuti forum dialog implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat bagi Generasi Muda.	Orang	40	100.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	Lomba Film Pendek Bertemakan Wawasan Kebangsaan.	Jumlah kelompok yang mengikuti lomba film pendek "Wawasan Kebangsaan".	Orang	20	250.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
9	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Diri tentang Pancasila dan Antisipasi Terhadap Radikalisme Bagi Pelajar dan Mahasiswa.	Jumlah peserta yang mengikuti seminar dan lomba-lomba pada Bulan LaHir Pancasila (Juli-Mei).	Orang	120	300.000,00	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pencapaian pembangunan Provinsi Sulawesi Barat telah berada pada jalur yang tepat, hal ini terlihat dari beberapa data indikator makro pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya yang mengalami peningkatan. Namun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan terhadap capaian-capaian tersebut masih sangat perlu dilakukan dalam membangun daerah dan masyarakat Sulawesi Barat.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, terkait permasalahan-permasalahan pembangunan yang dianggap prioritas dan berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada periode RPJMD 2017–2022 serta prioritas lain dari kebijakan nasional/propinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan;
- 2) Kualitas Lingkungan Hidup untuk Mendukung Sulbar “*go clean and go green*”;
- 3) Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
- 4) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas;
- 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 6) Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;
- 7) Indeks Gini Ratio;
- 8) Disparitas Wilayah;
- 9) Penanggulangan Kemiskinan;
- 10) Pengangguran dan Ketenagakerjaan;
- 11) Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 12) Ketahanan Pangan;
- 13) Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah;
- 14) Pengembangan Industri;
- 15) Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien;
- 16) Kualitas Demokrasi;
- 17) Keamanan dan Ketertiban Daerah;
- 18) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 19) Ketahanan Energi (Energi Baru Terbarukan); dan
- 20) Pengembangan Kawasan Perdesaan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pada bagian ini, merupakan permasalahan pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menyangkut layanan dasar serta tugas dan fungsi tiap perangkat daerah. Adapun permasalahan urusan pemerintah daerah dimaksud sebagai berikut.

2.3.2.1. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. PENDIDIKAN

- 1) Kualitas dan Kuantitas guru masih rendah dan pendistribusiannya tidak merata di setiap tingkatan pendidikan;
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), salah satunya ruang kelas untuk siswa SMA/SMK di beberapa wilayah masih terbatas dan rusak sebagian belum memiliki ruang pendukung pembelajaran (laboratorium dan perpustakaan);
- 3) Angka putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang didominasi anak usia 16 – 18 tahun dimana angka partisipasi sekolah jenjang SMA hanya sebesar 67,14 persen;
- 4) Anak usia sekolah yang bekerja;
- 5) Aksesibilitas terhadap sekolah belum merata di beberapa wilayah;
- 6) Kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing.

B. KESEHATAN

- 1) Masih tingginya Angka Kematian ibu dan bayi. Jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2018 sebesar 68 kasus dan pada tahun 2019 sebesar 49 kasus, sedangkan kasus kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 323 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 303 kasus;
- 2) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas;
- 3) Masih tingginya permasalahan Gizi dan Stunting growth (tubuh pendek). Angka stunting Sulawesi Barat sebesar 39,7 persen di atas rata-rata nasional sebesar 27,5 persen dan menempati urutan ke dua tertinggi di Indonesia;

- 4) Masih tingginya kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular;
- 5) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan;
- 6) Belum optimalnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- 7) Masih kurangnya jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan, penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan mencapai 82,83 persen pada tahun 2020;
- 8) Masih rendahnya akses terhadap sanitasi yang layak.

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1) Masih tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap. Panjang jalan provinsi yaitu sebesar 349,67 dimana Kondisi jalan yang belum mantap sebesar 60,42 persen atau sepanjang sepanjang 211,26 km sedangkan yang berada pada kondisi mantap sebesar 39,58 persen atau sepanjang 138,41 km;
- 2) Belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi;
- 3) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi;
- 4) Tingginya kerusakan jaringan irigasi;
- 5) Menurunnya daya tampung sungai;
- 6) Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum;
- 7) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah dan drainase);
- 8) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional;
- 9) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
- 10) Rendahnya keterkaitan fungsional antar wilayah perkotaan dan pedesaan;
- 11) Terbatasnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
- 12) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi.

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 1) Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak seimbang kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga tahun 2018 sebesar 27.497 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 13.758 unit;

- 2) Akses terhadap air bersih, penanganan persampahan dan sanitasi belum optimal. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih sebesar 69,68 persen dan persentase akses sanitasi layak sebesar 51,43 persen pada tahun 2016.

E. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- 1) Meningkatnya angka kriminalitas terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 2) Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah yang berlaku kepada masyarakat;
- 3) Masih kurangnya tenaga yang mengikuti Diklat PPNS dan Diklat Dasar Satpol PP;
- 4) Penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat.

F. SOSIAL

- 1) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan;
- 3) Penanganan lanjut usia masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak;
- 5) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.3.2.2. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. TENAGA KERJA

- 1) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;
- 2) Migrasi tenaga kerja dari daerah lain yang tinggi dapat mengancam kesempatan tenaga kerja lokal dan menimbulkan pengangguran;
- 3) Kualitas tenaga kerja masih rendah;
- 4) Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SLTA ke bawah;
- 5) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.

B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG;
- 2) Kurangnya pemahaman tentang *three ends* (kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang (*human trafficking*) dan kesenjangan ekonomi);
- 3) Tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun 2016 sebesar 42.373 jiwa atau mencapai 6,3 persen dari total angkatan kerja;
- 4) Tingginya pernikahan usia anak;
- 5) Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2016 jumlah korban KDRT sebanyak 126 kasus meningkat di tahun 2017 sebanyak 177 kasus;
- 6) Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;
- 7) Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus.

C. PANGAN

- 1) Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 2) Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
- 3) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

D. LINGKUNGAN HIDUP

- 1) Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air. Luas lahan kritis di Sulawesi Barat sebesar 38 persen;
- 2) Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 3) Pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
- 4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- 5) Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang belum efektif.

E. PERTANAHAN

- 1) Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
- 2) Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;
- 3) Konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan.

F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Minimnya sumberdaya manusia (SDM);
- 3) Belum optimalnya pengendalian penduduk;
- 4) Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) Penduduk rentan administrasi kependudukan;
- 6) Lemahnya pencatatan peristiwa penting di pencatatan sipil.

G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
- 2) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
- 3) Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- 4) Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1) Belum maksimal cakupan layanan KB;
- 2) Belum optimalnya ketahanan keluarga;
- 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 sebesar 77,92 persen;
- 4) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
- 5) Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.

I. PERHUBUNGAN

- 1) Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
- 2) Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi laut;
- 3) Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun angkutan sungai dan penyeberangan;
- 4) Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi masih lemah;
- 3) Belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah;
- 4) Belum adanya layanan e-Government secara holistik dan dikelolanya data sebagai aset strategis.

K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan usaha koperasi;
- 2) Rendahnya kualitas SDM;
- 3) Lemahnya informasi, akses pasar, dan pembiayaan;
- 4) Rendahnya daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Rendahnya manajemen kelembagaan koperasi.

L. PENANAMAN MODAL

- 1) Kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui PTSP yang belum optimal karena beberapa faktor yaitu: Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan bidang perizinan, Secara kuantitas masih sedikitnya aparat yang memahami dengan baik konsep pelayanan perizinan, Kebijakan terkait sistem prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
- 2) Iklim investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi infrastruktur dasar, regulasi terkait kemudahan berusaha;
- 3) Tidak maksimalnya tugas-tugas promosi diakibatkan oleh kurangnya data potensi daerah sektor prioritas yang siap ditawarkan serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas-tugas promosi;
- 4) Pengembangan potensi Penanaman Modal Daerah belum optimal karena belum tersedianya dokumen maupun kajian terkait pengembangan Penanaman Modal;
- 5) Lemahnya Pelayanan Penanaman Modal diakibatkan oleh kurangnya koordinasi dan pembinaan terhadap dunia usaha serta belum tersedianya standar operasional pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
- 6) Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN diakibatkan belum adanya acuan berupa regulasi-regulasi pendukung;
- 7) Tidak sinkronnya data realisasi investasi antara provinsi dan pusat akibat pelaporan LKPM PMA dan PMDN masih secara manual.

M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 1) Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda;
- 2) Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
- 3) Trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi dan narkoba;
- 4) Minimnya pembibitan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
- 5) Minimnya kualitas dan kuantitas pelatih di bidang olahraga prestasi;
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
- 7) Minimnya kejuaraan olahraga prestasi untuk kelompok umur.

N. STATISTIK

- 1) Belum maksimalnya Bank data dan masih sulit di akses;
- 2) Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang update dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 3) Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan di Sulawesi Barat.

O. KEBUDAYAAN

- 1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
- 2) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
- 3) Masih rendahnya promosi budaya lokal;
- 4) Rendahnya minat generasi muda untuk menggali, mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal.

P. PERPUSTAKAAN

- 1) Menurunnya minat baca masyarakat;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana;
- 3) Keterbatasan tenaga fungsional pustakawan.

Q. KEARSIPAN

- 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- 2) Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.

2.3.2.3. Permasalahan Pembangunan yang Menjadi Urusan Pilihan

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan;
- 4) Masih terbatasnya dan belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan;
- 5) Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 6) Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial / kawasan;
- 7) Belum adanya produk unggulan daerah berbasis kelautan dan perikanan yang dikelola secara spasial/kawasan (*one village one product*);
- 8) Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 9) Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder perikanan dan kelautan.

B. PARIWISATA

- 1) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing;
- 2) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan multistakeholders (sesuai UU 10/2013); (3) belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan;
- 3) Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.

C. PERTANIAN

- 1) Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu;
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
- 3) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; Subsektor peternakan;
- 4) Masih terbatasnya Jumlah petugas ensinator;
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi hasil peternakan;
- 6) Masih tingginya kasus penyakit pada ternak;
- 7) Terbatasnya petugas kesehatan hewan, subsektor perkebunan;
- 8) Rendahnya produktivitas tanaman perkebunan;
- 9) Masih tingginya alih fungsi lahan terutama pada daerah perkotaan;
- 10) Masih rendahnya produktivitas lahan pertanian.

D. KEHUTANAN

- 1) Masih luasnya lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- 2) Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan dan illegal logging;
- 3) Pengelolaan hutan yang belum efektif;
- 4) Belum maksimalnya produktivitas hutan;
- 5) Tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang;
- 6) Belum maksimalnya penegakan hukum kehutanan;
- 7) Masih minimnya SDM tenaga pengamanan/penyuluh kehutanan yang berstatus ASN;
- 8) Belum maksimalnya pola kemitraan pemberdayaan dengan masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS);
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana sektor kehutanan.

E. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

- 1) Belum Optimanya Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- 2) Masih rendahnya rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah;
- 4) Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).

F. PERDAGANGAN

- 1) Belum maksimalnya pemasaran produk unggulan daerah;
- 2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi;
- 3) Kurangnya jumlah maupun kualitas SDM;
- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung ekspor impor;
- 5) Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.

G. PERINDUSTRIAN

- 1) Belum adanya kawasan industri;
- 2) Masih rendahnya daya saing industri;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal;
- 4) Rendahnya Inovasi produk;
- 5) Rendahnya kualitas SDM;
- 6) Rendahnya penguasaan teknologi;
- 7) Belum optimalnya pengelolaan sentra Industri Kecil Menengah (IKM).

H. TRANSMIGRASI

- 1) Lokasi transmigrasi belum *clean and clear*;
- 2) Ketidak sesuaian skill warga transmigran dengan lokasi penempatan transmigran;
- 3) Infrastruktur transportasi kurang memadai;
- 4) Kurangnya akses pemasaran produk hasil transmigran;
- 5) Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan Kawasan transmigrasi;
- 6) Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum lokasi transmigrasi.

I. PERENCANAAN

- 1) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah belum optimal;
- 2) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana;
- 3) Belum terbangunnya sistem perencanaan elektronik yang membantu mendorong penyelenggaraan perencanaan yang akurat, update, sinkron dan terintegrasi.

J. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

- 1) Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 3) Masih rendahnya harmonisasi kehidupan beragama;
- 4) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

K. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

- 1) Belum maksimalnya implementasi hasil evaluasi daerah otonom baru;
- 2) Belum optimalnya evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Rendahnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 4) Masih lemahnya pembinaan kewilayahan pada kecamatan dan kelurahan;
- 5) Masih kurangnya kebutuhan lahan untuk pembangunan;
- 6) Belum adanya data base kebutuhan lahan untuk pembangunan;
- 7) Lemahnya fasilitasi penanganan konflik pertanahan;

- 8) Implementasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum maksimal;
- 9) Lemahnya fasilitasi permasalahan batas antar wilayah Kabupaten dan Provinsi;
- 10) Belum maksimalnya penegasan batas antar daerah di lapangan;
- 11) Fasilitasi kerjasama antar daerah belum optimal;
- 12) Belum tertatanya aspek kerjasama bidang pembangunan antar daerah;
- 13) Belum maksimalnya sinkronisasi implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
- 14) Lemahnya penegakan hukum dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM);
- 15) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- 16) Belum optimalnya pengelolaan e-governance bidang kepegawaian;
- 17) Kurangnya sarana dan prasarana bidang kepegawaian;
- 18) Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah;
- 19) Belum optimalnya pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- 20) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan analisis kerangka ekonomi daerah dan analisis kapasitas riil keuangan daerah, yang kemudian disajikan dalam 2 (dua) subbab yaitu Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah menjelaskan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah, juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Perkembangan tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara untuk membangun *herd immunity* dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh Amerika Serikat (AS), sedangkan di negara berkembang didorong oleh perbaikan ekonomi Tiongkok dan India. Kinerja positif sejumlah indikator pada Januari 2021 mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut. *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dan jasa di AS, Tiongkok dan India melanjutkan fase ekspansi. Selain itu, penjualan ritel di Tiongkok dan keyakinan konsumen di India juga terus meningkat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diperkirakan mencapai 5,1%, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya sebesar 5,0%. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global

tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara *emerging*, termasuk Indonesia. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian dunia. Kondisi likuiditas global juga tetap besar dan suku bunga tetap rendah sejalan dengan stimulus kebijakan moneter yang masih berlanjut. Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan IV 2020 dan berlanjut pada Januari 2021. Pada triwulan IV 2020, perbaikan ekonomi dunia didorong terutama oleh perbaikan ekonomi AS dan Tiongkok. Ekonomi AS yang membaik, tercermin pada kontraksi yang berkurang menjadi 2,5% (yoy), didukung oleh konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan ekspor yang meningkat. Ekonomi Tiongkok juga tumbuh semakin tinggi di kisaran 6,5% (yoy) sejalan dengan permintaan domestik yang makin kuat sebagai dampak dari berlanjutnya stimulus dan peningkatan mobilitas. Kinerja positif sejumlah indikator pada Januari 2021 mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi global. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur dan jasa di AS, Tiongkok dan India melanjutkan fase ekspansi. Selain itu, penjualan ritel di Tiongkok dan keyakinan konsumen di India juga terus meningkat.

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

	2019	WEO (IMF)						World Bank						Consensus Forecast (CF)						Bank Indonesia		
		Okt-20			Jan-21			Jun-20			Jan-21			Des-20			Jan-21			Asumsi Feb-21		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Dunia	2,8	-4,4	5,2	4,2	-3,5	5,5	4,2	-4,1	4,3	-3,7	4,3	3,9	-3,9	5,5	-3,8	5,6	4,3	-3,5	5,1	3,9		
Negara Maju	1,6	-5,8	3,9	2,9	-4,9	4,4	3,1							-5,1	4,1	-5,0	4,1	3,6	-4,7	4,1	2,9	
Amerika Serikat	2,2	-4,3	3,1	2,9	-3,4	5,1	2,5	-6,1	4,0	-3,6	3,5	3,3	-3,6	4,0	-3,5	4,4	3,4	-3,5	4,7	3,0		
Kawasan Euro	1,3	-8,3	5,3	3,1	-7,2	4,2	3,6	-9,2	4,5	-7,4	3,6	4,0	-7,3	4,7	-7,3	4,4	4,1	-6,8	4,5	3,2		
Jepang	0,3	-5,3	2,3	1,7	-5,1	3,1	2,4	-6,1	2,5	-5,3	2,5	2,3	-5,3	2,6	-5,3	2,4	2,2	-5,7	2,8	2,1		
Negara Berkembang	3,6	-3,3	6,0	5,1	-2,4	6,3	5,0							-2,7	6,7	-2,6	6,9	5,0	-2,6	5,8	4,7	
Tiongkok	6,0	1,9	8,2	5,8	2,3	8,1	5,6	1,0	6,9	2,0	7,9	5,2	2,1	8,0	2,1	8,3	5,4	2,3	8,1	5,4		
India	4,9	-8,6	6,8	6,7	-7,6	11,0	6,9	-3,2	3,1	-8,3	4,0	4,8	-8,6	10,0	-7,2	8,8	6,5	-8,4	9,0	7,4		
ASEAN-5	4,9	-3,4	6,2	5,7	-3,7	5,2	6,0						-3,5	5,6	-3,8	5,8	6,2	-3,7	5,8	5,6		
Amerika Latin	0,2	-8,1	3,6	2,7	-7,4	4,1	2,9						-7,5	4,0	-7,2	4,2	2,8	-7,4	3,1	2,4		
Negara Berkembang Eropa	2,2	-4,6	3,9	3,4	-2,8	4,0	3,9						-4,0	3,8	-3,4	3,8	3,4	-2,8	3,2	3,1		
Timur Tengah & Afrika Tengah	1,4	-4,1	3,0	4,0	-3,2	3,0	4,2											-3,2	3,2	3,8		

Sumber: IMF, World Bank, Consensus Forecast, dan Proyeksi Bank Indonesia

Sumber : Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan negaranya, prospek pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan didorong oleh pemulihan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang.

Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan tumbuh 4,7% di 2021. Prospek tersebut lebih baik dari prakiraan sebelumnya, didukung oleh akselerasi implementasi vaksinasi yang menjadi agenda pemerintahan baru dan berlanjutnya stimulus kebijakan, terutama rencana stimulus American Rescue Plan sebesar \$1,9 triliun. Ekonomi Eropa diperkirakan tumbuh di kisaran 4,5% di 2021, lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dengan permintaan domestik yang diperkirakan masih terbatas sejalan dengan pembatasan mobilitas yang masih berlangsung. Sementara itu, stimulus kebijakan di Eropa masih berlanjut. Di negara berkembang, ekonomi Tiongkok diperkirakan akan terus meningkat menjadi 8,1% di 2021, lebih baik dari prakiraan sebelumnya.

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pada triwulan IV 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi sebesar 2,19% (yoy), terutama karena masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi bangunan sebagai dampak masih terbatasnya mobilitas akibat pandemi Covid-19. Meskipun lebih rendah dari perkiraan, ekonomi pada triwulan IV-2020 membaik dengan kontraksi yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,49% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2020 ekonomi berkontraksi 2,07%. Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan akselerasi program vaksin nasional oleh Pemerintah. Perbaikan kinerja ekspor terus berlanjut pada beberapa komoditas, seperti CPO, batu bara dan besi baja, serta sejumlah produk manufaktur seperti kimia organik, kendaraan bermotor, dan alas kaki, yang kemudian akan mendorong kinerja sektoral. Perbaikan kinerja ekspor tercatat di sejumlah wilayah, khususnya Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Jawa, dan Sumatera. Sementara itu, untuk mendorong masih lemahnya permintaan domestik, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM. Untuk keseluruhan tahun 2021, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,3%-5,3%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada kisaran 4,8%-5,8% sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2020.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan proses perbaikan yang berlanjut. Ekonomi pada triwulan IV 2020 tercatat kontraksi sebesar -2,19% (yoy), membaik dari kontraksi triwulan III 2020 sebesar -3,49% (yoy). Konsumsi Pemerintah tumbuh positif di 2020 sebesar 1,94% dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta TKDD. Kontraksi konsumsi rumah tangga juga membaik menjadi -3,61% (yoy) dari -4,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya atau -2,63% (yoy) untuk tahun 2020, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan investasi juga membaik menjadi -6,15% (yoy) atau -4,95% (yoy) untuk 2020. Sementara itu, net ekspor tercatat positif, ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor, di tengah kinerja impor yang masih terbatas. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07%.

Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Komponen	% yoy														
	2018				2018	2019				2019	2020				2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	4,96	5,17	5,00	5,08	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	2,83	-5,52	-4,04	-3,61	-2,63
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	8,12	8,77	8,61	10,82	9,10	16,96	15,29	7,41	3,53	10,62	-5,09	-7,75	-2,12	-2,14	-4,29
Konsumsi Pemerintah	2,71	5,21	6,26	4,56	4,80	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	3,75	-6,90	9,76	1,76	1,94
Investasi (PMTDB)	7,92	5,81	6,92	6,01	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	1,70	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95
Investasi Bangunan	6,12	4,96	5,60	5,02	5,41	5,48	5,46	5,03	5,53	5,37	2,76	-5,26	-5,60	-6,63	-3,78
Investasi Nonbangunan	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31	3,69	1,96	1,95	-0,13	1,80	-1,46	-18,62	-8,99	-4,71	-8,38
Ekspor	5,84	7,48	8,34	4,59	6,55	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	-0,87	0,23	-11,66	-10,82	-7,21	-7,70
Impor	12,46	14,94	13,77	7,11	11,88	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	-7,69	-2,19	-16,96	-21,86	-13,52	-14,71
PDB	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Disisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan, terutama LU yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan aktivitas *new normal*. LU Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penerapan *Work from Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH). LU terkait penanganan COVID-19 dan *new normal*, seperti LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU Jasa Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, serta LU Real Estat, tumbuh positif. Sebagian besar LU utama juga mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020. Mobilitas masyarakat yang

meningkat turut mendorong perbaikan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Transportasi dan Pergudangan yang mencatat kontraksi yang lebih kecil. Selain itu, LU Industri Pengolahan menunjukkan perbaikan sejalan dengan optimisme atas prospek perbaikan ekspor.

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

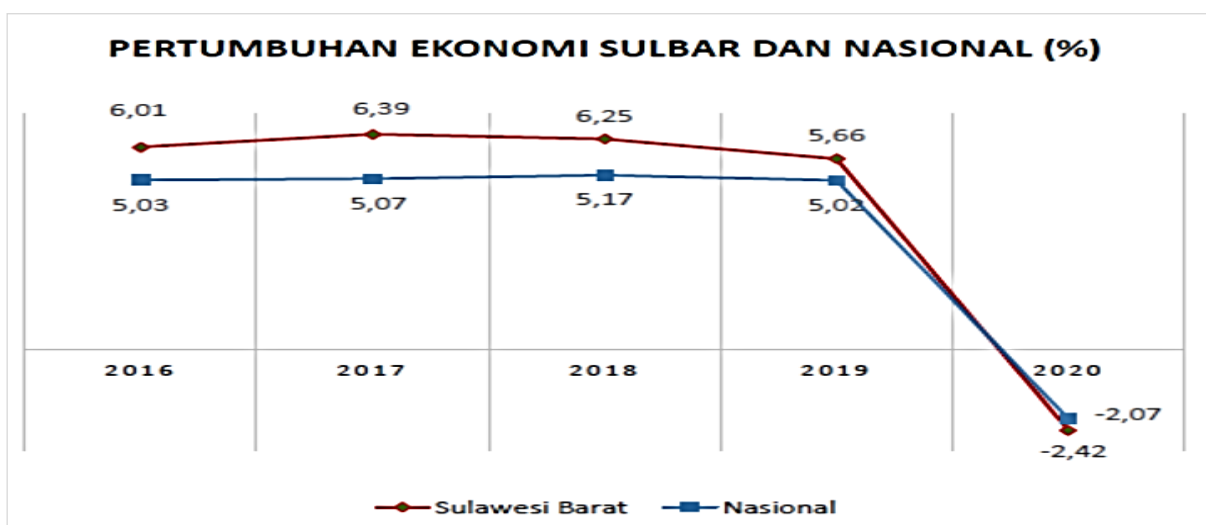
3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Daerah

Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Untuk triwulan IV Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,51% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III Tahun 2020 sebesar -5,26% (yoy). Dari sisi perdagangan, perlambatan sektor ini disebabkan oleh penurunan mobilitas masyarakat untuk aktivitas ke luar rumah seperti ke pusat perbelanjaan akibat pandemi COVID-19. Penundaan investasi Pemerintah karena penyesuaian (refocusing) anggaran dan sikap kehati-hatian pihak swasta untuk menunda rencana ekspansi usaha demi menjaga stabilitas keuangan perusahaan turut berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Dari perspektif regional, ekonomi kawasan Sulawesi tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,56% (yoy) pada triwulan IV membaik dibandingkan triwulan III 2020 sebesar -0,74%. Hampir seluruh provinsi terpantau mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020, kecuali provinsi Sulawesi Tengah.

Secara kumulatif, pertumbuhan perekonomian Sulawesi Barat Tahun 2020 tumbuh negatif. Pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,42% (yoy) lebih rendah dibandingkan Tahun 2019 yang masih tumbuh positif sebesar 5,67% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat juga sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi nasional di mana pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,07% (yoy). Faktor terkontraksinya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian perekonomian global maupun domestik karena pandemi Covid-19. Kebijakan *lockdown* di berbagai negara dunia termasuk Indonesia turut berdampak pada kinerja di berbagai sektor usaha. Selain itu, sikap masyarakat juga cenderung berhati-hati dalam berbelanja di tengah ketidakpastian kondisi tersebut. Kualitas konsumsi juga tergolong rendah karena perdagangan *durable goods* yang tertahan. Proyek infrastruktur Pemerintah Daerah mengalami penundaan karena penyesuaian anggaran untuk penanganan Covid-19, sedangkan pihak swasta cenderung bersikap *wait and see* disebabkan kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

Hal tersebut juga turut berimbas pada kegiatan perekonomian di Sulawesi Barat, yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami kontraksi. Sepanjang Tahun 2020, perekonomian seluruh kabupaten di Sulawesi Barat mengalami kontraksi. Adapun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Tahun 2020 berada di Kabupaten Mamuju Tengah yaitu sebesar -0,40%. Sementara itu, kontraksi yang terdalam ada di Kabupaten Pasangkayu dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -2,68%.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016–2020



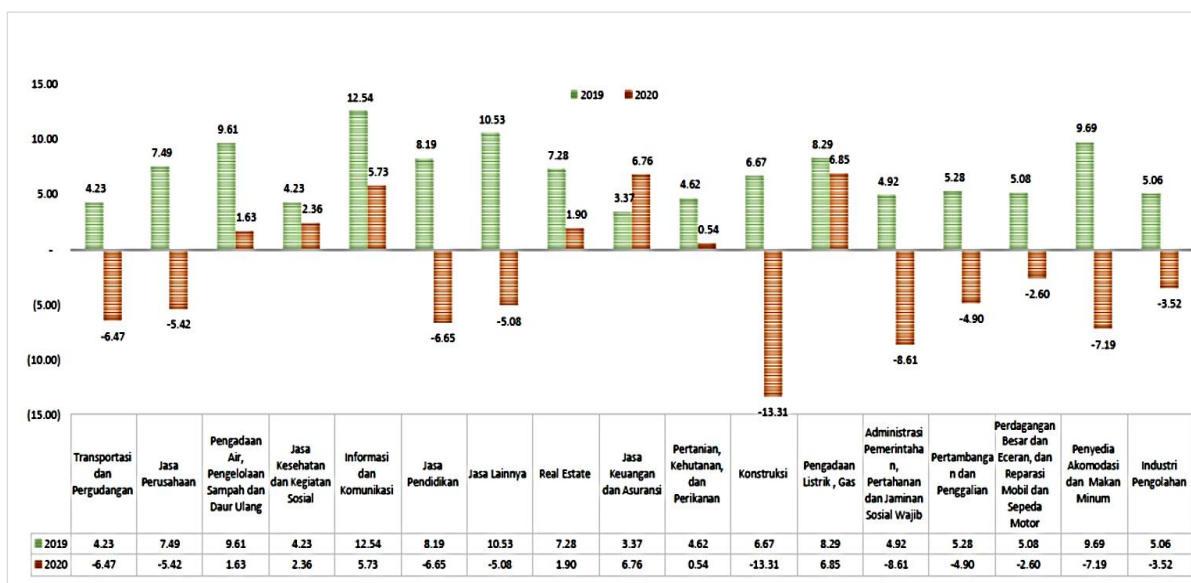
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,42%, terjadi pada sebagian besar lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,31%, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,61%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,19%. Struktur PDRB Sulawesi Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 menunjukkan perekonomian Sulawesi Barat masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 42,57%, diikuti oleh Perdagangan Besar–Eceran, Reparasi Mobil–Sepeda Motor sebesar 10,19%, Industri Pengolahan sebesar 9,83%, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,73%.

Berikut disajikan pada bagan terkait laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha.

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Sulawesi Barat Tahun 2019–2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

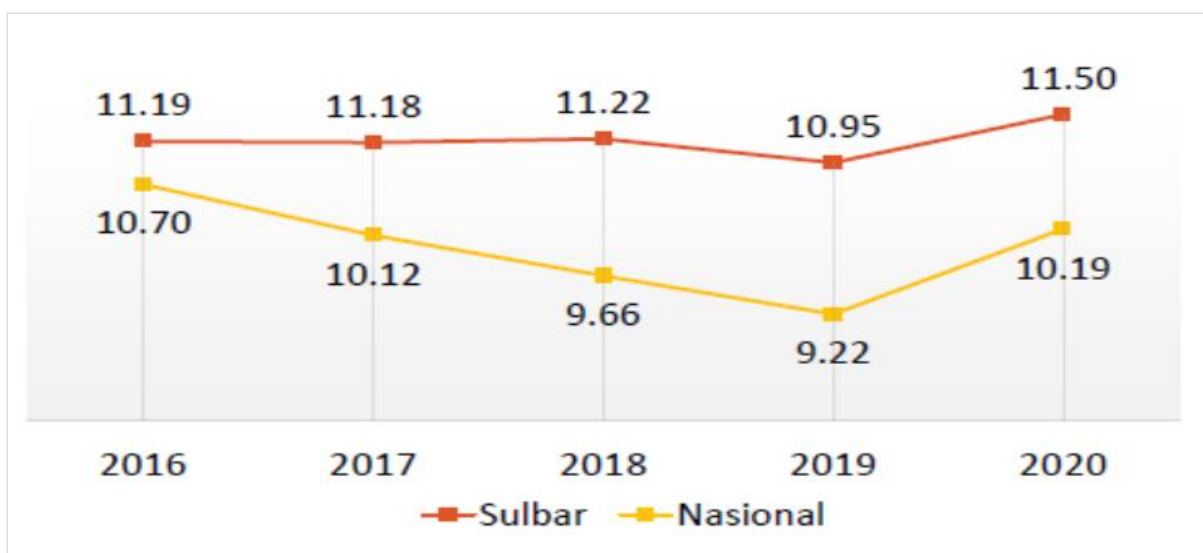
Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha karena adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020 ini memiliki dampak pada sektor perekonomian. Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, untuk jangka pendek pada sektor tanaman pangan tidak mengalami gangguan. Gangguan terjadi pada ekspor di sektor perkebunan terutama sawit dan sektor perikanan, sedangkan pada sektor industri pengolahan mengalami dampak yang signifikan. Penurunan permintaan dan harga komoditas baik Industri Besar maupun IKM, gangguan *supply chain* bagi perusahaan/UMKM. Kemudian di sektor konstruksi aktivitas sebagian besar terhenti seiring dengan penundaan/penghentian berbagai proyek infrastruktur, serta di sektor perdagangan yang terkena dampak dari penurunan aktivitas konsumsi dan produksi domestik.

Untuk penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum juga berdampak di mana adanya pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga hotel dan restoran/rumah makan sepi, yang hanya bisa melakukan *delivery/take away* serta pada sektor transportasi dan pergudangan dimana penurunan pada angkutan udara, darat dan laut, meningkatnya aktivitas pengiriman barang disebabkan belanja *online* seiring kebijakan WFH. Selanjutnya penyediaan jasa kesehatan yang meningkat sejalan dengan melonjaknya kebutuhan layanan kesehatan akibat penyebaran Covid-19.

b. Kondisi Kemiskinan

Penduduk miskin yang diartikan sebagai penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan. Untuk bulan September Tahun 2020, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat sebesar 11,50% atau meningkat sebesar 0,63% dibandingkan dengan bulan Maret Tahun 2020 dan meningkat 0,55% dibandingkan dengan bulan September Tahun 2019. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Barat pada bulan September Tahun 2020 sebanyak 159,05 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 7,03 ribu jiwa jika dibandingkan dengan bulan Maret Tahun 2020 dan mengalami peningkatan sebesar 7,18 ribu jiwa jika dibandingkan dengan bulan September Tahun 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan Maret Tahun 2020 sebesar 9,59% meningkat menjadi 9,98% pada bulan September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada bulan Maret Tahun 2020 sebesar 11,26% meningkat menjadi 11,89% pada bulan September Tahun 2020. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada bulan September Tahun 2020 tercatat sebesar 76,93%, yang mana kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi bulan Maret Tahun 2020 yaitu sebesar 77,17%.

Grafik 3.3 Persentase Kemiskinan Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016–2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Sejalan dengan meningkatnya Standar Garis Kemiskinan semakin memperdalam ketimpangan pengeluaran di antara penduduk. Tingkat kemiskinan

tidak hanya berfokus pada penurunan jumlah penduduk miskin tetapi juga memperhitungkan permasalahan kemiskinan yang dialami. Penduduk miskin di daerah cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan (GK) alhasil ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin melebar. Untuk itu selain menekan penduduk miskin juga diperlukan strategi memperkecil kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi di suatu daerah.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, gambaran penduduk miskin di Sulawesi Barat pada bulan September Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

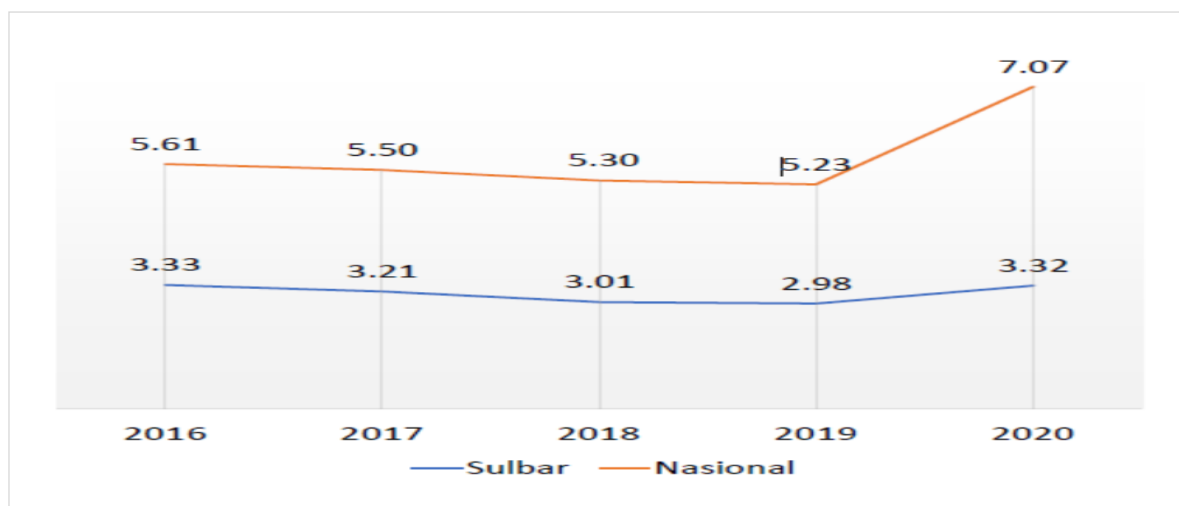
- a. Ekonomi Sulawesi Barat triwulan III Tahun 2020 terhadap triwulan III Tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,26% (yoy). Angka ini jauh menurun dibanding capaian triwulan III Tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,18% (yoy);
- b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III Tahun 2020 terkontraksi sebesar 0,46% (yoy), menurun dibandingkan periode yang sama Tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,37%;
- c. Pada periode bulan Maret Tahun 2020 – bulan September Tahun 2020, secara umum di Sulawesi Barat harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain beras, daging sapi, telur ayam ras, susu kental manis, minyak goreng, ikan cakalang, dan ikan layang. Namun demikian, terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain daging ayam ras, tepung terigu, gula pasir dan cabai rawit;
- d. Pada bulan Agustus Tahun 2020, dari total penduduk usia kerja sebanyak 991,72 ribu orang, sebanyak 120,52 ribu penduduk usia kerja (12,15%) terdampak Covid-19 pada bulan Agustus Tahun 2020, dengan rincian: 4,52 ribu penduduk menjadi pengangguran, 3,15 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja, 7,02 ribu penduduk Sementara Tidak Bekerja, dan 105,83 ribu penduduk Bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (*shorter hours*);
- e. Nilai Tukar Petani (NTP) bulan September Tahun 2020 sebesar 109,78 turun 0,58% dibandingkan bulan Maret Tahun 2020, yaitu sebesar 110,42. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani pada umumnya menurun.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, yang mana penduduk termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau

punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus Tahun 2020 sebanyak 696,12 ribu orang, naik 15,35 ribu orang dibandingkan bulan Agustus Tahun 2019. Senada dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,3%. TPT bulan Agustus Tahun 2020 sebesar 3,32% atau sebanyak 23,13 ribu orang yang berarti meningkat 2,85 ribu orang atau 0,34% dibandingkan bulan Agustus Tahun 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 672,99 ribu orang, bertambah 12,51 ribu orang dari bulan Agustus Tahun 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Pertanian (3,37%) dan Jasa Kesehatan (0,17%). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Industri (0,93%) dan Perdagangan (0,76%). Sebanyak 488,78 ribu orang (72,63%) bekerja di kegiatan informal, sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 184,20 ribu orang (27,37%). Penduduk yang bekerja di kegiatan informal pada bulan Agustus Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,72% dibandingkan bulan Agustus Tahun 2019. Terdapat 120,52 ribu orang atau mencapai 12,15% dari penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 18,43% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yang tercatat sebanyak 10,53%.

Grafik 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2016–2020

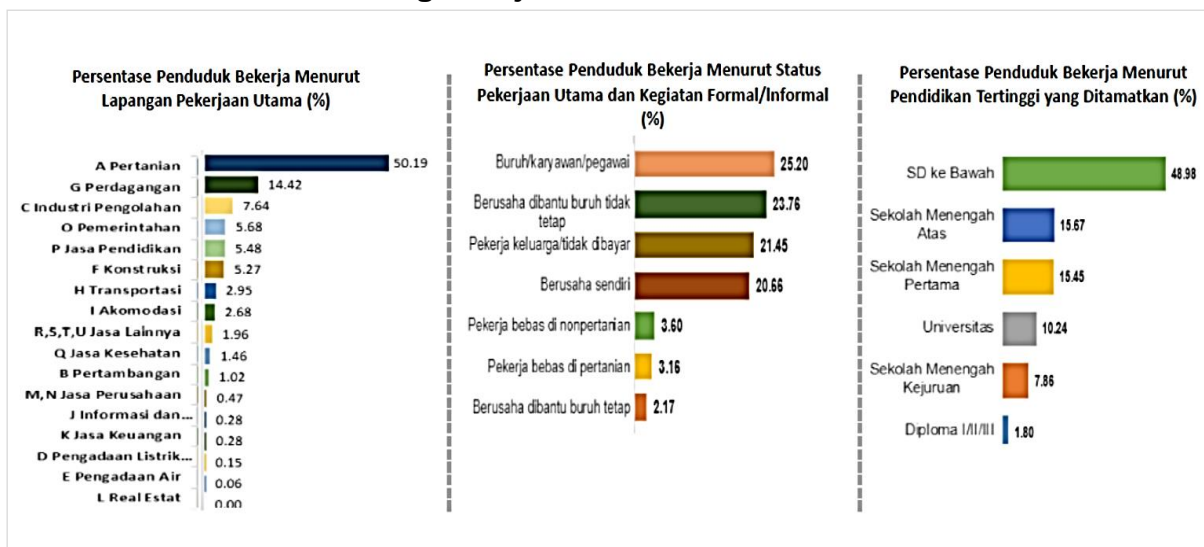


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan juga ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktifitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III

Tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) komponen yaitu: a) Penganggur; b) Bukan Angkatan Kerja yang pernah berhenti bekerja pada bulan Februari–Agustus Tahun 2020; c) Penduduk yang Bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk Bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Sehingga dari keempat kelompok tersebut, selain berdampak pada masyarakat yang saat ini bekerja, juga berdampak pada masyarakat yang berhenti bekerja, sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Grafik 3.5 Profil Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

3.1.3.2. Proyeksi Perekonomian Daerah

Selain bencana non-alam pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang Tahun 2020 hingga saat ini. Provinsi Sulawesi Barat juga turut dilanda bencana alam gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 6,2 SR, dengan lokasi terdampak pada 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Gempa bumi yang terjadi menimbulkan korban jiwa dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 107 jiwa, luka berat sebanyak 426 orang, luka sedang sebanyak 240 orang, dan luka ringan sebanyak 2.703 orang. Selain korban jiwa, bencana tersebut juga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah negara, gedung pemerintahan, infrastruktur pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, serta perumahan permukiman masyarakat.

Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat. Bencana gempa bumi yang terjadi tentunya akan mempengaruhi kinerja sektoral perekonomian Sulawesi Barat. Secara sektoral, sektor penggerak utama yaitu pertanian yang tidak akan berdampak cukup signifikan mengingat lokasi sektor ini berada diluar jangkauan episenter gempa, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu. Sementara itu, sektor yang paling terdampak adalah administrasi pemerintahan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Berdasarkan data dari BPS, pangsa ketiga sektor tersebut hampir mencapai 30% dari total PDRB Sulawesi Barat. Dari sisi administrasi pemerintahan, rusaknya sejumlah bangunan usaha, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan lainnya akan berdampak pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi mengalami penurunan, sehingga dapat mengurangi kemampuan fiskal dari pemerintah daerah. Sektor industri pengolahan juga berpotensi terdampak karena ketidaklancaran distribusi bahan baku maupun produk jadi yang dihasilkan akibat rusaknya jembatan dan jalan trans sulawesi. Rusaknya sejumlah pusat perbelanjaan dan toko ditambah dengan mobilitas masyarakat yang terbatas akan mempengaruhi pertumbuhan kinerja sektor perdagangan.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat, diperkirakan akan mengalami perlambatan. Pelemahan daya beli masyarakat akan memicu melemahnya kinerja sektor perdagangan. Rusaknya berbagai aset bangunan milik pemerintah dan pelaku usaha (swasta) akan mempengaruhi kinerja investasi Sulawesi Barat. Pemerintah masih berfokus pada rekalkulasi dan verifikasi sejumlah kerusakan aset. Sementara itu, pihak swasta juga tengah melakukan rekalkulasi kapasitas usaha dan memilih *wait and see* terhadap proses percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan kinerja perekonomian daerah Tahun 2020 sampai dengan tahun berjalan, serta proyeksi perekonomian 5 (lima) tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2022, untuk Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena Tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4–6,0% pada Tahun 2022. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan *Gross National Income* (GNI) per kapita menjadi

US\$4.370–4.400 pada Tahun 2022, membawa kembali Indonesia kedalam kategori *Upper–Middle Income Countries*.

Adapun sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai Tahun 2022, dari beberapa sasaran ekonomi makro, diantaranya:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4–6,0%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,52–6,24%
3. Rasio Gini sebesar 0,376–0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44–73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8–27,1%
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102–104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102–105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5–9,0%

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut, sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan nasional Tahun 2022 yang diukur dalam indikator kinerja makro sebagai berikut.

Tabel 3.3 Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2022

No.	Indikator	Capaian RKPd 2020	Target RKPd 2021	Target RPJMD 2017–2022	Target RKPd 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-2,42%	5,7%	7,63%	5,5 – 6,0%
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,32%	4,9%	2,23%	3,2 – 2,5%
3.	Indeks Pembangunan Manusia	66,11 Poin	67,11 Poin	70,53 Poin	68,19 Poin
4.	Angka Kemiskinan	11,50%	10,7%	9,06%	10,25%
5.	Ketimpangan (<i>Gini Ratio</i>)	0,356 Poin	0,359 Poin	0,338 Poin	0,338 Poin

Dengan dilakukannya proses vaksinasi dan pembangunan pasca gempa yang terus berjalan akan meningkatkan aktivitas perekonomian selama Tahun 2021. Permintaan masyarakat menyusul dengan dilakukannya pembayaran THR dan bantuan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional. Belanja pemerintah diperkirakan akan meningkat dalam rangka pembangunan proyek *multiyear* dan pembangunan kembali pasca gempa dengan target realisasi anggaran diatas 90% pada akhir tahun.

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi

pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan bencana alam gempa bumi, serta mendorong sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dengan kontribusi yang mencapai sebesar 42,57% terhadap PDRB.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah dan analisis keuangan daerah. Analisis keuangan daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan, untuk kemudian dialokasikan kedalam 3 (tiga) prioritas yakni: a) Prioritas Pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; b) Prioritas Kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah; dan c) Prioritas Ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Kebijakan keuangan daerah Tahun 2022 difokuskan dalam hal penanganan bencana non-alam pandemi Covid-19 yang mencakup pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta penanganan pasca bencana alam gempa bumi yang terjadi di awal Tahun 2021 yang meliputi rekonstruksi dan rehabilitasi khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar. Selain itu juga akan dilakukan pemfokusan pada upaya-upaya akselerasi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 yang belum tercapai, mengingat Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2017–2022.

3.2.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, menjadi bagian yang sangat penting dan mendasar dalam

struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dikarenakan hasil dan realisasi pendapatan daerah akan sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah perlu diupayakan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan dari sisi Pendapatan Transfer, dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah berpedoman pada rencana Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021, serta mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, yang mana mengalami pengurangan pada alokasi Dana Transfer Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sekitar Rp.32.124.768.000,-.

Selanjutnya gambaran realisasi dan proyeksi Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 telah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp.)				
	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH	301.499.588.174,52	345.208.054.041,74	346.864.756.506,15	386.506.904.336,00	407.948.854.258,50
Pendapatan Pajak Daerah	272.232.842.792,30	291.493.654.113,00	290.122.549.846,00	309.089.657.964,00	329.571.241.586,50
Pendapatan Retribusi Daerah	7.280.352.395,00	24.203.115.569,00	1.049.116.700,00	3.744.000.000,00	4.146.000.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.084.937.047,00	9.215.164.239,00	12.867.247.793,00	12.867.247.793,00	12.867.247.793,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.901.455.940,22	20.296.120.120,74	42.825.842.167,15	60.805.998.579,00	61.364.364.879,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.515.760.142.209,00	1.688.130.947.611,00	1.655.236.854.262,00	1.659.373.805.000,00	1.627.249.037.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	18.969.754.669,00	13.152.404.952,00	16.257.305.716,00	14.927.575.000,00	14.927.575.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.025.033.063.000,00	1.064.068.728.000,00	968.832.936.000,00	1.003.041.642.000,00	970.916.874.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	453.507.324.540,00	574.825.653.659,00	661.729.366.546,00	624.962.924.000,00	624.962.924.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	18.250.000.000,00	36.084.161.000,00	8.417.246.000,00	16.441.664.000,00	16.441.664.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.825.865.183,00	1.480.566.750,00	3.428.724.512,00	1.862.431.706,00	1.342.000.000,00
Pendapatan Hibah	324.000.000,00	336.000.000,00	2.586.652.307,00	1.862.431.706,00	1.342.000.000,00
Pendapatan Lainnya	1.501.865.183,00	1.144.566.750,00	842.072.205,00	-	-
JUMLAH	1.819.085.595.566,52	2.034.819.568.402,74	2.005.530.335.280,15	2.047.743.141.042,00	2.036.539.891.258,50

Secara umum realisasi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 mencapai sebesar Rp.2.005.530.335.280,15 dari yang direncanakan sebesar Rp.1.980.804.265.511,48 atau meningkat sebesar 101,25% dengan rincian sebagai berikut: pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 115,95%, kelompok Pendapatan Transfer terealisasi sebesar 98,72% dan kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar 69,12%.

Sehingga untuk Tahun Anggaran 2022, kebijakan Pendapatan Daerah diproyeksikan berdasarkan asumsi rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan analisis *trend* yang dilakukan serta upaya-upaya intensifikasi yang direncanakan, diasumsikan kenaikan PAD sebesar 5,54% dengan rencana kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar 6,62% dan rencana kenaikan pendapatan retribusi daerah sebesar 10,73%. Sedangkan pada kelompok Pendapatan Transfer didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, yang mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami pengurangan Dana Transfer Umum (DAU) sebesar Rp.32.124.768.000,- yakni dari semula sebesar Rp.1.003.041.642.000,- menjadi sebesar Rp.970.916.874.000,-.

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, terdiri dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah menjadi komponen dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan merealisasikan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Dengan proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 yang diasumsikan mengalami penurunan sebesar Rp.11.203.249.783,50 dari Tahun Anggaran 2021, tentunya akan memberikan dampak pada belanja daerah, sehingga dalam pengalokasiannya diharapkan dapat dilakukan secara lebih selektif, efektif dan efisien.

Selanjutnya gambaran realisasi dan proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 telah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp.)				
	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.251.360.756.233,45	1.420.141.672.132,11	1.351.910.828.299,58	1.509.710.625.326,00	1.467.141.612.339,33
Belanja Pegawai	526.918.858.643,00	527.799.474.077,45	589.659.058.326,50	575.343.734.685,00	620.928.245.038,00
Belanja Barang dan Jasa	460.291.696.308,45	590.564.295.904,66	463.097.416.632,46	664.882.965.337,00	585.883.428.384,33
Belanja Bunga	18.499.921.282,00	18.844.642.150,00	7.638.496.897,62	12.718.828.404,00	5.274.484.017,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	245.650.280.000,00	282.933.260.000,00	290.030.402.443,00	251.491.146.900,00	254.055.454.900,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	1.485.454.000,00	5.273.950.000,00	1.000.000.000,00
BELANJA MODAL	321.974.753.003,32	364.249.411.338,99	347.276.409.259,70	358.346.816.028,00	315.768.886.505,67
Belanja Tanah	29.898.960.068,00	31.565.493.315,00	15.182.664.000,00	8.262.500.000,00	30.000.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	97.594.685.366,00	91.718.279.644,00	106.521.771.238,90	86.513.977.278,00	43.652.630.405,46
Belanja Bangunan dan Gedung	57.707.456.152,32	104.909.479.457,89	111.583.891.054,07	135.513.589.371,00	68.376.519.238,28
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.736.268.917,00	118.146.642.376,10	81.024.132.347,73	79.367.073.749,00	149.062.942.424,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	18.037.382.500,00	17.909.516.546,00	32.747.349.274,00	48.689.675.630,00	24.567.503.214,06
Belanja Aset Lainnya	-	-	216.601.345,00	-	109.291.223,87
BELANJA TIDAK TERDUGA	537.273.535,00	42.212.100,00	80.558.069.472,00	15.785.298.144,00	10.785.298.144,00
Belanja Tidak Terduga	537.273.535,00	42.212.100,00	80.558.069.472,00	15.785.298.144,00	10.785.298.144,00
BELANJA TRANSFER	172.749.284.524,21	221.592.720.210,50	209.819.477.529,38	178.699.488.147,00	198.108.617.579,00
Belanja Bagi Hasil	137.730.271.724,21	148.809.394.813,50	153.819.477.529,38	155.499.488.147,00	168.108.617.579,00
Belanja Bantuan Keuangan	35.019.012.800,00	72.783.325.397,00	56.000.000.000,00	23.200.000.000,00	30.000.000.000,00
JUMLAH	1.746.622.067.295,98	2.006.026.015.781,60	1.989.564.784.560,66	2.062.542.227.645,00	1.991.804.414.568,00

Secara umum realisasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2020 mencapai sebesar Rp.1.989.564.784.560,66 dari yang direncanakan sebesar Rp.2.068.442.011.023,51 atau sebesar 96,19% dengan rincian sebagai berikut: pada kelompok Belanja Operasi terealisasi sebesar 96,48%, kelompok Belanja Modal terealisasi sebesar 95,35%, kelompok Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar 92,16% dan kelompok Belanja Transfer terealisasi sebesar 97,60%.

Untuk Tahun Anggaran 2022, belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp.1.991.804.414.568,- mengalami penurunan sebesar 3,43% dari Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Penurunan rencana belanja daerah tersebut, akan memberikan dampak bagi pengalokasian belanja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sehingga diperlukan pemfokusan belanja dalam kerangka prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022. Adapun beberapa fokus dimaksud dilakukan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, diantaranya:

- a. Penanganan bencana non-alam pandemi Covid-19, meliputi pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial;
- b. Penanganan pasca bencana alam gempa bumi, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi bagi sektor-sektor pelayanan dasar;
- c. Percepatan pemenuhan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017–2022.

3.2.3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mana terdiri dari kelompok Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.103.192.697.843,52. Namun untuk Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hanya merencanakan penggunaan SiLPA sebesar Rp.10.926.343.999,50 dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selanjutnya gambaran realisasi dan proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 telah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp.)				
	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	88.019.995.548,35	129.324.330.602,89	134.952.170.980,03	61.024.110.459,00	10.926.343.999,50
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	41.817.617.023,35	129.324.330.602,89	97.892.859.368,03	61.024.110.459,00	10.926.343.999,50
Penerimaan Pinjaman Daerah	46.202.378.525,00	-	37.059.311.612,00	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.133.965.964,00	60.225.023.856,00	47.725.023.856,00	46.225.023.856,00	55.661.820.690,00
Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	14.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	21.133.965.964,00	46.225.023.856,00	46.225.023.856,00	46.225.023.856,00	55.661.820.690,00
PEMBIAYAAN NETTO	56.886.029.584,35	69.099.306.746,89	87.227.147.124,03	14.799.086.603,00	(44.735.476.690,50)
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)	129.349.557.854,89	97.892.859.368,03	103.192.697.843,52	-	-

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 menjadi dokumen yang sangat strategis dalam melakukan percepatan pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017–2022. Untuk mendukung pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2022 yakni **“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”**, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengimplementasikan 5 (lima) misi yang dijabarkan kedalam RKPD setiap tahunnya, yakni:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya

Dengan sumber daya manusia yang ada, kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki masing-masing individu, pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Alam dan lingkungan yang terkelola dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hubungan dunia luar dari provinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih maju.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya

Dengan kondisi pemerintahan di mana para pelaku yang terlibat didalamnya mampu menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat dan pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis

Dengan penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, melalui 3 (tiga) prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan wawasan (bukan keseragaman), dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui *inter-moda supply chain system* yang

menghubungkan *hinterland* dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga diperoleh manfaat pembangunan.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi

Dengan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi yang dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas agar berdaya saing tinggi. Peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang diinginkan adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi yang dimaksudkan ialah adanya perbaikan dalam arti luas, seperti: adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.

5. Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utama untuk memastikan terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan yang mencakup integrasi antara aspek biofisik, aspek sosial dan aspek ekonomi dalam mendukung penghidupan (*livelihood*) yang berkelanjutan.

Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut. Dokumen RPJMD Tahun 2017–2022 telah menggambarkan proses *cascading* kinerja mulai dari level tujuan, sasaran, sampai kepada program pembangunan daerah yang diikuti dengan penetapan indikator kinerja dan target setiap tahunnya. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator kinerja dan targetnya untuk Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian RKPD 2020	Target RKPD 2021	Target RPJMD 2022	Target RKPD 2022
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya						
Meningkatkan Kualitas SDM yang Terdidik, Sehat dan Berbudaya	Meningkatnya derajat pendidikan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	66,11	67,11	70,53	68,19
	Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi					
	Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib dan tenteram	Angka Kriminalitas (%)	15,81	12,22	11,36	11,36
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya						
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	B	A	A	BB
	Meningkatnya kualitas kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya					
Misi 3 : Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis						
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dalam menunjang	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%)	39,58	57,65	67,65	67,65

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian RKPD 2020	Target RKPD 2021	Target RPJMD 2022	Target RKPD 2022
Infrastruktur Untuk Mendorong Produktivitas Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah	perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan	Persentase Elektrifikasi (%)	96,95	94	96	98
	Meningkatnya konektivitas antara wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antara desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wilayah	Persentase Rumah Layak Huni (%)	93,32	95	97	97
		Persentase Daerah Tertinggal (%)	53,91	46	30	30
Misi 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi						
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Peningkatan Daya Saing Berbasis Ekonomi Lokal	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,42	5,7	7,63	5,5-6,0
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,32	4,9	2,23	2,5-3,2
		Angka Kemiskinan (%)	11,5	10,7	9,06	10,25
		Indeks Gini Rasio (Poin)	0,356	0,359	0,338	0,338
	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Peringkat Daya Saing Daerah (Peringkat Ke-)	31	20	18	30
Misi 5 : Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan						
Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	74,91	75	75	75

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD, sebagaimana arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017–2022 yakni: “Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”. Namun dikarenakan adanya kondisi yang tidak normal (*extraordinary*) yang berada diluar dari perkiraan, yakni bencana non-alam pandemi Covid-19 dan bencana alam gempa bumi, sehingga diperlukan adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dalam merumuskan tema pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat, perlu berpedoman dalam rangka keselarasan dengan tema pembangunan nasional Tahun 2022 yaitu “**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**” dengan 7 (tujuh) prioritas nasional sebagai berikut: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, yaitu “**Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat**”, yang kemudian dioperasionalkan kedalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: (1) Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Akselerasi Pembangunan Ekonomi; (3) Pembangunan Manusia; (4) Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana; dan (5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern.

Pola hubungan keterkaitan antara RPJMD Tahun 2017–2022, RKP Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hubungan Keterkaitan antara RPJMD Tahun 2017–2022, RKP Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2022

RKP 2022	RKPD 2022	RPJMD 2017–2022
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia	Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya
	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Pembangunan Berkelanjutan
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya

Sebagai pedoman dalam merumuskan program pembangunan daerah yang tepat sasaran, diperlukan adanya sasaran strategis, arah kebijakan dan program prioritas terhadap prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022. Penentuan program prioritas didasarkan pada kebutuhan dan kontribusi yang diharapkan untuk dapat mencapai sasaran dan target pembangunan daerah, melalui pelaksanaan kegiatan prioritas yang berorientasi pada hasil (*outcome*), yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3 Prioritas, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1.	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	1. Memulihkan Infrastruktur Provinsi Pasca Bencana	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi 2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi 3. Penanganan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Jalan Provinsi	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		2. Memulihkan Infrastruktur Dasar Masyarakat Pasca Bencana	1. Penyediaan Rumah Layak Huni Pasca Bencana 2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan 3. Penyediaan Listrik Gratis bagi Desa Terdampak Bencana 4. Pembangunan Infrastruktur Desa Pasca Bencana 5. Penyediaan Infrastruktur Mitigasi Bencana bagi Pulau Kecil dan Terluar	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2.	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	1. Meningkatnya Usaha Pertanian Ketahanan Pangan Daerah	1. Pengembangan Pertanian Berbasis Korporasi 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian 3. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian 4. Peningkatan Hasil Pertanian berbasis Potensi Daerah dan Pasca Panen 5. Peningkatan Akses dan Ketahanan Pangan Daerah	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan 3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas
				6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 8. Program Penyuluhan Pertanian
		2. Meningkatnya Daya Saing Industri dan Perdagangan	1. Peningkatan Kemandirian Industri Pengolahan 2. Peningkatan Sarana Prasarana Industri dan Perdagangan 3. Fasilitasi Akses Keuangan dan Pembiayaan 4. Pendampingan IKM/ UMKM dan Koperasi	1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		3. Berkembangnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan Kawasan Destinasi Pariwisata 2. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif di Daerah 3. Pengembangan Kemitraan	1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		4. Meningkatnya Investasi dalam Menggerakkan Ekonomi dan Lapangan Kerja	1. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi 2. Penguatan <i>Database</i> Investasi 3. Peningkatan Pelayanan Perizinan yang Prima dan Terintegrasi	1. Program Promosi Penanaman Modal

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas
3.	Pembangunan Manusia	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Serta Gizi Masyarakat	1. Penguatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan 2. Peningkatan Sarana dan Fasilitas Kesehatan 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Perilaku Sehat 5. Percepatan Penurunan Stunting	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)
		2. Meningkatnya Layanan Pendidikan Berkualitas	1. Peningkatan Akses Sarana dan Prasarana Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kebudayaan 4. Program Pembinaan Perpustakaan
		3. Memperkuat Ketahanan Hidup Masyarakat	1. Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran 2. Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Miskin 3. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 4. Penguatan Sistem Pendataan Terintegrasi	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pemberdayaan Sosial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Penempatan Tenaga Kerja 7. Program Kesejahteraan Rakyat

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas
4.	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	1. Meningkatnya Kualitas Udara dan Air, serta Optimalisasi Tutupan Lahan	1. Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 2. Penurunan Beban Pencemaran 3. Pemulihan Lahan melalui Rehabilitasi Pesisir dan Sumber-sumber Air 4. Optimalisasi Tutupan Hutan dan Lahan Kritis	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Hutan
		2. Meningkatnya Ketahanan Bencana	1. Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Melalui Penyadaran Lingkungan Hidup 2. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 3. Penguatan Desa Tangguh Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana
5.	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Unit Pelayanan dengan Standarisasi Pelayanan Nasional 2. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
		2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peningkatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1. Program Penataan Organisasi 2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		3. Penguatan Pengawasan	1. Peningkatan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Penurunan Tingkat Penyalahgunaan Wewenang	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Program Penyelenggaraan Pengawasan

No.	Prioritas Provinsi	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Program Prioritas
		4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Peningkatan Ketaatan Pengelolaan SDM Aparatur 2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur 3. Peningkatan Disiplin SDM Aparatur 4. Peningkatan Efektivitas Manajemen SDM Aparatur 5. Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5. Penataan Tatalaksana	1. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi 2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas 3. Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		6. Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Penurunan Tumpang Tindih dan Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Instansi Pemerintah	1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
		7. Manajemen Perubahan	1. Peningkatan Komitmen Pimpinan dan Pegawai Instansi Pemerintah 2. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Instansi Pemerintah 3. Penurunan Risiko Kegagalan	1. Program Penataan Organisasi
		8. Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Penurunan Tumpang Tindih Tugas Pokok dan Fungsi Internal Instansi Pemerintah	1. Program Penataan Organisasi

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 yang menitik beratkan perhatian pada Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, mendorong percepatan serta pendampingan Materi teknis RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kabupaten, disamping itu juga harus memperhatikan daya dukung wilayah-wilayah kabupaten di Sulawesi Barat. Hal tersebut telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025. Arah pembangunan daerah masing-masing kabupaten telah disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan prospek pengembangannya, khususnya menyangkut aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya. Arah pembangunan wilayah-wilayah kabupaten yang termuat dalam RPJPD, yang kemudian diarahkan untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dalam hal ini RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Barat memegang peran strategis, dimana pengembangan wilayah diarahkan sebagai pusat pemerintahan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki. Kabupaten Mamuju dalam bidang pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan sektor-sektor produktivitas seperti pengembangan perkebunan kakao, perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, cengkeh, pengembangan kawasan persawahan irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai (DAS) yang potensial dan pusat pengembangan energi listrik, serta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) .

Pemulihan infrastruktur pelayanan dasar pasca bencana gempa bumi yang membuat kerusakan berbagai infrastruktur di Kabupaten Mamuju menjadi fokus dalam pembangunan di tahun 2022 mendatang.

Bidang sosial budaya, Kabupaten Mamuju diarahkan pada pengembangan kawasan budaya rumah adat, pengembangan kerajinan tenun ikat sekamandi, dan pengembangan kawasan wisata pantai. Untuk memacu kemajuan fisik daerah maka pembangunan jangka panjang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju diarahkan pada pengembangan bandara, pelabuhan laut internasional, terminal

angkutan darat, pengembangan pelayanan rumah sakit, dan pengembangan perguruan tinggi.

2. Kabupaten Majene

Bencana gempa bumi disebagian wilayah Kabupaten Majene menjadi dasar dalam pemulihan infrastruktur pelayanan dasar dan fokus pembangunan di tahun 2022 mendatang. Selanjutnya dalam perspektif jangka panjang, pembangunan Kabupaten Majene akan diarahkan pada pengembangan pusat pendidikan pada semua level pendidikan, terutama perguruan tinggi negeri (Universitas Sulawesi Barat). Di bidang pembangunan ekonomi, akan difokuskan pada pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao dan kelapa dalam, pengembangan kelautan dan perikanan, dan pengembangan kawasan pertambangan minyak blok mandar. Di bidang pembangunan sosial budaya, akan diarahkan pada pengembangan kompleks pemakaman raja-raja dan pahlawan mandar, pengembangan museum, dan pengembangan kawasan monumen. Untuk mendorong pembangunan kawasan dan kemajuan daerah, maka pembangunan infrastruktur di daerah ini akan diarahkan pada pengembangan pelabuhan perikanan dan pembangunan infrastruktur dasar. Peningkatan Kesejahteraan/Ekonomi Masyarakat melalui penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif, Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, serta optimalisasi program Bantuan social dan pemberdayaan masyarakat

3. Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar pada sektor ekonomi diarahkan sebagai pusat perdagangan dalam jangka panjang akan diarahkan pada pengembangan kegiatan perdagangan dan industri, pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS yang potensial menyediakan air sepanjang tahun, pengembangan sentra-sentra perkebunan kakao, perkebunan kelapa dalam, pengembangan buah-buahan dan pengembangan kawasan pertambangan minyak blok mandar. Untuk pembangunan sosial budaya, daerah ini akan diarahkan sebagai pusat pengembangan kebudayaan karena didukung oleh keanekaragaman budaya, mulai dari seni tari tradisional, seni sastra (kalinda'da), perahu sandeq, hingga peninggalan sejarah makam para raja, tokoh agama, dan pahlawan. Sedangkan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada pengembangan pelabuhan laut, bandara perintis, pengembangan wilayah dan pemukiman, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, dan peningkatan pelayanan rumah sakit.

4. Kabupaten Mamasa

Sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki, Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten yang berada pada dataran tinggi dengan cuaca udara yang sangat dingin, pada sektor pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan perkebunan, yang dikembangkan pada sentra perkebunan kopi, kakao, teh dan tanama hortikultura yang sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Mamasa. Pengembangan Kepariwisata yang diarahkan pada pengembangan kawasan wisata budaya dan pelestarian keindahan alam, pengembangan kawasan makam, dan pengembangan lokasi perayaan adat

Pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan kegiatan sosial budaya di daerah ini. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, wilayah Kabupaten Mamasa akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dan peningkatan pelayanan rumah sakit.

5. Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Mamuju Utara yang telah berganti nama menjadi Kabupaten Pasangkayu pada pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan diarahkan pada pengembangan kawasan pertanian, perkebunan, terutama untuk komoditas kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, jeruk kelantan dan perikanan serta pengembangan pembangunan pedesaan. Di daerah ini juga akan dikembangkan kawasan sawah irigasi teknis yang akan didukung dengan perencanaan dan manajemen DAS yang potensial menyediakan air sepanjang tahun. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah ini, maka akan dikembangkan kawasan pertambangan minyak blok suremana, blok pasangkayu, dan blok kuma. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur, akan diarahkan pada pengembangan pelabuhan laut, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, dan peningkatan pelayanan rumah sakit.

6. Kabupaten Mamuju Tengah

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju dengan ibukota kabupaten adalah Topoyo. Arah pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah tidak jauh berbeda dengan kabupaten induknya yaitu Kabupaten Mamuju. Pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah diarahkan pada pengembangan kawasan sawah irigasi teknis yang akan dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen daerah aliran sungai (DAS)

yang potensial. Pengembangan sentra-sentra perkebunan kelapa sawit, sentra-sentra perkebunan kakao, sentra-sentra perkebunan jeruk, sentra-sentra perkebunan kelapa dalam. Selain itu, pengembangan kawasan pertambangan minyak blok karama dan blok budong-budong kini masuk kedalam wilayah daerah ini yang sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten Mamuju.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pencapaian terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, setelah dirumuskan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka selanjutnya diperlukan perumusan program pada level *outcome* dan kegiatan pada level *output* yang nantinya akan saling memberikan kontribusi terhadap pencapaian di atasnya, sehingga memberikan kontribusi yang lebih luas yakni *impact*. Agar konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud, yang pada hakekatnya dokumen perencanaan tahunan (RKPD) menjadi penjabaran/pelaksanaan dari dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD), maka dirumuskan program-program yang diharapkan menjadi solusi terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan daerah setelah memperhatikan hasil evaluasi program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2020.

Adapun program-program yang akan dilaksanakan, mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, sebagaimana tabel pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berikut ini.

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						473,946,913,735						540,798,807,271			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persen		Persen	100 Persen	258,516,646,135						100 Persen	246,328,807,271		
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Poin		Poin	24 Poin	1,760,000,000						24 Poin	1,770,000,000		
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	1,000,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Laporan	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Laporan	575,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Laporan	580,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	250,845,706,135						100 Persen	239,323,807,271		
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				2615 Orang	248,640,706,135	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2615 Orang	239,228,807,271	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	2,100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Persen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Laporan	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Persen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				2 Laporan	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Laporan	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01		1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	405,000,000						2 Dokumen	320,000,000	
1		01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	120,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	804,940,000						100 Persen	870,000,000	
1		01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				5 Orang	104,940,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Orang	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	2,015,000,000						100 Persen	1,745,000,000	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis 5 Jenis	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Jenis 5 Jenis	270,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis	120,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan				2 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				4 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen	1,250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen 1 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				4 Dokumen	175,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	5 Unit	1,171,000,000						5 Unit	975,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	271,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				3 Jenis	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Jenis	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				7 Jenis	325,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7 Jenis	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				2 Jenis	325,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Jenis	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	315,000,000						3 Jenis	365,000,000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 Persen	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Jenis	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Jenis	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan				30 Unit	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30 Unit	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	10 Unit	1,200,000,000						10 Unit	960,000,000	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi				5 Jenis 5 Unit	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Jenis 5 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				31 Unit	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31 Unit	310,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5 Jenis	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Jenis	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor				3 Unit 2 Jenis	450,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Unit 2 Jenis	475,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	Persen		Persen	100,00 Persen	210,840,267,600						100,00 Persen	292,025,000,000	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang dikelola	Sekolah		Sekolah	88 Sekolah	101,772,200,000						88 Sekolah	106,635,000,000	
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang akan dibangun				3 unit	15,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 unit	55,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang akan dibangun				5 Ruang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan dibangun				8 Ruang	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	8 Ruang	2,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang akan dibangun				9 Ruang	4,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	9 Ruang	4,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang akan dibangun				10 Ruang	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	10 Ruang	5,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang akan dibangun				12 Ruang	5,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	12 Ruang	5,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang akan dibangun				7 Ruang	2,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	7 Ruang	2,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang akan dibangun				7 Ruang	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	7 Ruang	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang akan dibangun				2 Ruang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Ruang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang akan dibangun				13 Ruang	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	13 Ruang	4,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang akan dibangun				10 Ruang	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	10 Ruang	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang akan dibangun				3 Ruang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Ruang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan dibangun				3 Unit	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Unit	1,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan dibangun				2 Jenis 7 Paket	1,383,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Jenis 7 Paket	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang akan dibangun				2 Paket	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Paket	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang akan dibangun				2 Paket	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Paket	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang akan dibangun				2 Unit	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Unit	850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang akan dibangun				1 Paket	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	1 Paket	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang akan direhab				87 Ruang	20,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	87 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan direhab				7 Ruang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	7 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang akan direhabilitasi				5 Ruang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	5 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang akan direhabilitasi				3 Ruang	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Ruang	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang akan direhabilitasi				2 Ruang	620,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Ruang	620,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang akan direhabilitasi				3 Ruang	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Ruang	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium bahasa yang akan direhabilitasi				3 Ruang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Ruang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang akan direhabilitasi				3 Ruang	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Ruang	800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang akan direhabilitasi				3 Ruang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Ruang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang akan direhabilitasi				8 Ruang	2,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	8 Ruang	2,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang akan direhabilitasi				2 Ruang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Ruang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan direhabilitasi				2 Ruang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Ruang	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana ,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan direhabilitasi				6 Ruang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	6 Ruang	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang akan direhabilitasi				3 Paket	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Paket	470,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang akan direhabilitasi				2 Unit	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang akan direhabilitasi				3 Unit	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang akan direhabilitasi				2 Ruang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang telah disediakan				5 Jenis	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang akan disediakan				5 Jenis	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang akan disediakan				5 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang akan disediakan				1 Jenis	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	1 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas sekolah yang akan disediakan				1 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang diadakan				3 Jenis	3,685,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dirawat/dipelihara				2 Ruang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dirawat/dipelihara				2 Ruang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dirawat/dipelihara				3 Ruang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	3 Ruang	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang akan mendapatkan Biaya Personil				118 Siswa	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	118 Siswa	1,550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang diadakan				6 Unit	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	6 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Belajar dan ujian Peserta Didik				200 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	200 Orang	320,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				2 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa dan/atau satuan pendidikan yang akan mengikuti lomba-lomba				378 Siswa	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	378 Siswa	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMA yang telah mengikuti kegiatan pengembangan karir dan/atau profesi				100 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	100 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMA yang telah mengikuti kegiatan pengembangan karir dan/atau profesi				450 Orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	450 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Lembaga dan Manajemen Sekolah Menengah Atas yang akan dibina				75 Sekolah	2,264,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	75 Sekolah	420,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah SMA Negeri Penerima Dana BOS Reguler, Kinerja dan Afirmasi				75 Sekolah	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	75 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kapasitas Pengelolaan Dana BOS				5 Sekolah	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas se Sulawesi Barat	5 Sekolah	230,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang dikelola	Sekolah		Sekolah	138 Sekolah	85,790,867,600						138 Sekolah	118,410,000,000	
1		01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang akan dibangun				3 Unit	15,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Unit	55,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Akan dibangun				3 Ruang	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan dibangun				3 Ruang	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Ruang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang akan dibangun				13 Ruang	16,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	13 Ruang	17,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang akan dibangun				30 Ruang	8,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	30 Ruang	9,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang akan dibangun				18 Ruang	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	18 Ruang	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang akan dibangun				8 Ruang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	8 Ruang	1,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang akan dibangun				4 Ruang	1,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	4 Ruang	1,350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan dibangun				4 Unit	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	4 Unit	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan dibangun				5 Jenis	1,550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	5 Jenis	7,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang akan dibangun				1 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Paket	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang akan dibangun				2 Paket	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	2 Paket	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang akan dibangun				1 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Unit	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang akan dibangun				1 Paket	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Paket	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang akan direhabilitasi				54 Ruang	7,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	54 Ruang	7,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan direhabilitasi				4 Paket	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	4 Paket	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang akan direhabilitasi				7 Ruang	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	7 Ruang	4,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang akan direhabilitasi				2 Ruang	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	2 Ruang	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang akan direhabilitasi				4 Ruang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	4 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang akan direhabilitasi				3 Ruang	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Ruang	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang akan direhabilitasi				3 Ruang	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Ruang	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan direhabilitasi				1 Ruang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana ,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan direhabilitasi				27 Ruang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	27 Ruang	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang akan direhabilitasi				2 Paket	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	2 Paket	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang akan direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang akan direhabilitasi				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Unit	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang akan direhabilitasi				3 Paket	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang telah disediakan				5 Jenis	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang akan disediakan				5 Jenis	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang akan disediakan				5 Jenis	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang akan disediakan				4 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	4 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas sekolah yang akan disediakan				1 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang diadakan				96 Paket	4,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	96 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dirawat/dipelihara				3 Ruang	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dirawat/dipelihara				3 Ruang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dirawat/dipelihara				3 Ruang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	3 Ruang	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang akan mendapatkan Biaya Personil				11284 Siswa	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	11284 Siswa	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga siswa				20 Paket	4,624,467,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	20 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang diselenggarakan				1 Kegiatan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Kegiatan	320,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	umlah laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa dan/atau satuan pendidikan yang akan mengikuti lomba-lomba				414 Siswa	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	414 Siswa	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				130 Orang	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	130 Orang	470,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK yang telah mengikuti kegiatan pengembangan karir dan/atau profesi				335 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	335 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang akan dibangun				1 Unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Lembaga dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan yang akan dibina				60 Sekolah	3,316,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	60 Sekolah	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah SMK Negeri Penerima Dana BOS Reguler, Kinerja dan Afirmasi				60 Sekolah	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	60 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Kapasitas Pengelolaan Dana BOS				6 Sekolah	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se Sulawesi Barat	6 Sekolah	270,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa yang dikelola	Sekolah		Sekolah	25 Sekolah	23,277,200,000						25 Sekolah	66,980,000,000	
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang akan dibangun				1 Unit	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Unit	55,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Akan dibangun				3 Ruang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan dibangun				2 Ruang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	2 Ruang	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang akan dibangun				9 Ruang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	9 Ruang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang akan dibangun				5 Ruang	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	5 Ruang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang akan dibangun				2 Ruang	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	2 Ruang	725,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan dibangun				2 Unit	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	2 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan dibangun				2 Jenis	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	2 Jenis	1,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang akan dibangun				1 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Paket	230,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang akan dibangun				1 Paket	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang akan dibangun				1 Unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang akan dibangun				1 Paket	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang akan dibangun				1 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Paket	225,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang akan direhabilitasi				19 Ruang	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	19 Ruang	3,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang akan direhabilitasi				6 Ruang	900,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang akan direhabilitasi				2 Ruang	260,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	2 Ruang	260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang akan direhabilitasi				3 Ruang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	3 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang akan direhabilitasi				2 Ruang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	2 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang akan direhabilitasi				1 Paket	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang akan direhabilitasi				9 Ruang	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	9 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang akan direhabilitasi				1 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Paket	240,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang akan direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang akan direhabilitasi				1 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Unit	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang akan direhabilitasi				1 Ruang	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Ruang	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang akan direhab				1 Ruang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang akan direhab				2 Ruang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang telah disediakan				4 Jenis	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	4 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang akan disediakan				5 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	5 Jenis	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang akan disediakan				5 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	5 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang akan disediakan				4 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	4 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas sekolah yang akan disediakan				1 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang diadakan				3 Jenis	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	3 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dirawat/dipelihara				1 Ruang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dirawat/dipelihara				1 Ruang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dirawat/dipelihara				3 Ruang	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	3 Ruang	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mendapatkan biaya Personil				80 Siswa	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	80 Siswa	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga siswa Yang disediakan				6 Jenis	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	6 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang diselenggarakan				1 Kegiatan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Kegiatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa dan/atau satuan pendidikan yang akan mengikuti lomba-lomba				375 Siswa	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	375 Siswa	480,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Khusus				75 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	75 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus yang akan mengikuti kegiatan pengembangan karir dan/atau profesi				40 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	40 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Lembaga dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus yang akan dibina				60 Sekolah	847,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	60 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah SLB Negeri Penerima Dana BOS Reguler, Kinerja dan Afirmasi				13 Sekolah	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	13 Sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Kapasitas Pengelolaan Dana BOS				5 Sekolah	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa se Sulawesi Barat	5 Sekolah	230,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						1,790,000,000							1,195,000,000	
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						1,315,000,000							825,000,000	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang disusun				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang disusun				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Dokumen	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan menengah yang disediakan				350 Exemplar	615,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		350 Exemplar	230,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang diselenggarakan				1 Kegiatan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Kegiatan	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						475,000,000							370,000,000	
1		01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang disusun				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang disusun				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Dokumen	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang disediakan				350 Exemplar	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		350 Exemplar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						1,000,000,000							600,000,000	
1		01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi						1,000,000,000							600,000,000	
1		01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang dihitung dan dipetakan				100 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		100 Orang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang disusun				200 Orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		200 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						1,800,000,000							650,000,000	
1		01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1,800,000,000							650,000,000	
1		01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi Yang dikoordinasikan				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1		01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang dipublikasikan				1 Kegiatan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Kegiatan	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	01	06	1.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang diberi Penghargaan				10 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		10 Orang	225,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	06	1.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang disediakan dan didistribusikan				2350 Exemplar	850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		2350 Exemplar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan				30 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		30 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang disusun				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						15,270,000,000								10,790,000,000		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Kebudayaan yang Direvitalisasi dan Dilestarikan	Persen		Persen	80 Persen	4,200,000,000						80 Persen	2,770,000,000			
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kebudayaan dalam Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang telah dikembangkan	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	2,000,000,000						7 Kegiatan	1,950,000,000			
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah dilindungi dan dikembangkan				45 Orang	1,650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Pengelola sanggar/Lembaga Kebudayaan	45 Orang	1,750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pembuatan Film Dokumenter				30 Orang	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Pengelola sanggar/Lembaga Kebudayaan	30 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						550,000,000							820,000,000			
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Komunitas yang Mengikuti Kegiatan Festival Musik Rebana Tradisional				30 Komunitas	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		30 Komunitas	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti keigatan				700 Orang	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		700 Orang	620,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1,650,000,000							0			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pemanfaatan Objek Pemajuan lembaga Adat				10 Lembaga	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		10 Lembaga	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina				20 Lembaga	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		20 Lembaga	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				5 Paket	1,050,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		5 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang Dibina dan Berkarya	Persen		Persen	70 Persen	1,000,000,000						70 Persen	120,000,000	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian dalam Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota yang telah dibina	Lembaga		Lembaga	50 Lembaga	1,000,000,000						50 Lembaga	120,000,000	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang ditingkatkan				3 Kegiatan	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Kelompok masyarakat Pelaku Seni	3 Kegiatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				40 Orang	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Kelompok masyarakat Pelaku Seni	40 Orang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Lembaga	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Kelompok masyarakat Pelaku Seni	50 Lembaga	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persen		Persen	60,00 Persen	2,940,000,000						60,00 Persen	860,000,000	
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						2,940,000,000							860,000,000	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah yang di berdayakan				30 Lembaga	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30 Lembaga	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah sarana dan Prasarana yang disediakan				5 Kegiatan	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 Kegiatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Buku Sejarah Daerah Lokal Provinsi yang disediakan dan di distribusikan				4536 Eksamp	840,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4536 Eksamp	860,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal yang ditingkatkan				2 Dokume	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokume	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen		Persen	80 Persen	5,780,000,000						80 Persen	5,570,000,000	
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						300,000,000							350,000,000	
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang telah diregister				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang akan ditetapkan				5 lokasi	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5 lokasi	175,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Situs		Situs	2 Situs	5,480,000,000						2 Situs	5,220,000,000	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasi				2 Situs	530,000,000	Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	2 Situs	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister				10 Situs	4,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	10 Situs	4,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister				10 Situs	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	10 Situs	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregister				2 Situs	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	2 Situs	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi dan Dikembangkan	Persen		Persen	70 Persen	1,350,000,000						70 Persen	1,470,000,000	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi						1,350,000,000							1,470,000,000	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi pengembangan museum				1 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	325,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Tenaga Pengelola Museum yang mengikuti pelatihan				40 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40 Orang	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2		22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatnya layanana terhadap Museum				1 keg	250,000,000	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 keg	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang dalam pemeliharaan				1 Paket	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	425,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Museum yang direvitalisasi				1 Unit	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Unit	275,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						51,621,575,381							58,358,543,251	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	17,518,787,309						82 Poin	19,489,243,251	
1	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Untuk Lingkup Dinas Kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	341,999,640						70 Persen	290,000,000	
1		02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	48,612,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	2 Dokumen	20,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				1 Dokumen 2 Dokumen	28,631,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 2 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				1 Dokumen	37,019,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				1 Dokumen	32,456,700	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)				1 Dokumen	32,121,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				12 Laporan	125,885,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	12 Laporan	130,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	37,272,240	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Untuk Lingkup Dinas Kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	13,831,667,251						70 Persen	15,809,243,251	
1		02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				140 Orang	13,712,243,251	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	140 Orang	15,712,243,251	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Dokumen	31,475,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 persen	35,508,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	100 persen	30,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				12 Dokumen	32,441,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	12 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	24 Poin	70,480,000						24 Poin	80,000,000	
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimonitoring				6 Kabupaten	70,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Dinkes Sulbar	6 Kabupaten	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Sakip Untuk Lingkup Dinas Kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	458,030,000						70 Persen	480,000,000	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				150 Pasang	170,480,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	150 Pasang	170,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				8 Orang	157,990,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	8 Orang	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi				40 Orang	60,480,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	40 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis				40 Orang	69,080,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	40 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip Untuk Lingkup Dinas Kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	1,159,598,060						70 Persen	1,150,000,000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	20,480,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	10 Jenis	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Jenis 10 Jenis	70,480,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	2 Jenis 10 Jenis	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Jenis	85,787,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	2 Jenis	130,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Jenis	75,260,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Jenis	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak Jumlah Barang yang Digandakan Jumlah Jenis Barang yang Dicetak / Digandakan				20 Jenis 20 Jenis 2 Jenis	31,791,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	20 Jenis 20 Jenis 2 Jenis	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan				6 Jenis	60,150,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Jenis	65,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				43 Jenis	68,206,460	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	43 Jenis	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi KeDalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi KeLuar Daerah				90 Laporan 33 Laporan	747,443,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	90 Laporan 33 Laporan	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Untuk Lingkup Dinas Kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	160,714,500						70 Persen	175,000,000	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				11 Jenis	138,774,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	11 Jenis	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				1 Jenis	21,940,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Jenis	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Untuk Lingkup Dinas Kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	1,070,553,558						70 Persen	1,050,000,000	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	539,987,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	100 Persen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				24 Rekening	434,674,808	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	24 Rekening	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan				12 Bulan 4 Jenis	95,891,250	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	12 Bulan 4 Jenis	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Untuk Lingkup Dinas Kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	425,744,300						70 Persen	455,000,000	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan				1 Unit	123,740,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				4 Unit	156,150,300	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	4 Unit	180,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor				3 Unit	145,854,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	3 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Mutu Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standar	Persen		Persen	75 Persen	30,458,658,072						75 Persen	34,899,300,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	6,887,000,000					70.53 Persen	12,397,650,000		
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak yang di Bangun Sarana dan Prasarana Pendukungnya				1 Unit	1,088,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	2,800,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Terbangun				1 Unit	1,044,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Hibah PMI yang dibayarkan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dikembangkan				1 Paket 1 Unit	1,690,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Paket 1 Unit	1,250,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Layanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) Jumlah Rumah Sakit Keliling yang Diadakan				6 Kabupaten 1 Unit	250,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten 1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes yang di rehab/dipelihara				2 Unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	2 Unit	541,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				1 Paket	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Paket	402,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Tersedia				5 Sarana	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	5 Sarana	400,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Tersedia				1 Paket	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Paket	541,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium				1 Paket 1 Paket	1,080,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Karema	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Paket 1 Paket	1,109,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara				1 Paket	215,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Paket	250,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Psarana Fasilitas Layanan Kesehatan Yg Terpelihara				1 Paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Paket	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Telemedicine Yang tersedia di Faskes				3 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	3 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Frekuensi Pemenuhan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				6 Kabupaten	120,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Diadakan				1 Paket	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Paket	250,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	22,476,658,072						70.53 Persen	20,881,650,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Kabupaten yang Dilayani Akibat Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				6 Kabupaten	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten	541,650,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi KLB Provinsi				100 persen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	100 persen	450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Bayi Resiko Tinggi yang Mendapatkan Pendampingan Jumlah Distric Team Problem (DPS) yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Ibu Hamil Resiko Tinggi yang Mendapatkan Pendampingan Jumlah Nakes di Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil Jumlah Nakes yang Mendapatkan Orientasi MTBS (Manajamen Terpadu Balita Sakit) Jumlah Nakes yang Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Jumlah Nakes Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dalam Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Jumlah Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Jumlah Peserta TOT Audit Maternal Perinatal Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan Antenatal Care Terstandar				100 Orang 7 Tim 1000 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	100 Orang 7 Tim 1000 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang	2,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapatkan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Desa MARASA yang Mendapatkan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Gizi yang Tersusun Jumlah Dokumen Hasil Pemutkhiran Data Dan Surveilans Gizi Jumlah Dokumen Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang yang Tersusun Jumlah Ibu Kekurangan Energi Kronis (KEK) Mendapatkan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Gizi Jumlah Orang yang Mengikuti Diseminasi Data Gizi Jumlah Orang yang Mengikuti TOT Fasilitator PAGT (Pelayanan Asuhan Gizi Terpadu) Jumlah Paket Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus Jumlah Petugas yang Dilatih Konseling dan Edukasi Gizi Jumlah Petugas yang Dilatih Mapping Gizi Buruk Dan Gizi Kurang Jumlah Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah				500 Orang 6 Kabupaten 2 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 6 Kabupaten 30 Orang 50 Orang 2 Unit 50 Orang 105 Orang 6 Kabupaten	5,280,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	500 Orang 6 Kabupaten 2 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 6 Kabupaten 30 Orang 50 Orang 2 Unit 50 Orang 105 Orang 6 Kabupaten	1,300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Diukur Tingkat Kebugarannya Jumlah Pengawasan dan Pembinaan di Perusahaan yang Menyelenggarakan K3 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) Dibina Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pembinaan Kesehatan Kerja Dasar				100 Orang 12 Perusahaan 12 UKK 6 Kabupaten	235,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	100 Orang 12 Perusahaan 12 UKK 6 Kabupaten	350,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1		02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Kabupaten 12 Desa 1 Kabupaten 4 Pasar 50 Petugas 50 Petugas 50 Orang 12 Sekolah	595,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten 12 Desa 1 Kabupaten 4 Pasar 50 Petugas 50 Petugas 50 Orang 12 Sekolah	600,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				45 persen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	45 persen	70,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen 50 Desa 6 Kabupaten 6 Kabupaten 50 Orang 6 kabupaten 33 Orang 40 Orang	1,080,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Dokumen 50 Desa 6 Kabupaten 6 Kabupaten 50 Orang 6 kabupaten 33 Orang 40 Orang	1,200,000,000	Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Jamaah Haji yang Dilakukan Pengukuran Kebugaran Jumlah Jamaah Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang 1000 Orang	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1000 Orang 1000 Orang	350,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Lintas Sektor Bekerjasama Dengan Dinas Provinsi Dalam Penaganan Kesehatan Jiwa Jumlah Petugas Kesehatan/Tokoh Masyarakat/Lintas Sektor Terkait yang Mengikuti Sosialisasi Bebas Pasung Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Bimbingan Kesehatan Jiwa Jumlah Satgas ODMK yang Terbentuk dan Difasilitasi				1 Dokumen 50 Orang 50 Orang 7 Satgas	235,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 50 Orang 50 Orang 7 Satgas	450,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kabupaten Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Supervisi Program NAPZA Jumlah Petugas Kesehatan yang Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis Program NAPZA				6 Kabupaten 90 Orang	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten 90 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Kebijakan Teknis Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Tersusun Jumlah Peserta yang Dipenuhi luran PBI-nya				6 Kabupaten 7 Dokumen 234637 Orang	10,056,658,072	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten 7 Dokumen 234637 Orang	11,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Fasilitasi Coold Room Jumlah Anak Usia 0 - 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Jumlah Anak Usia 18 - 24 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Lanjutan Jumlah Anak Usia Sekolah Dasar yang Mendapatkan Imunisasi Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masaal yang Dilakukan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging Jumlah Penemuan Kasus Penyakit yang Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Jumlah Petugas Survelens yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)				1 Unit 29782 Orang 83513 Orang 28363 Orang 6 Kabupaten 50 Orang 59 Kasus 103 Petugas 6 Kabupaten	840,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit 29782 Orang 83513 Orang 28363 Orang 6 Kabupaten 50 Orang 59 Kasus 103 Petugas 6 Kabupaten	900,000,000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen E-Costing SPM Bidang Kesehatan Kabupaten dan Provinsi yang Tersusun Jumlah Kabupaten Mendapatkan Pemantauan dan Evaluasi SPM Bidang Kesehatan Jumlah Kabupaten yang dimoring DAK Kesehatan Jumlah Orang Mengikuti Rapat Kerja Kesehatan Daerah Jumlah Peserta Koordinasi SPM Bidang Kesehatan				7 Dokumen 6 Kabupaten 6 Kabupaten 200 Orang 35 Orang	330,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	7 Dokumen 6 Kabupaten 6 Kabupaten 200 Orang 35 Orang	350,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Fasilitas, Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Program Upaya Pelayanan Kesehatan				6 Kabupaten 300 Orang	215,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten 300 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan verifikasi untuk registrasi Puskesmas				6 Puskesmas	185,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	6 Puskesmas	200,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas yang menggunakan Aplikasi SPGDT				108 Unit	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	108 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas Pelayanan kesehatan yang mendapatkan pendampingan				18 Faskes	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	18 Faskes	150,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan yang dilaksanakan				1 Penelitian	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	1 Penelitian	150,000,000	Dinas Kesehatan
1		02	02	1.02	29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Jumlah kabupaten yang mendapatkan penilaiaan / Appraisal sarana dan prasarana dan alat kesehatan pasca bencana				6 Kabupaten	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten	170,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02		1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	537,000,000						70.53 Persen	600,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Pengelola Data yang Mendapatkan Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Peserta Pemutakhiran Data, Diseminasi dan Analisis Data Kesehatan Jumlah Profil Anggaran Kesehatan yang Tersusun Jumlah Puskesmas Mendapatkan Pembinaan Analisis Data Kesehatan				127 Orang 90 Orang 1 Dokumen 6 Kabupaten	257,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	127 Orang 90 Orang 1 Dokumen 6 Kabupaten	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah orang mendapatkan pelatihan pengelolaan sistem informasi kesehatan				60 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	60 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Aplikasi kesehatan yang diadakan				2 Aplikasi	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	2 Aplikasi	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	558,000,000						70.53 Persen	1,020,000,000	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang melakukan pengawasan dan tindak lanjut perizinan rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan				2 Rumah Sakit	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	2 Rumah Sakit	170,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Peserta Pertemuan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Jumlah Peserta Pertemuan Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Jumlah Rumah Sakit Mendapatkan Pembinaan Rujukan dan Rujukan Balik Jumlah Rumah Sakit Mendapatkan Pembinaan Rujukan dan Rujuk Balik Jumlah Rumah Sakit Mendapatkan Pembinaan Rujukan dan Rujuk Balik				7 Puskesmas 50 Orang 6 Kabupaten 6 Kabupaten 11 Faskes	288,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	7 Puskesmas 50 Orang 6 Kabupaten 6 Kabupaten 11 Faskes	700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah peserta workshop standarisasi mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan				108 Orang	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	108 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen		Persen	75 Persen	1,730,910,000						75 Persen	1,300,000,000	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	1,146,000,000						70.53 Persen	650,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah MOU Dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi yang Tersusun Jumlah Tenaga Kesehatan yang Diadakan Melalui Kontrak Provinsi				2 Dokumen 50 Orang	810,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	2 Dokumen 50 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pemerataan SDM Kesehatan				35 Orang	336,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	35 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	584,910,000						70.53 Persen	650,000,000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Dengan Jabatan Fungsional Kesehatan yang Mendapatkan Uji Komptensi Jumlah Tenaga Kesehatan Dengan Jabatan Fungsional Kesehatan yang Mendapatkan Uji Komptensi				60 Orang 20 Orang 150 Orang	504,910,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	60 Orang 20 Orang 150 Orang	550,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen monitoring evaluasi program SDM Kesehatan yang tersusun				5 Dokumen	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	5 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Sesuai Standar	Persen		Persen	100 Persen	780,380,000						100 Persen	900,000,000	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	484,110,000						70.53 Persen	550,000,000	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Persentase Produk Alkes dan PKRT Diperedaran yang Memenuhi Standar				75 persen	384,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	75 persen	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah ijin Pedagang Besar Farmasi(PBF) danCabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang diterbitkan				5 Izin	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	5 Izin	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	296,270,000						70.53 Persen	350,000,000	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Diperedaran yang Memenuhi Standar				75 persen	196,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	75 persen	200,000,000	Dinas Kesehatan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah petugas kesehatan mendapatkan bimbingan teknis keamanan pangan				30 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pembangunan Manusia	Provinsi Sulawesi Barat	30 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten yang Menetapkan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	1,132,840,000						100 Persen	1,770,000,000		
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	580,000,000						70.53 Persen	900,000,000		
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Desa Marasa Mendapatkan Pendampingan Pembinaan Desa Siaga Jumlah Kabupaten yang Mendapatkan Intervensi GERMAS Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Mendukung Program Kesehatan Jumlah Orang yang Mengikuti Perkemahan Saka Bakti Husada Tingkat Daerah Sulawesi Barat Jumlah Pembina Saka Bakti Husada yang Mengikuti Kursus Mahir Dasar Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kesehatan Jumlah Regulasi Kesehatan (Kawasan Tanpa Rokok, ASI , PIS PK)			12 Desa 2 Kabupaten 6 Dokumen 500 Orang 120 Orang 50 Orang 5 Dokumen	580,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	12 Desa 2 Kabupaten 6 Dokumen 500 Orang 120 Orang 50 Orang 5 Dokumen	900,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Persen		Persen	70.53 Persen	552,840,000						70.53 Persen	870,000,000		
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Penyebaran Media Informasi Kesehatan Jumlah Orang Mendaptkan Advokasi Kebijakan Publik yang Berwawasan kesehatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan Konselor Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Desa MARASA Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Pelatihan Publik Speaking Bidang Kesehatan Jumlah Petugas Kesehatan yang Mendapatkan Workshop Desain Grafis dan Multimedia Kesehatan Jumlah Studio Informasi Kesehatan			5 persen 50 Orang 50 Orang 50 Orang 60 Orang 1 Dokumen	552,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	5 persen 50 Orang 50 Orang 50 Orang 60 Orang 1 Dokumen	870,000,000	Dinas Kesehatan		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						101,277,524,077				124,604,773,690					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen		Persen	100 Persen	79,583,901,892					100 Persen	82,066,086,190		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	186,450,000					6 Dokumen	186,450,000		
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 dokumen	10,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dokumen perencanaan penganggaran	4 dokumen	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang terseusun				1 dokumen	129,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dokumen perencanaan penganggaran	1 dokumen	129,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun				1 dokumen	15,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dokumen perencanaan penganggaran	1 dokumen	15,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	7,350,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dokumen perencanaan penganggaran	1 dokumen	7,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	7,350,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dokumen perencanaan penganggaran	1 dokumen	7,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun				4 dokumen	15,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dokumen perencanaan penganggaran	4 dokumen	15,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan yang terlaksana	Laporan		Laporan	8 Laporan	40,973,246,541						8 Laporan	41,996,822,705	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				352 Org	40,943,046,541	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Laporan Keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat	352 Org	41,966,622,705	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	7,350,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Laporan Keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	7,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	persentase bahan tanggapan pemeriksaan				80 %	8,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Laporan Keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat	80 %	8,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				4 Laporan	7,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Laporan Keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat	4 Laporan	7,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang terseusun				2 Laporan	7,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Laporan Keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat	2 Laporan	7,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Adminstrasi Barang milik daerah yang terlaksana	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen	5,000,000	
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian yang terlaksana	Laporan		Laporan	3 Laporan	1,639,833,026						3 Laporan	1,771,756,852	
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				351 Pasang	210,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai RSUD Provinsi Sulawesi Barat	351 Pasang	306,793,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai RSUD Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	6,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				60 Org	1,423,233,026	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai RSUD Provinsi Sulawesi Barat	60 Org	1,458,813,852	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang terlaksana	Jenis		Jenis	15 Jenis	2,050,000,000						15 Jenis	2,101,250,000	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang disediakan				5 Jenis	125,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Peralatan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	5 Jenis	128,125,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Jenis	125,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Peralatan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	5 Jenis	128,125,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan				5 Jenis	1,500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Peralatan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	5 Jenis	1,537,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah				25 Laporan	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Peralatan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	25 Laporan	307,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana yang di adakan	Unit		Unit	5 Unit	1,247,500,000						5 Unit	1,278,687,500	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				2 Unit	997,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Prasarna di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	2 Unit	1,022,437,500	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				3 Jenis	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Prasarna di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	3 Jenis	256,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Laporan		Laporan	4 Laporan	3,874,950,000						4 Laporan	4,373,598,750	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				80 %	6,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Jasa Pihak Ketiga	80 %	407,925,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang di bayarkan				24 Rekening	1,260,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Jasa Pihak Ketiga	24 Rekening	1,291,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak				30 Unit	208,950,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Jasa Pihak Ketiga	30 Unit	214,173,750	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				12 Bulan	2,400,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Jasa Pihak Ketiga	12 Bulan	2,460,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang Milik Daerah yang terlaksana	Jenis		Jenis	3 Jenis	1,088,000,000						3 Jenis	1,120,625,000	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				8 Unit	63,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sarana prasarana di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	8 Unit	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Jenis	525,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sarana prasarana di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	20 Jenis	538,125,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor				3 Jenis	500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sarana prasarana di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	3 Jenis	512,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cost Recovery	%		%	80 %	28,518,922,325						80 %	29,231,895,383	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Cost Recovery				80 %	28,518,922,325	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Pendapatan dari BLUD		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Mutu Layanan di RSUD Provinsi Sulawesi Barat	80 %	29,231,895,383	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan yang Dilaksanakan	Persen		Persen	90 Persen	19,568,622,185						90 Persen	42,063,687,500	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Unit		Unit	66 Unit	16,824,872,185						66 Unit	40,375,000,000	
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana Prasarana yang diadakan				50 Unit	10,187,004,849	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	50 Unit	35,875,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit Yang diadakan				1 Unit	3,816,351,236	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang di Direhabilitasi				5 Unit	196,516,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	5 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alkes yang diadakan				10 Unit	2,625,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	10 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Unit Layanan RS yang Terintegrasi SIM RS	Unit layanan		Unit layanan	20 Unit layanan	145,000,000						20 Unit layanan	148,625,000	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen profil RS yang tersedia				1 dokumen	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Mutu Pelayanan Rumah Sakit	1 dokumen	35,875,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan Pemuktahiran data SIM RS dan ASPAK RS				80 %	110,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Mutu Pelayanan Rumah Sakit	80 %	112,750,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Ijin Operasional Rumah Sakit yang Terbit	Surat		Surat	1 Surat	2,598,750,000						1 Surat	1,540,062,500	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah pergub/produk hukum RS				10 Pergub	1,148,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Mutu Pelayanan Rumah Sakit	10 Pergub	53,812,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Capaian Tingkat Akreditasi				100 %	1,450,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Mutu Pelayanan Rumah Sakit	100 %	1,486,250,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih	Persen		Persen	90 Persen	2,125,000,000						90 Persen	475,000,000	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	25 Kegiatan	2,125,000,000						25 Kegiatan	475,000,000	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih				875 OK	2,125,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Tenaga Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	875 OK	475,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						215,313,395,806						247,750,200,000		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	27,075,949,182						82 Poin	28,580,200,000	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD	Poin		Poin	20.5 Poin	500,000,000						20.5 Poin	588,000,000	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Forum OPD, Penelaahan POKIR DPRD, Musrenbang) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 2 Dokumen 5 Laporan	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Dokumen 2 Dokumen 5 Laporan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPAD yang tersusun				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPAD yang tersusun				1 Dokumen	8,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPAD yang tersusun				1 Dokumen	8,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun				12 Laporan	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun (LPPD, LKPJ, LKJIP, Evaluasi Triwulan Renja) Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah				10 Item 7 Dokumen 1 Laporan	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Item 7 Dokumen 1 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	Persen		Persen	98 Persen	14,015,839,371						98 Persen	18,602,250,000	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				165 Orang	13,736,339,371	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	165 Orang	18,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan				100 Persen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100 Persen	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				24 Laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24 Laporan	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan				12 Laporan	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12 Laporan	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang tersusun				1 Laporan	27,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Laporan	85,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan				100 Persen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100 Persen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang tersusun				1 Laporan	17,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Laporan	17,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Persen		Persen	100 Persen	94,556,435						100 Persen	90,000,000	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang milik daerah (RK-BMD) SLPD yang tersusun				1 Dokumen	22,056,435	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Penegndalian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	72,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Laporan	70,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Persen		Persen	100 Persen	1,545,000,000						100 Persen	950,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang diadakan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan Jumlah Pakaian Kerja Pegawai Tidak Tetap yang diadakan Jumlah Pakaian PSL Eselon II dan Eselon III				215 Pasang 215 Pasang 150 Pasang 9 Pasang	775,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215 Pasang 215 Pasang 150 Pasang 9 Pasang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan hasil pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				45 Orang	720,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	45 Orang	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Persen		Persen	100 Persen	1,494,008,930						100 Persen	1,227,950,000	
1		03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				10 Jenis	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 Jenis	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				5 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5 Jenis	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan				7 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 Jenis	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan yang disediakan Jumlah Jenis Minuman yang disediakan				2 Jenis 2 Jenis	176,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Jenis 2 Jenis	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak (spanduk, map dsb) Jumlah barang yang digandakan (buku, dsb)				518 Buah 350 Eksemplar	56,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	518 Buah 350 Eksemplar	77,950,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan Jumlah Jenis Bahan Peraturan perundang-undangan yang disediakan				3 Jenis 2 Jenis	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Jenis 2 Jenis	80,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan				60 Jenis	184,915,930	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60 Jenis	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi/konsultasi di dalam daerah Jumlah laporan hasil rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah				30 Laporan 15 Laporan	861,343,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30 Laporan 15 Laporan	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	Persen		Persen	98 Persen	6,905,353,090						98 Persen	4,890,000,000	
1		03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan				7 Unit	850,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7 Unit	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

[illegible]

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai						0							0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing						0							0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						0							0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jaringan Irigasi yang Terbangun yang dipelihara setiap Tahunnya	Persen		Persen	31.77 Persen	23,064,846,160						31.77 Persen	41,650,000,000	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun				4 Dokumen	3,678,224,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Sumber Daya Air	4 Dokumen	1,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Pengujian mutu terhadap pekerjaan Konstruksi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun				5 Pengujian 7700 Meter	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Sumber Daya Air	5 Pengujian 7700 Meter	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi						0						Bidang Sumber Daya Air	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi jaringan irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatakan				5 Pengujian 1000 Meter	8,140,635,120	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Sumber Daya Air	5 Pengujian 1000 Meter	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi jaringan irigasi (DAK) Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi (DAK)				3 Pengujian 12000 Meter	4,867,580,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Sumber Daya Air	3 Pengujian 12000 Meter	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Besarnya Volume bendung yang direhabilitasi Jumlah pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi bendung irigasi				2000 Meter 3 Penujian	3,378,407,040	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Sumber Daya Air	2000 Meter 3 Penujian	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara				8000 Meter	1,550,894,125	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro				Bidang Sumber Daya Air	8000 Meter	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Besarnya volume bendung yang dipelihara				400 M3	1,449,105,875	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Sumber Daya Air	400 M3	1,850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah yang Diproduksi SPAM Regional	Persen		Persen	10 Persen	250,000,000						10 Persen	500,000,000	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah yang Diproduksi SPAM Regional	Persen		Persen	10 Persen	250,000,000						10 Persen	500,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknis terkait pengelolaan SPAM Regional				0 Orang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Cipta Karya	0 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan SPAM Regional yang tersusun				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Tingkat Penurunan Luas Daerah Genangan Air di Kawasan Strategis Provinsi	Persen		Persen	3,87 Persen	0						3,87 Persen	5,500,000,000	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Luas Daerah Genangan air (banjir) dikawasan Strategis Provinsi	Ha		Ha	22662 Ha	0						22662 Ha	5,500,000,000	
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi Drainase Panjang Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya				0 Pengujian 0 Meter	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Cipta Karya	0 Pengujian 0 Meter	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang Termanfaatkan	Persen		Persen	72,41 Persen	19,988,504,200						72,41 Persen	21,700,000,000	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Luas Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang Terbangun	Ha		Ha	39.1 Ha	19,988,504,200						39.1 Ha	21,700,000,000	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi bangunan gedung umlah bangunan gedung yang direncanakan dan dibangun untuk kepentingan strategis daerah provinsi				7 Pengujian 7 unit	8,917,004,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Ciptakarya	7 Pengujian 7 unit	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan Strategis daerah Provinsi yang direhabilitasi, direnovasi atau diubahsuai				7 unit	11,071,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Ciptakarya	7 unit	1,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan Strategis daerah Provinsi yang dipelihara dan dirawat				0 unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Ciptakarya	0 unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Luas Wilayah di Kawasan Strategis Provinsi yang Telah Dikembangkan	Persen		Persen	0,20 Persen	14,986,000,000						0,20 Persen	2,165,000,000	
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditata Sesuai Peruntukannya	Ha		Ha	100 Ha	14,986,000,000						100 Ha	2,165,000,000	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DED Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersusun				0 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Cipta Karya	0 Dokumen	165,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah paket penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terbangun Jumlah Pengujian Mutu terhadap pekerjaan konstruksi bangunan dan Lingkungan				7 Paket 7 Pengujian	14,986,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Cipta Karya	7 Paket 7 Pengujian	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Persen		Persen	64,41 Persen	125,998,096,264						64,41 Persen	143,150,000,000	
1		03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Panjang Jalan Provinsi yang Terbangun/Ditingkatkan dan Dipelihara setiap tahunnya	Persen		Persen	34.32 Persen	125,998,096,264						34.32 Persen	143,150,000,000	
1		03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen hasil survey kondisi jalan provinsi				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Bina Marga	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Jumlah pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi jalan Panjang jalan provinsi yang dibangun				10 Pengujian 21.19 Km	92,977,064,444	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Bina Marga	10 Pengujian 21.19 Km	115,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi jalan (DAK) Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan (DAK)				2 Pengujian 6.69 Km	17,985,191,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Bina Marga	2 Pengujian 6.69 Km	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Provinsi yang dipelihara				168 Km	4,036,500,000	Kab. Majene, Banggae, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Bina Marga	168 Km	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah pengujian mutu terhadap pekerjaan konstruksi jembatan Panjang jembatan pada ruas jalan provinsi yang dibangun				4 Pengujian 20 Meter	9,735,840,820	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Bina Marga	4 Pengujian 20 Meter	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan pada ruas jalan provinsi yang dipelihara				120 Meter	541,000,000	Kab. Majene, Banggae, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Bina Marga	120 Meter	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan/jembatan dalam kondisi tanggap darurat bencana yang ditangani				10 Km	422,500,000	Kab. Majene, Banggae, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Bina Marga	10 Km	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Keterpenuhan Tenaga Ahli Konstruksi yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat	Persen		Persen	60 Persen	1,600,000,000						60 Persen	2,205,000,000	
1		03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang Tersertifikasi di Provinsi Sulawesi Barat	Persen		Persen	86.42 Persen	900,000,000						86.42 Persen	925,000,000	
1		03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli konstruksi yang diberi pelatihan dan sertifikasi				60 Orang	900,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Jasa Konstruksi	60 Orang	770,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Asosiasi Konstruksi yang diberi pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan				30 Asosiasi	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Jasa Konstruksi	30 Asosiasi	155,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1		03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Barat	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000						100 Persen	780,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan hasil pengelolaan layanan SIPJAKI				1 Laporan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Jasa Konstruksi	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang disiapkan				7 Perangkat	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Jasa Konstruksi	7 Perangkat	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Administrator SIPJAKI yang diberi pelatihan				30 Orang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Jasa Konstruksi	30 Orang	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi cakupan Provinsi yang siap diolah				7 Data	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Jasa Konstruksi	7 Data	130,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						500,000,000							500,000,000	
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib usaha, Tertib penyelenggaraan dan Tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi				1 Dokumen	500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap RTRW Provinsi dari Sudut Pandang Struktur dan Pola Ruang Bidang Pekerjaan Umum	Persen		Persen	50 Persen	2,350,000,000						50 Persen	2,300,000,000	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase ketersediaan RTRW di Kawasan Strategis Provinsi	Persen		Persen	600 Persen	1,500,000,000						600 Persen	1,300,000,000	
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah dokumen pendukung dalam penyusunan RTRW Provinsi yang tersusun / PERDA				2 Dokumen	1,500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Penataan Ruang	2 Dokumen	1,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan Rencana Tata Ruang di Kawasan Strategis Provinsi	Persen		Persen	75 Persen	450,000,000						75 Persen	250,000,000	
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan RTRW Provinsi				2 Laporan	450,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Penataan Ruang	2 Laporan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan RTRW Provinsi Sulawesi Barat	Persen		Persen	60 Persen	200,000,000						60 Persen	400,000,000	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen NSPK yang trsusun				0 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah sistem Informasi Penataan Ruang yang diadakan				1 S.I	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Bidang Penataan Ruang	1 S.I	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran terhadap RTRw Provinsi yang terlapor	Laporan		Laporan	18 Laporan	200,000,000						18 Laporan	350,000,000	
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang yang dilaporkan				1 Laporan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	bidang Penataan Ruang	1 Laporan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten				1 Laporan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	bidang Penataan Ruang	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						36,079,868,551						36,079,868,551		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,420,868,511						82 Poin	7,420,868,511	
1	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	poin		poin	82 poin	592,200,374						82 poin	592,200,374	
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1 dokumen	15,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	65,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1 dokumen	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1 dokumen	70,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 laporan	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	2 laporan	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 dokumen	32,200,374	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	4 dokumen	32,200,374	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	poin		poin	82 poin	4,615,168,137						82 poin	4,615,168,137	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	4,508,168,137	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tingkat Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap perencanaan Lingkup OPD	100 Persen	4,508,168,137	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				5 laporan	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tingkat Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap perencanaan Lingkup OPD	5 laporan	25,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				5 laporan	12,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tingkat Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap perencanaan Lingkup OPD	5 laporan	12,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun				1 laporan	13,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tingkat Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap perencanaan Lingkup OPD	1 laporan	13,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tingkat Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap perencanaan Lingkup OPD	100 Persen	25,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				3 laporan	16,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tingkat Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap perencanaan Lingkup OPD	3 laporan	16,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 laporan	16,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tingkat Konsistensi penyerapan Anggaran terhadap perencanaan Lingkup OPD	1 laporan	16,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah PAD Retribusi Daerah	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000						100 Persen	150,000,000	
1	04	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah wajib retribusi sewa bangunan rusun asn				50 unit	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Jumlah PAD Retribusi Daerah	50 unit	150,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Diskripsi pekerjaan sesuai	persen		persen	100 persen	90,000,000						100 persen	90,000,000	
1	04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya				100 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur Lingkup SKPD	100 Persen	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai				100 Persen	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur Lingkup SKPD	100 Persen	25,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup SKPD				100 Persen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur Lingkup SKPD	100 Persen	15,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	jenis		jenis	50 jenis	688,500,000						50 jenis	688,500,000	
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor				45 jenis	18,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya administrasi Umum lingkup SKPD	45 jenis	18,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				60 jenis	16,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya administrasi Umum lingkup SKPD	60 jenis	16,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 jenis Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan				100 0	71,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya administrasi Umum lingkup SKPD	100 0	71,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak 0 buah Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				100 lembar	28,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya administrasi Umum lingkup SKPD	100 lembar	28,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				100 0	55,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya administrasi Umum lingkup SKPD	100 0	55,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				2 Dokumen	500,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya administrasi Umum lingkup SKPD	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengadaan barang milik Daerah penunjanh urusan Pemerintah Daerah	poin		poin	85 poin	625,000,000						85 poin	625,000,000	
1	04	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pengelolaan pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah				82 point	440,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Nilai SAKIP OPD	82 point	440,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				40 jenis	65,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Nilai SAKIP OPD	40 jenis	65,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				50 jenis	120,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Nilai SAKIP OPD	50 jenis	120,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	poin		poin	82 poin	660,000,000						82 poin	660,000,000	
1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	545,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	545,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				2 rekening	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 rekening	80,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				55 jenis	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	55 jenis	25,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	umlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang				0 bulan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	0 bulan	10,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persen		Persen	100 Persen	8,400,000,000						100 Persen	8,400,000,000	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	1,000,000,000						6 Dokumen	1,000,000,000	
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	jumlah identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Provinsi				500 unit	200,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurahan	500 unit	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Identifikasi Lahan-lahan Potesial sebagai Lokasi Relokasi Program Provinsi				500 unit	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurahan	500 unit	400,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				10 dokumen	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas			Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurah an	10 dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	jumlah pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau relokasi program provinsi				500 unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurah an	500 unit	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	400,000,000					5 Dokumen	400,000,000		
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	terlaksananya sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat tanggap bencana				100 org	100,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurah an	100 org	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	jumlah pelatihan tim satgas, tim pendamping dan fasilitator				500 orang	300,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurah an	500 orang	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah warga Negara yang terkena Bencana atau relokasi Program Provinsi	Unit		Unit	6 Unit	7,000,000,000					6 Unit	7,000,000,000		
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rehabilitasi rumah bagi korban bencana				500 unit	4,000,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurah an	500 unit	4,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana				100 unit	3,000,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan/Kelurah an	100 unit	3,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen		Persen	100 Persen	2,350,000,040					100 Persen	2,350,000,040		
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan dengan PSU	Unit		Unit	10 Unit	1,850,000,040					10 Unit	1,850,000,040		
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				5 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurah an	5 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	jumlah dokumen penadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh				5 dokumen	250,000,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurah an	5 dokumen	250,000,040	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pe mukiman Kembali Permukiman kumuh	jumlah kordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan/permukiman kembali permukiman kumuh				12 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurah an	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program peremajaan permukiman kumuh				5 Dokumen	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurah an	5 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	03	1.01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	jumlah serahterimahpemugaran peremajaanpermukimankumuh				3 unit	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurahan	3 unit	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah pelaksanaan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/premajaan permukiman kumuh				3 unit	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurahan	3 unit	150,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	jumlahpenyusunan dokumen /review/legalisasi kebijakanm bidang PKP				3 Dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurahan	3 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman				10 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten Kota Kecamatan/Kelurahan	10 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase peningkatan kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai 15 (lima belas) ha	unit		unit	50 unit	500,000,000						50 unit	500,000,000	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				50 unit	500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jumlah kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai 15 (lima belas) ha	50 unit	500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen		Persen	100 Persen	17,700,000,000						100 Persen	17,700,000,000	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang ditingkatkan dengan PSU	Unit		Unit	100 Unit	17,700,000,000						100 Unit	17,700,000,000	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum				32 Dokumen	5,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten	32 Dokumen	5,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana da Utilitas Umum di permukiman untuk Menunjang fungsi Permukman				87 Dokumen	12,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten	87 Dokumen	12,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana da Utilitas Umum di permukiman untuk Menunjang fungsi Permukman				5 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten	5 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang				10 dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten	10 dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Kerja sama Penyediaan/Penyelolaan PSU Permukiman				5 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Semua Kabupaten	5 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase sertifikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	209,000,000						4 Dokumen	209,000,000	
1	04	06		1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase sertifikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	209,000,000						4 Dokumen	209,000,000	
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencanaan PSU				5 Dokumen	209,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas				Jumlah sertifikasi Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	5 Dokumen	209,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						30,000,000,000						30,000,000,000		
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Ha		Ha	20 Ha	30,000,000,000						20 Ha	30,000,000,000	
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	ha		ha	20 ha	30,000,000,000						20 ha	30,000,000,000	
2	10	03	1.01	01	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah pengadaan tanah bagi Kepentingan Umum				100 Ha	30,000,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	jumlah lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	100 Ha	30,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						18,235,144,822						41,512,000,000		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen		Persen	100 Persen	17,675,144,822						100 Persen	28,322,000,000	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	260,345,861						100 Persen	692,000,000	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	132,745,861	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	4 Dokumen	160,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	38,800,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	38,800,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	2 Laporan	152,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	4 Dokumen	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	14,691,106,799						100 Persen	16,022,000,000	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				135 Orang	11,661,106,799	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	135 Orang	12,200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				195 Orang	2,925,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	195 Orang	3,500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	12 Laporan	52,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	100 Persen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				2 Laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	2 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				12 Laporan	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	12 Laporan	70,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	0					100 Persen	420,000,000		
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan				18 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	18 Unit	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai				18 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	18 Unit	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0					100 Persen	354,000,000		
1	05	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa dan Pengembangagn Retribusi Daerah, serta Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sarana dan/atau Media Sosialisasi Kebijakan Retribusi Daerah				2 jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD SATPOL PP DAN DAMKAR	2 jenis	52,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi Daerah				1 Data	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Data	52,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	05	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD SATPOL PP DAN DAMKAR	1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	629,940,000						100 Persen	1,260,000,000		
1	05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan				2 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	2 Jenis	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				350 Pasang	176,940,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	350 Pasang	275,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	79,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	4 Dokumen	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	4 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaia				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				115 Orang	234,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	115 Orang	255,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	100 Persen	105,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	140,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	100 Persen	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	645,518,599						100 Persen	1,647,000,000		
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	3 Jenis	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	5 Jenis	260,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	5 Jenis	52,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis	135,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	3 Jenis	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				3 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	3 Jenis	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Perda yang tersusun				1 Jenis 1 Perda	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Jenis 1 Perda	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				3 Jenis	73,518,599	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	3 Jenis	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	100 Persen	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	432,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Dokumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	941,194,435						100 Persen	3,722,000,000	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Unit	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				6 Unit	846,869,725	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	6 Unit	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				10 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	10 Jenis	252,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				5 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	5 Unit	260,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				2 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	2 Unit	260,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				20 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	20 Unit	800,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				6 unit	94,324,710	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	6 unit	750,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	194,569,128						100 Persen	505,000,000		
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	8,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	100 Persen	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Rekening	73,369,128	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	3 Rekening	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				2 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	2 Unit	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Jenis	113,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	5 Jenis	160,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	312,470,000						100 Persen	3,700,000,000		
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				18 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	18 Unit	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				18 Unit	282,470,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	18 Unit	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Unit	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan				5 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	5 Unit	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				25 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	25 Unit	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Unit	550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Unit	550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	1 Unit	550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi				900 M2	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar	900 M2	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Penanganan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	460,000,000						100 Persen	5,380,000,000	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen		Persen	100 Persen	285,000,000						100 Persen	2,960,000,000	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah gangguan yang dicegah				10 Ganguan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ganguan	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah gangguan yang ditindak				35 Ganguan	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	35 Ganguan	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dalam daerah				6 Kabupaten	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Kabupaten	360,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan : - Sosialisasi tentang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				60 Orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta yang mengikuti fisik dan mental.				60 Orang	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	60 Orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek				40 Orang		0 Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana				15 Unit		0 Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Unit	600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP yang tersusun				1 SOP		0 Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 SOP	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Provinsi				50 Orang	10,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Satpol PP dan Damkar , Masyarakat, Aparatur, dan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan PERDA dan PERGUB	Persen		Persen	100 Persen	175,000,000						100 Persen	1,500,000,000	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi				30 Orang	40,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur, Masyarakat ,dan Badan Hukum,	30 Orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Pergub yang diawasi				2 Perda/Pergub	40,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur, Masyarakat ,dan Badan Hukum,	2 Perda/Pergub	550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Pergub yang ditangani				2 Perda/Pergub	95,000,000	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur, Masyarakat ,dan Badan Hukum,	2 Perda/Pergub	600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Mengaktifkan Sekretariat PPNS	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	920,000,000	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat				20 Orang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur, Masyarakat, dan Badan Hukum, Diklat Pembentukan PPNS dan Perda dan Pergub	20 Orang	320,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Pemberkasan Administrasi Penyelidikan Oleh PPNS Penegak Perda dan Penguatan Sekretariat Bersama PPNS				6 Kabupaten	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur, Masyarakat, dan Badan Hukum, Diklat Pembentukan PPNS dan Perda dan Pergub	6 Kabupaten	600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	7,810,000,000	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Terdatanya Potensi rawan bencana kebakaran di Sulawesi Barat	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	7,160,000,000	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Data Pemutakhiran Informasi Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran di Sulawesi Barat				1 Laporan	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	1 Laporan	1,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Tersedianya Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) di Sulawesi Barat.				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	1 Dokumen	260,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemadam Kebakaran				60 Orang	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	60 Orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Lembaga yang bekerjasama /Kemitraan Antar Lembaga dalam teknik Penanganan Kebakaran				3 Lembaga	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	3 Lembaga	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	1 Unit	3,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia				5 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	5 Unit	260,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia				5 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	5 Unit	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan prasarana yang tersedia				20 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	20 Unit	260,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta bimtek yang mengikuti Pencegahan Sumber Api, Penanganan dan Analisis Resiko Kebakaran				60 Orang	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	60 Orang	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah peserta sosialisasi tantang pencegahan sumber api, penanganan dan analisis resiko kebakaran				60 Orang	100,000,000	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	60 Orang	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Jumlah Informasi dan laporan				1 Laporan	0	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	1 Laporan	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah data dan laporan				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SDM Petugas Pemadam kebakaran, Sarana Prasarana Pendukung dalam Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Aparatur, dan Masyarakat	1 Laporan	280,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1		05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Petugas Pemadam Kebakaran yang mengikuti Pembinaan pembinaan	Orang		Orang	50 Orang	0						50 Orang	650,000,000	
1		05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan				50 Orang	0	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Petugas Pemadam Kebakaran	50 Orang	350,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah wilayah rawan bencana kebakaran yang diawasi				6 Kabupaten	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Petugas Pemadam Kebakaran	6 Kabupaten	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8,229,913,997								9,090,149,468			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	6,206,833,735						82 Poin	6,485,149,468				
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	246,092,000						100 Persen	301,400,000				
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD				2 dokumen 24 Poin	180,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2 dokumen 24 Poin	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	6,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	39,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	5,700,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	5,700,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	5,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	5,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	5,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				4 dokumen	42,892,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4 dokumen	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat penyerapan anggaran lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	4,152,593,588					100 persen	4,242,579,468		
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				38 orang	4,118,859,468	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	38 orang	4,118,859,468	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 laporan	5,117,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	12 laporan	36,920,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 laporan	5,493,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	12 laporan	36,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 laporan	5,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 laporan	19,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 persen	6,226,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	100 persen	6,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD yang Tersusun				3 laporan	5,172,120	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3 laporan	18,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan prognosis realisasi anggaran				1 laporan	6,226,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 laporan	6,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	45,500,000						100 persen	83,000,000	
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	5,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	0 unit	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan hasil penatausahaan barang milik daerah SKPD				1 dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	7,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	110,000,000						100 persen	165,000,000	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				80 orang	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	80 orang	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan hasil pelaksanaan sistem informasi kepegawaian				1 dokumen	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	515,050,000						100 persen	565,050,000	
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 jenis	45,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2 jenis	45,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan				2 jenis	13,900,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2 jenis	13,900,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				15 jenis	55,950,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	15 jenis	55,950,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	12 laporan	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	235,510,000						100 Persen	225,000,000	
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 Gedung	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 Gedung	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan				6 jenis	135,510,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	6 jenis	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	454,788,147						100 Persen	306,600,000	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 persen	23,150,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	100 persen	23,150,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 rekening	101,638,147	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	3 rekening	101,650,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				5 jenis	330,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	5 jenis	181,800,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	447,300,000						100 Persen	596,520,000	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 unit	36,760,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	1 unit	55,870,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				28 unit	319,910,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	28 unit	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				2 unit	70,570,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	2 unit	70,600,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				4 Jenis	20,060,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	4 Jenis	20,050,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi	Persen		Persen	100 Persen	2,023,080,262						100 Persen	2,605,000,000	
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Masyarakat terdampak yang mendapatkan layanan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi	persen		persen	100 persen	150,000,000						100 persen	165,000,000	
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta pemulihan kondisi Ekonomi Pasca Bencana Jumlah Peserta Sosialisasi Penanganan Pasca Bencana				40 orang 80 orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	40 orang 80 orang	165,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen		persen	100 persen	1,223,080,262						100 persen	1,680,000,000	
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah/legal				100 persen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	100 persen	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparat yang dilatih				50 orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	50 orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Paket Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana				3 paket	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	3 paket	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Kawasan Rawan Bencana yang dikelola				0 Kawasan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	0 Kawasan	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Aparat terlatih penyusunan baseline data (dalam rangka penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana) Jumlah dokumen identifikasi dan verifikasi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana pasca bencana Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi				60 orang 1 dokumen 6 pelaksanaan	383,080,262	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	60 orang 1 dokumen 6 pelaksanaan	440,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Aparat Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang di kembangkan Kapasitasnya				25 orang	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	25 orang	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen yang tersusun				1 dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	1 dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Masyarakat yang mandiri dalam Kesiapsiagaan terhadap Bencana				50 orang	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	50 orang	230,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Persentase (%) penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana sampai dinyatakan sah/legal				100 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Aparatur dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	100 persen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen		persen	100 persen	650,000,000						100 persen	760,000,000		
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Laporan aduan yang direspon kurang dari 24 jam				100 persen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	100 persen	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Paket Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana				2 paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	2 paket	210,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Presentase kecepatan responkurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)				0 persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat	0 persen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13,290,324,094							46,703,000,000	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	8,986,824,094						82 Poin	10,943,000,000		
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aktivitas		Aktivitas	3 Aktivitas	238,000,000						3 Aktivitas	288,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
														Nasional					Daerah		
1		06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 4 Dokumen 7 Laporan	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	3 Dokumen 4 Dokumen 7 Laporan	200,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	umlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Sumare	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2 Laporan	40,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	8,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	4 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	6,614,177,880							100 Persen	6,750,000,000	
1		06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan				68 Orang	6,514,377,880	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	68 Orang	6,500,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				100 Persen	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	100 Persen	50,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	2,400,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	12 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 Laporan	2,400,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	12 Laporan	50,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial	
1		06	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	100 Persen	50,000,000	Dinas Sosial	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				3 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	3 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Aktivitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Aktivitas		Aktivitas	4 Aktivitas	10,000,000						4 Aktivitas	85,000,000	
1	06	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BMD	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan				4 Jenis	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BMD	4 Jenis	20,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD				2 Laporan	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BMD	2 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BMD	2 Laporan	20,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aktivitas		Aktivitas	4 Aktivitas	265,000,000						4 Aktivitas	400,000,000	
1	06	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				68 stell	160,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	68 stell	180,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Intensitas Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				4 Aktivitas	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	4 Aktivitas	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	65,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	3 Orang	120,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	100 Persen	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aktivitas		Aktivitas	7 Aktivitas	731,000,000						7 Aktivitas	1,855,000,000	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia				6 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Tadui Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	6 Jenis	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia				5 Jenis	86,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	5 Jenis	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang Disediakan				2000 Kotak	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2000 Kotak	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2 Jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2 Jenis	25,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				35 Jenis	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	35 Jenis	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	500,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2 Laporan	1,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				9 Jenis	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	9 Jenis	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik daerah yang diadakan	Jenis		Jenis	4 Jenis	353,646,214						4 Jenis	800,000,000	
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan				1 Unit	224,646,214	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Unit	500,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				5 Unit	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	5 Unit	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Unit	54,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Tadui	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Unit	0	Dinas Sosial
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aktivitas		Aktivitas	2 Aktivitas	225,000,000						2 Aktivitas	265,000,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				2 rekening	80,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Tadui Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2 rekening	115,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan umum Kantor yang disediakan				2 layanan	145,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2 layanan	150,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aktivitas Barang Milik Daerah yang Terpelihara/rehabilitasi	Aktivitas		Aktivitas	2 Aktivitas	550,000,000					2 Aktivitas	500,000,000		
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				8 Unit	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	8 Unit	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi				2 Gedung	300,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Tadui Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2 Gedung	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persen		Persen	20 Persen	459,400,000						20 Persen	3,350,000,000	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Intensitas Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	Wilayah		Wilayah	7 Wilayah	140,000,000						7 Wilayah	300,000,000	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Intensitas Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin dan Non Izin UGB dan PUB				7 Aktivitas	140,000,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	PPKS	7 Aktivitas	300,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah PSM yang memiliki kapasitas	Orang		Orang	257 Orang	319,400,000						257 Orang	3,050,000,000	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM yang memiliki kapasitas				5 Orang	30,000,000	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PSKS Kewenangan Provinsi	5 Orang	500,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang diberdayakan				69 Orang	179,400,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PSKS Kewenangan Provinsi	69 Orang	750,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah LK3 dan FCU yang memiliki kapasitas dalam Pemberdayaan Sosial				6 Orang	30,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PSKS Kewenangan Provinsi	6 Orang	300,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Sosial Masyarakat yang terberdayakan				2 Lembaga	80,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PSKS Kewenangan Provinsi	2 Lembaga	1,500,000,000	Dinas Sosial	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan	Persen		Persen	20 Persen	300,000,000							20 Persen	2,000,000,000	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah KTK PM yang dipulangkan ke Daerah Asal	Orang		Orang	200 Orang	300,000,000							200 Orang	2,000,000,000	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah WNI KTK PM yang di pulangkan ke Daerah Asal				150 Orang	300,000,000	Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	PPKS	150 Orang	2,000,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Berfungsinya Fungsi Sosial Bagi Pemerluh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen		Persen	20 Persen	433,100,000							20 Persen	5,210,000,000	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Orang		Orang	44 Orang	173,100,000							44 Orang	1,325,000,000	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang disediakan				2640 Kotak	79,200,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	2640 Kotak	500,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan				44 Stell	26,400,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	44 Stell	100,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Asrama yang disediakan				0 Kamar	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kamar	50,000,000	Dinas Sosial	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang disediakan				0 buah	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 buah	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 Paket	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang diberikan				0 kali	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 kali	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Intensitas Pelaksanaan Bimbingan Aktivitas Hidup sehari-hari				0 pertemuan	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah yang mendapatkan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah yang mendapatkan fasilitas dalam mengakses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga yang diberikan				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan layanan Reunifikasi Keluarga				0 Orang	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi yang terlaksana				9 pertemuan	67,500,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	9 pertemuan	200,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	Orang		Orang	78 Orang	45,000,000						78 Orang	1,900,000,000	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Jumlah Antar yang mendapatkan Pengasuhan				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Antar				0 Kotak	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kotak	650,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan				0 stell	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 stell	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Asrama yang disediakan				0 Kamar	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kamar	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Paket	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Intensitas Pertemuan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				0 pertemuan	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	intensitas Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari				0 pertemuan	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak yang difasilitasi pembuatannya				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Antar yang mengakses layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga yang diberikan				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang diberikan				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Jumlah Antar yang mendapatkan Layanan Aksesibilitas Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1		06	04		1.02	13				9 pertemuan	45,000,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	9 pertemuan	150,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03					6 Orang	35,000,000						6 Orang	520,000,000	
1		06	04		1.03	01				0 Kotak		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kotak	50,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	02				0 stell		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 stell	25,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	03				0 Kamar		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kamar	25,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	04				0 Orang		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	25,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	05				0 Paket		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Paket	25,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	06				0 pertemuan		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	60,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	07				0 pertemuan		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	08				0 Orang		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	5,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	09				0 Orang		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	10				0 Orang		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	11				0 pertemuan		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	25,000,000	Dinas Sosial
1		06	04		1.03	12				0 Orang		Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	60,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Intensitas Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar				7 pertemuan	35,000,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	7 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gepeng yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	Orang		Orang	6 Orang	30,000,000						6 Orang	500,000,000	
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang disediakan bagi Gelandangan dan Gengemis di dalam Panti				0 Kotak	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kotak	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan bagi Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				0 stell	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 stell	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah Asrama yang disediakan				0 Kamar	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kamar	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Paket	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang diberikan				0 pertemuan	0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Bimbingan yang diberikan				0 pertemuan	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan layanan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	5,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dipulangkan ke daerah asal				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant	Intensitas Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis				6 pertemuan	30,000,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	6 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	Orang		Orang	30 Orang	150,000,000						30 Orang	965,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang disediakan				0 Kotak	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kotak	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang yang disediakan				0 stell	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 stell	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah Asrama yang disediakan				0 Kamar	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Kamar	25,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Perbekalan Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Paket	55,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Bimbingan yang diberikan				12 pertemuan	96,000,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	12 pertemuan	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Bimbingan yang diberikan				0 pertemuan	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Bimbingan yang diberikan				0 pertemuan	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 pertemuan	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Data Kependudukan yang difasilitasi pembuatannya				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan Kesehatan				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	50,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipulangkan ke Derah asal				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Intensitas Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				9 pertemuan	54,000,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Mamasa, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	PPKS	9 pertemuan	120,000,000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah Anak yang Terlindungi dan Mendapatkan Pengasuhan	Persen		Persen	60 Persen	2,583,000,000						60 Persen	14,800,000,000	
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah aktivitas Pengangkatan anak yang sesuai dengan Ketentuan	Aktivitas		Aktivitas	6 Aktivitas	78,000,000						6 Aktivitas	300,000,000	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Pengasuhan				4 Orang	78,000,000	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	4 Orang	200,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1		06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Pengasuhan				0 Orang	0	Kab. Majene, Banggae, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	0 Orang	100,000,000	Dinas Sosial
1		06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten yang aktif melakukan Pemutakhiran DTKS	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	2,505,000,000						6 Kabupaten	14,500,000,000	
1		06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang Menerima Bansos UEP FM				20 KPM	20,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	PPKS	20 KPM	2,500,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	intensitas Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kesejahteraan sosial				12 kali	740,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	PPKS	12 kali	2,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok yang menerima Bansos KUBE				93 Kelompok	1,745,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	PPKS	93 Kelompok	10,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Persen		Persen	20 Persen	374,000,000						20 Persen	10,000,000,000	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Cakupan Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Aktivitas		Aktivitas	4 Aktivitas	374,000,000						4 Aktivitas	10,000,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Permakanan yang tersedia saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana				15000 Bungkus	150,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	PPKS	15000 Bungkus	5,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang tersedia saat Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana				500 stell	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	PPKS	500 stell	2,000,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang disediakan				6 Unit	30,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	PPKS	6 Unit	1,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Intensitas Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				12 lokasi	72,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	PPKS	12 lokasi	1,000,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Layanan Dukungan Psikososial yang dilaksanakan				12 lokasi	72,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	PPKS	12 lokasi	1,000,000,000	Dinas Sosial	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawanan Nasional Provinsi yang di Kelola	Persen		Persen	20 Persen	154,000,000						20 Persen	400,000,000		
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang dikelola	Taman		Taman	1 Taman	154,000,000						1 Taman	400,000,000		
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Aktivitas peningkatan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan sosial dalam pengelolaan Taman Makam Pahlawanan Nasional Provinsi Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan Rehabilitasi				7 Aktivitas 1 Taman	120,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Pati'di	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia	TMP	7 Aktivitas 1 Taman	300,000,000	Dinas Sosial	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan Pemeliharaan				1 Taman	17,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Pati'di	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia	TMP	1 Taman	50,000,000	Dinas Sosial	
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan Pengamanan				1 Taman	17,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Pati'di	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Manusia	TMP	1 Taman	50,000,000	Dinas Sosial	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						16,492,692,585						24,465,000,000			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	Skala Likert		Skala Likert	4 Skala Likert	10,039,536,906						4 Skala Likert	11,485,000,000		
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	365,000,000						100 Persen	420,000,000		
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				1 Dokumen	230,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun				1 Dokumen	45,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran / DPPA yang tersusun				1 Dokumen	45,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dikumen RKA yang tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				1 Laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Laporan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	97 Persen	6,922,536,906						97 Persen	7,085,000,000	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				70 Orang	6,837,536,906	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah	70 Orang	7,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan akuntansi SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				3 Laporan	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah	3 Laporan	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	120,000,000						100 Persen	180,000,000	
2	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				65 Pasang	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah	65 Pasang	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				5 Orang	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah	5 Orang	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	1,144,000,000						100 Persen	1,500,000,000	
2	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Jenis	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	10 Jenis	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis	121,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	2 Jenis	160,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak				10 Buah	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	10 Buah	110,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan				5 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	5 Jenis	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yag tersedia				10 Buah	173,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	10 Buah	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi				100 Laporan	700,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	100 Laporan	800,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	420,000,000						100 Persen	900,000,000	
2	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				3 Unit	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	3 Unit	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				10 Jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	10 Jenis	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				5 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	5 Jenis	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	788,000,000						100 Persen	1,000,000,000	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	410,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	100 Persen	500,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				72 Rekening Tagihan	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	72 Rekening Tagihan	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia				2 Unit	178,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	2 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	280,000,000						100 Persen	400,000,000	
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				20 Unit	130,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	20 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Dinas Tenaga Kerja Daerah Prov. Sulbar	1 Unit	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Melalui Lembaga Pemerintah dan Swasta yang Lulus Uji Kompetensi	Persen		Persen	80 Persen	2,048,155,679						80 Persen	2,805,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga kerja yang dilatih yang lulus ujikompetensi	Persen		Persen	95 Persen	1,848,155,679						95 Persen	2,575,000,000	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi				60 Orang	250,000,000	Kab. Mamuju, Kalukku, Beru-Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Tenaga Kerja	60 Orang	575,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	1.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Persentase sarana pelatihan kerja di BLK yang terbangun				60 Persen	1,598,155,679	Kab. Mamuju, Kalukku, Beru-Beru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Tenaga Kerja	60 Persen	2,000,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang Teragreditasi	Persen		Persen	64 Persen	100,000,000						64 Persen	120,000,000	
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dilakukan penilaian				20 Lembaga	100,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Lembaga Pelatihan Kerja	20 Lembaga	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase Perusahaan menengah yang dmelakukan konsultasi	Persen		Persen	10 Persen	100,000,000						10 Persen	110,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	04	1.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah layanan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online yang di gunakan				1 Layanan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 Layanan	210,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	1.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah layanan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Layanan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Perusahaan dan Tenaga Kerja	1 Layanan	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang di tempatkan melauai job fair / bursa kerja				100 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Perusahaan dan Tenaga Kerja	100 Orang	310,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerjaa yang dilayani perlindungannya	Orang		Orang	500 Orang	180,000,000						500 Orang	260,000,000	
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah layanan terpadu calon pekerja migran				1 Layanan	180,000,000	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Tenaga Kerja	1 Layanan	260,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pelayanan Hubungan Industrial	Persen		Persen	19,90 Persen	975,000,000						19,90 Persen	1,945,000,000	
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial				0	300,000,000						0	700,000,000	
2	07	05	1.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Peraturan Perusahaan yang Disahkan				15 Perusahaan	100,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Peraturan Perusahaan	15 Perusahaan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	1.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama yang Di Daftarkan				5 Perjanjian Bersama	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Peraturan Perusahaan	5 Perjanjian Bersama	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang dilakukan paendataan sarana hubungan Industrial				200 Perusahaan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Peraturan Perusahaan	200 Perusahaan	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05		1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen		Persen	100 Persen	375,000,000						100 Persen	745,000,000	
2	07	05		1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang dilakukan pencegahan perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan			150 Perusahaan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pekerja dan Pengusaha	150 Perusahaan	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05		1.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kasus yang diselesaikan			5 Kasus	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pekerja dan Pengusaha	5 Kasus	60,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05		1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah perusahaan dan serikat pekerja yang di verifikasi			25 Perusahaan	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pekerja dan Pengusaha	25 Perusahaan	85,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05		1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi ketenagakerjaan			3 Rekomendasi	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pekerja dan Pengusaha	3 Rekomendasi	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05		1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persen		Persen	100 Persen	300,000,000					100 Persen	500,000,000	
2	07	05		1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Peraturan Gubernur UMP yang Ditetapkan			1 Pergub	150,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	UMP dan UMK Provinsi Sulawesi Barat	1 Pergub	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05		1.03	03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Peraturan Gubernur UMK yang Ditetapkan			3 Pergub	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	UMP dan UMK Provinsi Sulawesi Barat	3 Pergub	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	Persen		Persen	11,94 Persen	950,000,000						11,94 Persen	1,150,000,000		
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pembinaan	Orang		Orang	480 Orang	950,000,000						480 Orang	1,150,000,000		
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan PengawasanNorma kerja				420 Perusahaan	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Tenaga Kerja dan Perusahaan	420 Perusahaan	450,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang patuh terhadap aturantentang ketenagakerjaan				300 Perusahaan	300,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Tenaga Kerja dan Perusahaan	300 Perusahaan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja				25 Perusahaan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Tenaga Kerja dan Perusahaan	25 Perusahaan	350,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						13,317,790,245							15,710,000,000		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,817,790,245						82 Poin	8,295,000,000		
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai perencanaan kinerja lingkup SKPD	Poin		Poin	100 Poin	216,141,069						100 Poin	275,000,000		
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun				2 dokumen	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	2 dokumen	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	34,760,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	1 dokumen	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang tersusun				1 dokumen	35,360,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	1 dokumen	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2		08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun				4 dokumen	56,021,069	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	4 dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat penyerapan anggaran lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	5,367,897,136						100 Persen	5,545,000,000	
2		08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan				50 orang	5,337,897,136	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	50 orang	5,500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun				1 laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	1 laporan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun				1 laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	1 laporan	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	98,286,000						100 Persen	170,000,000	
2		08	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan				74 pasang	58,286,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	74 pasang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				50 orang	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	50 orang	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	1,008,000,000						100 Persen	1,175,000,000	
2		08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				10 jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	10 jenis	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				7 jenis	190,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	7 jenis	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan				50 jenis	95,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	50 jenis	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak dan digandakan				5 jenis	3,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	5 jenis	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				2 jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	2 jenis	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah jenis bahan material yang disediakan				50 jenis	95,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	50 jenis	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi SKPD				1 dokumen	600,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	1 dokumen	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	709,935,000						100 Persen	500,000,000	
2	08	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan				2 unit	509,935,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	2 unit	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebeleur yang diadakan				3 jenis	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	3 jenis	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	140,031,040						100 Persen	230,000,000	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	preentase surat menyurat yang dikelola				100 persen	120,031,040	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	100 persen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis layanan umum kantor yang disediakan				15 jenis	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	15 jenis	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	277,500,000						100 Persen	400,000,000	
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang mendapatkan pemeliharaan				16 unit	177,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	16 unit	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan				5 unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	5 unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin		Poin	92 Poin	3,100,000,000						92 Poin	3,080,000,000	
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten yang komitmen dalam pembangunan berbasis gender di Prov. Sulawesi Barat	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	300,000,000						6 Kabupaten	1,200,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
														Nasional	Daerah										
2		08		02		1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	persentase pelaksanaan PUG di provinsi sulawesi barat				75 persen		0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0		75 persen		300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08		02		1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	persentase pelaksanaan PUG di provinsi sulawesi barat				75 persen		100,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0		75 persen		300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		08		02		1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	persentase pelaksanaan penyusunan PPRG				60 persen		0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0		60 persen		300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	persentase pelaksanaan penyusunan PPRG				60 persen	200,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0	60 persen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah kabupaten yang melibatkan perempuan dalam pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	2,800,000,000					6 Kabupaten	550,000,000		
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan yang mendapatkan bantuan peningkatan ekonomi dan kegiatan bedah buku				100 Orang	1,600,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	100 Orang	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok perempuan Jumlah perempuan yang mendapatkan pendidikan politik				60 kelompok 60 Orang	1,200,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	60 kelompok 60 Orang	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang memiliki lembaga layanan pemberdayaan perempuan	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	0					6 Kabupaten	1,330,000,000		
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi				75 persen	0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0	75 persen	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	meningkatnya kapasitas sumberdaya lembaga layanan perempuan				480 peserta	0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0	480 peserta	480,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	02	1.03	03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	persentase layanan dalam pengembangan KIE				75 persen	0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0	75 persen	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan	Persen		Persen	0,45 Persen	570,000,000					0,45 Persen	1,570,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang melibatkan para pihak lingkup daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	270,000,000					6 Kabupaten	1,200,000,000		
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM yang memahami tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)				300 orang	150,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	300 orang	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM/Masyarakat ,pemerintah dan lembaga non pemerintah yang memahami tentang Pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan akibat TPPOJumlah SDM/Masyarakat ,pemerintah dan lembaga non pemerintah yang memahami tentang Pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan akibat TPPO				50 orang	120,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	50 orang	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang memerlukan koordinasi tingkat daerah dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi korban kekerasan	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	300,000,000					6 Kabupaten	370,000,000		
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah korban kekerasan perempuan yang terlayani oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan				100 persen	300,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	100 persen	370,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	Persen		Persen	0,10 Persen	200,000,000					0,10 Persen	700,000,000		
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data terpilah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200,000,000					1 Dokumen	700,000,000		
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	tersedianya profil data gender dan anak				7 dokumen	200,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	7 dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	terpenuhinya penyajian data gender				7 dokumen	0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	7 dokumen	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kab/Kota Layak Anak Level Pratama	Persen		Persen	100 Persen	900,000,000					100 Persen	1,390,000,000		
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten Layak Anak level Pratama	Persen		Persen	100 Persen	650,000,000					100 Persen	700,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah DEKELA dan KELANA jumlah Kab/Kota yang mendapatkan BIMTEK jumlah kabupaten/kota yang ikut dalam pengisian evaluasi KLA jumlah kabupaten,kota yang meendapat pendampingan dalam evaluasi KLA jumlah kabupaten/kota yang memiliki RAD KLA jumlah kabupaten/kota yang menyusun kebijakan KLA				30 desa 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten	250,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0	30 desa 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah FA yang berpartisipasi dalam forum anak nasional dan provinsi jumlah forum anak kecamatan dan desa jumlah kabupaten/kota yang melibatkan forum anak daerah dalam perencanaan pembangunan tersedianya sekretariat Forum Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten				40 anak 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten	400,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	0	40 anak 6 kabupaten 6 kabupaten 6 kabupaten	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Kabupaten yang memiliki Forum Anak Kecamatan dan Desa	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	250,000,000						6 Kabupaten	690,000,000	
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah fasilitas ruang bermain ramah anak di provinsi dan kabupaten jumlah fasilitas rute selamat ke/dari sekolah jumlah kabupaten/kota yang memiliki lembaga pusat kreativitas anak jumlah kabupaten/kota yang memiliki ruang laktasi di tempat-tempat umum jumlah kabupaten/kota yang menyediakan fasilitas informasi layak anak (ILA)				3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 6 kabupaten	0	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 3 kabupaten 6 kabupaten	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah anak yang ikut terlibat dalam kegiatan hari anak nasional dan tingkat provinsi				200 anak	130,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	200 anak	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah media informasi layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah jumlah media informasi layanan yang digunakan oleh unit layanan terpadu jumlah pendidik dan tenaga pendidik terlatih KHA jumlah puskesmas ramah anak jumlah SDM terlatih dan memahami tentang penanganan anak dalam situasi bencana jumlah SDM yang memahami tentang dampak perkawinan anak jumlah sekolah ramah anak jumlah tenaga kesehatan terlatih KHA				3 media 3 media 40 orang 30 puskesmas ramah anak 30 orang 50 orang 20 sekolah 50 orang	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	3 media 3 media 40 orang 30 puskesmas ramah anak 30 orang 50 orang 20 sekolah 50 orang	560,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah desa PATEM jumlah fasilitator PATBM Moneva				20 desa 20 orang 6 kabupaten	120,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	20 desa 20 orang 6 kabupaten	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	Persen		Persen	0,10 Persen	730,000,000						0,10 Persen	675,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
															Nasional	Daerah			
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang melibatkan para pihak lingkup daerah yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	530,000,000				6 Kabupaten	600,000,000			
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah guru/remaja dan anak yang memiliki kemampuan LIVESKILL, RESILEANCE dalam pencegahan terhadap kekerasan jumlah SDM terlatih dalam pengasuhan anak (parenting Skill) Jumlah SDM terlatih dan memahami tentang perlindungan bagi anak dengan masalah sosial jumlah SDM terlatih masyarakat termasuk organisasi, dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana TPPO pada anak Jumlah SDM yang memahami tentang dampak dari pernikahan anak di bawah umur jumlah SDM yang memahami tentang perlindungan bagi tenaga kerja anak jumlah SDM yang terlatih dan memahami tentang ketahanan keluarga pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) jumlah SDM yang terlatih dan memahami tentang perlindungan bagi anak korban penyalagunaan NAPZA dan anak dengan HIV/AIDS				300 orang 150 orang 200 orang 150 orang 150 orang 200 orang 150 orang 200 orang	300,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	300 orang 150 orang 200 orang 150 orang 150 orang 200 orang 150 orang 200 orang	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM terlatih tentang aplikasi data simponi				30 orang	230,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	30 orang	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten yang memerlukan koordinasi tingkat daerah yang menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	200,000,000				6 Kabupaten	75,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan khusus				20 anak	200,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	20 anak	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						800,000,000							3,750,000,000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio		Rasio	180 Rasio	300,000,000						180 Rasio	1,050,000,000	
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan daerah yang melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	300,000,000						6 Kabupaten	900,000,000	
2	14	02	1.01	04	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	jumlah satuan pendidikan jalur formal, nonformal yang melaksanakan pendidikan kependudukan				6 kabupaten	300,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	6 kabupaten	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Cakupan daerah yang melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	0						6 Kabupaten	150,000,000	
2	14	02	1.02	06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	jumlah profil kependudukan KKBPk tingkat provinsi				1 profil	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	1 profil	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio		Rasio	2,50 Rasio	500,000,000						2,50 Rasio	2,700,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan daerah yang melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Kabupaten		Kabupaten	6 Kabupaten	250,000,000					6 Kabupaten	1,200,000,000		
2	14	03	1.01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Institusi kerjasama dan dukungan stakeholders dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program KKBPK				6 kabupaten	100,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	6 kabupaten	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	1.01	08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	jumlah kabupaten yang mendapatkan pengetahuan dan kesadaran stakeholder terkait kesehatan				6 kabupaten	150,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	6 kabupaten	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Proporsi dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber KB	Persen		Persen	80 Persen	250,000,000					80 Persen	1,500,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta kerjasama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB				6 kabupaten	100,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	6 kabupaten	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	03	1.02	03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Jumlah jejaring kemitraan dalam program KKBPK Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan bayi dan anak berbasis pangan lokal dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting				6 kabupaten 6 kabupaten	150,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	0	6 kabupaten 6 kabupaten	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							7,971,373,480								9,589,000,000	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persen		Persen	100 Persen	5,921,373,480						100 Persen	6,559,000,000			
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	297,223,000						3 Dokumen	355,000,000			
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				3 Dokumen	180,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Karampuang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	3 Dokumen	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	45,223,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2		09	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang		Orang	48 Orang	4,885,592,202						48 Orang	5,429,000,000	
2		09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				48 Orang	4,878,592,202	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	48 Orang	5,384,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	100 Persen	25,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	7,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Laporan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan	Unit		Unit	2 Unit	0						2 Unit	15,000,000	
2		09	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan				2 Unit	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	2 Unit	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang		Pasang	80 Pasang	75,120,000						80 Pasang	120,000,000	
2		09	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				80 Pasang	41,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	80 Pasang	90,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	10,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	100 Persen	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	24,120,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	100 Persen	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	409,900,978						3 Jenis	413,000,000	
2		09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	3 Jenis	3,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2		09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	25,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	5 Jenis	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Jenis	23,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	35 Jenis	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				20 Jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	20 Jenis	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				30 Jenis	46,900,978	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	30 Jenis	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	300,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	150 Laporan	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	Unit		Unit	1 Unit	9,752,000						1 Unit	20,000,000	
2	09	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				10 Jenis	9,752,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	10 Jenis	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola	Persen		Persen	100 Persen	109,000,000						100 Persen	27,000,000	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	94,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	100 Persen	7,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				12 Rekening Tagihan	15,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	12 Rekening Tagihan	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	134,785,300						1 Unit	180,000,000	
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi				1 Unit	134,785,300	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	1 Unit	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				5 Jenis	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD	5 Jenis	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	250,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan di Daerah Rawan Pangan	Lumbung		Lumbung	2 Lumbung	0					2 Lumbung	250,000,000		
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan di Daerah Rawan Pangan				2 Lumbung	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	2 Lumbung	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi infrastruktur logistik				1 Laporan	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Dukungan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	967,230,000					100 Persen	1,220,000,000		
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen hasil analisis kondisi harga dan pasokan pangan mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan tahunan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300,000,000					1 Dokumen	230,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen hasil analisis kondisi harga dan pasokan pangan mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan tahunan Jumlah Laporan Hasil Analisis Kondisi harga dan pasokan pangan dan NBM				1 Dokumen 2 Laporan	115,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 2 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Penyediaan Pangan Lokal				6 Kali	65,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	6 Kali	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Laporan Koodinasi dan sinkronisasi Distribusi Pangan				6 Laporan	35,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat	6 Laporan	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Koodinasi dan stok, pasokan dan harga pangan				6 Laporan	85,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	6 Laporan	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Laporan Kebutuhan Pangan Lokal	Laporan		Laporan	1 Laporan	150,000,000						1 Laporan	310,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Laporan Kebutuhan Pangan Lokal				1 Laporan	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	1 Laporan	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (CPP)				8 Ton	150,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	8 Ton	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan		Laporan	12 Laporan	40,000,000						12 Laporan	60,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				12 Laporan	40,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	12 Laporan	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Kelompok yang Mengkonsumsi pangan keluarga melalui pengelolaan sumber daya keluarga dengan menanam cabe dirumah	Kelompok		Kelompok	2 Kelompok	477,230,000						2 Kelompok	620,000,000	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang Mengkonsumsi pangan keluarga melalui pengelolaan sumber daya keluarga dengan menanam cabe dirumah Jumlah pangan lokal bersumber karbohidrat non beras untuk masyarakat				2 Kelompok 3 Kelompok	213,245,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	2 Kelompok 3 Kelompok	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Kelompok Mengikuti lomba cipta menu tingkat prov. Dan Nasional Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi kegiatan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) Jumlah Peserta Perempuan/Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan				6 Kelompok 24 Orang 2 Kelompok	163,985,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	6 Kelompok 24 Orang 2 Kelompok	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Data Pola Pangan Harapan(PPh) dan Konsumsi Pangan Jumlah laporan survey Analisis Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan				1 Dokumen 6 Laporan	100,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	1 Dokumen 6 Laporan	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Persen		Persen	100 Persen	780,000,000						100 Persen	1,120,000,000	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dan Kabupaten	Laporan		Laporan	6 Laporan	55,000,000						6 Laporan	70,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi dan Kabupaten				6 Laporan	55,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan	6 Laporan	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Gerakan sayang halaman rumah	Kelompok		Kelompok	33 Kelompok	725,000,000						33 Kelompok	1,050,000,000	
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah kawasan dalam mewujudkan kemandirian pangan masyarakat miskin di desa rawan pangan Jumlah Kelompok Pemberdayaan Sumber Daya Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan jumlah penduduk rawan pangan yang tertangani				2 Kawasan 10 Kelompok 3 Kelompok	255,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	2 Kawasan 10 Kelompok 3 Kelompok	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Gerakan sayang halaman rumah				33 Kelompok	470,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat	33 Kelompok	650,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Didistribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	302,770,000						100 Persen	440,000,000	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengawasan, keamanan, dan pemantauan mutu pangan segar	Pelaku Usaha PSAT		Pelaku Usaha PSAT	10 Pelaku Usaha PSAT	302,770,000						10 Pelaku Usaha PSAT	440,000,000	
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengawasan, keamanan, dan pemantauan mutu pangan segar Sosialisasi prosedur sertifikasi pangan segar kepada pelaku usaha PSAT				10 Pelaku Usaha PSAT 25 Pelaku Usaha PSAT	80,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pelaku Usaha PSAT	10 Pelaku Usaha PSAT 25 Pelaku Usaha PSAT	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengkomsumsi pangan yang aman dan bermutu Jumlah Pelaku Usaha PSAT yang melakukan sertifikasi prodak Jumlah Pelaku usaha yang tersurvelen				1 Event 10 Pelaku Usaha PSAT 10 Pelaku Usaha PSAT	170,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pelaku Usaha PSAT	1 Event 10 Pelaku Usaha PSAT 10 Pelaku Usaha PSAT	130,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar asal tumbuhan yang (PSAT) diregistrasi				5 Pelaku Usaha PSAT	0	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pelaku Usaha PSAT	5 Pelaku Usaha PSAT	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
2		09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan				2 Paket	52,770,000	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pelaku Usaha PSAT	2 Paket	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							9,626,194,703							17,659,311,813		
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,413,900,919						82 Poin	8,821,253,813			
2	11	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup OPD	Persen		Persen	90 Persen	203,574,720						90 Persen	389,413,500			
2	11	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	74,161,220	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	4 Dokumen 2 Dokumen 4 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				1 Laporan	71,267,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	71,267,500	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Data 1 Dokumen 1 Laporan	38,146,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	9 Data 1 Dokumen 1 Laporan	38,146,000	Dinas Lingkungan Hidup		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup DLH	Persen		Persen	90 Persen	5,537,288,129						90 Persen	5,690,655,685	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				1 Tahun	5,497,783,129	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Tahun	5,615,655,685	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	39,505,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup SKPD	Persen		Persen	90 Persen	174,978,224						90 Persen	600,350,000	
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				85 Pasang	21,250,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	85 Pasang	63,750,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				15 Orang	108,408,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	15 Orang	447,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				55 Orang 100 Persen	45,320,224	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	55 Orang 100 Persen	89,600,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup DLH	Persen		Persen	90 Persen	536,385,428						90 Persen	635,924,628	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis	26,897,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	3 Jenis	53,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicetak dan digandakan				30 Blok	4,435,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	30 Blok	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan				4 Bahan Bacaan	9,551,120	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	4 Bahan Bacaan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				47 Jenis	45,481,240	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	47 Jenis	54,481,240	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi /Konsultasi Ke Luar Daerah				25 OP 25 OP	450,020,968	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	25 OP 25 OP	498,243,388	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Persen		Persen	90 Persen	586,395,550						90 Persen	886,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	1 Unit	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				5 Jenis	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	5 Jenis	104,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				3 Jenis	54,104,550	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	3 Jenis	197,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				2 Jenis	12,291,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	2 Jenis	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan	Persen		Persen	90 Persen	154,407,768						90 Persen	190,000,000	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				90 Persen	77,130,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	90 Persen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				36 Rekening/Bulan	77,277,768	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	36 Rekening/Bulan	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	Persen		Persen	90 Persen	220,871,100						90 Persen	428,910,000	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan				6 Unit	136,670,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	6 Unit	156,670,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				15 Unit	27,240,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	15 Unit	47,240,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor Luas Gedung Kantor yang Direhabilitasi				2 Jenis 8 Meter	9,768,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	2 Jenis 8 Meter	95,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				12 Jenis	14,170,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	12 Jenis	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor				21 Jenis	33,023,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Lingkungan Hidup	21 Jenis	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen		Persen	100 Persen	201,215,400						100 Persen	668,930,000	
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Cakupan Dokumen Pengendalian RPPLH Yang Tersusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	151,215,400						3 Dokumen	468,930,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah DIKLPH dan IKLH Provinsi Sulawesi Barat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Evaluasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan				2 Dokumen 20 Orang	151,215,400	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	2 Dokumen 20 Orang	468,930,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS yang dikaji oleh provinsi	KLHS		KLHS	5 KLHS	50,000,000						5 KLHS	200,000,000		
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah KLHS yang divalidasi				2 KLHS	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	2 KLHS	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pij (Indeks Pencemar) yang Memenuhi Baku Mutu	Persen		Persen	0,86 Persen	1,146,489,264						0,86 Persen	4,550,000,000		
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Parameter Yang Memenuhi Baku Mutu	Persen		Persen	78 Persen	795,889,660						78 Persen	3,250,000,000		
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah parameter dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup Jumlah sungai yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti PROPER				15 Parameter 4 Sungai 8 Perusahaan	103,839,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	15 Parameter 4 Sungai 8 Perusahaan	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim Jumlah Laporan Inventarisasi GRK Persentase Peningkatan Bengkel/servis yang mendukung pengurangan bahan perusak ozon				7 Desa 1 Laporan 50 %	236,358,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	7 Desa 1 Laporan 50 %	2,100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Uji yang tervalidasi Jumlah pengelola laboratorium yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah ruang lingkup pengendalian mutu yang tervalidasi Jumlah sarana prasarana pengujian laboratorium				50 Dokumen 14 Orang 22 Metode 40 Sarana	455,692,050	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	50 Dokumen 14 Orang 22 Metode 40 Sarana	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Luas kawasan Kerusakan Lahan yang dipulihkan kondisinya	Ha		Ha	15 Ha	350,599,604						15 Ha	1,300,000,000		
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Pemetaan Luas wilayah yang direhabilitasi				1 Dokumen 15 Ha	350,599,604	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	1 Dokumen 15 Ha	1,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen		Persen	0,03 Persen	91,649,090						0,03 Persen	500,000,000		
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah titik pengumpulan limbah B3	Titik		Titik	16 Titik	91,649,090						16 Titik	500,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Limbah B3 yang terlaporkan				23.3513 Ton	91,649,090	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	23.3513 Ton	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persen		Persen	0,59 Persen	79,034,640						0,59 Persen	450,088,000	
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilaksanakan	Pengawasan		Pengawasan	25 Pengawasan	79,034,640						25 Pengawasan	450,088,000	
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usahadan/atau kegiatan yang wajib diawasi oleh pemerintah Provinsi				25 Usaha	79,034,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat dan Usaha/Kegiatan	25 Usaha	450,088,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Persen		Persen	1 Persen	200,951,880						1 Persen	500,000,000	
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan Pilot Project	Lembaga Masyarakat		Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	200,951,880						3 Lembaga Masyarakat	500,000,000	
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga masyarakat/kelompok peduli lingkungan yang memperoleh peningkatan kapasitas PPLH Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Bid. Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan				300 Orang 30 OK	110,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	300 Orang 30 OK	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kader sakakalpataru yang terlatih Jumlah sekolah peduli lingkungan				4000 Orang 15 Sekolah	89,971,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	4000 Orang 15 Sekolah	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan	Persen		Persen	11 Persen	91,116,690						11 Persen	150,000,000	
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten Penerima Penghargaan ADIPURA	Kabupaten		Kabupaten	1 Kabupaten	91,116,690						1 Kabupaten	150,000,000	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan PPLH yang dibagikan pada peringatan HLH Jumlah titik pemantauan ADIPURA Jumlah usulan penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi				4 Penghargaan 6 Titik 5 Penghargaan	91,116,690	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	4 Penghargaan 6 Titik 5 Penghargaan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan	Persen		Persen	1 Persen	71,471,080						1 Persen	459,040,000		
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah Pengaduan yang tertangani	Pengaduan		Pengaduan	10 Pengaduan	71,471,080						10 Pengaduan	459,040,000		
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan lingkungan yang diterima Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat				10 Pengaduan 30 Orang	71,471,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	10 Pengaduan 30 Orang	459,040,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen		Persen	0,55 Persen	330,365,740						0,55 Persen	1,560,000,000		
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Volume Timbunan Sampah Yang Tertangani/terkelola	Ton		Ton	74977 Ton	330,365,740						74977 Ton	1,560,000,000		
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan sampah Jumlah titik penanganan sampah TPA				200 OK 4 Titik	330,365,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat	200 OK 4 Titik	1,560,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							6,196,845,968							9,471,000,000	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	4,651,845,968						82 Poin	5,746,000,000		
2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	30,000,000						100 Persen	80,000,000		
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	4 Dokumen	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	1,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	2 Laporan	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	1,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	2 Dokumen	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	3,189,136,959						100 Persen	3,807,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				29 Orang	3,180,936,959	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	29 Orang	3,800,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	1,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	100 Persen	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				1 Laporan	1,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Laporan	1,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 Laporan	1,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	12 Laporan	1,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	1,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	100 Persen	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				3 Laporan	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	3 Laporan	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Laporan	1,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	30,000,000					100 Persen	50,000,000		
2	12	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	231,709,009					100 Persen	369,000,000		
2	12	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan				2 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	2 Jenis	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				30 Pasang	33,709,009	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	30 Pasang	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	40,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	10 Orang	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	100 Persen	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				50 Orang	75,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	50 Orang	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	566,000,000						100 Persen	740,000,000	
2	12	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	25 Jenis	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	10 Jenis	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	20 Jenis	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2500 Dos	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	2500 Dos	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan				7 Jenis	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	7 Jenis	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				5 Jenis	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	5 Jenis	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				65 Jenis	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	65 Jenis	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi				100 Persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	100 Persen	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Dokumen	200,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Karema Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	30 Dokumen	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	370,000,000						100 Persen	470,000,000	
2	12	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				2 Unit	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	2 Unit	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				20 Unit	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	20 Unit	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Unit	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	60,000,000						100 Persen	50,000,000	
2	12	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	100 Persen	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Rekening Tagihan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	3 Rekening Tagihan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				30 Unit	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	30 Unit	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	175,000,000						100 Persen	180,000,000	
2	12	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				2 Unit	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	2 Unit	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				25 Unit	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	25 Unit	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Unit	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi	1 Unit	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen		Persen	100 Persen	475,000,000						100 Persen	1,525,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persen		Persen	95 Persen	240,000,000						95 Persen	865,000,000	
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional				6 Kabupaten	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah data penduduk Non permanen dan rentan adminduk				25 Dokumen	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	25 Dokumen	170,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah peserta penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk				50 Orang	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	50 Orang	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah pemanfaatan data peristiwa kependudukan				20 Dokumen	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	20 Dokumen	175,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	02	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen terkait pendaftaran penduduk				25 Dokumen	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	25 Dokumen	120,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persen		Persen	95 Persen	160,000,000						95 Persen	460,000,000	
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi terkait pendaftaran penduduk				6 Kabupaten	40,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi terkait pendaftaran penduduk				100 Orang	35,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	100 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan terkait Pendaftaran Penduduk				35 Orang	35,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	35 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah terkait pendaftaran penduduk				20 Lembaga	50,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	20 Lembaga	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	02	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten		100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persen		Persen	95 Persen	75,000,000						95 Persen	200,000,000	
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kabupaten yang Terbina dan Terawasi terkait pendaftaran penduduk				6 Kabupaten	30,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Karema Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimtek Pendaftaran Penduduk				35 Orang	45,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	35 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen		Persen	100 Persen	615,000,000						100 Persen	915,000,000	
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen		Persen	95 Persen	250,000,000						95 Persen	425,000,000	
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Penetapan Kebijakan teknis				20 Dokumen	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	20 Dokumen	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah peserta penataan tata kelola pelaksanaan Pencatatan Sipil				40 Orang	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	40 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah pemanfaatan data peristiwa penting				7 Dokumen	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	7 Dokumen	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi terkait pencatatan Sipil				6 Kabupaten	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	03	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen terkait Pencatatan Sipil				7 Dokumen	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	7 Dokumen	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persen		Persen	95 Persen	235,000,000						95 Persen	310,000,000	
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten yang terfasilitasi terkait Pencatatan sipil				6 Kabupaten	35,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencatatan Sipil				100 Orang	40,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	100 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	03	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan terkait Pencatatan Sipil				50 Orang	60,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	50 Orang	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah lembaga pemerintah dan non pemerintah terkait Pencatatan Sipil				25 Lembaga	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	25 Lembaga	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten yang terbina terkait pencatatan sipil				6 Kabupaten	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				100	130,000,000						100	180,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kabupaten yang Terbina dan Terawasi terkait Pencatatan Sipil				6 Kabupaten	80,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Karema Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimtek Pencatatan Sipil				50 Orang	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	50 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan yang Tervalidasi	Persen		Persen	100 Persen	400,000,000						100 Persen	1,200,000,000	
2	12	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	Persen		Persen	95 Persen	70,000,000						95 Persen	350,000,000	
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan tatacara Perencanaan,Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi				50 Orang	20,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	50 Orang	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan				50 Orang	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	50 Orang	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan urusan administrasi Kependudukan Provinsi	Persen		Persen	95 Persen	250,000,000						95 Persen	650,000,000	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten yang Terfasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan				6 Kabupaten	20,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	150,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				50 Orang	20,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	50 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah peserta Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				50 Orang	50,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	50 Orang	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang melakukan Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				25 Lembaga	45,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	25 Lembaga	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)				35 OPD	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	35 OPD	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	1.02	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi yang melakukan kerjasama				20 Lembaga	25,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	20 Lembaga	85,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	12	04	1.02	07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kabupaten yang melakukan konsultasi				6 Kabupaten	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persen		Persen	95 Persen	80,000,000						95 Persen	200,000,000			
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kabupaten yang terbina dan terawasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan				6 Kabupaten	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Karema Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	6 Kabupaten	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis				30 Orang	30,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Kabupaten	30 Orang	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan yang Tervalidasi	Persen		Persen	100 Persen	55,000,000						100 Persen	85,000,000			
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Profil Kependudukan	Persen		Persen	95 Persen	55,000,000						95 Persen	85,000,000			
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah data kependudukan yang tersedia				2 Dokumen	25,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan yang tersusun				3 Dokumen	30,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten	3 Dokumen	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							11,697,635,362								21,625,620,173	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,242,635,362							82 Poin	9,371,620,173		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	167,000,000					13 Dokumen	258,500,000		
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				3 Dokumen	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	3 Dokumen	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	35,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Dokumen	47,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Dokumen	13,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Dokumen	25,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	7,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Dokumen	12,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	2 Dokumen	22,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	11,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	4 Dokumen	14,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya	Orang		Orang	57 Orang	5,174,653,371						57 Orang	5,460,620,173	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				57 Orang	5,107,653,371	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	57 Orang	5,356,620,173	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	8,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	12 Laporan	13,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 Laporan	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	12 Laporan	62,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	7,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Laporan	12,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				2 Laporan	11,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	2 Laporan	15,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang		Pasang	90 Pasang	102,500,000						90 Pasang	152,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				90 Pasang	67,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	90 Pasang	87,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				5 Orang	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	5 Orang	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	567,481,991						100 Persen	784,500,000	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	15 Jenis	27,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	2 Jenis	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicetak dan digandakan				5 Jenis	31,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	5 Jenis	35,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				50 Jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	50 Jenis	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				85 Laporan 50 Laporan	391,481,991	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	85 Laporan 50 Laporan	567,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Jenis		Jenis	30 Jenis	625,000,000						30 Jenis	1,660,500,000	
2	13	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	450,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Unit	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan				4 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	4 Unit	700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				6 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	6 Jenis	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				7 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	7 Jenis	135,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				4 Jenis	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	4 Jenis	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	331,000,000						100 Persen	540,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	100 Persen	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Rekening	81,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	3 Rekening	95,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Jenis	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Jenis	290,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit		Unit	81 Unit	275,000,000						81 Unit	515,500,000	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Unit	63,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				30 Unit	175,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	30 Unit	255,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	1 Unit	127,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				35 Unit	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	35 Unit	37,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				15 Unit	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas PMD Prov. Sulbar	15 Unit	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	Persen		Persen	60 Persen	120,000,000						60 Persen	400,000,000	
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Lembaga Adat		Lembaga Adat	6 Lembaga Adat	120,000,000						6 Lembaga Adat	400,000,000	
2	13	02	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dibina				6 Lembaga Adat	120,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Lembaga Adat	6 Lembaga Adat	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa Dalam Kawasan Perdesaan	Persen		Persen	100 Persen	140,000,000						100 Persen	357,000,000	
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah pemerataan pembangunan desa dalam kawasan perdesaan	Kawasan		Kawasan	14 Kawasan	140,000,000						14 Kawasan	357,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah peserta Musyawarah Kerja Kawasan Perdesaan Jumlah Peserta Rapat Kerja Pembentukan Kawasan Perdesaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama)				75 Orang 60 Orang 50 Orang	140,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan serta perwakilan dari Pemerintah Kecamatan, Dinas PMD Kab. dan Provinsi	75 Orang 60 Orang 50 Orang	357,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparat Pemerintah Desa yang Memiliki Kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	3,090,000,000						100 Persen	8,662,000,000	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menjadi lokasi Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam berbasis Kemampuan Lokal	Desa		Desa	30 Desa	3,090,000,000						30 Desa	8,662,000,000	
2	13	04	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang menjadi lokasi Monitoring Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Desa				60 Desa	145,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	60 Desa	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa dan Pekan Inovasi Nasional (PIN) Desa				6 Desa	220,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	6 Desa	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Pendayagunaan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel.				69 Desa/Kel.	165,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	69 Desa/Kel.	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta Jambore Aparatur Desa				575 Orang	390,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	575 Orang	1,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang terlatih				69 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	69 Orang	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah desa yang menjadi lokasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramMarasa Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi Program Marasa Tk. Provinsi Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program MARASA Jumlah Tim Pelaksanaan Program Marasa Tk.Prov dan Tk.Kab. yang dihonor				50 Desa 2 Kali 111 Orang 1 Tim	1,500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	50 Desa 2 Kali 111 Orang 1 Tim	2,855,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Pelatih Pengelola BUMDES/BUMDESA yang terlatih				50 Orang	190,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	50 Orang	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	1.01	18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang menjadi lokasi Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam berbasis Kemampuan Lokal				30 Desa	140,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	30 Desa	257,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Produk Unggulan Desa yang berdaya saing pada Gebyar Inovasi Desa				30 Desa	190,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pemerintah Desa Se Provinsi Sulawesi Barat	30 Desa	2,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Berprestasi	Persen		Persen	15 Persen	1,105,000,000						15 Persen	2,835,000,000	
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPM Berprestasi	Kelompok		Kelompok	8 Kelompok	1,105,000,000						8 Kelompok	2,835,000,000	
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kabupaten yang mengikuti Lomba Posyandu				6 Kabupaten	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Lembaga Kemasyarakatan Desa	6 Kabupaten	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pelatih kader posyandu Jumlah peserta Rakon Pokjanal Posyandu				118 Orang 103 Orang	115,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Lembaga Kemasyarakatan Desa	118 Orang 103 Orang	375,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang terbina pelayanan Sosial Dasar dan Prasarana Desa				30 Desa	115,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Lembaga Kemasyarakatan Desa	30 Desa	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pemetaan Potensi Ekonomi Desa dan penguatan One Product One Village (OPOV)				50 Desa	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Lembaga Kemasyarakatan Desa	50 Desa	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pameran/Inovasi/Gelar Teknologi Tepat Guna Perdesaan Tk. Nasional				1 Kali	220,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Lembaga Kemasyarakatan Desa	1 Kali	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Peserta Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional dan Provinsi				330 Orang	240,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Lembaga Kemasyarakatan Desa	330 Orang	555,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kader PKK yang mengikuti RAKON Tk. Pusat dan Tk. Provinsi Jumlah Peserta Gelar Karya dan Temu Kader PKK (JAMBORE) Tingkat Provinsi dan Nasional				50 Orang 150 Orang	115,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Lembaga Kemasyarakatan Desa	50 Orang 150 Orang	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						13,265,779,304								16,112,910,000		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	9,635,779,304						82 Poin	2,626,800,000			
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral lingkup OPD	%		%	90 %	304,000,000						90 %	530,000,000			
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan program dan kegiatan PD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD				2 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan	125,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	2 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan	165,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersusun				5 Laporan	6,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	5 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	8 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data sektoral yang tersusun Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang tersusun Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah				4 Item 7 Dokumen 2 Laporan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	4 Item 7 Dokumen 2 Laporan	225,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	%		%	95 %	7,091,626,431						95 %	153,500,000			
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				112 Orang	7,016,626,431	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	112 Orang	6,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	100 Persen	16,000,000	Dinas Perhubungan		
2	15	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	12 Laporan	18,000,000	Dinas Perhubungan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	15	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan				12 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	12 Laporan	16,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Laporan	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase bahan tanggapan pemeriksanaan yang dikelola dan disiapkan				100 Persen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	100 Persen	27,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				14 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	14 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				6 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	6 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	90 %	25,000,000						90 %	10,500,000	
2	15	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan				0 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang telah dinilai				0 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD SKPD				3 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	3 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil rekonsiliasi BMD SKPD				12 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	5,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Penatausahaan BMD SKPD				6 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	6 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan hasil Pemanfaatan BMD SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%		%	90 %	20,000,000						90 %	0	
2	15	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah				0 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sarana dan/ atau media Sosialisasi Kebijakan retribusi daerah				0 Janis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Janis	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi daerah				0 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan data retribusi Daerah				0 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah data wajib retribusi daerah				0 Data	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Data	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	%		%	90 %	200,000,000						90 %	590,000,000	
2	15	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD				95 Persen 97 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	95 Persen 97 Persen	380,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan				124 Pasang 112 Pasang 114 Pasang	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	124 Pasang 112 Pasang 114 Pasang	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	3 Dokumen	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	0 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				4 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	4 Orang	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	%		%	90 %	1,024,152,873						90 %	470,000,000	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	5 Jenis	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan kantor yang disediakan Jumlah jenis Perlengkapan kantor yang disediakan				7 Jenis 8 Jenis	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	7 Jenis 8 Jenis	105,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	7 Jenis	10,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah jenis makanan yang disediakan Jumlah jenis minuman yang disediakan				5 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	125,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	5 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	55,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan				4 Jenis 3 Jenis	29,152,873	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	4 Jenis 3 Jenis	22,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan yang disediakan Jumlah Jenis bahan peraturan Perundang- Undangan yang disediakan				2 Jenis 2 Jenis	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	2 Jenis 2 Jenis	10,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan				30 Jenis	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	30 Jenis	38,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah SKPD				100 Laporan 30 Laporan	600,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	100 Laporan 30 Laporan	225,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	90 %	450,000,000					90 %	560,000,000		
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4 Unit	450,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	4 Unit	500,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				5 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	5 Jenis	35,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	2 Jenis	10,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1 Paket	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Paket	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	3 Jenis	15,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	90 %	325,000,000					90 %	129,800,000		
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	160,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	100 Persen	5,000,000	Dinas Perhubungan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				1 Rekening	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Rekening	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				1 Paket	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelolaan Kebersihan kantor yang menggunakan jasa/pihak ketiga				12 Bulan	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	12 Bulan	64,800,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	196,000,000						90 %	183,000,000	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis pemeliharaan mobil jabatan				1 Jenis	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	1 Jenis	33,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang menggunakan jasa pemeliharaan				45 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	45 Unit	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				7 Jenis	16,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	7 Jenis	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi				2 Unit	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Dinas Perhubungan	2 Unit	45,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen		Persen	1 Persen	2,600,000,000						1 Persen	5,482,610,000	
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	200,000,000						1 Dokumen	0	
2	15	02	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Kegiatan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ provinsi.				1 Kegiatan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ provinsi.				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan provinsi	Paket		Paket	5 Paket	200,000,000						5 Paket	1,500,000,000	
2	15	02	1.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.				3 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	3 Paket	1,500,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	15	02	1.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Paket		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.				27 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	27 Unit		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola	Unit		Unit	1 Unit	1,230,000,000						1 Unit	3,000,000,000		
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen lingkungan terminal penumpang type B				1 Dokumen	350,000,000	Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Dokumen		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah paket pembangunan gedung terminal type B				1 Paket	840,000,000	Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Paket	3,000,000,000		Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Paket pengembangan sarana dan prasarana terminal				1 Paket	0	Kab. Mamuju Tengah, Budong-Budong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat	1 Paket		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas utama dan pendukung terminal				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Paket		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah aparatur pengelola terminal type B yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM				8 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	8 Orang		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas.	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	610,000,000						6 Kegiatan	300,000,000		
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi				1 Kegiatan	550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	150,000,000		Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah pengadaan, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas				3 Jenis	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	3 Jenis	150,000,000		Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kegiatan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi				2 Kegiatan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	2 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.05	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Forum LLAJ untuk jaringan jalan Provinsi				3 Kegiatan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	3 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen andalalin di jalan provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen		0	
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kegiatan penetapan kebijakan tata kelola Andalalin				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.06	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penilai Andalalin				2 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	2 Orang	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Kegiatan pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan Inspeksi, Audit dan pemantauan terminal	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	360,000,000						1 Kegiatan	340,000,000	
2	15	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ				5 Orang	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	5 Orang	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan pelaksanaan Inspeksi, Audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor				1 Kegiatan	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kegiatan Inspeksi, Audit dan pemantauan terminal				1 Kegiatan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor				1 Kegiatan	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Kegiatan	135,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang /barang antar kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	0						1 Kegiatan	70,000,000	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang antar kota				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang /barang antar kota				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	70,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	1.09	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.09	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan provinsi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	0						1 Kegiatan	0	
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek antarkota kewenangan provinsi				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek antar kota kewenangan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	0	
2	15	02	1.11	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.11	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen penetapan wilayah operasi angkutan yang menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan antar kab/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	0	
2	15	02	1.12	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi anmgkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kab/ kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	0						1 Kegiatan	110,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi						0						0		
2	15	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional						0						0		
2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan						0						0		
2	15	03	1.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi						0						0		
2	15	03	1.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0						0		
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0 Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas	Izin		Izin	3 Izin	50,000,000						3 Izin	430,000,000	
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik"				1 Kegiatan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	210,000,000 Dinas Perhubungan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				1 Kegiatan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	220,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03		1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi							0							0	
2	15	03	1.07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.07	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	03		1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan regional	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300,000,000							1 Dokumen	1,075,000,000	
2	15	03	1.08	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	850,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.08	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	140,000,000	Dinas Perhubungan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
															Nasional	Daerah							
2		15	03		03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan		85,000,000	Dinas Perhubungan	
2		15	03		1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Unit		Unit	2 Unit		30,000,000							2 Unit		5,590,000,000	
2		15	03		1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			1 Kegiatan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan		90,000,000	Dinas Perhubungan	
2		15	03		1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional			1 Kegiatan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan	
2		15	03		1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Unit pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional			2 Unit		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	2 Unit		5,500,000,000	Dinas Perhubungan	
2		15	03		1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			1 Kegiatan		30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan	
2		15	03		1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0									0	
2		15	03		1.10	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1 Kegiatan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan	
2		15	03		1.10	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1 Kegiatan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan	
2		15	03		1.10	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1 Kegiatan		0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan		0	Dinas Perhubungan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.10	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan pengumpan regional	Izin		Izin	1 Izin	50,000,000						1 Izin	170,000,000	
2	15	03	1.11	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	"Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik "				1 Kegiatan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.11	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional	Izin		Izin	1 Izin	0						1 Izin	170,000,000	
2	15	03	1.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.12	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	85,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional						0							0	
2	15	03	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional						0							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	03	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional						0							0	
2	15	03	1.15	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.15	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000						1 Kegiatan	65,000,000	
2	15	03	1.16	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	1.16	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	"Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional"				1 Kegiatan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	65,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelesaian Dokumen Data Dukung Pembangunan Perkeretaapian	Persen		Persen	100 Persen	550,000,000						100 Persen	503,500,000	
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan rencana induk perkeretaapian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	550,000,000						1 Dokumen	503,500,000	
2	15	05	1.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian				1 Kegiatan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	330,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
2	15	05	1.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Kegiatan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	110,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	05	1.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Masyarakat	1 Kegiatan	63,500,000	Dinas Perhubungan	
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah						0							0		
2	15	05	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	05	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							0		
2	15	05	1.03	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	05	1.03	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	05	1.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi						0							0		
2	15	05	1.04	01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	05	1.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							0		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
2		15	05	1.05	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan			
2		15	05	1.05	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan			
2		15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi						0							0				
2		15	05	1.06	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan			
2		15	05	1.06	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan			
2		15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							0				
2		15	05	1.07	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar		1 Kegiatan	0	Dinas Perhubungan			
2		15	05	1.07	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar			0	Dinas Perhubungan			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						16,795,595,260							59,055,171,203				
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	8,578,448,216							82 Poin	10,835,171,203			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	101,000,000					100 Persen	195,000,000		
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen 4 dokumen 1 Laporan	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	3 dokumen 4 dokumen 1 Laporan	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	9,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	9,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	9,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	9,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	2 Laporan	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Item 4 dokumen 1 Laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 Item 4 dokumen 1 Laporan	55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	7,133,448,216						100 Persen	7,565,171,203	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				78 Orang	7,098,448,216	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	78 Orang	7,485,171,203	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				12 Laporan	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	12 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 Laporan	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				2 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	2 Laporan	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	40,000,000						100 Persen	340,000,000	
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan				0 Pasang 0 Pasang 78 Pasang 0 Pasang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	0 Pasang 0 Pasang 78 Pasang 0 Pasang	175,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	12 dokumen	55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	12 dokumen	55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaia				12 dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	12 dokumen	55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	589,000,000						100 Persen	890,000,000	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	25 Jenis	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Jenis 40 Jenis	9,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	40 Jenis 40 Jenis	100,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Jenis	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	20 Jenis	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan				30 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	30 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				60 Jenis	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	60 Jenis	90,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				50 dokumen 50 dokumen	400,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	50 dokumen 50 dokumen	550,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	70,000,000						100 Persen	890,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 Unit	350,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				10 Jenis	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	10 Jenis	90,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				10 Unit	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	10 Unit	450,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	235,000,000						100 Persen	330,000,000	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	100 Persen	80,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				2 Rekening Tagihan	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	2 Rekening Tagihan	85,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				20 Unit	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	20 Unit	55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan				10 Orang 4 Orang 10 Unit 87 Orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	10 Orang 4 Orang 10 Unit 87 Orang	110,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	410,000,000						100 Persen	625,000,000	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitas				6 Unit 1 Unit	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	6 Unit 1 Unit	200,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				30 Unit 10 Unit 30 Unit 30 Unit	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	30 Unit 10 Unit 30 Unit 30 Unit	110,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 Unit	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	50 Unit	75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Unit 20 Jenis	120,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	1 Unit 20 Jenis	130,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				20 Jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	20 Jenis	75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor				20 Jenis	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur	20 Jenis	35,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	5,019,176,514						100 Persen	16,920,000,000	
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	5,019,176,514						100 Persen	16,920,000,000	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Informasi Komunikasi yang disiapkan				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	1 dokumen	5,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				50 Laporan	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	50 Laporan	6,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Monitoring Informasi				20 Laporan	84,486,514	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	20 Laporan	60,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Siaran Lokal				10 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	10 Jenis	900,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Pemprov				10 Media	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	10 Media	870,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Kepada Masyarakat				12 Layanan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	12 Layanan	960,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Patner				80 Media	900,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	80 Media	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Fasilitas Informasi Pemangku Kepentingan				80 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	80 Persen	350,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Perencanaan Komunikasi Krisis				3 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur dan Publik	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumah ASN Yang Mengikuti Bimtek				10 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	10 Orang	500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Hasil Laporan Badan Publik Yang Mengelola Informasi Publik Jumlah Laporan Sengketa Informasi Yang Dimesiasi Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi				12 Laporan 12 Laporan 0 Orang	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	12 Laporan 12 Laporan 0 Orang	750,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibidang mlah Agen/Duta Informasi Komunikasi				1 Tahun 25 Klp 5 Orang	3,134,690,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	1 Tahun 25 Klp 5 Orang	1,230,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen		Persen	100 Persen	3,197,970,530						100 Persen	31,300,000,000	
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Sub Domain dalam lingkup Pemerintah Provinsi	Persen		Persen	100 Persen	1,277,046,050						100 Persen	9,400,000,000	
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Layanan yang Menggunakan Domain/ Sub Domain yang Menggunakan Sertifikat Elektronik Jumlah Sub Domain Pemerintah Provinsi Terdaftar yang Digunakan				10 Layanan 70 Sub Domain	290,702,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	10 Layanan 70 Sub Domain	1,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan/Regulasi/SOP Yang Dihasilkan Untuk Penatalaksanaan Domain Dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Jumlah OPD Yang Menggunakan Domain Dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Menggunakan Sistem Elektronik Dengan Domain Dan Sub Domain Provinsi				3 Dokumen 40 OPD 25 Urusan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	3 Dokumen 40 OPD 25 Urusan	400,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah DESA Yang Telah Terkoneksi Jaringan Internet Jumlah OPD Yang Terkoneksi Jaringan Fiber Optik Pemerintah Provinsi Jumlah PEMKAB Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Pemprov				70 Desa 42 OPD 6 Kabupaten	986,344,050	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	70 Desa 42 OPD 6 Kabupaten	8,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penerapan E-Government	Persen		Persen	100 Persen	1,920,924,480					100 Persen	21,900,000,000		
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan/Regulasi/SOP Yang Dihasilkan Untuk Penatalaksanaan E-Government Jumlah Nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jumlah OPD Yang Bekerja Menggunakan Sistem Elektronik Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Dikerjakan Menggunakan Sistem Elektronik				0 Dokumen 25 Indeks 42 OPD 14 Urusan	222,850,940	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	0 Dokumen 25 Indeks 42 OPD 14 Urusan	2,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Capaian Indikator Terhadap Target SPBE Yang Sudah Ditentukan Sesuai Dokumen Rencana Induk Jumlah Kegiatan Sesuai Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Yang Sinkron Dan Terakomodir Dalam Penganggaran				5 Indikator 3 Kegiatan	299,416,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	5 Indikator 3 Kegiatan	800,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Aplikasi/Layanan Yang Menggunakan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Kapasitas Daya Tampung Data Yang Dilayani Oleh Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah OPD Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi				20 Aplikasi 5 TB 41 OPD 20 Urusan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	20 Aplikasi 5 TB 41 OPD 20 Urusan	1,500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Yang Terkoneksi Jaringan Internet Pemprov Yang Terintegrasi Jumlah Pemenuhan Terhadap Kebutuhan Koneksi Internet Pemprov				40 OPD 5 TB	775,984,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	40 OPD 5 TB	7,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Aplikasi/Layanan Yang Menggunakan Sistem Keamanan Informasi Jumlah Capaian Target Kemampuan Sistem Keamanan Informasi Jumlah Teknisi Keamanan Informasi Yang Bersertifikasi				10 Aplikasi/ Web 5 Urusan 5 Orang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	10 Aplikasi/ Web 5 Urusan 5 Orang	1,800,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Aplikasi/Layanan Dengan Data Dan Informasi Elektronik Yang Sikron Dan Terintegrasi Jumlah Capaian Target Data Dan Informasi Elektronik Yang Sinkron Jumlah Teknisi Data Dan Informasi Elektronik Yang Bersertifikasi Jumlah Teknisi Data Dan Informasi Elektronik Yang Bersertifikasi				12 Aplikasi 12 Jenis 4 Orang 5 Orang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	12 Aplikasi 12 Jenis 4 Orang 5 Orang	1,800,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Khusus Yang Dikembangkan Mendukung Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi Umum Yang Digunakan Oleh OPD Pemerintah Provinsi Jumlah OPD Yang Taat Mengikuti Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				5 Aplikasi 10 Aplikasi 42 OPD	267,109,580	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	5 Aplikasi 10 Aplikasi 42 OPD	2,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Yang Terhubung Oleh Interoperabilitas Antar Aplikasi Jumlah OPD Yang Terhubung Dalam Layanan Aplikasi Pemerintahan Jumlah PEMKAB Yang Terhubung Dalam Layanan Aplikasi Pemerintahan				10 Layanan 41 OPD 6 Kabupaten	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	10 Layanan 41 OPD 6 Kabupaten	500,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Capaian Terhadap Indikator Dan Aspek Dalam Ekosistem Provinsi Cerdas Jumlah Layanan Digital Yang Dihasilkan Oleh Provinsi Cerdas Jumlah Proses Bisnis Yang Dihasilkan Dalam Provinsi Cerdas				2 Indikator 10 Layanan 15 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	2 Indikator 10 Layanan 15 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD Yang Memiliki Tenaga Teknis SPBE Bersertifikat Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikasi Pemprov Dan Pemkab Yang Mendukung SPBE Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendukung Seluruh Aspek Penyelenggaraan SPBE				5 OPD 16 Orang 5 Orang	355,563,960	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	5 OPD 16 Orang 5 Orang	2,000,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Capaian Implementasi Terhadap Target Yang Tertuang Dalam Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE Jumlah Dokumen Yang Diselesaikan Oleh GCIO Terkait Proses Bisnis, Layanan Dan Audit Penyelenggaraan SPBE Jumlah Kebijakan Dan Regulasi Teknis Yang Dihasilkan Untuk Pengelolaan SPBE				5 Indikator 5 Dokumen 5 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	5 Indikator 5 Dokumen 5 Dokumen	800,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				14 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	14 Laporan	700,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							390,000,000							3,000,000,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Cakupan Penyelenggaraan dan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Persen		Persen	100 Persen	390,000,000						100 Persen	3,000,000,000		
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Penyelenggaraan dan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Persen		Persen	100 Persen	390,000,000						100 Persen	3,000,000,000		
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral				12 Laporan	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	12 Laporan	1,600,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Aparatur Pengelola Data Statistik Sektoral Jumlah SDM Aparatur Pengelola Data Statistik Sektoral Yang Mengikuti Diklat Tingkat Nasional				100 Orang 10 Orang	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	100 Orang 10 Orang	550,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Metadata Statistik Sektoral yang disusun				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pengelolaan Statistik Sektoral				100 Orang	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	100 Orang	350,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Aplikasi berlisensi Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang disediakan				2 Aplikasi	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	2 Aplikasi	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral				12 Laporan	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	12 Laporan	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							100,000,000							1,960,000,000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	1,960,000,000		
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase jenis informasi yang wajib diamankan melalui Penyelenggaraan Persandian	Persen		Persen	80 Persen	80,000,000						80 Persen	1,630,000,000		
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Kebijakan Yang Dibuat Terkait Pengamanan Informasi				1 Pergub	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	1 Pergub	180,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Sandiman Dan Diklat Teknis				10 Orang	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	10 Orang	400,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD Yang Menerapkan Security Awareness				43 OPD	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	43 OPD	800,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Yang Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				43 OPD	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	43 OPD	250,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Persen		Persen	80 Persen	20,000,000						80 Persen	330,000,000		
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Yang Menggunakan Email Bersandi (Sanapati)				43 OPD	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur dan Publik	43 OPD	330,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							12,045,811,691							12,728,000,000	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						9,945,811,691							10,358,000,000		
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						440,000,000							475,000,000		
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun				10 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN TRANSFER		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		10 Dokumen	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN TRANSFER		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		2 Dokumen	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA SKPD yang mengalami perubahan				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN TRANSFER		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		2 Dokumen	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN TRANSFER		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		2 Dokumen	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen DPPA SKPD yang disusun				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN TRANSFER		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		2 Dokumen	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja yang disusun Jumlah Tenaga Non PNS yang digaji				6 Dokumen 10 orang	230,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Dokumen 10 orang	250,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun Jumlah Monitoring kegiatan yang dilaksanakan				3 laporan 50 kali	170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		3 laporan 50 kali	180,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	dokumen		dokumen	4 dokumen	7,093,142,521						4 dokumen	7,042,000,000		
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai				80 orang	7,058,142,521	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	80 orang	7,000,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan				1 dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 dokumen	130,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan jumlah laporan				2 kali 1 dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		2 kali 1 dokumen	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah daerah Jumlah penyuluhan				6 Kabupaten 12 kali	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Kabupaten 12 kali	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	JUmlah Kegiatan Jumlah Objek				6 kali 10 objek	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kali 10 objek	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang menunjang kinerja ASN	paket		paket	10 paket	405,000,000						10 paket	644,000,000	
2	17	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang dianggarkan				240 pasang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	240 pasang	210,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan				1 dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	1 dokumen	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Jumlah pegawai				1 dokumen 80 orang	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	1 dokumen 80 orang	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Jumlah pegawai				1 dokumen 80 orang	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	1 dokumen 80 orang	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun				3 orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	3 orang	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pegawai				1 tahun	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	1 tahun	85,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah pegawai				1 tahun	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	1 tahun	16,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	peningkatan SDM pegawai				10 orang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	10 orang	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasikan				2 jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	2 jenis	125,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan				2 jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	2 jenis	80,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						614,669,170							476,000,000	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik				10 jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		10 jenis	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung kantor Jumlah pegawai				4 gedung 80 orang	234,669,170	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		4 gedung 80 orang	65,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah gedung kantor Jumlah pegawai				4 gedung 80 orang	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		4 gedung 80 orang	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan Jumlah pegawai				30 kali 80 orang	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		30 kali 80 orang	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan kantor yang dicetak				12 bulan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		12 bulan	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/ATK kantor				20 item	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		20 item	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu Jumlah mobilitas/sarana pendukung tamu				12 bulan 2 unit	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		12 bulan 2 unit	25,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Jumlah rapat/koordinasi yang dilaksanakan				1 dokumen 50 kali	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 dokumen 50 kali	210,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip kantor Jumlah pegawai				30 dokumen 80 orang	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		30 dokumen 80 orang	6,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana/peralatan yang dibutuhkan Jumlah SDM				1 paket 10 orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 paket 10 orang	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						800,000,000							940,000,000	
2	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pejabat eselon II, III dan IV				20 orang	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		20 orang	350,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan bersubsidi yang harus diawasi Jumlah daerah yang harus diawasi				1 pupuk 6 kabupaten	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 pupuk 6 kabupaten	350,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah gedung kantor Jumlah meja dan kursi yang dianggarkan				4 gedung 40 unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		4 gedung 40 unit	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana gedung kantor SKPD				1 gedung	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 gedung	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			130,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						456,000,000							494,000,000	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JUmlah pegawai Non PNS yang digaji jumlah surat keluar dan masuk				10 orang 200 surat	226,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		10 orang 200 surat	250,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						150,000,000						170,000,000		
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Daerah Jumlah UMKM				6 Kab 180 Orang	50,000,000				Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Kab 180 Orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Daerah Pelaku UMKM dan Koperasi				6 Kab 180 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Kab 180 Orang	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						150,000,000							170,000,000	
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						150,000,000							170,000,000	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Daerah Jumlah Koperasi				6 Kab 180 Koperasi	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Kab 180 Koperasi	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Daerah Jumlah Koperasi				6 Kab 180 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Kab 180 Unit	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						200,000,000							230,000,000	
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						200,000,000							230,000,000	
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Daerah Jumlah UMKM Peningkatan SDM pengelola Koperasi dan UMKM				6 Kab 300 UMKM 300 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Kab 300 UMKM 300 Orang	230,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persen		Persen	85 Persen	400,000,000						85 Persen	460,000,000	
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan SDM Pelaku UMKM dan Koperasi	orang		orang	100 orang	400,000,000						100 orang	460,000,000	
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana UMKM				6 Kab 100 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	6 Kab 100 Unit	230,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana UMKM Peningkatan SDM Pelaku UMKM dan Koperasi				100 Unit 100 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	100 Unit 100 Orang	230,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						1,000,000,000							1,100,000,000		
2	17	07		1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						1,000,000,000							1,100,000,000		
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana UMKM Jumlah UMKM dan Koperasi Peningkatan SDM PLUT				6 Kab 300 Unit 300 Orang/Unit 20 Orang	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 Kab 300 Unit 300 Orang/Unit 20 Orang	1,100,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						50,000,000							60,000,000		
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						50,000,000							60,000,000		
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peralatan Usaha Jumlah UMKM				30 Unit 180 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		30 Unit 180 Unit	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2,170,000,000							3,077,000,000	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						120,000,000							141,000,000		
3	30	02		1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						100,000,000							120,000,000		
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah aparat pengawasan Jumlah daerah yang harus diawasi				15 orang 6 kabupaten	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		15 orang 6 kabupaten	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah daerah yang harus diawasi				6 kabupaten	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	30	02		1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						20,000,000							21,000,000		
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah barang ekspor Jumlah daerah potensi ekspor Jumlah SKA yang diterbitkan				5 jenis 4 kabupaten 100 Surat	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		5 jenis 4 kabupaten 100 Surat	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						110,000,000							570,000,000	
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						110,000,000							570,000,000	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	jumlah sarana/prasarana pusat regional				5 paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		5 paket	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah daerah yang dibina				6 kabupaten	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten	160,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pasar komoditas yang dikembangkan				3 pasar	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		3 pasar	350,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						980,000,000							1,064,000,000	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						40,000,000							42,000,000	
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	jumlah daerah Jumlah distributor ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat				6 kabupaten 12 perusahaan 6 jenis	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten 12 perusahaan 6 jenis	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah daerah jumlah distributor ketersediaan barang penting				6 kabupaten 12 perusahaan 20 jenis	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten 12 perusahaan 20 jenis	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						800,000,000							860,000,000	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	jumlah pasar tradisional ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah				6 pasar 6 kabupaten	100,000,000				Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 pasar 6 kabupaten	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah daerah jumlah keluarga miskin dan kurang mampu pengadaan sembako murah				6 kabupaten 10 KK 10 paket	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten 10 KK 10 paket	750,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						140,000,000							162,000,000	
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	jumlah distributor Jumlah perizinan				12 perusahaan 30 dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		12 perusahaan 30 dokumen	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	pengawasan pupuk bersubsidi dan bahan berbahaya				6 kabupaten	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	jumlah daerah jumlah distributor jumlah pengawasan				6 kabupaten 6 perusahaan 12 kali	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten 6 perusahaan 12 kali	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	jumlah daerah jumlah distributor				6 kabupaten 6 perusahaan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten 6 perusahaan	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						250,000,000							300,000,000	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						250,000,000							300,000,000	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	jumlah pameran yang diikuti jumlah produk unggulan daerah yang dipamerkan				3 kali 6 jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		3 kali 6 jenis	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	jumlah pameran yang diikuti jumlah produk unggulan yang dipamerkan				2 kali 6 jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		2 kali 6 jenis	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah produk ekspor daerah				4 jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		4 jenis	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah produk ekspor daerah				6 jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 jenis	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	pelaku ekspor Sulawesi Barat				10 perusahaan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		10 perusahaan	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						460,000,000							702,000,000	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						60,000,000							252,000,000	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	pelaku usaha				60 orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		60 orang	210,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	koordinasi perlindungan konsumen peningkatan SDM				6 kali 6 orang	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kali 6 orang	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	koordinasi penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa konsumen				10 kali 10 kali	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		10 kali 10 kali	21,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						300,000,000							340,000,000	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	mutu produk ekspor				6 jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 jenis	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu barang peningkatan SDM penguji				1 tahun 6 orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 tahun 6 orang	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3		30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	layanan sertifikasi uji mutu peningkatan SDM produk unggulan dan ekspor daerah				1 tahun 6 orang 6 jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 tahun 6 orang 6 jenis	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	laboratorium uji mutu produk				1 tahun	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1 tahun	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000							110,000,000		
3		30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	jumlah daerah pelaku usaha sarana pengawasan perdagangan sosialisasi peraturan				6 kabupaten 6 kabupaten 2 unit 1 kali	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten 6 kabupaten 2 unit 1 kali	110,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						250,000,000							300,000,000		
3		30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						50,000,000							60,000,000		
3		30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	produk dalam negeri promosi produk dalam negeri				20 jenis 2 kali	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		20 jenis 2 kali	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						50,000,000							60,000,000		
3		30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	pelaku usaha promosi produk dalam negeri				1000 orang 2 kali	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		1000 orang 2 kali	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						150,000,000							180,000,000		
3		30	07	1.03	01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	jumlah daerah pelaku usaha produsen dan konsumen				6 kabupaten 100 orang 100 orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		6 kabupaten 100 orang 100 orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	pelaku usaha				100 orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		100 orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	pelaku usaha ekspor peningkatan SDM petugas pemantau harga pangan				30 orang 3 orang 12 orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		30 orang 3 orang 12 orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3		31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,200,000,000							1,430,000,000		
3		31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						450,000,000							550,000,000		
3		31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						450,000,000							550,000,000		
3		31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Barat				2 dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi		2 dokumen	60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
															Nasional					Daerah
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			250,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						600,000,000							700,000,000		
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						600,000,000							700,000,000		
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			350,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi						300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			350,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						150,000,000							180,000,000		
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						150,000,000							180,000,000		
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas						50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi			60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	persentasi pemantauan dan evaluasi perusahaan industri				100 persen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	100 persen		60,000,000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					9,293,208,800						11,076,350,000			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,787,358,800					82 Poin	9,065,500,000		
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Baik		Baik	75 Baik	234,000,000					75 Baik	305,000,000		
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Operator e-Planning				3 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan 3 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan 3 Orang	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah operator Kepegawaian				8 Data Sektoral 4 Dokumen 1 Laporan 2 Orang	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8 Data Sektoral 4 Dokumen 1 Laporan 2 Orang	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat capaian kinerja anggaran lingkup DPMPTSP	Persen		Persen	100 Persen	6,237,745,756						100 Persen	7,220,000,000	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				53 Orang	6,068,745,756	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	53 Orang	7,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Disediakan				95 Persen	159,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	95 Persen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				12 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	12 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan				12 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	12 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	1 Laporan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	100 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				2 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	2 Laporan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Anggaran DPMPTSP	2 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dimiliki	Persen		Persen	80 Persen	6,000,000						80 Persen	33,000,000	
2	18	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan				2 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	2 Unit	2,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	1 Laporan	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	2 Laporan	3,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	95 Persen	60,000,000						95 Persen	72,000,000	
2	18	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan				80 Pasang 30 Pasang 160 Pasang 65 Pasang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	80 Pasang 30 Pasang 160 Pasang 65 Pasang	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	1 Laporan	6,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaian				65 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	65 Laporan	6,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya				20 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	20 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya				10 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	10 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase PNS yang Mendapatkan Fasilitas Pindah Tugas				20 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	20 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikandan Pelatihan Formal				10 Orang	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	10 Orang	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				15 Orang 95 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	15 Orang 95 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				5 Orang 95 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DPMPTSP	5 Orang 95 Persen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Baik		Baik	75 Baik	377,213,044						75 Baik	405,500,000	
2	18	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	2,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	10 Jenis	2,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang disediakan				10 Jenis 5 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	10 Jenis 5 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	15 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan				10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	47,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	10 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak Jumlah Barang yang Digandakan				5 Jenis 3 Jenis	2,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	5 Jenis 3 Jenis	3,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang -undangan yang Disediakan				4 Jenis 4 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	4 Jenis 4 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				60 Jenis	47,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	60 Jenis	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				40 Laporan 30 Laporan	278,463,044	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	40 Laporan 30 Laporan	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi umum DPMPTSP	1 Laporan	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	Baik		Baik	75 Baik	180,000,000						75 Baik	200,000,000	
2	18	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit 1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMPTSP	1 Unit 1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				4 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMPTSP	4 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				10 Unit	180,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMPTSP	10 Unit	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan				20 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMPTSP	20 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan				4 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMPTSP	4 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Gedung	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMPTSP	1 Gedung	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				25 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMP TSP	25 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				10 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah DPMP TSP	10 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Baik		Baik	75 Baik	442,400,000						75 Baik	550,000,000	
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	252,400,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi Umum DPMP TSP	100 Persen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				36 Rekening	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi Umum DPMP TSP	36 Rekening	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				20 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi Umum DPMP TSP	20 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan				12 Bulan 12 Bulan 10 Unit 60 Orang	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Administrasi Umum DPMP TSP	12 Bulan 12 Bulan 10 Unit 60 Orang	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Baik		Baik	75 Baik	250,000,000						75 Baik	280,000,000	
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan Jumlah tenga pengemudi				2 Jenis 4 Unit 30 Unit 30 Unit 1 Orang	190,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	2 Jenis 4 Unit 30 Unit 30 Unit 1 Orang	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan				4 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	4 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	2 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				10 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	10 Jenis	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	18	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Jenis Pemeliharaan Aset Tetap Tak Berwujud				2 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	2 Jenis	20,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2		18	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Luas Gedung Kantor yang Direhabilitasi				1 Gedung 1 Jenis 25 Jenis 10 Jenis 2103.5 M2	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Barang Milik Daerah	1 Gedung 1 Jenis 25 Jenis 10 Jenis 2103.5 M2	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan Ketersediaan Regulasi Penanaman Modal	Persen		Persen	70 Persen	285,000,000						70 Persen	350,000,000	
2	18	02	1.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan Ketersediaan Regulasi Penanaman Modal	Persen		Persen	70 Persen	180,000,000						70 Persen	235,000,000	
2	18	02	1.01	01		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Bidang Usaha yang Ditetapkan Fasilitas/Insentif Penanaman Modalnya Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal Jumlah Peraturan Pendukung Kemudahan Berusaha Jumlah Peserta FGD Penetapan Fasilitas/Insentif Penanaman Modal				10 Bidang Usaha 4 Kali 1 Pergub 30 Orang	150,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Regulasi & Pelaku Usaha	10 Bidang Usaha 4 Kali 1 Pergub 30 Orang	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1.01	02		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Konsolidasi Data Bidang Usaha yang Ditetapkan Fasilitas/insentif Penanaman Modal				2 Kali 1 Kali	30,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Regulasi & Pelaku Usaha	2 Kali 1 Kali	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1.02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Cakupan ketersediaan data potensi penanaman modal	Persen		Persen	90 Persen	105,000,000						90 Persen	115,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah FGD Evaluasi Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Jumlah Konsolidasi Data RUPMP Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan dan Evaluasi RUPMP Jumlah Pertemuan Evaluasi RUPMP Jumlah Sektor Prioritas				1 Kali 2 Kali 24 Kali 1 Kali 9 Sektor	30,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Regulasi dan Pelaku Usaha	1 Kali 2 Kali 24 Kali 1 Kali 9 Sektor	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi Jumlah Peserta Konsolidasi Data Potensi dan Peluang Usaha Penanaman Modal Jumlah Sektor yang Tersedia Peta Potensi dan Peluang Usahanya				4 Kali 30 Orang 9 Sektor	75,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Regulasi dan Pelaku Usaha	4 Kali 30 Orang 9 Sektor	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen		Persen	80 Persen	320,000,000						80 Persen	500,000,000	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama dalam rangka penanaman modal	Persen		Persen	40 Persen	320,000,000						40 Persen	500,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Promosi Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Promosi Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Kualitas Promosi Jumlah Peserta Workshop Peningkatan Kualitas Sumber Daya Promosi Investasi Jumlah Profil Investasi Sulawesi Barat Jumlah Proyek Investasi Strategis yang Siap Ditawarkan				5 Kali 30 Orang 30 Orang 30 Orang 5 Jenis 4 Proyek	120,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Promosi dan Calon Investor	5 Kali 30 Orang 30 Orang 30 Orang 5 Jenis 4 Proyek	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pameran Investasi Dalam dan Luar Negeri yang Diikuti/Dilaksanakan Jumlah Peserta Forum Investor Jumlah Peserta Promosi Terpadu dan Keikutsertaan Pada Regional Investment Forum Jumlah Promosi Melalui Media				2 Kali 30 Orang 4 Orang 2 Kali	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Promosi dan Calon Investor	2 Kali 30 Orang 4 Orang 2 Kali	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan PTSP	Poin		Poin	95 Poin	725,850,000						95 Poin	965,850,000	
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai dengan SOP melalui PTSP	Persen		Persen	98 Persen	725,850,000						98 Persen	965,850,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Aparat PTSP yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Teknis Jumlah Gerai PTSP di Kabupaten Jumlah Inovasi Penyelenggaraan PTSP Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan PTSP Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Bimbingan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Menu Pengembangan System Pendukung Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pemeliharaan System Pendukung Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Elektronik Jumlah Personil Penyelenggara PTSP yang Diberikan Tunjangan Khusus Jumlah Peserta Konsolidasi Data Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek OSS				20 Orang 6 Gerai 2 Inovasi 10 Kali 10 Kali 30 Orang 10 Menu 2 Jenis 300 Izin dan Non Izin 50 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang	533,050,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Nilai Investasi, Pelaku Usaha	20 Orang 6 Gerai 2 Inovasi 10 Kali 10 Kali 30 Orang 10 Menu 2 Jenis 300 Izin dan Non Izin 50 Orang 30 Orang 30 Orang	585,850,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Anggota Forum Komunikasi PTSP Jumlah Konsolidasi Kebijakan dan Harmonisasi Peraturan Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Rumusan Kebijakan dan Peraturan PTSP				30 Orang 2 Kali 2 Kali 2 Rumusan	100,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Nilai Investasi, Pelaku Usaha	30 Orang 2 Kali 2 Kali 2 Rumusan	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Aduan PTSP yang ditindaklanjuti Jumlah Responden Survey Kepuasan Masyarakat				5 Aduan 200 Orang	67,800,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Nilai Investasi, Pelaku Usaha	5 Aduan 200 Orang	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Data Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				10 Data 3 Kali 30 Orang	25,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Nilai Investasi, Pelaku Usaha	10 Data 3 Kali 30 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal	Persen		Persen	30 Persen	150,000,000						30 Persen	165,000,000	
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rasio pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persen		Persen	90 Persen	150,000,000						90 Persen	165,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Peserta Konsolidasi Perkembangan Data Realisasi Penanaman Modal Jumlah Peserta Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal Jumlah Realisasi LKPM Tingkat Provinsi Sulawesi Barat				4 Kali 30 Orang 30 Orang 390 Milyar	60,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Realisasi Investasi & Pelaku usaha	4 Kali 30 Orang 30 Orang 390 Milyar	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimbingan Teknik/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Peserta Bimbingan LKPM Online Jumlah UMKM yang Berkomitmen dengan Perusahaan PMA/PMDN Jumlah UMKM yang Berpotensi Bermitra dengan Perusahaan PMA/PMDN				5 Kali 4 Kali 30 Orang 4 UMKMK 18 UMKMK	50,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Realisasi Investasi & Pelaku usaha	5 Kali 4 Kali 30 Orang 4 UMKMK 18 UMKMK	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang Diawasi Pelaksanaan Penanaman Modalnya				10 Kali 8 Kali 60 Perusahaan	40,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Data Realisasi Investasi & Pelaku usaha	10 Kali 8 Kali 60 Perusahaan	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Implementasi Pengelolaan Data dan Informasi yang Terintegrasi	Persen		Persen	75 Persen	25,000,000						75 Persen	30,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Persen		Persen	80 Persen	25,000,000					80 Persen	30,000,000			
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Konsolidasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik				6 Informasi 1 Kali 5 Kali	25,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Data dan Informasi Sektoral	6 Informasi 1 Kali 5 Kali	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						19,728,773,299								77,394,935,976	
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,047,727,079						82 Poin	8,664,935,976		
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Poin		Poin	24 Poin	296,500,000						24 Poin	296,500,000		
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)				4 Dokumen	114,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	4 Dokumen	114,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun (Dokumen)				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (LAPORAN)				2 Laporan	4,500,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	2 Laporan	4,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2		19	01		1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia (Item) Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)				1 Item 4 Dokumen	86,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Item 4 Dokumen	86,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01		1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat penyerapan anggaran OPD (Persen)	Persen		Persen	85 Persen	5,001,227,079						85 Persen	4,848,635,976	
2		19	01		1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya (Orang)				50 Orang	4,942,227,079	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	50 Orang	4,789,635,976	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2		19	01		1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun (Laporan)				1 Laporan	4,500,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Laporan	4,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2		19	01		1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD yang Tersusun (Laporan) (LAPORAN)				2 Laporan	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	2 Laporan	50,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2		19	01		1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang Tersusun (LAPORAN)				1 Laporan	4,500,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Laporan	4,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01		1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup SKPD (Persen)	Persen		Persen	75 Persen	300,000,000						75 Persen	500,000,000	
2		19	01		1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)				100 Pasang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	100 Pasang	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2		19	01		1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang) Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (ORANG)				50 Orang 10 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	50 Orang 10 Orang	350,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01		1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD (Persen)	Persen		Persen	75 Persen	615,000,000						75 Persen	1,444,800,000	
2		19	01		1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (JENIS)				0 Jenis	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	0 Jenis	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2		19	01		1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (JENIS)				5 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	5 Jenis	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2		19	01		1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (JENIS)				17 Jenis	20,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	17 Jenis	25,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis) Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan (Jenis) Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan (Jenis)				5 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	5 Jenis 2 Jenis 2 Jenis	162,500,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan (JENIS)				2 Jenis	40,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	2 Jenis	45,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan (JENIS)				4 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	4 Jenis	12,300,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan (Jenis)				28 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	28 Jenis	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah (Dokumen) Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah (Dokumen)				90 Dokumen 47 Dokumen	350,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	90 Dokumen 47 Dokumen	850,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	75 Persen	200,000,000						75 Persen	500,000,000	
2	19	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan (UNIT)				3 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	3 Unit	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan (Jenis)				2 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	2 Jenis	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	Persen		Persen	80 Persen	485,000,000						80 Persen	525,000,000	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang di Kelola (PERSEN)				75 Persen	155,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	75 Persen	160,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang dibayarkan dalam Setahun (REKENING)				2 Rekening	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	2 Rekening	165,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan (Jenis)				3 Jenis	180,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	3 Jenis	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	Persen		Persen	80 Persen	150,000,000						80 Persen	550,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan (Unit)				17 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	17 Unit	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)				1 Unit	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dispora	1 Unit	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Angka		Angka	1 Angka	2,336,046,220						1 Angka	8,280,000,000	
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi (Orang)	Orang		Orang	577 Orang	2,036,046,220						577 Orang	7,480,000,000	
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda yang mengikuti Seleksi Pemuda Pelopor (ORANG)				40 Orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	40 Orang	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Pemuda Terampil (ORANG) Jumlah Wirausahawan Muda (ORANG)				40 Orang 60 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	40 Orang 60 Orang	1,200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Kader Pemuda Anti Narkoba (ORANG) Jumlah Kader Pemuda MARASA (Orang) Jumlah Kader Pemuda Sarjana Desa (Orang) Jumlah Peserta Jambore Pemuda Daerah (Orang) Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pemuda (ORANG) Jumlah Peserta Seleksi Jambore Pemuda Indonesia (JPI)(Orang) Jumlah Peserta Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)(Orang)				40 Orang 40 Orang 30 Orang 60 Orang 50 Orang 20 Orang 20 Orang	200,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	40 Orang 40 Orang 30 Orang 60 Orang 50 Orang 20 Orang 20 Orang	2,780,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Delegasi Paskibra Prov. Sulbar yang dikirim ke Jakarta Sebagai Calon Paskibra Nasional (ORANG) Jumlah Purna Paskibraka yang Mengikuti Wisata Intelektual (ORANG) Jumlah Siswa(i)/Sederajat yang mengikuti DIKLAT Paskibra Tk. Provinsi (ORANG) Jumlah Siswa(i) SLTA/Sederajat yang terseleksi Sebagai Calon Paskibra Tk. Nasional (ORANG) Jumlah Siswa(i) SLTA/Sederajat yang terseleksi Sebagai Calon Paskibra Tk. Provinsi (ORANG)				2 Orang 71 Orang 71 Orang 12 Orang 71 Orang	1,036,046,220	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	2 Orang 71 Orang 71 Orang 12 Orang 71 Orang	1,850,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Unit)				1 Unit	200,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	1 Unit	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Pemuda Berprestasi yang di Berikan Penghargaan (ORANG) Jumlah Pemuda Berprestasi yang diberikan Penghargaan (ORANG)				3 Orang 5 Orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	3 Orang 5 Orang	800,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen RAD (Dokumen)				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda (Orang)				30 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemuda se Sulawesi Barat	30 Orang	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi/lembaga kepemudaan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang menjadi binaan provinsi (Organisasi/Lembaga)	Organisasi/Lembaga		Organisasi/Lembaga	12 Organisasi/Lembaga	300,000,000						12 Organisasi/Lembaga	800,000,000	
2	19	02	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemuda yang Bermitra dengan Dunia Usaha (Organisasi)				6 Organisasi/Lembaga	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Organisasi Pemuda se Sulawesi Barat	6 Organisasi/Lembaga	450,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah OKP yang dibina (ORGANISASI/LEMBAGA)				6 Organisasi/Lembaga	250,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Organisasi Pemuda se Sulawesi Barat	6 Organisasi/Lembaga	350,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen		Persen	12 Persen	8,995,000,000						12 Persen	58,250,000,000	
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih PPLP yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Orang		Orang	38 Orang	2,800,000,000						38 Orang	51,700,000,000	
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet Binaan di PPLP (ORANG) Jumlah Pelatih PPLP yang mendapatkan pelatihan pengembangan SDM (Orang)				38 Orang 9 Orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat	38 Orang 9 Orang	800,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terpelihara (UNIT) Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia (UNIT)				2 Unit 2 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat	2 Unit 2 Unit	700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Club Olahraga yang dibina (KLUB) Tersedianya Tenaga Keolahragaan (Orang)				6 Club 30 Orang	2,600,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat	6 Club 30 Orang	50,200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah cabor yang diikuti dan diselenggarakan pada kejuaraan olahraga (Cabor)	Cabor		Cabor	2 Cabor	345,000,000						2 Cabor	3,600,000,000	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Cabor rekreasi dan Tradisional yang dipertandingkan (CABOR) Jumlah Cabor yang di kompetisikan (CABOR) Jumlah Cabor yang Dipertandingkan (POPDA) (Cabor)				2 Cabor 3 Cabor 8 Cabor	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Atlit Provinsi Sulawesi Barat	2 Cabor 3 Cabor 8 Cabor	1,600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Cabor Pada Kejuaraan Paralimpik yang dipertandingkan (Cabor) Jumlah Cabor Paralimpik Pelajar yang dipertandingkan (Cabor)				2 Cabor 2 Cabor	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Atlit Provinsi Sulawesi Barat	2 Cabor 2 Cabor	600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Cabor yang Di Ikuti (POPWIL) (Cabor) Jumlah Cabor yang Mengikuti Kejurnas PPLP (CABOR) Jumlah tim yang mengikuti piala Menpora (TIM)				8 Cabor 3 Cabor 4 Tim	145,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Atlit Provinsi Sulawesi Barat	8 Cabor 3 Cabor 4 Tim	1,400,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet yang mendapatkan fasilitas pembninaan dan pengembangan olahraga prestasi	Orang		Orang	38 Orang	550,000,000						38 Orang	2,100,000,000	
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang Mengikuti Seleksi Atlet Daerah (Orang)				38 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Atlit Provinsi Sulawesi Barat	38 Orang	250,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Binaan PPLP yang mendapatkan Pembinaan Mental (Orang) Jumlah Atlet yang Mengikuti Try Out (ORANG) Jumlah Cabor yang Mengikuti TC (Cabor)				38 Orang 38 Orang 2 Cabor	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Atlit Provinsi Sulawesi Barat	38 Orang 38 Orang 2 Cabor	1,450,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Insan Olahraga berprestasi yang diberi Penghargaan (ORANG)				7 Orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Atlit Provinsi Sulawesi Barat	7 Orang	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia (DOKUMEN)				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Atlit Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang mendapatkan pembinaan pengembangan (Organisasi)	Organisasi		Organisasi	10 Organisasi	5,300,000,000						10 Organisasi	850,000,000	
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi Olahraga yang memenuhi standar (Organisasi)				10 Organisasi	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Organisasi Olahraga	10 Organisasi	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi Olahraga yang berkembang dimasyarakat (Organisasi) Jumlah Pengurus Organisasi Keolahragaan yang Mengikuti Pelatihan (Orang)				10 Organisasi 35 Orang	5,000,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Organisasi Olahraga	10 Organisasi 35 Orang	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Tercapainya kerjasama dengan lembaga terkait (Dokumen)				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Organisasi Olahraga	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	1.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang berprestasi yang di beri penghargaan (Organisasi)				5 Organisasi	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Organisasi Olahraga	5 Organisasi	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen		Persen	12 Persen	1,350,000,000						12 Persen	2,200,000,000	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah anggota gerakan pramuka yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (Orang)	Orang		Orang	120 Orang	1,350,000,000						120 Orang	2,200,000,000	
2	19	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia (Dokumen)				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan (Lembaga)				7 Lembaga	500,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	7 Lembaga	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Peserta Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi (Orang)				40 Orang	200,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	40 Orang	150,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	19	04	1.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersedia (Unit)				1 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	1 Unit	500,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Peserta Kegiatan Kepramukaan Provinsi (Orang)				40 Orang	200,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	40 Orang	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi (Lembaga)				1 Lembaga	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	1 Lembaga	300,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	04	1.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi (Paket)				1 Paket	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	1 Paket	600,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2	19	04	1.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan (Orang)				40 Orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Organisasi Gerakan Pramuka Sulawesi Barat	40 Orang	200,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						7,357,859,091								11,288,900,000		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	Skala Likert		Skala Likert	4 Skala Likert	5,935,961,833						4 Skala Likert	7,378,900,000			
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai perencanaan kinerja lingkup SKPD	Poin		Poin	25 Poin	46,900,000						25 Poin	300,000,000			
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	14,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	16,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	16,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat penyerapan anggaran lingkup SKPD	Persen		Persen	98 Persen	4,621,466,469						98 Persen	4,270,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				35 Orang	4,577,766,469	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	35 Orang	4,200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	8,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Laporan	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				12 Laporan	35,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	12 Laporan	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat disilin Aparatur Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	39,500,000						100 Persen	228,900,000	
2	23	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan Jumlah Pakaian Olahraga yang Diadakan				35 Pasang 61 Pasang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai DPKD Prov. Sulbar	35 Pasang 61 Pasang	78,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	4,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai DPKD Prov. Sulbar	12 Dokumen	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				28 Persen	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai DPKD Prov. Sulbar	28 Persen	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	604,816,460						100 Persen	1,070,000,000	
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	20 Jenis	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	50 Jenis	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan				5 Jenis 2 Jenis	40,920,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	5 Jenis 2 Jenis	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak Jumlah Barang yang Digandakan				5 Jenis 70000 Jenis	32,550,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	5 Jenis 70000 Jenis	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				3 Jenis	7,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	3 Jenis	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				25 Jenis	49,046,460	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	25 Jenis	65,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Dokumen	445,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	130 Dokumen	550,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	295,000,000					100 Persen	1,000,000,000		
2	23	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				2 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	2 Unit	400,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				20 Jenis	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	20 Jenis	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				20 Unit	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	20 Unit	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diadakan				1 Unit	185,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Unit	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	169,638,904					100 Persen	260,000,000		
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	40,120,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	100 Persen	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				24 Rekening Tagihan	79,518,904	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	24 Rekening Tagihan	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	1 Jenis	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	158,640,000					100 Persen	250,000,000		
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				14 Unit	49,170,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	14 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				5 Unit	59,470,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	5 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				30 Unit	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	DPKD Prov. Sulbar	30 Unit	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio		Rasio	1,88 Rasio	1,351,897,258					1,88 Rasio	3,685,000,000		
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen		Persen	1.8 Persen	551,897,258					1.8 Persen	1,335,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah jaringan perpustakaan elektronik yang dikelola dan terpelihara Jumlah Tenaga Perpustakaan/ Pustakawan yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan dan pengembangan perpustakaan elektronik				1 Jaringan 40 Orang	66,897,258	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemustaka (Masyarakat, Pelajar, Siswa, Mahasiswa)	1 Jaringan 40 Orang	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung perpustakaan umum provinsi				2700 Kunjungan	185,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemustaka (Masyarakat, Pelajar, Siswa, Mahasiswa)	2700 Kunjungan	260,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan SMA Sederajat yang dibina				6 Perpustakaan	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemustaka (Masyarakat, Pelajar, Siswa, Mahasiswa)	6 Perpustakaan	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan/ Pustakawan yang mengikuti bimbingan teknis perpustakaan				60 Orang	45,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemustaka (Masyarakat, Pelajar, Siswa, Mahasiswa)	60 Orang	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Peningkatan jumlah koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah				1000 Eksamp lar	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemustaka (Masyarakat, Pelajar, Siswa, Mahasiswa)	1000 Eksamp lar	600,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah data indeks minat baca masyarakat sulawesi barat Jumlah data perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan se sulawesi barat				1 Data 1 Data	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Pemustaka (Masyarakat, Pelajar, Siswa, Mahasiswa)	1 Data 1 Data	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Nilai index minat baca masyarakat sulawesi barat	Nilai		Nilai	2.86 Nilai	800,000,000						2.86 Nilai	2,350,000,000	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Pelajar dan Masyarakat yang mengikuti sosialisasi budaya baca dan literasi				200 Orang	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Perpustakaan Umum Provinsi Perpustakaan Desa / Masyarakat	200 Orang	300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang mendapat bantuan pengembangan, supervisi, dan stimulasi				20 Perpustakaan	640,000,000	Kab. Majene, Pamboang, Betteng Kab. Mamuju, Tapalang, Orobatu Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruung Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Buku Kab. Mamasa, Buntumalangka, Kebanga Kab. Pasangkayu, Tikke Raya, Lariang Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Bambamanurung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Perpustakaan Umum Provinsi Perpustakaan Desa / Masyarakat	20 Perpustakaan	2,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial				6 Kelompok	110,000,000	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Perpustakaan Umum Provinsi Perpustakaan Desa / Masyarakat	6 Kelompok	50,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno	Persen		Persen	1 Persen	70,000,000						1 Persen	225,000,000	
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase karya cetak dan karya rekam	Persen		Persen	25 Persen	0						25 Persen	75,000,000	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah karya cetak dan karya rekam yang diserahkan				145 Eksamplar	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat Se Provinsi Sulawesi Barat	145 Eksamplar	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Penerbitan KID dan BID	terbitan		terbitan	2 terbitan	70,000,000						2 terbitan	150,000,000	
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Katalog Induk Daerah yang diterbitkan				1 Terbitan	35,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat se Provinsi Sulawesi Barat	1 Terbitan	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Induk Daerah yang diterbitkan				1 Terbitan	35,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat se Provinsi Sulawesi Barat	1 Terbitan	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						815,000,000						1,200,000,000		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan Arsip Statis OPD, Perusahaan, Ormas, Orpol, dan Perorangan yang Dikelola	Persen		Persen	75 Persen	815,000,000						75 Persen	1,200,000,000	
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah daftar Arsip Dinamis tersusun	daftar		daftar	1 daftar	130,000,000						1 daftar	300,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
														Nasional					Daerah		
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerahyang Tersusun				4 Dokumen	101,176,040				Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	4 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	9,861,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	1 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	4,401,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	1 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	9,865,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	1 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yangTersusun				1 Dokumen	4,298,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	1 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Dokumen	11,306,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	2 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yangTersusun				4 Dokumen	50,373,260		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	4 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	%		%	100 %	7,421,141,992							100 %		0	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji danTunjangannya				76 Orang	7,380,332,152		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	76 Orang		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	5,420,520		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	1 Laporan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				2 Laporan	35,389,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	2 Laporan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD	%		%	100 %	64,232,000							100 %		0	
3	25	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan PelatihanFormal				3 Orang	64,232,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	3 Orang		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	%		%	100 %	637,194,103							100 %		0	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	3,899,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	4 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan				2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis	45,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	2 Jenis 1 Jenis 1 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak				2 Jenis	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	2 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan				2 Jenis	7,071,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	2 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				2 Jenis	52,310,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	2 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi KeLuar Daerah				135 Dokumen 38 Dokumen	520,813,303		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	135 Dokumen 38 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasrana gedung kantor	Jenis		Jenis	4 Jenis	335,000,000						4 Jenis	230,000,000	
3	25	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional Yang Tersedia				5 Unit	185,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	ASN DKP	5 Unit	230,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor Diadakan				3 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	3 Paket	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD	%		%	100 %	348,003,800						100 %	0	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 %	86,558,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	100 %	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				4 Rekening Tagihan	87,280,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	4 Rekening Tagihan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangMenggunakan Jasa/Pihak Ketiga				3 Jenis	133,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	3 Jenis	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yangMenggunakan Jasa/Pihak Ketiga				12 Bulan	40,765,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	12 Bulan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jenis		Jenis	2 Jenis	400,100,000						2 Jenis	230,000,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yangMenggunakan Jasa Pemeliharaan				11 Unit	200,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN DKP	11 Unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab				1 Gedung	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	ASN DKP	1 Gedung	230,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Kawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	Kawasan		Kawasan	3 Kawasan	3,573,000,000						3 Kawasan	0	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentasi Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	%		%	100 %	2,250,000,000						100 %	0	
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen dan penetapan Peninjauan kembali Perda RZWP3K Jumlah Dokumen dan Validasi KLHS Peninjauan Kembali PERDA RZWP3K Jumlah dokumen Profil Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat pengguna ruang laut	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3		25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Penilaian potensi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) (Kab. Mamuju Tengah dan kabupaten pasang kayu Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (Kab. Majene dan Kab. Mamuju) Jumlah infrastruktur, sarana dan prasara pendukung di kawasan konservasi Jumlah Kawasan Konservasi WP3K yang ditetapkan oleh pemerintah Jumlah Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan dan dikelola Jumlah kelompok pengelola, dan pengawas kawasan Konservasi di WP3K				1 KKPD 2 KKPD 1 KKPD 1 KKPD 1 kawasan 3 Kelompok	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat pengguna ruang laut	1 KKPD 2 KKPD 1 KKPD 1 KKPD 1 kawasan 3 Kelompok	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Lokasi pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem pesisir				2 Lokasi	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat pengguna ruang laut	2 Lokasi	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah SDM dalam Peningkatan kesiapsiagaan mengurangi risiko bencana.				100 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat pengguna ruang laut	100 Orang	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Persentasi Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Persen)	%		%	100 %	350,000,000						100 %	0	
3		25	02	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah peraturan gubernur terkait Izin Reklamasi WP3K				1 Pergub	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat pengguna ruang laut	1 Pergub	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi/ pertimbangan teknis untuk izin lokasi perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di WP3K, 2)				2 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat pengguna ruang laut	2 Jenis	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi				2 Kabupaten	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat pengguna ruang laut	2 Kabupaten	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.02	04	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah rekomendasi/ pertimbangan teknis izin reklamasi di WP3K,				2 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat pengguna ruang laut	2 Jenis	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.02	05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Kegiatan pengelolaan data dasar (basis data) Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan.				2 Lokasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat pengguna ruang laut	2 Lokasi	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Persen)	%		%	100 %	973,000,000						100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Jumlah SDM dalam Mengolah sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang terlatih				3 Jenis 100 Orang	500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	3 Jenis 100 Orang		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pemerhati pesisir dan laut				2 Kelompok	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Kelompok		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	02	1.03	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Bersih Pantai)				2 Kabupaten	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Kabupaten		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	02	1.03	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM WP3K yang mendapatkan Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	113,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	100 Orang		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat	Persen		Persen	1,2 Persen	2,982,000,000							1,2 Persen		0	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	%		%	100 %	1,050,000,000							100 %		0	
3	25	03	1.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi				1 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	1 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap				2 Jenis	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok nelayan	2 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap				5 Jenis	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok nelayan	5 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0								0		
3	25	03	1.02	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						0								0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	%		%	100 %	250,000,000							100 %		0	
3	25	03	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				2 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				5 Jenis	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	5 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	25	03	1.03	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah data usaha Perikanan tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	1 Laporan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.04	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Persentase Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	%		%	100 %	100,000,000							100 %	0	
3	25	03		1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil			2 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.04	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah rekomendasi izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil			3 Jenis	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	3 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	%		%	100 %	100,000,000							100 %	0	
3	25	03		1.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT			2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT			3 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	3 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Persentase Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	%		%	100 %	1,300,000,000							100 %	0	
3	25	03		1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan			1 Lokasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok nelayan	1 Lokasi		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			3 Jenis	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok nelayan	3 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Fungsi Pemerintahandan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			3 Lokasi	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	3 Lokasi		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03		1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persentase Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	%		%	100 %	132,000,000							100 %	0	
3	25	03		1.07	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan prosedur persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT			2 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen		0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	"Jumlah Pesrsetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT "				2 Jenis	57,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Jenis	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03		1.08	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya. (Persen)	%		%	100 %	50,000,000						Kelompok nelayan	100 %	0	
3	25	03	1.08	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT				2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.08	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok nelayan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	%		%	100 %	0						Kelompok nelayan	100 %	0	
3	25	03	1.09	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah dokumen pendaftaran kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03		1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	%		%	100 %	0						Kelompok nelayan	100 %	0	
3	25	03	1.10	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran 10 GT				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah dokumen pendaftaran kapal Perikanan dengan Ukuran 10 GT				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok nelayan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat	Persen		Persen	2 Persen	4,935,000,000							2 Persen	0	
3	25	04		1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidaya Ikan	%		%	100 %	0							100 %	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	04	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				2 Dokumen	0	Kab. Majene, Banggae, Banggae	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pembudidayaan ikan yang terbit dan tersedianya tim teknis				3 kawasan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pembudidaya ikan	3 kawasan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah data usaha pembudidayaan ikan				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pembudidaya ikan	1 Laporan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan uang Usahanya sampe 12 Mil	%		%	100 %	100,000,000						100 %	0	
3	25	04	1.02	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pembudidaya ikan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pembudidayaan ikan yang terbit				3 kawasan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pembudidaya ikan	3 kawasan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Persentase Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT	%		%	100 %	0						100 %	0	
3	25	04	1.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT				2 kawasan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pembudidaya ikan	2 kawasan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Persentase Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	%		%	100 %	4,835,000,000						100 %	0	
3	25	04	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah Kab/Kota				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pembudidaya ikan	1 Laporan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di laut				2 Jenis	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	2 Jenis	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan diair payau dan air tawar				2 kawasan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	2 kawasan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut				2 Paket	1,020,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	2 Paket		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan diair payau dan air tawar				2 kawasan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	2 kawasan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring Keseshatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Jumlah pembudidaya ikan di laut yang terlatih Jumlah Sarana Pengelolaan Kesehatan ikan				5 Kabupaten 150 Orang 5 Jenis	715,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Kelompok pembudidaya ikan	5 Kabupaten 150 Orang 5 Jenis		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Temu Lapang, Temu Teknis dan Temu Usaha yang terlaksana				5 Kegiatan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Kelompok pembudidaya ikan	5 Kegiatan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	08	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kawasan pengembangan,Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan				3 kawasan	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	3 kawasan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	1.05	09	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kawasan pengembangan pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan				3 kawasan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pembudidaya ikan	3 kawasan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentasi Penanganan Kegiatan IUU Fishing, Destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	Persen		Persen	100 Persen	1,920,000,000						100 Persen		0	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil (Persen)	%		%	100 %	1,720,000,000						100 %		0	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Hari Operasi kapal Pengawas Jumlah Kegiatan Pembinaan pengawasan pemanfaatan Ruang laut Jumlah Sarana dan Prasarana Pokmaswas untuk Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut Tindak Lanjut Layanan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut				20 Hari 3 Kegiatan 3 Jenis 5 Laporan	1,120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Pengguna sumber daya kelautan dan perikanan	20 Hari 3 Kegiatan 3 Jenis 5 Laporan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3		25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Hari Operasi kapal Pengawas Jumlah Kegiatan Pembinaan pengawasan pemanfaatan Ruang laut Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Tindak Lanjut Layanan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut				30 Hari 3 Kegiatan 3 Jenis 5 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat pengguna sumber daya kelautan dan perikanan	30 Hari 3 Kegiatan 3 Jenis 5 Laporan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	05	1.01	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pembinaan pengawasan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut (Kegiatan)				2 Kabupaten	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Pengguna sumber daya kelautan dan perikanan	2 Kabupaten	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	05			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya (Persen)	%		%	100 %	200,000,000						100 %	0	
3		25	05	1.02	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya				3 Kegiatan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Kelompok masyarakat pengguna sumber daya perikanan wilayah sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya	3 Kegiatan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	05	1.02	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan				3 Kegiatan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok masyarakat pengguna sumber daya perikanan wilayah sungai, waduk, danau dan genangan air lainnya	3 Kegiatan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Sulawesi Barat	Persen		Persen	2 Persen	2,659,953,742						2 Persen	0	
3		25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	%		%	100 %	250,000,000						100 %	0	
3		25	06	1.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan SOP Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pengolah hasil perikanan	2 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	06	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan				36 Kelompok	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pengolah hasil perikanan	36 Kelompok	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3		25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil produk kelautan dan perikanan				6 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pengolah hasil perikanan	6 Laporan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menegah dan Besar	%		%	100 %	850,000,000					100 %	0		
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang memenuhi standar SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) Jumlah Pengolah dan Pemasar yang mengikuti Bimbingan				4 Kelompok 90 Orang	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Kelompok pengolah hasil perikanan	4 Kelompok 90 Orang	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi				6 Kabupaten	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Kelompok pengolah hasil perikanan	6 Kabupaten	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengohan Ikan	%		%	100 %	1,559,953,742						100 %	0	
3	25	06	1.03	01	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku Usahan Pengolah/distribusi Ikan				1 Dokumen	950,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pengolah hasil perikanan	1 Dokumen	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan Jumlah sarana dan prasarana bagi pelaku Usaha Perikanan				30 Pelaku Usaha 5 Jenis	509,953,742		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok pengolah hasil perikanan	30 Pelaku Usaha 5 Jenis	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	1.03	03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Informasi Manejeman Logistik Ikan yang dapat diakses				1 Aplikasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok pengolah hasil perikanan	1 Aplikasi	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						10,290,197,415						11,920,309,375		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	6,611,447,415						82 Poin	7,421,559,375	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai sakip opd	poin		poin	70 poin	350,000,000						70 poin	498,000,000	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Dokumen	46,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Dokumen	57,500,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	26	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Dokumen	28,750,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	2 Laporan	5,750,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	99 persen	4,918,982,815						99 persen	5,179,596,468	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				45 Orang	4,848,982,815	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	45 Orang	5,098,596,468	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	100 Persen	5,750,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Laporan	30,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Laporan	5,750,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Laporan	5,750,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	100 Persen	5,750,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				1 Laporan	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Laporan	27,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	50,000,000						100 persen	72,500,000	
3	26	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				46 Orang	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas			Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	46 Orang	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	100 Persen	72,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	450,000,000						100 persen	641,750,000	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	6 Jenis	20,250,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan				20 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	20 Jenis	18,050,000	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	8 Jenis	11,500,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Jenis	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	7 Jenis	40,875,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak				5 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	5 Jenis	55,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan				2 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	2 Jenis	115,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				6 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	6 Jenis	81,075,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				8 Dokumen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	8 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	105,000,000						100 persen	152,008,300	
3	26	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				4 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	4 Unit	0	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				4 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	4 Jenis	142,008,300	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				6 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	6 Jenis	10,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	501,714,600						100 persen	553,106,757	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	22,714,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	100 Persen	46,046,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				96 Rekening	84,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	96 Rekening	112,060,757	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan				46 Orang	395,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	46 Orang	395,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	235,750,000						100 persen	324,597,850	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil				2 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	2 Unit	129,302,550	Dinas Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				6 Unit	15,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	6 Unit	21,750,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor				1 Unit	110,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	1 Unit	145,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan				7 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	ASN dinas pariwisata provinsi sulawesi barat	7 Jenis	28,545,300	Dinas Pariwisata
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Persen		Persen	0,29 Persen	1,340,000,000						0,29 Persen	1,640,000,000	
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya tarik wisata provinsi yang dikelola	objek		objek	7 objek	400,000,000						7 objek	500,000,000	
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah daya tarik wisata unggulan provinsi yang dikembangkan				1 kegiatan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			destinasi objek wisata	1 kegiatan	500,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah daya tarik wisata unggulan provinsi yang dirancang dan direncanakan				3 Objek	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	destinasi objek wisata	3 Objek	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi						0					destinasi objek wisata		0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi	kawasan		kawasan	3 kawasan	640,000,000						3 kawasan	720,000,000	
3	26	02	1.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang direncanakan				3 Objek	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	kawasan pariwisata provinsi	3 Objek	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi yang dipelihara dan di adakan				7 Unit	640,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	kawasan pariwisata provinsi	7 Unit	720,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola	objek		objek	9 objek	300,000,000						9 objek	420,000,000	
3	26	02	1.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan				3 Objek	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	destinasi objek wisata	3 Objek	0	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	jumlah objek destinasi yang dimonitoring dan evaluasi yang dilakukan				13 objek	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	destinasi objek wisata	13 objek	250,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	02	1.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan				30 orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	destinasi objek wisata	30 orang	170,000,000	Dinas Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Persen		Persen	100 Persen	827,500,000						100 Persen	867,500,000	
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi yang diselenggarakan	kegiatan		kegiatan	9 kegiatan	827,500,000						9 kegiatan	867,500,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektoronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan				3 Kegiatan	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	3 Kegiatan	87,500,000	Dinas Pariwisata				
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri bagi Industri Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan				5 Kegiatan	627,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	5 Kegiatan	650,000,000	Dinas Pariwisata				
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data daan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri yang dilaksanakan				5 Kegiatan	120,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	5 Kegiatan	130,000,000	Dinas Pariwisata				
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Persen		Persen	0,29 Persen	828,750,000						0,29 Persen	1,148,750,000					
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	kegiatan		kegiatan	15 kegiatan	828,750,000						15 kegiatan	1,148,750,000					
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik yang diselenggarakan				5 Kegiatan	157,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif dan industri jasa pariwisata	5 Kegiatan	200,000,000	Dinas Pariwisata				
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif yang dilaksanakan				7 Kali	400,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif dan industri jasa pariwisata	7 Kali	667,500,000	Dinas Pariwisata				
3	26	04	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	jumlah koordinasi dan Sinkronisasi usaha Kreatif Sepanjang rantai Produksi dengan menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar yang dilaksanakan				9 Kali	271,250,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif dan industri jasa pariwisata	9 Kali	281,250,000	Dinas Pariwisata				
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Persen		Persen	0,29 Persen	682,500,000						0,29 Persen	842,500,000					
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	682,500,000						5 kegiatan	842,500,000					
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya				55 Orang	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Lembaga atau SDM dan mitra pariwisata	55 Orang	230,000,000	Dinas Pariwisata				
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				55 Orang	382,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Lembaga atau SDM dan mitra pariwisata	55 Orang	467,500,000	Dinas Pariwisata				
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Fasilitasi Serifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang diselenggarakan				9 Kegiatan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Lembaga atau SDM dan mitra pariwisata	9 Kegiatan	145,000,000	Dinas Pariwisata				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						21,050,976,059							27,525,150,000					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	12,443,831,359					82 Poin	13,615,150,000		
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Perkebunan yang akuntabel	dokumen		dokumen	13 dokumen	443,433,584					13 dokumen	580,000,000		
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Perkebunan				1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	180,946,179	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	190,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	24,091,405	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di susun				1 Dokumen	18,396,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD di susun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD di susun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	75,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	2 Laporan	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	130,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	2 Laporan	150,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	Persen		Persen	95 Persen	8,670,385,609					95 Persen	9,442,000,000		
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				85 Orang	8,443,831,359	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	85 Orang	9,000,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	55,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	100 Persen	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi dokumen/laporan keuangan PD diselesaikan				12 Dokumen	44,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	12 Dokumen	88,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi pengelolaan keuangan OPD yang diselesaikan				12 Dokumen	54,600,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	16,500,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	37,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	24,014,250	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	100 Persen	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				14 Laporan	21,440,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	14 Laporan	45,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	11,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	2 Laporan	22,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	Persen		Persen	80 Persen	209,078,000						80 Persen	360,000,000	
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				80 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	80 Persen	60,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai				85 Orang	66,420,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	85 Orang	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				15 Orang	55,158,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	15 Orang	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	21,500,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	100 Persen	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				30 Persen	16,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	30 Persen	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	747,424,310						100 Persen	850,000,000	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan				5 Jenis	8,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	5 Jenis	20,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang disediakan				5 Jenis	30,773,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	5 Jenis	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yag disiapkan				12 Bulan	8,500,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	12 Bulan	10,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantoryang Disediakan Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan				10 Jenis 1 Jenis	116,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	10 Jenis 1 Jenis	130,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicitak Jumlah Jenis Barang yang Digandakan				50 Jenis 50 Jenis	16,500,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	50 Jenis 50 Jenis	20,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				8 Jenis 2 Jenis	22,500,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	8 Jenis 2 Jenis	30,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				50 Jenis	81,517,750	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	50 Jenis	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				50 Laporan	463,633,560	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	50 Laporan	490,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai yang Tersedia	unit		unit	30 unit	1,181,445,261						30 unit	1,202,000,000	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional roda dua yang Diadakan Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional roda empat yang Diadakan				3 Unit 2 Unit	966,002,033	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	3 Unit 2 Unit	967,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Meubeler yang Diadakan				15 Jenis	38,944,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	15 Jenis	45,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				10 Jenis	176,499,228	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	10 Jenis	190,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhnya Kebutuhan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	992,064,595						100 Persen	1,001,150,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	49,500,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	100 Persen	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang dibayarkan(Rekening Tagihan)				12 Rekening Tagihan	111,414,595	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	12 Rekening Tagihan	120,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				12 Jenis 12 Bulan	831,150,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	12 Jenis 12 Bulan	831,150,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Layak Pakai	Persen		Persen	70 Persen	200,000,000						70 Persen	180,000,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				50 Unit 20 Unit	200,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Pegawai Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat	50 Unit 20 Unit	180,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Produksi Dalam Pengembangan Kawasan Perkebunan	Persen		Persen	700 Persen	4,341,000,000						700 Persen	4,890,000,000	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Pertanian	kabupaten		kabupaten	6 kabupaten	391,000,000						6 kabupaten	490,000,000	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah laporan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung perkebunan Luas lahan yang dioptimalisasi				1 Laporan 75 Ha	391,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Kelompok Tani	1 Laporan 75 Ha	400,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah laporan kebutuhan pupuk dan laporan pengawasan peredaran sarana pertanian				2 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	2 Laporan	90,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Peredaran Benih yang bermutu	laporan		laporan	10 laporan	2,950,000,000						10 laporan	3,200,000,000	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih yang terbitkan				10 Sertifikat	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	10 Sertifikat	200,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah dem area komoditi perkebunan yang terbangun Jumlah demplot penangkar benih yang dibangun Jumlah dokumen sistem jaminan mutu benih Jumlah dokumen sistem mutu SDG yang diterbitkan Jumlah laporan pengawasan mutu benih Jumlah laporan pengelolaan administrasi UPTD dan layanan UPTD perbenihan tanaman perkebunan Jumlah laporan pengembangan pengelolaan kebun induk kakao Jumlah laporan pengembangan pengelolaan kebun induk kelapa Jumlah laporan pengembangan pengelolaan kebun induk kopi Jumlah laporan pengembangan teknologi APH dan Nabati Jumlah laporan pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan Jumlah penangkar benih perkebunan yang berproduksi Jumlah penangkar benih perkebunan yang dibina Jumlah Pengawas Benih Tanamana Luas lahan komoditi kakao yang dikembangkan Luas lahan tanaman semusim dan rempah yang diremajakan dan diintensifikasi Luas lahan tanaman tahunan dan penyegar yang diremajakan dan diintensifikasi Luas lahan yang mendapatkan bantuan benih			20 Ha 2 Kelompok 3 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 0 Penangkar Benih 0 Penangkar Benih 2 Orang 0 Ha 0 Ha 270 Ha 0 Ha	2,800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	20 Ha 2 Kelompok 3 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 0 Penangkar Benih 0 Penangkar Benih 2 Orang 0 Ha 0 Ha 270 Ha 0 Ha	3,000,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sistem Mutu SDG yang diterbitkan	dokumen		dokumen	3 dokumen	1,000,000,000						3 dokumen	1,200,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah dokumen sistem jaminan mutu benih Jumlah dokumen sistem mutu SDG yang diterbitkan Jumlah laporan pengelolaan administrasi UPTD dan layanan UPTD perbenihan tanaman perkebunan Jumlah laporan pengembangan pengelolaan kebun induk kakao Jumlah laporan pengembangan pengelolaan kebun induk kelapa Jumlah laporan pengembangan pengelolaan kebun induk kopi Jumlah laporan pengembangan teknologi APH dan Nabati Jumlah laporan pengembangan teknologi perbenihan tanaman perkebunan Jumlah Pestisida nabati yang tersedia Panjang jalan rabat beton kebun induk batupanga Panjang pagar kebun induk dan pagar UPTD				3 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 2000 Kg 300 Meter 400 Meter	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	3 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 2000 Kg 300 Meter 400 Meter	1,200,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Produksi Perkebunan yang Memenuhi SNI dan Standar Pasar Global	Persen		Persen	20 Persen	2,152,144,700						20 Persen	5,750,000,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase penataan prasarana perkebunan	Persen		Persen	60 Persen	2,152,144,700						60 Persen	5,750,000,000	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perkebunan				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani	2 Dokumen	250,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen pendukung penerapan standarisasi mutu kopi dan kakao Jumlah kelompok yang menerapkan pasca panen sesuai standar teknis Jumlah laporan monitoring evaluasi pemenuhan standarisasi mutu kopi dan kakao Jumlah Laporan Pembinaan UPH Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas perkebunan Jumlah penyediaan alat pasca panen Jumlah UPH perkebunan yang terbangun Jumlah UPH yang operasional				2 Kelompok 5 Kelompok 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Unit 3 Unit 9 Unit	732,144,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani	2 Kelompok 5 Kelompok 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Unit 3 Unit 9 Unit	3,500,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Laporan identifikasi kebutuhan dan pengelolaan jalan produksi Panjang Jalan Produksi yang dibangun/ di Tingkatkan				1 Laporan 6 Km	1,080,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani	1 Laporan 6 Km	1,100,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Irigasi yang dibangun/ditingkatkan Jumlah laporan identifikasi kebutuhan dan pengelolaan irigasi tanaman perkebunan				1 Unit 1 Laporan	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani	1 Unit 1 Laporan	150,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah laporan hasil penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit Jumlah laporan informasi harga pasar komoditi perkebunan berbasis IT Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung Jumlah laporan pemantauan pelaku usaha yang menerapkan penetapan harga TBS				12 Dokumen 12 Laporan 0 Laporan 4 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani	12 Dokumen 12 Laporan 0 Laporan 4 Laporan	350,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD yang dibangun/rehab/dipelihara				2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok tani	2 Unit	400,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						0							0	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						0							0	
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan						0							0	Dinas Perkebunan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Tingkat Pengendalian Bencana Tanaman Perkebunan	Skala Likert		Skala Likert	1.500 Skala Likert	1,350,000,000						1.500 Skala Likert	1,600,000,000	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tingkat Pengendalian BencanaTanaman Perkebunan	Persen		Persen	100 Persen	1,350,000,000						100 Persen	1,600,000,000	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Laporan data Serangan dan Peramalan Serangan OPT tanaman Perkebunan Jumlah Laporan Kelompok Brigade yang Terbina Jumlah Luasan Pengendalian OPT Tanaman terlaksananya Pengendalian OPT Tanaman perkebunan				6 Laporan 12 Laporan 2000 Ha	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	6 Laporan 12 Laporan 2000 Ha	650,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang tertangani				3 Kelompok	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	3 Kelompok	350,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah konflik yang tertangani Jumlah laporan pencegahan gangguan usaha, konflik dan pencegahan kebakaran tanaman perkebunan				3 konflik 3 Laporan	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	3 konflik 3 Laporan	200,000,000	Dinas Perkebunan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah tonase sarana pasca bencana alam tanaman perkebunan				0 Tonase	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	0 Tonase	400,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan	Persen		Persen	55 Persen	275,000,000						55 Persen	220,000,000	
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemenuhan legalitas perizinan usaha perkebunan	Persen		Persen	80 Persen	275,000,000						80 Persen	220,000,000	
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah dokumen standar pelayanan perizinan usaha perkebunan Jumlah petani/mitra yang tersertifikasi ISPO Jumlah petani yang terfasilitasi mendapatkan STDB				3 Kelompok	275,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	3 Kelompok	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penilaian izin usaha Perkebunan				0 Rekomendasi	0	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	0 Rekomendasi	60,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan pengawasan penerapan izin usaha perkebunan				0 Kelompok	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	0 Kelompok	60,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian Pada Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi dan Kawasan Pertanian Strategis Kewenangan Provinsi	Persen		Persen	100 Persen	489,000,000						100 Persen	1,450,000,000	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Rasio ketersediaan penyuluh yang kompeten	Persen		Persen	85 Persen	164,000,000						85 Persen	150,000,000	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN Perkebunan yang menguasai standar teknis budidaya tanaman perkebunan dan kelembagaan petani				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	0 Orang	100,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya pembinaan penyuluh perkebunan swadaya dan swasta				82 Orang	164,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat	82 Orang	50,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Tercapainya pelayanan penyuluhan perkebunan	Persen		Persen	60 Persen	250,000,000						60 Persen	650,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah media informasi inovasi usahatani perkebunan Jumlah petani yang mengakses media informasi inovasi usahatani perkebunan				0 Eksamplar	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	0 Eksamplar	250,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang mendapatkan pendampingan teknis				500 Orang	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	500 Orang	400,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Terwujudnya adopsi GAP dan GHP tanaman perkebunan	Persen		Persen	80 Persen	75,000,000						80 Persen	650,000,000			
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah korporasi petani perkebunan yang dibentuk				2 Unit	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kelompok Tani	2 Unit	80,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang operasional				6 Kelompok	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	6 Kelompok	250,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	terlaksananya penilaian kelayakan dan standar manajemen koorporasi perkebunan				4 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	4 Laporan	160,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani yang memahami anjuran teknis dan administrasi kelembagaan petani				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kelompok Tani	0 Orang	160,000,000	Dinas Perkebunan		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						44,237,661,353								46,788,262,908		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	21,123,841,353						82 Poin	22,069,812,908			
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	613,960,000						3 Dokumen	692,270,000			
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	350,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	4 Dokumen	398,870,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	36,660,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	1 Dokumen	37,900,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	1 Dokumen	17,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	1 Dokumen	19,500,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	6,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	1 Dokumen	7,100,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	15,800,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	2 Laporan	17,400,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	175,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	4 Dokumen	194,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	17,332,523,333						100 Persen	18,013,641,908	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				172 Orang	17,172,240,333	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	172 Orang	17,837,332,908	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	25,583,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	12 Laporan	26,862,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 Laporan	45,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	12 Laporan	50,660,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	46,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	1 Laporan	52,850,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 persen	15,190,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	100 persen	16,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				3 Laporan	14,435,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	3 Laporan	15,157,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	14,075,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	1 Laporan	14,780,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dilayani Administrasi Kepegawaiannya	Orang		Orang	166 Orang	302,000,000						166 Orang	317,100,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				6 Orang	213,740,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	6 Orang	224,427,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perencanaan				70 Orang 70 Orang	88,260,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP	70 Orang 70 Orang	92,673,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	1,412,071,020					100 Persen	1,482,140,000		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	12,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	5 Jenis	13,054,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	350,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	5 Jenis	373,279,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Jenis	154,240,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	1 Jenis	165,037,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Dicetak Jumlah Jenis Barang yang Digandakan				2 Jenis 5 Jenis	42,691,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	2 Jenis 5 Jenis	45,679,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Jenis 2 Jenis	48,300,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	2 Jenis 2 Jenis	52,298,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				20 Jenis	54,640,020	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	20 Jenis	57,793,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	1 Dokumen	775,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Barang Milik Daerah	unit		unit	4 unit	285,495,000						4 unit	305,479,000	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang tersedia				1 Unit	94,802,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	1 Unit	101,438,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Meubeler yang Diadakan				1 Jenis	190,693,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	1 Jenis	204,041,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	686,910,000						3 Jenis	733,942,000	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 persen	156,910,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	100 persen	167,893,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Rekening Tagihan	330,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	3 Rekening Tagihan	352,049,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Jenis	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	5 Jenis	214,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Disediakan Pemeliharannya	Jenis		Jenis	4 Jenis	490,882,000						4 Jenis	525,240,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				20 Unit	274,497,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	20 Unit	293,712,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	121,359,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	1 Unit	129,850,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				10 Jenis	95,026,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	10 Jenis	101,678,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Lahan Pertanian	Persen		Persen	80 Persen	13,181,380,000						80 Persen	14,050,050,000	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Distributor/penyalur/pengecer sarana pertanian , pupuk, pestisida dan alsintan yang terawasi/terpantau dalam penyaluran/pendistribusiannya ke petani	Distributor		Distributor	6 Distributor	452,050,000						6 Distributor	492,050,000	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Unit Usaha Penyedia dan Pengedar/Penyalur Pupuk, Pestisida dan Sarana Pendukung Pertanian				100 persen	322,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petugas, Petani	100 persen	357,050,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Koordinasi, Sinkronai dan Pelaporan Unit Usaha Penyedia dan Pengedar/Penyalur Sarana Pertanian				100 persen	130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petugas, Petani	100 persen	135,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih/Bibit (Pengadaan Benih/Bibit dan Pembinaan Penangkar) Yang Memenuhi Standar Sertifikasi	Persen		Persen	100 Persen	4,135,100,000						100 Persen	4,480,100,000	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Luas Cakupan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				225 Hektar	350,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	225 Hektar	375,100,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Luas Cakupan Penyaluran/Distribusi Benih/ Bibit Unggul Hortikultura Luas Cakupan Penyediaan Stok Benih/ Bibit Unggul Hortikultura				250 Hektar 2000 Hektar	2,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	250 Hektar 2000 Hektar	2,185,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Luas Cakupan Penyediaan Benih/ Bibit Unggul Tanaman Pangan Luas Cakupan Penyediaan Stok Benih/ Bibit Unggul Tanaman Pangan				2000 Hektar 1200 Hektar	1,785,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	2000 Hektar 1200 Hektar	1,920,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis Perbibitan Ternak yang Dikembangkan pada Sentra Perbibitan Ternak	Jenis		Jenis	3 Jenis	1,564,170,000						3 Jenis	1,703,340,000	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Petugas/Peternak Pada Sentra Produksi Benih/Bibit ternak yang Terlatih				25 Orang	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	25 Orang	95,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sentra Perbibitan Ternak Yang Dikembangkan				5 Sentra	1,379,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	5 Sentra	1,513,340,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang terlatih				30 Orang	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	30 Orang	95,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pelaporan Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Persen		Persen	100 Persen	290,000,000						100 Persen	330,000,000	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase Pengendalian dan Pelaporan Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				100 persen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas,Petugas,Petani	100 persen	150,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				100 persen	165,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas,Petugas,Petani	100 persen	180,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Obat Hewan yang Memenuhi Syarat Teknis dan Peredarannya sesuai Aturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persen		Persen	100 Persen	275,000,000						100 Persen	300,000,000	
3	27	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Persentase Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan serta Pelaporan Peredaran Obat Hewan pada Distributor Obat Hewan				100 persen	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petugas, Petani	100 persen	300,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dari Luar Provinsi	Ekor		Ekor	387 Ekor	6,465,060,000						387 Ekor	6,744,560,000	
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Penyediaan Bibit ternak dari Luar Provinsi				387 Ekor	6,289,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas,Petugas,Petani	387 Ekor	6,519,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Penyediaan Bibit Hijauan Pakan Ternak dari Luar Provinsi				35 Hektar	175,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas,Petugas,Petani	35 Hektar	225,560,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	5,785,300,000						82 Poin	6,139,290,000	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana dan Pemanfaatan Lahan Pertanian pada Kawasan Pertanian	Persen		Persen	100 Persen	5,785,300,000						100 Persen	6,139,290,000	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Penyediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				100 Dokumen	698,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	100 Dokumen	717,640,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Sesuai Dokumen Perencanaan				100 persen	356,190,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	100 persen	371,050,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani pada Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan Provinsi				7 Unit	1,570,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	7 Unit	1,820,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani pada Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan Provinsi				9 Unit	1,585,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	9 Unit	1,610,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan/Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan				2 Unit	215,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	2 Unit	230,600,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Pembangunan/Pemeliharaan Laboratorium Pertanian				6 Unit	145,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	6 Unit	150,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan/Pemeliharaan Rumah Potong Hewan				5 Unit	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	5 Unit	260,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Kawasan Pertanian yang terkoordinasikan, tersinkronisasi dan dilakukan Penataan Prasarana Pendukungnya				9 Kawasan	285,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	9 Kawasan	295,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD serta Sarana Pendukungnya				4 Unit	680,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petani	4 Unit	685,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	1,118,780,000					82 Poin	1,179,540,000		
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Penyakit Pada Hewan/Ternak Terpantau	Persen		Persen	100 Persen	384,780,000					100 Persen	404,790,000		
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Daerah Beresiko/Rawan Serta Daerah Wabah/Terdampak Penyakit Hewan				100 persen	384,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	0	100 persen	404,790,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi yang Terawasi	Persen		Persen	100 Persen	217,440,000					100 Persen	229,880,000		
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				1 Dokumen	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Petugas	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Pengawasan dan Pelaporan Unit Usaha Pemasok/Penyedia Hewan dan Produk Hewan yang akan Masuk/Keluar daerah Lintas Provinsi				100 persen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Petugas	100 persen	65,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas daerah Provinsi				100 persen	102,440,000	Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Petugas	100 persen	104,880,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Daerah/Zona yang Dilakukan Identifikasi/Surveillance Penyakit Hewan	Wilayah		Wilayah	6 Wilayah	456,560,000					6 Wilayah	474,870,000		
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Persentase Zona/Kompartemen Bebas Penyakit				100 persen	91,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	100 persen	97,120,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang terbina dalam Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan				6 Unit	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	6 Unit	120,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian, Peta Tingkat Kesehatan Hewan serta Rekomendasi Pencegahan Penyakit Ternak				1 Dokumen	255,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas TPHP Sulbar dan UPTD	1 Dokumen	257,750,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pelaku, Unit/Lembaga yang Terbina dan Terfasilitasi Dalam penanganan Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Unit		Unit	4 Unit	60,000,000						4 Unit	70,000,000	
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Unit Usaha Yang Diterbitkan				5 Sertifikat	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, UPTD, Petugas, Petani	5 Sertifikat	70,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	917,820,000						82 Poin	1,011,320,000	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase Wilayah Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Terpantau terhadap Gangguan OPT dan Gangguan Lainnya	Persen		Persen	100 Persen	917,820,000						100 Persen	1,011,320,000	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikendalikan				100 persen	525,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	UPTD, Kelompok Tani	100 persen	595,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Dampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tertangani				100 persen	272,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	UPTD, Kelompok Tani	100 persen	291,320,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguang Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura				100 persen	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	UPTD, Kelompok Tani	100 persen	125,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian Pada Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi dan Kawasan Pertanian Strategis Kewenangan Provinsi	Persen		Persen	100 Persen	2,110,540,000						100 Persen	2,338,250,000	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Yang Berkompeten Sesuai Kebutuhan Wilayah Kerjanya	Persen		Persen	80 Persen	881,110,000						80 Persen	1,102,770,000	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Persentase Penyuluh Pertanian ASN yang Berkpompeten Sesuai Kebutuhan Wilayah Kerjanya				100 persen	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Penyuluh Pertanian	100 persen	490,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Penyuluhan dan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta				60 Orang	461,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Penyuluh Pertanian	60 Orang	612,770,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Layanan Penyuluh Pertanian yang Profesioanl pada Kawasan Pengembangan Pertanian	Persen		Persen	80 Persen	584,700,000						80 Persen	585,470,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani yang Mengakses Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian yang di Diseminasikan				30 Kelompok	285,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Penyuluh Pertanian, Petani	30 Kelompok	285,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani yang Mengakses Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Berstandar GAP dan GHP				35 Kelompok	299,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Penyuluh Pertanian, Petani	35 Kelompok	300,470,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Terbentuk dan Terbina	Lembaga		Lembaga	6 Lembaga	644,730,000						6 Lembaga	650,010,000	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Pembentukan/ Restrukturisasi dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani pada Kawasan Pengembangan Pertanian				12 Lembaga	110,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	12 Lembaga	110,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Kelembagaan Korporasi Petani yang terbina dalam Pengelolaan/Manajemen Kawasan Koorporasi Pertanian				12 Lembaga	299,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	12 Lembaga	305,010,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani				1 Dokumen	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok tani pada Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Provinsi yang dilaksanakan				6 Unit	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Dinas, Petani	6 Unit	175,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						35,295,928,112							36,959,000,000	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						29,280,928,112							30,176,500,000	
3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						363,599,348							394,000,000	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Dokumen	240,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		1 Dokumen	12,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		2 Laporan	6,000,000	Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	88,599,348		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Dokumen	100,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						24,622,958,764							25,120,000,000	
3	28	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				246 Orang	24,530,958,764		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		246 Orang	25,000,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				90 Persen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90 Persen	40,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				1 Laporan	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		1 Laporan	6,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				2 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		2 Laporan	25,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				90 Persen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		90 Persen	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				12 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		12 Laporan	15,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				4 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Laporan	4,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						293,000,000							336,500,000	
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				246 Pasang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		246 Pasang	220,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pegawai yang Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya				100 Persen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		100 Persen	4,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya				100 Persen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		100 Persen	6,500,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah PNS yang Pindah Tugas				1 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		1 Orang	6,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		15 Orang	60,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				90 Persen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		90 Persen	20,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				95 Persen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		95 Persen	20,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,055,000,000							1,134,000,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Jenis	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		10 Jenis	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Jenis	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		10 Jenis	30,000,000	Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Jenis	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		10 Jenis	85,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				7 Jenis	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		7 Jenis	100,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 Jenis	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		5 Jenis	9,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				35 Jenis	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		35 Jenis	120,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Dokumen	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		1 Dokumen	730,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,451,370,000							1,580,000,000	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				10 Unit	650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		10 Unit	700,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				3 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		3 Jenis	60,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				15 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		15 Unit	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				10 Unit	651,370,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		10 Unit	700,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				6 Jenis	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		6 Jenis	60,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				4 Jenis	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Jenis	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						395,000,000							427,000,000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Ditindaklanjuti				100 Persen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		100 Persen	27,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan Dalam Setahun				4 Rekening tagihan	370,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Rekening tagihan	400,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,100,000,000							1,185,000,000	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				4 Unit	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Unit	130,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				35 Unit	440,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		35 Unit	460,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Mendapatkan Pemeliharaan				2 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		2 Unit	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				13 Unit	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		13 Unit	475,000,000	Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				60 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		60 Unit	60,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				3 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		3 Unit	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						5,295,000,000							5,866,000,000	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						355,000,000							400,000,000	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH yang disusun				12 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		12 Dokumen	10,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Unit Sarana Prasarana Operasional KPH yang disediakan dan dipelihara				12 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	170,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan				36 Kali	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		36 Kali	220,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						155,000,000							245,000,000	
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi				4 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		4 Dokumen	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung				8 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		8 Dokumen	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				12 Kali	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		12 Kali	85,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung				16 Kali	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		16 Kali	50,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah KPHP yang dinilai rencana pengelolaannya				4 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		4 Unit	20,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah KPHL yang dinilai rencana pengelolaannya				8 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		8 Unit	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						1,965,000,000							2,250,000,000	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang tersusun				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		1 Dokumen	120,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Pembangunan HR di Luar Kawasan Hutan Negara				1000 Ha	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		1000 Ha	500,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit yang digunakan untuk Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara				24000 Bibit	1,360,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		24000 Bibit	1,500,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Unit penerapan teknik KTA Hutan dan Lahan				24 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		24 Unit	60,000,000	Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Unit Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan				12 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		12 Unit	40,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan				48 Kali	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		48 Kali	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						2,675,000,000							2,780,000,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan berkurang				100 Ha	2,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		100 Ha	2,550,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Volume Kerusakan Hasil Hutan yang dicegah dan dibatas				100 Ha	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		100 Ha	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				48 Kali	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		48 Kali	100,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan n Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				48 Kali	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		48 Kali	100,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						65,000,000							87,000,000	
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang difasilitasi				6 Izin	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		6 Izin	12,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Pembudidaya HHBK				6 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		6 Unit	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu				48 Kali	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		48 Kali	45,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						55,000,000							75,000,000	
3	28	03	1.07	01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Rencana Pengolahan HHK dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				8 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		8 Dokumen	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				8 Kali	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		8 Kali	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang difasilitasi				7 Izin	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		7 Izin	15,000,000	Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan						25,000,000							29,000,000	
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar yang ditetapkan				19 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		19 Unit	12,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	03	1.09	05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit				48 kali	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		48 kali	17,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						145,000,000							186,500,000	
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi						25,000,000							30,000,000	
3	28	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Usulan Pembentukan TAHURA dan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi				1 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		1 Unit	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi						75,000,000							90,000,000	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				12 Kali	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		12 Kali	90,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						45,000,000							66,500,000	
3	28	04	1.03	03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Perencanaan Ekosistem Lahan Basah				4 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		4 Dokumen	6,500,000	Dinas Kehutanan
3	28	04	1.03	04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Unit Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah				4 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		4 Unit	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok Masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting yang diberdayakan dan dikuatkan kapasitasnya				6 Kelompok	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		6 Kelompok	30,000,000	Dinas Kehutanan
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						450,000,000							570,000,000	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						450,000,000							570,000,000	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh dan SDM bidang Kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya				50 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		50 Orang	70,000,000	Dinas Kehutanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelembagaan KTH yang dikuatkan dan didampingi				12 Kelompok	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		12 Kelompok	250,000,000	Dinas Kehutanan	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Izin PS yang disiapkan dan dikembangkan				5 Izin	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		5 Izin	250,000,000	Dinas Kehutanan	
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						125,000,000							160,000,000		
3	28	06		1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						125,000,000							160,000,000		
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang disusun dan ditetapkan				3 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		3 Dokumen	60,000,000	Dinas Kehutanan	
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS				48 kali	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		48 kali	100,000,000	Dinas Kehutanan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						11,323,819,988							49,573,673,410		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	6,723,819,988						82 Poin	7,198,125,410		
3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	207,470,000						2 Dokumen	249,840,400		
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	19,620,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	4 Dokumen	19,620,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	37,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	1 Dokumen	72,685,200	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	37,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	1 Dokumen	65,485,200	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Dokumen	26,850,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	2 Dokumen	22,050,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	17,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	4 Dokumen	10,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan	Persen		Persen	90 Persen	5,264,146,988						90 Persen	4,762,185,010		
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				50 Orang	5,209,726,099	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	50 Orang	4,687,185,010	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	46,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	1 Laporan	45,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				90 Persen	3,420,889	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	90 Persen	10,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				3 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	3 Laporan	20,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	Pasang		Pasang	70 Pasang	115,000,000						70 Pasang	330,000,000	
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				70 Pasang	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	70 Pasang	80,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaia				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	4 Orang	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis		Jenis	5 Jenis	727,520,000						5 Jenis	945,600,000	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	5 Jenis	10,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Jenis	210,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	8 Jenis	300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Jenis	29,770,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	5 Jenis	40,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan				6 Jenis	20,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	6 Jenis	20,600,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Jenis	3,150,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	2 Jenis	5,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				40 Jenis	54,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	40 Jenis	70,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Dokumen	405,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	40 Dokumen	500,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	Unit		Unit	2 Unit	0						2 Unit	450,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas EDM	1 Unit	300,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				3 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas EDM	3 Unit	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				11 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas EDM	11 Unit	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan	Rekening Tagihan		Rekening Tagihan	2 Rekening Tagihan	102,648,000						2 Rekening Tagihan	110,000,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	48,705,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	100 Persen	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				2 Rekening Tagihan	53,943,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	2 Rekening Tagihan	60,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan	Unit		Unit	35 Unit	307,035,000						35 Unit	350,500,000	
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				27 Unit	159,090,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	27 Unit	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				4 Unit	42,550,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	4 Unit	40,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	94,895,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	1 Unit	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				10 Unit	10,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas ESDM	10 Unit	10,500,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pengembangan Air Tanah yang Berbasis Konservasi	Persen		Persen	20 Persen	250,000,000						20 Persen	1,280,000,000	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Titik pengendalian dan pengawasan kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT	Laporan		Laporan	5 Laporan	0						5 Laporan	480,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Data dan Peta parameter air tanah (kuantitas dan kualitas) untuk penyusunan zonasi konservasi AT				7 Laporan	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	7 Laporan	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah cekungan air tanah yang sudah ditetapkan zona konservasinya (Pergub/Perda).				1 Dokumen	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	1 Dokumen	230,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Titik pengendalian dan pengawasan kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah pada wilayah CAT				5 Laporan	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	5 Laporan	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02		Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat laporan hasil uji (LHU) Pelayanan pengujian air	Perusahaan		Perusahaan	30 Perusahaan	150,000,000					30 Perusahaan	300,000,000		
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah sertifikat laporan hasil uji (LHU) Pelayanan pengujian air Jumlah SOP perizinan sektor air tanah				5 Perusahaan 1 SOP	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	5 Perusahaan 1 SOP	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi/BAPL teknis perizinan sektor air tanah yang sesuai SOP				5 Rekomendasi	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	5 Rekomendasi	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Perizinan sektor air tanah yang taat aturan				10 Perusahaan	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	10 Perusahaan	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah data penyusunan NPA (nilai perlehan air tanah)	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	100,000,000						20 Dokumen	500,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data penyusunan NPA (nilai perlehan air tanah)				20 Dokumen	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	20 Dokumen	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Regulasi penetapan NPA dalam daerah provinsi				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Lokasi pengendalian dan pengawasan kerusakan air tanah dan lingkungan air tanah				15 Lakasi	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	15 Lakasi	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan	Persen		Persen	25 Persen	170,000,000						25 Persen	310,000,000	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rekomendas		Rekomendasi	20 Rekomendasi	125,000,000						20 Rekomendasi	265,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan				5 Rekomendasi	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	5 Rekomendasi	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan yang taat terhadap aspek (Administrasi dan Finansial)				25 Perusahaan	75,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	25 Perusahaan	65,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang taat terhadap aspek (Tekinis, K3 dan Lingkungan)				30 Perusahaan	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	30 Perusahaan	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat yang taat terhadap aspek (Administrasi,Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan)	Perusahaan		Perusahaan	5 Perusahaan	45,000,000						5 Perusahaan	45,000,000	
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat yang taat terhadap aspek (Administrasi,Finangsial, Teknis, K3 dan Lingkungan)				5 Perusahaan	45,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	5 Perusahaan	45,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Peningkatan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Persen		Persen	1,40 Persen	900,000,000						1,40 Persen	12,432,440,000	
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Pemegang Izin yang Taat Aturan	Pengusahaar		Pengusahaan	1 Pengusahaan	0						1 Pengusahaan	400,000,000	
3	29	05	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Rekomendasi Teknis yang diterbitkan				3 Rekomendasi	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	3 Rekomendasi	250,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
														Nasional	Daerah									
3		29		05		1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Pemegang Izin yang Taat Aturan					25 Pemegang Izin		0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	25 Pemegang Izin	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3		29		05		1.02		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Izin yang Taat Aturan	Pengusahaar			Pengusahaan	2 Pengusahaan		0						2 Pengusahaan	50,000,000	
3		29		05		1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Izin yang Taat Aturan					2 Pengusahaan		0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	2 Pengusahaan	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi Teknis yang diterbitkan	Rekomendas		Rekomendasi	3 Rekomendasi	0					3 Rekomendasi	100,000,000		
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Rekomendasi Teknis yang diterbitkan				3 Rekomendasi	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	3 Rekomendasi	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah pembangunan pembangkit dan kegiatan pendukung terkait konservasi energi	Unit		Unit	175 Unit	900,000,000					175 Unit	11,882,440,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah pembangunan pembangkit dan kegiatan pendukung terkait konservasi energi				175 Unit	800,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	175 Unit	11,532,440,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang lulus pada kegiatan i Bimbingan Teknis Konsernasi Energi				20 Orang	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	20 Orang	150,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah obyek yang menerakan prinsip konservasi energi				5 Obyek	100,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	5 Obyek	200,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang Teraliri Listrik	Persen		Persen	50 Persen	3,280,000,000						50 Persen	28,353,108,000	
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan	Rekomendas		Rekomendasi	2 Rekomendasi	0						2 Rekomendasi	50,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
															Nasional	Daerah			
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan				2 Rekomendasi	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	2 Rekomendasi	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	Rekomendas		Rekomendasi	5 Rekomendasi	100,000,000					5 Rekomendasi	200,000,000		
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi				5 Rekomendasi	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	5 Rekomendasi	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik Instalasi Pembangkit Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang memenuhi kewajiban Perizinan, Lingkungan Hidup dan keteknikan				20 Pemilik	50,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	20 Pemilik	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUJPTL	Rekomendas		Rekomendasi	5 Rekomendasi	0						5 Rekomendasi	100,000,000	
3	29	06	1.05	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUJPTL				5 Rekomendasi	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	5 Rekomendasi	100,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3		29	06	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	KK		KK	10353 KK	3,180,000,000						10353 KK	28,003,108,000	
3		29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	SK Gubernur tentang Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			2 Dokumen	0	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	2 Dokumen	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3		29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			6 Kabupaten	100,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Publik/Masyarakat	6 Kabupaten	50,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3		29	06		1.06	06					1050 KK	3,080,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Publik/Masyarakat	1050 KK	27,953,108,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						8,993,944,193							20,487,000,000	
3	32	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	6,239,344,193						82 Poin	7,072,000,000	
3	32	01		1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Poin		Poin	24 Poin	557,500,000						24 Poin	763,500,000	
3	32	01		1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	185,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	4 Dokumen	300,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01		1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	36,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	1 Dokumen	37,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01		1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	36,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	1 Dokumen	37,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01		1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	37,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	1 Dokumen	37,500,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01		1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	36,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	1 Dokumen	37,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01		1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	42,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	2 Laporan	60,000,000	Dinas Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
														Nasional					Daerah		
3		32	01		1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				5 Item 7 Dokumen	185,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	5 Item 7 Dokumen	255,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	4,138,066,486						100 Persen	4,407,500,000	
3		32	01		1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				40 Orang	4,054,066,486	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	40 Orang	4,308,500,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				2 Laporan	42,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	2 Laporan	54,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				14 Laporan	42,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	14 Laporan	45,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	120,500,000						100 Persen	170,000,000	
3		32	01		1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				60 Pasang	55,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dinas Transmigrasi	60 Pasang	70,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	65,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Dinas Transmigrasi	4 Orang	100,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	636,597,707						100 Persen	734,000,000	
3		32	01		1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Jenis	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	5 Jenis	84,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan				5 Jenis	64,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	5 Jenis	75,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				7 Jenis	42,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	7 Jenis	55,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				35 Jenis	65,097,707	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	35 Jenis	70,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Dokumen	390,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	85 Dokumen	450,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	01		1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	180,000,000						100 Persen	280,000,000	
3		32	01		1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				1 Unit	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	1 Unit	100,000,000	Dinas Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				4 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	4 Jenis	60,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				5 Jenis	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	5 Jenis	120,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	356,000,000						100 Persen	397,000,000	
3	32	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				90 Persen	210,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	90 Persen	210,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				24 Rekening Tagihan	96,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	24 Rekening Tagihan	110,500,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	3 Jenis	76,500,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	250,680,000						100 Persen	320,000,000	
3	32	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				3 Unit	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	3 Unit	170,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	100,680,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Dinas Transmigrasi	1 Unit	150,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis	Persen		Persen	90 Persen	995,000,000						90 Persen	5,305,000,000	
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Tingkat Penyediaan Lokasi Calon Areal Transmigrasi dengan Kriteria Clean and Clear	Persen		Persen	50 Persen	995,000,000						50 Persen	5,305,000,000	
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Potensi Kawasan dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang Tersusun				10 Dokumen	620,000,000	Kab. Majene, Ulumanda, Kabiraan Kab. Majene, Ulumanda, Panggalo Kab. Mamuju, Kalukku, Kabuloang Kab. Polewali Mandar, Tutar, Tubbi Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu Tua Kab. Mamasa, Mambi, Selumaka Kab. Pasangkayu, Lariang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	10 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kesepakatan Satuan Lahan Permukiman dan Satuan Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang Tersusun dan Ditetapkan				6 Dokumen	100,000,000	Kab. Majene, Ulumanda, Ulumanda Kab. Mamuju, Kalukku, Sinyonyoi Kab. Mamasa, Mehalaan, Mehalaan Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	6 Dokumen	280,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luasan Usulan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Satuan Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi yang Memiliki Legalitas				5044 Hektar	215,000,000	Kab. Majene, Ulumanda, Kabiraan Kab. Majene, Ulumanda, Ulumanda Kab. Mamuju, Kalukku, Kabuloang Kab. Polewali Mandar, Tutar, Piriang Tapiko Kab. Mamasa, Mambi, Selumaka Kab. Mamasa, Mehalaan, Mehalaan Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	5044 Hektar	2,500,000,000	Dinas Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Areal Transmigrasi dan Hak Pengelolaan Transmigrasi yang Tersusun				2 Dokumen	60,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	2 Dokumen	525,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya	Persen		Persen	100 Persen	549,500,000						100 Persen	5,360,000,000	
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK		KK	270 KK	549,500,000						270 KK	5,360,000,000	
3	32	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen MoU Kerjasama antar Daerah dan Hasil Monitoring				7 Dokumen	100,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	7 Dokumen	185,000,000	Dinas Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	32	03	1.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Dibangun Pada Kawasan Transmigrasi				2 UPT	70,000,000	Kab. Majene, Ulumanda, Ulumanda Kab. Mamuju, Kalukku, Kabuloang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	2 UPT	3,900,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Persebaran Penduduk Pada Permukiman Transmigrasi				4 Dokumen	30,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	4 Dokumen	125,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya Pada Permukiman Transmigrasi				100 KK	25,000,000	Kab. Mamasa, Mehalaan, Mehalaan Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	100 KK	150,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	03	1.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Orang yang Memahami Program Transmigrasi yang Mendukung Pengembangan Wilayah				30 Orang	74,500,000	Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	30 Orang	250,000,000	Dinas Transmigrasi
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Ditingkatkan Kompetensi Dasar dan Penunjang Usahanya				90 Orang	225,000,000	Kab. Majene, Ulumanda, Ulumanda Kab. Polewali Mandar, Tutar, Tubbi Kab. Polewali Mandar, Tutar, Ratte Kab. Mamasa, Mehalaan, Mehalaan Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	90 Orang	500,000,000	Dinas Transmigrasi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3		32	03	1.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Transmigran Daerah Asal dan Daerah Setempat yang Ditingkatkan Kemampuan Adaptasi Sosialnya di Kawasan Transmigrasi				25 Orang	25,000,000	Kab. Mamasa, Mehalaan, Mehalaan Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	25 Orang	250,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri	Persen		Persen	42,85 Persen	1,210,100,000						42,85 Persen	2,750,000,000	
3		32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Berkembang pada Tahap Pemantapan	UPT		UPT	6 UPT	1,210,100,000						6 UPT	2,750,000,000	
3		32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah SDM Transmigrasi yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Edukasi Formal dan Non Formal				60 Orang	245,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	60 Orang	250,000,000	Dinas Transmigrasi
3		32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Permukiman Transmigrasi yang Mendapatkan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				8 Unit	965,100,000	Kab. Majene, Ulumanda, Panggalo Kab. Mamuju, Kalukku, Sinyonyoi Kab. Polewali Mandar, Tutar, Piriang Tapiko Kab. Mamasa, Mehalaan, Botteng Kab. Pasangkayu, Lariang, Bambakoro Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Batu Parigi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Kawasan Transmigrasi	8 Unit	2,500,000,000	Dinas Transmigrasi
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01					SEKRETARIAT DAERAH						260,563,529,841							113,442,615,000	
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen		Persen	100 Persen	1,841,650,000						100 Persen	5,497,586,000	
4	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Persen		Persen	100 Persen	246,000,000						100 Persen	364,698,000	
4	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				8 Dokumen	130,700,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	8 Dokumen	167,540,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				5 Dokumen	6,700,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen	16,439,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				5 Dokumen	9,700,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5 Dokumen	15,349,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				10 Dokumen	4,500,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10 Dokumen	7,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				10 Dokumen	10,800,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10 Dokumen	7,020,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				4 Laporan	53,200,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan	99,870,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30,400,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	50,980,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Biro Pemerintahan & Kesra	Persen		Persen	100 Persen	43,600,000						100 Persen	181,658,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	3,500,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	1 Laporan	90,788,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				4 Dokumen	40,100,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	4 Dokumen	90,870,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesra	Persen		Persen	100 Persen	240,340,000						100 Persen	979,080,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan umlah Pakaian Khusus yang Diadakan				84 Pasang 84 Pasang	35,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	84 Pasang 84 Pasang	570,790,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data kepegawaian				0 Persen	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	0 Persen	10,900,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai				0 Persen	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	0 Persen	7,890,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat keikutsertaan pegawai untuk mengikuti pendidkan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi				1 Persen	55,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	1 Persen	98,700,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4		01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan				100 Persen	150,340,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	100 Persen	290,800,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	100 Persen	611,610,000						100 Persen	2,554,650,000	
4		01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan				2 Jenis	120,340,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2 Jenis	1,548,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak Jumlah Barang yang digandakan				3 Jenis 1 Jenis	51,300,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3 Jenis 1 Jenis	55,400,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				40 Jenis	95,430,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	40 Jenis	50,800,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				97 Laporan 67 Laporan	344,540,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	97 Laporan 67 Laporan	900,450,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	25 Unit	500,000,000						25 Unit	862,950,000	
4		01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Diadakan				0 Unit	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	0 Unit	773,210,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				10 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	10 Unit	89,740,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				10 Unit	400,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	10 Unit	0	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	26 Unit	200,100,000						26 Unit	554,550,000	
4		01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservice Jumlah Pajak Kendaran Dinas yang dibayar				21 Unit 21 Unit	90,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	21 Unit 21 Unit	465,790,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				3 Unit	52,100,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	3 Unit	88,760,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																				
Provinsi Sulawesi Barat																				
Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4		01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor				2 Unit	58,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pemerintahan dan Kesra	2 Unit	0	Sekretariat Daerah
4		01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	1,660,049,841						100 Persen	17,955,809,000	
4		01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terfasilitasinya Urusan Tugas Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	539,326,841						100 Persen	9,981,330,000	
4		01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Aparat yang mengikuti penyelenggaraan PATEN Jumlah Dokumen penamaan Rupabumi Unsur Buatan di Prov. Sulbar yang terinventarisasi Jumlah kecamatan yang dievaluasi Jumlah kelurahan yang dievaluasi				65 Orang 1 Dokumen 20 Kecamatan 35 Kelurahan	159,346,841	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	65 Orang 1 Dokumen 20 Kecamatan 35 Kelurahan	1,475,870,000	Sekretariat Daerah
4		01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen percepatan penerapan SPM Jumlah rapat dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran berjalan Jumlah rapat koordinasi APPSI/BKPRS Jumlah rapat koordinasi dengan instansi vertikal Jumlah rapat koordinasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat				1 Dokumen 6 Rapat 2 Rapat 6 Rapat 3 Rapat	154,300,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 6 Rapat 2 Rapat 6 Rapat 3 Rapat	2,500,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah berita acara kesepakatan rapat penataan batas wilayah Jumlah berita acara kesepakatan rapat penegasan batas wilayah Jumlah dokumen kode wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terinventarisir Jumlah orang yang mengikuti pelatihan terkait batas wilayah Jumlah Peserta Sosialisasi Permendagri Batas Wilayah Jumlah Pilar yang dipasang, dipelihara atau dirapatkan Jumlah rapat koordinasi bidang administrasi kewilayahan				3 Berita Acara 3 Berita Acara 1 Dokumen 55 Orang 50 Peserta 25 Pilar 6 Rapat	225,680,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3 Berita Acara 3 Berita Acara 1 Dokumen 55 Orang 50 Peserta 25 Pilar 6 Rapat	6,005,460,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.02			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terfasilitasinya Urusan Otonomi Daerah	Persen		Persen	100 Persen	690,403,000						100 Persen	4,996,700,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4		01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang di PAW Jumlah dokumen memory jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tersusun Jumlah dokumen pelayanan kedinasan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan administrasi pemerintahan				12 Orang 2 Dokumen 3 Dokumen 65 Orang	223,743,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemkab dan Pemprov serta Anggota DPRD Kab/Provinsi se Sulawesi Barat	12 Orang 2 Dokumen 3 Dokumen 65 Orang	2,453,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah dokumen penataan dan pembentukan daerah otonomi baru yang tersusun				2 Dokumen	121,300,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemkab dan Pemprov serta Anggota DPRD Kab/Provinsi se Sulawesi Barat	2 Dokumen	543,900,000	Sekretariat Daerah
4		01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen pengukuran penyelenggaraan pemerintah daerah Jumlah kabupaten yang dibina Jumlah orang yang mengikuti Bimtek LPPD Jumlah Rapat antar Pemerintah Daerah terkait LPPD Jumlah rapat koordinasi gubernur sebagai Kepala Daerah				6 Rapat 6 Kabupaten 120 Orang 1 Rapat 6 Rapat	345,360,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemkab dan Pemprov serta Anggota DPRD Kab/Provinsi se Sulawesi Barat	6 Rapat 6 Kabupaten 120 Orang 1 Rapat 6 Rapat	1,999,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	1.03			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terfasilitasinya Proses Perjanjian Kerjasama Daerah	Persen		Persen	100 Persen	430,320,000						100 Persen	2,977,779,000	
4		01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah Dokumen kerjasama daerah yang terinventarisir Jumlah dokumen pengembangan kerjasama daerah Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah yang tertandatangani				3 Dokumen 3 Dokumen 6 MoU	154,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SKPD Tekhnis dan Pihak Ketiga	3 Dokumen 3 Dokumen 6 MoU	1,753,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah MoU kerjasama dengan badan usaha/swasta yang tertandatangani				3 MoU	144,320,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SKPD Tekhnis dan Pihak Ketiga	3 MoU	723,900,000	Sekretariat Daerah
4		01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama				5 Rapat	132,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	SKPD Tekhnis dan Pihak Ketiga	5 Rapat	500,879,000	Sekretariat Daerah
4	01	04				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	100 Persen	257,061,830,000						100 Persen	89,989,220,000	
4	01	04	1.01			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen		Persen	100 Persen	39,852,000,000						100 Persen	85,210,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Dokumen Pelayanan Kehidupan Beragama Jumlah Dokumen Pembinaan Mental Spritual Jumlah Pembinaan Mental Pengurus Rumah Ibadah se Sulawesi Barat Jumlah Permohonan Rumah Ibadah dan Lembaga Kegiatan Keagamaan lainnya yang di Verifikasi Jumlah Peserta Hari-hari Besar Keagamaan Jumlah Peserta Silaturahmi Ulama Jumlah Peserta Tablik Akbar dan Zikir Bersama Jumlah Peserta Training Center Tahfidz Al-Quran Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keagamaan Jumlah Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan Lainnya yang mendapatkan Bantuan Jumlah Rumah Ibadah dan Lembaga Kegiatan Keagamaan lainnya yang di Monitoring dan di Evaluasi				6 Dokumen 6 Dokumen 70 Orang 400 Permohonan 80 Peserta 60 Peserta 200 Peserta 77 Peserta 7 Rapat 285 Unit 285 Unit	36,052,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat, Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan lainnya	6 Dokumen 6 Dokumen 70 Orang 400 Permohonan 80 Peserta 60 Peserta 200 Peserta 77 Peserta 7 Rapat 285 Unit 285 Unit	60,860,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Peserta Dialog antar Umat Beragama Jumlah Peserta Festival Paduan Suara Gerejawi Tk. Nasional (FESPARAWI) Jumlah Peserta Festival Paduan Suara Gerejawi Tk. Nasional (PESPARANI) Jumlah Peserta Festival Seni Qasidah Tk. Nasional (LASQI) Jumlah Peserta Festival Seni Qasidah Tk. Provinsi (LASQI) Jumlah Peserta Kemah Bersama ORMAS Jumlah Peserta Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) Jumlah Peserta Pelatihan pembinaan karakter bagi warga binaan Rutan (ESQ) tingkat Sulawesi Barat Jumlah Peserta Peltihan Remaja Masjid Tk. Sulawesi Barat Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Quran/Musabaqah Tilawatil Quran Tk. Nasional Jumlah Peserta Seleksi Tilawatil Quran /Musabaqah Tilawtil Quran Tk. Provinsi Jumlah Peserta Seni Budaya Islam/Seni Religi Tingkat Sulawesi Barat Jumlah TIM Pemandu Haji Daerah Provinsi Sulawesi Barat				120 Peserta 60 Peserta 55 Peserta 30 Peserta 30 Peserta 70 Peserta 75 Peserta 50 Peserta 80 Peserta 60 Peserta 60 Peserta 30 Peserta 1 Tim	3,800,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat, Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan lainnya	120 Peserta 60 Peserta 55 Peserta 30 Peserta 30 Peserta 70 Peserta 75 Peserta 50 Peserta 80 Peserta 60 Peserta 60 Peserta 30 Peserta 1 Tim	24,350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terkait Pelayanan Dasar	Persen		Persen	100 Persen	216,800,690,000						100 Persen	3,124,070,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				1 Laporan 6 Rapat	216,567,720,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten se-Prov. Sulbar dan OPD Tekhnis Terkait	1 Laporan 6 Rapat	2,030,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				1 Laporan 6 Rapat	121,430,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten se-Prov. Sulbar dan OPD Tekhnis Terkait	1 Laporan 6 Rapat	546,790,000	Sekretariat Daerah
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Laporan 6 Rapat	111,540,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten se-Prov. Sulbar dan OPD Tekhnis Terkait	1 Laporan 6 Rapat	546,780,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	01	04		1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Fasilitasi Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terkait Non Pelayanan Dasar	Persen		Persen	100 Persen	409,140,000					100 Persen	1,655,150,000		
4		01		04		1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	6 Rapat 5 Rapat	143,900,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se- Prov. dan Pihak Ketiga	6 Rapat 5 Rapat	532,900,000	Sekretariat Daerah
4		01		04		1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Rapat 6 Rapat	100,340,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se- Prov. dan Pihak Ketiga	6 Rapat 6 Rapat	566,800,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				6 Rapat 3 Rapat	164,900,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se- Prov. dan Pihak Ketiga	6 Rapat 3 Rapat	555,450,000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							3,064,236,505							9,072,100,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	1,522,869,166						82 Poin	5,177,100,000		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Poin		Poin	80 Poin	166,900,000						80 Poin	490,000,000		
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	50,100,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Lingkup Biro Hukum	4 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	21,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Biro Hukum yang Tersusun				2 Dokumen	71,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	2 Dokumen	125,000,000	Sekretariat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4		01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Item 4 Dokumen	6,800,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Lingkup Biro Hukum	4 Item 4 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Biro Hukum	Persen		Persen	100 Persen	173,756,000						100 Persen	370,000,000	
4		01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				35 oRANG	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	35 oRANG	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	5,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	100 Persen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				1 Laporan	10,100,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Laporan	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				1 Laporan	5,300,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Laporan	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	4,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	5,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	100 Persen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				3 Laporan	135,256,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	3 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	7,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Laporan	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup Biro Hukum	Persen		Persen	100 Persen	14,700,000						100 Persen	100,000,000	
4		01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Unit	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Biro Hukum				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Biro Hukum				1 Dokumen	1,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah Biro Hukum				1 Dokumen	11,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Biro Hukum	Persen		Persen	100 Persen	133,200,000						100 Persen	820,000,000	
4	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan				1 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Jenis	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				136 Pasang	115,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	136 Pasang	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	3 Orang	240,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				5 Orang 100 Persen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	5 Orang 100 Persen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				5 Orang 100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	5 Orang 100 Persen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Biro Hukum	Persen		Persen	100 Persen	686,300,000						100 Persen	990,000,000	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 jenis	6,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	4 jenis	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	10 Jenis	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	8,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	3 Jenis	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				2 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	2 Jenis	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				15 Jenis	120,100,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	15 Jenis	200,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Dokumen	500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	70 Dokumen	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis Biro Hukum				1 Dokumen	1,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Biro Hukum				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	22,453,166						100 Persen	1,530,000,000	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				3 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	3 Unit	450,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Unit	40,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				2 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	2 Jenis	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				7 Unit	12,453,166	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	7 Unit	320,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	1 Unit	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				4 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	4 Unit	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				3 Unit	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Biro Hukum	3 Unit	260,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	21,650,000						100 Persen	121,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	21,650,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	100 Persen	121,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	303,910,000						100 Persen	756,100,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				11 Unit	170,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	11 Unit	190,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				13 Unit	107,200,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	13 Unit	90,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				20 Unit	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	20 Unit	36,100,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	1 Unit	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				10 Unit	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	10 Unit	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				3 Unit	6,710,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	0	3 Unit	260,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persen		Persen	100 Persen	1,541,367,339						100 Persen	3,895,000,000	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	864,127,399						100 Persen	2,610,000,000	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang dikelola				35 Dokumen	197,142,840	Semua Kab/Kota, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemprov Sulbar	35 Dokumen	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang dikelola				500 Dokumen	151,441,960	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemprov Sulbar	500 Dokumen	510,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Naskah Hukum Lainnya yang dikelola Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang diidentifikasi Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum Lainnya yang didokumentasikan				35 Dokumen 570 Dokumen 570 Dokumen	156,370,380	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Lingkup Pemprov Sulbar	35 Dokumen 570 Dokumen 570 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III yang dikelola Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikelola Jumlah Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikelola				45 Dokumen 45 Dokumen 45 Dokumen	359,172,219	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemprov Sulbar	45 Dokumen 45 Dokumen 45 Dokumen	700,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persen		Persen	100 Persen	677,239,940						100 Persen	1,285,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi yang dikelola				2 Kasus	489,778,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Pemprov Sulbar	2 Kasus	935,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Koordinasi Rencana Aksi HAM di Daerah Jumlah Penanganan Sengketa Non Litigasi yang dikelola				4 Laporan 2 Kasus	187,461,440	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Aparatur Lingkup Pemprov Sulbar	4 Laporan 2 Kasus	350,000,000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						3,088,472,026							11,720,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	1,288,472,026						82 Poin	4,570,000,000		
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	411,000,000						15 Dokumen	1,060,000,000		
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				3 Dokumen	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3 Dokumen	180,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				4 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				30 Laporan	341,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	30 Laporan	280,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	240,000,000		
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD				17 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	17 Laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				24 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	24 Laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas	Pasang		Pasang	43 Pasang	80,000,000						43 Pasang	740,000,000		
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya yang diadakan				81 Pasang	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	81 Pasang	300,000,000	Sekretariat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja				32 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	32 Laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	20 Orang	320,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	697,722,026						100 Persen	1,740,000,000		
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Jenis	134,250,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	30 Jenis	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	50 Jenis	150,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Jenis	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	50 Jenis	150,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Barang yang Dicetak dan Digandakan				5000 Jenis	18,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	5000 Jenis	200,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				250 Jenis	50,472,026	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	250 Jenis	300,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	200 Laporan	700,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				17 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	17 Laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	300,000,000		
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				10 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	10 Unit	300,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	99,750,000						100 Persen	490,000,000		
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				13 Unit	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	13 Unit	250,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				2 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2 Unit	120,000,000	Sekretariat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				10 Unit	19,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	10 Unit	120,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	1,200,000,000						100 Persen	5,700,000,000		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Perekonomian	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	457,000,000						2 Dokumen	3,000,000,000		
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Kajian Analisis Kebijakan Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Kajian Analisis Kebijakan Pengendalian Inflas Jumlah dokumen Pendukung Pengendalian Inflasi berada pada rentang kendali Nasional Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja SDM TPID terhadap Pengendalian Inflasi				5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	231,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov/Kab, Pelaku Usaha, Perbankan	5 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Optimalisasi Penyaluran KUR melalui SIKP dan pola kemitraan Jumlah Dokumen pendukung Pencapaian Target Liberasi dan Inklusi Keuangan Jumlah Dokumen Peningkatan Akses Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Peningkatan Kerja TPAKD				1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	226,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Prov/Kab, Pelaku Usaha, Perbankan	1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen	1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	143,000,000						4 Dokumen	950,000,000		
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan di Pemprov. Sulbar.				1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov/Kab	1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Pemprov. Sulbar.				1 Dokumen	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov/Kab	1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Pemantauan HET LPG Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.				1 Dokumen 1 Dokumen	73,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov/Kab	1 Dokumen 1 Dokumen	450,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD dan BLUD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	600,000,000						2 Dokumen	1,750,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Laporan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				17 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BUMD dan BLUD	17 Laporan	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Laporan Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaaam Badan Usaha Milik Daerah Air MInum, Limbah dan Sanitasi				5 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BUMD dan BLUD	5 Laporan	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BUMD dan BLUD	1 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				5 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BUMD dan BLUD	5 Laporan	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BUMD dan BLUD	1 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	600,000,000						100 Persen	1,450,000,000	
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	400,000,000						3 Laporan	700,000,000	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Pelaksanaan MONEV Pembangunan Daerah Jumlah Laporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD Prov. Sulbar				17 Laporan 17 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov Sulbar yang terkait	17 Laporan 17 Laporan	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBN				17 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov Sulbar yang terkait	17 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD di Kabupaten				17 Laporan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov Sulbar yang terkait	17 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	200,000,000						3 Laporan	750,000,000	
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Hasil analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Prov Sulbar				100 Persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov. Sulbar	100 Persen	250,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan TEPRa yang terpenuhi				17 Laporan 17 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov. Sulbar	17 Laporan 17 Laporan	250,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Prov. Sulbar	1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						3,022,017,630								5,455,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	772,017,630						82 Poin	1,905,000,000			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	128,000,000						10 Dokumen	235,000,000			
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 dokumen	48,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4 dokumen	125,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				4 laporan	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4 laporan	55,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4 dokumen	55,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Admistrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	80,000,000						100 Persen	250,000,000			
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 laporan	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1 laporan	125,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				4 laporan	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4 laporan	125,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pengelolaan Adminstrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	344,017,630						100 Persen	975,000,000			
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 jenis	69,017,630	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	30 jenis	225,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				10 jenis	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	10 jenis	125,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				40 jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	40 jenis	150,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 laporan	175,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	40 laporan	475,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit		Unit	15 Unit	100,000,000						15 Unit	150,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4		01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				15 unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	15 unit	150,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	50,000,000						100 Persen	170,000,000	
4		01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	170,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Unit		Unit	7 Unit	70,000,000						7 Unit	125,000,000	
4		01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan				7 unit	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7 unit	125,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persen		Persen	100 Persen	2,250,000,000						100 Persen	3,550,000,000	
4		01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel	Persen		Persen	100 Persen	750,000,000						100 Persen	925,000,000	
4		01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa yang Berkualitas				100 persen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD lingkup Pemprov. Sulbar, UKPBJ Kabupaten dan Provinsi dan Pelaku Pengadaan	100 persen	275,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat				100 persen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD lingkup Pemprov. Sulbar, UKPBJ Kabupaten dan Provinsi dan Pelaku Pengadaan	100 persen	375,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/ jasa				4 laporan	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD lingkup Pemprov. Sulbar, UKPBJ Kabupaten dan Provinsi dan Pelaku Pengadaan	4 laporan	275,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Persen		Persen	100 Persen	750,000,000						100 Persen	825,000,000	
4		01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Persentase Tingkat Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Eletronik				100 persen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pelaku Pengadaan	100 persen	275,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tingkat Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa				100 persen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pelaku Pengadaan	100 persen	275,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Tingkat Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa				100 persen	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pelaku Pengadaan	100 persen	275,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Peningkatan Kualitas Pelaku dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Persen		Persen	100 Persen	750,000,000						100 Persen	1,800,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Personil Program Pengembangan SDM				30 orang	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pelaku pengadaan, Personil UKPBJ Kabupaten dan Pemerintah Provinsi	30 orang	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pelaku pengadaan, Personil UKPBJ Kabupaten dan Pemerintah Provinsi	80 Orang	450,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta advokasi, pendampingan dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa				200 orang	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pelaku pengadaan, Personil UKPBJ Kabupaten dan Pemerintah Provinsi	200 orang	850,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						4,079,316,946				5,080,000,000				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai	Persen		Persen	100 Persen	1,880,000,000						100 Persen	2,080,000,000	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Poin		Poin	24 Poin	270,000,000						24 Poin	150,000,000	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Organisasi Setda Prov. Sulawesi Barat	4 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi Setda Prov. Sulawesi Barat	2 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun				3 Dokumen	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi Setda Prov. Sulawesi Barat	3 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000						100 Persen	250,000,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				100 Pasang	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Organisasi	100 Pasang	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				10 Orang	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	10 Orang	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	1,070,000,000						100 Persen	1,070,000,000	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan				10 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	10 Jenis	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Organisasi	10 Jenis	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	300 Jenis	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak Jumlah Barang yang Digandakan				30 Jenis 50 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	30 Jenis 50 Jenis	50,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				60 Jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	60 Jenis	70,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				40 Dokumen 30 Dokumen	650,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	40 Dokumen 30 Dokumen	650,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	10 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000						100 Persen	500,000,000	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				1 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	1 Unit	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				15 Unit	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	15 Unit	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	140,000,000						100 Persen	110,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	80,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	100 Persen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan				5 Unit	60,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Organisasi	5 Unit	60,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							0	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				5 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Persen		Persen	100 Persen	2,199,316,946						100 Persen	3,000,000,000	
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persen		Persen	100 Persen	900,000,000						100 Persen	1,200,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Jumlah Laporan Monev Kelembagaan Provinsi Jumlah Peserta bimbingan teknis Jumlah peserta yang terlatih				41 Dokumen 41 Laporan 41 Peserta 41 Peserta	300,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	41 Dokumen 41 Laporan 41 Peserta 41 Peserta	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasiitas Kelembagaan Kabupaten Jumlah Laporan Monev Kelembagaan Kabupaten				6 Laporan 1 Laporan	300,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	6 Laporan 1 Laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK dan Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan				10 Dokumen 10 Dokumen	300,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	10 Dokumen 10 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pengelolaan Administrtasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Laksana, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Persen		Persen	100 Persen	1,299,316,946						100 Persen	1,800,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pendukung RB Jumlah Kabupaten yang dimonitoring dan dievaluas Jumlah Laporan Monev Jumlah OPD yang menginput PMP RB tepat waktu Jumlah Perangkat Daerah Yang Dibina Jumlah Perangkat Daerah Yang dievaluas Persentase Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas				8 Dokumen 6 Kabupaten 1 Laporan 40 OPD 5 OPD 5 OPD 100 Persen	300,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	8 Dokumen 6 Kabupaten 1 Laporan 40 OPD 5 OPD 5 OPD 100 Persen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah OPD dan Kabupaten yang telah menyusun dan melengkapi dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas baik Jumlah OPD dan Pemerintah Kabupaten yang menyusun LKJIP tepat waktu dengan kualitas baik Jumlah OPD yang telah menyusun Indikator Kinerja berbasis outcome Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan implementasi SAKIP di lingkup Pemprov dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat				46 OPD 46 OPD 40 OPD 30 6	300,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	46 OPD 46 OPD 40 OPD 30 6	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan budaya kerja sesuai pedoman				40 OPD	149,316,946	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	40 OPD	100,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
4		01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dok. SOP Jumlah OPD yang telah menyusun Peta Proses Bisnis Jumlah Peraturan Gubernur				41 Dokumen 20 OPD 1 Pergub	300,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	41 Dokumen 20 OPD 1 Pergub	700,000,000	Sekretariat Daerah			
4		01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten yang dimonitoring untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Jumlah OPD Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah menyusun dan menjabarkan 7 (tujuh) aspek kebijakan Pelayanan Publik Jumlah OPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat provinsi dan Nasional Terlaksananya monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkup Pemprov dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat				6 Kabupaten 40 OPD 10 OPD 36 OPD	250,000,000	Kab. Majene, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mamuju Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	6 Kabupaten 40 OPD 10 OPD 36 OPD	300,000,000	Sekretariat Daerah			
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01					SEKRETARIAT DAERAH						97,892,753,129								131,019,000,000			
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	97,892,753,129						82 Poin	131,019,000,000				
4	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup SKPD	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	593,040,129						100 Persen 100 Persen	787,000,000				
4		01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				6 dokumen	239,306,372	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas				Biro Umum Sekretariat Daerah	6 dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah			
4		01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	42,411,882	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1 dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah			
4		01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	46,417,460	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1 dokumen	60,000,000	Sekretariat Daerah			
4		01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	31,315,961	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1 dokumen	45,000,000	Sekretariat Daerah			
4		01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	36,315,961	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1 dokumen	45,000,000	Sekretariat Daerah			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 laporan	103,607,558	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	2 laporan	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan SPIP Perangkat Daerah yang Tersusun				6 item 6 dokumen 1 laporan	93,664,935	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	6 item 6 dokumen 1 laporan	77,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	30,748,783,423						100 Persen	32,052,000,000	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				300 orang	29,187,857,519	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	300 orang	30,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 persen	210,293,930	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	100 persen	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Register Pengesahan SPJ Jumlah Dokumen SPM yang diterbitkan Jumlah Dokumen SPP yang diterbitkan Jumlah Kegiatan Penatausahaa Gaji dan Tunjangan Jumlah Kegiatan Pertanggungjawaban Keuangan Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				2400 dokumen 120 dokumen 120 dokumen 12 kegiatan 12 kegiatan 12 laporan 72 laporan	905,376,327	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	2400 dokumen 120 dokumen 120 dokumen 12 kegiatan 12 kegiatan 12 laporan 72 laporan	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 laporan	208,395,404	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	12 laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 laporan	34,196,176	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1 laporan	47,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 persen	140,999,003	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	100 persen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				16 laporan	61,665,064	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	16 laporan	85,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	3,627,774,669						100 Persen	4,920,000,000	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen HPS Rencana Kebutuhan Barang Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				30 dokumen 30 dokumen	457,963,397	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	30 dokumen 30 dokumen	650,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis Pengamanan Barang Milik Daerah yang Tersedia				4 jenis	2,234,608,040	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	4 jenis	2,800,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				3 laporan	471,971,039	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	3 laporan	640,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD				12 laporan	85,098,061	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	12 laporan	140,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				12 laporan	218,886,511	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	12 laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Laporan Hasil Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD				1 laporan 1 laporan	159,247,621	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	1 laporan 1 laporan	590,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	1,427,491,447						100 Persen	2,315,000,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan				673 pasang	452,665,142	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	673 pasang	700,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 laporan	179,873,968	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	1 laporan	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen SOP Lingkup Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				27 dokumen 1 laporan	81,948,374	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	27 dokumen 1 laporan	120,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaiian				75 laporan	61,768,860	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	75 laporan	45,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				5 orang	114,971,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	5 orang	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 persen	536,264,103	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat Daerah Biro Umum	100 persen	900,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	13,740,605,687						100 Persen	17,185,000,000	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"				25 Jenis	1,026,764,664	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	25 Jenis	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 jenis	173,632,217	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	20 jenis	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 jenis	403,717,148	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	15 jenis	550,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 jenis	9,753,742,669	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	15 jenis	11,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				16 jenis	302,113,300	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	16 jenis	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi				100 persen	873,133,544	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	100 persen	1,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750 laporan	1,146,173,639	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	750 laporan	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 laporan	61,328,506	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1 laporan	85,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	4,451,992,181						100 Persen	11,250,000,000	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				6 Unit	1,500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	6 Unit	3,400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				6 Jenis	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Biro Umum Sekretariat Daerah	6 Jenis	650,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				2 jenis	1,248,536,810	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	2 jenis	3,200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				30 jenis 20 jenis	1,503,455,371	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	30 jenis 20 jenis	4,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	4,437,996,925						100 Persen	6,600,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 persen	430,618,319	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum, Sekretariat Daerah	100 persen	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				4 rekening tagihan	2,053,716,944	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum, Sekretariat Daerah	4 rekening tagihan	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				1 jenis	1,953,661,662	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum, Sekretariat Daerah	1 jenis	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	8,691,095,683						100 Persen	13,200,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4		01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan Jumlah Mobil Jabatan yang Dikelola Perizinannya Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi				20 Unit 20 Unit 20 Unit	1,770,263,076	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	20 Unit 20 Unit 20 Unit	2,600,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dikelola Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				150 Unit 150 Unit 150 Unit	2,059,355,295	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	150 Unit 150 Unit 150 Unit	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				70 Unit	1,000,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	70 Unit	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				12 Unit	3,861,477,312	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	12 Unit	5,600,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,295,455,150						100 Persen	2,370,000,000	
4		01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dikelola Gaji dan Tunjangannya				2 orang	238,151,194	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	300,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 kegiatan	57,303,956	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 kegiatan	70,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Dana Penunjang Operasionalnya				2 orang	1,000,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pengelolaan Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	16,352,388,926						100 Persen	22,100,000,000	
4		01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Jenis Bahan Logistik Rumah Jabatan yang Disediakan				40 jenis	5,521,771,215	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	40 jenis	7,500,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Bahan Logistik Rumah Jabatan yang Disediakan				40 jenis	4,049,210,004	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	40 jenis	5,600,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				800 kegiatan	6,781,407,707	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	800 kegiatan	9,000,000,000	Sekretariat Daerah
4		01	01	1.13		Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen		Persen	100 Persen	10,171,978,009						100 Persen	14,370,000,000	
4		01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Jumlah Materi Pimpinan yang Disiapkan				1200 kegiatan 2000 dokumen	2,124,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1200 kegiatan 2000 dokumen	3,000,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1560 kegiatan	7,421,426,647	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	1560 kegiatan	10,500,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinan				2500 dokumen	626,551,362	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	2500 dokumen	870,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Fasilitasi Keprotokolan	Persen		Persen	100 Persen	2,354,150,900						100 Persen	3,870,000,000			
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah kegiatan fasilitasi Koordinasi pelaksanaan Acara				2000 kegiatan	323,284,216	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	2000 kegiatan	470,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terfasilitasi				100 persen	761,484,604	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	100 persen	1,400,000,000	Sekretariat Daerah		
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan				2400 kegiatan	1,269,382,080	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Biro Umum Sekretariat Daerah	2400 kegiatan	2,000,000,000	Sekretariat Daerah		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	02				SEKRETARIAT DPRD						101,274,653,346								140,915,000,013		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	65,123,482,538						82 Poin	85,830,000,005			
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD	Poin		Poin	24.6 Poin	1,593,151,740						24.6 Poin	1,390,000,000			
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				3 Dokumen	575,397,760	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	400,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	109,634,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	110,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	94,269,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	80,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	94,944,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	96,609,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				12 Laporan	437,580,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	12 Laporan	450,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				3 Dokumen	184,717,880	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	150,000,000	Sekretariat DPRD		
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD	Persen		Persen	90 Persen	10,532,792,073						90 Persen	11,185,000,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				114 Orang	9,413,698,993	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	114 Orang	10,000,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	203,091,140	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	100 Persen	190,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	130,509,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	12 Laporan	145,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 Laporan	149,963,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	12 Laporan	170,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	287,066,840	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Laporan	350,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	97,156,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	100 Persen	120,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				12 Laporan	144,533,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	12 Laporan	120,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				12 Laporan	106,774,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	12 Laporan	90,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	4,320,231,380						100 Persen	8,270,000,000		
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				553 Orang	295,318,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	553 Orang	370,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	3,316,007,660	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	100 Persen	7,000,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	708,905,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	100 Persen	900,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	7,496,072,544						100 Persen	8,795,000,000		
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Jenis	453,725,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	8 Jenis	550,000,000	Sekretariat DPRD	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Jenis	131,335,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	5 Jenis	160,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Jenis	4,556,855,575	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	6 Jenis	5,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				3 Jenis	155,950,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	3 Jenis	175,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Jenis	91,808,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Jenis	120,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				30 Jenis	232,670,369	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	30 Jenis	290,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				72 Laporan 72 Laporan	1,873,728,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	72 Laporan 72 Laporan	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,980,000,000						100 Persen	12,200,000,005	
4	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				0 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	0 Unit	3,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				0 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	0 Unit	1,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Unit	880,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Unit	4,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				5 Jenis	600,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	5 Jenis	1,200,000,005	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				9 Jenis	500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	9 Jenis	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	4,288,606,825						100 Persen	5,130,000,000	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	107,012,300	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	100 Persen	130,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Rekening	2,356,710,072	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	3 Rekening	3,000,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Jenis	1,824,884,453	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	1 Jenis	2,000,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	5,979,680,100						100 Persen	6,850,000,000		
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				5 Unit	941,127,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	5 Unit	1,200,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				89 Unit	675,335,400	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	89 Unit	800,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				5 Unit	3,099,422,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	5 Unit	3,200,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				6 Jenis	806,185,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	6 Jenis	950,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				6 Jenis	457,610,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Sekretariat DPRD	6 Jenis	700,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	24,350,579,576						100 Persen	26,650,000,000		
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Jenis layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				17 Jenis	23,809,919,576	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	17 Jenis	26,000,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan				225 Pasang	202,650,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	225 Pasang	250,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Laporan hasil Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD				45 Laporan	338,010,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Laporan	400,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.16		Layanan Adminstrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	4,582,368,300						100 Persen	5,360,000,000		
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Administrasi Keanggotaan DPRD yang dilaksanakan				100 Persen	1,134,439,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	100 Persen	1,300,000,000	Sekretariat DPRD	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				90 Laporan	482,990,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	90 Laporan	560,000,000	Sekretariat DPRD	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				10 Laporan	694,313,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Laporan	800,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan				5 Jenis	2,270,626,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Jenis	2,700,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	36,151,170,808						100 Persen	55,085,000,008	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase PERDA dan Peraturan DPRD yang disahkan	Persen		Persen	100 Persen	6,948,957,108						100 Persen	8,630,000,000	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang direncanakan				12 Perda	847,374,640	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	12 Perda	960,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda yang dibahas				12 Perda	4,223,172,388	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	12 Perda	5,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian Peraturan Perundang-Undangan				6 Dokumen	738,620,900	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	6 Dokumen	850,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang di Fasilitasi Penyusunannya				6 Naskah	767,415,280	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	6 Naskah	870,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun				1 Dokumen	372,373,900	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	1 Dokumen	450,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase peningkatan Kebijakan Anggaran yang selesai dibahas	Persen		Persen	100 Persen	5,463,456,200						100 Persen	6,140,000,000	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang dibahas				2 Dokumen	95,999,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	2 Dokumen	120,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas				2 Dokumen	108,000,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	2 Dokumen	120,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang dibahas				1 Dokumen	1,745,252,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	1 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD yang dibahas				1 Dokumen	1,746,902,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	1 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD yang dibahas				1 Dokumen	1,767,303,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	1 Dokumen	1,900,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase peningkatan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	6,173,257,840						100 Persen	7,760,000,008	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	1,382,479,240	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	3 Laporan	2,300,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Infrastruktur				3 Laporan	883,967,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	3 Laporan	1,600,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	1,511,379,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	3 Laporan	1,000,000,008	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan bidang Perekonomian				3 Laporan	1,408,580,900	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	3 Laporan	1,700,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Laporan	223,686,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	1 Laporan	290,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Laporan	329,158,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	12 Laporan	380,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dibahas				1 Laporan	434,007,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	1 Laporan	490,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD dalam TUPOKSI	Persen		Persen	100 Persen	5,166,754,960						100 Persen	6,930,000,000	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis				45 Orang	931,169,260	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	45 Orang	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Jenis Publikasi dan Dokumentasi Dewan				3 Jenis	1,869,479,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Jenis	2,100,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan				27 Orang	1,377,425,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	27 Orang	1,600,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan				8 Orang	360,225,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Orang	410,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				10 Laporan	570,607,700	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Laporan	650,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
4		02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang disusun				1 Dokumen	57,849,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	70,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diserap dan dihimpun oleh DPRD	Persen		Persen	100 Persen	6,681,149,700						100 Persen	15,860,000,000	
4		02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah				4 Laporan	2,500,279,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok Masyarakat	4 Laporan	6,500,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun				1 Dokumen	135,437,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	160,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Reses				2 Laporan	4,045,432,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Kelompok Masyarakat	2 Laporan	9,200,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Kode Etik DPRD yang dilaksanakan dan diawasi	Persen		Persen	100 Persen	518,921,000						100 Persen	620,000,000	
4		02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang disusun				1 Dokumen	311,806,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	370,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				10 Laporan	207,115,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Laporan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Cakupan Kerja Sama Daerah yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	565,143,300						100 Persen	695,000,000	
4		02	02	1.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				6 Rekomendasi	441,143,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	6 Rekomendasi	550,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun				3 Dokumen	124,000,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemprov Sulawesi Barat	3 Dokumen	145,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Persen		Persen	100 Persen	4,633,530,700						100 Persen	8,450,000,000	
4		02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD				478 Laporan	2,500,170,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pimpinan dan Anggota DPRD	478 Laporan	4,900,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang disusun				3 Laporan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Laporan	150,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang difasilitasi				2 Laporan	548,254,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Laporan	1,100,000,000	Sekretariat DPRD
4		02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD yang difasilitasi				4 Laporan	1,485,106,100	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Simboro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Laporan	2,300,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01				PERENCANAAN						13,308,892,091								19,756,740,000		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	8,408,892,091						82 Poin	9,071,000,000			
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup Bappeda	%		%	100 %	181,500,000						100 %	315,000,000			
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun				1 Dokumen	95,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	19,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusu				1 Dokumen	6,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	2,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Dokumen	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				1 Laporan	33,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun				4 Dokumen	23,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	4 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup Bappeda	%		%	100 %	6,387,176,317						100 %	6,551,000,000			
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				55 Orang	6,340,576,317	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	55 Orang	6,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yangTersusun				1 Laporan	5,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Laporan	6,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				4 Laporan	41,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	4 Laporan	45,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup Bappeda	%		%	100 %	15,000,000						100 %	25,000,000			
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov.Sulbar	4 Orang	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup Bappeda	%		%	100 %	990,215,774						100 %	1,240,000,000			
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				3 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	3 Jenis	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	5 Jenis	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				10 Jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	10 Jenis	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Jenis	55,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	20 Jenis	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				7 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	7 Jenis	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				35 Jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	35 Jenis	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	700,215,774	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	1 Laporan	850,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Lingkup Bappeda	%		%	100 %	150,000,000						100 %	200,000,000	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				3 Jenis	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	3 Jenis	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Lingkup Bappeda	%		%	100 %	290,000,000						100 %	250,000,000	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 %	115,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	100 %	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Rekening	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	3 Rekening	155,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				23 Jenis	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	23 Jenis	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Bappeda	%		%	100 %	395,000,000						100 %	490,000,000	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				30 Jenis	230,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	30 Jenis	270,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor				4 Jenis	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	4 Jenis	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor				2 Jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Bappeda Prov. Sulbar	2 Jenis	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah dengan Bobot Perencanaan Kinerja Tahunan diatas 11%	Persen		Persen	100 Persen	2,000,000,000					100 Persen	2,690,000,000		
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Perangkat Daerah dengan Bobot Kualitas Renstra> 3% dan Rencana Kinerja Tahunan > 6%	%		%	75 %	825,000,000					75 %	980,000,000		
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				1 Dokumen	325,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Provinsi				1 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Teknoratik Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi				1 Dokumen 2 Dokumen	125,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 2 Dokumen	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	400,000,000					100 %	830,000,000		
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	130,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Peyusunan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan Data dan informasi melalui aplikasi SIPD				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Data yang dihasilkan pada aplikasi E-database SIPD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	0 Dokumen	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	%		%	100 %	775,000,000						100 %	880,000,000	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi				4 Dokumen	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	4 Dokumen	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah				1 Dokumen	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah				4 Dokumen	195,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	4 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				18 Dokumen	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	18 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		Persen	100 Persen	2,900,000,000						100 Persen	7,995,740,000	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Daerah antara RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	1,200,000,000						100 %	5,000,000,000	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen/Analisis/Kajian/Rumusan/Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	0 Dokumen	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Analisis/Kajian/Rumusan/Rekomendasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Analisis/Kajian/Rumusan/Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan	550,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan				2 Dokumen	181,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	2 Dokumen	650,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen/Analisis/Kajian/Rumusan/Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	0 Dokumen	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen/Rumusan Asistensi perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen/ Rumusan Asistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia				1 Dokumen 1 Dokumen	32,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 1 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Monitoring Program Portal Anak Tidak Sekolah (ATS) Jumlah Laporan/ Rekomendasi Hasil Evaluasi Monitoring Konvergensi Penanganan Stunting Jumlah Laporan/ Rekomendasi Hasil Evaluasi Monitoring Pengarusutamaan Gender				1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	95,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Portal Anak Tidak Sekolah (ATS) Jumlah Laporan/ Rekomendasi Hasil Koordinasi Konvergensi Penanganan Stunting Jumlah Laporan/Rekomendasi Hasil Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jumlah Laporan/ Rekomendasi Hasil Koordinasi Pengarusutamaan Gender				1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	831,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1,600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Program Pembangunan Daerah antara RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	1,000,000,000						100 %	1,180,740,000	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Barat				1 Dokumen	568,400,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	610,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian				1 Dokumen	20,300,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	23,420,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Barat				1 Dokumen	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	80,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Sulawesi Barat				1 Dokumen	80,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	80,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA				1 Dokumen	190,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	200,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA				0 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	0 Dokumen	23,420,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	0 Dokumen	80,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Rumusan/Rekomendasi Hasil Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	0 Dokumen	80,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Program Pembangunan Daerah antara RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	700,000,000						100 %	1,815,000,000	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	111,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	330,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen/Analisis/Kajian/Rumusan/Rekomendasi Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen data dan informasi serta dokumen perencanaan dan pengembangan AMPL/PKP Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, DAN RKPD) Teridentifikasinya kemajuan serta keterbatasan upaya-upaya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lingkup Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat dan SPAM Regional				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	850,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil rekomendasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Dokumen hasil rekomendasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Subbid Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)				1 Dokumen 1 Dokumen	14,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Dokumen hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Subbid Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)				1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 1 Dokumen	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan budang kewilayahan Dokumen hasil sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan budang kewilayahan Subbid Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)				1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Provinsi Sulawesi Barat	1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN						264,543,463,370							289,372,206,197		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	43,726,701,517						82 Poin	48,149,441,842		
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	Poin		Poin	24 Poin	610,000,920						24 Poin	457,612,027		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	241,838,105	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	2 Dokumen	210,553,633	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	14,987,720	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	1 Dokumen	10,986,492	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	14,987,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	1 Dokumen	10,986,492	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	14,987,720	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	1 Dokumen	10,986,492	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	14,987,720	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	1 Dokumen	10,986,492	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	113,467,165	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	2 Laporan	44,361,460	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	194,744,770	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	4 Dokumen	158,750,966	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup BPKPD	Persen		Persen	95 Persen	38,468,985,158						95 Persen	42,363,906,722	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				182 Orang	37,788,228,319	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	182 Orang	41,610,074,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	100 Persen	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	205,625,500	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	12 Laporan	226,188,050	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 Laporan	113,454,539	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	12 Laporan	124,799,992	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	53,351,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	1 Laporan	58,686,980	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 Persen	40,597,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	100 Persen	44,657,580	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				18 Laporan	41,274,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	18 Laporan	45,401,620	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				4 Laporan	176,453,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	4 Laporan	194,098,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	Persen		Persen	95 Persen	160,433,514						95 Persen	150,700,000	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	1 Dokumen	9,350,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan				2 Unit	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	2 Unit	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai				10 Unit	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	10 Unit	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				3 Laporan	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	3 Laporan	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	1 Laporan	16,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	1 Dokumen	9,350,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	Persen		Persen	95 Persen	546,394,337						95 Persen	711,679,529	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan				6 Unit	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	6 Unit	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				182 Pasang	165,300,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	182 Pasang	181,830,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan				7 Laporan	141,729,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	7 Laporan	155,902,780	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	49,412,947	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	1 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawaiian				12 Dokumen	82,076,590	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	12 Dokumen	90,284,249	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	57,875,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	10 Orang	118,662,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	95 Persen	1,448,644,008						95 Persen	1,745,513,132	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Jenis	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	2 Jenis	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Jenis	33,336,050	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	36 Jenis	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	5 Jenis	38,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis	153,744,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	2 Jenis	169,118,400	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				4 Jenis	665,383,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	4 Jenis	731,921,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	1 Jenis	11,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				28 Jenis	30,692,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	28 Jenis	33,761,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi				95 Persen	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	95 Persen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	512,011,120	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	45 Laporan	563,212,232	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	1 Dokumen	33,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	95 Persen	192,792,119						95 Persen	195,981,609	
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				4 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	4 Unit	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				0 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	0 Unit	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				0 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	0 Jenis	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				20 Unit	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	20 Unit	26,738,919	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				7 Jenis	134,158,300	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	7 Jenis	134,158,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				4 Jenis	31,894,900	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	4 Jenis	35,084,390	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	95 Persen	644,467,220						95 Persen	708,913,942	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				98 Persen	38,734,220	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	98 Persen	42,607,642	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				36 Rekening Tagihan	605,733,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	36 Rekening Tagihan	666,306,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	95 Persen	1,654,984,241						95 Persen	1,815,134,881	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				32 Unit	26,738,919	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	32 Unit	26,738,919	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				32 Unit	365,606,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	32 Unit	402,166,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				4 Jenis	26,738,922	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD BPKPD	4 Jenis	26,738,922	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				2 Jenis	945,510,600	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	2 Jenis	1,040,061,660	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				4 Jenis	290,389,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BPKPD	4 Jenis	319,428,780	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	213,243,589,674						82 Poin	233,624,478,702	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	Persen		Persen	100 Persen	1,236,811,948						100 Persen	1,447,333,639	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS				2 Dokumen	246,655,512	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2 Dokumen	271,321,063	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	72,574,300	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2 Dokumen	79,831,730	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang direview				42 OPD	7,448,954	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	42 OPD	8,193,849	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang direview				42 OPD	6,864,173	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	42 OPD	7,550,590	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi				42 OPD	6,919,738	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	42 OPD	7,611,711	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi				42 OPD	6,864,692	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	42 OPD	7,551,161	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda APBD yang disusun Jumlah Pergub Penjabaran APBD yang disusun				1 Perda 1 Pergub	284,721,158	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Perda 1 Pergub	313,193,273	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD Perubahan yang disusun Jumlah Pergub Penjabaran APBD Perubahan yang disusun				1 Perda 1 Pergub	159,819,109	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Perda 1 Pergub	175,801,019	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi yang disusun				1 Regulasi	108,283,586	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1 Regulasi	119,111,944	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Pendapatan				2 Laporan	74,081,002	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2 Laporan	81,489,102	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Laporan	149,811,587	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2 Laporan	164,792,745	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Laporan	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	2 Laporan	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				42 OPD	91,714,048	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	42 OPD	100,885,452	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kepatuhan Kabupaten Terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi	Persen		Persen	95 Persen	428,497,194						95 Persen	1,014,389,926	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota yang dievaluasi				6 Produk Hukum	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Produk Hukum	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi				6 Produk Hukum	101,825,720	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Produk Hukum	112,008,292	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perubahan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi				6 Produk Hukum	75,802,460	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Produk Hukum	83,382,706	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi				6 Produk Hukum	60,447,360	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Produk Hukum	66,492,096	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota yang Diasistensi				12 Laporan	29,743,660	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Laporan	32,718,026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti/Menghadiri Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah				30 Peserta	34,353,460	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Peserta	37,788,806	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				6 Kali	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Kali	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kab/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota				6 Laporan	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Laporan	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota				6 Laporan	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Laporan	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Ranperkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota				6 Laporan	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	6 Laporan	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				30 Peserta	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Peserta	132,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peserta Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				30 Peserta	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Peserta	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Indeks Kepuasan OPD dan Masyarakat bernilai minimal baik	Poin		Poin	100 Poin	997,461,159						100 Poin	212,270,678,637	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				272 Laporan	87,172,366	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	272 Laporan	95,889,602	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan atas Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya yang Sesuai dengan Proporsinya				17 Laporan	19,525,960	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	17 Laporan	21,478,556	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD yang diterbitkan				368 Dokumen	14,516,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	368 Dokumen	15,968,480	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Laporan	53,678,940	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	4 Laporan	59,046,834	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				60 Laporan	185,561,940	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	60 Laporan	197,262,670,095	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Kerjasama Transaksi Non Tunai dengan Perbankan/Bukan Bank				4 Laporan	94,500,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	4 Laporan	14,094,662,124	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				17 Laporan	84,535,560	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	17 Laporan	92,989,116	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas				3 Laporan	49,597,940	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	3 Laporan	54,557,734	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Jumlah Laporan Realisasi atas Penggunaan Belanja Pegawai Jumlah Laporan SP2D yang diterbitkan				4 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	301,287,360	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	4 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	331,416,096	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Regulasi tentang Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang terusun				1 Regulasi	53,541,747	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	1 Regulasi	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Peserta	53,541,746	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD dan Publik	100 Peserta	132,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD Yang Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Persen		Persen	95 Persen	1,154,000,687						95 Persen	1,695,842,045	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	20,648,160	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	12 Laporan	88,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Laporan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi				516 Dokumen	42,004,810	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	516 Dokumen	29,149,120	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun				1 Laporan	235,398,880	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Laporan	241,882,597	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun				1 Laporan	124,646,660	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Laporan	120,055,155	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tersusun Jumlah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang tersusun				1 Ranperda 1 Ranpergub	206,934,218	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Ranperda 1 Ranpergub	227,627,639	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	20,648,160	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				15 Laporan	332,575,410	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	15 Laporan	348,776,780	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun				1 Dokumen	20,648,160	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Dokumen	77,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi Tentang Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun				1 Regulasi	20,648,160	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Regulasi	88,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun				1 Regulasi	20,648,160	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Regulasi	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				100 Peserta	88,551,750	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	100 Peserta	80,350,754	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				50 Peserta	20,648,159	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangsas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	50 Peserta	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola an Keuangan Daerah	Persentase Alokasi Bantuan Keuangan Khusus yang Tersalurkan	Persen		Persen	95 Persen	208,871,199,708						95 Persen	16,632,078,132	
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah				1 Laporan	16,041,792	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Laporan	17,645,971	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Lembgaaga Keuangan Bukan BANK yang dibayarkan				1 Lembaga	5,274,484,017	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Lembaga	5,274,484,017	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Regulasi dan Alokasi Subsidi yang tersusun				1 Regulasi	21,054,089	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Regulasi	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	31,500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas				Masyarakat	1 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	11,229,948,144					Masyarakat	1 Laporan	11,229,948,144	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil Provinsi				4 Laporan	160,829,671,666	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	4 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data Keuangan Daerah pada SIPD yang Dikelola	Persen		Persen	95 Persen	555,618,978						95 Persen	564,156,323	
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Laporan	123,089,146	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	2 Laporan	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Samsat Jumlah Peserta Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				150 Peserta 300 Peserta	432,529,832	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	150 Peserta 300 Peserta	454,156,323	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD	Persen		Persen	100 Persen	884,160,772						100 Persen	918,019,708	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola	Persen		Persen	95 Persen	884,160,772						95 Persen	918,019,708	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Pergub Standar Harga yang disusun				1 Pergub	114,234,427	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Pergub	110,621,588	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pergub Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Pergub	68,662,847	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	5 Pergub	60,492,850	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Keputusan tentang RKBMD yang tersusun (Pengadaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan dan Pemeliharaan serta perubahannya)				5 SK	71,629,947	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	5 SK	63,756,660	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun				1 Regulasi	94,920,011	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Regulasi	110,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD yang tersusun				43 Laporan	186,714,569	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	43 Laporan	190,349,742	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi BMD yang tersusun				43 Laporan	53,396,440	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	43 Laporan	58,736,084	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah				4 Laporan	89,677,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	4 Laporan	98,644,700	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pangawasan dan Pengendalian BMD				4 Laporan	24,651,651	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	4 Laporan	27,116,816	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12 Laporan	89,613,820	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	12 Laporan	98,575,202	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD				12 Laporan	40,659,300	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	12 Laporan	44,725,230	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan BMD yang tersusun				2 Laporan	9,201,400	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	2 Laporan	10,121,540	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten				1 Laporan	40,799,360	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD Pemprov Sulbar	1 Laporan	44,879,296	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan PAD	Persen		Persen	100 Persen	6,689,011,407						100 Persen	6,680,265,945	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persen		Persen	5 Persen	6,689,011,407						5 Persen	6,680,265,945	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah yang disusun				2 Dokumen	275,488,936	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	2 Dokumen	274,952,811	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Peraturan Kebijakan Pajak dan RetribusiDaerah yang disusun				30 Regulasi	180,868,416	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	30 Regulasi	175,601,265	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				200 Peserta	291,949,436	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	200 Peserta	292,236,336	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersedia				8 Jenis	123,089,146	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	8 Jenis	275,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun				4 Dokumen	139,969,856	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	4 Dokumen	132,657,777	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
															Nasional	Daerah				
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengolahan, Pemeliharaan, danPelaporan Basis Data Pajak Daerah				4 Laporan	160,104,036	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	4 Laporan	153,798,666	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rapat Bagi Hasil Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi				4 Dok 4 Dok	469,864,591	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	4 Dok 4 Dok	471,800,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekon yang dihadiri Samsat Majene Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekon yang dihadiri Samsat Mamasa Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekon yang dihadiri Samsat Mamuju Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekon yang dihadiri Samsat Mamuju Tengah Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekon yang dihadiri Samsat Mamuju Utara Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pelaksanaan Rekon yang dihadiri Samsat Polewali Mandar Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Majene Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Mamasa Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Mamuju Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Mamuju Tengah Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Mamuju Utara Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah Samsat Polewali Mandar				4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	2,993,825,067	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	2,939,661,807	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pajakdan Retribusi Daerah yang disusun				12 Laporan	140,719,860	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	12 Laporan	133,445,277	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling UPTB Samsat Majene Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling UPTB Samsat Mamasa Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling UPTB Samsat Mamuju Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling UPTB Samsat Mamuju Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling UPTB Samsat Mamuju Tengah Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling UPTB Samsat Mamuju Utara Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling UPTB Samsat Polewali Mandar				12 Laporan 108 Laporan 12 Laporan 70 Laporan 12 Laporan 60 Laporan 192 Laporan	972,707,213	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	12 Laporan 108 Laporan 12 Laporan 70 Laporan 12 Laporan 60 Laporan 192 Laporan	929,671,008	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Laporan	252,243,125	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	12 Laporan	221,852,484	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				4 Laporan 60 Peserta	425,292,520	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	4 Laporan 60 Peserta	446,557,146	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Objek Pajak dan Retribusi Daerah				12 Laporan	262,889,205	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD, Wajib Pungut & Wajib Pajak	12 Laporan	233,030,868	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	03				KEPEGAWAIAN							11,787,412,437							6,925,150,000	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,089,692,293						82 Poin	1,948,030,000		
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup BKD	poin		poin	24.6 poin	229,290,000						24.6 poin	229,290,000		
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen 2 dokumen 1 laporan	70,000,000	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	3 dokumen 2 dokumen 1 laporan	70,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	1 dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	1 dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 laporan	29,290,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	2 laporan	29,290,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 item 4 dokumen 1 laporan	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	7 item 4 dokumen 1 laporan	50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	persen		persen	90 persen	5,633,082,293						90 persen	129,810,000	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				50 orang	5,543,272,293	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	50 orang	40,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 laporan	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	1 laporan	40,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				2 laporan	49,810,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	2 laporan	49,810,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup BKD	persen		persen	100 persen	100,000,000						100 persen	461,610,000	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				50 pasang	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	50 pasang	461,610,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	521,000,000						100 persen	521,000,000	
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 jenis	21,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	10 jenis	21,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan				3 jenis 3 jenis	65,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	3 jenis 3 jenis	65,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak Jumlah Barang yang Digandakan				5 jenis 2 jenis	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	5 jenis 2 jenis	30,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				20 jenis	35,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	20 jenis	35,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				24 dokumen 24 dokumen	370,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	24 dokumen 24 dokumen	370,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	60 persen	336,320,000						60 persen	336,320,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				1 jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	1 jenis	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan				1 unit	136,320,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	1 unit	136,320,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				5 jenis	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	5 jenis	100,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	120,000,000						100 persen	120,000,000	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	100 persen	50,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan				10 unit	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	10 unit	70,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	150,000,000						100 persen	150,000,000	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				31 unit 31 unit	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	31 unit 31 unit	75,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi Luas Gedung Kantor yang Direhabilitasi				1 unit 69 m2	75,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD BKD	1 unit 69 m2	75,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Database Kepegawaian yang Tertata	Persen		Persen	100 Persen	4,697,720,144						100 Persen	4,977,120,000	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rasio antara jumlah pengangkatan PNS dengan jumlah PNS yang pensiun	persen		persen	28.57 persen	1,850,000,000						28.57 persen	1,600,000,000	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah usulan formasi yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB				400 orang	500,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	400 orang	500,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian PNS				200 SK	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	200 SK	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen PNS yang terbit Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Terfasilitasi				550 orang 1 lembaga	600,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	550 orang 1 lembaga	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah ASN yang terakomodir dalam dokumen Tata Naskah Kepegawaian				6000 orang	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	6000 orang	270,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang terupdate				6000 orang	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	6000 orang	250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang dapat diakses				6000 orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	6000 orang	180,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengangkatan dalam jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi	persen		persen	94 persen	550,000,000						94 persen	670,000,000		
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Mutasi Jabatan JPT, Administrator dan Fungsional Jumlah Mutasi Pindah ASN				310 orang 250 orang	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	310 orang 250 orang	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat ASN				510 orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	510 orang	220,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Promosi Jabatan JPT, Administrator dan Fungsional				160 orang	250,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	160 orang	250,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase capaian pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	persen		persen	100 persen	1,950,000,000						100 persen	2,070,000,000		
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah peserta ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah dan sertifikasi lainnya.				250 orang	150,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	250 orang	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan				60 orang	1,700,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	60 orang	1,700,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen standar baku pola pengembangan karir				1 dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	1 dokumen	170,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase capaian pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	persen		persen	100 persen	347,720,144						100 persen	637,120,000		
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan Pengukuran Indeks Profesional (PIP) ASN Laporan penilaian prestasi kerja ASN				1 laporan 1 laporan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	1 laporan 1 laporan	217,120,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan				200 orang	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	200 orang	220,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah izin perceraian yang diproses Jumlah PNS yang melanggar				20 orang 70 orang	147,720,144	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Lingkup Pemprov Sulbar	20 orang 70 orang	200,000,000	Badan Kepegawaian Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							10,563,530,181							20,670,000,000	
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	7,173,530,181						82 Poin	9,520,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Poin		Poin	1 Poin	70,000,000					1 Poin	360,000,000		
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	3 Dokumen 4 Dokumen 1 Laporan	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	2 Laporan	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Item 4 Dokumen 1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel Lingkup SKPD	1 Item 4 Dokumen 1 Laporan	10,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	50 Persen	5,216,641,951					50 Persen	5,390,000,000		
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				54 orang	5,146,641,951	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	54 orang	4,590,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				150 Persen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	150 Persen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan				1 Laporam	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	1 Laporam	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	1 Laporan	500,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	1 Laporan	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				50 Persen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	50 Persen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				4 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	4 Laporan	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Keuangan Lingkup SKPD	1 Laporan	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	66,888,230						1 Dokumen	250,000,000	
5	04	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	26,888,230	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan				36 Unit	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	36 Unit	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai				36 Unit	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	36 Unit	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup SKPD	Persen		Persen	50 Persen	600,000,000						50 Persen	850,000,000	
5	04	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan				1 Unit	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup SKPD	1 Unit	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5		04	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan				78 Pasang 78 Pasang 78 Pasang 45 Pasang	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup SKPD	78 Pasang 78 Pasang 78 Pasang 45 Pasang	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				78 orang	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup SKPD	78 orang	500,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan				40 orang 50 Persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas dan Disiplin Lingkup SKPD	40 orang 50 Persen	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	Persen		Persen	50 Persen	780,000,000						50 Persen	1,370,000,000	
5		04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	20 Jenis	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Jenis 20 Jenis	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	20 Jenis 20 Jenis	400,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	15 Jenis	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan				10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis	70,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak Jumlah Barang yang Digandakan				10 Jenis 10 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	10 Jenis 10 Jenis	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediaka				5 Jenis 5 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	5 Jenis 5 Jenis	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				40 Jenis	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	40 Jenis	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				2 Dokumen 2 Dokumen	300,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	400,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	2 Dokumen	50,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Terkelolanya Administrasi Umum Lingkup SKPD	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	50 Persen	230,000,000						50 Persen	700,000,000	
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				50 Persen	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50 Persen	400,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				3 Rekening Tagihan	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Rekening Tagihan	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				40 Unit	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga Jumlah Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan				12 Bulan 12 Bulan 40 Unit 78 orang	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Bulan 40 Unit 78 orang	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona	Unit		Unit	30 Unit	210,000,000						30 Unit	600,000,000	
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				10 Jenis 36 Unit 36 Unit 36 Unit	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Jenis 36 Unit 36 Unit 36 Unit	300,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	300,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Persen		Persen	13 Persen	3,390,000,000						13 Persen	11,150,000,000	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dalam Setahun	Persen		Persen	13 Persen	610,000,000						13 Persen	1,000,000,000	
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Teknis Inti bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Teknis Umum dan Pilihan bagi jabatan administrasi				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawes Barat	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum				1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawes Barat	1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
5		04		02		1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan bagi jabatan administrasi Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan bagi jabatan administrasi Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum bagi jabatan administrasi umlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum bagi jabatan administrasi					1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 1 Kegiatan	350,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Barat	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 1 Kegiatan	500,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04		02		1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Perangkat Daerah Penunjang Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Pilihan bagi jabatan administrasi Jumlah SJumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasitandar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Inti bagi jabatan administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum					1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Barat	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dokumen	300,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04		02		1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	Orang		Orang	300 Orang	2,780,000,000						300 Orang	10,150,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5		04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengelolaan Sumber Belajar serta Kerjasama, Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional. Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Prajabatan Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Pengelolaan Lembaga Sertifikasi				1 Kegiatan	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	1 Kegiatan	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jumlah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi				120 orang 1 Kegiatan	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	120 orang 1 Kegiatan	500,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang Jumlah Pengelolaan Sumber Belajar				1 Kegiatan 1 Kegiatan	350,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	1 Kegiatan 1 Kegiatan	350,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5		04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Jabatan Fungsional Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi				1 Dokumen 1 Dokumen	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	1 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan fungsional Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Prajabatan. Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan fungsional Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Prajabatan.				1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 30 orang 40 orang 40 orang 120 orang	1,400,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 orang 30 orang 40 orang 40 orang 120 orang	3,500,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Pembinaan, Pengoordinasian, fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi,				1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	600,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Jumlah Peserta Sertifikasi Kompetensi bagi ASN	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	5,100,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							6,268,814,733						16,625,000,000	
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin		Poin	82 Poin	4,768,814,733						82 Poin	8,275,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	180,000,000						100 Persen	460,000,000	
5	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				3 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	3 Dokumen	100,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	1 Dokumen	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	1 Dokumen	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	1 Dokumen	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	1 Dokumen	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				2 Dokumen	75,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	2 Dokumen	80,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun				3 Laporan	65,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	3 Laporan	80,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup SKPD	Persen		Persen	100 Persen	3,366,814,733						100 Persen	4,705,000,000	
5	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya				60 Orang	3,266,814,733	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	60 Orang	4,500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 Persen	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	100 Persen	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	1 Laporan	30,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun				1 Laporan	10,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	1 Laporan	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semmesteran SKPD yang tersusun				3 Laporan	70,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	3 Laporan	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5		05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	1 Laporan	25,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					85,000,000							350,000,000	
5		05	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Kartu/Absensi yang Diadakan			1 Unit	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BALITBANGDA	1 Unit	25,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya yang Diadakan			50 Pasang	50,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BALITBANGDA	50 Pasang	100,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat berdasarkan Tugas dan Fungsi			2 Orang	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BALITBANGDA	2 Orang	75,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan Pada Soasialisasi Peraturan Perundang-Undangan			50 Persen	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BALITBANGDA	50 Persen	75,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0 Persen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BALITBANGDA	0 Persen	75,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					747,000,000							1,105,000,000	
5		05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	7 Jenis	25,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 Jenis 3 Jenis	75,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	5 Jenis 3 Jenis	90,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Jenis Makanan dan Minuman yang Disediakan			5 Jenis 3 Jenis	85,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	5 Jenis 3 Jenis	150,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang Diketac dan Digandakan			4 Jenis	22,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	4 Jenis	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0 Jenis	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	0 Jenis	30,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan				41 Jenis	60,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	41 Jenis	60,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	60 Laporan	700,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	80,000,000						100 Persen	1,010,000,000	
5	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				2 Unit	40,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	2 Unit	850,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				5 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	5 Jenis	60,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				4 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	4 Jenis	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				5 Jenis	20,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	5 Jenis	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	110,000,000						100 Persen	200,000,000	
5	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat-Menyurat yang Dikelola				100 Persen	110,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BALITBANGDA	100 Persen	150,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				0 Bulan	0	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	BALITBANGDA	0 Bulan	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Mendapatkan Pemeliharaan	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000						100 Persen	445,000,000	
5	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas/Jabatan yang Memiliki Izin Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan DInas/Jabatan				7 Unit 7 Jenis	130,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	7 Unit 7 Jenis	250,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel Yang Mendapatkan Pemeliharaan				10 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	10 Jenis	25,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang Direhabilitasi				50 M2	30,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	50 M2	70,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				25 Jenis	20,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	25 Jenis	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor				25 Jenis	15,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Balitbangda	25 Jenis	50,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan sebagai Bahan Kebijakan	Persen		Persen	90 Persen	1,500,000,000						90 Persen	8,350,000,000	
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						280,000,000							1,500,000,000	
5	05	02	1.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi/Pelaksanaan/Evaluasi Penelitian dan Pengembangan				1 Dokumen	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	200,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Rekomendasi	250,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Evaluasi				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	450,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.01	15	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Evaluasi				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						220,000,000							2,200,000,000	
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	600,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	05	02	1.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	600,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						500,000,000							2,450,000,000	
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	390,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	300,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	300,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	300,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian/Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akselerasi Pembangunan Ekonomi	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	550,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	500,000,000						14 Dokumen	2,200,000,000	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Dokumen	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Rekomendasi Hasil Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi				2 rekomendasi	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	2 rekomendasi	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Diseminasi				1 Laporan	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Laporan	500,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi				1 Laporan	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	1 Laporan	400,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi				6 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	Masyarakat Sulawesi Barat	6 Laporan	300,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG							6,178,434,154							7,634,901,946	
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD	Skala Likert		Skala Likert	4 Skala Likert	4,862,434,154						4 Skala Likert	6,187,301,946		
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Percanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen		Persen	100 Persen	187,002,560						100 Persen	187,939,638		
5	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	15,798,360	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	2 Dokumen	17,378,196	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Tersusun				1 Dokumen	8,074,180	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	1 Dokumen	9	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	8,074,180	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	1 Dokumen	9	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	8,074,180	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	1 Dokumen	8,881,598	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	8,074,180	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	1 Dokumen	8,881,598	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				12 Laporan	130,833,300	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	12 Laporan	143,916,630	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	8,074,180	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	4 Dokumen	8,881,598	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen		Persen	100 Persen	2,116,897,867						100 Persen	2,114,908,927		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				22 Orang	2,098,625,067	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	22 Orang	2,094,808,847	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun				1 Laporan	8,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	1 Laporan	8,800,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun				2 Laporan	10,272,800	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	2 Laporan	11,300,080	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun	Persen		Persen	100 Persen	154,645,000						100 Persen	280,109,500	
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				70 Pasang	80,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	70 Pasang	143,550,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Forma				10 Orang	74,145,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	10 Orang	136,559,500	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Persen		Persen	100 Persen	589,367,617						100 Persen	770,170,660	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Jenis	50,770,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	22 Jenis	55,847,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Jenis	103,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	6 Jenis	223,300,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	umlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Jenis	51,150,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	4 Jenis	56,265,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak				9 Jenis	54,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	9 Jenis	60,225,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan				2 Jenis	30,750,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	2 Jenis	33,825,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan				46 Jenis	51,184,145	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	46 Jenis	56,302,560	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah				60 Laporan	247,763,472	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	60 Laporan	284,406,100	Badan Penghubung Provinsi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di Adakan	Persen		Persen	100 Persen	154,500,000						100 Persen	788,150,000	
5	07	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghuung Provinsi	1 Unit	563,200,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				12 Jenis	154,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghuung Provinsi	12 Jenis	224,950,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Persen		Persen	100 Persen	864,094,150						100 Persen	1,005,503,565	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	458,080,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	100 Persen	503,888,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				4 Rekening Tagihan	216,992,900	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	4 Rekening Tagihan	238,692,190	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantoryang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				12 Bulan	189,021,250	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	12 Bulan	262,923,375	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Sediakan	Persen		Persen	100 Persen	795,926,960						100 Persen	1,040,519,656	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan				6 Unit	284,820,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	6 Unit	368,302,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan				10 Unit	278,260,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	10 Unit	361,086,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor				2 Gedung	169,246,960	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	2 Gedung	241,171,656	Badan Penghubung Provinsi
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor				5 Jenis	63,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	5 Jenis	69,960,000	Badan Penghubung Provinsi
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Kunjungan Pimpinan yang Difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	1,316,000,000						100 Persen	1,447,600,000	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penghubung yang Terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	1,316,000,000						100 Persen	1,447,600,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah Kegiatan Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Difasilitasi				3 Event	306,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	3 Event	336,600,000	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Pelayanan Penghubung Dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi				84 Kali	1,010,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	Pegawai Badan Penghubung Provinsi	84 Kali	1,111,000,000	Badan Penghubung Provinsi	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							19,739,121,282							21,625,538,000	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin		Poin	82 Poin	13,263,127,014						82 Poin	13,245,538,000		
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD	Nilai		Nilai	25 Nilai	225,353,000						25 Nilai	233,000,000		
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				4 Dokumen	118,103,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	4 Dokumen	118,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	26,800,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	25,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	13,900,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Inspektorat	1 Dokumen	9,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	17,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	18,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun				1 Dokumen	7,250,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	8,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun				4 Dokumen	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	4 Dokumen	10,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun				7 Dokumen	37,300,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	7 Dokumen	45,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD	persen		persen	100 persen	9,271,056,814						100 persen	10,048,250,000		
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya				85 orang	9,225,648,614	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	85 orang	10,000,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan				100 persen	20,800,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 persen	22,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan SKPD				12 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	12 Laporan	250,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Neraca Keuangan SKPD				12 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	12 Laporan	250,000	Plt. Inspektorat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Tersusun				1 Laporan	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Laporan	250,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan				100 persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 persen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun				2 Laporan	24,608,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	2 Laporan	25,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat		250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	30,000,000							100 persen	35,536,000	
6	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan				3 Unit	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Unit	34,286,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Telah Dinilai				50 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	50 Unit	0	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	1,070,722,000							100 persen	758,500,000	
6	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang Disediakan				1 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Jenis	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan				176 pasang	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	176 pasang	151,500,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 Persen	2,500,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 Persen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Fasilitas Pindah Tugas				100 Persen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 Persen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 orang	550,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	24 orang	330,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	220,722,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 Persen	220,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				100 Persen	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 Persen	53,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD	persen		persen	100 persen	1,014,000,000						100 persen	828,456,000	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	10,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Jenis	10,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Jenis	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Jenis	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Jenis	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Jenis	70,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Jenis	69,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan				3 Jenis	12,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Jenis	11,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Jenis	5,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Jenis	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan				3 Jenis	167,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Jenis	81,000,000	Plt. Inspektorat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Kunjungan Tamu yang Terfasilitasi				100 persen	50,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 persen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Dokumen	700,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	20 Dokumen	655,956,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Dokumen	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persen		persen	100 persen	680,000,000						100 persen	441,346,000	
6	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan				1 Unit	320,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan				1 Unit	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	50,456,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan				3 Jenis	90,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	3 Jenis	54,890,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan				1 Unit	200,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan				20 Unit	30,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	20 Unit	334,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	385,295,200						100 persen	434,250,000	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Menyurat yang Dikelola				100 Persen	18,395,200	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	100 Persen	19,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan				24 Rekening Tagihan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	24 Rekening Tagihan	125,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga				1 Unit	17,300,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Jenis	249,600,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Jenis	290,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	586,700,000						100 persen	466,200,000	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan				31 Unit	450,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	31 Unit	305,700,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan				31 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	31 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang mendapatkan pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapatkan Pemeliharaan				10 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	10 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	40,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	40,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	71,700,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	71,500,000	Plt. Inspektorat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	25,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	47,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 Unit	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Luas Tanah yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 m2	0	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	ASN Inspektorat	1 m2	250,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini BPK atas Penyajian Laporan Keuangan Pemda	Opini		Opini	WTP Opini	4,645,645,280						WTP Opini	6,304,000,000	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan		Laporan	207 Laporan	3,700,382,000						207 Laporan	4,904,000,000	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan				31 Laporan	1,298,736,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	31 Laporan	1,299,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan				41 Laporan	835,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	41 Laporan	1,200,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu				82 Laporan	376,337,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	82 Laporan	380,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu				41 Laporan	103,525,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	41 Laporan	104,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan				4 Laporan	100,000,000	Kab. Majene, Banggae, Rangas Kab. Mamuju, Mamuju, Karema Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Tobadak, Tobadak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	4 Laporan	500,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan				2 Laporan	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	2 Laporan	521,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monev				6 Laporan	886,784,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	6 Laporan	900,000,000	Plt. Inspektorat Daerah
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persertase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	945,263,280						100 persen	1,400,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan				4 Laporan	46,800,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	4 Laporan	500,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan				12 Laporan	898,463,280	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	12 Laporan	900,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	1,830,348,988						100 Persen	2,076,000,000		
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	199,616,000						4 Dokumen	440,000,000		
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	2 Dokumen	340,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan				2 Dokumen	99,616,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	2 Dokumen	100,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	persentase perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan	persen		persen	100 persen	1,630,732,988						100 persen	1,636,000,000		
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang terbit				4 Laporan	12,119,399	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	4 Laporan	12,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan yang terbit				2 Laporan	41,111,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	2 Laporan	42,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan yang terbit				6 Laporan	1,506,133,589	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	6 Laporan	1,510,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan yang terbit				3 Laporan	71,369,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern	OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat & PemKab	3 Laporan	72,000,000	Plt. Inspektorat Daerah	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							11,161,292,908							11,161,292,908	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						6,587,043,308							6,587,043,308		
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						323,711,320							323,711,320		
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun.				2 Dokumen Perencanaan	61,984,400	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen Perencanaan	61,984,400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.				1 Dokumen Penganggaran	60,876,040	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen Penganggaran	60,876,040	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA-P/SKPD.				1 Dokumen Penganggaran	5,850,880	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen Penganggaran	5,850,880	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen koordiansi dan penyusunan perubahan dokumen DPA/SKPD.				1 Dokumen Penganggaran	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan					1 Dokumen Penganggaran	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPPA/SKPD.				1 Dokumen Penganggaran	7,500,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan					1 Dokumen Penganggaran	7,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kineja perangkat daerah.				5 Dokumen Pelaporan	187,500,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		5 Dokumen Pelaporan	187,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,418,532,697							4,418,532,697	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang digaji dan diberikan tunjangan ASN.				40 Orang	4,341,468,697	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		40 Orang	4,341,468,697	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.				1 Laporan	5,710,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	5,710,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang tersusun.				2 Laporan	71,354,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	71,354,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						98,624,940							98,624,940	
8	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.				80 Stel	98,624,940	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 Stel	98,624,940	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah fasilitas pendidikan dan pelatihan formal.				5 Orang	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Mamunyu					5 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						608,515,871							608,515,871	
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.				1272 Kotak	56,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1272 Kotak	56,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar fotocopy dan spanduk baliho.				3.6 lembar fotocopy	30,500,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		3.6 lembar fotocopy	30,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penerbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.				10 Kali Terbit	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Semua Kelurahan					10 Kali Terbit	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						2,174,249,600						2,174,249,600		
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan Politik dan etika budaya politik yang tersusun.				2 Dok. Lap	1,324,249,600	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		2 Dok. Lap	1,324,249,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang tersusun.				2 Dok. Lap	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku					2 Dok. Lap	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan kebijakan di bidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang terlaksana.				4 Dok Lap.	700,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		4 Dok Lap.	700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pelaporan dibidang pendidikan politik dan etika budaya politik yang terkoordinasi.				1 Dok. Lap	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku					1 Dok. Lap	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						425,000,000						425,000,000		
8		01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen laporan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tersusun.				1 dokumen	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia	1 dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8		01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen laporan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tersusun.				1 Dokumen	0	Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa				1 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8		01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen laporan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya yang terlaksana.				4 Dokumen	325,000,000	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	325,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8		01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terkoordinasi.				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						900,000,000						900,000,000	
8	01	06	1.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						900,000,000						900,000,000	
8		01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang terlaksana.				2 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku				2 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022																					
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
															Nasional	Daerah					
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang tersusun.				1 Dokumen	170,000,000	Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan Manusia		1 Dokumen	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana.				5 Dokumen	170,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Tadui Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Mamasa, Mamasa, Mamasa Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu Kab. Mamuju Tengah, Topoyo, Topoyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terlaksana.				2 Dokumen	210,000,000	Kab. Majene, Banggae, Banggae Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	210,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terevaluasi.				1 Dokumen	0	Kab. Mamuju, Mamuju, Rimuku					1 Dokumen	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah pertemuan rapat fasilitasi FORKOPIMDA dan jumlah peserta yang mengikuti rapat				4 Pertemuan	350,000,000	Kab. Mamuju, Simboro dan Kepulauan, Rangas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Modern		4 Pertemuan	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
TOTAL											2,085,724,595,507								2,450,468,481,153		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka menyajikan gambaran terkait kemajuan pencapaian dan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Ditetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagai berikut.

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 terdiri dari 13 indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022. Adapun target indikator kinerja utama pembangunan daerah Tahun 2022 pada Tabel 7.1. adalah sebagai berikut.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No.	Indikator	Kondisi Awal 2017	Capaian 2020	Target 2022	Kondisi Akhir 2022
I.	Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya				
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	64,3	66,11	68,19	70,53
2.	Angka Kriminalitas (%)	15,35	15,81	11,36	11,36
II.	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	CC	B	BB	A
III.	Misi 3 : Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis				
1.	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%)	31	39,58	67,65	67,65
2.	Persentase Elektrifikasi (%)	86	96,95	98	96
3.	Persentase Rumah Layak Huni (%)	88,33	93,32	97	97

No.	Indikator	Kondisi Awal 2017	Capaian 2020	Target 2022	Kondisi Akhir 2022
4.	Persentase Daerah Tertinggal (%)	80	53,91	30	30
IV.	Misi 4 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi				
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,39	-2,42	5,5-6,0	7,63
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,21	3,32	2,5-3,2	2,23
3.	Angka Kemiskinan (%)	11,18	11,5	10,25	9,06
4.	Indeks Gini Rasio (Poin)	0,339	0,356	0,338	0,338
5.	Peringkat Daya Saing Daerah (Ke-)	30	31	30	18
V.	Misi 5 : Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan				
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,25	74,91	75	75

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan akumulasi dari pencapaian indikator *outcome* dari program-program pembangunan daerah setiap tahunnya yang merupakan indikator sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 adalah sebagaimana Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
1	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Persen	80,00	-	-	-
2	Jumlah Siswa/Mahasiswa Menerima Bantuan Beasiswa	Orang	30,00	-	-	-
3	Persentase Penyaluran Dana BOS Tepat Waktu	Persen	100,00	-	-	-
4	Angka Partisipasi Sekolah (APK) pada Pendidikan PAUD/TK	Angka	35,66	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
5	Angka Partisipasi Sekolah (APK) pada Pendidikan SD	Angka	95,86	-	-	-
6	Angka Partisipasi Sekolah (APK) pada Pendidikan SMP	Angka	69,36	-	-	-
7	Persentase Guru yang Memenuhi Standar Kualifikasi S-1/D-IV	Persen	91,47	-	-	-
8	Persentase Guru yang Memenuhi Standar Kualifikasi Sertifikasi Guru/Kepala Sekolah	Persen	27,63	-	-	-
9	Persentase SMA/SMK/SMALB/MA yang Memanfaatkan dan Menerapkan TIK dalam Proses Pembelajaran	Persen	100,00	-	-	-
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan SMA/SMK/SMALB/MA /Paket C	Persen	84,10	-	-	-
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada Pendidikan SMA/SMK/SMALB /MA/Paket C	Persen	-	-	70,00	70,00
12	APK SMA/SMK/SMALB/MA/Paket C	Persen	-	-	-	-
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	-	-	57,90	58,00
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	-	-	70,00	70,60
15	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	Persen	-	-	100,00	100,00
16	Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	Persen	-	-	100,00	100,00
17	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen	-	-	50,00	60,00
18	Persentase Pendidik & Tenaga Kependidikan Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4	Persen	-	-	80,00	85,00
19	Persentase Pendidik Bersertifikat Profesi	Persen	-	-	38,00	40,00
20	Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	Persen	-	-	50,00	60,00
21	Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persen	-	-	50,00	60,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
Dinas Kesehatan						
22	Jumlah Rumah Sakit Keliling	Unit	-	-	-	-
23	Jumlah Rumah Sakit Ibu dan Anak	Unit	-	-	-	-
24	Regionalisasi Rujukan	Unit	-	2,00	-	-
25	Jumlah RSUD yang Terakreditasi	Unit	1,00	-	-	-
26	Jumlah Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Kecamatan	31,00	-	-	-
27	Jumlah Absolut Angka Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup	Orang	49	46	-	-
28	Jumlah Kematian Bayi per Kelahiran Hidup/Angka Kematian Bayi	Orang	323	303	-	-
29	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Bayi	987,40	988,2	-	-
30	Angka Kematian Balita	Orang	13,10	12,50	-	-
31	Angka Kematian Neonatal	Orang	10,21	10,80	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
32	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	77,50	66,90	-	-
33	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	78,00	76,80	-	-
34	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	81,20	96,50	-	-
35	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	71,00	70,00	-	-
36	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	82,62	77,30	-	-
37	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	40	46	-	-
38	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	72,00	60,70	-	-
39	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI	Persen	76,00	74,70	-	-
40	Persentase Anak Balita dengan Stunting	Persen	30,00	22,36	-	-
41	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100,00	100,00	-	-
42	Persentase Kabupaten dengan Keberhasilan Pengobatan TB > 80%	Persen	100,00	100,00	-	-
43	Prevalensi HIV	Persen	<1	<1	-	-
44	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Malaria	Kab/Kota	3,00	5,00	-	-
45	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	75,00	46,30	-	-
46	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	Persen	88,90	63,20	-	-
47	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	Persen	23,60	11,60	-	-
48	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100	100	-	-
49	Penderita Diare yang Ditangani	Persen	100	70,20	-	-
50	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Persen	100	100	-	-
51	Persentase Penggunaan Obat Rasional	Persen	90,0	75,0	-	-
52	Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana	N/A	N/A	-	-
53	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Orang	0,30	0,35	-	-
54	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Orang	0,30	0,35	-	-
55	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Unit	5	10	-	-
56	Jumlah Institusi yang Mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Unit	10	50	-	-
57	Jumlah Desa/Kelurahan yang Stop BABS	Desa	97	154,00	-	-
58	Jumlah Sarana Air Minum (SAM) yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Unit	8.000	3.523	-	-
59	Jumlah TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Unit	100,00	1.648	-	-
60	Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	83,64	82,83	-	-
61	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebijakan PHBS	Persen	100,00	100,00	-	-
62	Jumlah Dokumen Kebijakan Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas	Dokumen	1,00	1,00	-	-
63	Jumlah Desa yang Difasilitasi Gerakan Sulbar Marasa	Desa	6,00	6,00	-	-
64	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Menyusun Profil Kesehatan	Provinsi dan	7,00	7,00	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
		Kabupaten/Kota				
65	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas	Persen	100,00	100,00	-	-
66	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan di UPTD Balai Kesehatan	Orang	N/A	N/A	-	-
67	Jumlah Orang yang di Donor	Orang	N/A	N/A	-	-
68	Jumlah Pemeriksaan Sampel/Sediaan di Labkesda	Sampel	N/A	N/A	-	-
69	Cakupan Mutu Layanan Upaya Kesehatan Perorangan yang Sesuai Standar	Persen	-	-	80,00	80,00
70	Cakupan Mutu Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standar	Persen	-	-	70,00	75,00
71	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Persen	-	-	100,00	100,00
72	Cakupan Pencegahan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Persen	-	-	40,00	35,00
73	Persentase Penduduk yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan	Persen	-	-	90,00	97,00
74	Persentase Kab/Kota yang Melaporkan Data Kesehatan Prioritas Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Persen	-	-	90,00	95,00
75	Jumlah Absolut Angka Kematian Ibu	Kasus	-	-	32,00	30,00
76	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Balita	-	-	8,00	7,00
77	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	-	-	35,00	30,00
78	Persentase Peningkatan Jenis dan Pemerataan Tenaga Kesehatan	Persen	-	-	75,00	80,00
79	Persentase Peningkatan Mutu dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	-	-	70,00	75,00
80	Persentase Layanan Perizinan pada Cabang Pedagang Farmasi (PBF) dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang Sesuai Standar	Persen	-	-	100,00	100,00
81	Persentase Layanan Perizinan pada Usaha Kecil Obat Tradisional	Persen	-	-	100,00	100,00
82	Persentase Penggunaan Obat Rasional	Persen	-	-	80,00	95,00
83	Persentase Kabupaten yang Menetapkan Kebijakan Publik yang Berwawasan Kesehatan	Persen	-	-	100,00	100,00
84	Persentase Kabupaten/kota yang Melaksanakan Minimal 5 Tema Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	-	-	100,00	100,00
85	Persentase Desa yang Melaksanakan UKBM	Persen	-	-	75,00	80,00
86	Persentase Desa yang Melaksanakan UKBM	Persen	-	-	-	75,00
Rumah Sakit Umum Daerah						
87	Persentase Pemberian Informasi Melalui Media Promosi yang Dilaksanakan	Persen	100,00	-	90,00	100,00
88	Status Akreditasi yang Dicapai	Tingkat	Utama	Utama	Utama	Paripurna
89	Persentase Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar RS Tipe B	Persen	92,00	92,28	80,00	85,00
90	Prosentase Sarana dan Prasarana RS yang Terpelihara	Persen	93,00	46,00	80,00	80,00
91	Prosentase Dokter Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	Persen	95,00	90,00	90,00	100,00
92	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Dilaksanakan	Persen	85,00	90,91	90,00	90,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
93	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan yang Dilaksanakan	Persen	-	86,53	80,00	90,00
94	Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih	Persen	-	-	80,00	90,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
95	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Provinsi Baik dan Sedang	Persen	37,24	39,58	-	-
96	Persentase Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Kondisi Baik (19.114 Ha)	Persen	2,88	17,31	-	-
97	Terbangunnya Konstruksi Pengaman Pantai dan Sungai	Meter	300,00	-	-	-
98	Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang Dikembangkan	Persen	1,00	-	-	-
99	Persentase Terbangunnya Kawasan Perkantoran Pemprov. Sulbar	Persen	70,00	67,85	-	-
100	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Akses Air Bersih dan Akses Jaringan Air Limbah (Sharing APBN)	Persen	84,67	-	-	-
101	Persentase Aparatur dan Tenaga Ahli yang Diberi Pelatihan Jasa Konstruksi	Persen	20,00	30,00	-	-
102	Persentase Ketersediaan Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi	Persen	-	80,00	-	-
103	Program Pembinaan, Pengembangan, dan Kerjasama Pengawasan Uji Mutu dan Standarisasi Konstruksi Bangunan	Persen	50,00	60,00	-	-
104	Persentase Ketaatan terhadap RTRW Provinsi	Persen	10,00	20,00	-	-
105	Persentase Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi yang Berfungsi Dengan Baik	Persen	-	-	34,93	41,48
106	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah yang Diproduksi SPAM Regional	Persen	-	-	5,00	10,00
107	Persentase Tingkat Penurunan Luas Daerah Genangan Air di Kawasan Strategis Provinsi	Persen	-	-	1,75	3,87
108	Persentase Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang Termanfaatkan	Persen	-	-	70,56	72,41
109	Persentase Luas Wilayah di Kawasan Strategis Provinsi yang Telah Dikembangkan	Persen	-	-	0,10	0,20
110	Persentase Tingkat Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Persen	-	-	51,54	64,41
111	Persentase Keterpenuhi Tenaga Ahli Konstruksi yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat	Persen	-	-	40,00	60,00
112	Persentase Ketaatan terhadap RTRW Provinsi dari Sudut Pandang Struktur dan Pola Ruang Bidang Pekerjaan Umum	Persen	-	-	45,00	50,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
113	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0,21	0,213	-	-
114	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	Persen	21,20	0,30	-	-
115	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persen	-	363,41	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
116	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	-	94,90	-	-
117	Cakupan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persen	-	-	-	-
118	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Persen	-	-	-	-
119	Persentase Rumah yang Dilayani Bantuan PSU Kawasan Permukiman	Persen	-	-	-	-
120	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Persen	-	-	-	-
121	Persentase Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	-	-	-	-
122	Cakupan Kualitas Kapasitas SDM Aparatur	Persen	-	-	-	-
123	Persentase Warga Negara yang Terkena Bencana Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Persen	-	-	100,00	100,00
124	Persentase Kawasan Permukiman yang Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	-	-	44,81	100,00
125	Persentase Rumah Layak Huni Masyarakat Miskin (MARASA)	Persen	-	-	90,00	100,00
126	Persentase Pelayanan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Diberikan	Persen	-	-	50,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran						
127	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Persen	100,00	99,80	-	-
128	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100,00	-	-	-
129	Persentase Fasilitas Penanganan Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	-	-	100,00	100,00
130	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	-	-	100,00	100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
131	Persentase Pencapaian Pemberian Layanan Informasi Penanganan Bencana pada Masyarakat	Persen	37,50	55,86	-	-
132	Cakupan Sekolah/Madrasah Aman Bencana yang Dibentuk	Persen	40,00	-	-	-
133	Cakupan Desa Tangguh Bencana	Persen	-	-	-	-
134	Persentase Ketersediaan Dokumen Penunjang Kebencanaan Daerah	Persen	-	-	-	-
135	Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Saat Tanggap Darurat	Persen	36,38	56,90	-	-
136	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana yang Dipulihkan Kembali Pasca Bencana	Persen	26,66	50,22	-	-
137	Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Saat Tanggap Darurat	Persen	12,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
138	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi	Persen	-	-	80,00	100,00
Sosial						
Dinas Sosial						
139	Persentase Penanganan Keluarga Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persen	-	100,00	-	-
140	Persentase Keluarga Fakir Miskin dan yang Rentan Menerima Bantuan Stimulan UEP dan Bansos lainnya	Persen	49,14	109,25	-	-
141	Persentase Data Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Persen	-	-	-	-
142	Persentase Cakupan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar yang Ditangani	Persen	100,00	100,00	-	-
143	Persentase Cakupan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	-	-
144	Persentase Bencana Alam/Bencana Sosial yang Ditanggulangi	Persen	-	100,00	-	-
145	Persentase Pelayanan Kehidupan Beragama	Persen	-	-	-	-
146	persentase PMKS yang Telah Ditangani oleh PSKS	Persen	-	88,46	-	-
147	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB) dan Lembaga Sosial lainnya yang Diberdayakan	Persen	49,14	100,00	-	-
148	Persentase Dunia Usaha yang Peduli Sosial CSR	Persen	-	4,17	-	-
149	Persentase TKSK, PSM, TAGANA, PSKS lainnya yang Berpartisipasi Dalam Membangun Kesejahteraan Sosial	Persen	-	100,00	-	-
150	Jumlah Warakuri Perintis Kemerdekaan yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Warakuri	-	126,00	-	-
151	Persentase Penyelenggaraan Restorasi Sosial Penanaman dan Penghayatan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persen	150,00	100,00	-	-
152	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Orang	-	200,00	-	-
153	Persentase Korban Tindakan Kekerasan	Persen	20,00	-	-	-
154	Persentase Anak Terlantar, Jalanan dan Anak Berhadapan Hukum	Persen	-	-	-	-
155	Persentase Anak yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Persen	-	-	-	-
156	Persentase Penanganan Lanjut Usia	Persen	-	-	0,20	-
157	Persentase Penanganan Penyandang Disabilitas dan Eks. Masalah Kejiwaan	Persen	-	0,46	-	-
158	Persentase Penyandang Disabilitas dan Bermasalah Kejiwaan di Dalam Panti maupun Luar Panti yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Persen	20,00	-	-	-
159	Persentase Penanganan, Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	Persen	-	-	-	-
160	Persentase Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK,	Persen	20,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial					
161	Persentase Penanganan Wanita Tuna Susila dan Waria	Persen	-	-	-	-
162	Persentase Penanganan Korban Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan HIV/AIDS	Persen	-	-	-	-
161	Persentase Penanganan Bekas Warga Binaan Perumahan	Persen	-	-	-	-
162	Persentase Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Pelayanan Pemberdayaan Sosial	Persen	-	-	20,00	20,00
163	Persentase Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan	Persen	-	-	20,00	20,00
164	Persentase Berfungsinya Fungsi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	-	-	20,00	20,00
165	Persentase Jumlah Anak yang Terlindungi dan Mendapatkan Pengasuhan	Persen	-	-	40,00	60,00
166	Persentase Jumlah Korban Bencana yang Tertangani	Persen	-	100	20,00	20,00
167	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang di Kelola	Persen	-	100	20,00	20,00
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
Dinas Tenaga Kerja						
168	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	75,00	25,49	-	-
169	Besaran Tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	1.400,00	25	-	-
170	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih dan Memiliki Kompetensi	Persen	-	10,00	-	-
171	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	95,00	95,00	-	-
172	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Mampu Berwirausaha	Persen	-	20,00	-	-
173	Persentase Gedung Balai Latihan Kerja yang Terbangun	Persen	-	35,00	-	-
174	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Aktif	Orang	100,00	0	-	-
175	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Kasus	5,00	5,00	-	-
176	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	300,00	465,00	-	-
177	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Perusahaan	250,00	227,00	-	-
178	Keselamatan dan Perlindungan	Persen	100,00	100,00	-	-
179	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Melalui Lembaga Pemerintah dan Swasta yang Lulus Uji Kompetensi	Persen	-	76,19	75,00	80,00
180	Persentase Tenaga Kerja yang Difasilitasi Penempatannya	Persen	-	25,49	80,00	85,00
181	Persentase Pelayanan Hubungan Industrial	Persen	-	16,90	18,40	19,90
182	Persentase Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	Persen	-	11,40	8,96	11,94
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
183	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	16,67	-	-	-
184	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	-	100,00	-	-
185	Persentase Pendapatan Perempuan Dalam Pembangunan	Persen	0,36	36,57	-	-
186	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Persen	54,98	53,26	-	-
187	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen	Persen	6,67	6,67	-	-
188	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan	Persen	1,20	4,8	-	-
189	Harapan Lama Sekolah	Persen	-	12,73	-	-
		Persen	-	12,99	-	-
190	Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan	Angka	-	63,20	-	-
		Angka	-	67,02	-	-
191	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD	Persen	89,55	97,69	-	-
192	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP	Persen	75,30	80,12	-	-
193	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	Persen	60,80	61,25	-	-
194	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	-	-	92,50	92,00
195	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	-	-	71,50	72,00
196	Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan	Persen	-	-	0,53	0,45
197	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	-	-	42,57	43,25
198	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	Persen	-	-	36,29	30,00
199	Tingkat Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Persen	-	-	55,37	37,90
200	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	-	-	53,90	54,25
201	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan Sektor Non Pertanian	Persen	-	-	37,43	38,71
202	Cakupan Kab/Kota Layak Anak Level Pratama	Persen	-	-	100,00	100,00
203	Persentase Penurunan Kekerasan Terhadap Anak	Persen	-	-	0,16	0,10
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
	Dinas Ketahanan Pangan					
204	Skor PPH Ketersediaan	Kkal/Kap/ Tahun	82,40	90,00	-	-
205	Skor PPH Konsumsi	Kkal/Kap/ Tahun	78,80	78,00	-	-
206	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras terhadap Beras	Persen	14,380	13,530	-	-
207	Konsumsi Energi	Kkal/Kap/ Hari	2.125,00	2.074,90	-	-
208	Konsumsi Pangan Hewani	Kkal/Kap/ Hari	152,60	158,20	-	-
209	Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	Persen	13,00	8,33	-	-
210	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Diuji	Persen	95,00	97,10	-	-
211	Peningkatan Konsumsi	Persen	12,00	15,00	-	-
212	Peningkatan Pendapatan Keluarga	Persen	8,00	10,00	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
213	Informasi Harga dan Pasokan Pangan di 6 Kabupaten se-Prov. Sulbar dan Sistem Informasi Panel Harga Pangan	> HPP	10,00	-	-	-
214	Data/Informasi Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Provinsi, Cadangan Pangan Kabupaten dan Cadangan Pangan Desa	Kg/Kapit/ Tahun	6,00	-	-	-
215	Jumlah Kelompok Tani Berpartisipasi Aktif dan Mengembangkan Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan serta Menerapkan Teknologi Anjuran Pemerintah	Persen	-	-	-	-
216	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persen	-	-	100,00	100,00
217	Persentase Dukungan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Persen	-	-	100,00	100,00
218	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	Persen	-	-	100,00	100,00
219	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Didistribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	-	-	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah						
220	Luas Lahan Difasilitasi untuk Dibebaskan	Ha	0,83	-	-	-
221	Persentase Ketersediaan Aset Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen	83,25	9,38	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
Dinas Lingkungan Hidup						
222	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ha	5,50	-	-	-
223	Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah Diwilayah Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	-	-
224	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Pelatihan	2,00	2,00	-	-
225	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	1,00	-	-	-
226	Laporan Inventarisasi GRK	Laporan	1,00	1,00	-	-
227	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Laporan	1,00	1,00	-	-
228	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Sungai	53,20	53,00	-	-
229	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Kabupaten	90,00	89,72	-	-
233	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Penghargaan	2,00	-	-	-
234	Tersedianya Dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	-	-	-	-
235	Tersedianya Dokumen RPPLH Provinsi	Dokumen	1,00	2,00	-	-
236	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	-	-	100,00	100,00
237	Persentase Pij (Indeks Pencemar) yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	-	-	0,67	0,86
238	Persentase Kabupaten IKU Diatas Nilai 90	Persen	-	-	0,67	0,83
239	Cakupan Peningkatan Tutupan Lahan	Ha	-	-	6,30	15,00
240	Persentase Peningkatan Pengelolaan Potensi Keanekaragaman Hayati Sulawesi Barat	Persen	-	-	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
241	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	-		1,13	2,50
242	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persen	-		50,00	59,00
243	Persentase MHA yang Diakui	Persen	-		33,33	33,33
244	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Persen	-		100,00	100,00
245	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan	Persen	-		100,00	100,00
246	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan	Persen	-		100,00	100,00
247	Persentase Penanganan Sampah	Persen	-		55,50	59,00
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
248	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	78,00	89,00	-	-
249	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,21	0,28	-	-
250	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	Rasio	1,00	1,42	-	-
251	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0,63	0,68	-	-
252	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada/Tidak	Ada	Ada	-	-
253	Penerapan KTP Nasional yang Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	-	-
254	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	Persen	0,99	-	-	-
255	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	-	-	90,00	100,00
256	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	-	-	90,00	100,00
257	Persentase Data Kependudukan yang Tervalidasi	Persen	-	-	90,00	100,00
258	Persentase Tingkat Pemenuhan Profile Kependudukan	Persen	-	-	90,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
259	Persentase Posyandu Aktif	Persen	65,00	70,00	95,00	100,00
260	Persentase Desa yang Mengalami Perkembangan	Persen	27,65	29,39	31,13	33,04
261	Cakupan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	Kelompok	15,00	15,00	15,00	15,00
262	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa dalam Kawasan Perdesaan	Kawasan	4,00	4,00	14,00	15,00
263	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Desa	72,00	190,00	-	-
264	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Berprestasi	Persen	8,00	8,00	10,00	15,00
265	Persentase Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Desa Dalam Kawasan Perdesaan	Persen	-	-	80,00	100,00
266	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	-	-	80,00	100,00
267	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa	Persen	-	-	50,00	60,00
268	Persentase Desa yang Mengalami Perkembangan	Persen	27,65	29,39	31,13	33,04
269	Persentase Posyandu yang Aktif	Persen	65,00	70,00	95,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
270	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Berprestasi	Persen	8,00	8,00	10,00	15,00
271	Persentase Aparat Pemerintah Desa yang Memiliki Kompetensi	Persen	100	100	100,00	100,00
272	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	Persen	-	-	30,00	60,00
273	Persentase PKK Aktif	Persen	85	87	90,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
274	Angka Kelahiran Total atau TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	Persen	-	-	-	-
275	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	-	2,68	-	-
276	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	100,00	-	-	-
277	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100,00	-	-	-
278	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	Persen	100,00	-	-	-
279	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	Persen	100,00	49,00	-	-
280	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun)	Persen	100,00	51,7	-	-
281	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	Persen	100,00	-	-	-
282	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	100,00	10,10	-	-
283	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	100,00	-	-	-
284	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persen	100,00	-	-	-
285	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	100,00	78,34	-	-
286	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	100,00	80,59	-	-
287	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	100,00	83,52	-	-
288	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Persen	100,00	9,41	-	-
289	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persen	100,00	-	-	-
290	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Persen	150,00	-	-	-
291	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Persen	150,00	-	-	-
292	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Persen	-	-	-	-
293	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS di Setiap Kecamatan	Persen	15,00	-	-	-
294	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	25,00	80,63	-	-
295	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	Persen	25,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri					
296	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Rasio	2,40	1,85	-	-
297	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Kebijakan	-	-	-	-
298	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	Sektor	5,00	-	-	-
299	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Kerjasama	2,00	10,00	-	-
300	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio	-	-	185,00	180,00
301	Total Fertility Rate (TFR)	Rasio	-	-	2,65	2,50
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
Dinas Perhubungan						
302	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Dokumen	1,00	448.699	-	-
303	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan	Paket	1,00	-	-	-
304	Pemasangan Rambu-rambu/ Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Unit	-	-	-	-
305	Pemasangan Rambu-rambu/ Pemasangan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan	Unit	71,00	-	-	-
306	Jumlah Arus Penumpang	Orang	702.008,00	448,699	-	-
307	Jumlah Pengusaha yang Mengikuti Kompetensi Keselamatan Transportasi	Orang	42,00	-	-	-
308	Frekuensi Kegiatan Penertiban Pengendalian Lalu Lintas	Tertib/Tidak	Tertib	Tertib	-	-
309	Jumlah Kendaraan yang Diterbitkan	Unit	-	300,00	-	-
310	Persentase Peningkatan Arus Penumpang Angkutan Jalan	Persen	-	-	2,00	3,00
311	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	-	-	1,00	1,00
312	Persentase Kendaraan yang Menjadi Sampel Penertiban Terkait Penegakan Hukum Perizinan	Persen	-	-	10,00	15,00
313	Persentase Peningkatan Arus Penumpang Angkutan Pelayaran	Persen	-	-	1,00	2,00
314	Persentase Peningkatan Arus Penumpang Angkutan Udara	Persen	-	-	3,00	5,00
315	Persentase Penyelesaian Dokumen Data Dukung Pembangunan Perkeretaapian	Persen	-	-	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik						
316	Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik Non Elektronik	Media	30,00	30,00	-	-
317	Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Indeks	5,00	5,00	-	-
318	Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persen	-	30,00	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
319	Jumlah OPD Provinsi dan Kab/Kota yang Terkoneksi Jaringan Komunikasi dan Informatika	OPD	42,00	42,00	-	-
320	Presentase Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik	Persen	-	-	-	-
321	Jumlah Aplikasi Berbasis Web yang Dikembangkan	Aplikasi	35,00	35,00	-	-
322	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	60,00	-	-
323	Persentase Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	-	-	100,00	100,00
324	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persen	-	-	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM						
325	Persentase Koperasi Aktif	Persen	0,75	0,70	-	-
326	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	Persen	0,21		-	-
327	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	1,00		-	-
328	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	0,69	0,78	-	-
329	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	0,69	0,78	-	-
330	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	Persen	1,00		-	-
331	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	1,00		-	-
332	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	0,69	0,78	-	-
333	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	Persen	0,21		-	-
334	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	0,69	0,78	-	-
335	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	-	-	80,00	83,00
336	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	Persen	-	-	80,00	83,00
337	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persen	-	-	80,00	85,00
338	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	-	-	80,00	83,00
339	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	-	-	73,00	78,00
Penanaman Modal						
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
340	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	-	-	-	-
341	Rasio Kabupaten yang Difasilitasi Pengembangan Potensi Daerah	Kabupaten	2,00	-	-	-
342	Presentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	-	-	-	-
343	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Proyek	92,00	-	-	-
344	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rupiah	0,25	-	-	-
345	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Persen	44,00	-	-	-
346	Persentase Peningkatan Persetujuan Investasi Penanaman Modal	Persen	-	-	-	-
347	Peningkatan Nilai Realisasi PMDN	Persen	0,20	-	-	-
348	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persepsi	Baik	-	-	-
349	Cakupan Dukungan Manajemen dalam Pelaksanaan Tugas Teknis	Persen	-	-	-	-
350	Implemetasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik	Sistem	1,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
351	Cakupan Ketersediaan Regulasi Penanaman Modal	Persen	-	-	40,00	70,00
352	Cakupan Ketersediaan Data Potensi Penanaman Modal	Persen	-	-	80,00	85,00
353	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	-	-	80,00	80,00
354	Persentase Kenaikan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persen	-	-	20,00	40,00
355	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan PTSP	Poin	-	-	89,00	95,00
356	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal	Persen	-	-	20,00	30,00
357	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	-	-	50,00	50,00
358	Persentase Implementasi Pengelolaan Data dan Informasi yang Terintegrasi	Persen	-	-	40,00	75,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
Dinas Kepemudaan dan Olahraga						
359	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	53,13	33,02	-	-
360	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	48,19	27,76	-	-
361	Persentase Atlet Berprestasi	Persen	20,00	-	-	-
362	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	19,23	-	-	-
363	Persentase Wirausaha Muda	Persen	-	17,00	-	-
364	Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Angka	-	-	1,00	1,00
365	Tingkat Kemandirian Pemuda	Tingkat	-	-	2,00	2,00
366	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Kepemudaan	Persen	-	-	10,00	12,00
367	Tingkat Raihan Medali	Tingkat	-	-	1,00	1,00
368	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	-	-	10,00	12,00
369	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Tingkat	-	-	1,00	1,00
370	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persen	-	-	10,00	12,00
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik						
371	Persentase Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Persen	50,00	55,00	-	-
372	Persentase Cakupan Penyelenggaraan dan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Persen	-	-	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik						
373	Jumlah Jenis Informasi yang Wajib Diamankan Melalui Penyelenggaraan Persandian	Konten	-	-	-	-
374	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	-	-	80,00	90,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
375	Jumlah Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasi	Dokumen	33,00	-	-	-
376	Jumlah Taman Budaya dan Museum yang Dikembangkan	Unit	1,00	-	-	-
377	Jumlah Situs dan Cagar Budaya serta Kepurbakalaan yang Dilestarikan	Situs/Cagar	65,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
378	Jumlah Bangunan Rumah Adat, Taman Budaya dan Museum yang Dibangun dan Direhabilitasi	Unit	6,00	-	-	-
379	Persentase Objek Kebudayaan yang Direvitalisasi dan Dilestarikan	Persen	-	-	70,00	80,00
380	Persentase Pelaku Kesenian Tradisional yang Dibina dan Berkarya	Persen	-	-	60,00	70,00
381	Persentase Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal yang Diberdayakan	Persen	-	-	50,00	60,00
382	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	-	-	70,00	80,00
383	Persentase Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi dan Dikembangkan	Persen	-	-	50,00	70,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
384	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Kunjungan	2.500,00	2.600,00	-	-
385	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Persen	1,84	1,85	-	-
386	Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan	Persen	21,60	22,20	-	-
387	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	-	-	1,861	1,875
388	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno	Persen	-	-	0,50	1,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
389	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola	Boks	25,00	25,00	-	-
390	Persentase Arsip Daerah yang Terpelihara	Persen	-	-	-	-
391	Jumlah Arsip Statis yang Diakses, Digunakan dan Dimanfaatkan oleh Masyarakat	Reel/Roll /Kaset/M ember	-	-	-	-
392	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	2,40	2,40	-	-
393	Jumlah Kebijakan Dibidang Kearsipan yang Ditetapkan	Pergub	-	4,00	-	-
394	Persentase Pengelolaan Arsip Statis OPD, Perusahaan, Ormas, Orpol, dan Perorangan yang Dikelola	Persen	-	-	50,00	75,00
Urusan Pemerintahan Pilihan						
Kelautan dan Perikanan						
Dinas Kelautan dan Perikanan						
395	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Barat	Persen	1,00	-	-	-
396	Persentase Perkembangan Perikanan Budidaya dalam Menunjang Peningkatan Produksi, Kesejahteraan Pembudidaya dan Terwujudnya Industri Aquaculture yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Persen	0,06	-	-	-
397	Persentase Pengelolaan Balai Budidaya Ikan/ Udang Pantai yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Guna Memenuhi Kebutuhan Perikanan Budidaya Dapat Terpenuhi Setiap Tahun	Persen	0,75	-	-	-
398	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Persen	1,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulbar					
399	Meningkatnya Produk Kelautan dan Perikanan yang Semakin Berkualitas, Memenuhi Standar Produk dan Memiliki Daya Saing serta Terserap Pangsa Pasar Nasional dan Internasional	Ton	193,00	-	-	-
400	Persentase Perkembangan Perikanan Tangkap dalam Menunjang Peningkatan Produksi, Kesejahteraan Nelayan dan Terwujudnya Industri Perikanan Tangkap yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Persen	0,08	-	-	-
401	Jumlah Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dapat Terealisasi	Unit	5,00	-	-	-
402	Cakupan Kawasan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	Kawasan	-	-	3,00	3,00
403	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Sulawesi Barat	Persen	-	-	2,00	2,00
404	Persentase Peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Tahun di Sulawesi Barat	Persen	-	-	1,20	1,20
405	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Sulawesi Barat	Persen	-	-	1,00	2,00
406	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fishing, Destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	Persen	-	-	100,00	100,00
407	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Sulawesi Barat	Persen	-	-	2,00	2,00
408	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan di Sulawesi Barat	Persen	-	-	0,50	1,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
Dinas Pariwisata						
409	Kunjungan Wisata	Persen	1.434,00	48,33 %	-	-
410	PAD Sektor Pariwisata	Persen	6,75	6,10	-	-
411	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	Persen	150,00	433,33	-	-
412	Persentase Mitra Pariwisata yang Terbina dan Tersertifikasi	Persen	-	-	-	-
413	Persentase Lembaga dan Mitra Pariwisata yang Terbentuk, Terbina dan Tersertifikasi	Persen	100,00	75,00	-	-
414	Persentase Industri Pariwisata yang Terbina dan Tersertifikasi	Persen	155,00	40,00	-	-
415	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terbina dan Tersertifikasi	Persen	-	100,00	-	-
416	Persentase Mitra Pariwisata yang Terbentuk, Terbina dan Tersertifikasi	Persen	-	-	-	-
417	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Persen	-	-	0,27	0,29
418	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	Persen	-	-	70,00	100,00
419	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Persen	-	-	0,27	0,29
420	Persentase PDRB Sektor Pariwisata	Persen	-	-	0,27	0,29
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
Dinas Pertanian						
421	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai)	Ton	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
422	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang Merah, Jeruk, Pisang, Nanas, Durian, Rambutan)	Ton	-	-	-	-
423	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian lainnya	Persen	-	-	-	-
424	Persentase Kenaikan Produktifitas Komoditas Unggulan Nasional dan Daerah	Persen	-	-	-	-
425	Persentase Kecukupan Hand Tractor terhadap Lahan Sawah	Persen	-	-	-	-
426	Jumlah Populasi Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Ekor	-	-	-	-
427	Jumlah Populasi Ternak Kecil (Kambing, Babi)	Ekor	-	-	-	-
428	Jumlah Populasi Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Itik Manila)	Ekor	-	-	-	-
429	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menuilar Strategis (PHMS)	Kasus	-	-	-	-
430	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Berperan Aktif Menerapkan Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada Wilayah Kerjanya	Orang	-	-	-	-
431	Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Standar Mutu Hasil Produksi Pertanian	Kelompok	-	-	-	-
432	Jumlah Kemitraan Pemasaran Hasil Pertanian	Kemitraan	-	-	-	-
433	Jumlah Kelompok Tani Berpartisipasi Aktif dan Mengembangkan Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan serta Menerapkan Teknologi Anjuran Pemerintah	Kelompok	-	-	-	-
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan						
434	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai)	Ton	985.728,00	-	-	-
435	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang Merah, Jeruk, Pisang, Nanas, Durian, Rambutan)	Ton	125.681,00	-	-	-
436	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian lainnya	Persen	0,25	-	-	-
437	Persentase Kenaikan Produktifitas Komoditas Unggulan Nasional dan Daerah	Persen	4,80	-	-	-
438	Persentase Handtractor terhadap Areal Persawahan	Persen	3,24	-	-	-
439	Jumlah Populasi Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Ekor	108.587,00	-	-	-
440	Jumlah Populasi Ternak Kecil (Kambing, Babi)	Ekor	331.878,00	-	-	-
441	Jumlah Populasi Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik, Itik Manila)	Ekor	8.094.159,00	-	-	-
442	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menuilar Strategis (PHMS)	Kasus	42,00	-	-	-
443	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Berperan Aktif Menerapkan Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada Wilayah Kerjanya	Orang	440,00	-	-	-
444	Jumlah Kelompok Tani Berpartisipasi Aktif dan Mengembangkan Komoditas	Kelompok	254,00	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Unggulan Berbasis Kawasan serta Menerapkan Teknologi Anjuran Pemerintah					
445	Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Standar Mutu Hasil Produksi Pertanian	Kelompok	17,00	-	-	-
446	Jumlah Kemitraan Pemasaran Hasil Pertanian	Kemitraan	11,00	-	-	-
447	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian Terhadap Lahan Pertanian	Persen	-	-	70,00	80,00
448	Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang memiliki Legalitas	Persen	-	-	80,00	100,00
449	Persentase Lahan Pertanian yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas	Persen	-	-	80,00	100,00
450	Persentase Kesesuaian Pengembangan Lahan Pertanian dengan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Komoditas	Persen	-	-	80,00	100,00
451	Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah	Persen	-	-	80,00	100,00
452	Persentase Wilayah/Zona Bebas Penyakit Hewan Ternak	Persen	-	-	80,00	100,00
453	Persentase Unit Usaha Produk Hewan Yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan	Persen	-	-	80,00	100,00
454	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	-	-	80,00	100,00
455	Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian Pada Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi dan Kawasan Pertanian Strategis Kewenangan Provinsi	Persen	-	-	80,00	100,00
456	Persentase Lembaga Ekonomi Petani pada Kawasan Pertanian Yang Menerapkan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	Persen	-	-	80,00	100,00
457	Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP	Persen	-	-	35,00	40,00
Dinas Perkebunan						
458	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Perkebunan (Kakao, Kelapa Sawit, Kelapa Dalam, Lada dan Cengkeh)	Ton	484.872,00	-	-	-
459	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Berperan Aktif Menerapkan Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada Wilayah Kerjanya	Orang	102,00	-	-	-
460	Jumlah Kelompok Tani yang Berpartisipasi Aktif dan Mengembangkan Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan serta Menerapkan Teknologi Anjuran Pemerintah	Kelompok	-	-	35,00	-
461	Persentase Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Perkebunan	Ton/Ha	8,40	-	10,00	-
462	Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Standar Mutu Hasil Produksi Pertanian	Kelompok	7,00	-	10,00	-
463	Jumlah Kemitraan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelompok	10,00	-	15,00	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
464	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Produksi Dalam Pengembangan Kawasan Perkebunan	Persen	-	-	600,00	700,00
465	Persentase Penurunan Peredaran Sarana Produksi Perkebunan	Persen	-	-	10,00	10,00
466	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Perkebunan Unggulan	Persen	-	-	15,00	18,00
467	Persentase Produksi Perkebunan yang Memenuhi SNI dan Standar Pasar Global	Persen	-	-	15,00	20,00
468	Tingkat Pengendalian Bencana Tanaman Perkebunan	Nilai	-	-	1.200,00	1.500,00
469	Tingkat Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan	Nilai	-	-	1.200,00	1.500,00
470	Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan	Persen	-	-	50,00	55,00
471	Persentase Penerapan GAP dan GHP pada Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan	Persen	-	-	35,00	40,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan						
Dinas Kehutanan						
472	Luas Kawasan Hutan yang Menjadi Milik Masyarakat melalui Fasilitasi TORA	Ha	15.268,00	15.268,00	-	-
473	Jumlah Pengelolaan Wisata Alam dan Jasa Lingkungan	Unit	1,00	1,00	-	-
474	Jumlah Titik Api Kebakaran Hutan dan Lahan yang Dikendalikan	Titik Panas	35,00	34,00	-	-
475	Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	Kasus	14,00	15,00	-	-
476	Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Rasio	42,62	42,62	-	-
477	Luas Hutan yang Dikelola Masyarakat dalam Bentuk HKm, HD, HR, HTR, HA dan Kemitraan	Ha	31.072,00	42.402,00	-	-
478	Jumlah Luasan Hutan dan Lahan yang Direhabilitasi	Ha	3.766,00	150,00	-	-
479	Jumlah KPH yang Beroperasional	Unit	11,00	12,00	-	-
480	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	69,00	70,00	-	-
481	Persentase Capaian Sasaran Strategis Perencanaan Pembangunan Kehutanan	Persen	85,00	83,30	-	-
482	Persentase Capaian Sasaran Perencanaan Pengembangan Kehutanan	Persen	-	-	-	-
483	Luas Kawasan Hutan yang Difasilitasi Melalui Planologi dan Tata Lingkungan	Persen	-	-	-	-
484	Luas Lahan Kritis pada Luar dan Dalam Kawasan Hutan dan Terwujudnya Pelaksanaan RHL	Hektar	-	-	-	-
485	KPH yang Beroperasional	Unit	-	-	-	-
486	Persentase KPH yang Memiliki Unit Usaha	Persen	-	-	75,00	90,00
487	Persentase Daerah Penyangga Kawasan Konservasi yang Terkelola	Persen	-	-	40,00	50,00
488	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Non Aparatur Bidang Kehutanan	Persen	-	-	55,00	65,00
489	Persentase DAS Dengan Fungsi dan Daya Dukung Optimal	Persen	-	-	45,00	60,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					
490	Persentase Regulasi, Rekomendasi Pengelolaan SDM, Data dan Informasi Potensi ESDM Dapat di Akses Melalui Media Online	Persen	5,00	-	-	-
491	Rasio Desa yang Terlayani Listrik	Persen	94,46	90,00	93,00	95,00
492	Jumlah Rumah Tangga Pemakai Listrik PLTMH, PLTS, PLTB (KK)	Rumah Tangga	-	-	-	-
493	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Dokumen	4,00	1,00	-	-
494	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (Masyarakat Tidak Mampu) yang Mendapatkan Bantuan Listrik Perdesaan	Rumah Tangga Sasaran	320,00	300,00	-	-
495	Dokumen Pemetaan (Desa Belum Berlistrik) dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Dokumen	4,00	3,00	-	-
496	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dari Air Tanah (Sumur Bor)	Rumah Tangga	180,00	60,00	-	-
497	Dokumen Hasil Evaluasi Pemanfaatan Air Tanah dan Data Informasi Potensi Sumber Daya Geologi	Dokumen	1,00	1,00	-	-
498	Jumlah Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan (Clear and Clean)	IUP	20,00	25,00	-	-
499	Persentase Pertambangan Tanpa Izin	Persen	19,48	11,36	-	-
500	Luas Penambangan Liar yang Diterbitkan	Ha	17,14	10,00	-	-
501	Luas Area Penambangan yang Liar	Ha	88,00	88,00	-	-
502	Jumlah Pendapatan dari Sektor Jasa Laboratorium dan Pembuatan Peta dan SIG	Rupiah	-	-	-	-
503	Persentase Pengembangan Air Tanah yang Berbasis Konservasi	Persen	-	-	10,00	20,00
504	Persentase Pengusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan	Persen	-	-	25,00	25,00
505	Persentase Peningkatan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	Persen	-	-	1,35	1,40
506	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang Teraliri Listrik	Persen	-	-	20,00	50,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM					
507	Ekspor Bersih Perdagangan	Ekspor	-	-	458,00	-
508	Jumlah Dokumen Database yang Disusun	Kegiatan	1,00	-	-	-
509	Jumlah Pelaku UKM yang Telah Dilatih	Kegiatan	35,00	-	-	-
510	Jumlah Dokumen Feasibility Study	Dokumen	-	-	-	-
511	Jumlah Kawasan Pergudangan yang Dibangun	Kawasan	1,00	-	-	-
512	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informasi	Persen	0,05	-	-	-
513	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	1,00	-	-	-
514	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	-	-	80,00	85,00
515	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	-	-	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
516	Persentase Cakupan Pembinaan Kelompok Terkait Standarisasi Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	-	-	100,00	100,00
517	Nilai Dukungan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	USD	-	-	435,00	440,00
518	Persentase Cakupan Kelompok yang Dibina Terkait Standarisasi Perlindungan Konsumen	Persen	-	-	15,00	17,00
519	Persentase Peningkatan Produk Unggulan Daerah yang Dipromosikan	Persen	-	-	5.000,00	5.500,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM						
520	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0,70	-	-	-
521	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0,48	-	-	-
522	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0,37	-	-	-
523	Persentase Cakupan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	-	-	90,00	100,00
524	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persen	-	-	90,00	100,00
525	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	-	-	90,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi						
Dinas Transmigrasi						
526	Terfasilitasinya Penyediaan dan Pelayanan Pertanahan serta Peningkatan Kapasitas SDM Transmigrasi	Lokasi KK	1 65	0 60	-	-
527	Terealisasinya Perencanaan Transmigrasi Menjadi Kegiatan Teknis di Lokasi Transmigrasi	Dokumen	5,00	3,00	-	-
528	Terbangunya Permukiman Transmigrasi Baru dan Jumlah KK Penempatan Transmigrasi	Unit KK	1 115	0 0	-	-
529	Terbentuknya Unit Pemukiman Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi Menjadi Desa Mandiri dalam Kawasan Transmigrasi	Unit/Kawasan	1,00	-	-	-
530	Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi menjadi Kegiatan Teknis	Persen	-	-	85,00	90,00
531	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya	Persen	-	-	95,00	100,00
532	Persentase Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Dasar dan Penunjang Usaha	Persen	-	-	65,00	70,00
533	Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri	Persen	-	-	42,85	42,85
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
Sekretariat Daerah						
Sekretariat Daerah						
534	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Tata Pemerintahan	Persen	-	-	100,00	100,00
535	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	-	-	100,00	100,00
536	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persen	-	-	100,00	100,00
537	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persen	-	-	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
538	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	-	-	100,00	100,00
539	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Umum, Perlengkapan dan Protokol	Persen	-	-	100,00	100,00
540	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Organisasi dan Tata Laksana	Persen	-	-	100,00	100,00
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah						
541	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Penyerapan Anggaran dan Analisis Sarana dan Prasarana Pembangunan	Persen	90,00	-	-	-
542	Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah	Persen	90,00	-	-	-
543	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Prosedur	Persen	90,00	-	-	-
Biro Hukum Sekretariat Daerah						
544	Penanganan Perkara	Kasus	-	4,00	-	-
545	Pelayanan dan Informasi terhadap Permasalahan HAM	Dokumen	-	4,00	-	-
546	Tindak Lanjut Hasil Audit	LHP APIP	-	-	-	-
547	Penanganan Perkara	Perkara	-	-	-	-
548	Pelayanan dan Informasi terhadap Permasalahan HAM	Persen	3,00	-	-	-
549	Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	Persen	90,00	138,13	-	-
550	Jumlah Jejaring Pemberi Layanan dan Akses terhadap Produk Hukum Daerah	Persen	29,00	106,47	-	-
551	Jumlah Jejaring Pemberi Layanan dan Akses terhadap Produk Hukum Daerah	Jaringan Data dan Informasi Hukum	-	-	-	-
552	Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Penatausahaan yang Dihasilkan	Persen	100,00	100,00	-	-
Biro Umum, Perlengkapan, dan Protokol Sekretariat Daerah						
553	Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100,00	100,00	-	-
554	Tingkat Percepatan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu/Tidak	-	-	-	-
555	Persentase Tingkat Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Tepat Waktu/Tidak	-	-	-	-
556	Persentase Peningkatan Layanan Penyediaan Informasi	Persen	-	-	-	-
557	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi	Kegiatan	100,00	-	-	-
Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah						
558	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	Persen	-	100,00	-	-
559	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	-	-
560	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Penataan dan Pengembangan	Persen	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Daerah Otonom dan Daerah Otonom Baru					
561	Jumlah Kabupaten yang Dibina dalam Peningkatan Kualitas DOB	Kabupaten	1,00	-	-	-
562	Cakupan Data Pembinaan Wilayah Prov. Sulbar	Persen	-	-	-	-
563	Cakupan Fasilitas Pengelolaan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persen	-	-	-	-
564	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama yang Dilaksanakan	Dokumen	1,00	1,00	-	-
565	Jumlah Penanganan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah yang Ditangani	Segmen	-	-	-	-
567	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	-	-	-	-
568	Jumlah Pemantuan Pemilihan Kada/Leg/Pres	Kegiatan	2,00	-	-	-
569	Cakupan Fasilitas Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	Persen	-	-	-	-
570	Jumlah SK yang Difasilitasi pada Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	Produk Hukum	1,00	-	-	-
571	Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Penataan Administrasi, Batas Daerah dan Toponimi Dalam Wilayah Prov. Sulbar	Persen	-	-	-	-
572	Jumlah Batas Daerah antara Kabupaten se-Sulbar dan antar Provinsi	Segmen	6,00	-	-	-
Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah						
573	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	Persen	70,00	80,00	-	-
574	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	25,00	30,00	-	-
575	Nilai Predikat SAKIP	Nilai	60,61	63,14	-	-
576	Persentase OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persen	55,00	65,00	-	-
577	Cakupan OPD yang Telah Menyusun SOP Sesuai Tupoksi	Persen	43,90	58,54	-	-
578	Indeks RB	Predikat	B	B	-	-
579	Persentase Aparatur yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensinya	Persen	60,00	65,00	-	-
580	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persen	-	-	-	-
581	Persentase Pembinaan Dalam Pengembangan ASN	Persen	-	-	-	-
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah						
582	Persentase Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama	Persen	86,85	0,00	-	-
583	Persentase Kualitas Kehidupan Beragama	Persen	99,50	75,90	-	-
584	Persentase Kualitas Hidup dan Kesejahteraan	Persen	79,16	88,61	-	-
Sekretariat DPRD						
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
585	Persentase Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Terlaksana	Persen	-	-	-	-
586	Jumlah Ranperda APBD	Kegiatan	2,00	-	-	-
587	Jumlah Hearing	Kegiatan	2,00	-	-	-
588	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Rapat	102,00	-	-	-
589	Jumlah Rapat Rapat Paripurna	Rapat	42,00	-	-	-
590	Jumlah Kegiatan Reses	Reses	3,00	-	-	-
591	Jumlah Kunjungan Kerja dan Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Kegiatan	80,00	-	-	-
592	Jumlah Perda dan Regulasi Lainnya yang Tersosialisasikan	Perda	8,00	-	-	-
593	Jumlah Media Publikasi Kegiatan DPRD	Media	50,00	-	-	-
594	Jumlah Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	Kegiatan	90,00	-	-	-
595	Jumlah Anggota DPRD dan Sekretariat yang Menghadiri Forum Komunikasi	Orang	26,00	-	-	-
596	Jumlah Ranperda Non APBD	Perda	10,00	-	-	-
597	Jumlah Aduan Masyarakat yang Tertangani	Laporan	-	-	-	-
598	Jumlah Penerbitan Informasi Melalui Buletin	Buletin	48,00	-	-	-
599	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi DPRD dan Layanan Keuangan serta Kesejahteraan DPRD	Persen	-	-	80,00	100,00
600	Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	-	-	80,00	100,00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
Perencanaan						
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
601	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1,00	2,00	-	-
602	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	-	100	-	-
603	Fasilitasi Kerjasama Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2,00	-	-	-
604	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Lembaga Pembangunan Daerah	Dokumen	-	1,00	-	-
605	Cakupan Aparatur Perencana Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Dibimbing dan Dilatih	Orang	100,00	-	-	-
606	Jumlah ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Bidang Perencanaan	Orang	-	110,00	-	-
607	Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	33,00	24,00	-	-
608	Persentase Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	-	100,00	-	-
609	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Dengan SKPD Lingkup Ekonomi dan Kabupaten, Koordinasi Pembangunan Ekonomi di 6 Kabupaten dan 9 Kementerian/Lembaga	Dokumen	2,00	1,00	-	-
610	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan	Persen	-	100,00	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Ekonomi					
611	Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dengan SKPD Lingkungan Sosial Budaya dan Kabupaten	Dokumen	2,00	2,00	-	-
612	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Sosial Budaya	Persen	-	100,00	-	-
613	Jumlah Data dan Informasi serta Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Alam	Dokumen	2,00	1,00	-	-
614	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Kewilayahan dan Sumber Daya Alam	Persen	-	100,00	-	-
615	Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Dokumen	2,00	2,00	-	-
616	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RENSTRA OPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Bidang Tata Ruang	Persen	-	100,00	-	-
617	Dokumen Evaluasi, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Laporan	-	30,00	-	-
618	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah dan Pelaporan	Dokumen	13,00	13,00	-	-
619	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	-	100,00	-	-
620	Persentase Perangkat Daerah dengan Bobot Renstra >6%	Persen	-		100,00	100,00
621	Persentase Perangkat Daerah dengan Bobot Perencanaan Kinerja Tahunan >11%	Persen	-		100,00	100,00
622	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	-		100,00	100,00
623	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	-		100,00	100,00
624	Persentase Kesesuaian Program RKPD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	-		100,00	100,00
Keuangan						
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah						
625	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Persen	90,00	101,00	-	-
626	Terwujudnya Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persen	90,00	100% WTP	-	-
627	Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian KDH	Persen	90,00	-	-	-
628	Persentase Laporan dan Sistem Informasi Keuangan yang Dikelola	Persen	-		-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
629	Persentase Dokumen Regulasi yang Berkaitan Dengan Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah	Persen	-		-	-
630	Persentase Barang Milik Daerah yang Dikelola oleh Provinsi	Persen	-		-	-
631	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melaksanakan Asistensi terhadap APBD	Persen	-		-	-
632	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	-		-	-
633	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	-		95,00	100,00
634	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah BMD	Persen	-		95,00	100,00
635	Persentase Pertumbuhan PAD	Persen	-		95,00	100,00
Kepegawaian						
Badan Kepegawaian Daerah						
636	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kemampuan serta Pengetahuan Dalam Upaya Peningkatan Karier Aparat	Persen	100,00	100,00	-	-
637	Persentase OPD yang Menerapkan Sistem Pelayanan Kepegawaian Berbasis IT	Persen	100,00	100,00	-	-
638	Jumlah Jabatan yang Dilelang	Jabatan	10,00	8,00	-	-
639	Jumlah ASN yang Memiliki Kompetensi Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal	ASN	136,00	54,00	-	-
640	Rasio Jumlah Pegawai yang Diberikan Sanksi Dengan Jumlah Pegawai yang Melakukan Pelanggaran	Persen	100,00	100,00	-	-
641	Persentase Database Kepegawaian yang Tertata	Persen	-	-	100,00	100,00
642	Rasio PNS terhadap Penduduk	Rasio	-	-	0,35	0,36
643	Persentase Formasi Jabatan Struktural yang Terisi	Persen	-	-	90,00	95,00
644	Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	Persen	-	-	100,00	100,00
Pendidikan dan Pelatihan						
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
645	Proporsi ASN yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas	Persen	100,00		-	-
646	Proporsi ASN yang Memperoleh Pembinaan dan Pengembangan	Persen	100,00	100,00	-	-
647	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	Persen	-		12,00	13,00
Penelitian dan Pengembangan						
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah						
648	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sosial Budaya yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan	Persen	50,00	75,00	80,00	90,00
649	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Tata Kelola Pemerintahan yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan	Persen	50,00	-	80,00	90,00
650	Persentase Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan	Persen	50,00	50,00	80,00	90,00

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
651	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan	Persen	-	-	80,00	90,00
652	Persentase Hasil Kelitbangan IPTEK yang Diusulkan Menjadi Bahan Kebijakan	Persen	50,00	75,00	80,00	90,00
653	Persentase Hasil Kelitbangan Bidang Pengembangan Inovasi dan Penerapan IPTEK yang Diusulkan untuk Dijadikan Bahan Kebijakan	Persen	25,00	75,00	80,00	90,00
654	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan sebagai Bahan Kebijakan	Persen	-	-	80,00	90,00
Penghubung						
Badan Penghubung Provinsi						
655	Jumlah Pelayanan Kehumasan dalam Penyebarluasan Informasi	Layanan	-	-	-	-
656	Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Luar dan Dalam Daerah	Persen	100,00	100,00	-	-
657	Jumlah Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Layanan	-	-	-	-
658	Persentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persen	-	-	-	-
659	Jumlah Data dan Informasi Provinsi Sulawesi Barat	Data Potensi dan Informasi	-	-	-	-
660	Persentase Kunjungan Pimpinan yang Difasilitasi	Persen	-	-	100,00	100,00
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
Inspektorat Daerah						
Inspektorat Daerah						
661	Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100%	100%	-	-
662	Tingkat Maturitas SPIP OPD	Level	3	3	-	-
663	Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	Persen	100%	100%	-	-
664	Tingkat Maturitas SPIP OPD	Level	3	3	-	-
665	Cakupan Obyek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Saber PUNGLI)	Persen	100%	100%	-	-
666	Opini BPK atas Penyajian Laporan Keuangan Pemda	Opini	-	-	WTP	WTP
667	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	Persen	-	-	100,00	100,00
Unsur Pemerintahan Umum						
Kesatuan Bangsa dan Politik						
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
668	Tingkat Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) melalui Beberapa Kegiatan-kegiatan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Orang Kabupate n	40,60	40,60	-	-
669	Tingkat Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) melalui Beberapa Kegiatan-kegiatan	Persen	40,00	40,00	-	-

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2019	Capaian Target 2020	Target	
					Tahun 2021	Tahun 2022
	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban					
670	Cakupan Persentase Peserta yang Mengikuti Seluruh Kegiatan Pengembangan Etika Politik dalam Segala Aspek Kehidupan Berdemokrasi	Orang	400,00	40,00	-	
671	Cakupan Persentase Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol, IDI dan Database Parpol serta yang ASN yang Mengikuti Perkembangan Evaluasi Politik di Daerah	Orang Indikator Parpol	40 42 16	40 42 10	-	
672	Cakupan Persentase Peserta yang Berpartisipasi pada Kegiatan Ormas, dan Beberapa Sosialisasi, Desiminasi Peraturan Pemerintah dan Permendagri tentang Ormas	Ormas	10,00	-	-	
673	Persentase Penegakan Perda melalui Perda tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba dan Cakupan Persentase Peserta yang Ikut Berpartisipasi dalam Seluruh Kegiatan Ormas	Orang	40,00	40,00	-	
674	Cakupan Persentase Peserta yang Ikut Berpartisipasi dalam Seluruh Rangkaian Kegiatan pada Pembinaan Karakter Bangsa	Orang	40,00	40,00	-	
675	Cakupan Persentase Peserta yang Berpartisipasi dalam Segala Kegiatan PPWK dan Forum FPK	Persen	40,00	40,00	-	
676	Cakupan Persentase Peserta yang Mengikuti Seluruh Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kegiatan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persen	-	-	-	
677	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	-	-	100,00	100,00
678	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen	-		100,00	100,00
679	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	-		100,00	100,00
680	Persentase Pemenuhan Dokumen Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	-		100,00	100,00
681	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kondisi Waspada Nasional, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	-		100,00	100,00



BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022. RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 ini disusun berdasarkan kebijakan nasional dengan konsep *Money Follow Program Priority*, sehingga program prioritas yang akan dilaksanakan dapat mendukung akselerasi pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMD. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja serta pendanaannya. Rencana program dan kegiatan serta pendanaannya dalam RKPD ini akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2022.

RKPD ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022, sehingga kedudukan RKPD ini menjadi penting dalam penyusunan rencana pembangunan Tahun 2022.

Demikian RKPD ini dibuat untuk dipedomani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mamuju, 30 Juni 2021


GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**